

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI BALI
TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020

GUBERNUR BALI

KATA PENGANTAR



Dengan menghaturkan *puja pangastuti angayubagia* kehadapan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 pada dasarnya dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70 menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 selanjutnya digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas, paradigma penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami pergeseran dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik walaupun masih dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sebagai akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Bali, yaitu : "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru** untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Terimakasih.

Bali, 18 Maret 2020

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI BALI 1

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 3

C. KONDISI GEOGRAFIS 3

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 4

E. KONDISI EKONOMI 8

a. Potensi Unggulan Daerah 8

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB 14

F. INDIKATOR KINERJA MAKRO 16

a. Indeks Pembangunan Manusia 16

b. Angka Kemiskinan 17

c. Angka Pengangguran 18

d. Pertumbuhan Ekonomi 19

e. Pendapatan Per Kapita 20

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) 21

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 22

A. Visi dan Misi 22

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 27

C. Prioritas Daerah 39

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42

A. Urusan Konkuren 42

a. Ringkasan Urusan Wajib 42

1. Pendidikan 42
2. Kesehatan 67
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 89
5. Sosial 99
6. Tenaga Kerja 106
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 111
8. Ketahanan Pangan 115
9. Pertanahan 120
10. Lingkungan Hidup 124
11. Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 138
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 145
13. Perhubungan 157
14. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 166
15. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 174
16. Penanaman Modal 182
17. Kepemudaan dan Olah Raga 187
18. Kebudayaan 191
19. Perpustakaan dan Kearsipan 210

b. Ringkasan Urusan Pilihan 217

1. Kelautan dan Perikanan 217
2. Pariwisata 236
3. Pertanian dan Perkebunan 243
   3.1. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 243
   3.2. Peternakan 254
4. Kehutanan 266

5. Energi dan Sumber Daya Mineral 275
6. Industri dan Perdagangan 279
6.1. Perindustrian 279
6.2. Perdagangan 284
7. Transmigrasi 292

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294

1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 294
2. Otonomi Daerah 302
3. Kepegawaian 306
4. Pengadaan Barang dan Jasa 318
5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 321
6. Pendidikan dan Pelatihan 331
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 338
8. Pengawasan 344
9. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 353
10. Penyelenggaraan Hukum 358
11. Kehumasan 362
12. Umum 367
13. Perekonomian Pembangunan 371
14. Administrasi Pembangunan 374
15. Pendapatan Daerah 380

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) 393

D. Indikator kinerja kunci 397

1. Tataran Pengambil Kebijakan 397
2. Tataran Pelaksana Kebijakan 397
3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan 397

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019 399

BAB V TUGAS PEMBANTUAN 410

A. Tugas Pembantuan yang Diterima 410

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan 417

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 418

A. Kerjasama Antar Daerah 418

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 423

C. Koordinasi Dengan Instasi Vertikal di Daerah 427

D. Pembinaan Batas Wilayah 430

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 434

F. Pengelolaan Kawasan Khusus 447

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 448

BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 462

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 489

BAB IX PENUTUP 513

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 69 menyebutkan bahwa Kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah pusat berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, dan pada Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

LPPD ini tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif dan disinsentif, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; serta pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam konteks otonomi daerah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui regulasi mengenai otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran yang merupakan pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan Misi ke 22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

A. Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Bali

Provinsi Bali lahir setelah terjadi penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bali dikukuhkan dengan

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Era baru masyarakat Bali diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara Daerah Bali, lembaga Legislasi ini dilantik pada 25 September 1950 di Bali Hotel Denpasar. Sebelum itu, Pemerintahan Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksana Pemerintahan (BPP) di Bali, dengan Katua BPP adalah AA. Gede Oka (Ketua Dewan Raja Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Dangin (urusan ekonomi), dan I Wayan Badra (urusan umum). Baru beberapa hari BPP menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang itu, dibentuklah Panitia Penyelenggaraab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Panitia ini yang membentuk DPR sementara Daerah Bali. Jumlah Anggota DPRD Bali saat itu berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakli dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani, dan orang-orang yang terikat oleh Partai/Organisasi. I Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Ida Bagus Oka, dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri.

Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. AA. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, diadakan pula pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, yaitu I Gusti Made Mudra (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Dangin (urusan ekonomi), dan I Gusti Bagus Sugriwa (urusan umum). Bersamaan dengan itu, diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali. Pada Bulan Mei 1951, semua daerah di Bali telah terbentuk DPRD Daerah Bagian (swapraja) serta dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah.

Pasca Pemilu Tahun 1951, munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemberlakuan Undang-Undang ini diikuti dengan pembentukan Provinsi Bali pada 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali dibentuk, pelaksanaan Pemerintahan di Bali mengalami perubahan, Pemerintah Pusat menunjuk/mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Bagus Oka ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca dibentuknya Provinsi Bali, dan dilantik pada 1 Desember 1958. Setelah diangkatnya pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, terbentuklah DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru terbentuk dan memlih calon Kepala Daerah yang baru. Presiden Soekarno menetapkan AA. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959, jadi AA. Bagus Sutedja merupakan Kepala Daerah definitif pertama Provinsi Bali setelah dibentuk Tahun 1958.

Semula Ibukota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil, tapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-B6 tanggal 23 Juni 1960,

Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar, pemidahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali, dan Denpasar menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini.

B. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan Pulau-pulau kecil dengan luas wilayah 563.286 Ha atau 0,29 dari luas kepulauan Indonesia. Adapun pulau-pulau kecil tersebut adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dibelahan selatan menghadap samudra Hindia dan Pulau Menjangan di belahan utara Pulau Bali menghadap ke Laut Jawa. Provinsi Bali sebagai daerah pusat wisata Indonesia bagian tengah, dan tujuan wisata dunia memeiliki potensi yang menunjang pertumbuhan kepariwisataan. Potensi tersebut antara lain mencakup potensi manusia dan kebudayaannya. Panorama alam yang indah dan ideal, hutan yang hijau, gunung, danau, sungai serta sawah yang membentang dengan teras-teras serta pantai yang indah dengan beragam pasir hitam dan putih. Perpaduan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang unik yang berlandaskan kepada konsepsi keserasian mewujudkan satu kondisi estetika yang ideal dan bermutu tinggi.

C. Kondisi Geografis

Luas wilayah Provinsi Bali 5.636,66 km2 atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia terdiri dari beberapa pulau yaitu : Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan; terletak pada posisi antara 8003'40"-8050'48" lintang selatan dan 114025'53"-115042'40" bujur timur. Secara administrasi Daerah Provinsi Bali, terbagi menjadi 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.488 Desa Pakraman dan 4.361 Banjar Adat.

Berdasarkan relief dan topografinya, di bagian-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur. Diantara bentangan pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yaitu Gunung Agung (3.142 m) dan Gunung Batur (1.717 m). Selain itu, terdapat gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 m), Gunung Patas (1.414 m), dan Gunung Seraya (1.058 m), dan lain sebagainya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Provinsi Bali terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama. Bali Utara yang memiliki dataran rendah yang sempit dan kurang landau, sedangkan Bali Selatan memiliki dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan yang ada di Provinsi Bali, yaitu lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Di daerah pegunungan tersebut terdapat 4 (empat) buah Danau yaitu : Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur, yang menjadi bagian penting dalam sistem hidrologis daerah Bali.

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latasol. Hanya sebagian kecil terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah

Latosol secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas daratan Provinsi Bali. Jenis tanah Regosol meliputi sekitar 39,93% dari luas Provinsi Bali. Jenis tanah Andasol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari luas Provinsi Bali.

D. Gambaran Umum Demografis

Sebagaimana diketahui, penduduk merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan di suatu daerah. Namun demikian, penduduk seringkali juga menjadi masalah krusial bagi jalannya roda pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali menimbulkan berbagai persoalan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pengangguran, angka kriminalitas dan lain sebagainya.

Hasil proyeksi jumlah penduduk menunjukan bahwa tahun 2019 penduduk Bali akan mencapai 4,34 juta jiwa, terdiri dari 2.184,1 ribu jiwa (50,36%) penduduk laki-laki dan 2.152,8 ribu jiwa (49,64%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2019 ini naik 1,04 % dari sebelumnya 4.292,2 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 5.780,06 km2 maka kepadatan penduduk di Bali telah mencapai 750 jiwa/km^2. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan diwilayah tersebut. Aspek kependudukan meliputi jumlah, komposisi dan distribusi serta laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak saja hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Peningkatan angka kelahiran berdampak pada masih tingginya komposisi penduduk usia anak (0-14 tahun), yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Komposisi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Anak (0 – 14)	514,9	490,5	1.005,4
Produktif (15 – 64)	1.524,5	1.491,8	3.016,3
Lansia (65+)	144,7	170,5	315,2
JUMLAH	**2.184,1**	**2.152,8**	**4.336,9**

Komposisi kelompok usia anak (0–14 tahun) dan kelompok usia produktif (15–64 tahun) merupakan mayoritas jumlah penduduk. Perhatian khusus dalam penerapan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang menyangkut penyediaan berbagai sarana dan prasarana seperti perumahan, pendidikan kesehatan, transportasi dan tentunya akan mendapat perhatian khusus berupa penyediaan lapangan kerja.

Semakin meningkatnya proporsi usia anak-anak dalam komposisi penduduk Provinsi Bali secara keseluruhan, maka upaya meningkatkan kualitas anak membutuhkan perhatian yang lebih besar, dengan menyadari bahwa kehidupan seorang anak merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya meningkatkan status gizi anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dasar, menurunkan tingkat kenakalan anak dan pemuda, menghindarkan mereka dari penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, dan narkoba serta meningkatkan kesadaran dan peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak, serta peningkatan wawasan IPTEK bagi anak menjadi kebijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi Bali.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan pada tahun 2017-2019 dapat dilihat sebagaimana Tabel di bawah ini.

Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Provinsi Bali Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2018 – 2019

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2018	Agustus 2019
Pekerja Formal		
Buruh/karyawan/pegawai	1.144.726	1.128.042
Berusaha dibantu buruh tetap	109.851	91.255
Total Pekerjaan Formal	1.254.577	1.219.297
Pekerja Informal		
Berusaha Sendiri	349.431	402.677
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	406.506	366.243
Pekerja bebas	186.976	170.428
Pekerja tak dibayar	293.380	270.034
Total Pekerjaan Informal	1.236.293	1.209.382
Jumlah	**2.490.870**	**2.428.679**

Sumber : BPS Provinsi Bali

Sesuai dengan karakteristik wilayah, komposisi penduduk yang bekerja di dominasi pada lapangan usaha pertanian, namun setiap tahun persentasenya terus menurun. Lapangan usaha yang mulai menarik perhatian adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta Jasa-jasa.

Penduduk 15 Tahun Ke Atas Provinsi Bali Yang Bekerja Menurut Lapangan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018 - 2019

No	Lapangan Usaha	Agustus 2018	Agustus 2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	501.235	458.430
2	Pertambangan dan Penggalian	6.073	9.627
3	Industri Pengolahan	364.685	364.397
4	Pengadaan Listik dan Gas	5.989	5.586
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.754	11.759
6	Kontruksi	158.190	161.512
7	Pengadaan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	502.064	471.799
8	Transportasi dan Pergudangan	72.194	75.851
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	318.574	318.711
10	Informasi dan Komunikasi	7.566	12.252
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	60.987	69.653
12	Real Estate	3.193	4.133
13	Jasa Perusahaan	57.901	56.951
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	137.796	123.762
15	Jasa Pendidikan	116.739	98.327
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.097	53.552
17	Jasa Lainnya	121.833	132.377
JUMLAH		2.490.870	2.428.679

Sumber : BPS Provinsi Bali

Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kesejahteraan keluarga. Untuk mengetahui kondisi penduduk antara lain dapat dilihat dari Angka Partisipasi penduduk dalam kegiatan sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan tampaknya sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ini terlihat dari angka partisipasi sekolah menurut kelompok usia sekolah. pada penduduk usia SD sederajat (7-12 tahun) tercatat mencapai 99,71%. Sementara angka partisipasi sekolah pada usia di atasnya mencapai 97,72%. Sedangkan APS untuk usia SMA sederajat (16-18 tahun) angka partisipasi sekolah menduduki peringkat yang paling rendah yaitu 82,60%.

Meningkatnya pendidikan masyarakat Provinsi Bali juga dapat tercermin dalam indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pada Tahun 2018 mencapai 8,65 tahun, meningkat dari tahun 2017 sebesar 0,10 tahun.

Indikator Pendidikan Provinsi Bali

No	Indikator	Sat	Tahun Pelajaran					
			2012/2013	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	Angka Partisipasi Sekolah							
	SD Sederajat	%	99,27	99,41	99,35	99,44	99,55	99,71

No	Indikator	Sat	Tahun Pelajaran					
			2012/2013	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	SMP Sederajat		95,83	97,41	97,55	97,72	97,92	97,72
	SMA/SMK Sederajat		73,95	81,69	81,98	82,16	82.35	82,60
2	Angka Partisipasi Kasar							
	SD Sederajat	%	105,84	105,00	104,87	107,99	105,90	109,38
	SMP Sederajat		93,87	96,82	96,19	113,37	106,95	106,88
	SMA/SMK Sederajat		80,08	86,61	86,41	104,42	100,40	98,00
3	Angka Partisipasi Murni							
	SD ederajat	%	94,28	95,64	95,75	95,70	96,06	99,63
	SMP Sederajat		80,78	84,78	84,99	84,36	84,54	88,72
	SMA/SMK Sederajat		67,10	71,53	71,71	72,61	73,15	73,21
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	Rata-rata Lama Sekolah	TH	8,11	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84
5	Harapan Lama Sekolah	TH	12,64	12,97	13,04	13,21	13,23	13,27

Sumber : BPS dan Disdikpora Provinsi Bali

Kualitas SDM di Provinsi Bali terkait erat dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk. Seperti yang terlihat pada tabel 1.9, untuk tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan SD ke bawah: 816.134 orang (33,60%); SLTP: 332.986 orang (13,71%); SMU: 544.163 orang (22,41%); SMK: 317.437 orang (13,07%); Diploma: 116.444 orang (4,79%); dan Universitas: 301.515 orang (12,41%). Jadi, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan tertinggi ternyata didominasi tamatan SMU dan SMK dengan total 861.600 orang (35,48%).

Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2019

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Orang)			%
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
1	SD / Lebih Rendah	380.006	436.128	816.134	33,60
2	SLTP	191.083	141.903	332.986	13,71
No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Orang)			%
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
3	SMU	341.438	202.725	544.163	22,41
4	SMK	196.005	121.432	317.437	13,07
5	Diploma I/II/III/Akademi	66.111	50.333	116.444	4,79
6	Universitas	169.159	132.356	301.515	12,41

Jumlah	1.344.337	1.084.877	2.428.679	100,00

Sumber : BPS Provinsi Bali

Disamping hal di atas, fasilitas pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penunjang pendidikan. Jumlah sarana sekolah, guru dan siswa Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenjang di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2018/2019

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1.	PAUD	2.529	5.868	87.314
2.	SLB	14	388	1.201
3.	SD/MI	2.525	27.941	417.602
4.	SMP/MTs	456	12.971	199.711
5.	SMA /MA/SMK	363	4.095	190.642

Sumber : BPS Provinsi Bali

Perkembangan jumlah sekolah, guru, dan murid di tahun 2018/2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Artinya, pertumbuhan akan berkisar pada rentangan angka satu-satuan dan tidak sampai pada lonjakan yang sangat tajam.

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang diberikan begitu banyak anugerah oleh Sang Pencipta. Meski tidak dipenuhi oleh kekayaan alam seperti bahan tambang dan sejenisnya, namun Bali memiliki segudang potensi unggulan yang hingga kini telah menjadi daya tarik sebagian besar penduduk dunia. Keunikan budaya, keindahan panorama, serta sejumlah seniman yang menghasilkan seni berkelas dunia adalah kekayaan yang dimiliki oleh Provinsi yang memiliki julukan Pulau Dewata ini.

Provinsi Bali tidak dipenuhi oleh kekayaan alam seperti bahan tambang, hutan dan sejenisnya, namun Bali memiliki segudang potensi unggulan yang hingga kini telah menjadi daya tarik sebagian besar penduduk dunia. Keunikan budaya, keindahan panorama, serta sejumlah seniman yang menghasilkan seni berkelas dunia adalah kekayaan yang dimiliki oleh Provinsi yang memiliki julukan Pulau Dewata ini. Sampai saat ini pembangunan Bali masih memegang teguh prinsip-prinsip dasar pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru.

Adapun pencapaian program prioritas yang menjadi unggulan daerah yang fokus kepada penataan alam Bali, Manusia dan Budaya Bali sebagai berikut :

1. **Bidang Pangan, Sandang, dan Papan**
   a) Telah meningkat pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal oleh hotel, restoran, dan pasar swalayan. Namun peningkatan belum sesuai harapan, karena Pergub Nomor 99 Tahun 2018 belum berjalan optimal. Pemasaran manggis (ke Tiongkok) dan kakao (ke Eropa) melalui ekspor tahun 2019 telah meningkat tajam.
   b) Mulai menggeliat industri rumahan Arak Bali terutama di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan.
   c) Telah berhasil diperjuangkan melalui Kementerian Perindustrian, agar minuman tradisional khas Bali seperti arak dan jenis minuman lainnya dapat diproduksi dan diperdagangkan secara legal, namun kapasitas produksinya masih rendah.
   d) Untuk memperkuat kebijakan tersebut, sedang disiapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali.
   e) Telah diajukan ke Dirjen Industri Agro untuk penambahan kapasitas produksi minuman arak dari 1,1 juta liter per tahun menjadi 6,0 juta liter per tahun, pada 4 (empat) perusahaan lokal Bali (sedang diaudit berkenaan dengan kapasitas produksi dan potensi pasar).
2. **Bidang Kesehatan**
   a) Penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang sudah berjalan dengan baik dan mencapai di atas 95% *Universal Health Coverage* (UHC).
   b) Telah selesai dibangun gedung Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan perlengkapannya sebanyak 3 unit di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Tabanan. Fasilitas ini akan menjadi pusat pengembangan produk obat tradisional Bali (herbal/*Usadha* Bali).
   c) Telah selesai dibangun gedung unit Layanan Kanker Terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara.
   d) Sedang dibangun gedung unit rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bangli, selesai tahun 2020.
3. **Bidang Pendidikan**
   a) Telah selesai dibangun Sekolah Baru SMKN 2 Kubu di Kabupaten Karangasem.
   b) Telah selesai dibangun Ruang Kelas Baru di SMAN 1 Denpasar, SMKN 1 Susut-Bangli, SMKN 2 Kintamani-Bangli, SMKN 1 Kuta Selatan-Badung, SMKN 1 Kubu-Karangasem, dan SMKN 1 Bebandem-Karangasem.
   c) Telah direalisasikan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK swasta pada APBD Perubahan Tahun 2019.

4. Bidang Adat

Telah dilaksanakan kebijakan strategis untuk memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan Desa Adat.

a) Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2019
b) Menetapkan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, yang mengatur pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
c) Telah dibentuk Dinas baru yaitu: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang secara khusus mengurus Desa Adat. Ini baru pertama dibentuk selama Pemerintahan di Bali.
d) Telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 300 juta untuk masing-masing Desa Adat dalam APBD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020.
e) Dari anggaran tersebut, dialokasikan untuk Anggaran Rutin maksimal sebesar Rp. 80 juta per tahun, termasuk pemberian insentif Bandesa Adat sebesar Rp. 1,5 juta per bulan dan Prajuru yang besarnya ditentukan melalui musyawarah.
f) Mulai Tahun 2020, Anggaran Desa Adat dari Pemerintah Provinsi ditransfer secara langsung ke rekening Desa Adat, tidak lagi melalui Bantuan Keuangan Khusus di Desa (Dinas).
g) Telah disiapkan perencanaan pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 9,5 Milyar melalui dana CSR BUMN. Dan rencana pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota Se-Bali mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 melalui bantuan anggaran CSR BUMN/BUMD atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Bidang Agama

Sudah disiapkan program Pelindungan Kawasan Suci Besakih, yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tahun 2019 ini sudah dimulai dengan; penyelesaian Desain, RAB, serta proses pembebasan lahan. Pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2020 sampai 2022 Anggaran yang diperlukan sekitar Rp. 1,8 Trilyun, sedang dievaluasi oleh Kementerian PUPR.Sumber pendanaan dari APBN di Kementerian PUPR dan APBD Provinsi Bali.

6. Bidang Tradisi, Seni dan Budaya

a) Telah dilaksanakan kebijakan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Busana Adat Bali.
b) Telah diselenggarakan program Bulan Bahasa Bali pada bulan Pebruari di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
c) Telah dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali.

d) Telah diselenggarakan Festival Seni Bali Jani yang pertama, mulai tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 8 November 2019. Festival Seni modern ini telah mendapat respon positif dari generasi milenial.

e) Telah diselenggarakan pementasan seni budaya dalam rangka pelaksanaan Bulan Bung Karno pada bulan Juni di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.

f) Telah diatur pementasan tari-tarian sakral, untuk mengembalikan pada pakem dan tempat yang dibolehkan.

g) Telah disiapkan perencanaan program pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung. Tahun 2019 ini dimulai dengan penyusunan Desain, RAB, dan proses pembebasan lahan. Sedangkan pembangunan dimulai tahun 2020 sampai 2023. Pembangunan dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

7. Bidang Pariwisata

Memantapkan arah kebijakan pembangunan pariwisata berbasis budaya dan berkualitas.

a) Telah dilaksanakan penertiban tata niaga pariwisata seperti menertibkan wisatawan yang melanggar aturan, antara lain: praktek jual beli kepala, bisnis wisata ilegal, bisnis wisata murahan yang dapat merusak citra dan pasar pariwisata Bali.

b) Telah dilaksanakan kegiatan “Balingkang Kintamani Festival” di Kabupaten Bangli, pada tanggal 6 Pebruari 2019.

c) Telah dilaksanakan Lomba Makepung “Gubernur Cup” di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 14 Juli 2019.

d) Telah memberikan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Festival Seni Tradisional Jegog di Kabupaten Jembrana, yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2019.

8. Bidang Pendukung yaitu Infrastruktur

a) Telah diselesaikan pembangunan *shortcut* ruas jalan Mengwitani-Singaraja titik 3-4 dan titik 5-6, dan telah diresmikan penggunaannya.

b) Telah direncanakan lanjutan pembangunan pada titik 7, 8, 9, dan 10 yang akan selesai pada tahun 2020.

Anggaran bersumber dari APBN Kementerian PUPR dan APBD Provinsi Bali.

c) Telah direncanakan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo untuk Kapal *Cruise*, dengan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dan pihak ketiga, yang akan selesai tahun 2020.

d) Telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pengelolaan Pelabuhan *Cruise* di Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem.
e) Telah disiapkan perencanaan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Denpasar ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung.
f) Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 453 Milyar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan; untuk Pelabuhan Sanur sebesar Rp. 238 Milyar; Pelabuhan Nusa Penida sebesar Rp. 98 Miyar; dan Pelabuhan Nusa Lembongan sebesar Rp. 117 Milyar.
g) Pembangunan Pelabuhan di Nusa Penida dan di Nusa Lembongan dilaksanakan dan selesai pada tahun 2020.
h) Pembangunan Pelabuhan di Sanur Denpasar mulai tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 100 Milyar dan selesai tahun 2021 dengan anggaran Rp. 138 Milyar.
i) Telah diaksanakan pengembangan Terminal dan Parkir Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dengan anggaran dari BUMN, selesai tahun 2022.
j) Telah direalisasikan layanan *Wifi* gratis untuk semua Desa Adat, Puskesmas, Obyek Wisata, dan SMA/SMK/SLB se-Bali guna mendukung aktivitas muda milenial Bali.

9. Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Limbah Regional

a) Telah dimulai pembangunan Bendungan Sidan di wilayah perbatasan Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli untuk memenuhi penyediaan air minum dan mendukung irigasi pertanian di wilayah Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli, Tabanan, dan Denpasar. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2021. Pendanaan bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
b) Telah dimulai tahapan pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng untuk memenuhi penyediaan air minum dan mendukung irigasi pertanian di wilayah Kabupaten Buleleng di bagian Timur. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2021. Pendanaan bersumber dari APBN Kementerian PUPR.

10. Penyediaan Energi Listrik

Kebijakan penyediaan energi listrik agar Bali mandiri di bidang Energi dengan Energi Bersih. Saat ini Bali memiliki ketersediaan energi sebesar 1.250 MW, yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik di Bali sebesar 850 MW dan dari luar Bali (Paiton) lewat kabel laut sebesar 400 MW. Tingkat pertumbuhan penggunaan listrik rata-rata mencapai 6,5% per tahun. Agar Bali bisa mencapai mandiri energi dengan energi bersih, maka telah dilaksanakan upaya:

a) Telah dilakukan persiapan penggantian semua pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar batu bara dan minyak yang ada saat ini dengan bahan bakar gas.

b) Telah disiapkan program pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis gas di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, dengan kapasitas 700 MW mulai tahun 2020.
c) Telah diimplementasikan Nota kesepahaman / Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan PT. Indonesia Power, dengan PT. Pertamina (Persero), dan dengan PT. PLN (Persero).
d) Telah disiapkan implementasi kebijakan Bali Energi Bersih dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
e) Telah disiapkan rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Politeknik Energi Baru Terbarukan di Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, mulai tahun 2020.

11. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dari korupsi, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan:

a) Telah dilaksanakan sistem Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan sistem ini maka proses kenaikan jabatan fungsional dan golongan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepat serta tanpa biaya.
b) Telah dilaksanakan pengisian jabatan struktural pada Perangkat Daerah secara transparan berbasis kompetensi, daftar urut kepangkatan, dan golongan serta integritas moral.
c) Telah dilakukan perampingan birokrasi dari 49 menjadi 41 Perangkat Daerah, termasuk membentuk 2 Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
d) Secara konsisten telah melaksanakan program Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Se-Bali atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
e) Telah menerapkan sistem Laporan Pengaduan Masyarakat *online* yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), yang disebut SP4N LAPOR.
f) Telah disiapkan Sistem Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan seluruh layanan administrasi birokrasi melalui sebuah sistem.
g) Telah menyiapkan program *Bali Smart Island* yang mengelola sistem dan data secara terintegrasi yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sistem informasi kesehatan, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan pemerintah daerah.

h) Telah dilaksanakan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah secara akuntabel, sehingga memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

12. Program Bali Resik Sampah Plastik

Dalam rangka mewujudkan alam Bali yang bersih, sesuai dengan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, telah dilaksanakan program Bali Resik Sampah Plastik yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sehari setelah hari Purnama. Kegiatan ini dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota se-Bali bahkan sampai ke Desa dengan melibatkan semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, pelajar/mahasiswa, lembaga adat, dan organisasi masyarakat.

13. Pengelolaan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Dalam rangka melindungi hasil karya inovatif berbasis budaya masyarakat Bali, Pemerintah Provinsi Bali sudah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a) Membentuk unit organisasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang secara khusus menangani kekayaan intelektual.
b) Melakukan inventarisasi dan verifikasi hasil karya (produk budaya), selanjutnya difasilitasi untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.
c) Pada tahun 2019 ini, telah diusulkan sebanyak 261 produk untuk mendapat hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan memperoleh hak atas kekayaan intelektual maka hasil karya / produk budaya masyarakat Bali akan terlindungi dari praktek pembajakan dan memiliki daya saing secara ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan kue ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Namun demikian pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjadi acuan keberhasilan pembangunan karena kesejahteraan akan terjadi jika kue ekonomi yang tercipta mampu dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat tanpa ada ketimpangan.

Ekonomi Bali triwulan III-2019 tercatat tumbuh 5,34% atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,15%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 9,99%. Sementara itu bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 yakni Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) yang tercatat tumbuh sebesar 7,94%. Secara *(q-to-q)* atau jika dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya, ekonomi Bali triwulan III-2019 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,12%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) sebesar 9,85%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Konsumsi Pengeluaran Impor (Luar Negeri/LN dan Antar Daerah) dengan pertumbuhan sebesar 9,11%.

Dari sisi lapangan usaha, di triwulan III-2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi tercatat sebesar 23,59%. Sementara kontribusi terbesar pada triwulan III-2019 dari sisi komponen pengeluaran tercatat pada Komponen Ekspor (55,21%) diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (47,57%). Sedangkan, kontribusi dari Komponen Impor sebagai komponen pengurang tercatat sebesar 43,78%.

Dari sisi Pengeluaran, ekonomi Bali hingga triwulan III-2019 tercatat sebesar 64,86 triliun rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan sebesar 41,56 triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Jika kumulatif selama tahun 2019 dibandingkan dengan kumulatif tahun sebelumnya (*c-to-c*), ekonomi Bali tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67%. Hampir seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, hanya komponen ekspor (LN dan Antar Daerah) dan Perubahan Inventori yang tumbuh negatif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 13,81%; diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,24%; dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,91%. Pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan III-2019 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat mengalami perlambatan. Pada triwulan III-2018 pertumbuhan ekonomi Bali (*c-to-c*) tercatat sebesar 5,93% atau lebih besar 0,26 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode ini.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*Source of Growth*) Bali secara *c-to-c*, komponen PK-RT memberikan andil terbesar terhadap tumbuhnya ekonomi Bali sampai dengan triwulan III-2019, tercatat menyumbang sebesar 3,04%. Sumbangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya, ketika itu tercatat sebesar 2,30%. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga memberikan andil cukup besar yakni sebesar 1,93%, tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang telah mencapai 2,56%. Selanjutnya komponen lainnya yang meliputi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), perubahan inventori, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT), ekspor dan impor (sebagai komponen pengurang) memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan sebesar 0,7%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor-sektor ekonomi) dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Karena itu, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah sama

dengan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan/tidak dipengaruhi perubahan harga) di wilayah tersebut. Apabila diibaratkan “kue”, PDRB adalah besarnya “kue” tersebut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan membesarnya “kue” yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB harga konstan pada tahun tertentu terhadap PDRB harga konstan tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi Bali sendiri menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan meningkatnya total PDRB. Total nilai tambah yang tercipta (PDRB nominal/atas dasar harga berlaku) di Bali sampai dengan selama tahun 2018 telah mencapai Rp 234,43 trilyun. Sedangkan total nilai tambah ekonomi Bali Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2019 nilainya mencapai Rp 154,15 trilyun. (BPS 2019)

F. Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara konseptual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan digambarkan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dan dimensi standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, namun IPM tergolong indikator yang cukup lengkap untuk melihat dimensi pembangunan karena bisa menggambarkan kondisi sosial maupun ekonomi. IPM dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat tercapainya tujuan pembangunan dan meningkatkan kapabilitas serta kualitas manusia.

IPM Bali pada tahun 2019 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IPM Bali pada tahun 2019 mencapai 75,38 meningkat 0,61 poin jika dibandingkan IPM Bali pada tahun 2018 yang mencapai 74,77. Angka ini merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir, dari 72,48 pada tahun 2014 kemudian meningkat menjadi 73,27 di tahun 2015; 73,65 di tahun 2016 kemudian meningkat di tahun 2017 dan 2018 menjadi 74,30 dan 74,77, kemudian menjadi 75,38 di tahun 2019. Pencapaian ini menandakan bahwa pembangunan manusia Bali berangsur membaik selama 5 tahun terakhir. Dilihat dari komponennya, capaian IPM pada tahun 2019 didukung oleh umur harapan hidup mencapai 71,99 tahun, kemudian angka harapan lama sekolah mencapai 13,27 tahun, lalu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 8,84 tahun (hampir tamat SMP) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 14,146 juta rupiah per tahun.

Jika dilihat ranking per Kabupaten/Kota di Bali, Kota Denpasar merupakan daerah dengan IPM Tertinggi se-Bali. Hal ini sejalan dengan Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan yang juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Bali. Nilai IPM Kota Denpasar di tahun 2019 tercatat sebesar 83,68. Angka ini melampaui pencapaian IPM

Provinsi Bali sendiri yang hanya mencapai 75,38. Selain Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan merupakan Kabupaten yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dibandingkan nilai IPM Bali. IPM Kabupaten Badung tercatat sebesar 81,59, IPM Kabupaten Gianyar sebesar 77,14 dan IPM Tabanan sebesar 76,16.

Sedangkan Kabupaten yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karangasem. Kabupaten ini tercatat sebagai Kabupaten dengan IPM terendah di tahun 2019 yakni sebesar 67,34. Kabupaten Bangli pun perlu mendapat perhatian yang sama seperti halnya Karangasem, hal ini mengingat Kabupaten Bangli menempati peringkat kedua terendah setelah Karangasem dengan nilai IPM di tahun 2019 sebesar 69,35.

b. Angka Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Bali. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2019 tercatat sekitar 156,91 ribu orang. Jumlah ini mengindikasikan penurunan sekitar 6,9 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 yang tercatat sekitar 163,85 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 3,61 persen. Nilai ini mengindikasikan penurunan sedalam -0,18 poin persen jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang tercatat sebesar 3,79 persen. Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret - September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan bersamaan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sekitar 91,12 ribu orang. Jumlah ini berkurang sekitar 6,9 ribu orang dibandingkan dengan bulan Maret 2019 yang berada pada kisaran 97,98 ribu orang. Demikian juga jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 65,87 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 65,79 ribu orang pada September 2019, atau tercatat berkurang sekitar 0,1 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan keduanya juga tercatat mengalami penurunan. Di daerah perkotaan yang pada Maret 2019 tercatat sebesar 3,29 persen, turun menjadi 3,04 persen pada September 2019. Demikian juga persentase penduduk miskin di daerah perdesaan tercatat turun dari 4,88 persen pada Maret 2019 menjadi 4,86 persen pada September 2019 (data BPS).

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Bali, Maret – September 2019

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan		
Maret 2019	97,98	3,29
September 2019	91,12	3,04
Perdesaan		
Maret 2019	65,87	4,88
September 2019	65,79	4,86
Kota + Desa		
Maret 2019	163,85	3,79
September 2019	156,91	3,61

Sumber data : BPS

c. Angka Pengangguran

Data dari BPS Provinsi Bali, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah Angkatan Kerja bila dibandingkan dengan Agustus 2018. Pada Agustus 2019, sebanyak 3.338.767 orang tercatat sebagai penduduk usia kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.466.230 orang tercatat sebagai Angkatan Kerja (penduduk usia kerja yang siap bekerja atau membuka usaha) dan sebanyak 872.537 orang tercatat sebagai Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya). Dari total Angkatan Kerja, sebanyak 2.428.679 orang (98,48%) tercatat sebagai penduduk bekerja sedangkan sebanyak 37.551 orang (1,52%) tercatat sebagai penduduk yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2019 tercatat sebesar 73,87%, turun sedalam -2,91 poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2018 yang tercatat sebesar 76,78%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,52%, meningkat setinggi 0,15 poin dibandingkan TPT Agustus 2018 yang tercatat sebesar 1,37%.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2017-2019

No	Kegiatan Utama	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
1	Penduduk Usia Kerja	3.235.563	3.288.908	3.338.767
2	Angkatan Kerja	2.434.450	2.525.355	2.466.230
	a. Bekerja	2.398.307	2.490.870	2.428.679
	b. Menganggur	36.143	34.485	37.551

3	Bukan Angkatan Kerja	801.113	763.553	872.537
4	TPAK (%)	75,24	76,78	73,87
5	TPT (%)	1,48	1,37	1,52
	Pekerja Tidak Penuh (<35 Jam)	550.541	583.676	605.581

Sumber : BPS Provinsi Bali

Dalam Tabel ditunjukan perkembangan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (yaitu proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja), Tingkat Pengangguran Terbuka (Proporsi penduduk yang menganggur/mencari kerja) serta Tingkat Kesempatan Kerja (Proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja) yang saling berhubungan.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan kue ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Namun demikian pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjadi acuan keberhasilan pembangunan karena kesejahteraan akan terjadi jika kue ekonomi yang tercipta mampu dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat tanpa ada ketimpangan.

Ekonomi Bali triwulan III-2019 tercatat tumbuh 5,34% atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,15%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 9,99%. Sementara itu bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 yakni Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) yang tercatat tumbuh sebesar 7,94%. Secara *(q-to-q)* atau jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Bali triwulan III-2019 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,12%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) sebesar 9,85%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Konsumsi Pengeluaran Impor (Luar Negeri/LN dan Antar Daerah) dengan pertumbuhan sebesar 9,11%.

Dari sisi lapangan usaha, di triwulan III-2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi tercatat sebesar 23,59%. Sementara kontribusi terbesar pada triwulan III-2019 dari sisi komponen pengeluaran tercatat pada Komponen Ekspor (55,21%) diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (47,57%). Sedangkan, kontribusi dari Komponen Impor sebagai komponen pengurang tercatat sebesar 43,78%.

Dari sisi Pengeluaran, ekonomi Bali hingga triwulan III-2019 tercatat sebesar 64,86 triliun rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan sebesar 41,56 triliun rupiah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Jika kumulatif selama tahun 2019 dibandingkan dengan kumulatif tahun sebelumnya (*c-to-c*), ekonomi Bali tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,67%. Hampir seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, hanya komponen ekspor (LN dan Antar Daerah) dan Perubahan Inventori yang tumbuh negatif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 13,81%; diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,24%; dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,91%. Pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan III-2019 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya tercatat mengalami perlambatan. Pada triwulan III-2018 pertumbuhan ekonomi Bali (*c-to-c*) tercatat sebesar 5,93% atau lebih besar 0,26 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode ini.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (*Source of Growth*) Bali secara *c-to-c*, komponen PK-RT memberikan andil terbesar terhadap tumbuhnya ekonomi Bali sampai dengan triwulan III-2019, tercatat menyumbang sebesar 3,04%. Sumbangan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya, ketika itu tercatat sebesar 2,30%. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga memberikan andil cukup besar yakni sebesar 1,93%, tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang telah mencapai 2,56%. Selanjutnya komponen lainnya yang meliputi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), perubahan inventori, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT), ekspor dan impor (sebagai komponen pengurang) memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan sebesar 0,7%.

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar rata-rata nilai tambah yang mampu diciptakan oleh penduduk, sehingga secara tidak langsung memberi gambaran akan produktivitas penduduk dalam menciptakan nilai tambah. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah memiliki produktivitas yang semakin tinggi dalam hal penciptaan nilai tambah, yang diharapkan akan berkorelasi positif terhadap tingkat pendapatan/kesejahteraan penduduk di daerah bersangkutan.Namun mesti diingat kembali bahwa pendapatan per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Selain itu, besaran PDRB juga

merupakan besaran nilai tambah yang tidak memperhatikan kepemilikan faktor produksi. Sehingga bisa saja nilai tambah yang tercipta relatif besar namun tidak dimiliki oleh penduduk di wilayah bersangkutan. Namun data ini sangat berguna untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Dalam konteks Bali, berdasarkan proyeksi dari hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Bali pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 4,292 juta jiwa. Sementara nilai nominal PDRB di tahun yang sama mencapai Rp. 234,43 trilyun maka pendapatan perkapita penduduk Bali mencapai Rp 54,62 juta rupiah per tahun di tahun 2018. Sementara berdasarkan harga konstan pendapatan per kapita Bali tahun 2018 tercatat sebesar 35,92 juta rupiah atau meningkat 1,05% jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai Rp 34,14 juta perkapita/tahun.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai *gini ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini ratio* Provinsi Bali pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,366 dan naik menjadi 0,370 pada September 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,365 , angkaini turun sedalam 0,005 poin dibanding g*ini ratio* Maret 2019 yang tercatat sebesar 0,370. Untuk daerah perdesaan, *gini ratio* September 2019 tercatat sebesar 0,306 atau mengalami penurunan sedalam 0,007 poin dibanding g*ini ratio* Maret 2019 yang tercatat sebesar 0,313. Gambar 2 menunjukkan perkembangan g*ini ratio* di Bali pada periode Maret 2015 sampai dengan September 2019.

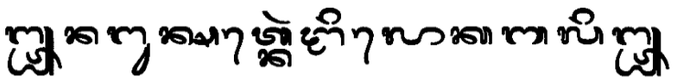
Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan *Gini ratio* sedikit mengalami kenaikan dari 0.366 di Maret 2019 menjadi 0.370 di September 2019. Kenaikan *gini ratio* pada periode September 2019 sekitar 0,004 poin persen dari periode Maret 2019.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu :



“ NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Penjabaran visi di atas yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, Krama Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi Krama Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: Atita (masa lalu), Nagata (masa kini), dan Wartamana (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)
   1) Alam Bali :
      a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
      b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
      c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.
   2) Krama Bali:
      a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
      b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri Krama Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas Krama Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktvitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.
   3) Kebudayaan Bali:
      a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.

b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
c. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.
1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali.
3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Bali.
5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan Krama Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan Krama Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi **"*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**, maka ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah
Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.

Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Misi 3. **Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama* Bali Berbasis Kecamatan.**

Misi 4. **Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.**

Misi 5. **Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di *Desa Pakraman/Desa Adat*.**

Misi 6. **Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama* Bali.**

Misi 7. **Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama* Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.**

Misi 8. **Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.**

Misi 9. **Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi *Krama* Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.**

Misi 10. **Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya *Krama* Bali.**

Misi 11. **Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali Secara *Sakala* Dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* Yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih,* Dan *Jagat Kertih*.**

Misi 12. **Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi *Desa Pakraman*/*Desa Adat* Dalam Menyelengarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan,* Dan *Palemahan*.**

Misi 13. **Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.**

Misi 14. **Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.**

Misi 15. **Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.**

Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.

Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.

Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.

Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.

Misi 20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.

Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.

Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023
VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"
MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan	1	Membentuk yayasan

		kebutuhan sandang masyarakat miskin		terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian

MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI				
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi		Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali		Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA				
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali		Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali		Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI				
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja		Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri		
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA				

YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI			
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan		Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI			
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH			
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN			
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI			
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU			

T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali		Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global		Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlidungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil

				dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi		1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumbur pendapatan lain-lain

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Strategi		Arah Kebijakan		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"						
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi						
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali						
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali						
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin						
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali						
7	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)						
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi					
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi					

9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali						
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor					
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan					
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor						
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan						
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian					
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan eksport produk hasil pertanian dalam arti luas					
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani					
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali						
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali						
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional					
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik					

17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali						
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan kepemerintah pusat						
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan					
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali					
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri					
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali					
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali					
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)					
21	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja						
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali					
		2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri					
23	Melembagakan dan	Menjadikan tradisi, seni dan						

	menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali						
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi						
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya						
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik						
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan					
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku					
		3	Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu					
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura					
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya					
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)					
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama						
29	Penguatan kedudukan, tugas da fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa					
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususya pendidikan non-formal)					
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)					

		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen					
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi					
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi					
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya					
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat					
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)					
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali					
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis						
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah						
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali						
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali						
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam					

	pasar kerja		jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara					
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara					
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta					
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali						
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi					
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi					
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi					
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)						
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia						

39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali						
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali						
41	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan						
41	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali						
42	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI						
43	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan					
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangunan dan pertumbuhan ekonomi Baru					
44	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali						
45	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan						
46	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya					
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah					

C. Prioritas Daerah

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak

secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sector, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan adalah:

1.	Pendidikan.	15.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
2.	Kesehatan.	16.	Penanaman Modal.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	17.	Kepemudaan dan Olah Raga.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	18.	Kebudayaan.
5.	Sosial.	19.	Perpustakaan dan Kearsipan.
6.	Tenaga Kerja.		
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		
8.	Pangan.		
9.	Pertanahan.		
10.	Lingkungan Hidup.		
11.	Adiministrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana		
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		
13.	Perhubungan.		
14.	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.		

1. Pendidikan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, telah mengambil berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan pada semua jenjang (SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) dengan melaksanakan berbagai kegiatan dengan program-program unggulan/prioritas pada bidang pendidikan yang juga mencakup Bidang Kebudayaan, Perekonomian, Perpustakaan, Pelatihan dan Pemberian Penghargaan.

Dalam rangka mendukung capaian sasaran prioritas pembangunan dan capaian visi, misi, tujuan dan rencana strategis Dinas Pendidikan, dapat dijabarkan melalui program

dan kegiatan dengan periode tahunan. Prioritas-prioritas khusus dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan bidang pendidikan, baik yang telah ditetapkan berupa Komitmen/janji kinerja OPD maupun yang menjadi bagian dari penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Adapun Program Kegiatan Unggulan/Strategis yang telah ditetapkan capainnya dapat di jabarkan dengan narasi dan tabel.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya iar dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan bahan bacaa dan peraturan perundang-udangan 8. Penyusunan buku pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 9. Persiapan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun 10. Pengembangan SDM Bali Unggul 11. Persiapan pelaksanaan pendidikan berbasis keagamaan di desa adat, pendidkan PAUD/TK Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 12. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA/SMK/SLB Negeri se- Bali 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 15. Upacara keagamaan 16. Pengadaan peralatan gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19. Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja 20. Peningkatan kehumasan 21. Penyusunan Tabloid di Bidang Pendidikan 22. Profil dan Informasi Pendidikan 23. Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Sekolah 24. Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 25. Fasilitasi OSN, O2SN, FLS2N SD dan SMP serta Galatama SM ke Tingkat Nasional
2.	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa	1. Penyelenggaraan SLB N 1 Buleleng 2. Penyelenggaraan SLBN 2 Buleleng 3. Penyelenggaraan SLBN 1 Jembrana 4. Penyelenggaraan SLBN 1 Tabanan 5. Penyelenggaraan SLBN 1 Badung 6. Penyelenggaraan SLBN 1 Gianyar 7. Penyelenggaraan SLBN 1 Bangli 8. Penyelenggaraan SLBN 1 Klungkung

		9. Penyelenggaraan SLBN 1 Karangasem 10. Penyelenggaraan SLBN 1 Denpasar 11. Penyelenggaraan SLBN 2 Denpasar 12. Lomba Prestasi dan Kreatifitas PLB 13. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Khusus 14. Peningkatan Mutu SaranaPendidikan Khusus 15. Pembinaan Prestasi dan Kreativitas Siswa PLB ke Tingkat Nasional 16. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Khusus. 17. Pembinaan Bahasa/Penyuluhan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
1.	Program Pembinaan SMA	1. Penyelenggaraan Pembinaan SMA 2. Penyelenggaraan SMAN 1 BANJAR; 3. Penyelenggaraan SMAN 2 BANJAR; 4. Penyelenggaraan SMAN 1 BUSUNGBIU; 5. Penyelenggaraan SMAN 2 BUSUNGBIU; 6. Penyelenggaraan SMAN 1 KUBUTAMBAHAN; 7. Penyelenggaraan SMAN 1 SAWAN; 8. Penyelenggaraan SMAN 1 SERIRIT; 9. Penyelenggaraan SMAN 1 SUKASADA; 10. Penyelenggaraan SMAN 1 TEJAKULA; 11. Penyelenggaraan SMAN 2 TEJAKULA; 12. Penyelenggaraan SMAN 1 SINGARAJA; 13. Penyelenggaraan SMAN 2 SINGARAJA; 14. Penyelenggaraan SMAN 3 SINGARAJA; 15. Penyelenggaraan SMAN 4 SINGARAJA; 16. Penyelenggaraan SMAN 1 GEROKGAK ; 17. Penyelenggaraan SMAN 2 ABIANSEMAL; 18. Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA SELATAN; 19. Penyelenggaraan SMAN 2 GEROKGAK 20. Penyelenggaraan SMAN 1 ATAP TEJAKULA 21. Penyelenggaraan SMAN 1 NEGARA 22. Penyelenggaraan SMAN 2 NEGARA 23. Penyelenggaraan SMAN 1 MELAYA 24. Penyelenggaraan SMAN 1 MENDOYO 25. Penyelenggaraan SMAN 2 MENDOYO 26. Penyelenggaraan SMAN 1 PEKUTATAN 27. Penyelenggaraan SMAN 1 BATURITI 28. Penyelenggaraan SMAN 1 KEDIRI 29. Penyelenggaraan SMAN 1 KERAMBITAN 30. Penyelenggaraan SMAN 1 MARGA 31. Penyelenggaraan SMAN 1 PENEBEL 32. Penyelenggaraan SMAN 1 PUPUAN 33. Penyelenggaraan SMAN 1 SELEMADEG 34. Penyelenggaraan SMAN 1 TABANAN 35. Penyelenggaraan SMAN 2 TABANAN 36. Penyelenggaraan SMAN 1 ABIANSEMAL 37. Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA 38. Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA 39. Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA UTARA 40. Penyelenggaraan SMAN 1 MENGWI 41. Penyelenggaraan SMAN 1 PETANG 42. Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA SELATAN 43. Penyelenggaraan SMAN 2 MENGWI 44. Penyelenggaraan SMAN 1 PAYANGAN 45. Penyelenggaraan SMAN 1 BLAHBATUH 46. Penyelenggaraan SMAN 1 GIANYAR 47. Penyelenggaraan SMAN 1 SUKAWATI 48. Penyelenggaraan SMAN 1 TAMPAKSIRING

		49. Penyelenggaraan SMAN 1 TEGALLALANG 50. Penyelenggaraan SMAN 1 UBUD 51. Penyelenggaraan SMAN 1 BANGLI 52. Penyelenggaraan SMAN 2 BANGLI 53. Penyelenggaraan SMAN 1 SUSUT 54. Penyelenggaraan SMAN 1 TEMBUKU 55. Penyelenggaraan SMAN 1 KINTAMANI 56. Penyelenggaraan SMAN 1 BANJARANGKAN 57. Penyelenggaraan SMAN 1 DAWAN 58. Penyelenggaraan SMAN 1 SEMARAPURA 59. Penyelenggaraan SMAN 2 SEMARAPURA 60. Penyelenggaraan SMAN 1 NUSA PENIDA 61. Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP LEMBONGAN 62. Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP KLUMPU 63. Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA 64. Penyelenggaraan SMAN 1 BEBANDEM 65. Penyelenggaraan SMAN 1 KUBU 66. Penyelenggaraan SMAN 1 AMLAPURA 67. Penyelenggaraan SMAN 2 AMLAPURA 68. Penyelenggaraan SMAN 3 AMLAPURA 69. Penyelenggaraan SMAN 1 MANGGIS 70. Penyelenggaraan SMAN 1 RENDANG 71. Penyelenggaraan SMAN 1 SELAT 72. Penyelenggaraan SMAN 1 SIDEMEN 73. Penyelenggaraan SMAN 1 DENPASAR 74. Penyelenggaraan SMAN 2 DENPASAR 75. Penyelenggaraan SMAN 3 DENPASAR 76. Penyelenggaraan SMAN 4 DENPASAR 77. Penyelenggaraan SMAN 5 DENPASAR 78. Penyelenggaraan SMAN 6 DENPASAR 79. Penyelenggaraan SMAN 7 DENPASAR 80. Penyelenggaraan SMAN 8 DENPASAR 81. Penyelenggaraan SMAN BALI MANDARA 82. Debat Bahasa SMA; 83. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA ke Tingkat Nasional; 84. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMA ke Tingkat Nasional; 85. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional; dan 86. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA
2.	Program Pembinaan SMK	1. Penyelenggaraan Pembinaan SMK. 2. Penyelenggaraan SMKN 1 SUKASADA 3. Penyelenggaraan SMKN 1 KUBUTAMBAHAN 4. Penyelenggaraan SMKN 1 SAWAN 5. Penyelenggaraan SMKN 1 SERIRIT 6. Penyelenggaraan SMKN 2 SERIRIT 7. Penyelenggaraan SMKN 1 TEJAKULA 8. Penyelenggaraan SMKN 1 BUSUNBIU 9. Penyelenggaraan SMKN1 SINGARAJA 10. Penyelenggaraan SMKN 2 SINGARAJA 11. Penyelenggaraan SMKN 3 SINGARAJA 12. Penyelenggaraan SMKN 1 GEROKGAK 13. Penyelenggaraan SMKN 1 NEGARA 14. FGD Pengembangan Pendidikan SMK 4 Tahun 15. Lomba Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan SMK Berbasis WEB 16. Persiapan SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

		17. Pemetaan Program Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri 18. Penyelenggaraan SMKN 2 NEGARA 19. Penyelenggaraan SMKN 3 NEGARA 20. Penyelenggaraan SMKN 4 NEGARA 21. Penyelenggaraan SMKN 5 NEGARA 22. Penyelenggaraan SMKN 1 TABANAN 23. Penyelenggaraan SMKN 2 TABANAN 24. Penyelenggaraan SMKN 3 TABANAN 25. Penyelenggaraan SMKN 1 KUTA SELATAN 26. Penyelenggaraan SMKN 1 PETANG 27. Penyelenggaraan SMKN 1 GIANYAR 28. Penyelenggaraan SMKN 1 SUKAWATI 29. Penyelenggaraan SMKN 2 SUKAWATI 30. Penyelenggaraan SMKN 3 SUKAWATI 31. Penyelenggaraan SMKN 1 TAMPAKSIRING 32. Penyelenggaraan SMKN 1 TEGALLALANG 33. Penyelenggaraan SMKN 1 MAS UBUD 34. Penyelenggaraan SMKN 1 SUSUT 35. Penyelenggaraan SMKN 1 TEMBUKU 36. Penyelenggaraan SMKN 1 BANGLI 37. Penyelenggaraan SMKN 2 BANGLI 38. Penyelenggaraan SMKN 3 BANGLI 39. Penyelenggaraan SMKN 4 BANGLI 40. Penyelenggaraan SMKN 1 KINTAMANI 41. Penyelenggaraan SMKN 2 KINTAMANI 42. Penyelenggaraan SMKN 3 KINTAMANI 43. Penyelenggaraan SMKN 1 KLUNGKUNG 44. Penyelenggaraan SMKN NUSA PENIDA 45. Penyelenggaraan SMKN 1 BEBANDEM 46. Penyelenggaraan SMKN 1 ABANG 47. Penyelenggaraan SMKN 1 KUBU 48. Penyelenggaraan SMKN 1 MANGGIS 49. Penyelenggaraan SMKN 1 AMLAPURA 50. Penyelenggaraan SMKN 1 DENPASAR 51. Penyelenggaraan SMKN 2 DENPASAR 52. Penyelenggaraan SMKN 3 DENPASAR 53. Penyelenggaraan SMKN 4 DENPASAR 54. Penyelenggaraan SMKN 5 DENPASAR 55. Penyelenggaraan SMKN BALI MANDARA 56. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK 57. Lomba Kompetensi Siswa SMK 58. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMK ke Tingkat Nasional; 60. Festival Lomba Seni SMK (FLS2N) ke Tingkat Nasional; dan
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Penilaian Penetapan dan Penataran Angka Kredit Guru dan Pengawas di Provinsi Bali 2. Manajemen Operasional Pemberian Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Olimpiade Sains Guru MIPA SMA/SMK 4. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 5. Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Provinsi Bali 6. Pengkajian Nilai-nilai Kearifan Lokal Bali dan Workshop GTK Jenjang SMA/SMK/SLB
4.	Program Pengembangan Teknologi Pendidikan	1. Belanja jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa surat menyurat

		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 9. Pengadaan peralatan gedung kantor 10. Penyusunan kalender pendidikan 11. Lomba cerdas cermat kehidupan berbangsa dan bernegara 12. Penyelenggaraan USBN tingkat Provinsi 13. Pedoman Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara on line 14. Pelatihan dan Lomba Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK 15. Lomba Pemanfaatan Multi Kuis Ki Hajar ke Tingkat Nasional 16. Pembuatan Konten Pembelarajan TIK Bidang Pendidikan 17. Manajemen Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbasis TIK 18. Pembuatan Studio Mini 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Pegawai

NO.	KRITERIA	JUMLAH
1.	PNS	5493
2.	CPNS	471
3.	KONRAK SEKOLAH TOTAL	1858
	GURU KONTRAK	1052
	TENAGA ADMINISTRASI	643
	TENAGA KESEHATAN	1
	PENGASUH ASRAMA	1
	PENJAGA ASRAMA	4
	PENJAGA MALAM	76
	SOPIR	1
	TUKANG KEBUN	31
	TUKANG MASAK	6
	CS	43
4.	GURU OJTM	842
5.	PENYULUH BAHASA BALI : 702	702
6.	KONTRAK DINAS : TOTAL	124
	TENAGA ADMINISTRASI	92
	PENJAGA MALAM	11
	SOPIR	13
	CS	10

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

Program ini menjabarkan 25 kegiatan yang sangat mendasar sebagai satu kesatuan aspek managemen perkantoran. Dua puluh lima jenis kegiatan ini bersifat urusan pekerjaan rutin

yang berlangsung terus menerus. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja ditujukan untuk medukung kelancaran pelaksanaan operasional perkantoran, pemenuhan kondisi gedung kantor tetap baik dan terjaga untuk menunjang kualitas kerja aparatur dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung operasional seperti gedung dan peralatannya yang lebih baik, kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

b) Program Pembinaan SMA

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, maka Program Pembinaan SMA menjadi urusan layanan wajib. Program ini menjadi urusan Bidang Pembinaan SMA dengan Seksi-seksi urusan Kurikulum dan Penilaian; urusan Sarana dan Prasarana; dan urusan pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter.

Pelaksanaan Tahun anggaran 2019 Program Pembinaan SMA memiliki 86 kegiatan dengan sasaran kegiatan tercapainya peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA. Untuk tercapainya peningkatan akses pendidikan SMA, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) kepada SMA Negeri se-Bali. Dalam hal peningkatan mutu pendidikan jenjang SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai kegiatan lomba seperti Debat Bahasa, FLS2N, O2SN, dan OSN serta mampu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan bagi Provinsi Bali. Sampai akhir tahun pelajaran 2018/2019 hasil kegiatan Program Pembinaan SMA digambar dalam Tabel dibawah ini :

Kondisi SMA/MA

No	Tahun Pelajaran	Penddk usia 16-18 tahun	Jumlah siswa SMA/MA	APK	Jumlah Sekolah		
					SMA	**MA**	**Total**
1	2013/2014	162.171	84.026	50,26	161	20	181
2	2014/2015	167.254	82.834	49,52	160	21	181
3	2015/2016	174.998	85.935	49,10	160	21	181
4	2016/2017	177.144	88.937	50,20	158	20	178
5	2017/2018	198.635	90.525	45.57	159	25	184
6	2018/2019	199.250	91.747	47,04	158	31	189

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capaian Nilai UN Tertinggi dan Terendah UN
SMA Program Bahasa TP 2018/2019

Mata Pelajaran	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
Bahasa Indonesia	96,0	14,0
Bahasa Inggris	100	16,0

Matematika	95,0	12,5
Sastra Indonesia	95,0	25,0
Antropologi	96,0	18,0
Bahasa Asing	100,0	12,0

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capaian Nilai UN Tertinggi dan Terendah UN
SMA Program IPA TP 2018/2019

Mata Pelajaran	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
Bahasa Indonesia	100,0	18,0
Bahasa Inggris	100,0	16,0
Matematika	100,0	0,0
Fisika	100,0	17,5
Kimia	100,0	00,0
Biologi	100,0	15,5

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capaian Nilai UN Tertinggi dan Terendah UN
SMA Program IPS TP 2018/2019

Mata Pelajaran	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
Bahasa Indonesia	100,0	14,0
Bahasa Inggris	100,0	0,0
Matematika	100,0	12,5
Ekonomi	100,0	20,0
Sosiologi	98,0	18,0
Geografi	96,0	16,0

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capaian Nilai UN Tertinggi dan Terendah UN
SMA Keagamaan TP 2018/2019

Mata Pelajaran	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
Bahasa Indonesia	94,0	26,0
Bahasa Inggris	92,0	22,0
Matematika	70,0	20,5
Ilmu Tafsir	94,0	24,0
Ilmu Hadist	100,0	70,0
Fiqih	80,0	26,0

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Perolehan Medali Jenjang SMA Tahun 2019

NO	JENIS LOMBA	PEROLEHAN JUARA/MEDALI
1	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMA	Medali emas cabang Renang Putri Medali perak cabang Bulutangkis Medali perak cabang Pencak Silat F Putra Medali Perak cabang Pencak Silat Tunggal Putra Medali Perunggu cabang Pencak Silat Tunggal Putri Medali Perunggu cabang Renang Putra
2	Olimpiade Sains Nasional (OSN)	Juara 1 bidang Fisika Juara 2 bidang Kebumian Juara 3 bidang Kimia Juara 3 bidang Matematika Juara 3 bidang Astronomi

c) Program Pembinaan SMK

Salah satu kebijakan pemerintah adalah meningkatkan rasio keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi 60:40. Sebuah harapan besar dari pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat dalam menempuh pendidikan di SMK yang hasilnya diharapkan untuk meningkatkan tenaga-tenaga yang kompeten dalam bidang yang ditekuni dan mampu bersaing di pasar kerja lokal, regional, maupun internasional.

Dalam perspektif ketenagakerjaan di Bali kehadiran SMK berkontribusi nyata terhadap angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 sebesar 1,52%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019 sebesar 73,87%. Kondisi ini sejalan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang hingga saat ini harus memperbaiki struktur tenaga kerja yang selama ini dominan pendidikan dasar menjadi pendidikan menengah. Dengan meningkatnya calon tenaga kerja yang berasal dari SMK, Indonesia tidak saja mendapat lebih banyak calon tenaga kerja yang berasal dari pendidikan menengah namun mendapatkan pula calon tenaga kerja yang siap pakai.

Bali sebagai wilayah Indonesia juga ikut mempengaruhi pertumbuhan SMK secara nasional. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan SMK baik status negeri maupun swasta hingga ke pelosok desa yang ada di Bali dengan berbagai Kompetensi Keahlian yang dibuka. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan manusia Bali di era globalisasi serta kondisi persaingan yang semakin ketat. Sementara ratio SMK:SMA di Bali tahun 2019 adalah 52:48.

Di sisi lain dengan pertumbuhan SMK yang sangat signifikan khususnya di Bali masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan sekolah tersebut, seperti pemenuhan pendidik dengan keahlian khusus, pemenuhan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, merupakan peluang dan juga tantangan dalam mengelola SMK kedepan. Pelaksanaan Tahun anggaran 2019 Program Pembinaan SMK memiliki 60 kegiatan untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan di SMK sejalan dengan konsepsi Revitalisasi SMK sudah seyogyanya Dinas Pendidikan Provinsi Bali melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung proses penguatan kompetensi keahlian peserta didik SMK antara lain :

1) Bantuan Operasional Sekolah Daearh (BOSDA) SMK Negeri se-Bali
2) Penyempurnaan kurikulum yang mampu memenuhi standar dunia industri dan dunia usaha
3) Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.

4) Pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten.

5) Penguatan pendidikan karakter.

6) Penguatan tata kelola SMK.

Hasil kegiatan di tahun 2019 dari Program Pembinaan SMK digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Kondisi SMK

No	Tahun Pelajaran	Penddk usia 16-18 tahun	Jumlah siswa SMK semua umur	APK	Jumlah sekolah SMK
1	2013/2014	162.171	80.416	48,10	162
2	2014/2015	167.254	83.179	49,73	166
3	2015/2016	174.998	86.900	49,66	171
4	2016/2017	177.144	92.088	51,90	176
5	2017/2018	198.635	96.643	48,65	176
6	2018/2019	199.290	98.895	50,96	174

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Capaian Nilai UN Tertinggi dan Terendah UN SMK TP 2018/2019

Mata Pelajaran	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah
Bahasa Indonesia	100,0	20,0
Bahasa Inggris	100,0	10,0
Matematika	100,0	00,0
Kompetensi Keahlian	100,0	10,0

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

Perolehan Medali Jenjang SMK Tahun 2019

No	Jenis Lomba	Perolehan Juara/Medali
1	FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional)	Medali emas Bidang Musik Tradisi Daerah Medali emas Bidang Tari Tradisional
2	LKS (Lomba Kompetensi Siswa)	Medali Perunggu Bidang Lanscape and Gardening Medali Perunggu cabang olahraga Renang Putra
2	O2SN (Olympiade Olahraga Siswa Nasional)	Juara 1 cabang Pencak Silat Putri Juara 1 cabang Atletik Putra Juara 2 cabang Atletik Putri Juara 3 cabang Renang Putra

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

d) Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa

Konvensi international tentang hak-hak penyandang disabilitas *(Covention on the Right of Persons with Disabilities)* telah ditandatangani oleh 147 negara termasuk Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut melalui undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi penyandang disabilitas yang disyahkan melalui sidang paripurna DPR-RI tanggal 18 Oktober 2011. Pada pasal 24 dari Convention disebutkan bahwa "Negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan, dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan

kesempatan yang sama, Negara-negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah". Untuk itulah, Pemerintah Pusat berupaya mendorong setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia agar memberikan layanan yang utuh kepada setiap warga negara penyandang cacat (*disabilitas*) tanpa pengecualian. Langkah nyatanya adalah mewujudkan gerakan "Provinsi Inklusi".

Perlu untuk dipahami, dihayati dan diamalkan bahwa UUD 1945 telah menjamin, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender, kemampuan dan lain-lain. Kemudian, setiap gerakan pembangunan di Bali harus berkiblat pada 4 pilar pembangunan yakni Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara). Kerangka ini secara utuh sangat menjamin adanya layanan pendidikan di Bali yang tidak diskriminatif.

Demikian pula dengan spirit dan filosofis Bali sangat kental dengan pembangunan yang bersifat *humanism* (kemanusiaan). Kekuatan utama pembangunan Bali adalah "terletak pada manusia Bali itu sendiri". Sehingga, dengan memberikan perhatian dan layanan khusus pada anak-anak penyandang cacat, kedepannya sangat jelas bahwa para penyandang cacat bukanlah orang-orang yang terpinggirkan dan bukan beban pembangunan, melainkan orang-orang, anak-anak yang dapat tumbuh dengan sikap mental positif dan bisa mandiri. Ini telah banyak bukti bahwa seorang penyandang cacat dapat membanggakan bangsanya dengan prestasi-prestasi gemilang dan jangan lupa, itu bisa terjadi karena ada proses pendidikan yang dilakoni penyandang cacat tersebut.

Hal yang menjadi kendala dalam pengembangan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah terkait dengan data. Secara khusus *by name, by address* terkait keberadaan, jumlah dan problem yang dihadapi para penyandang cacat di Bali belum jelas akan tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Bali telah mengembangkan pusat-pusat belajar pendidikan khusus yang tersebar di 9 kab/kota yang berjumlah 14 sekolah dengan jumlah peserta didik 1.884 dengan tenaga pendidik 388 orang.

Daya dukung lainnya adalah support kalangan pengusaha (*corporate social responsibility*) yang sangat *care* dengan para penyandang cacat. Tugas pokok dan fungsi layanan pendidikan khusus berada di bawah Bidang Pembinaan PK,PLK dan Bahasa. Adapun sasaran dalam pembinaan pendidikan khusus adalah target sukses Bali sebagai "Provinsi Inklusif" dan sukses menjadikan anak-anak cacat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

Selain menangani laporan pendidikan khusus Bidang PK,PLK dan Bahasa juga menangani pembinaan Bahasa/Penyuluhan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali berupa pemberdayaan tenaga penyuluh Bahasa Bali yang memiliki tugas antara lain pembelajaran

Bahasa Bali di sekolah dan desa, memlihara lontar di wilayah binaan, mengadakan isi lontar yang dikembangkan dalam aplikasi.

Hasil kegiatan dari Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa 2019 digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Kondisi Pendidikan Khusus (SLB) TP 2018/2019

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus				Jumlah SLB	Jumlah Guru SLB		
		SD	SMP	SMA	Jumlah		GT	GTT	Jumlah
1	2013/2014	1.157	405	239	1.801	16	-	-	289
2	2014/2015	1.176	463	261	1.900	16	-	-	308
3	2015/2016	1.078	528	288	1.606	16	316	70	386
4	2016/2017	1.059	526	337	1.922	16	316	70	386
5	2017/2018	1.039	517	377	1.933	14	295	73	368
6	2018/2019	1.201	541	467	1.884	14	300	88	388

Prestasi SLB Tahun 2019

No	Jenis Lomba	Perolehan Juara/Medali
1	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Juara 1 Mata Lomba Menari Anak
		Juara 2 Mata Lomba Melukis
2	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Juara 2 cabang olahraga Bocce Putri
3	Lomba Kompetensi Siswa (LKS)	Juara 1 Bidang lomba IT
		Juara 2 Bidang lomba Tata Boga
4	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Berseri	Juara 1 mata lomba sinopsis
		Juara 3 mata lomba Cipta dan Baca Puisi

Sumber Data : SIPD Provinsi Bali

e) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagaimana yang dapat dipahami terkait dengan sistem, prosedur, pola, strategi, penetapan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi layanan pendidikan tidak terlepas dan mesti menjadi perhatian bersama yakni terkait dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan itu sendiri. Untuk tercapainya sasaran meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan di Bali maka Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan 6 kegiatan.

Secara prinsip Pemerintah Provinsi Bali sangat apresiasiatif dan mendukung kegiatan-kegiatan semacam pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi keahlian, evaluasi guru dan penilaian guru berprestasi.

Dalam hal pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggungjawab provinsi berbagai persoalan mencuat kepermukaan terutamanya terkait distribusi guru, analisis kebutuhan guru, keberadaan guru kontrak/honor, guru PNS kekuarangan jam mengajar, guru PNS yang diperbantukan, guru yang belum bersertifikasi, pengakuan guru dengan keahlian ganda, guru dengan tugas tambahan, guru OJTM dan seterusnya.

Untuk itu, para guru hendaknya benar-benar dapat memahami secara tepat dan serius terkait dengan prosedur, operasional, dan standar kebutuhan memperoleh sertifikasi. Perlu, untuk diketahui, sampai sejauh ini (data 2019) bahwa total guru (TK/RA; SD/MI; SMP/ MTs; SMA/MA/SMK sebanyak 58.983 orang .

Untuk pembaharuan pada ranah peran guru dimasa mendatang dengan memperkuat sendi-sendi profesionalitas seorang guru. Secara perlahan namun pasti bagi guru-guru yang tidak siap membangun kompetensi dirinya, guru yang tidak siap berkompetisi, tidak cakap, tidak cerdas, dan tidak mau berbenah diri untuk tumbuh dan berkembang dengan intelektual yang cakap dan kritis niscaya guru-guru seperti itu tidak bisa mengikuti proses sertifikasi.

Pada hakikatnya aktivitas pendidikan selalu berlangsung dengan melibatkan unsur subyek atau pihak-pihak sebagai aktor penting. Subyek penerima adalah peserta didik sedangkan subyek pemberi adalah pendidik. Seseorang yang menginginkan menjadi pendidik maka ia dipersyaratkan mempunyai kriteria yang di inginkan oleh duni pendidikan. Orang yang merasa terpanggil untuk mendidik maka ia mencintai peserta didiknya dan memiliki perasaan wajib dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan dedikasi yang tinggi atau bertanggungjawab.

Kajian tentang pendidik mencakup beberapa hal antara lain pengertian dan sebutan istilah pendidik, kompetensi pendidik, kedudukan pendidik, hakekat tugas dan tanggung jawab guru, profesionalisme guru, organisasi profesi dan kode etik guru. Guru merupakan salah satu profesi dari tenaga kependidikan. Guru bertugas untuk mengajar dimana mengajar merupakan pelaksanaan proses pembelajaran dan menjadi proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengabdian guru dalam dunia pendidikan yang sangat besar tersebut sangat memberikan kontribusi yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru juga memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga setiap guru mandapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

f) Program Pengembangan Teknologi Pendidikan.

Program ini dirancang khusus untuk menangani urusan teknis pengembangan teknologi pendidikan. Pada era global interaksi sosial antar warga dunia sudah tidak mengenal batas geografis, negara dan hukum yang dianut oleh setiap wilayah. Arus informasi dapat saja mengalir dari satu komunitas ke komunitas lainnya tanpa dibatasi

oleh ruang dan waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Provinsi Bali telah berhadapan pada keberagaman informasi yang mengglobal ditengah arus pariwisata yang mendunia. Pengaruh masuknya informasi dan pengetahuan melalui medai digital dapat menjadi sumber belajar penting untuk membangun masyarakat berpengetahuan (*Knowledge Society*).

Kenyataan itu memicu perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi perangkat standar yang harus dimiliki untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan. Dalam dimensi global, keberadaan TIK telah menjadi persyaratan penting untuk mencerdaskan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral kegiatan pendidikan, baik formal maupun non-formal. TIK telah menjadi bagian utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan. TIK telah menjadi *style* bagi para praktisi pendidikan dalam menjalankan tugs pokok dan fungsinya. Disamping itu aplikasi TIK dalam bidang pendidikan telah meluas pada aspek manajerial, sehingga TIK telah menjadi infrastruktur pendidikan yang sangat penting dikembangkan untuk menunjang manajemen berbasis sekolah (*school-based management*).

Saat ini para guru di Provinsi Bali telah mengikuti *trend* perkembangan TIK dimana Provinsi Bali oleh Kemendikbud RI ditetapkan sebagai Model Penyelenggaraan Pembelajaran Berbasis E-Learning pada SMA dan SMK melalui Rumah Belajar. Perkembangan jumlah sekolah SMP, SMA dan SMK yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer terus meningkat. Sehingga, mau tidak mau guru-guru harus siap menyambut tantangan era TIK. Pertumbuhan keikutsertaan UNBK tahun pelajaran 2018/2019 untuk SMA/SMK mencapai 100%.

Potensi sumberdaya tersebut membutuhkan sebuah lembaga khusus agar aktivitas mereka terorganisir, terarah dan memberikan dampak induktif bagi para guru lainnya. Percepatan diseminasi kompetensi TIK tersebut hanya dapat dilakukan dengan wadah yang secara khusus mengembangkan TIK dalam bidang pendidikan. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan disingkat BPTEKDIK merupakan unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang menangani pengembangan teknologi pendidikan.

Tujuan pendirian UPT BPTEKDIK pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali adalah:

a. Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan bagi masyarakat di Bali melalui pemanfaatan TIK pendidikan.
b. Meningkatkan pengelolaan pendidikan agar efektif dan efisien, melalui pemanfaatan TIK pendidikan.
c. Peyediaan data dan publikasi pendidikan.

Program Pengembangan Teknologi Pendidikan terdiri atas 17 kegiatan yang terdiri dari kegiatan rutinitas dan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran teknologi.

Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Realisasi Pelaksaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

No.	URAIAN BELANJA		TARGET					REALISASI				
			FISIK			KEUANAGAN		Fisik			Keuangan	
			VOL		%	Rp.	%	VOL		%	Rp.	%
I	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		26	Keg.	100	225.978.627.848	100	21	Keg.	80,77	195.793.907.843	86,64
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	1	Keg.	100	15.000.000	100	1	Keg.	100,00	12.962.000	86,41
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Keg.	100	600.000.000	100	1	Keg.	100,00	472.601.318	78,77
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1	Keg.	100	728.223.996	100	1	Keg.	100,00	663.530.383	91,12
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1	Keg.	100	235.392.234	100	1	Keg.	100,00	235.392.234	100,00
	5	Penyediaan alat tulis kantor	1	Keg.	100	295.126.650	100	1	Keg.	100,00	295.126.650	100,00
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	Keg.	100	75.000.000	100	1	Keg.	100,00	74.143.130	98,86
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Keg.	100	42.000.000	100	1	Keg.	100,00	39.720.000	94,57
	8	Penyediaan makanan dan minuman	1	Keg.	100	170.000.000	100	1	Keg.	100,00	151.735.100	89,26
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1	Keg.	100	613.441.000	100	1	Keg.	100,00	602.521.879	98,22
	10	Upacara Keagamaan	1	Keg.	100	75.000.000	100	1	Keg.	100,00	69.550.000	92,73
	11	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	Keg.	100	293.269.000	100	1	Keg.	100,00	263.426.965	89,82
	12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Keg.	100	3.997.739.048	100	1	Keg.	100,00	3.863.047.722	96,63
	13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	Keg.	100	170.000.000	100	1	Keg.	100,00	92.140.365	54,20
	14	Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	1	Keg.	100	395.232.600	100	1	Keg.	85,00	335.849.489	84,98
	15	Peningkatan Kehumasan	1	Keg.	100	180.700.000	100	1	Keg.	100,00	150.199.385	83,12

	16	Penyusunan Tabloid di Bidang Pendidikan	1	Keg.	100	151.494.750	100	1	Keg.	100,00	86.191.926	56,89
	17	Profil dan Informasi Pendidikan	1	Keg.	100	200.000.000	100	1	Keg.	86,00	171.203.400	85,60
	18	Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Sekolah	1	Keg.	100	123.352.200	100	1	Keg.	100,00	101.395.256	82,20
	19	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1	Keg.	100	250.000.000	100	1	Keg.	98,00	244.844.007	97,94
	20	Fasilitasi OSN, O2SN, FLS2N SD dan SMP serta Galatama SMP ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	945.229.800	100	1	Keg.	100,00	893.046.634	94,48
	21	Penyusunan Buku Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal	1	Keg.	100	200.000.000	100	-	Keg.	-	-	-
	22	Persiapan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	1	Keg.	100	125.000.000	100	-	Keg.	-	-	-
	23	Pengembangan SDM Bali Unggul	1	Keg.	100	2.150.000.000	100	-	Keg.	-	-	-
	24	Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Keagamaan di Desa Adat, Pendidikan PAUD/TK, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	1	Keg.	100	150.000.000	100	-	Keg.	-	-	-
	25	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK/SLB Negeri se-Bali	1	Keg.	100	191.032.741.400	100	1	Keg.	98,00	186.975.280.000	97,88
	26	Sisa Dana Bantuan Oprasional Sekolah Jenjang SMA/SMK/SLB Negeri se Bali	1	Keg.	100	22.764.685.170	100	-	Keg.	-	-	-
II	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Bahasa		17	Keg.	100	35.899.058.332	100	17	Keg.	100,00	33.403.896.454	93,05
	1	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Buleleng	1	Keg.	100	795.650.684	100	1	Keg.	99,20	788.673.054	99,12
	2	Penyelenggaraan SLB Negeri 2 Buleleng	1	Keg.	100	978.882.372	100	1	Keg.	96,80	948.278.786	96,87
	3	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Jembrana	1	Keg.	100	1.034.607.560	100	1	Keg.	100,00	1.008.028.574	97,43
	4	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Tabanan	1	Keg.	100	1.046.339.248	100	1	Keg.	99,07	1.019.159.664	97,40
	5	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Badung	1	Keg.	100	2.595.552.092	100	1	Keg.	68,00	1.752.703.383	67,53
	6	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Gianyar	1	Keg.	100	1.343.581.560	100	1	Keg.	96,17	1.292.114.235	96,17
	7	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Bangli	1	Keg.	100	1.012.725.768	100	1	Keg.	100,00	997.359.707	98,48

	8	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Klungkung	1	Keg.	100	706.747.040	100	1	Keg.	100,00	685.624.383	97,01
	9	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Karangasem	1	Keg.	100	1.186.512.426	100	1	Keg.	100,00	1.160.374.355	97,80
	10	Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Denpasar	1	Keg.	100	719.687.160	100	1	Keg.	90,00	635.359.418	88,28
	11	Penyelenggaraan SLB Negeri 2 Denpasar	1	Keg.	100	800.094.168	100	1	Keg.	95,81	634.994.865	79,37
	12	Lomba Prestasi dan Kreatifitas Siswa PLB	1	Keg.	100	565.425.350	100	1	Keg.	100,00	538.254.900	95,19
	13	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Khusus	1	Keg.	100	96.132.600	100	1	Keg.	100,00	90.475.585	94,12
	14	Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Khusus	1	Keg.	100	98.139.700	100	1	Keg.	100,00	89.406.500	91,10
	15	Pembinaan Prestasi dan Kreativitas Siswa PLB ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	200.000.000	100	1	Keg.	100,00	184.846.322	92,42
	16	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Khusus	1	Keg.	100	1.000.000.000	100	1	Keg.	100,00	968.579.000	96,86
	17	Pembinaan Bahasa/Penyuluhan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali	1	Keg.	100	21.718.980.604	100	1	Keg.	94,89	20.609.663.723	94,89
III	PROGRAM PEMBINAAN SMA		86	Keg.	100	94.551.628.222	100	86	Keg.	100,00	81.862.163.059	86,58
	1	Penyelenggaraan Pembinaan SMA	1	Keg.	100	142.700.000	100	1	Keg.	100,00	129.236.100	90,56
	2	Penyelenggaraan SMAN 1 BANJAR	1	Keg.	100	910.848.936	100	1	Keg.	82,90	662.001.249	72,68
	3	Penyelenggaraan SMAN 2 BANJAR	1	Keg.	100	1.087.053.664	100	1	Keg.	89,77	975.842.488	89,77
	4	Penyelenggaraan SMAN 1 BUSUNGBIU	1	Keg.	100	999.823.824	100	1	Keg.	89,00	828.969.237	82,91
	5	Penyelenggaraan SMAN 2 BUSUNGBIU	1	Keg.	100	411.932.624	100	1	Keg.	99,62	390.979.266	94,91
	6	Penyelenggaraan SMAN 1 KUBUTAMBAHAN	1	Keg.	100	814.488.416	100	1	Keg.	100,00	782.632.887	96,09
	7	Penyelenggaraan SMAN 1 SAWAN	1	Keg.	100	584.844.208	100	1	Keg.	98,32	568.226.689	97,16
	8	Penyelenggaraan SMAN 1 SERIRIT	1	Keg.	100	610.216.312	100	1	Keg.	80,82	493.196.589	80,82
	9	Penyelenggaraan SMAN 1 SUKASADA	1	Keg.	100	389.016.312	100	1	Keg.	100,00	384.400.743	98,81
	10	Penyelenggaraan SMAN 1 TEJAKULA	1	Keg.	100	723.693.352	100	1	Keg.	84,54	584.565.098	80,78

	11	Penyelenggaraan SMAN 2 TEJAKULA	1	Keg.	100	439.760.520	100	1	Keg.	100,00	428.706.488	97,49
	12	Penyelenggaraan SMAN 1 SINGARAJA	1	Keg.	100	862.617.888	100	1	Keg.	75,00	680.996.685	78,95
	13	Penyelenggaraan SMAN 2 SINGARAJA	1	Keg.	100	718.593.026	100	1	Keg.	93,67	680.285.836	94,67
	14	Penyelenggaraan SMAN 3 SINGARAJA	1	Keg.	100	796.604.828	100	1	Keg.	100,00	674.149.203	84,63
	15	Penyelenggaraan SMAN 4 SINGARAJA	1	Keg.	100	922.117.888	100	1	Keg.	96,66	827.889.725	89,78
	16	Penyelenggaraan SMAN 1 GEROKGAK	1	Keg.	100	860.448.936	100	1	Keg.	100,00	852.689.113	99,10
	17	Penyelenggaraan SMAN 2 GEROKGAK	1	Keg.	100	369.760.520	100	1	Keg.	100,00	368.494.437	99,66
	18	Penyelenggaraan SMAN 1 ATAP TEJAKULA	1	Keg.	100	395.721.040	100	1	Keg.	96,57	382.840.476	96,75
	19	Penyelenggaraan SMAN 1 NEGARA	1	Keg.	100	1.604.548.384	100	1	Keg.	92,00	1.549.937.093	96,60
	20	Penyelenggaraan SMAN 2 NEGARA	1	Keg.	100	1.245.856.028	100	1	Keg.	100,00	1.244.277.753	99,87
	21	Penyelenggaraan SMAN 1 MELAYA	1	Keg.	100	1.408.466.302	100	1	Keg.	100,00	1.374.686.402	97,60
	22	Penyelenggaraan SMAN 1 MENDOYO	1	Keg.	100	932.766.824	100	1	Keg.	97,63	897.899.955	96,26
	23	Penyelenggaraan SMAN 2 MENDOYO	1	Keg.	100	975.569.976	100	1	Keg.	99,05	966.313.255	99,05
	24	Penyelenggaraan SMAN 1 PEKUTATAN	1	Keg.	100	934.809.456	100	1	Keg.	79,81	748.238.824	80,04
	25	Penyelenggaraan SMAN 1 BATURITI	1	Keg.	100	520.960.520	100	1	Keg.	83,00	454.297.391	87,20
	26	Penyelenggaraan SMAN 1 KEDIRI	1	Keg.	100	1.263.981.560	100	1	Keg.	82,85	1.050.629.111	83,12
	27	Penyelenggaraan SMAN 1 KERAMBITAN	1	Keg.	100	655.004.728	100	1	Keg.	95,00	606.614.936	92,61
	28	Penyelenggaraan SMAN 1 MARGA	1	Keg.	100	415.444.208	100	1	Keg.	90,65	358.592.445	86,32
	29	Penyelenggaraan SMAN 1 PENEBEL	1	Keg.	100	670.921.040	100	1	Keg.	99,47	667.333.062	99,47
	30	Penyelenggaraan SMAN 1 PUPUAN	1	Keg.	100	711.876.832	100	1	Keg.	72,00	511.930.949	71,91
	31	Penyelenggaraan SMAN 1 SELEMADEG	1	Keg.	100	608.288.416	100	1	Keg.	99,00	604.249.139	99,34

	32	Penyelenggaraan SMAN 1 TABANAN	1	Keg.	100	981.962.096	100	1	Keg.	90,00	895.499.765	91,19
	33	Penyelenggaraan SMAN 2 TABANAN	1	Keg.	100	1.281.653.664	100	1	Keg.	98,00	1.257.184.062	98,09
	34	Penyelenggaraan SMAN 1 ABIANSEMAL	1	Keg.	100	1.985.678.016	100	1	Keg.	70,00	1.189.219.003	59,89
	35	Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA	1	Keg.	100	1.859.623.640	100	1	Keg.	90,20	1.676.261.184	90,14
	36	Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA	1	Keg.	100	1.733.107.328	100	1	Keg.	83,74	1.450.115.408	83,67
	37	Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA UTARA	1	Keg.	100	1.911.091.016	100	1	Keg.	100,00	1.732.982.044	90,68
	38	Penyelenggaraan SMAN 1 MENGWI	1	Keg.	100	1.518.942.080	100	1	Keg.	100,00	1.428.844.620	94,07
	39	Penyelenggaraan SMAN 1 PETANG	1	Keg.	100	1.012.681.560	100	1	Keg.	89,68	907.343.265	89,60
	40	Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA SELATAN	1	Keg.	100	1.443.158.392	100	1	Keg.	85,40	1.290.451.682	89,42
	41	Penyelenggaraan SMAN 2 MENGWI	1	Keg.	100	2.082.481.796	100	1	Keg.	90,42	1.883.070.572	90,42
	42	Penyelenggaraan SMAN 1 PAYANGAN	1	Keg.	100	371.000.000	100	1	Keg.	89,00	328.973.300	88,67
	43	Penyelenggaraan SMAN 1 BLAHBATUH	1	Keg.	100	1.140.372.880	100	1	Keg.	100,00	1.016.245.657	89,12
	44	Penyelenggaraan SMAN 1 GIANYAR	1	Keg.	100	878.447.368	100	1	Keg.	95,00	836.611.843	95,24
	45	Penyelenggaraan SMAN 1 SUKAWATI	1	Keg.	100	915.244.208	100	1	Keg.	97,92	827.929.394	90,46
	46	Penyelenggaraan SMAN 1 TAMPAKSIRING	1	Keg.	100	851.935.632	100	1	Keg.	98,00	826.832.085	97,05
	47	Penyelenggaraan SMAN 1 TEGALLALANG	1	Keg.	100	622.116.312	100	1	Keg.	70,00	387.601.698	62,30
	48	Penyelenggaraan SMAN 1 UBUD	1	Keg.	100	978.576.832	100	1	Keg.	100,00	909.918.867	92,98
	49	Penyelenggaraan SMAN 1 BANGLI	1	Keg.	100	1.665.709.692	100	1	Keg.	98,00	1.632.125.825	97,98
	50	Penyelenggaraan SMAN 2 BANGLI	1	Keg.	100	1.202.186.288	100	1	Keg.	100,00	1.182.666.504	98,38
	51	Penyelenggaraan SMAN 1 SUSUT	1	Keg.	100	1.400.553.664	100	1	Keg.	64,56	919.686.932	65,67
	52	Penyelenggaraan SMAN 1 TEMBUKU	1	Keg.	100	683.521.040	100	1	Keg.	84,00	584.954.524	85,58

	53	Penyelenggaraan SMAN 1 KINTAMANI	1	Keg.	100	989.994.720	100	1	Keg.	100,00	971.158.930	98,10
	54	Penyelenggaraan SMAN 1 BANJARANGKAN	1	Keg.	100	527.972.104	100	1	Keg.	82,00	434.172.098	82,23
	55	Penyelenggaraan SMAN 1 DAWAN	1	Keg.	100	500.672.104	100	1	Keg.	100,00	471.423.798	94,16
	56	Penyelenggaraan SMAN 1 SEMARAPURA	1	Keg.	100	791.059.736	100	1	Keg.	71,74	591.111.579	74,72
	57	Penyelenggaraan SMAN 2 SEMARAPURA	1	Keg.	100	1.160.313.214	100	1	Keg.	98,00	981.299.136	84,57
	58	Penyelenggaraan SMAN 1 NUSA PENIDA	1	Keg.	100	574.963.416	100	1	Keg.	78,46	430.976.293	74,96
	59	Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP LEMBONGAN	1	Keg.	100	325.505.764	100	1	Keg.	76,00	297.682.662	91,45
	60	Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP KLUMPU	1	Keg.	100	343.934.520	100	1	Keg.	100,00	299.972.317	87,22
	61	Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA	1	Keg.	100	399.148.936	100	1	Keg.	88,00	358.830.281	89,90
	62	Penyelenggaraan SMAN 1 BEBANDEM	1	Keg.	100	673.732.624	100	1	Keg.	90,16	617.774.586	91,69
	63	Penyelenggaraan SMAN 1 KUBU	1	Keg.	100	534.386.840	100	1	Keg.	99,16	501.729.543	93,89
	64	Penyelenggaraan SMAN 1 AMLAPURA	1	Keg.	100	739.034.224	100	1	Keg.	96,62	650.760.598	88,06
	65	Penyelenggaraan SMAN 2 AMLAPURA	1	Keg.	100	854.632.624	100	1	Keg.	80,26	688.201.271	80,53
	66	Penyelenggaraan SMAN 3 AMLAPURA	1	Keg.	100	736.261.784	100	1	Keg.	100,00	703.785.738	95,59
	67	Penyelenggaraan SMAN 1 MANGGIS	1	Keg.	100	776.093.144	100	1	Keg.	99,00	760.978.234	98,05
	68	Penyelenggaraan SMAN 1 RENDANG	1	Keg.	100	740.232.624	100	1	Keg.	96,88	717.077.857	96,87
	69	Penyelenggaraan SMAN 1 SELAT	1	Keg.	100	536.544.208	100	1	Keg.	100,00	518.572.948	96,65
	70	Penyelenggaraan SMAN 1 SIDEMEN	1	Keg.	100	509.072.104	100	1	Keg.	100,00	468.127.098	91,96
	71	Penyelenggaraan SMAN 1 DENPASAR	1	Keg.	100	1.176.321.040	100	1	Keg.	95,00	980.891.627	83,39
	72	Penyelenggaraan SMAN 2 DENPASAR	1	Keg.	100	916.472.104	100	1	Keg.	89,00	752.116.156	82,07
	73	Penyelenggaraan SMAN 3 DENPASAR	1	Keg.	100	913.821.040	100	1	Keg.	83,60	643.921.281	70,46

	74	Penyelenggaraan SMAN 4 DENPASAR	1	Keg.	100	1.104.393.144	100	1	Keg.	100,00	1.026.170.202	92,92
	75	Penyelenggaraan SMAN 5 DENPASAR	1	Keg.	100	887.072.104	100	1	Keg.	75,00	546.539.833	61,61
	76	Penyelenggaraan SMAN 6 DENPASAR	1	Keg.	100	812.860.520	100	1	Keg.	90,59	734.863.553	90,40
	77	Penyelenggaraan SMAN 7 DENPASAR	1	Keg.	100	1.234.478.408	100	1	Keg.	94,42	1.011.898.462	81,97
	78	Penyelenggaraan SMAN 8 DENPASAR	1	Keg.	100	912.272.104	100	1	Keg.	79,04	721.057.320	79,04
	79	Penyelenggaraan SMAN BALI MANDARA	1	Keg.	100	8.803.573.996	100	1	Keg.	100,00	8.556.605.974	97,19
	80	Debat Bahasa SMA	1	Keg.	100	158.750.000	100	1	Keg.	100,00	154.953.200	97,61
	81	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMA Ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	456.000.000	100	1	Keg.	100,00	392.988.200	86,18
	82	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	444.000.000	100	1	Keg.	100,00	422.854.150	95,24
	83	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	356.250.000	100	1	Keg.	100,00	294.803.500	82,75
	84	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA	1	Keg.	100	8.105.149.000	100	1	Keg.	100,00	7.898.223.115	97,45
	85	Penyelenggaraan SMAN 2 ABIANSEMAL	1	Keg.	100	3.023.940.000	100	1	Keg.	19,47	588.906.722	19,47
	86	Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA SELATAN	1	Keg.	100	3.023.940.000	100	1	Keg.	100,00	1.776.113.939	58,74
IV	PROGRAM PEMBINAAN SMK		59	Keg.	100	105.347.885.408	100	59	Keg.	100,00	92.804.144.889	88,09
	1	Penyelenggaraan Pembinaan SMK	1	Keg.	100	150.000.000	100	1	Keg.	93,90	140.840.000	93,89
	2	Penyelenggaraan SMKN 1 SUKASADA	1	Keg.	100	1.558.259.456	100	1	Keg.	91,00	1.420.436.397	91,16
	3	Penyelenggaraan SMKN 1 KUBUTAMBAHAN	1	Keg.	100	1.212.027.226	100	1	Keg.	90,00	1.079.085.414	89,03
	4	Penyelenggaraan SMKN 1 SAWAN	1	Keg.	100	1.120.432.624	100	1	Keg.	76,84	860.914.636	76,84
	5	Penyelenggaraan SMKN 1 SERIRIT	1	Keg.	100	1.695.425.768	100	1	Keg.	99,10	1.362.508.615	80,36
	6	Penyelenggaraan SMKN 2 SERIRIT	1	Keg.	100	1.099.259.456	100	1	Keg.	100,00	1.010.751.011	91,95

	7	Penyelenggaraan SMKN 1 TEJAKULA	1	Keg.	100	1.857.457.328	100	1	Keg.	80,00	1.407.824.024	75,79
	8	Penyelenggaraan SMKN 1 BUSUNGBIU	1	Keg.	100	747.921.040	100	1	Keg.	97,24	727.211.329	97,23
	9	Penyelenggaraan SMKN 1 SINGARAJA	1	Keg.	100	2.086.488.928	100	1	Keg.	75,81	1.283.984.655	61,54
	10	Penyelenggaraan SMKN 2 SINGARAJA	1	Keg.	100	2.208.892.080	100	1	Keg.	94,00	2.051.379.661	92,87
	11	Penyelenggaraan SMKN 1 NEGARA	1	Keg.	100	1.996.874.704	100	1	Keg.	90,81	1.823.167.644	91,30
	12	Penyelenggaraan SMKN 2 NEGARA	1	Keg.	100	1.844.630.496	100	1	Keg.	91,00	1.592.323.128	86,32
	13	Penyelenggaraan SMKN 3 NEGARA	1	Keg.	100	1.048.210.720	100	1	Keg.	91,00	970.997.521	92,63
	14	Penyelenggaraan SMKN 4 NEGARA	1	Keg.	100	1.435.191.016	100	1	Keg.	86,11	1.235.732.331	86,10
	15	Penyelenggaraan SMKN 5 NEGARA	1	Keg.	100	1.461.552.600	100	1	Keg.	90,90	1.328.490.984	90,90
	16	Penyelenggaraan SMKN 1 TABANAN	1	Keg.	100	1.537.315.248	100	1	Keg.	83,18	1.296.226.460	84,32
	17	Penyelenggaraan SMKN 2 TABANAN	1	Keg.	100	1.206.421.040	100	1	Keg.	100,00	960.531.815	79,62
	18	Penyelenggaraan SMKN 3 TABANAN	1	Keg.	100	2.266.252.600	100	1	Keg.	83,00	1.743.434.641	76,93
	19	Penyelenggaraan SMKN 1 KUTA SELATAN	1	Keg.	100	3.313.284.160	100	1	Keg.	87,94	2.860.912.234	86,35
	20	Penyelenggaraan SMKN 1 PETANG	1	Keg.	100	748.309.456	100	1	Keg.	87,95	661.145.681	88,35
	21	Penyelenggaraan SMKN 1 GIANYAR	1	Keg.	100	1.399.010.520	100	1	Keg.	100,00	1.361.695.670	97,33
	22	Penyelenggaraan SMKN 1 SUKAWATI	1	Keg.	100	736.933.888	100	1	Keg.	85,00	634.461.024	86,09
	23	Penyelenggaraan SMKN 2 SUKAWATI	1	Keg.	100	1.844.021.040	100	1	Keg.	91,00	1.612.332.462	87,44
	24	Penyelenggaraan SMKN 3 SUKAWATI	1	Keg.	100	973.960.520	100	1	Keg.	81,00	793.271.288	81,45
	25	Penyelenggaraan SMKN 1 TAMPAKSIRING	1	Keg.	100	1.804.268.512	100	1	Keg.	88,65	1.599.458.669	88,65
	26	Penyelenggaraan SMKN 1 TEGALLALANG	1	Keg.	100	1.828.125.768	100	1	Keg.	100,00	1.572.936.660	86,04
	27	Penyelenggaraan SMKN 2 TEGALLALANG	1	Keg.	100	361.434.200	100	1	Keg.	95,00	343.213.903	94,96

	28	Penyelenggaraan SMKN 1 MAS UBUD	1	Keg.	100	2.035.389.600	100	1	Keg.	96,57	1.891.357.124	92,92
	29	Penyelenggaraan SMKN 1 SUSUT	1	Keg.	100	1.140.314.184	100	1	Keg.	100,00	1.114.823.950	97,76
	30	Penyelenggaraan SMKN 1 TEMBUKU	1	Keg.	100	1.066.326.832	100	1	Keg.	100,00	1.055.877.053	99,02
	31	Penyelenggaraan SMKN 1 BANGLI	1	Keg.	100	1.828.885.224	100	1	Keg.	100,00	1.817.922.701	99,40
	32	Penyelenggaraan SMKN 2 BANGLI	1	Keg.	100	2.274.079.432	100	1	Keg.	91,00	2.100.162.769	92,35
	33	Penyelenggaraan SMKN 3 BANGLI	1	Keg.	100	748.931.560	100	1	Keg.	95,00	725.981.365	96,94
	34	Penyelenggaraan SMKN 4 BANGLI	1	Keg.	100	830.187.352	100	1	Keg.	100,00	807.462.972	97,26
	35	Penyelenggaraan SMKN 1 KINTAMANI	1	Keg.	100	837.881.560	100	1	Keg.	68,00	811.407.415	96,84
	36	Penyelenggaraan SMKN 2 KINTAMANI	1	Keg.	100	583.584.200	100	1	Keg.	76,00	492.278.559	84,35
	37	Penyelenggaraan SMKN 3 KINTAMANI	1	Keg.	100	1.223.338.928	100	1	Keg.	90,00	1.033.143.639	84,45
	38	Penyelenggaraan SMKN 1 KLUNGKUNG	1	Keg.	100	2.507.106.392	100	1	Keg.	85,00	1.696.846.475	67,68
	39	Penyelenggaraan SMKN 1 NUSA PENIDA	1	Keg.	100	1.946.477.232	100	1	Keg.	94,06	1.860.876.932	95,60
	40	Penyelenggaraan SMKN 1 BEBANDEM	1	Keg.	100	818.538.928	100	1	Keg.	60,00	685.947.420	83,80
	41	Penyelenggaraan SMKN 1 ABANG	1	Keg.	100	1.553.887.352	100	1	Keg.	95,93	1.520.703.468	97,86
	42	Penyelenggaraan SMKN 1 KUBU	1	Keg.	100	1.907.808.240	100	1	Keg.	98,44	1.641.330.469	86,03
	43	Penyelenggaraan SMKN 1 MANGGIS	1	Keg.	100	1.892.219.976	100	1	Keg.	94,69	1.628.058.892	86,04
	44	Penyelenggaraan SMKN 1 AMLAPURA	1	Keg.	100	2.121.987.864	100	1	Keg.	98,33	2.017.266.962	95,06
	45	Penyelenggaraan SMKN 1 DENPASAR	1	Keg.	100	4.192.483.096	100	1	Keg.	67,20	2.817.550.283	67,20
	46	Penyelenggaraan SMKN 2 DENPASAR	1	Keg.	100	1.670.454.728	100	1	Keg.	84,00	1.391.705.927	83,31
	47	Penyelenggaraan SMKN 3 DENPASAR	1	Keg.	100	2.480.437.864	100	1	Keg.	90,00	2.231.565.886	89,97
	48	Penyelenggaraan SMKN 4 DENPASAR	1	Keg.	100	1.517.921.828	100	1	Keg.	99,00	1.471.962.027	96,97

	49	Penyelenggaraan SMKN 5 DENPASAR	1	Keg.	100	2.709.968.912	100	1	Keg.	90,00	2.214.802.826	81,73
	50	Penyelenggaraan SMKN BALI MANDARA	1	Keg.	100	12.251.087.872	100	1	Keg.	95,70	11.466.503.218	93,60
	51	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK	1	Keg.	100	8.661.522.000	100	1	Keg.	99,19	8.591.251.593	99,19
	52	Lomba Kompetensi Siswa SMK	1	Keg.	100	888.426.000	100	1	Keg.	100,00	855.048.900	96,24
	53	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa SMK ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	543.574.000	100	1	Keg.	100,00	485.732.800	89,36
	54	Festival Lomba Seni SMK (FLS2N) ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	421.000.000	100	1	Keg.	100,00	352.696.400	83,78
	55	Penyelenggaraan SMKN 3 SINGARAJA	1	Keg.	100	3.912.980.872	100	1	Keg.	81,00	3.173.814.933	81,11
	56	Penyelenggaraan SMKN 1 GEROKGAK	1	Keg.	100	888.548.936	100	1	Keg.	96,00	813.928.099	91,60
	57	FGD Pengembangan Pendidikan SMK 4 Tahun	1	Keg.	100	50.574.050	100	1	Keg.	100,00	47.283.775	93,49
	58	Lomba Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan SMK Berbasis Web	1	Keg.	100	100.000.000	100	1	Keg.	100,00	87.550.200	87,55
	59	Persiapan SMK Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1	Keg.	100	150.000.000	100	1	Keg.	81,99	126.347.000	84,23
	60	Pemetaan Program Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	1	Keg.	100	50.000.000	100	1	Keg.	79,40	39.685.000	79,37
V	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		6	Keg.	100	1.410.413.000	100	6	Keg.	100,00	1.063.517.200	75,40
	1	Penilaian Penetapan dan Penataran Angka Kredit Guru dan Pengawas di Provinsi Bali	1	Keg.	100	155.663.000	100	1	Keg.	94,12	136.611.600	87,76
	2	Manajemen Operasional Pemberian Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Keg.	100	70.000.000	100	1	Keg.	91,49	50.017.800	71,45
	3	Olimpiade Sains Guru MIPA SMA/SMK	1	Keg.	100	100.000.000	100	1	Keg.	100,00	89.765.800	89,77
	4	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	1	Keg.	100	334.750.000	100	1	Keg.	93,11	312.270.800	93,28
	5	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Provinsi Bali	1	Keg.	100	450.000.000	100	1	Keg.	100,00	200.511.700	44,56
	6	Pengkajian Nilai - Nilai Kearifan Lokal Bali dan Workshop GTK jenjang SMA/SMK/SLB	1	Keg.	100	300.000.000	100	1	Keg.	90,00	274.339.500	91,45
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN		18	Keg.	100	3.855.050.200	100	18	Keg.	100,00	3.392.112.333	87,99

	1	Belanja jasa surat menyurat	1	Keg.	100	4.500.000	100	1	Keg.	50,00	3.300.000	73,33
	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1	Keg.	100	73.500.000	100	1	Keg.	87,00	71.819.200	97,71
	3	Penyediaan alat tulis kantor	1	Keg.	100	25.000.000	100	1	Keg.	98,00	24.457.400	97,83
	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	Keg.	100	17.000.000	100	1	Keg.	100,00	17.000.000	100,00
	5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Keg.	100	4.800.000	100	1	Keg.	100,00	4.800.000	100,00
	6	Penyediaan makanan dan minuman	1	Keg.	100	20.000.000	100	1	Keg.	100,00	19.995.500	99,98
	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1	Keg.	100	70.000.000	100	1	Keg.	100,00	57.513.490	82,16
	8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	Keg.	100	150.000.000	100	1	Keg.	75,00	132.700.000	88,47
	9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1	Keg.	100	15.000.000	100	1	Keg.	63,00	9.800.000	65,33
	10	Penyusunan Kalender Pendidikan	1	Keg.	100	50.000.000	100	1	Keg.	100,00	49.278.500	98,56
	11	Lomba Cerdas cermat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	1	Keg.	100	350.000.000	100	1	Keg.	100,00	334.904.798	95,69
	12	Penyelenggaraan USBN tingkat Provinsi	1	Keg.	100	340.000.000	100	1	Keg.	100,00	281.538.200	82,81
	13	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1	Keg.	100	845.250.200	100	1	Keg.	100,00	807.643.797	95,55
	14	Pelatihan dan Lomba Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK	1	Keg.	100	320.000.000	100	1	Keg.	100,00	263.880.200	82,46
	15	Lomba Pemanfaatan multi Kuis Ki Hajar ke Tingkat Nasional	1	Keg.	100	400.000.000	100	1	Keg.	100,00	349.334.398	87,33
	16	Pembuatan Konten Pembelajaran TIK Bidang Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal	1	Keg.	100	220.000.000	100	1	Keg.	91,11	115.567.600	52,53
	17	Manajemen Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbasis TIK	1	Keg.	100	200.000.000	100	1	Keg.	100,00	173.950.501	86,98
	18	Pembuatan Studio Mini	1	Keg.	100	750.000.000	100	1	Keg.	84,58	674.628.749	89,95

Permasalahan dan Solusi

1. **Permasalahan**

   Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam pelaksanaan tahun anggaran 2019:

   a) Masih lemahnya kinerja para Kepala Tata Usaha (KTU)
   b) Proses sertifikasi guru-guru SLB.
   c) Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai.
   d) Partisipasi komite sekolah sangat terbatas.
   e) Tata kelola penganggaran sekolah masih belum optimal

2. **Solusi**

   Beberapa solusi yang direncanakan:

   a) Menguatkan sistem layanan managemen berbasis TIK
   b) Melakukan kajian analisis kebutuhan jumlah Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang ideal.
   c) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan managemen bagi Kepala Tata Usaha (KTU)
   d) Melaksanakan kajian akademis terkait masalah sertifikasi guru-guru SLB.
   e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Dirjen P4TK Kemendikbud. RI terkait dengan proses sertifikasi guru-guru SLB yang bermasalah.
   f) Menginventarisasi sekolah-sekolah dengan daya dukung sarana prasarana yang kurang memadai.
   g) Membuat perencanaan yang lebih baik terkait pemenuhan sarana prasarana sekolah.
   h) Melaksanakan kegiatan revitalisasi komite sekolah.
   i) Melakukan analisis program/kegiatan yang memiliki deviasi masih tinggi
   j) Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang tidak direalisasikan.

2. Kesehatan

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah maka peran Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan yaitu Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi penduduk miskin, meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit baik pencegahan primer, sekunder, maupun tertier terutama pada penyakit-penyakit yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Bali, meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan, mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan urusan wajib kesehatan berupa yaitu pelaksanaan program dan dan kegiatan urusan kesehatan dan Standar Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan. Tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengampu 18 program, 142 kegiatan dan 2 kegiatan pengampu SPM.

Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta UPT yaitu : Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Bali, Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, UPT Kesehatan Pengobatan Tradisional, UPT RSUD Bali Mandara, UPT RS Mata Bali Mandara dan UPT RS Jiwa Provinsi Bali.

Program dan Kegiatan

1. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kegiatan :

a. Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Pelayanan Kefarmasian
b. Pengawasan dan Pengendalian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
c. Pembangunan Gedung Pusat Pengolahan PascaPanen Tanaman Obat (P4TO)

2. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan :

a. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
b. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
b. Pengembangan Pengobatan Tradisional
c. Penanggulangan Bencana Kluster Kesehatan
d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
e. Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
f. Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
g. Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional
h. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sehat

4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

a. Peningkatan Kesehatan Keluarga
b. Upaya Kesehatan Kerja
c. Upaya Kesehatan Olahraga
d. Pengembangan Promosi Kesehatan dan Penggerakan Masyarakat Hidup Sehat
e. Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat

f. Peningkatan Kesehatan Masyarkat melalui Dana BOK

g. Penanggulangan Stunting

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan :

a. Pengembangan Kab/Kota Sehat

6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kegiatan :

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML)

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ)

c. Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS

7. Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi

Kegiatan :

a. Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)

b. Pelaksanaan Imunisasi Daar Lengkap pada Bayi (Usia 0-11 bulan)

c. Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan

8. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kegiatan :

a. Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

b. Pelaksanaan Kesehatan Jiwa dan Napza di Kab/Kota

Selain Program Prioritas, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai Program pendukung yaitu:

9. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyeiaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

k. Upacara Keagamaan

l. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

m. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

p. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

q. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

r. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

s. Penyusunan laporan keuangan PD

UPT Balai Laboratorium Kesehatan

1. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

UPT Bapelkesmas

1. Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan

UPT Kesehatan Pengobatan Tradisional

1. Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga

UPT. RSUD Bali Mandara

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Bali Mandara
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT RSUD Bali Mandara

UPT. RS Mata Bali Mandara

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Mata Bali Mandara
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara

UPT. RS Jiwa Provinsi Bali

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Provinsi : 100%
2. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi : 100%

Penghargaan yang diraih Dinkes. Provinsi Bali tahun 2019 :

Penghargaan Tingkat Nasional :

1. Pelaporan dan Pencapaian SPM (Kemenkes) kategori Provinsi Terbaik dalam Pelaporan dan Pencapaian SPM
2. Juara I LSS Tingkat Nasional (Kemenkes) :

- Kategori Pencapaian Terbaik Lomba Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2019 oleh Tim Pembina UKS/M Provinsi Bali

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib

SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib no 2 (Kesehatan) adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta 6 UPT yaitu Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Bali, Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas), Kesehatan Pengobatan Tradisionali (JKMB), UPT RSUD Bali Mandara, UPT RS Mata Bali Mandara dan UPT RS Jiwa Provinsi Bali serta Perangkat Daerah lain seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan

Jumlah total pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta 6 UPT sebanyak 1.231 orang dengan rincian PNS sebanyak 349 orang dan non PNS sebanyak 882 orangn. Kwalifikasi pendidikan PNS: Strata 2 (90 orang), Strata 1/Diploma IV (144 orang), Diploma 3 (29 orang), Diploma 1 (1 orang), SMA (79 orang), SMP (3 Orang) dan SD (3 orang). Kwalifikasi pendidikan non PNS : Strata 2 (35 orang), Strata 1/Diploma IV (305 orang), Diploma 3 (438 orang), Diploma 1 (1 orang), SMA (99 orang) dan SMP (4 Orang).

Alokasi Dan Realisasi Anggaran

- Alokasi anggaran APBD Provinsi di Dinas Kesehatan beserta 6 UPTD setelah perubahan sejumlah Rp.616.227.809.297.- dan terealisasi Rp.544.553.970.645,- (88,37%) yang terdiri dari Belanja Langsung Rp.490.828.828.844 terealisasi Rp. 424.115.456.118,- (86,41%) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 125.398.980.453.dengan realisasi Rp.120.438.514.527,- (96,04%)
- Anggaran Dekonsentrasi (APBN) di Dinas Kesehatan sebesar Rp. 20.283.135.000,- dan realisasi keuangan Rp. 19.434.121.607,- (95,81 %).

Proses perencanaan pembangunan

a) Forum SKPD

Dimulai dari pertemuan perencanaan di Kab/Kota (Dinas Kesehatan,Puskesmas, Bappeda, PU, Bangdes) yang terkait dengan bidang Kesehatan dalam wadah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab/Kota. Dalam pertemuan dimaksud tetap dalam satu kerangka berpikir yang didasari pada Rencana Strategik atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah disusun termasuk juga Standar Pelayanan Minimal Kab/Kota. Diupayakan adanya sinergisme perencanaan anggaran,sehingga tidak terjadi suatu tumpang tindih anggaran dengan melihat tugas dan wewenang/fungsi Provinsi dan Kab/Kota dengan indikator kinerja yang terukur. Output berupa perencanaan awal (Forum SKPD) di Kab/Kota sebagai bahan Musrenbang Kab/Kota termasuk di Provinsi.

b) Musrenbang

Bahan perencanaan Kab/Kota dan Provinsi akan diangkat dalam daftar usulan perencanaan (Program/Kegiatan) di Bappeda Provinsi dengan melibatkan seluruh instansi

terkait termasuk Staf Ahli Pembangunan,guna lebih menitik beratkan pada Isu Strategis dan program yang bersifat Inovatif.

c) Penyusunan RKA

Program/kegiatan yang telah disusun sesuai dengan PPAS (Pedoman Plafon Anggaran Sementara) dan diinput dalam bentuk Software dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 13/2006 dan Penyempurnaannya ke Permendagri Nomor 59/2007 dan Permendagri 21/20111 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang terbagi dalam Belanja Langsung (Operasional Kegiatan) dan Belanja Tidak Langsung (Gaji, Bantuan Hibah/Sosial),yang mana outputnya adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA).

d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Setelah melalui proses di DPRD dan verifikasi di Kemendagri di Jakarta, maka input data Software menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana di Dinkes Prov. Bali beserta 6 UPT dari segi ketersediaan rata-rata cukup dengan kondisi baik. Sarana dan prasarana tersebut antara lain : 8 bidang tanah dengan luas 6.464m^2, 12 unit bangunan gedung, alat angkut 84 unit, alat bengkel dan alat ukur 15 unit, alat pertanian/peternakan 5 unit, alat kantor dan rumah tangga 726 unit, alat studio dan komunikasi 23 unit, alat kedokteran 22 unit, alat laboratorium 42 unit, alat keamanan 1 set, jalan dan jembatan 1 unit, bangunan air/irigasi 1 unit dan asset lainnya 4 unit.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program dan kegiatan

1. Semakin meningkatnya masyarakat yang menderita penyakit jantung koroner, stroke, kanker, DM serta gangguan jiwa
2. Kematian Ibu di Bali masih sulit diturunkan secara signifikan walaupun faktor pendukung sangat memadai namun kecataan hambatan juga sangat komplek antara lain:

a) Meskipun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudak baik, tetapi cakupan dan kualitas pelayanan belum optimal, hal ini disebabkan oleh belum meratanya distribusi Sumber Daya manusia (SDM) kesehatan sampai dengan daerah perifer.

b) Sumber daya yang cukup belum didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai,

c) Kepatuhan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap standar pelayanan, mencakup sumber daya fisik, sistem maupun sumber daya manusia belum optimal.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsumsi garam beryodium dan sulitnya mendapatkan garam beryodium di pasaran

4. Perilaku Gaya Hidup Bersih dan Sehat Masih Kurang
5. Masih ditemukannya kasus stunting di Provinsi Bali dengan prevalensi stunting sebesar 19 %
6. Kesulitan dalam pengawasan, pengendalian penularan dan pengobatan HIV/AIDS dikarenakan pada saat penertiban lokasi hotspot penularan, penghuninya menyebar.
7. Penduduk tanpa identitas tanpa jaminan kesehatan sehingga menyulitkan dalam pelayanan kesehatan.
8. Belum Terbentuknya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi (One Data).
9. Masih kurangnya kemampuan/kapasitas laboratorium dalam penegakan diagnosis untuk beberapa penyakit potensial KLB.

Solusi

1. Penguatan Manajemen Program Dan SDM
2. Melaksanakan sosialisasi dan mendorong Kab/Kota untuk membuat regulasi terkait konsumsi garam beryodium serta meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat
3. Implementasi Inpres No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
4. Mewujudkan Kemandirian Keluarga Dalam 100 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
5. Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dan masyarakat terkait penanganan lokasi hotspot penularan dan penertiban penduduk tanpa identitas
6. Penguatan komitmen lintas program dan lintas sektor perlu ditingkatkan untuk penanggulangan stunting.
7. Mendorong Faskes dan Dinas Kesehatan berkomitmen dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan terintegrasi (one data)
8. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait baik lintas program maupun lintas sektor
9. Pemantapan pelaksanaan program yang mengacu pada hasil evaluasi kegiatan tahun 2018
10. Meningkatkan kemampuan kapasitas laboratorium yang ada di Provinsi Bali dalam rangka penegakan diagnosis beberapa KLB yang terjadi di Provinsi Bali melalui peningkatan peralatan dan kemampuan sumber daya manusia
11. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota terkait Pemerataan SDM Kesehatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

Kebijakan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum di Provinsi Bali diprioritaskan untuk menunjang sektor-sektor andalan dalam hal penyediaan kebutuhan dasar,

penyediaan akses jalan untuk menunjang peningkatan ekonomi, sektor-sektor lain untuk mendukung peningkatan taraf kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan 22 misi yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali mengampu 4 misi yaitu Misi ke 11, 16, 18 dan 21. Upaya mendorong percepatan pengembangan wilayah secara berimbang dan terpadu, antara lain ditempuh melalui kebijakan pemerataan penyediaan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum antar wilayah yang dilaksanakan secara bertahap, melalui program prioritas, meliputi :

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi	a) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi; b) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi; c) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	a) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi; b) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun; c) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	a) Kegiatan Pengelolaan Danau, Waduk dan Sumber Daya Air Lainnya; b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air; c) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai.
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.	a) Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum; b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
5	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman.	a) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah; b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman.
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.	a) Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan; b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan.
7	Program Pembinaan Jasa Konstruksi.	a) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b) Kegiatan Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; c) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi.
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat.	a) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan; b) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat; c) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Kualitas Air;
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum.	Kegiatan Pelayanan Air Minum pada BLUD.
10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah.	Kegiatan Pelayanan Air Limbah pada BLUD.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi
   a) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi

      Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan sepanjang 14,90 Km dan Jembatan sepanjang 10 M' bersumber dari APBD Murni dan peningkatan jalan sepanjang 5,30 Km bersumber dari DAK dengan penjelasan sebagai berikut : Sumber Dana APBD Murni, terdiri dari 7 (tujuh) paket pekerjaan :

      1. Jasa Penilai Pertanahan/Appraisal;
      2. Pengadaan/pembebasan lahan, Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Ruas Pembangunan Short Cut Jalan Bts. Kota Singaraja – Mengwitani;
      3. Peningkatan Jalan Provinsi Pupuan - Pekutatan 5 Km di Kabupaten Buleleng;
      4. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Buleleng - Kubutambahan 4,50 Km di Kabupaten Buleleng;
      5. Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Buruan - Batukaru 2,90 Km di Kabupaten Tabanan;
      6. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Kota Bangli - Nongan 2,50 Km di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem;
      7. Pembangunan Jembatan Tukad Yeh Sumi 10 Meter di Kabupaten Tabanan.

      Sumber Dana DAK, terdiri dari 1 (satu) paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Lateng - Madenan - Bondalem 5,30 Km di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng (DAK).

   b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi

      Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi terdiri dari 2 (dua) jenis penanganan yaitu : pemeliharaan rutin dan pemeliharaan yang bersifat berkala. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi ini bertujuan untuk tetap terpeliharanya ruas-ruas jalan Provinsi sepanjang 743,34 Km agar tetap mampu mendukung beban lalu lintas diatasnya. Sedangkan rehabilitasi/pemeliharaan berkala bertujuan untuk pencegahan terjadinya kerusakan jalan yang lebih luas dan agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

   c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi bersumber dari APBD Murni, dengan penjelasan lingkup penanganan sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Antosari - Pupuan Sepanjang 3,40 Km;
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jl. Raya Puputan Nitimandala (DPS) Sepanjang 3,20 Km;
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Penelokan - BTS. Buleleng Sepanjang 1,50 Km;
5. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas Jalan Provinsi;
6. Pemeliharaan Trotoar pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 Kab/Kota.

d) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan bertujuan antara lain agar tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan spesifikasi teknis, pekerjaan supervisi sehingga pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan serta tersedianya data kondisi jalan dan jembatan, kondisi lalu lintas dan histori jalan. Paket pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain :

1. Survey Lalulintas Pada Ruas Jalan Provinsi;
2. Survey Kondisi Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Semester I;
3. Survey Kondisi Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Semester II;
4. Survey Kondisi Jembatan Provinsi;
5. Perencanaan Leger Jalan Sepanjang 92,78 Km;
6. Perencanaan Teknik Jalan Provinsi Sepanjang 55,78 Km;
7. Perencanaan Teknik Jembatan Kawasan Suci Besakih;
8. Perencanaan Teknik Jaringan Jalan Kawasan Suci Besakih;
9. Perencanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah Ruas Jalan Baru Bts. Kota Singaraja-Mengwitani;
10. Perencanaan Teknik Jalan (DED) Ruas Jalan Baru Bts. Kota Singaraja-Mengwitani;
11. Dokumen Lingkungan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja-Mengwitani (Shortcut 1 dan 2);
12. Dokumen Lingkungan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja-Mengwitani (Shortcut 7, 8, 9 dan 10);
13. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 3,40 Km di Kabupaten Tabanan (Jalan Provinsi Antosari-Pupuan);
14. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 1,50 Km di Kabupaten Buleleng (Jalan Provinsi Sp. Penelokan-Bts. Buleleng);
15. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 3,20 Km di Kota Denpasar (Jalan Provinsi Jln. Raya Puputan Nitimandala (DPS));
16. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 5 Km di Kabupaten Buleleng (Jalan Provinsi Pupuan-Pekutatan);

17. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 4,50 Km di Kabupaten Buleleng (Jalan Provinsi Bts. Buleleng-Kubutambahan);
18. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 2,90 Km di Kabupaten Tabanan (Jalan Provinsi Sp. Buruan-Batukaru);
19. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 2,50 Km di Kabupaten Bangli dan Karangasem (Jalan Provinsi Bts. Kota Bangli-Nongan);
20. Pengawasan Teknik Jembatan Provinsi 10 M di Kabupaten Tabanan (Jembatan Provinsi Tukad Yeh Sumi).
21. Pengawasan Teknik Jalan Provinsi 5,30 Km di Kabupaten Bangli dan Buleleng (Jalan Provinsi Sp. Lateng-Madenan-Bondalem) (DAK).

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan jaringan irigasi yang meliputi 6 (enam) paket pekerjaan antara lain :
   1) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tembuku di Kabupaten Bangli;
   2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Yeh Leh di Kabupaten Tabanan dan Jembrana;
   3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Oongan di Kota Denpasar;
   4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gerana di Kabupaten Badung;
   5) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Balian di Kabupaten Tabanan;
   6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Palasari di Kabupaten Jembrana (DAK).

b) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun diarahkan untuk meningkatkan pelayanan/ penyediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan pertanian dalam arti luas. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan (O&P) Irigasi meliputi 14 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Bali yang tersebar di 8 kabupaten/kota (Kab.Jembrana, Kab. Buleleng, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab.Gianyar, Kab. Bangli, Kab. Klungkung dan Kota Denpasar). Penanganan paket pekerjaan yaitu :
   1) Pemeliharaan Rumah Jaga Bendung dan Tembok Pagar Berawantangi, D.I. Palasari Kabupaten Jembrana;
   2) Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi (Pekerjaan Swakelola).

c) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi penyusunan perencanaan teknis dan pengawasan teknis paket pekerjaan yang meliputi 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu :
   1) Studi Potensi dan DED Pengembangan Jaringan Irigasi D.I. Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar;
   2) Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tembuku di Kab. Bangli dan D.I. Balian di Kab. Tabanan;
   3) Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Palasari di Kab. Jembrana (DAK).

3) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
   a) Kegiatan Pengelolaan Danau, Waduk dan Sumber Daya Air Lainnya, pada kegiatan ini meliputi 1 paket pekerjaan yaitu : Pemeliharaan Konstruksi Pengaman Pantai, Embung, Danau, Waduk, dan SDA lainnya (Swakelola).
   b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air meliputi penyusunan perencanaan teknis dan pengawasan paket pekerjaan, dengan uraian paket pekerjaan antara lain :
      1) Penyusunan Database Pantai dan Embung Aset Provinsi Bali;
      2) Penyusunan Kajian Akademis dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan SDA;
      3) Perencanaan Pantai Syahbandar di Kab. Karangasem;
      4) Perencanaan Pengaman Sungai di Desa Antiga di Kab. Karangasem;
      5) Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai Pangkung Tibah di Kab. Tabanan;
      6) Perencanaan Pembangunan Tebing Pengaman Sungai di SMAN 1 Semarapura di Kab. Klungkung.
   c) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, kegiatan ini bertujuan untuk penanganan terhadap abrasi pantai yang terus terjadi, pada tahun 2019 meliputi 4 (empat) paket pekerjaan yaitu :
      a) Pengamanan Pantai Bondalem di Kabupaten Buleleng;
      b) Pengamanan Pantai Sembiran di Kabupaten Buleleng;
      c) Pengamanan Pantai Seraya di Kabupaten Karangasem;
      d) Pengamanan Pantai Ujung di Kabupaten Karangasem.
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
   a) Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum

      Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum bertujuan untuk memperluas cakupan layanan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan yang terdiri atas 4 (empat) paket pekerjaan, antara lain :
      1) Pembangunan Sumur Uji, Prasarana Air Minum di Banjar Selombo, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
      2) Pengembangan SPAM Songan A dan Songan B, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
      3) Pembangunan SPAM Regional Burana Titab;
      4) Optimalisasi SPAM Petanu (Pengadaan dan Pemasangan Pompa Booster Optimalisasi JDU SPAM Petanu).
   b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis sehingga pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. Paket pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain :

1. Perencanaan Sumur Uji, Prasarana Air Minum di Banjar Selombo, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
2. Perencanaan Pengembangan SPAM Songan A dan Songan B, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
3. Perencanaan Optimalisasi SPAM Petanu (Pengadaan dan Pemasangan Pompa Booster Optimalisasi JDU SPAM Petanu);
4. Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM Petanu untuk Kawasan Sukawati dan Sekitarnya;
5. Pengawasan Sumur Uji, Prasarana Air Minum di Banjar Selombo, Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng;
6. Pengawasan Pengembangan SPAM Songan A dan Songan B, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
7. Penyusunan Data Base Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bali;
8. Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Burana Titab;
9. Pengawasan Optimalisasi SPAM Petanu (Pengadaan dan Pemasangan Pompa Booster Optimalisasi JDU SPAM Petanu);

5) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

a) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah bertujuan untuk memperluas cakupan layanan sanitasi layak meliputi paket pekerjaan Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah Perpipaan Terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar.

b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis sehingga pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. Paket pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini meliputi :

1) Review Perencanaan Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah Perpipaan Terpusatdi Kab. Badung dan Kota Denpasar;
2) Pengawasan Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah Perpipaan Terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar;
3) Penyusunan Data Base Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Bali.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

a) Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan serta mewujudkan keselarasan dan keserasian dengan lingkungan sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi penataan gedung kantor, sekolah, dan bangunan tempat ibadah (penataan pura sad kayangan) yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di Bali. Paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 yaitu :

1) Renovasi Gapura, Pagar, Pengecatan Kantor dan Pengaspalan Lapangan Parkir Makodam IX/Udayana;
2) Pembangunan Gedung Prasanti Reswara Graha dan Penataan Halaman;
3) Rehab Gedung Utama dan Penataan Halaman Polda Bali;
4) Pelindungan Taman Pujaan Bangsa Margarana Kab. Tabanan;
5) Rehabilitasi Eks Rumah Sakit Indra untuk Pelayanan SLB di Denpasar;
6) Pembangunan Wisma Pramuka di Pusat Perkemahan Pramuka Margarana Kab. Tabanan (lanjutan);
7) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Denpasar;
8) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Susut;
9) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Kuta Selatan, Kab. Badung;
10) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Kubu, Kab. Karangasem;
11) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Bebandem;
12) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 2 Kintamani;
13) Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN 1 Denpasar;
14) Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN 1 Gianyar;
15) Pembangunan SMK Kubu Kab. Karangasem;
16) Penyelesaian Tahap 9 Berupa Pekerjaan Peredam Suara dan Pendingin Ruangan Gedung Serbaguna UNHI;
17) Rehabilitasi Eks Rumah Sakit Indra untuk Pelayanan SLB di Denpasar (lanjutan);
18) Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Aset Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung;
19) Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Aset Tanah Pembangunan Insfrastruktur Kawasan Pura Agung Besakih Kab. Karangasem.

b) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis sehingga pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan ini sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. Paket pekerjaan yang dilaksanakan antara lain :

1) FS Perlindungan Kawasan Suci Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
2) DED Pembangunan Pura Dalem Waturenggong, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
3) DED Pembangunan Fasilitas Penunjang Kawasan Suci Besakih, Pedestrian, dan Taman, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
4) FS Penataan Kawasan Danau Beratan Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;

5) Perencanaan Renovasi Gapura, Pagar, Pengecatan Kantor dan Pengaspalan Lapangan Parkir Makodam IX/Udayana;
6) Penyusunan Perencanaan Pengadilan Tinggi Denpasar;
7) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana;
8) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan;
9) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng;
10) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung;
11) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar;
12) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar;
13) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung;
14) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli;
15) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem;
16) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;
17) Penyusunan Data Base Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali;
18) Perencanaan Teknis Peredam Gedung Institut Seni Indonesia Denpasar;
19) Penyusunan Data Base Fungsi Pelinggih Kawasan Pura Agung Besakih Kabupaten Karangasem;
20) Pendataan Infrastruktur dan Fasilitas Umum di Kawasan Pura Agung Besakih Kabupaten Karangasem;
21) Pengawasan Renovasi Gapura, Pagar, Pengecatan Kantor dan Pengaspalan Lapangan Parkir Makodam IX/Udayana;
22) Pengawasan Pembangunan Gedung Prasanti Reswara dan Penataan Halaman;
23) Pengawasan Rehab Gedung Utama dan Penataan Halaman Polda Bali;
24) Pengawasan Penyelesaian Tahap 9 Berupa Pekerjaan Peredam Suara dan Pendingin Ruangan Gedung Serbaguna UNHI;
25) FS Pembangunan Bali International Convention Center;
26) DED Pembangunan Bali International Convention Center;

27) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Denpasar;
28) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN di Kab. Badung, Bangli, dan Karangasem;
29) DED Pembangunan Ruang Kelas SLBN di Kota Denpasar dan Kab. Gianyar;
30) Pra DED Pembangunan Sekolah Baru SMAN 9 Denpasar;
31) Pra DED Pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Denpasar;
32) Pra DED Pembangunan Sekolah Baru SMAN 10 Denpasar;
33) Pra DED Pembangunan Sekolah Baru SMAN 2 Sukawati;
34) Review DED Pembangunan Sekolah Baru SMKN 2 Kubu;
35) Pra DED Pembangunan Sekolah Baru SMAN 1 Abang;
36) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Tampaksiring;
37) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Tegallalang;
38) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 3 Amlapura;
39) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Bebandem;
40) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Abang;
41) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Gerokgak;
42) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Sawan;
43) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 2 Seririt;
44) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Ruang Kantor SMKN 1 Singaraja;
45) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tembuku;
46) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 4 Bangli;
47) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 2 Bangli;
48) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 5 Negara;
49) DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 4 Negara;
50) DED Pembangunan Ruang Kantor SMAN Satap Tejakula;
51) DED Pembangunan Ruang Kantor SMKN 2 Tabanan;
52) DED Pembangunan Ruang Kantor SMKN 2 Denpasar;
53) Pra DED Pembangunan SLB di Tembau Penatih;
54) DED Pembangunan Ruang Belajar Serbaguna dan Pembangunan Lanjutan Gedung Serbaguna Lantai 3 SMAN 1 Singaraja;
55) DED Pembangunan Gedung Serbaguna SMAN 2 Tejakula;
56) Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
57) Pengawasan Perlindungan Taman Pujaan Bangsa Margarana Kab. Tabanan;
58) Pengawasan Pembangunan Wisma Pramuka di Pusat Perkemahan Pramuka Margarana Kab. Tabanan (lanjutan);
59) Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Denpasar;

60) Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN di Kab. Badung dan Kab. Bangli;
61) Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN di Kab. Karangasem;
62) Pengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru SLBN di Kota Denpasar dan Kab. Gianyar;
63) Pengawasan Pembangunan SMK Kubu Kab. Karangasem.

7) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
   a) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kegiatan ini meliputi pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang ada di Provinsi Bali, baik bersumber dana APBD maupun APBN.
   b) Kegiatan Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kegiatan ini meliputi sosialisasi dan Desiminasi Perundang-Undangan Jasa Konstruksi di 9 Kabupaten/Kota se-Bali.
   c) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi, kegiatan ini meliputi sertifikasi terhadap SDM yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa konsultansi, sehingga semakin banyak SDM jasa konstruksi sebagai Tenaga Kerja Ahli dan Terampil yang berkompeten dan bersertifikat di Provinsi Bali.
8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat
   a) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan, kegiatan ini meliputi Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tanah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengujian yang dilakukan pada UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
   b) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat, kegiatan ini memberikan pelayanan/penyewaan alat berat bagi masyarakat/swasta/Badan Usaha yang membutuhkan.
   c) Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air, kegiatan ini meliputi Pemeliharaan Alat Laboratorium Air, Kalibrasi Alat-Alat Laboratorium dan Pengujian Kualitas Air sehingga dapat memberikan pelayanan pengujian kualitas air berkualitas.
9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum
   a) Kegiatan Pelayanan Air Minum pada BLUD, Pada kegiatan ini dilakukan operasional/pengelolaan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan air minum Regional dan daerah rawan air, serta dilaksanakan Monitoring dan pengendalian atas pengelolaan sistem Penyediaan Air Minum sehingga data dan kondisi yang ada dapat digunakan sebagai dasar rencana pengembangan maupun operasi dan pemeliharaan selanjutnya.
10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah
   a) Kegiatan Pelayanan Air Limbah pada BLUD Kegiatan ini meliputi Pengadaan dan Pemasangan Pipa tersier dan Sambungan Pelanggan sistem Pengolahan Air Limbah perpipaan terpusat di Kota Denpasar dan Kab. Badung dan dilakukan operasional/

pengelolaan prasarana dan sarana Sistem Pengolahan air limbah perpipaan terpusat yang berkelanjutan, serta dilaksanakan Monitoring dan pengendalian atas pengelolaan sistem Pengolahan Air Limbah terpusat sehingga data dan kondisi yang ada dapat digunakan sebagai dasar rencana pengembangan maupun operasi dan pemeliharaan selanjutnya.

Pegawai Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali sebanyak:

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	9 orang
3	Pejabat Eselon IV	26 orang
4	Staf	157 orang
5	Fungsional	1 orang
6	CPNS	- orang
7	Tenaga Honorer	- orang
8	Tenaga Harian	- orang
9	Tenaga Kontrak	381 orang
Jumlah		**575 orang**

Realisasi Program dan Kegiatan Pekerjaan Umum Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
A	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi								
1	Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi	20,06 Km, 10 Meter	100	249,561,783,780	100	20.06 Km, 10 Meter	84.97	118,721,815,650	47.57
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi	743,34 km, 8,10 km, 29 Paket kegiatan, 1 Paket, 1 unit Cold Miling Machine, 1 unit Truck Self Loader	100	48,649,632,630	100	743,34 km, 8,10 km, 29 Paket kegiatan, 1 Paket, 1 unit Cold Miling Machine, 1 unit Truck Self Loader	100	48,106,291,938	98.88
3	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	8 Paket, 4 Paket, 9 Paket	100	11,649,254,923	100	8 Paket, 4 Paket, 9 Paket	100	11,458,661,481	98.36
B	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								
1	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi	3.695 m, 1 buah Bendung, 1 buah Talang	100	7,425,230,084	100	3.695 m, 1 buah Bendung, 1 buah Talang	80.41	5,949,494,899	80.13
2	Pengelolaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	14 D.I. (Daerah Irigasi), 2 Paket	100	1,994,093,060	100	14 D.I. (Daerah Irigasi), 2 Paket	100	1,931,551,211	96.86
3	Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	3 Lap. Kegiatan, 1 Dok. Perencanaan, 2 Dok. Pengawasan	100	810,119,746	100	3 Lap. Kegiatan, 1 Dok. Perencanaan, 2 Dok. Pengawasan	100	751,947,927	92.82

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
C	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya								
1	Pengelolaan Danau, Waduk dan Sumber Daya Air Lainnya	1 danau, 4 embung, 4 pantai	100	623,000,000	100	1 danau, 4 embung, 4 pantai	100	586,232,400	94.1
2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air	6 Lap. Perencanaan 3 Lap. Kegiatan 3 Lap. TKMPP	100	1,358,931,000	100	6 Lap. Perencanaan 3 Lap. Kegiatan 3 Lap. TKMPP	74.24	922,419,820	67.88
3	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	48 m	100	801,457,726	100	48 m	100	797,763,682	99.54
D	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum								
1	Pengembangan Distribusi Air Minum	4 Paket (Kab. Buleleng, Kab. Bangli dan Kota Denpasar)	100	39,449,625,000	100	4 Paket (Kab. Buleleng, Kab. Bangli dan Kota Denpasar)	100	26,757,879,346	67.83
2	Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dok. Perencanaan: 5 Paket Dok. Pengawasan: 4 Paket	100	2,169,467,259	100	Dok. Perencanaan: 5 Paket Dok. Pengawasan: 4 Paket	100	1,984,765,133	91.49
E	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman								
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	100 SP	100	846,000,000	100	100 SP	100	836,433,013	98.87
2	Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	Dok. Perencanaan : 2 Paket Dok. Pengawasan : 1 Paket	100	290,094,950	100	Dok. Perencanaan : 2 Paket Dok. Pengawasan : 1 Paket	100	247,281,126	85.24
F	Program Penataan Bangunan								
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	24 paket	100	65,697,265,810	100	24 paket	96.71	58,718,361,721	89.38
2	Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dok. Perencanaan : 49 Paket Dok. Pengawasan : 11 Paket	100	7,576,135,110	100	Dok. Perencanaan : 49 Paket Dok. Pengawasan : 11 Paket	98.37	6,220,735,965	82.11
G	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat								
1	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan	1 Unit Reflux, Extractor, 1 unit, Vibrating Sieve, Shaker, 1 unit, Hammer Test Digital, 1 Paket	100	392,604,192	100	1 Unit Reflux, Extractor, 1 unit, Vibrating Sieve, Shaker, 1 unit, Hammer Test Digital, 1 Paket	100	357,691,288	91.11
2	Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat	1 unit, 1 tahun	100	595,034,569	100	1 unit, 1 tahun	100	579,158,498	97.33
3	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air	1 tahun	100	187,909,410	100	1 tahun	100	153,978,543	81.94
H	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum								

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
1	Pelayanan Air Minum pada BLUD	5 PDAM	100	25,980,679,562	100	5 PDAM	100	25,461,762,039	98
I	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah								
1	Pelayanan Air Limbah pada BLUD	14.000 SR	100	15,500,000,000	100	14.000 SR	100	13,531,045,288	87.3
J	Program Pembinaan Jasa Konstruksi								
1	Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1 tahun	100	260,773,178	100	1 tahun	100	149,572,243	57.36
2	Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	12 Kegiatan	100	480,087,594	100	12 Kegiatan	100	309,091,827	64.38
3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi	11 Kegiatan	100	789,747,777	100	11 Kegiatan	100	653,414,948	82.74

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan serta tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah.

1. Pesatnya Pertambahan penduduk terutama didaerah perkotaan mengakibatkan keterbatasan layanan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Persampahan dan Drainase);
2. Penurunan debit sumber air untuk Irigasi dan untuk Air Baku Air Minum, serta terjadi kemarau panjang di tahun 2019;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang air limbah dan sampah untuk menjaga kualitas lingkungan;
4. Potensi sumber air baku yang tidak merata merupakan kendala dalam memenuhi kebutuhan Air Minum;
5. Masih terdapat ruas jalan provinsi yang belum mencapai kondisi mantap;
6. Terdapat segmen jalan provinsi yang berada pada zona rawan longsor;
7. Banyak ruas jalan provinsi yang telah melampaui umur rencana namun belum mendapat penanganan sehingga terjadi penurunan kondisi pada ruas-ruas jalan tersebut.;
8. Belum optimalnya pemanfaatan badan jalan untuk berlalu lintas dan pelanggaran pemanfaatan Rumija/ Rumaja/ Ruwasja akibat pengembangan permukiman yang tidak terkontrol;
9. Terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana akibat perencanaan yang kurang matang dan belum siapnya sistem;
10. Terdapat paket pekerjaan yang mengalami putus kontrak, akibat dari rendahnya Kinerja Penyedia Jasa;
11. Banyaknya paket pekerjaan fisik yang pelaksanaanya di Anggaran Perubahan;
12. Terdapat paket pekerjaan yang batal tender akibat SK BPN belum bisa diterbitkan di tahun 2019;
13. Pesatnya pertumbuhan lalu lintas yang tidak mampu diimbangi dengan pengembangan jalan baru akibat keterbatasan lahan.

Solusi terhadap permasalahan yang ada pada urusan pekerjaan umum adalah :

1. Mengembangkan cakupan layanan Air Minum, sistem pengolahan air limbah perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, mengoptimalkan pengelolaan TPA Regional dan memperbaiki sistem drainase perkotaan;
2. Mendorong percepatan Pembangunan SPAM Regional dengan memanfaatkan potensi air permukaan sebagai sumber air baku;
3. Efisiensi pemanfaatan air dan perlindungan sumber daya air antara lain dengan penghijauan/ membangun *green belt* (sabuk hijau) pada sumber air baku dan daerah kritis air;
4. Sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya dan manfaat Sistem Pengolahan Air Limbah perpipaan terpusat dalam rangka menyelamatkan lingkungan dari kontaminasi air limbah dan perlu adanya aturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
5. Mengoptimalkan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan untuk tetap mampu mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa;
6. Melakukan relokasi jalan pada titik-titik rawan bencana
7. Melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan jaringan pelayanan transportasi;
8. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan menghindari pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi di Anggaran Perubahan;
9. Mengkaji dan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang mengalami batal tender;
10. Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan penyedia jasa berkualitas dan berdaya saing.

3.2 Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Kebijakan dalam penataan ruang antara lain untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang dan tata bangunan, pembangunan wilayah, mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan wilayah tertinggal untuk menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang ditempuh melalui koordinasi yang optimal dengan kabupaten/kota serta mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Perencanaan Tata Ruang	Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

NO	PROGRAM	KEGIATAN
2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3	Program Pengawasan Tata Ruang	Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pegawai Daerah

Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali sebanyak:

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	9 orang
3	Pejabat Eselon IV	26 orang
4	Staf	157 orang
5	Fungsional	1 orang
6	CPNS	- orang
7	Tenaga Honorer	- orang
8	Tenaga Harian	- orang
9	Tenaga Kontrak	381 orang
Jumlah		**575 orang**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan urusan penataan ruang adalah :

1) Program Perencanaan Tata Ruang :

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dihasilkan yaitu :

- Sinkronisasi Peta RTR Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul Pancasari;
- Sinkronisasi Materi Kelengkapan Persetujuan Substansi RTR Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
- Pemutakhiran dan Penyusunan Dataset Peta RTR Kawasan Suci Pura Agung Besakih;
- Review Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Bedugul-Pancasari.

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk mewujudkan informasi penataan ruang sebagai materi pembahasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3) Program Pengawasan Tata Ruang

Kegiatan Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui kegiatan ini telah dilakukan pengawasan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tersebar di Provinsi Bali.

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Sektor Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penataan Ruang Tahun 2019

No	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
I	Program Perencanaan Tata Ruang								
	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	1 tahun, 4 paket	100	1,313,735,718	100	1 tahun, 4 paket	99.53	1,080,953,439	82.28
II	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 tahun	100	444,802,143	100	1 tahun	100	407,549,863	91.62
III	Program Pengawasan Tata Ruang								
	Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 tahun	100	315,630,196	100	1 tahun	100	307,667,293	97.48

Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan penataan ruang selama ini, antara lain :

1. Prosedur dan Mekanisme Penyusunan Rencana Tata Ruang sangat panjang;
2. Belum semua pedoman NSPK Bidang Tata Ruang tersedia;
3. Banyak terjadi indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan;

Menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dipandang perlu dilakukan hal-hal berikut sebagai solusi untuk mengatasinya, antara lain dengan :

1. Menyusun Rencana Rinci Tata Ruang secara bertahap
2. Melakukan Koordinasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai penataan ruang kepada aparat/ instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat tentang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi; pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang

pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi; penyelengaraan administrasi dinas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman juga mengamanatkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Mengacu pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang dijabarkan dalam 22 misi, dan yang terkait dengan bidang perumahan tercantum dalam misi pertama yaitu Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali. Sehingga arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan bidang papan (perumahan), berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali antara lain: Pemberian bantuan untuk membangun/merehabilitasi rumah yang tidak layak huni, penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.

Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a) Penyedian jasa surat menyurat b) Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c) Penyedian jasa kebersihan kantor d) Penyediaan alat tulis kantor e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g) Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h) Penyediaan makanan dan minuman i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah j) Upacara keagamaan k) Pengadaan perlengkapan gedung kantor l) Pengadaan peralatan gedung kantor m) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor n) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas o) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

PROGRAM	KEGIATAN
	p) Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja
2. Pengembangan Kawasan Permukiman	a) Peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) b) Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) c) Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman
3. Pengembangan Perumahan	a) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni b) Pendataan dan perencanaan perumahan c) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan
4. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan

Jumlah Pegawai

Gol. / Ruang	Sekretariat		Bidang Perumahan		Bidang Kawasan Permukiman		Jumlah		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	Org.	%
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	1	1	-	-	-	1	1	2	8,33
III/b	1	-	1	-	2	-	4	-	4	16,67
III/c	1	-	1	1	2	-	4	1	5	20,83
III/d	3	2	1	1	-	-	4	3	7	29,17
IV/a	-	1	-	-	1	-	1	1	2	8,33
IV/b	1	1	1	-	1	-	3	1	4	16,67
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	5	5	2	6	-	17	7	24	100
%	54,55	45,45	71,43	28,57	100	-	70,83	29,17		
L+P	11		7		6		24			
%	45,83		29,17		25		100			

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan keempat bulan Desember Tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut.

A. Program Administrasi Perkantroran

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurut

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat sebesar Rp. 1.350.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 1.350.000,- dengan persentase 100% realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 60.736.055,- dari pagu induk anggaran Rp. 85.000.000,- dengan persentase 71,45% realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Jasa kebersihan kantor

   Realisasi anggaran kegiatan jasa kebersihan kantor sebesar Rp. 251.196.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 252.056.750,- dengan persentase 99,66% realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 47.418.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 47.418.000,- dengan persentase 100% realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 16.843.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 17.655.000,- dengan persentase 95,40% realisasi fisik 100%.

6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 3.500.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 3.500.000,- dengan persentase 100% realisasi fisik 100%.

7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 6.500.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 7.000.000,- dengan persentase 92,86% realisasi fisik 100%.

8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 11.000.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 11.000.000,- dengan persentase 100% realisasi fisik 100%.

9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah.

   Realisasi anggaran kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 239.075.358,- dari pagu induk anggaran Rp. 303.336.000,- dengan persentase 78,82% realisasi fisik 100%.

10. Kegiatan Upacara keagamaan

    Realisasi anggaran kegiatan Upacara keagamaan sebesar Rp. 52.739.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 60.000.000,- dengan persentase 87,90% realisasi fisik 100%.

11. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

    Realisasi anggaran kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp. 26.603.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 31.000.000,- dengan persentase 85,82% realisasi fisik 100%.

12. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    Realisasi anggaran kegiatan Upacara keagamaan sebesar Rp. 99.375.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 104.050.000,- dengan persentase 95,51% realisasi fisik 100%.

13. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    Realisasi anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebesar Rp. 836.316.688,78 dari pagu induk anggaran Rp. 838.934.892,- dengan persentase 99,69% realisasi fisik 100%.

14. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

    Realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas sebesar Rp. 348.511.510,59 dari pagu induk anggaran Rp. 388.244.960,- dengan persentase 89,77% realisasi fisik 100%.

15. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

    Realisasi anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar Rp. 10.500.000,- dari pagu induk anggaran Rp. 14.750.000,- dengan persentase 71,96% realisasi fisik 100%.

16. Kegiatan penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja

    Realisasi anggaran kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sebesar Rp. 42.573.195,- dari pagu induk anggaran Rp. 49.800.000,- dengan persentase 85,49% realisasi fisik 100%.

B. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

   Tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas pengembangan perumahan permukiman, menyediakan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman, tersusunnya rencana strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan terlaksananya penghimpunan, penyusunan dan mendokumentasikan data informasi dan standar pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas pengembangan perumahan dan permukiman. Pada tahun 2019 telah terlaksana program pengembangan kawasan permukiman dengan kegiatan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) kawasan permukiman serta melaksanakan pekerjaan peningkatan kualitas saluran drainase di kawasan Kubu 2 Kabupaten Bangli.

   Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2019 dapat disampaikan bahwa semua kegiatan sudah terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 422.510.898,93 dari pagu induk anggaran Rp. 433.310.080,- dengan persentase 97.51% realisasi fisik 100%.

2.Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum (PSU) pada Kawasan Kumuh, Bidang Permukiman Tahun Anggaran 2019 mendapat Dana sebesar Rp. 181.761.460,-. Program Pengembangan Kawasan Permukiman serta Persentase lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan antara lain: Termonitornya Peningkatan Kualitas PSU Permukiman, Kegiatan Penyusunan dan Penggandaan, serta Penjilidan Buku Laporan Akhir Kegiatan 2019. Realisasi anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Kumuh dengan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 170.562.890,58 dari pagu induk anggaran Rp. 181.761.460,- dengan persentase 93,84% realisasi fisik 100%.

3.Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman

Kegiatan Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan kumuh telah terlaksana dengan baik, dimana yang telah dilaksanakan antara lain :

- Monitoring yang dilakukan adalah dalam rangkaian mencari data terkait kegiatan Permukiman dan Pertanahan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Fisik dan Keuangan.
- Kegiatan dilaksanakan selama selama 12 (dua belas) bulan di 9 (sembilan) Kabupaten/Koa se Bali, dimana ruang lingkup kegiatan antara lain melakukan koordinasi penanganan kawasan kumuh di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali dan menyusun database kawasan permukiman kumuh di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Bali.
- Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dimana kegiatan ini baru pada tahap pengumpulan data beberapa OPD di kabupaten /kota karena baru terbentuk pada awal tahun 2017 dan belum memiliki data yang cukup terkait dengan penyelenggaraan permukiman. Data sementara yang dapat dikumpulkan adalah SK Bupati tentang Kawasan Kumuh di 8 Kabupaten/Kota dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Badung yang tidak menetapkan Kawasan Kumuh di daerahnya. Data kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker Bangkim yang merupakan peRp.anjangan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi tidak ada data sama sekali. Realisasi anggaran kegiatan Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Kumuh, capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 144.993.422,93 dari pagu induk anggaran Rp. 157.594.220,- dengan persentase 92% realisasi fisik 100%.

C. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

   Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pekerjaan bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga tahun 2019 dilakukan secara swakelola oleh panitia pelaksana Desa di Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang dirancang sebanyak 7 (tujuh) unit. Peningkatan kualitas meliputi kegiatan perbaikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan atau terpenuhi kelayakan/kesehatan bangunan dengan nilai nominal bantuan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per unitnya. Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 425.148.274,59 dari pagu induk anggaran Rp. 445.116.960,- dengan persentase 95,51% realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan

   Hasil yang telah dicapai pada Kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan pada tahun 2019 antara lain :

   - Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali, dengan menggali masukan hasil penyusunan draf Raperda RP.3KP dari masyarakat serta menyempurnakan draf Raperda RP3KP Provinsi Bali setelah dilakukan uji substansi dan uji materi teknis RP3KP Provinsi Bali. Sehingga nantinya Pemerintah Provinsi Bali dan *stakeholder* lainnya mempunyai landasan hukum serta dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi sebagai upaya untuk rencana penanganan sektor perumahan kawasan permukiman, serta mengisi RTRWP dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.
   - Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Perumahan Terintegrasi di Provinsi Bali, guna untuk mendapatkan data atribut maupun data lokasi serta mengintegrasikannya dalam satu sistem digital/aplikasi. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini antara lain : mendata dan/atau melengkapi data penanganan sektor perumahan di Provinsi dengan data yang berbasis lokasi/peta, mengintegrasikan data adalah sistem informasi yang memudahkan pelaporan dan operasional pekerjaan lainnya serta sinkronisasi data Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 667.002.727,59 dari pagu induk anggaran Rp. 696.859.410,- dengan persentase 95,72% realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan

   Pelaksanaan kegiatan antara lain melaksanakan penyusunan laporan kegiatan monitoring, melaksanakan kegiatan pertemuan rutin kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan membuat hasil Evaluasi kegiatan kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Realisasi anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 215.535.713,87 dari pagu induk anggaran Rp. 265.838.960,- dengan persentase 81,08% realisasi fisik 100%.

D. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan, Realisasi anggaran kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 37.828.900,- dari pagu induk anggaran Rp. 49.600.000,- dengan persentase 76,27% realisasi fisik 100%.

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksaaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A.	Program Pelayanan Administrai Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Tahun	100	85,000,000	100	1 Tahun	100	60,736,055	71,45
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	100	1,350,000	100	1 Tahun	100	1,350,000	100
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	100	252,056,750	100	1 Tahun	100	251,196,000	99,66
4	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	100	47,418,000	100	1 Tahun	100	47,418,000	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	100	17,655,000	100	1 Tahun	100	16,843,000	95,40
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	100	3,500,000	100	1 Tahun	100	3,500,000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	100	7,000,000	100	1 Tahun	100	6,500,000	92,86
8	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	100	11,000,000	100	1 Tahun	100	11,000,000	100
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 Tahun	100	303,336,000	100	1 Tahun	100	239,075,358	78.82
10	Upacara Keagamaan	1 Tahun	100	60,000,000	100	1 Tahun	100	52,739,000	87,90

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Papan Informasi 1 Buah, Papan Papan Struktur Organisasi 1 Buah, Plang Nama Rusun Penatih 1 unit, Meja Ruang Rapat Aula 2 unit, Kursi Kerja Pegawai 11 Unit	100	31,000,000	100	Papan Informasi 1 Buah, Papan Papan Struktur Organisasi 1 Buah, Plang Nama Rusun Penatih 1 unit, Meja Ruang Rapat Aula 2 unit, Kursi Kerja Pegawai 11 Unit	100	26,603,000	85,82
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Apar Abc Dry Powder) 4 unit, AC (2 Pk) 4 unit, Pengadaan Printer 2 unit, UPS 1 unit, Pengadaan sound system 1 set, Pengadaan CCTV 1 set	100	104,050,000	100	Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Apar Abc Dry Powder) 4 unit, AC (2 Pk) 4 unit, Pengadaan Printer 2 unit, UPS 1 unit, Pengadaan sound system 1 set, Pengadaan CCTV 1 set	100	99,375,000	95.51
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	100	838,934,892	100	1 Tahun	100	836,316,688.78	99,69
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Tahun	100	388,244,960	100	1 Tahun	100	348,511,510.59	89,77
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	100	14,750,000	100	1 Tahun	100	10,500,000	71,96
16	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja	1 Tahun	100	49,800,000	100	1 Tahun	100	42,573,195	85,49
B	Program Pengembangan Kawasan Permukiman								
1	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan kumuh.	1 Paket	100	433,310,080	100	1 Paket	100	422,510,898.93	97,51
2	Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan kumuh.	1 Laporan	100	181,761,460	100	1 Laporan	100	170,562,890.58	93,84
3	Pendataan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan kumuh.	2 Dok	100	157,594,220	100	2 Dokumen	100	144,993,422.93	92,00
C	Program Pengembangan Perumahan								

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1 Laporan	100	445,116,960	100	1 Laporan	100	425,148,274.59	95,51
2	Pendataan dan perencanaan perumahan	1 Raperda, 1 Aplikasi Online, 1 kali/1 tahun/1 Laporan	100	696,859,410	100	1 Raperda, 1 Aplikasi Online, 1 kali/1 tahun/1 Laporan	100	667,002,727.59	95,72
3	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan	2 Laporan	100	265,838,960	100	2 Laporan	100	215,535,713.87	81,08
E	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan								
1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	1 Laporan	100	49,600,000	100	1 Laporan	100	37,828,900	76,27

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain :

   - Berkembangnya bangunan baru yang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah khususnya tentang Arsitektur Bali yang disebabkan oleh belum semua Kabupaten/Kota mempunyai peraturan daerah tentang bangunan gedung.
   - Munculnya kawasan kumuh baru diperkotaan secara periodik
   - Tingginya alih lahan produktif
   - Masih banyak masyarakat yang belum menempati rumah layak huni akibat perekonomian yang belum merata.

2. Solusi

   Solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

   - Percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di masing-masing Kabupaten/Kota dan diterapkan secara konsisten.
   - Penanganan terhadap bermunculnya kawasan kumuh yang dilakukan secara bertahap dengan disusun secara terintegrasi dengan berbagai tingkat pemerintah, swasta, masyarakat dan termasuk pengendalian penduduk imigran.
   - Pengendalian lahan agar tertib dan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada, seperti antara lain dengan menyusun pedoman penataan ruang dan peraturan zoning.
   - Peningkatan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Swasta maupuan melalui program bantuan stimulant
   - perumahan swasta, bedah rumah, rusunawa dan sebagainya.

5. Sosial

Permasalahan sosial di Bali secara umum semakin kompleks, hal ini disebabkan jumlah yang ditangani relatif sedikit dibanding dengan perkembangan permasalahan sosial dan faktor lain yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun. Dengan menurunnya pendapatan masyarakat akan menimbulkan permasalahan sosial baru diantaranya bertambahnya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta permasalahan sosial lainnya.

Kebijakan umum pada urusan sosial meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya serta meningkatkan dan memantapkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat atas dasar swadaya dan kesetiakawanan sosial sehingga merupakan bentuk usaha-usaha kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berkut :

Program dan Kegiatan dan tingkat capaian:

A. Sumber Dana APBD

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :
    a Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disablitas anggaran Rp.481.600.000,- realisasi keuangan 96.69% dan realisasi fisik 100%.
    b Pemulangan Orang Terlantar anggaran Rp.420.000.000,- realisasi keuangan 28.20% dan realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya anggaran untuk biaya kesehatan pasien ODGJ terlantar yang tidak dapat terealisasi karena belum adanya regulasi yang mengatur, sementara target pemulangan orang terlantar sejumlah 400 orang sudah terealisasi.
    c Pencegahan Penyalahgunaan Napza anggaran Rp.40.000.000,- realisasi keuangan 99.75% dan realisasi fisik 100%.
    d Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia anggaran Rp.90.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.

e Kremasi Jenazah Terlantar anggaran Rp.46.500.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.78%.

f Penanganan Tuna Sosial anggaran Rp.40.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.88%.

g Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak anggaran Rp.200.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.16%.

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :

a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat angaran Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan 99,90 % capaian fisik 100%

b Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) anggaran Rp.80.000.000,- realisasi keuangan 98,63 % capaian fisik 100%

Perorangan

c Pengawasan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

d Pemeliharaan TMP

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan :

a Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam anggaran Rp.397.200.000,- realisasi keuangan 100% capaian fisik 100%.

4. Program Penanganan Fakir Miskin dengan kegiatan :

a Penanganan Fakir Miskin Alokasi anggaran Rp.70.000.000,- dengan realisasi keuangan 96.64% dan capaian realisasi fisik 100%.

5. Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman dengan kegiatan :

a Bedah Rumah anggaran Rp.5.500.000.000,- dengan realisasi keuangan 96.99% dan capaian realisasi fisik 100%.

UPT PELAYANAN SOSIAL

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :

a Monitoring Evaluasi dan Pelaporan anggaran Rp.6.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.93%.

b Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Jaramarapati Singaraja anggaran Rp.647.566.080,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95%.

c Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Wana Seraya Denpasar anggaran Rp.602.503.280,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96.96%.

d Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar di PSBR Guna Mantha Denpasar anggaran Rp.230.515.040,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.77%.

e Pelayanan Anak di PSAA Udiyana Wiguna Singaraja anggaran Rp.650.772.760 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.33%.

B. Sumber Dana APBN

Dekonsentrasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial dengan 1 (satu) kegiatan, total dana Rp.224.692.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.68%.
2. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian , dan Pengembangan Kegiatan Penyuluhan Sosial dengan 1 (satu) kegiatan, total dana 454.140.000,- realisai fisik 94,40 % dan reaisasi keuangan 87,11%
3. Program Pemberdayaan Sosial dengan 3 (tiga) kegiatan total dana Rp.1.936.302.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,59%.
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan 5 (lima) kegiatan total dana Rp.1.720.165.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94.56%.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 3 (tiga) kegiatan total dana Rp.4.672.610.000,- realisasi fisik 95,00% dan realisasi keuangan 90,77%.
6. Program Penanganan Fakir Miskin dengan 1 (satu) kegiatan total dana Rp.4.235.300.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.28%.

Perangkat Daerah Pelaksana:

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Bali.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

REALISASI TARGET DAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG SOSIAL TAHUN 2019

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2019	2019	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
6	**Bidang Sosial**							
6.1	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100%	50 %	-	Rp. 481.600.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	50 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.2	• Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100%	100 %	Rp. 332.190.000,-	Rp. 1.081.287.800,-
		b) Standar jumlah dan kualitas	100 %	2019	100%	60 %		

		sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan						
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.3	• Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100%	80 %	-	Rp. 1.392.973.360,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	50 %		
	•	c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.4	• Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100%	100%	Rp. 120.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.5	• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100%	100 %	Rp. 2.858.530.000,-	Rp. 397.200.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali pada Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

INDIKATOR YANG SESUAI TARGET DAN TIDAK SESUAI TARGET:

6.1 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 ditargetkan 100% tetapi ditangani 1 panti dengan capaian realisasi 50%, karena keterbatasan anggaran dan masih melaksanakan penanganan di luar panti karena penetapan anggaran dan target telah selesai sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM ditetapkan.

b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 ditargetkan 100% dengan capaian 50%, karena minimnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional kesejahteraan sosial.

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2019 ditargetkan 100% telah terealisasi capaian 100%.

6.2 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 target 100% capaian realisasi 100%.

b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 ditargetkan 100% dengan realisasi 60% karena minimnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional kesejahteraan sosial.

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti target 100% dengan realisasi capaian 100%.

6.3 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 target 100% dengan capaian realisasi 75% yang tertangani 2 Panti Pemerintah.

b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 ditargetkan 100% namun dengan realisasi 50% karena minimnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional kesejahteraan sosial.

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti dengan realisasi capaian 100%.

6.4 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 capaian realisasi 100%.

b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 sudah mencapai target yang ditangani.

c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti telah mencapai target dengan realisasi capaian 100%.

6.5 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi telah memenuhi standar dengan realisasi 100%.

b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100%.

c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi telah tersedia dengan realisasi

100%.

Jumlah Pegawai :

Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali dan UPT Pelayanan Sosial sebanyak 110 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pendidikan :
   - Tingkat S2 : 14 orang
   - Tingkat S1 : 38 orang
   - Tingkat D3 : - orang
   - Tingkat SLTA : 54 orang
   - Tingkat SLTP : 1 orang
   - Tingkat SD : 2 orang

b. Pangkat dan golongan :
   - Pembina Utama Madya (Iv/d) : - orang
   - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
   - Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang
   - Pembina (IV/a) : 7 orang
   - Penata Tk.I (III/d) : 27 orang
   - Penata (III/c) : 8 orang
   - Penata Muda Tk.I (III/b) : 21 orang
   - Penata Muda (III/a) : 1 orang
   - Pengatur Tk.I (II/d) : 4 orang
   - Pengatur (II/c) : 25 orang
   - Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 3 orang
   - Pengatur Muda (II/a) : 4 orang
   - Juru Tk. I (I/d) : - orang
   - Juru (I/c) : 2 orang
   - Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
   - Juru Muda : - orang

c. Pejabat Struktural :
   - Eselon II : 1 orang
   - Eselon III : 6 orang
   - Eselon IV : 18 orang

d. Pejabat Fungsional :
   - Fungsional Arsiparis : 1 orang
   - Fungsional Pustakawan : 1 orang
   - Fungsional Pekerja Sosial : 3 orang
   - Fungsional Penyuluh Sosial : 3 orang

Alokasi dan realisasi Anggaran :

Anggaran yang dialokasikan di Dinas Sosial Provinsi Bali dan UPT Pelayanan Sosial pada tahun 2019 berjumlah Rp. 28.397.573.244,- dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD Provinsi Bali (BL) : Rp.13.504.568.148,-
2. APBN (Dekonsentrasi) : Rp.13.345.609.000,-

Proses Perencanaan Pembangunan :

Proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Forum SKPD, menghasilkan rancangan RKPD
2. Musrenbang menghasilkan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
3. Kebijakan Umum APBD yang tertuang dalam RKPD dilaksanakan bulan Juni menghasilkan PPAS
4. KUA dan PPAS dibahas bersama DPRD bulan Juni/Juli, menghasilkan nota kesepakatan antara Gubernur dengan pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS.
5. KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penelitian RKA oleh tim Anggaran Pemerintahan daerah.
6. Kompilasi RKA yang telah dibahas menjadi rancangan APBD dibahas dengan DPRD bulan September /Oktober.
7. Penetapan APBD dengan Perda pada bulan Desember.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada sampai saat ini untuk mendukung program /kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali dan UPT Pelayanan Sosial secara umum sudah cukup memadai. Namun untuk sarana internet terkadang mengalami permasalahan jaringan sehingga menghambat beberapa pekerjaan yang menggunakan aplikasi melalui jaringan internet. Untuk kedepannya perlu adanya perbaikan jaringan internet sehingga administrasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu adanya pemeliharaan yang berkesinambungan.

Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Bali sebagai berikut:

a. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang berfluktuasi mengakibatkan penanganan PMKS tidak sesuai target yang telah ditetapkan
b. Belum optimalnya pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau dunia usaha terhadap masalah sosial.

Solusi Pemecahan Masalah :

Solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Bali sebagai berikut:

a. Perencanaan penanganan PMKS divalidasi dan verifikasi untuk tahun berikutnya
b. Intensifikasi dan sinergisitas pendataan secara berjenjang.
c. Melaksanakan koordinasi dengan masyarakat atau dunia usaha melalui forum dunia usaha/*Coorporate Social Resposibility* (CSR).

6. Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada peningkatan, pembentukan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wirausaha, disamping itu terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Visi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018-2023. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 22 misi, Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mengemban Program dan Kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan b. Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan b. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Ketenagakerjaan
2	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	c. Perluasan Kerja sistem Padat Karya (PKSPK); d. Penerapan dan Pembekalan Teknologi Padat Karya (TPK) Sistem Kelompok; e. Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair); f. Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL); g. Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia (PMI) Ke Luar Negeri; h. Penyebaran Informasi Lapangan Pekerjaan dan Penyediaan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja On Line (BKOL); i. Pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Provinsi Bali; j. Penyuluhan Mengenai Prosedur dan Mekanisme Bekerja ke Luar Negeri Bagi Masyarakat/Calon TKI; k. Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; l. Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri; m. Pendataan Informasi Pasar Kerja; n. Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi Pencari Kerja atau Siswa; o. Pembinaan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) di Provinsi Bali.
3	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pemasyarakatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Paramakarya/Sidhakarya b. Pembinaan Desa Produktif; c. Pelatihan Pemagangan Berbasis Pengguna; d. Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali; e. Akredetasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); f. Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		(ASC);
4	Program Perlindungan Tenaga Kerja	a. Pengawasan Norma Kerja, b. Pengawasan Tenaga Kerja Asing; c. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), d. Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan, e. Pembinaan Mekanisme Penyelesaian HI dan Verifikasi data PHI, f. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang UMP dan UMK
5	Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	a. Pelatihan berbasis kompetensi b. Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit (MTU) c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri Pariwisata d. Identifikasi kebutuhan latihan e. Persiapan Pendirian Akademi Komunitas (Pendidikan Vokasi)
6	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja.	a. Audit Akreditasi Laboratorium b. Kalibrasi Alat-alat Pemeriksaan Kesehatan c. Pengadaan Bahan Kimia d. Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes e. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja f. Pengujian Lingkungan Kerja

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

indikator kinerja kunci adalah :

1. Capaian kinerja angkatan kerja 73,87%
2. Pencari kerja yang sudah ditempatkan capaian kinerjanya 42,36%

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai : PNS/CPNS : 139 Orang

1. Pegawai Berdasarkan Kualitas Pendidikan :
   - SD : 0 Orang
   - SLTP : 0 Orang
   - SLTA : 28 Orang
   - D3 : 6 Orang
   - Sarmud : 0 Orang
   - S1 : 82 Orang
   - S2 : 23 Orang
2. Pangkat/Golongan :
   - I : -
   - II : 10 Orang
   - III : 87 Orang
   - IV : 42 Orang
3. Jumlah Pejabat Struktural
   28 Orang
   Eselon II : 1 orang

Eselon III : 6 orang
Eselon IV : 21 orang

4. Jumlah Pejabat Fungsional
56 orang

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				KEUANGAN			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Akuntabitilas Capaian Kinerja								
1	Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan	5 dok	100	67,466,000	100	5 dok	100	61,370,610	90,97
2	Penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan	5 dok	100	155,711,090	100	5 dok	100	139,711,090	89,72
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	17 dok	100	54,364,000	100	17 dok	100	53,283,500	98,01
B	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja								
1	Perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK)	100 orang	100	192,400,000	100	100 orang	97,50	187,330,000	97,36
2	Penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok	20 orang	100	189,400,000	100	20 orang	98,10	185,080,000	97,72
3	Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	5.000 orang	100	228,466,500	100	4.570 orang	100	223,021,500	97,62
4	Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL).	750 Orang	100	25,200,000	100	4.570 orang	100	25,100,000	99,60
5	Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Luar Negeri	180 orang	100	2,185,280,700	100	4.570 orang	3	15,799,246	0,72
6	Penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui Bursa Kerja On Line (BKOL).	3000 Orang	100	27,588,800	100	4.570 orang	100	27,338,800	99,09
7	Pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Provinsi Bali	25 prsh	100	32,761,000	100	25 prsh	100	30,043,245	91,70
8	Penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI.	400 orang	100	50,000,000	100	4.570 orang	100	48,700,000	97,40
9	Pembinaan penggunaan tenaga kerja asing	100 prsh	100	91,075,000	100	100 prsh		84,935,768	93,26
10	Pembinaan tenaga kerja mandiri	20 orang	100	91,750,000	100	20 orang	100	88,050,000	95,97
11	Pendataan Informasi pasar kerja	12 laporan	100	23,288,000	100	12 laporan	100	15,476,000	66,45
12	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa.	400 orang	100	50,000,000	100	400 orang	100	49,599,800	99,20

NO	URAIAN	TARGET				KEUANGAN			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
13	Pembinaan Terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK) di Provinsi Bali	100 BKK	100	43,125,000	100	100 BKK	100	41,727,200	96,76
C	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1	Pemasyarakatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Paramakarya								
2	Pembinaan Desa Produktif	40 orang	100	117,750,000	100	190 orang	100	117,008,200	99,37
3	Pelatihan Pemagangan Berbasis Pengguna	210 orang	100	3,519,555,000	100	210 orang	100	3,435,816,450	97,28
4	Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali	96 orang	100	173,025,000	100	96 orang	100	170,734,900	98,68
5	Akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK)	10 LPK	100	113,725,000	100	10 LPK	100	113,619,900	99,91
6	Seleksi dan Pembinaan ASEAN Skills Competition (ASC)	12 orang	100	79,515,000	100	12 orang	100	77,166,100	97,05
D	Program Perlindungan Tenaga Kerja								
1	Pengawasan Norma Kerja	100 prsh	100	111,984,000	100	100 prsh	100	98,184,000	87,68
2	Pengawasan Tenaga Kerja Asing	50 prsh	100	77,070,000	100	50 prsh	100	58,620,000	76,06
3	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	40 prsh	100	51,680,000	100	250 prsh	100	37,180,000	71,94
4	Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan	30 prsh	100	75,764,000	100	30 prsh	100	61,639,420	81,36
5	Pembinaan Mekanisme Penyelesaian HI dan verifikasi data PHI	30 prsh	100	90,800,000	100	250 prsh	100	75,343,664	82,98
6	Pembahasan dan Penetapan Peraturan Gubernur tentang UMP dan UMK	2 pergub	100	222,565,000	100	2 pergub	100	199,689,075	89,72
E	Program Peningkatasn Kompetensi Calon Tenaga Kerja								
1	Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi	48 orang	100	605,294,000	100	112 orang	100	575,325,916	95,05
2	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit (MTU)	96 orang	100	1,037,323,000	100	112 orang	100	1,007,038,694	97,08
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri dan Pariwisata	176 orang	100	60,000,000	100	176 orang	100	59,459,000	99,10
4	Identifikasi Kebutuhan Latihan	100 prsh	100	84,000,000	100	100 prsh	100	82,673,800	98,42
5	Persiapan Pendirian Akademis Komunitas (Pendidikan Vokasi)	1 dokumen	100	16,491,000	100	1 dok	100	16,491,000	100

NO	URAIAN	TARGET				KEUANGAN			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
F	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja								
1	Audit Akreditasi Laboratorium	1 unit	100	29,278,000	100	1 unit	100	16,917,100	57,78
2	Kalibrasi Alat-alat Pemeriksaan Kesehatan	2 pkt	100	70,493,000	100	2 pkt	100	70,493,000	100
3	Pengadaan Bahan Kimia	1 Paket	100	194,700,000	100	1 Paket	100	194,700,000	100
4	Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes	16 org	100	46,562,000	100	16 org	100	46,009,000	98,81
5	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja	150 org	100	74,350,000	100	150 org	100	73,790,300	99,25
6	Pengujian Lingkungan Kerja	60 prsh	100	82,950,000	100	60 prsh	100	82,766,600	99,78

Proses Perencanaan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu melalui tahapan sebagai berikut :

1. Forum OPD Menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan masukan dari kebijakan pusat dan hasil Evaluasi untuk bahan musrenbang.
2. Musrenbang menghasilkan RKPD antara lain :
   a. Kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk menyempurnakan rancangan OPD dan Renja OPD.
   b. Sebagai bahan didalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
   c. Daftar Usulan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
   d. RKPD ditetapkan dengan peraturan Gubernur pada bulan Mei yang antara lain telah ditetapkan KUA (Kebijakan Umum APBD).
   e. KUA dilaksanakan bulan Juni menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).
   f. KUA dan PPAS dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan Juni/Juli.
   g. Nota Kesepakatan Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang KUA dan PPAS .

h. Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
i. Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi Rancangan RAPBD untuk diajukan dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada Bulan September-Oktober.
j. Menetapkan APBD dengan Peraturan Daerah pada Bulan Desember.
k. Setelah APBD ditetapkan, disusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang diharapkan pada Bulan Januari sudah Selesai.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana seperti gedung dan perlengkapan kantor lainnya yang digunakan Mencukupi.

Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dibidang ketenagakerjaan, yaitu :

1) Belum semua pencari kerja yang telah dilatih dapat tersalurkan, karena kesempatan kerja tidak sebanding dengan pencari kerja.
2) Belum dimanfaatkannya peluang kerja ke luar negari secara optimal karena belum semua tenaga kerja memenuhi syarat keterampilan yang dibutuhkan
3) Lemahnya jiwa wirausaha bagi tenaga kerja.
4) Belum sepenuhnya dipahami hakekat hubungan industrial oleh pengusaha dan karyawan.

Sedangkan ***Solusi***/usaha pemecahan masalah adalah :

1) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan melalui pelatihan yang diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri.
2) Koordinasi antara instansi pemerintah maupun dengan lembaga swasta agar pencari kerja dapat tersalurkan.
3) Meningkatkan pemahaman hakekat hubungan industrial antara karyawan dan pengusaha.
4) Melakukan sertifikasi/kompetensi bagi pencari kerja.
5) Meningkatkan sosialisasi terhadap dunia usaha dan dunia industri tentang Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.
6) Memberikan motivasi bagi angkatan kerja untuk membuat usaha mandiri.
7) Menekankan kepada Lembaga Pelatihan Kerja untuk menyalurkan pencari kerja yang sudah dilatih.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2017tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Provinsi Bali.

Sesuai dengan *core business* Dinas, untuk dapat mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali melaksanakan Misi 20 yaitu "Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai- nilai budaya Bali".

Hal ini dijadikan sebagai acuan dalam mencapai sasaran strategis yang telah disepakati dan dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebagaimana dibawah ini.

Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan prioritasyang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Tahun 2019 untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	1. Monitoring dan Evaluasi Data Gender dan Anak, 2. Pelatihan Pendidikan Kebangsaan Bersefektif Gender, 3. Peningkatan Pemahaman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi, Kab,/Kota, 4. Pembinaan Kerja Kelompok Usaha Rumahan Untuk Produk Industri Unggulan di Kab/Kota 5. Peningkatan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Daerah
2.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	1. Workshops Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke 9 Kab/Kota, 2. Monitoring dan Evaluasi KDRT di 9 Kab/Kota, 3. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
3.	Program Peningkatan Perlindungan Anak	1. Penguatan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Prov.Bali, 2. Fasilitasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak, 3. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Provinsi, Kab/Kota, 4. Penyuluhan Sekolah Ramah Anak, 5. Pelatihan Pendampingan Hukum dan Rehabilitasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Psikososial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Jumlah Pegawai

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMP Sederajat	-	1	1	1	3
3	SMA Sederajat	2	5	7	3	17
4	D3	1	-	1	-	2
5	S1	5	5	2	6	18
6	S2	3	5	-	1	9
7	S3	-	-	-	-	-
JUMLAH		**12**	**16**	**11**	**11**	**50**
TOTAL		**28**		**22**		

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Bali digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
A	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	-	100	740,463,000	100	-	100	661,442,530	89.33
1	Tersedianya Data Gender dan PemberdayaanPerempuan	30 buku	100	42,625,000	100	37 buku	100	3,978,095	93.33
2	Meningkatnya Pemahaman pendidikan kebangsaan berspektif gender	35 orang	100	70,000,000	100	350 orang	100	65,475,580	93.54
3	Meningkatnya Pemahaman Gender bagi aparatur	35 orang	100	62,838,000	100	35 orang	100	55,484,100	88.3
4	Jumlah kelompok usaha rumahan yang dibina	9 Klp	100	65,000,000	100	9 Klp	100	62,030,000	95.43
5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan daerah	1000 orang	100	500,000,000	100	1000 orang	100	438,671,900	87.73
B	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	-	100	378,827,430	100	-	100	374,930,930	98.97
1	Terlatihnnya Gugus TugasTPPO dalam pendampingan bagi saksi dan / atau korban TPPO	50 buku	100	44,765,700	100	50 buku	100	43,840,700	97.93
2	Tersedianya data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	50 Lap Buku	100	68,561,730	100	50 Lap Buku	100	68,561,730	100
3	Persentase kasus yang ditangani sesuai standar	100%	100	265,500,000	100	100%	100	261,828,500	98.62
C	Program Peningkatan Perlindungan Anak	-	100	985,489,800	100	-	100	885,906,875	89.9

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
1	Jumlah OPD Kab/Kota /Prov yang melaksanakan perencanaan pembangunan peduli anak	1 Prov, 9 Kab/Kota	100	563,750,000	100	1 Prov, 9 Kab/Kota	100	513,054,585	91.01
2	Jumlah anak FAD yang mengikuti FAD di Kab/Kota/ Provinsi	30 orang	100	177,926,000	100	30 orang	100	148,373,200	83.39
3	Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya tentang KHA	200 orang	100	100,000,000	100	200 orang	100	97,462,030	97.46
4	Jumlah aparatur, siswa yang faham akan pentingnya sekolah ramah anak sesuai standar	50 orang	100	95,038,000	100	50 orang	100	78,766,260	82.88
5	Jumlah Kab/Kota yang memiliki tenaga terlatih pendampinmgan hukum dan rehabilitasi psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	50 orang	100	48,775,800	100	50 orang	100	48,250,800	98.92
D	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	-	100	2,351,879,000	100	-	100	2,249,263,906	65.64
1	Tersedianya biaya langganan telepon, air, dan listrik	12 bulan	100	120,000,000	100	12 bulan	92	98,703,379	82,25
2	Terselenggaranya kebersihan kantor	12 bulan	100	110,000,000	100	12 bulan	100	109,541,000	99,58
3	Tersedianya alat tulis kantor kantor	12 bulan	100	45,000,000	100	12 bulan	100	44,801,800	99,58
4	Tersedianya barang cetakandan penggandaan	12 bulan	100	35,000,000	100	12 bulan	100	35,000,000	100
5	Tersedianya komponen listrik	12 bulan	100	10,000,000	100	12 bulan	100	10,000,000	100
6	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang- undangan	12 bulan	100	15,480,000	100	12 bulan	100	15,480,000	100
7	Terpenuhinya Makan dan minumpegawai	12 bulan	100	30,000,000	100	12 bulan	100	29,810,000	99.37
8	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalamDaerah	12 bulan	100	300,648,000	100	12 bulan	100	290,908,950	96.75
9	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	100	45,000,000	100	12 bulan	100	45,000,000	100
10	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	6 paket	100	74,000,000	100	12 bulan	100	72,800,000	98.38
11	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	6 unit	100	994,346,000	100	12 bulan	100	974,444,378	98
12	Terselenggaranya oprasional kendaraan dinas untuk roda 4 dan 2	12 bulan	100	380,000,000	100	12 bulan	100	346,566,000	91.2
13	Terselenggaranya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	100	35,000,000	100	12 bulan	100	34,760,000	99.31
14	Terlaksanannya Rapat Koordinasidan Sinkronisasi Program DP3A	12 bulan	100	157,405,000		12 bulan	100	141,448,400	89.86

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

   a) Penyelenggaraan Program dan Kegiatan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali secara umum dapat berjalan lancar, hal ini dapat dilihat dari realisasi fisik hamper semua kegiatan mencapai 100% kecuali kegiatan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listril yang mencapai

92% karena pemakaian listrik dan air bulan Desember 2019 baru dibayarkan bulan Januari 2020.

b) Realisasi Keuangan Tahun 2019 adalah mencapai 93,59%, hal ini diakibatkan karena PPTK masih kurang cermat dalam perencanaan kebutuhan anggaran masing – masing belanja, dan pembelian barang dibawah pagu anggaran.

2. Solusi

a) Dalam menetapkan jenis belanja dan anggaran dari masing – masing kegiatan agar mengacu pada hasil Analisis Standar Belanja (ASB).

b) Dalam menetapkan harga barang pada masing – masing komponen barang yang dicantumkan dalam DPA, agar beRp.edoman pada standar harga barang yang sudah ditetapkan berdasarkan Peratutan Gubernur Bali.

8. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pemenuhan pangan sesuai dengan kuantitas maupun kualitasnya dapat mempengaruhi kebutuhan gizi seseorang dan akan berdampak pada perkembangan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan Undang-undang 18 tahun 2012 ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketika kondisi pangan bagi negara sampai dengan perorangan tidak terpenuhi maka kondisi yang akan terjadi adalah kondisi kerawanan pangan, sehingga kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi tidak tersedianya pangan yang cukup bagi individu/perorangan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pola konsumsi pangan di Indonesia masih didominasi oleh tingginya konsumsi karbohidrat terutama beras sebagai pangan pokok sementara konsumsi umbia-umbian, protein, sayuran dan buah-buahan belum mencapai target walaupun terjadi peningkatan konsumsi. Saat ini Konsumsi beras di Provinsi Bali mencapai 113 gram/kapita/hari, sedangkan untuk nasional sebesar 312 gram/kapita/hari, sementara konsumsi umbi-umbian hanya 40 gram/kapita/hari, dari jumlah ideal 100 gram/kapita/hari (Kementan,2011). Berdasarkan hal tersebut diperlukan perubahan pada pola konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya pendidikan, pengetahuan gizi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka perbaikan status gizi masyarakat sebagai salah satu prediktor untuk kualitas sumberdaya manusia. Ketersediaan energi Bali tahun 2019 sudah mencapai 2.646 kkal/kap/tahun, hal ini sudah memenuhi kebutuhan anggka rekomendasi

(WNPG) X tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kap/tahun, namun belum berimbang. Kebutuhan energi tahun 2019 masih didominasi oleh pangan nabati sebesar 2.108 kkal/kap/hari atau 79,70%, sedangkan pangan hewani hanya sebesar 537 kkal/kap/hari atau sebesar 20,30%.

Sedangkan untuk ketersediaan protein juga sudah terpenuhi yaitu sebesar 63 gr/kap/hari sesuai dengan angka kecukupan protein secara nasional sebesar 63 gr/kap/hari, yang bersumber dari protein nabati 39 gr/kap/hari atau 61,90% dan yang bersumber dari protein hewani sebesar 24 gr/kap/hari atau 38,90%. Sedangkan Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi untuk mengukur tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pencapaian nilai skor pola pangan harapan konsusmi Bali tahun 2019 mencapai 95,70% dan masih perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi skor PPH maksimal nasional sebesar 100. Berdasarkan PPH tingkat konsumsi dari 9 kelompok bahan pangan yang termasuk dalam komponen Pola Pangan Harapan, hanya 6 kelompok bahan (padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula serta sayuran dan buah) yang telah memenuhi skor PPH maksimal sedangkan kelompok bahan pangan yang lainnya masih belum mampu untuk mencapai skor PPH maksimal yang diharapkan. Semakin beragam konsumsi makanan yang dilakukan oleh masyarakat, maka skor PPH semakin tinggi.

Adapun fokus pembangunan Pangan diarahkan kepada peningkatan ketahanan pangan melaui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, mengatur distribusi pangan antar wilayah untuk menjamin stabilitas harga sampai tingkat konsumen. Untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal, serta meningkatkan pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Bali antara lain : Terwujudnya Ketahanan Pangan yang dengan indikator kinerja antara lain : Persentase Indek Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota diatas 80 dengan target kinerja 55%

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program akuntabilitas capaian kinerja	a) Pengadaan surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik c) Penyediaan jasa kebersihan kantor. d) Penyediaan alat tulis kantor. e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. h) Penyediaan makanan dan minuman. i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		j) Upacara keagamaan. k) Pengadaan peralatan gedung kantor. l) Pengadaan mebeleur. m) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas n) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor. o) Penyusunan perencanaan dan pelaporan caapaian kinerja.
2	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan.	a) Identifikasi Pemanfaatan potensi Sumberdaya Pangan b) Penanganan Rentan Pangan c) Peningkatan ketersediaan pangan
3	Program Mendukung Ketahanan Pangan melalui Kedaulatan Beras	a) Pemantapan stabilitasi harga pangan b) Penguatan system distribusi pangan c) Revitalisasi fungsi jineng
4	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong b) Pengembangan Pangan Lokal c) Promosi dan penganekaragaman pangan
5	Program Peningkatan Keamanan Pangan Segar.	a) Penataan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar. b) Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan c) Peningkatan penyebaran informasi keamanan pangan dan mutu pangan segar.
6	Program Peningkatan Sertifikasi Mutu dan Keamaan Pangan Segar.	a) Penyediaan jasas surat menyurat. b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah. d) Penyediaan peralatan gedung kantor. e) Peningkatan registrasi,sertifikasi dan keamanan pangan segar. f) Penerapan jaminan mutu keamanan pangan segar.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1) Dinas

- Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan pagu Rp. 2.045.747.316 realisasi keuangan Rp. 1.850.962.687 (90,48%), realisasi fisik 100%
- Program peningkatan Ketersediaan Pangan dengan Pagu Rp. 325.192.364 realisasi keuangan Rp.310.406.833 (95,45%) realisasi fisik 100%
- Program Mendukung Ketahanan Pangan melalui Kedaulatan Beras dengan pagu kegiatan Rp. 2.644.334.612,- realisasi keuangan 2.269.108.321,62 realisasi fisik 100%
- Program peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan pagu kegiatan Rp. 612.609.996 realisasi keuangan Rp.592.782.175 (96,76%) realisasi fisik 100%
- Program Peningkatan keamanan pangan segar dengan Pagu Rp. 544.297.080 realisasi keuangan Rp. 512.480.262 (94,15%) realisasi fisik 100%

2) UPTD

- Program peningkatan sertifikasi mutu dan keamanan pangan segar dengan pagu kegiatan Rp. 200.000.000 realisasi anggaran Rp. 165.825.152 (82,91%) realisasi fisik 98,72%

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2019 digambarkan pada tabel dibawah ini :

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahan Pangan Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3 Jenis	100	1,500,000	100	3 jenis	100	900,000	60,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	3 Jenis	100	134,000,000	100	3 jenis	100	102,347,572	76.38
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4 org, 24 jenis	100	131,056,652	100	4 org, 24 jenis	100	131,056,652	100
4	Penyediaan alat tulis kantor.	30 Jenis	100	24,585,700	100	30 Jenis	100	24,585,700	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	100	18,500,000	100	3 Jenis	100	18,497,900	99,99
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	14 Jenis	100	12,473,000	100	14 Jenis	100	12,473,000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 explr	100	3,360,000	100	48 explr	100	3,360,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	2000 ktk	100	35,000,000	100	1681 Ktk	94,00	29,420,000	94,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.	2 Jenis	100	313,769,188	100	2 Jenis	100	238,924,039	76,15
10	Upacara Keagamaan	4 Jenis	100	20,000,000	100	4 Jenis	100	19,750,000	98,75
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	8 Jenis	100	254,985,684	100	8 Jenis	100	243,568,500	95.52
12	Pengadaan meubeleur.	12 Jenis	100	303,775,000	100	12 jenis	100	277,513,250	91.35
13	Pemeliharaan rutin/ berkal peralatan perlengkapan gedung kantor.	5 Jenis	100	254,106,376	100	5 Jenis	100	253,204,683	99,52
14	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	2 Jenis	100	358,106,376	100	2 Jenis	100	347,276,745	96,98
15	Penyusunan,perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	18 Dok.	100	179,621,988	100	18 Dok.	100	147,484,646	82,11
B	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan								
1	Penanganan rentan pangan	3 Jenis informas	100	95,999,088	100	3 Jenis informas	100	92,453,597	96,31
2	Identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan	5 Jenis komoditi	100	111,678,588	100	5 Jenis komoditi	100	103,173,297	92,38
3	Peningkatan ketersediaan pangan	Energy 2400 kkal/kap/ hr dan protein 63 gr/	100	117,514,688	100	Energy 2400 kkal/kap/hr dan protein 63 gr/ kap/hr	100,34	114,779,939	97,67

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
		kap/hr							
C	Program mendukung Ketahanan Pangan melalui Kedaulatan beras								
1	Pemantapan Stabilitasi harga	17 komoditi	100	70,762,788	100	17 komoditi	100	69,033,255	97,56
2	Penguatan system distribusi pangan	14 Klpk	100	109,773,888	100	14 Klpk	100	99,542,267	90,68
3	Revitalisasi lumbung pangan	40 Ton	100	74,973,088	100	40 Ton	100	71,357,397	95.18
D	Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan								
1	Pengembangan pangan pokok lokal	2 komoditi	100	77,163,004	100	2 komoditi	100	77,162,997	99,99
2	Peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong	80 Klpk	100	240,693,788	100	80 Klpk	100	229,701,281	95,43
3	Promosi penganekaragaman pangan	18 Klpk	100	294,753,204	100	18 Klpk	100	285,917,897	97,00
E	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Segar								
1	Penataan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar	118 pelaku usaha	100	64,997,004	100	118 pelaku usaha	100	64,896,997	99,85
2	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	10 sampel	100	414,182,688	100	10 sampel	100	382,728,568	92,41
3	Peningktan penyebaran informasi penanganan keamanan pangan	36 Klpk	100	65,117,388	100	36 Klpk	100	64,854,697	99,60
	Program Peningkatan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Segar								
1	Penyediaan alat tulis kantor	11 Jenis	100	683,200,000	100	11 Jenis	100	683,200,000	100
2	Penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	100	45,000	100	2 jenis	100	45,000	100
3	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	6 buku, 294 lbr	100	178,800	100	6 buku, 294 lbr	100	178,800	100
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	2 Jenis	100	8,800,000	100	2 Jenis	100	7,800,000	88,64
5	Pengadaan peralatan gedung	4 Jenis	100	9,475,000	100	4 Jenis	88,65	8,400,000	88,65
6	Peningkatan registrasi, sertifikasi dan keamanan pangan	10 sertifikat	100	93,718,000	100	10 sertifikat	100	81,864,200	87,35
7	Penerapan jaminan mutu keamanan pangan segar	9 PSAT	100	87,100,000	100	9 PSAT	100	66,853,952	76,76

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal
- Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit
- Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi

- Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
- Penguasaan teknologi bagi petani lemah
- Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan.
- Koordinasi lintas sector belum berjalan maksimal

Solusi dan Upaya Tindak Lanjut

- Memberikan edukasi dengan cara model pengembangan lahan pekarangan produktif (KRP.L).
- Pengembangan teknologi hemat air, perbaikan jaringan irigasi
- Promosi, pameran dan pengembangan kemitraan usaha serta penyaluran kredit usahatani
- Dilaksanakannya pelatihan / kursus bagi petani, serta peningkatan koordinasi penyuluhan sampai ke tingkat BPP.
- Melakukan uji makanan ke produsen dan sertifikasi organik.
- Pemmbinaan pasca panen, pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan STA (Sub Terminal Agribisnis), Sertifikasi dan perlabelan benih/bibit, pengawasan beredarnya benih dan pembinaan penangkar benih.

9. Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerahdan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendataan inventaris tanah milik Pemerintah Provinsi Bali sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Tanah yang berada dalam Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali tersebar secara tidak merata di 9 (sembilan) Kab/Kota se-Bali dan Luar Bali.Sampai dengan tahun 2019 berjumlah sebanyak 4.953 bidang, dengan luas keseluruhan 30.202.139 M2. Adapun sebaran Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Penguasaan Lahan Pemerintah Provinsi Bali

No	Lokasi	Jumlah (bidang)	Luas (m^2)
1	Kab. Karangasem	585	5.666.040,40
2	Kab. Badung	1.111	3.509.537,75
3	Kab. Bangli	206	1.741.041,20
4	Kab. Gianyar	438	2.337.728,14

No	Lokasi	Jumlah (bidang)	Luas (m^2)
5	Kab. Klungkung	1.063	2.625.143,63
6	Kab. Tabanan	598	3.899.309,80
7	Kab. Buleleng	250	5.260.068
8	Kab. Jembrana	232	2.246.517,10
9	Kota Denpasar	460	2.910.582,99
10	Luar Bali	10	6.170

Selanjutnya pengelolaan tanah-tanah yang merupakan Barang Milik Daerah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali, secara bertahap telah dilakukan penataan untuk pengamanan administrasi, fisik dan hukum untuk menghindari permasalahan berkaitan dengan penguasaan tanah yang banyak diklaim oleh masyarakat atau pihak tertentu. Untuk itu pengaturan pemanfaatan tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali perlu dilakukan pengelolaanlebih optimal agar bermanfaat untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan PemerintahanDaerah, termasuk untuk tanah yang belum dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Provinsi Bali, dilakukan pengelolaan secara langsung atau dengan pihak ketiga untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan kelestarian dan sesuai dengan tata ruang wilayah yang ada. Berikut perincian peruntukan tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali pada tabel dibawah ini:

Rincian Peruntukan Tanah Penguasaan Pemerintah

No	Peruntukan Tanah	Jumlah (bidang)
1	Kantor untuk penyelenggaraan Tugas Provinsi	201
2	Asrama Mahasiswa di Luar Bali	9
3	Pinjampakai oleh Pemkab/Kota/Pusat	416
4	Rumah Dinas	146
5	Rumah Jabatan	6
6	Sewa oleh Pihak Ketiga	251
7	Kerjasama pemanfaatan (ITDC, SDM, DWI)	10
8	Sawah/tegalan yang digarap oleh masyarakat dan jalan Provinsi	3.856
	TOTAL	4.895

Program dan Kegiatan

Kebijakan dalam bidang pertanahan sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik diarahkan pada pengembangan penataan ruang wilayah sesuai peruntukkannya, dengan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kegiatan Pendataan,

Pemetaan dan Pensertifikatan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dan kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Bali.

Realisasi Program dan Kegiatan

Kegiatan Pengamanan dan Pensertifikatan Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dana sebesar Rp.711.950.000 realisasi keuangan mencapai Rp. 541.813.624 (76,10%) dan realisasi fisik mencapai 100%. Sampai dengan Tahun 2019 tanah inventaris milik Pemerintah Provinsi Bali yang tercatat dalam buku inventaris tanah milik Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 4.895 bidang.

Dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) khusunya tanah aset milik Pemerintah Provinsi Bali, telah dilaksanakan kegiatan pemasangan patok batas tanah dan papan nama kepemilikan tanah aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali secara bertahap. Untuk tahun 2019 pemasangan patok batas tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar dengan jumlah patok sebanyak 214 buah, dengan rincian sebagai berikut :

Patok Batas Tanah

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
1	Badung	a) Desa Ungasan sebanyak 74 buah untuk 4 bidang tanah. b) Desa Ayunan sebanyak 13 buah untuk 2 bidang tanah. c) Desa Tibubeneng sebanyak 16 buah untuk 2 bidang tanah. d) Desa Canggu sebanyak 42 buah untuk 1 bidang tanah. e) Desa Munggu sebanyak 15 buah untuk 2 bidang tanah. f) Desa Munggu sebanyak 6 buah untuk 1 bidang tanah.
2	Tabanan	Desa Baturiti sebanyak 20 buah untuk 1 bidang tanah.
3	Denpasar	a) Desa Pedungan sebanyak 20 buah untuk 1 bidang tanah. b) Desa Pemecutan Kaja sebanyak 2 buah untuk 1 bidang tanah. c) Desa Kesiman Kertalangu sebanyak 6 buah untuk 1 bidang tanah.

Sedangkan untuk pemasangan papan nama kepemilikan tanah aset sebanyak 16 buah untuk 27 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :

Papan Nama Kepemilikan Tanah Aset

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
1	Badung	a) Desa Ungasan sebanyak 13 buah untuk 4 bidang tanah.

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
		b) Desa Ayunan sebanyak 2 buah untuk 2 bidang tanah. c) Desa Tibubeneng sebanyak 2 buah untuk 2 bidang tanah. d) Desa Canggu sebanyak 1 buah untuk 1 bidang tanah. e) Desa Munggu sebanyak 1 buah untuk 2 bidang tanah. f) Desa Cemagi sebanyak 1 buah untuk 1 bidang tanah.
2	Tabanan	Desa Baturiti sebanyak 3 buah untuk 1 bidang tanah.
3	Denpasar	a) Desa Pedungan sebanyak 1 buah untuk 1 bidang tanah. b) Desa Pemecutan Kaja sebanyak 1 buah untuk 1 bidang tanah. c) Desa Kesiman Kertalangu sebanyak 1 buah untuk 1 bidang tanah.

Karena terbatasnya ketersediaan anggaran mengakibatkan masih banyak tanah penguasaan milik Pemerintah Provinsi Bali yang belum dipasangi patok batas tanah dan papan nama kepemilikan.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Secara umum program-program dan kegiatan-kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dengan baik. Namun ada beberapa permasalahan dalam kaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu :

1) Terdapat Barang Milik Daerah dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ijin.
2) Terdapat Barang Milik Daerah berupa tanah belum bersertifikat.
3) Ada klaim atau gugatan di masyarakat sampai proses hukum pengadilan

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maupun dalam upaya memperbaiki manajemen penatausahaan BMD, maka pada tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan :

- Melaksanakan pendataan atas tanah-tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali yang tersebar di 9 Kab/Kota.
- Melaksanakan pensertifikatan tanah aset yang belum bersertifikat.
- Kerjasama dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Bali dalam hal pemetaan, pensertifikatan dan Kejaksaan Tinggi Bali dalam upaya penyelesaian masalah tanah aset.

10. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Bali merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan lingkungan hidup mendukung Misi 11 dan Misi 21 pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan kebijakan program dan kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan.
3	Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.
4	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	a. Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan; b. Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan.
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	a. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi; b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan TPA Regional; c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional.

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/Urusan Pilihan

Dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan	Target Tahun 2019	Hasil tahun 2019	Realisasi
1.	Pelayanan informasi status mutu air	8 Sungai lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali	8 Sungai lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali	100%

		dengan 24 titik sampling, Danau dilakukan pada 4 (empat) buah Danau dengan 8 Titik sampling, Air Laut dilakukan pada perairan pesisir dekat pantai, yang meliputi pantai di kawasan pariwisata, dengan 9 titik sampel.	dengan 24 titik sampling, Danau dilakukan pada 4 (empat) buah Danau dengan 8 Titik sampling, Air Laut dilakukan pada perairan pesisir dekat pantai, yang meliputi pantai di kawasan pariwisata, dengan 9 titik sampel.	
2.	Pelayanan informasi status mutu udara ambien	36 Titik (1 Periode) di 9 Kabupaten /Kota	36 Titik (1 Periode) di 9 Kabupaten /Kota	100%
3.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	10 Kasus	10 Kasus	100%

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

a. Jumlah pegawai keseluruhan 63 orang.
b. Kualifikasi pendidikan :

   SMP: 1 orang; STM : 2 orang; SMA: 15 orang; Sarjana Muda : 1 orang; S1 : 22 orang, S2 : 22 orang.
c. Pangkat dan golongan :

   Gol II : 12 orang; Gol III : 36 orang; Gol IV : 15 orang.
d. Jumlah jabatan struktural : 24

Alokasi dan realisasi anggaran

Sumber Dana APBD Provinsi Bali

Realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Langsung, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.574.537.701,00 (92,13%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.136.310.040,00. Adapun realisasi dari masing-masing program/kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja,** dengan kegiatan :
   a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan realisasai keuangan Rp. 102.988.257,00 (82,39%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 125.000.000,00.
   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan realisasai keuangan Rp. 153.460.670,00 (95,38%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 160.902.264,00.
   c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan realisasai keuangan Rp. 22.585.300,00 (94,11%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 24.000.000,00.

d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan realisasai keuangan Rp. 7.500.000,00 (100,00%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 7.500.000,00.
e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan realisasai keuangan Rp. 5.000.000,00 (100,00%) dan realisasi fisik 100 % dari pagu anggaran Rp. 5.000.000,00.
f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan realisasai keuangan Rp. 11.000.000,00 (84,62%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 13.000.000,00.
g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan realisasai keuangan Rp. 7.483.000,00 (99,77%), realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 7.500.000,00.
h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan realisasai keuangan Rp. 66.175.000,00 (99,89%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 66.250.000,00.
i. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah, dengan realisasai keuangan Rp. 137.263.090,00 (79,05%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 173.648.950,00.
j. Kegiatan Upacara Keagamaan, dengan realisasai keuangan Rp. 60.877.000,00 (98,99%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 61.500.000,00.
k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas, dengan realisasai keuangan Rp. 401.465.435,78 (98,36%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 408.174.936,00.
l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan realisasai keuangan Rp. 528.117.562,00 (93,88%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 562.568.080,00.
m. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi, dengan realisasai keuangan Rp. 44.284.320,08 (93,33%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 47.447.820,00.
n. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja, dengan realisasai keuangan Rp. 41.286.570,00 (83,44%) dan realisasi fisik 100% dari pagu anggaran Rp. 49.481.570,00.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan *Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.*

Daerah Bali sebagaimana daerah-daerah lainnya menghadapi permasalahan sumber daya air dalam menunjang kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yaitu ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air yang ada wajib dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan beberapa sungai lintas Kabupaten/Kota terutama yang melewati daerah perkotaan telah menunjukkan indikasi beberapa parameter seperti: DO, BOD, COD, dan Total Coli melampaui Baku Mutu Lingkungan.

Keberadaan 4 (empat) danau sebagai penyimpan air adalah sangat strategis, namun telah terindikasi mengalami penurunan kualitas di beberapa lokasi yang ditunjukkan melalui beberapa parameter seperti: Phosfat dan Detergen telah melampaui Baku Mutu Lingkungan. Kualitas air laut di beberapa lokasi telah terindikasi mengalami penurunan kualitas yang ditunjukkan oleh adanya beberapa parameter seperti TSS, BOD, dan COD telah melampaui Baku Mutu Air Laut untuk rekreasi dan wisata bahari.

Berbagai aktifitas seperti kendaraan bermotor, industri, aktifitas pembangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan gas emisi ke udara. Kondisi kualitas udara di Bali terutama pada terminal, pusat-pusat kota dan kompleks pertokoan telah mengalami tekanan cukup serius terutama pada parameter PM_{10} (bahan partikulat), dan bahkan pada tempat tertentu sudah melebihi Baku Mutu Kualitas Udara.

Indonesia telah berupaya merespon issu perubahan iklim melalui upaya mainstreaming perubahan iklim dalam penyusunan perencanaan nasional dan daerah serta pernyataan Non-Binding Commitment yakni upaya Indonesia mengurangi tingkat emisi GRK sebesar 26% di tahun 2020 di bawah kondisi Business as Usual (BAU).

Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional GRK yang merupakan salah satu aksi menghadapi perubahan iklim (mitigasi maupun adaptasi) yang melibatkan semua sektor penghasil emisi GRK yang potensial di Indonesia dan telah dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD). Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Bali bertujuan:

- Untuk mengetahui kualitas air (sungai, danau, dan air laut) melalui pengujian parameter sesuai yang dipersyaratkan;
- Untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambien terutama untuk parameter PM_{10}, $PM_{2,5}$. NO_2, SO_2, Pb dan CO.
- Tersedianya data-data emisi Gas Rumah Kaca secara akurat dari sektor-sektor terkait.
- Tersedianya informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- Jumlah kawasan pariwisata strategis yang terpantau di Provinsi Bali.
- Terpantaunya kerusakan di kawasan pesisir dan laut dan kegiatan yang ada di kawasan pesisir di Provinsi Bali.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Air

Pemantauan kualitas air Tahun 2019 dilaksanakan di 8 (delapan) Sungai lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dengan 24 (dua puluh empat) titik sampling, 4 (empat) Danau meliputi Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan dengan 8 (delapan) titik sampling. Air Laut dilakukan pada perairan pesisir dekat pantai, yang meliputi pantai di kawasan pariwisata dan pelabuhan di Pantai Celukan Bawang, Pantai

Padangbai, Pantai Gilimanuk, Pantai Pengambengan dan Pantai Benoa dengan 9 (sembilan) titik sampel.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara Tahun 2019 dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) parameter, CO, NO_2, SO_2, timbal Pb, PM_{10} dan $PM_{2,5,}$ dengan 4 (empat) titik pantau lokasi *sampling* yang meliputi Kawasan Terminal, Kawasan Pelabuhan/ Bandar Udara, Kawasan Pariwisata, Pasar dan Pusat Kota/ padat lalu-lintas yang ditetapkan di masing-masing 4 (empat) lokasi *sampling* di setiap kabupaten/ kota.

Sub Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi GRK di Provinsi Bali dilakukan dengan pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK yang dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor utama yaitu energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Inventarisasi GRK di Provinsi Bali yang dilakukan di 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota menunjukan adanya kenaikan emisi GRK yaitu sebesar 312,52Gg CO_2 e atau 3,09% dari tahun sebelumnya.

Sub Kegiatan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Flora dan Fauna

Keanekaragaman hayati meliputi berbagai jenis tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan pola kehidupannya masing-masing. Setiap jenis tumbuhan, satwa dan organisme mempunyai manfaat dan peran yang berbeda-beda bagi fungsi ekologis dan kehidupan manusia. Pelaksanaan pembelian bibit tanaman dan penanaman pohon untuk meningkatkan tutupan lahan di luar kawasan hutan menuju taman Kehati seluas 1 (satu) Hektar yang dilaksanakan di Areal Pura Dalem Pingit, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu

Sumberdaya alam wilayah pesisir Provinsi Bali ditopang oleh keberadaan ekosistem pesisir yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem tersebut menyediakan beragam jasa-jasa lingkungan sebagai daya tarik dan atraksi wisata. Pelaksanaan pemantauan ekosistem pesisir dan laut terpadu dilakukan di 13 (tiga belas) kawasan di Provinsi Bali. Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 272.902.620,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 98,03 % dari pagu anggaran.

3. Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan *Kegiatan Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan*.

Studi lingkungan harus dilakukan khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting. Untuk mewujudkan hal itu maka AMDAL sebagai salah satu studi kelayakan harus dilakukan khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting, sehingga dampak yang akan muncul baik dalam tahap

prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dapat dicegah dan di antisipasi sedini mungkin melalui rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), sedangkan kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting dikelola dengan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Selain itu pengawasan wajib dilakukan guna memastikan bahwa setiap usaha/ kegiatan wajib izin lingkungan beroperasi sesuai kaidah-kaidah yang tertuang di dalam dokumen/ izin lingkungan yang dimilikinya. Salah satu tugas dan wewenang dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup oleh masyarakat. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi/laporan terkait adanya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Kegiatan Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan bertujuan untuk:

a. Melakukan pembinaan dan evaluasi di instansi bidang lingkungan hidup kabupaten/ kota yang menerbitkan rekomendasi/ izin lingkungan di wilayahnya serta mendorong kabupaten/kota agar segera membentuk Tim Komisi Penilai AMDAL (KPA);
b. Melakukan pengawasan pada kegiatan wajib izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL);
c. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan Komisi Penilai Amdal (KPA) provinsi maupun kabupaten/kota;
d. Melakukan pembahasan, pemeriksaan, penilaian, dan survey lapangan terhadap penerbitan rekomendasi izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali;
e. Menyelesaikan pengaduan pencemaran lingkungan hidup yang masuk/teregistrasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali; dan
f. Melakukan validasi terhadap KLHS yang disusun oleh provinsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan validasi yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan ini antara lain adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen wajib izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sebanyak 30 dokumen, pengawasan terhadap 30 usaha dan/ atau kegiatan wajib dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL), penyelesaian proses pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang masuk/ teregistrasi sebanyak 10 kasus, dan melakukan validasi terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) baik yang disusun baik oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/ Kota dimana pada Tahun 2019 Dokumen KLHS yang telah tervalidasi antara lain: Dokumen KLHS Revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Provinsi) dan Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ) Kota Denpasar (Kota).

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 185.306.029,- (dua ratus dua juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 91,63 % dari pagu anggaran.

4. **Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dengan *Kegiatan Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.***

Isu lingkungan yang semakin viral secara lokal maupun nasional adalah permasalahan sampah, baik sampah yang mudah terurai dan sampah yang sulit terurai maupun sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya beracun). Untuk menanggulangi permasalahan persampahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Program Adipura, yakni program dalam pengendalian pencemaran yang domainnya pada pengelolaan persampahan di seluruh kota di indonesia, termasuk kota-kota di 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota se-Bali.

Untuk peningkatan kesadaran masyarakat haruslah dimulai dengan mengedukasi masyarakat dari usia dini sebagai pembentukan kebiasaan atau pembentukan karakter masyarakat untuk peduli dan berbudaya lingkungan. Salah satu program pembentukan karakter dimaksud adalah dengan melaksanakan Program Adiwiyata, yaitu Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan membentuk warga sekolah (peserta didik, tenaga pendidik, komite dan tenaga non pendidik yang ada di lingkungan sekolah) untuk membiasakan diri dalam berprilaku yang peduli dan berbudaya lingkungan. Selain itu mengapresiasi dengan memberikan penghargaan juga merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan atau memperluas tingkat kesadaram masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Kegiatan Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

a. Menciptakan lingkungan hidup yang bersih, hijau, sehat, lestari dan indah serta berkesinambungan;
b. Memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah dan warga sekolah lain dalam upaya pelestarian lingkungan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
c. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara mandiri;
d. Meningkatkan Kinerja Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik) dalam pengelolaan sampah B3 dan Sampah Limbah B3 sesuai Peraturan Perundang-undangan;
e. Mewujudkan peningkatkan peran kelembagaan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan sinkronisasi program/kegiatan terkait Pelestarian, Pengendalian Pencemaran Ligkungan hidup (PPLH), antara lain Program Adipura, Adiwiyata dan Penghargaan Kalpataru.

Sub Kegiatan Pengelolaan Sampah

Hingga tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Bali antara lain:

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah antara lain:

- Sosialisasi Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ke Kabupaten/ Kota se-Bali, terdiri dari unsur OPD, aparat Desa, tokoh keagamaan, lembaga swasta, sekolah, pengelola pasar, dan komunitas lingkungan.
- Selain memberikan sosialisasi melalui pertemuan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali juga melakukan sosialisasi kepada penjual dan pembeli di pasar tradisional sekaligus memberikan tas tidak sekali pakai. Hal ini sangat penting dilakukan karena memberikan pemahaman langsung kepada penjual dan pembeli terkait dampak PSP terhadap lingkungan dan kesehatan.
- Inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai

  Toko modern/ retail di Kota Denpasar dan Kab. Badung sudah mengalami penurunan dalam penggunaan/penyediaan PSP, hal ini dapat terlihat volume PSP yang menurun pada saat sebelum (akhir tahun 2018) dan sesudah (tahun 2019) diterbitkan Pergub No. 97/2018. Begitu pula dengan toko modern jaringan seperti: Alfamart, Indomaret, Circle K, dsb, sudah mengalami penurunan. Sedangkan toko modern di kabupaten lain belum terlihat penurunan yang signifikan.
- Inventarisasi distributor/ pemasok Plastik Sekali Pakai

  Ketiga jenis PSP masih dijual bebas di pasaran dikarenakan permintaan masyarakat akan kebutuhan PSP masih cukup tinggi dan proses distribusi PSP dari luar Bali masih lancar. Data distributor/ pemasok PSP ini akan digunakan sebagai bahan pengawasan bagi Tim Bali Resik Sampah Plastik untuk menerapkan sanksi administratif.
- Evaluasi capaian Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

  Capaian pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT Provinsi Bali mengalami pengurangan SRT dan SSSRT 17,6% dan penanganan SRT dan SSSRT 54,74%.
- Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik

  Pelaksanaan Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik di kabupaten/ kota se-Bali, dengan peserta 12.245 s/d 54.782 orang. Dengan total jumlah sampah yang terkumpul 4.201 s/d 28.250 kg. perlakuan sampah yang terkumpul yaitu sampah plastic dalam kondisi kotor dibawa ke TPA dan yang bersih dibawa ke bank sampah.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3

- Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pemerintah kabupaten/ kota terkait pengawasannya terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten/ Kota;

- Mensosialisasikan peraturan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten/ Kota dengan hasil sebagai berikut:

a. Kesepakatan akhir dengan fasyankes di kabupaten dimana pertemuan pembinaan dan sosialisasi dilanjutkan dengan penyusunan nota kesepakatan dan berita acara antara pemda dengan seluruh fasyankes dengan dilampirkan serta penyusunan SOP untuk penyimpanan proses B3
b. Adanya usulan Bali mempunyai mesin *incinerator* dengan harapan mempercepat proses pengangkutan karena limbah B3 mempunyai batas penyimpanan dan meringankan biaya jasa pengangkutan dan pengolahannya, untuk perizinannya harus mempunyai izin pengangkutannya dan izin pengolahannya yang hanya diperkenankan di kawasan industri dan sesuai RUTR lokasi di Bali hanya di Pengambengan dan Celukan Bawang.
c. Ada rencana untuk Puskesmas memiliki mesin *incinerator* dengan syarat tertentu seperti cerobongnya, ruang pengolahannya/ *chamber* dengan 2 (dua) ruang sehingga fasyankes bila akan membeli alat pengolahannya untuk dipelajari ketersediaan sparepart, spect mesinnya bila tidak memiliki alat pengolahnya harus diserahkan kepada pihak ketiga dengan bukti manifest yang diserahkan kepada penghasil limbah B3.
d. Tentang pentingnya puskesmas memiliki *incinerator* dimana sesuai PP Nomor 47/2016 akan ada pengembangan terhadap jenis fasyankes yang tadinya dalam permenLHK Nomor 56/2015 seperti spa dan counter tattoo dan untuk praktek dokter cukup dengan menyimpan limbah dengan menggunakan *refrigerator/ coldstorage* kecil karena volume tidak banyak dan membuat NSPK dalam jangka waktu tertentu untuk selanjutnya dikirim ke penyimpanan pada Rumah Sakit.

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Pelaksanaan Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 4 sekolah;

Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 7 sekolah;

Sekolah Adiwiyata Provinsi sebanyak 35 sekolah.

- Pelaksanaan Kalpataru

  Dari 3 Usulan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2019, yang lolos hanya 1 sebagai Penerima Kalpataru adalah Kelompok Nelayan Prapat Agung Mangening Patasari Jl. Kubu Anyar No.8 Lingkungan Temacun, Kuta Kab.Badung.

  Adapun realisasi fisik kegiatan Kemitraan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 175.742.410,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau 87,00 % dari pagu anggaran.

5. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan, dengan kegiatan meliputi:

a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan menegaskan bahwa untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup diperlukan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan Tahun 2019 adalah melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan melalui Uji Profisiensi, bimbingan teknis bagi personil laboratorium untuk pemenuhan persyaratan kompetensi personil dalam rangka menuju akreditasi dan registrasi, dan pembinaan laboratorium lingkungan Daerah.

Peningkatan kompetensi laboratorium dalam rangka menuju akreditasi laboratorium lingkungan yaitu dengan meningkatkan jumlah parameter uji laboratorium lingkungan sebanyak 8 parameter.

Pelaksanaan bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi personil laboratorium yaitu sebagai berikut:

- ✓ Bimtek Pemahaman dan Penerapan SNI/ISO/IEC 17025:2017;
- ✓ Bimtek Jaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Laboratorium;
- ✓ Bimtek Validasi/Verifikasi Metode dan Angka Penting.

Pembinaan Laboratorium Lingkungan yang dilakukan oleh Tim Pembina Laboratorium Lingkungan Provinsi Bali terhadap laboratorium lingkungan daerah di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota.

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah berjalan 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.152.400,- (*sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 88,50% dari total anggaran.

b. *Kegiatan Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan*

Laboratorium pengujian adalah laboratorium yang melaksanakan pengujian, yakni suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan Tahun 2019 untuk mendapatkan data-data terkait kualitas lingkungan untuk pengawasan dalam rangka pengambilan kebijakan dan untuk persiapan menuju akreditasi dan registrasi Laboratorium Lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan pengujian tetap dilaksanakan untuk mendapatkan data-data kualitas lingkungan untuk pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya melakukan pengujian parameter lapangan bersamaan dengan kegiatan lainnya, kemudian melakukan pengujian kualitas lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan mengikuti uji profisiensi yang

merupakan salah satu syarat persiapan laboratorium menuju akreditasi. Sampel uji yang berhasil diuji Tahun 2019 sebanyak 90 sampel.

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah berjalan 100%, dengan realisasi keuangan 98.87% atau sebesar Rp. 170.971.793,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari pagu anggaran.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan, dengan kegiatan meliputi:

a. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan koordinasi;

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional sebagai bagian dari pengelolaan sampah yang melayani lintas Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Bali mulai Tahun 2019 mengelola 2 (dua) TPA Regional yaitu:

1. TPA Sarbagita di Desa Suwung Kota Denpasar yang melayani Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
2. TPA Regional Bangli di Desa Bangklet Bangli yang melayani Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem.

Monitoring dilaksanakan di 2 (dua) TPA Regional di Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli. Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah berjalan 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.483.400,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau 62,59% dari pagu anggaran.

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan TPA Regional;

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan TPA Regional dilaksanakan untuk kelancaran pelayanan pengelolaan sampah di TPA Regional. Penyediaan dimaksud yaitu pengadaan pompa mesin air portable untuk TPA Regional sebanyak 1 (satu) paket.

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah berjalan 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 237.110.432,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau 85,48% dari pagu anggaran.

c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional.

Pengelolaan prasarana dan sarana TPA Regional meliputi pembelian bahan baku bangunan sebagai bahan pengelolaan sampah; pemeliharaan kendaraan operasional persampahan di TPA Regional; serta pemeliharaan TPA Regional.

Tahun 2019 telah dimulai pembentukan Tim Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menuju persiapan perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/ Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PLTSa/ PSEL) di TPA Regional Sarbagita.

Sedangkan pada TPA Bangli, Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir peruntukannya sebagai TPA Regional dikarenakan mulai Tahun 2020 TPA Bangli telah diserahkan oleh Kabupaten Bangli untuk menjadi menjadi TPA Kabupaten.

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah berjalan 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.401.149.524,16 (dua milyar empat ratus satu juta seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah koma enam belas sen) atau 96,73% dari pagu anggaran.

Sumber Dana Dekonsentrasi

Realisasi fisik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan kegiatan Koordinasi perencanaan dan evaluasi sebesar 100% sedangkan realisasi keungannya sebesar 94,58% dari pagu anggaran sebesar Rp. 173.500.000,- , kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) komponen yaitu Persentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK (Peningkatan SAKIP), dengan sub komponen :

1. Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,49% dari pagu anggaran sebesar Rp. 112.500.000,- .
2. Administrasi kegiatan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,42% dari pagu anggaran sebesar Rp. 61.000.000,-.

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Untuk Sarana dan Prasarana yang meliputi gedung dan peralatan kantor lainnya cukup memadai hanya saja untuk gedung UPT. Laboratorium Lingkungan ada beberapa bagiannya yang perlu diperbaiki/rehab.

Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain:

1. Permasalahan
   a. Koordinasi antar OPD di lingkungan Provinsi Bali dan instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati belum optimal sehingga pengembangan Taman Kehati berjalan parsial tanpa perencanaan yang komprehensif;
   b. Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati belum terlaksana secara maksimal sehingga prosedur, tahapan dan bentuk Taman Kehati yang akan dikembangkan;
   c. Belum optimalnya pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, yakni melaksanakan pembinaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan sekolah model atau percontohan, pendampingan dan monitoring dan evaluasi program;

d. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan Adipura di setiap Kota se provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura;
e. Tidak terlaksananya pendampingan penyusunan kebijakan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f. Tidak terlaksananya identifikasi, inventarisasi dan verifikasi terkait dengan Masyarakat Hukum Adat;
g. Belum optimalnya identifikasi dan pendataan penghasil limbah B3 di Kabupaten/ Kota se-Bali sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pengelolaan limbah B3 di Provinsi Bali;
h. Belum optimalnya koordinasi dengan Kab/Kota dalam pelaksanaan dan pelaporan gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik;
i. Belum terakreditasi dan teregistrasinya UPTD. Laboratorium Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali sehingga belum mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan informasi parameter kualitas lingkungan;
j. Sarana dan prasarana untuk pengujian belum memadai sehingga tidak bisa melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan secara maksimal;
k. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang pengujian laboratorium.

2. Solusi

a. Perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Taman Keanekeragaman Hayati di tingkat Provinsi dan masing-masing Kabupaten/ Kota yang melibatkan OPD dan *stakeholders* terkait sebagai wadah untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan perencanaan secara terpadu dan komprehensif;
b. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, *stakeholders* serta masyarakat setempat melalui berbagai media sehingga tercipta pemahaman yang sama dan terwujud kesadaran terhadap pentingnya pelestarian Keanekaragaman Hayati.
c. Melaksanakan langkah-langkah pengendalian pencemaran air yaitu:
   - sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua *stakeholder* seperti Pemerintah Kabupaten/ Kota, pihak swasta, LSM dan lembaga adat (banjar,desa adat) akan arti pentingnya sungai, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tidak membuang sampah di sungai;
   - pembangunan sarana prasarana MCK;
   - melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan dengan sanksi bagi para pelaku usaha yang membuang limbah secara langsung ke sungai;

- mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengendalian pencemaran air melalui pembuatan instalasi pengolahan air limbah;
- perlu dibangun IPAL komunal pada daerah yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai khususnya pada kawasan padat penduduk;
- perlunya pengawasan terhadap kelayakan perijinan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha;
- mengendalikan aktivitas pertanian di sekitar daerah tangkapan air danau yang berpotensi mencemari kualitas air danau;
- perlunya kajian inventarisasi sumber-sumber pencemar sehingga diketahui berbagai kegiatan/ usaha yang berpotensi menurunkan kualitas air;
- perlunya dilakukan penetapan kelas air sebagai dasar pemanfaatan sumber-sumber air di Provinsi Bali.

d. Tindak lanjut dalam optimalisasi implementasi pelaksanaan Pergub 97/2018:
   - Mengevaluasi poin Perwali/Perbup untuk Kota Denpasar & Kab. Badung yang belum mengacu pada Pergub 97/2018 (tidak mengatur tentang pengurangan penggunaan sedotan plastik dan sterofoam);
   - Mendorong kabupaten lain untuk menyusun Perbup;
   - Berkoordinasi dengan pengelola pasar tradisional untuk penerapan Pergub 97/2018;
   - Penyamaan persepsi dalam penerapan sanksi administratif terhadap distributor/ pemasok plastik sekali pakai;
   - Pengawasan dan penerapan sanksi pelaksanaan Pergub 97/2018;
   - Evaluasi penerapan Pergub 97/2018.
e. Tindak lanjut dalam evaluasi capaian Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:
   - Melakukan pendampingan/ memfasilitasi terhadap pembuatan percontohan TPS 3R Desa Adat/ Desa/ Kelurahan;
   - Melakukan pendampingan kepada Kab/Kota dalam penghitungan neraca pengelolaan SRT & SSSRT;
   - Mendorong Kabupaten/ Kota untuk bekerjasama dengan NGO dalam membantu mengelola sampah di wilayahnya.
f. Tindak lanjut dalam optimalisasi implementasi pelaksanaan Pergub 47/2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber:
   - FGD Juknis Pengelolaan Sampah di Sumber;
   - MoU antara Pemprov. Bali dengan Rektor perguruan tinggi se-Bali dalam pelibatan mahasiswa KKN sebagai fasilitator/pendamping pengelolaan sampah berbasis desa;

- Kerjasama implementasi RPJMD Prov. Bali dengan Kab/Kota se-Bali untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber;
- Sosialisasi Pergub 47/2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kabupaten/ Kota;
- Pelatihan pengelolaan sampah berbasis sumber kepada desa adat/ desa/ kelurahan;
- Pembinaan Dinas LH Provinsi dengan MDA Provinsi dan Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi kepada Desa Adat dalam rangka penyusunan Awig-awig/ Pararem;
- Evaluasi penerapan Pergub 47/2019.

g. Menghimbau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah dalam pelaksanaan Program Adiwiyata daripada hanya mempertimbangkan kuantitas saja;
h. Meningkatkan pembinaan kepada Tim Adiwiyata Kabupaten/ Kota tentang Program Adiwiyata;
i. Meningkatkan koordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota terkait pelaksanaan Adipura dan Masyarakat Hukum Adat;
j. Dalam rangka terwujudnya laboratorium lingkungan yang terakreditasi sekaligus teregistrasi untuk pengujian parameter kualitas lingkungan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) diperlukan hal–hal antara lain:
   - Komitmen yang kuat untuk segera mengoperasionalkan laboratorium lingkungan;
   - Meningkatkan kompetensi dan mutu sumber daya manusia laboratorium lingkungan melalui pelatihan–pelatihan;
   - Penyediaan anggaran yang memadai dan secara berkesinambungan setiap tahunnya;
   - Meningkatkan penyediaan jenis dan mutu peralatan laboratorium;
   - Berpartisipasi dalam pelaksanaan Uji Profisiensi/ Uji Banding Laboratorium Lingkungan;
   - Meningkatkan koordinasi antar bidang dengan laboratorium, sehingga tercipta sinergi yang baik dalam melakukan penelitian kualitas lingkungan;
l. Perlu adanya penganggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana laboratorium;
m. Perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap personil laboratorium sesuai dengan kompetisi di bidang pengujian laboratorium.

11. Adiministrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan kependudukan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan urusan wajib sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang

pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Bali dibentuk Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali dengan Tipe B yang terdiri dari 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Kasubag dan 9 Kepala Seksi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 89 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali merupakan lembaga yang membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu:

- Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.

Selanjutnya dari 2 tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran yaitu :

- Meningkatnya instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el mencapai target
- Meningkatnya instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran 0-18 tahun mencapai target
- Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) pengguna metode kontasepsi jangka panjang (MKJP)

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berecana Provinsi Bali mendukung misi ke 22 yaitu Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah melalui penataan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dan atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami penduduk, mengendalikan pertumbuhan, persebaran penduduk untuk mencapai tujuan akhir yaitu Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.

Program Kependudukan, Program Peningkatan Pencatatan Sipil dan Program Keluarga Berencana merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran .

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Kependudukan	a) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan dengan dana sebesar Rp. 60.000.000,- b) Pengawasan, Evaluasi dan Diseminasi Penyelenggaraan Kependudukan dengan dana sebesar Rp.161.138.000,- c) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		dengan dana sebesar Rp.112.200.000,- d) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/PIAK dengan dana sebesar Rp. 112.200.000,- e) Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi dengan dana sebesar Rp. 113.738.000,- f) Penyusunan Data dan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi dengan dana sebesar Rp. 192.200.000,- g) Peningkatan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp.197.000.000,-
2	Program Peningkatan Pencatatan Sipil	a) Pengelolaan Sarana, Prasana Data pencatatan Sipil, Bidang Pencatatan Sipil dengan dana sebesar Rp.134.388.000,- b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil dengan dana sebesar Rp. 172.976.000,- c) Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Desimenasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Skala Provinsi dengan dana sebesar Rp. 184.388.000,-
3	Program Keluarga Berencana	a) Pelayanan KIE. dengan dana sebesar Rp. 120.843.000,- b) Kegiatan Monev Pelaksanaan KB Pria dengan dana sebesar Rp.119.193.000,- c) Pengelolaan Data Keluarga Berencana dengan dana sebesar Rp. 82.500.000,-

Jumlah Pegawai

NO	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH
1	Kepala DInas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Sub. Bagian	2
5	Kepala Seksi	9
6	Pelaksana Golongan IV	1
7	Pelaksana Golongan III	12
8	Pelaksana Golongan II	5
TOTAL		**34**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk belanja langsung pada Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.879.542.277,- terealisasi sebesar Rp. 3.230.376.911,- (83,27%) Sedangkan untuk Program/kegiatan prioritas alokasi dana sebesar Rp. 1.762.764.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.503.990.505,- (85,32%), dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Kependudukan, alokasi dana sebesar Rp. 948.476.000,- terealisasi sebesar Rp. 788.634.730,- (83,15%).
2. Program Peningkatan Pencatatan Sipil alokasi dana sebesar Rp. 491.752.000,- terealisasi sebesar Rp. 448.760.080,- (91,26%).

3. Program Keluarga Berencana dengan alokasi dana sebesar Rp. 322.536.000,- terealisasi sebesar Rp. 266.595.695,- (82,66%)

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Kependudukan,
    a. Tersedianya laporan kondisi sarana prasarana perangkat pendukung perekaman KTP-el se-Bali.
    b. Tersedianya laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi administrasi kependudukan dan meningkatnya pemahaman 50 orang aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota tentang kebijakan administrasi kependudukan..
    c. Meningkatnya kompetensi 40 aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran penduduk.
    d. Meningkatnya kompetensi 40 aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam mengelola informasi administrasi kependudukan.
    e. Meningkatnya kompetensi 20 orang aparatur provinsi dalam mengelola data kependudukan dan dokumen kependudukan serta tersedianya laporan pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi.
    f. Tersusunnya Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali semester II tahun , semester I tahun 2019 dan Buku Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Bali Tahun .
    g. Terdistribusinya blanko KTP-el ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebanyak 116.000 keping sehingga 96% penduduk memiliki dokumen kependudukan.
2. Program Peningkatan Pencatatan Sipil
    a. Tersedianya laporan kondisi dan kebutuhan sarana prasarana pencatatan sipil dan laporan rapat koordinasi pencapaian target akta kelahiran dan akta perkawinan.
    b. Meningkatnya kompetensi 50 orang aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam bidang pencatatan sipil dan tersedianya laporan pelaksanaan Bimtek.
    c. Meningkatnya pemahaman 75 orang perangkat desa tentang kebijakan administrasi pencatatan sipil dan tersedianya laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil.
3. Program Keluarga Berencana
    a. Terwujudnya dokumen data Keluarga Berencana yang baik semester I dan semester II.
    b. Terwujudnya dokumen kerjasama dan inovasi pelayanan KIE dengan sekolah dan PKK.
    c. terwujudnya laporan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Keluarga Berencana

Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan keluarga Berencana Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan, Pecatatan Sipil dan Keluarga Berencana Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
I	Program Kependudukan								
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan	1 laporan	100	60.000.000	100	1 laporan	93.44	56.063.900	93.44
2	Pengawasan, Evaluasi dan Diseminasi Penyelenggaraan Kependudukan	1 laporan ; 1 kali sosial	100	160.138.000	100	1 laporan	100	133.355.100	82.76
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	1 kali	100	112.200.000	100	1 kali	100	87.798.400	78.25
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan/PIAK	1 kali	100	112.200.000	100	1 kali	100	108.742.600	96.92
5	Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	1 kali bimtek; 2 kali rapat	100	113.738.000	100	1 kali bimtek; 2 kali rapat	85	76.391.900	68.92
6	Penyusunan Data dan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	2 jenis buku	100	192.200.000	100	2 buku	95	162.848.580	84.73
7	Peningkatan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	2 kali rakor; 500.000 keping	100	197.000.000	100	450.000 keping	90	161.434.250	81.95
II	Program Peningkatan Pencatatan Sipil								
1	Pengelolaan Sarana Prasarana Data Pencatatan Sipil	2 jenis laporan	100	134.388.000	100	2 laporan	98.75	113.806.080	84.68
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	1 laporan/ 50 orang	100	172.976.000	100	1 laporan/ 50 orang	99.27	168.578.400	97.46
3	Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Desimenasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 laporan; 3 kali sosialisasi	100	184.388.000	100	1 laporan	100	166.375.600	90.23
III	Program Keluarga Berencana								
1	Kegiatan Pelayanan KIE	1 dokumen	100	120.843.000	100	1 dokumen	95	104.158.980	86.19
2	Kegiatan Monev Pelaksnaan KB Pria	1 laporan	100	119.193.000	100	1 laporan	95	95.686.899	80.28
3	Pengelolaan Data Keluarga Berencana	2 dokumen	100	82.500.000	100	2 dokumen	90	66.749.816	80.91

Permasalahan dan Solusi

1. Bidang Fasilitasi Keluarga Berencana
    a. Permasalahan

- Sosialisasi Program KB Krama Bali belum dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan Kab/Kota, instansi terkait, serta mitra kerja lintas provinsi.
- Masyarakat masih mempunyai persepsi bahwa Program KB Krama Bali mewajibkan Krama Bali mempunyai 4 anak.
- Kebijakan pengendalian penduduk oleh Pemerintah Pusat melalu program Keluarga Berencana belum mengakomodasi kearifan local yang berkembang di daerah, khususnya di Bali, pengendalian penduduk, khususnya pendatang berpotensi mengancam pelestarian kebudayaan Bali.
- Pengelolaan data Keluarga Berencana belum optimal.

b. Solusi

- Perlu dilakukan kerjasama yang melibatkan instansi Pemerintah Provinsi, pemerintah Kab/Kota, sektor swasta, serta mitra kerja lainnya dalam melakukan sosialisai Program KB Krama Bali.
- Selain sosialisasi Program KB Krama Bali, Krama Bali mengaharapkan adanya bantuan dari Pemerintah maupun instansi terkait yang bertujuan mengurangi beban ekonomi Krama Bali, khususnya Krama Bali yang mempunyai anak lebih dari 2.
- Perlu dilakukan pemahaman kepada Krama Bali melalui publikasi di berbagai media bahwa KB Krama Bali bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang unggu dan berkualitas dengan tetap mempertimbangkan kesehatan reproduksi.
- Melakukan sinkronisasi kebijakan Program Keluarga Berencana antara Kemendagri, BKKBN, serta Kab/Kota. Diharapkan kebijakanProgramKB Krama Bali yang berlandaskan kearifan local Bali dapat selaras dengan kebijakan pengendalian penduduk Pemerintah Pusat.
- Program KB Krama Bali merupakan program yang baru diluncurkan pada tahun 2019, sehingga diperlukan melakukan kajian/penelitian dalam rangkamemperkuat landasan penerapan program tersebut.
- Untuk mengoptimalkan pengelolaan data KB perlu dibuatkan aplikasi yang membantu mengelola data Keluarga Berencana serta pengelolaan peserta KB Krama Bali.

2. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

a. Permasalahan

- Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan kependudukan.
- Jumlah alokasi blanko KTP-el oleh pusat belum mencukupi kebutuhan pencetakan KTP-el sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target kepemilikan KTP-el Provinsi Bali sebesar 100%.

- Kurangnya kesadaran masyarakatakan manfaat dan pentingnya dokumen kependudukan.
- Sumber Data Manusia (SDM) yang berlatar belakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada.
- Kurangnya kesadaran penduduk kurang mampu (miskin) untuk mengikuti program KB.

b. Solusi

- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana.
- Koordinasi dan konsultasi ke Dirjen Dukcapil untuk menyelesaikan masalah terkait administrasi kependudukan.
- Perlunya pelatihan SDM agar menghasilkan SDM yang ahli di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dengan melibatkan Dinas Dukcapil dan Dinas yang menangani Keluarga Berencana di Kab/Kota.

3. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

a. Permasalahan

- Kebijakan Pusat tentang TTE dan Akta Kelahiran Online belum dapat berjalan dengan optimal di Dukcapil Kab/Kota dikarenakan Pejabat yang menangani Pencatatan Sipil banyak kosong, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlatar belakang Informasi Teknologi kurang, sarana prasarana/internet sering mengalami kendala.
- SDM di Bidang Pencatatan Sipil yang mampu mengoperasionalkan program TTE dan Akta Kelahiran Online lebih banyak tenaga kontrak. Sedangkan persyaratan dari Pusat yang mengoperasionalkan program TTE dan Akta Kelahiran Online harus Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Akta Pencatatan Sipil masih kurang.

b. Solusi

- Bupati/Walikota segera mengisi jabatan kosong di Bidang Pencatatan dan penambahan ASN yang berlatar belakang Informasi dan Teknologi di Dukcapil.
- Penambahan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana di Bidang Penacatatan Sipil seperti jaringan internet.
- Ditingkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta pencatatan sipil sebagai bukti otentik.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bali dikelola oleh organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 menjadi acuan pelaksanaan program bagi setiap Perangkat Daerah sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan tindakan penting serta memandu pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan bagian dari Urusan Pemerintah Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar, fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan (1) mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, sistem administrasi dan kelembagaan desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintahan desa/kelurahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, (2) meningkatkan kegiatan usaha ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) , (3) mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien didasari pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi lokal bertujuan agar pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (4) meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera.

Program Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja, dengan kegiatan :
    a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
    c. Penyediaan alat tulis kantor
    d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    h. Penyediaan makanan dan minuman
    i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

j. Upacara Keagamaan
k. Pengadaan peralatan gedung kantor
l. Pembangunan Sarana Gedung Kantor
m. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
n. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
o. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
p. Evaluasi dan Koordinasi Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
q. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED) , dengan kegiatan :
   a. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)/BUMDes.
   b. Peningkatan Kapasitas Manajerial Pasar Desa
   c. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan
   d. Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa).
3) Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna, dengan kegiatan :
   a. Pendataan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan
   b. Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Kawasan Perdesaan
   c. Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
4) Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masrakat, dengan kegiatan :
   a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
   b. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa
   c. Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan
5) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, dengan kegiatan :
   a. Evaluasi Perkembangan Desa berbasis Digital
   b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
   c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi dalam tatanan urusan wajib yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dari

urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Prgoram dan Kegiatan yang sudah terlaksana yaitu sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa**

   a. **Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa berbasis Digital.**

      Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa berbasis Digital merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan desa/kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan yang bersifat mendorong kebersamaan dan keswadayaan gotong-royong. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dilakukan secara bertahap dari evaluasi diri oleh Desa dan Kelurahan, dilanjutkan dengan analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mempunyai 4 (empat) ruang lingkup yakni Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Perlombaan Desa dan Kelurahan, Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Penentuan lokasi labsite untuk model perkembangan Desa dan Kelurahan. Indikator Output Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa berbasis Digital ini ialah Presentase Perkembangan Desa berbasis Digital. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Desa Cepat Berkembang sebanyak 46,70% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa berbasis Digital sebesar Rp.1.043.461.648,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.1.132.705.036,- dengan persentase sebanyak 92,12%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

   b. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.**

      Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai peran penting untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip-prinsip serta tertib anggaran untuk menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam rangka akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transaparan, akuntabel, dan tepat waktu. Berdasarkan pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat Desa dan Meningkatkan Pendapatan Desa. Permendagri No. 1 Tahun 2016 memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus aset yang dimiliki oleh desa yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Indikator Output Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ini ialah Jumlah Desa yang mampu menyajikan laporan akuntabilitas Pemerintahan Desa. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Desa Cepat Berkembang sebanyak 46,70% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebesar Rp.663.973.868,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.684.974.752,- dengan persentase sebanyak 96,93%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dapat melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga kemasyarakatan. Indikator Output Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa ini ialah Persentase Aparatur dan Kelembagaan desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Desa Cepat Berkembang sebanyak 46,7% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa sebesar Rp. 335.834.982,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp. 344.575.400,- dengan persentase sebanyak 97,46%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

2. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)/BUMDes.

Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)/BUMDes merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terdapat di desa seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten, akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola ‘ijon’, kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah, kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik, sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi dan pasca produksi. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan di desa, berdasarkan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sangat diperlukan oleh setiap warga desa guna mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat pedesaan. Untuk itu usaha-usaha perekonomian di pedesaan sangat perlu untuk terus ditumbuh kembangkan melalui peningkatan manajemen yang profesional, pemberian modal usaha serta meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan hasil produksi terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di desa. Indikator Output Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)/BUMdes ini ialah Persentase Desa yang telah membentuk BUMDes. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif sebanyak 90,14% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)/BUMdes sebesar Rp.391.440.095,26,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.401.674.016,- dengan persentase sebanyak 97,45%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial Pasar Desa.

Pasar Desa merupakan pusat pertukaran barang dan jasa, pusat informasi dan komunikasi harga dan kualitas produksi desa, oleh karena itu keberadaan pasar desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan, juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, serta pasar desa juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasar Desa merupakan salah satu aset/kekayaan Desa, dimana Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa (pasal 77 ayat 2). Indikator Output Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial Pasar Desa ini ialah Jumlah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pengelola Pasar Desa. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif sebanyak 90,14% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajerial Pasar Desa sebesar Rp.274.229.151,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.285.857.816,- dengan persentase sebanyak 95,93%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan.

Kerjasama antar desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kerja sama antar desa diharapkan dapat memperoleh manfaat dari pihak-pihak yang bekerjasama tersebut. Manfaat kerjasama yang dapat dilihat dari target tersebut adalah baik bersifat finansial maupun non finansial. Sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa ”Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga”. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar desa dalam satu kawasan yang memiliki potensi dan karakteristik yang hampir sama untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing,

meningkatkan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa serta keamanan dan ketertiban, karena itu perlu adanya kesamaan langkah dan persepsi dalam memfasilitasi kegiatan kerjasama antar desa. Indikator Output Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa ini ialah Presentase desa yang melakukan kerjasama dan kemitraan. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif sebanyak 90,14% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa sebesar Rp.308.912.845,25,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.314.350.732,- dengan persentase sebanyak 98.27%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

d. Kegiatan Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa).

Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi wanita desa untuk menciptakan wadah perekonomian melalui Gerakan Ekonomi Wanita Desa (Genta Desa) yang berfokus pada kelompok wanita desa yang ada di Provinsi Bali. Lahirnya Gerakan ini didasarkan pada permasalahan yang ada di desa yaitu Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di wilayah perdesaan, Ketidaksetaraan/ketimpangan Gender, Pelaku ekonomi informal di Desa lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita yang telah terorganisasi namun belum terkoordinasi dan Program unggulan Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan kemiskinan belum menyentuh secara spesifik kaum wanita sebagai pelaku ekonomi di Desa. Dalam konteks inilah sebagai aktualisasi dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas implementasi program, maka dilaksanakan Program Kegiatan Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa) Tahun 2019. Melalui kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan dari usaha-usaha kelompok GENTA sesuai dengan potensi yang ada serta pengetahuan Pengelola GENTA khususnya dalam inovasi pengembangan serta strategi pemasaran yang berbasis pada Informasi dan teknologi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Indikator Output Kegiatan Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA DESA) ini ialah Persentase peningkatan kapasitas lembaga Ekonomi Wanita Desa. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif sebanyak 90,14% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA DESA) sebesar Rp.580.273.998,15,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.586.681.780,- dengan persentase sebanyak 99,91%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

3. Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) berbasis Teknologi Tepat Guna.

a. Kegiatan Pendataan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Kegiatan Pendataan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa dengan berbasis pada potensi desa yang ada, yaitu dengan memberdayakan masyarakat desa dimana masyarakat desa diikutsertakan dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Indikator Output Kegiatan Pendataan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan ini ialah Jumlah desa yang mampu menyajikan data potensi desa. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan sebanyak 47,01% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Pendataan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan sebesar Rp.407.198.525,89,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.416.050.348,- dengan persentase sebanyak 97,87%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

b. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Kawasan Perdesaan.

Ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan perdesaan merupakan hal yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan spesifik mendukung perkembangan sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi. Program pembangunan tersebut antara lain dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ekonomi desa diutamakan untuk irigasi dan pasar desa. Beberapa sarana dan prasarana dasar perdesaan lainnya yang harus juga mendapat perhatian, yaitu sarana prasarana permukiman (pendidikan, kesehatan, peribadatan, air bersih, sanitasi, MCK dan persampahan), jalan, drainase/pembuangan limbah dan transportasi, pendukung ekonomi (warung, ruko, BUMDesa), listrik dan telekomunikasi. Indikator Output Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Kawasan Perdesaan ialah Jumlah desa yang mampu memelihara dan mengembangkan Sarana dan Prasarana Dasar Perdesaan. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan sebanyak 47,01% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Kawasan Perdesaan sebesar Rp.147.939.120,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.153.530.000,- dengan persentase sebanyak 96,36%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

c. Kegiatan Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, murah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara optimal akan terwujud bila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG kepada

masyarakat pengguna TTG. Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan TTG disebut bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan TTG. Dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri terkait, Kepala Bappenas, Gubernur, Bupati serta Walikota untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan TTG sebagai tanggung jawab pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat, meratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, efektif dan efisien, pelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas/kuantitas produksi masyarakat melalui pemasyarakatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. Indikator Output Kegiatan Kegiatan Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) ialah Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dalam rangka mendukung One Village One Produk (OVOP). Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase One Village One Produk (OVOP) pada Kawasan Perdesaan sebanyak 47,01% yang telah melebihi Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Kegiatan Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebesar Rp.620.460.405,26,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.669.730.816,- dengan persentase sebanyak 92,64 %, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

4. Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat.

a. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan keadilan. PKK sebagai gerakan masyarakat selama ini aktif berperan sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan masyarakat yang dikemas dalam 10 Program Pokok PKK, mulai dari tingkat dasa wisma sampai dengan tingkat provinsi. TP-PKK dalam melaksanakan programnya mempunyai visi, misi, kebijakan, strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bali dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga yang merupakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berkualitas. Dalam pelaksanaan Gerakan PKK berpedoman pada hasil Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017

tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dimana dengan adanya dasar hukum tersebut Gerakan PKK menjadi lebih proporsional dan profesional. Indikator Output Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ialah Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa sebanyak 65% yang telah mencapai Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp.6.228.330.519,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.6.544.228.132,- dengan persentase sebanyak 95,17 %, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

b. Kegiatan Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang mencerminkan tingkat kesejahateraan dari masyarakat desa. Pemerintah telah menetapkan peraturan guna melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat yakni salah satunya diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan gotong royong masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat perdesaan dalam menunjang pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan. Indikator Output Kegiatan Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa ialah Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Masyarakat. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa sebanyak 65% yang telah mencapai Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.576.008.397,89,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.604.781.348,- dengan persentase sebanyak 95,24%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

c. Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan.

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2016 tentang melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan fasilitasi pelayanan dasar. “Pelayanan Dasar” menurut UU Desa No 6 Tahun 2014 meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Melalui berbagai upaya dalam Pelayanan dasar ini diharapkan dapat menjadi salah satu penunjang dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Bali yaitu kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Dalam rangka mewujukan visi tersebut pada seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar

dilaksanakan kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan dengan program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat melalui upaya penguatan pelayanan di Posyandu serta penyediaan air bersih melalui Program Pamsimas. Indikator Output Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan ialah Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat di 9 Kab/kota. Berfungsinya indikator output tersebut telah menimbulkan Indikator Outcome Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa sebanyak 65% yang telah mencapai Target Outcome. Realisasi anggaran Kegiatan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan sebesar Rp.666.569.782,- dari pagu induk anggaran sebesar Rp.765.839.180,- dengan persentase sebanyak 87,04%, serta realisasi fisik sebanyak 100%.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di DISPMD Provinsi Bali, maka harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. SDM di lingkungan DISPMD Provinsi Bali terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 53 orang dan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 74 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil DISPMD Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	0
2.	SMP	2
3.	SMA	9
4.	Sarjana Muda/D.III	0
5.	SARJANA/S1	27
6.	PASCASARJANA/S2	15
Jumlah		**53**

Jumlah Pegawai Non PNS DISPMD Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019 :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	2
2.	SMP	1
3.	SMA	25
4.	Sarjana Muda/D.III	1
5.	SARJANA/S1	42
6.	PASCASARJANA/S2	3
Jumlah		**74**

Berikut ini data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali tahun 2019 berdasarkan golongan :

GOLONGAN	a	b	c	d	JUMLAH
I	0	0	0	0	0
II	2	1	2	2	7
III	4	15	9	11	39
IV	2	4	1	0	7
Jumlah					**53**

Jumlah Pejabat Struktural yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebanyak 21 Orang dan tidak terdapat Fungsional.

Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 33.199.403.348 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) sebesar Rp.7.713.488.675,- dengan realisasi sebesar Rp.7.125.857.435,- Belanja Langsung sebesar Rp. 17.038.314.673,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.220.324.655,20,- dan Belanja Tidak Langsung (Hibah dan Bansos) sebesar Rp. 8.447.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.587.550.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)	Rp. 7.713.488.675	Rp. 7.125.857.435	92,38
2.	Belanja Langsung	Rp. 17.038.314.673	Rp. 16.220.324.655,20	95,20
3.	Belanja Tidak Langsung (Hibah, Bansos dan BKK) pada DPA PPKD	Rp. 8.447.600.000	Rp. 7.587.550.000	89,82
	Total Belanja	Rp. 33.199.403.348	Rp. 30.933.732.090,20	93,18

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam praktiknya, penyusunan RKPD Tahun 2019 juga disusun dengan memperhatikan kebijkan tingkat nasional. Penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat.

Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKP Tahun 2019 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Keterkaitan RKPD Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2019 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementeriaan/Lembaga Sebagai Penjabaran

RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan dokumen yang integratif, Komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

RKPD Provinsi Bali tahun 2019 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dalam masa transisi mengacu pada Renstra Tahun 2013-2018 dan evaluasi Renja Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2019, hasil penelahan, hasil reses DPRD, dan Musrenbang serta disesuikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Gedung yang ditempati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali bertepat dijalan DI. Panjaitan Nomor 5 Denpasar. Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sarana mobilitas yang tersedia sebanyak 16 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dan 5 unit sepeda motor kondisi baik. Dalam rangka pembinaan maupun kegiatan lomba sarana mobilitas yang tersedia dirasa relatif kurang, sehingga selama ini diupayakan dengan meminjam kendaraan yang tersedia pada Sekretariat Daerah.

Untuk peralatan komputer, laptop dan printer belum mencukupi untuk di masing-masing bidang oleh karena ini itu tahun selanjutnya masih perlu pengadaan peralatan komputer, laptop dan printer untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Permasalahan Dan Solusi

Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

a. Sebagian besar dari Desa yang telah dikunjungi dalam monitoring dan koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana pemanfaatan Dana Desa lebih diarahkan dalam bidang pembangunan Sarana Prasarana Desa dan jika diarahkan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat kesenjangan yang relatif jauh terhadap pemanfaatan Dana Desa.
b. Masih Rendahnya Pemahaman Aparatur Desa dalam mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat terhadap pembangunan sumberdaya manusia desa untuk mengoptimalkan potensi yang ada.
c. Pemahaman Aparatur Desa terhadap Aplikasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa relatif masih rendah mengingat intensitas pelaksaaan sosialisasi dan bimtek yang relatif masih minim.

Solusi :

a. Prioritas penggunaan dana desa agar lebih di arahkan dalam meningkatkan kualitas perekonomian Masyarakat di perdesaan baik diatur dengan kebijakan menteri maupun

projek perencanaan pembangunan desa. Diharapkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri

b. Diperlukan adanya transformasi mindset Aparatur Desa dalam pelakasanan program pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi potensi-potensi desa untuk dapat dikelola sehingga memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi yang tinggi.

c. Pengembangan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan berkembangnya regulasi atau aturan terkait tata kelola keuangan dan pemerintahan desa dari Pemerintah Pusat.

13. Perhubungan

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mempunyai fungsi penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, dimana dalam penyelenggaraannya banyak elemen yang terkait seperti sarana, prasarana, pergerakan, sertifikasi, kelaikan, perambuan, kenavigasian, sumberdaya manusia, geografi, demografi dan lainnya sehingga jaringan transportasi sebagai akses keluar masuk barang dan jasa dari Bali ke kota-kota nasional maupun internasional dapat dicapai melalui pelabuhan penyeberangan, Bandar udara Internasional, serta simpul-simpul transportasi keluar masuk Bali.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, sehingga sistem transportasi harus terus dibina, agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas barang dan jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan hubungan antar wilayah, nasional dan internasional dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pembangunan transportasi, informasi dan komunikasi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan kualitas pelayanan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dan jasa agar mampu menunjang pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah dan stabilitas nasional.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali telah melaksanakan Program/Kegiatan seperti dibawah ini.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
Dinas		
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	a) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan b) Penatalaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Jalan dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		c) Peningkatan Standar Keselamatan Sarana Angkutan Jalan
2	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran	a) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Bali b) Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Jaringan Pelayaran c) Pengawasaan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut
3	Program Perencanaan Pengembangan Aksesibilitas	a) Pengendalian Multimoda b) Pengembangan Multimoda c) Perencanaan Multimoda
4	Program Peningkatan Pengawasan LLAJ	a) Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali b) Penyelenggaraan Forum Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN) c) Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran dan Perijinan Angkutan Orang dan Barang di Jalan
UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan		
5	Program Pengendalian Persimpangan Berbasis APILL	a) Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem Informasi LLAJ b) Pengelolaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan
UPTD Trans Sarbagita		
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita	a) Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA b) Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans SARBAGITA
UPTD Perlengkapan Jalan		
7	Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	a) Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitias Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi
UPTD Penyelenggara Pelabuhan		
8	Program Terselenggaranya Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	a) Penyediaan, Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Kepelabuhan b) Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Arus Barang, Penumpang dan Hewan

Jumlah Pegawai

NO	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina Tk. I (IV/b)	4
3	Pembina (IV/a)	14
4	Penata Tk. I (III/d)	13
5	Penata (III/c)	17
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	15
7	Penata Muda (III/a)	10
8	Pengatur Tk. I (II/d)	3
9	Pengatur (II/c)	6
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
11	Pengatur Muda (II/a)	-
12	Juru Tk. I (I/d)	1

13	Juru (I/c)	-
14	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
15	Juru Muda (I/a)	-
Total		**85**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan
   a. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan

      Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan adalah kegiatan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan ataupun armada yang digunakan, sehingga beroperasi tertib dengan perijinan yang berlaku. Pada tahun 2019, target yang ingin dicapai adalah 100% tertib dimana diharapkan 100% angkutan yang dibina tertib terhadap peraturan. Hasil pembinaan tahun 2019, Angkutan Sewa Umum 43 Kendaraan, Angkutan Pariwisata 147 Kendaraan, Angkutan Taxi 3.441 Kendaraan. Pagu Aggaran tahun 2019 sebesar Rp. 138.716.312 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 135.411.155 (97,62%), serta realisasi fisik (100%).

   b. Penatalaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Jalan dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan adalah kegiatan dengan 2 sub kegiatan inti yakni memberikan pelayanan perijinan angkutan jalan terutama rekomendasi perijinan dan sub kegiatan yang melakukan seleksi Abdi Yasa Teladan sebagai wakil Provinsi Bali ke pusat dengan anggaran sebesar Rp. 484.076.832 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 419.087.332 (86,57%), serta realisasi fisik (100%). Dalam kegiatan pelayanan perijinan ditargetkan pelayanan terhadap 11.728 ijin, sedangkan seleksi Abdi Yasa dilakukan terhadap 30 orang perwakilan dari Kab./Kota dan perusahaan.

   c. Peningkatan Standar Keselamatan Sarana Angkutan Jalan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan melakukan pembinaan terhadap Pengujian kendaraan bermotor (Penguji, alat uji, sistem dan prosedur pengujian kendaraan bermotor) yang ada di kabupaten/kota, serta pengecekan terhadap 15.000 kendaraan angkutan umum. Dengan anggaran sebesar Rp. 52.176.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.834.713 (91,68%), serta realisasi fisik (100%)

2) Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Pelayaran
   a) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Bali. Kegiatan untuk menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kepelabuhanan, melakukan analisa untuk pengembangan kepelabuhan dan menyiapkan bahan kebijakan teknis rekomendasi rencana pengembangan pelabuhan sesuai kewenangan Provinsi. Pada Perubahan tahun 2019

dalam perubahan anggaran mendapat tambahan anggaran untuk melaksanakan 2 pekerjaan prioritas yakni Review DED Pelabuhan Sanur dan DED Pelabuhan Bias Munjul. Pada tahun 2019 jumlah pelabuhan yang dikoordinasi sebanyak 3 pelabuhan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.307.860.520 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.302.871.325 (99,62%), serta realisasi fisik (100%)

b) Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Jaringan Pelayaran, kegiatan dilaksanakan untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian jaringan pelayaran sehingga sesuai dengan penetapan lintasan jaringan pelayaran dengan tujuan untuk ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan yang tersebar di wilayah provinsi Bali. Target capaian output kegiatan yang diharapkan sebanyak 20 trayek pelayaran yang dapat terkoordinasi serta pelaksanaan kajian lingkungan pengembangan pelabuhan Sanur. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.246.527.933 (98,61%), serta realisasi fisik (100%).

c) Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut yang tersebar di wilayah Provinsi Bali sehingga dengan melakukan kegiatan ini diharapkan seluruh perusahaan tertib administrasi dan operasional. Pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 50 perusahaan (100%) dari target perusahaan yang dibina sebanyak 50 perusahaan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.46.017.015 (92,03%), serta realisasi fisik (100%)

1) Program Perencanaan Pengembangan Aksesibilitas

a) Pengendalian Multimoda adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk inventarisasi awal mengenai kebutuhan utama moda transportasi dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Mengingat banyaknya aturan baru yang diterbitkan, terjadinya perubahan aturan perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan aturan pelaksana baru maka sosialisasi dan koordinasi harus dapat dilakukan dengan intensif dan berkelanjutan. Selain tugas diatas, juga terdapat tugas penyediaan data profil perhubungan yang disusun sebagai bahan ketersediaan data dan bahan analisis. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan anggaran sebesar Rp.256.788.520 dan realisasi keuangan sebesar Rp.249.957.491,- (93,34%), serta realisasi fisik (100%)

b) Pengembangan Multimoda adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk fungsi mensinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang perhubungan dan urusan terkait, memfasilitasi pengembangan layanan transportasi multimoda, dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.69.351.855,- (92,47%), serta realisasi fisik (100%)

c) Perencanaan Multimoda adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi untuk menunjang

Kinerja Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Bali. Dalam anggaran tahun 2019 dilaksanakan beberapa kajian untuk mendukung pencapaian target infrastruktur berupa dokumen kajian Rencana Induk Sistem Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di Kawasan Suci Besakih, Review Tatrawil Provinsi Bali, dan Review Survei Investigasi dan Rancang Dasar (SID) Jalur Kereta Api antara Mengwitani - Singaraja, dengan anggaran sebesar Rp. 1.072.472.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.989.717.247,- (92,28%), serta realisasi fisik (100%)

4) Program Peningkatan Pengawasan LLAJ
   a) Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali. Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan berupa pemilihan perwakilan pelajar pelopor di kabupaten/kota yang selanjutnya akan dikirim kepusat sebagai perwakilan provinsi Bali, pelaksanaan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di jalan raya, serta Kajian audit keselamata jalan Provinsi di Provinsi Bali. Dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 224.264.195,- (89,71%), serta realisasi fisik (100%)
   b) Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN) kegiatan ini dilaksanakan untuk penentuan prioritas perencanaan pemasangan perlengkapan jalan di jalan provinsi dan penyelenggaran koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.94.307.519,- (94,31%), serta realisasi fisik (100%)
   c) Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran dan Perijinan Angkutan Orang dan Barang di Jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemeriksaan perijinan angkutan pariwisata, sewa baik sewa umum maupun sewa khusus dan laik jalan kendaraan angkutan barang yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dijalan, dengan anggaran sebesar Rp. 795.497.976,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.787.502.555,- (98,99%), serta realisasi fisik (100%)

Selain dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali, dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yakni :

5) UPTD. Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Program Pengendalian Persimpangan Berbasis APILL
   a) Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem Informasi LLAJ adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemeliharaan fasilitas Pusat Pengendalian Lalu lintas jalan (CC room ATCS), dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.001.100 (98%), serta realisasi fisik (100%). Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran operasional pengaturan persimpangan berbasis ATCS yang dikelola.
   b) Pengelolaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran aktivitas Pusat Pengendalian Lalu lintas jalan

(CC room ATCS), dengan anggaran sebesar Rp. 451.288.440,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.450.593.688,- (99,85%), serta realisasi fisik (100%).

1) UPTD. Trans Sarbagita dengan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita
   a) Pelayanan angkutan umum Trans SARBAGITA adalah kegiatan untuk melaksanakan operasional pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita baik koridor I (Kota-GWK PP) dan layanan koridor II (Batubulan-Nusa dua PP), kegiatan berisi pelaksanaan pembelian layanan selama 1 tahun disertai muatan sosialisasi apabila diperlukan. Anggaran kegiatan pada tahun 2019 sebesar Rp.4.437.666.929 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.995.873.612,- (90,04%), serta realisasi fisik (100%).
   b) Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans SARBAGITA adalah kegiatan untuk mengawasi operasional pelaksanaan pelayanan Trans Sarbagita selama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp. 958.585.676,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.955.166.015,- (99,64%), serta realisasi fisik (100%). Kegiatan juga dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi kinerja prasarana pendukung operasional layanan Trans Sarbagita dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian layanan angkutan Trans Sarbagita dari sisi infrastruktur penunjang.

7) UPTD. Perlengkapan Jalan dengan Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan
   a) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan yakni melaksanakan pengadaan RPPJ 4 buah, Rambu Lalu lintas 139 buah, cermin tikungan 4 paket, ZoSS 2 paket, LPJU 1 paket, Papan Nama Jalan 53 buah, Marka jalan 239 M' yang tersebar dibeberapa ruas jalan Provinsi Bali, dengan anggaran sebesar Rp. 692.373.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.685.706.257,- (99,04%), serta realisasi fisik (100%)
   b) Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan provinsi dilaksanakan untuk pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. Fasilitas yang ditangani yakni Pembersihan dan pengecatan guardrail (pagar pengaman jalan) sepanjang 44 m', pemeliharaan guardrail di 2 lokasi, Penggantian daun rambu 50 buah, Reposisi tiang rambu 7 buah, penggantian tiang rambu 1 buah, pembersihan rambu 257 buah, peningkatan RPPJ 2 buah, Pembersihan RPPJ 15 buah. Anggaran tahun 2019 sebesar Rp.445.721.040,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.440.413.255,- (98,81%), serta realisasi fisik (100%)

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali digambarkan pada tabel dibawah ini :

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Tahun 2019

No	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			674,969,144	100			602,333,132	89.24

No	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
1	Peningkatan Standar Keselamatan Sarana Angkutan Jalan	15. 000 Kendaraan Umum	100	52,176,000	100	81.229 Kendaraan lain uji	100	47,834,713	91.68
2	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan	Jumlah angkutan yg dibina	100	138,716,312	100	52 Perusahaan angkutan	100	135,411,138	97.62
3	Penatalaksanaan Pelayanan Perijinan Angkutan Jalan dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan	11.728 ijin	100	484,076,832	100	8.253 Ijin	100	419,087,281	86.57
B	Program Peningkatan Pelayaran Lintas dan Angkutan Pelayaran			1,607,860,520	100			1,595,416,273	99.23
1	Pengembangan Kepelabuhan Pengumpan Regiaonal di Provinsi Bali	3 Pelabuhan	100	1,307,860,520	100	3 Pelabuhan	100	1,302,871,325	99.62
2	Pengawasan , Pembinaan dan Pengendalian Jaringan Pelayaran	20 Trayek Pelayaran	100	250,000,000	100	20 Trayek Pelayaran	100	246,527,933	98.61
3	Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut	50 Perusahaan	100	50,000,000	100	50 Perusahaan	100	46,017,015	92.03
C	Program Perencanaan Pengembangan			1,404,260,520	100			1,309,026,593	93.22
1	Pengendalian Multimoda	1 Dokumen	100	256,788,520	100	1 Dokumen	100	249,957,491	97.34
2	Pengembangan Multimoda	1 Tahun	100	75,000,000	100	1 Tahun	100	69,351,855	92.47
3	Perencanaan Mutimoda	3 Dokumen	100	1,072,472,000	100	3 Tahun	100	989,717,247	92.28
E	Program Peningkatan Pengawasan LLAJ			1,145,497,976	100			1,106,074,269	96.56
1	Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali	30 Kali	100	250,000,000	100	30 Kali	100	224,264,195	89.71
2	Penyelenggaraan Forum Lalulintas Angkutan jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)	9 Kab/kota	100	100,000,000	100	9 Kab/kota	100	94,307,519	94.31
3	Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran dan perijinan angkutan orang dan barang di jalan	3600 Kendaraan	100	795,497,976	100	5684 Kendaraan	157.89	787,502,555	98.99
	UPT. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN								
F	Program Optimalisasi Pengendalian Persimpangan Berbasis APILL			601,288,440	100			597,594,788	99.39
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem Informasi LLAJ	1 Tahun	100	150,000,000	100	4 Paket	100	147,001,100	98.00

No	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
2	Pengelolaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan	2.912 Jam	100	451,288,440	100	2.912 Jam	100	450,593,688	99.85
	UPT. TRANS SARBAGITA								
G	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita			5,396,252,605	100			4,951,039,627	91.75
1	Pelayanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	2 koridor 1 tahun	100	4,437,666,929	100	2 koridor 1 tahun	100	3,995,873,612	90.04
2	Pengelolaan Infrastruktur dan fasilitas pendukung trans sarbagita	65%	100	958,585,676	100	65%	100	955,166,015	99.64
IV	UPT. PERLENGKAPAN JALAN								
H	Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan			1,138,094,040	100			1,126,119,512	98.95
1	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	7 Paket	100	692,373,000	100	7 Paket	100	685,706,257	99.04
	- RP.PJ	77 bh				77 bh			
	- Rambu lalu Lintas Jalan	30 bh				30 bh			
	- Rambu lalu Lintas Chevron	30 bh				30 bh			
	- Cermin Tikungan	4 paket				4 paket			
	- ZoSS	2 paket				2 paket			
	- LPJU di Besakih	1 paket				1 paket			
	- Pemasangan nama-nama jalan	50 bh				50 bh			
	- Rambu larangan parkir	6 bh				6 bh			
	- Marka Jalan	239M2				239M2			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi	1 Paket	100.00	445,721,040	100	1 Paket	100	440,413,255	98.81
	- Pergantian Daun Rambu	50 bh				50 bh			
	- Reposisi Tiang Rambu	7 bh				7 bh			
	- Penggantian Tiang Rambu	1 bh				1 bh			
	- Pembersihan Rambu	257 bh				257 bh			
	- Penigkatan RP.PJ	2 bh				2 bh			
	- Pembersihan RP.PJ	15 bh				15 bh			
	UPT. KEPELABUHAN								
I	Program Terselenggaranya Operasional Pelabuhan Regional Provinsi Bali			131,428,000	100			107,439,369	81.75
1	Penyediaan, Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Kepelabuhan	3 Pelabuhan	100.00	66,428,000	100	3 Pelabuhan	100	55,776,345	83.97
2	Pengaturan, Pengendalan dan pengawasan arus barang, penumpang dan hewan	3 Pelabuhan	100.00	65,000,000	100	3 Pelabuhan	100	51,663,024	79.48

Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dialami dalam melaksanakan urusan perhubungan adalah :

1. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih kurang, ditunjukkan dengan masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan transportasi.
2. Fungsi pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas belum optimal bisa dilaksanakan karena keterbatasan baik anggaran pendukung untuk melaksanakan survey-survey dan SDM.
3. Masih tingginya tingkat pelanggaran perijinan baik angkutan pariwisata, angkutan sewa umum yang disebabkan penerbitan ijin dimaksud dilaksanakan di tingkat Pusat (Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan), dimana penyelesaian ijin belum dapat memenuhi SOP penerbitan ijin yang seharusnya 14 hari kerja selesai sehingga kendaraan angkutan tersebut tidak dilengkapi perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Minimnya layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita pada Koridor Utama (Koridor I dan II) dan belum terkoneksinya dengan baik layanan diantara trayek utama dan trayek pengumpan.
5. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi berpengaruh terhadap kinerja angkutan Trans Sarbagita.
6. Fasilitas halte, seperti rambu, bus stop dan papan informasi serta fasilitas pendukung lainnya masih banyak yang kurang dan butuh perawatan.
7. Masih tingginya biaya pembelian layanan Trans Sarbagita yang ditanggung oleh APBD Provinsi Bali.

Solusi yang dapat ditempuh antara lain :

1. Pelaksanaan FGD, sosialisasi dan pertemuan terhadap seluruh stake holder perhubungan perlu dilakukan secara intens sehingga seluruh regulasi dapat dipahami dengan baik baik dari aparatur dan seluruh lapisan masyarakat.
2. Survey – survey atau kajian tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas perlu didorong dan diusahakan mendapat porsi anggaran cukup sepanjang hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, perlu diberikan pemahaman lebih mendalam melalui media Diklat dan sejenisnya. Agar dapat diusulkan ke BKD Provinsi Bali untuk mendapat penganggaran Diklat Teknis Perhubungan.
3. Diperlukan koordinasi terkait prosedur pengurusan perijinan yang saat ini melalui Kementerian Perhubungan sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi di masyarakat terutama pengusaha transportasi. Saat ini Kementerian Perhubungan sedang berbenah dan menyiapkan regulasi yang lebih praktis dan mempermudah masyarakat dalam mengakses.
4. Perlu penambahan bus untuk membuka koridor baru sehingga jaringan/trayek lebih terkoneksi. diusulkan baik melalui bantuan APBN, pengadaan melalui APBD maupun bekerjasama operasi dengan pihak ketiga dalam upaya pemenuhan kebutuhan bus. Hingga saat ini terjadi penurunan

jumlah feeder/pengumpan, yang juga berpengaruh cukup besar. Sebagian besar feeder di Kota Denpasar saat ini tidak lagi berjalan, sehingga kedepan perlu dibangkitkan kembali untuk mensupport Trans Sarbagita.

5. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan pemberian prioritas bagi kendaraan Trans Sarbagita.
6. Perlunya dukungan regulasi/kebijakan untuk memungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga melalui skema CSR.
7. Telah diusulkan ke Pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan RI) untuk membantu / subsidi pembiayaan layanan angkutan massal perkotaan.
8. Sinergitas pelaksanaan Program Visi Gubernur terpilih "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Dalam pelaksanaan Program Visi Gubernur terpilih, telah dilaksanakan upaya – upaya untuk menjabarkan Visi Gubernur Bali. Pelaksanaan penjabaran Visi dalam sisa tahun berjalan, pada tahun anggaran 2019 terdapat beberapa kebijakan dan Program yang langsung ditujukan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur. Diantaranya meliputi ;
   a) Koordinasi Bandara Bali Utara sebagai salah satu program Gubernur dalam Bidang Infrastruktur.
   b) Evaluasi atas dokumen kajian perencanaan (Review DED Pelabuhan Sanur, Kajian Lingkungan Pelabuhan Sanur, Review Pelabuhan Bias Munjul) sebagai dokumen pendukung untuk pelaksanaan lanjutan Program Infrastruktur di Provinsi Bali.
   c) Pelaksanaan serta penerapan / implementasi penggratisan tiket bus untuk pelajar menggunakan angkutan Trans Sarbagita, selain memberikan kemudahan / dukungan kepada pelajar/mahasiswa yang notabenenya penerus bangsa, juga sebagai sarana promosi dan upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dikalangan pelajar.

14. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian.

Sesuai dengan Pergub Provinsi Bali Nomor 102 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Program Dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
Urusan Komunikasi Informatika		
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah k. Upacara Keagamaan l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor m. Pengadaan peralatan gedung kantor n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor o. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor p. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor q. Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja
2	Program Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	a. Penyebarluasan Informasi Publik b. Pengelolaan Informasi Publik c. Kegiatan Layanan Informasi Publik
3.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	a. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali b. Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi c. Literasi Media

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		d. Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal
4.	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	a. Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi b. Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi c. Standarisasi Perangkat Keamanan Data dan Informasi
5.	Program Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi	Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi
Urusan Statistik		
1.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	a. Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Ekonomi b. Pengumpulan Data Statistik Politik,Hukum dan HAM c. Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah d. Kegiatan Forum Satu Data e. Penyusunan Data dan Informasi Hasil Pembangunan
Urusan Persandian		
1.	Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab / Kota se Bali b. Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab / Kota se Bali c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab / Kota se Bali.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minmal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sbb:

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas waktu pencapaian	Realisasi
	Indikator	Target		
Pelaksanaan deseminasi informasi nasional	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :			
	Media massa : Majalah Radio dan televisi	 1 buah 12 bulan	Tahun 2019	 1 buah (100%) 12 bulan (100%)
	Media baru: website (media online)	 12 bulan	Tahun 2019	 12 bulan (100%)
	Media tradisional : pertunjukan rakyat	15 kali	Tahun 2019	15 kali (100%)
	Media interpersonal : Sarasehan, ceramah/ diskusi/Dialog Rapat koordinasi	 9 kali 2 kali	Tahun 2019	 9 kali (100%) 2 kali(100%)
	Media luar ruang : Spanduk	53 buah	Tahun 2019	53 buah(100%)
	Buku	1 buah		1 buah(100%)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2019 sebanyak 137 orang terdiri dari 45 orang PNS dan 92 orang pegawai kontrak/non PNS. Kualifikasi Pendidikan PNS sbb :

SMP = 3
SLTA = 34 orang
S1 = 72 orang
S2 = 35 orang

Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan sbb :
Gol II = 10 orang
Gol III = 20 orang
Gol IV = 17 orang
Jumlah pejabat struktural dan fungsional sbb :
Pejabat struktural sebanyak 25 orang terdiri dari :
Pejabat Eselon II = 1 orang
Pejabat Eselon III = 6 orang
Pejabat Eselon IV = 18 orang
Pejabat fungsional sebanyak 3 orang sbb :
Arsiparis = 1 orang
Kehumasan = 2 orang

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

   Program pendukung yang terdiri dari 17 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dalam rangka memberi dukungan, memenuhi dan memperlancar kegiatan prioritas dengan hasil diuraikan sbb:

   a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat; menyediakan meterai dan perangko untuk kebutuhan administrasi selama 12 bulan, realisasi tahun 2019 kebutuhan meterai dan perangko telah dapat dipenui selama 12 bulan sehingga proses administrasi perkantoran berjalan lancar.
   b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; untuk memenuhi kebutuhan komunikasi telepon, air dan listrik selama tahun 2019 dan telah terealisasi 100% dengan pemakaian yang hemat sehingga terdapat efisiensi pembayaran rekening sebesar Rp.51.623.642
   c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda 2((1 unit) dan roda 4 (17 unit) dan keseluruhan kendaraan dinas telah dapat dilakukan pemeliharaan dengan baik.
   d) Penyediaan jasa kebersihan kantor; telah terlaksana pemeliharaan kebersihan taman serta bangunan gedung kantor di dua tempat yakni pada taman serta Gedung KPID/KI dan taman serta Gedung Diskominfos. Kebersihan dan keindahan taman serta bangunan gedung kantor tersebut telah terjaga dengan baik.
   e) Penyediaan alat tulis kantor; untuk kebutuhan penyelesaian administrasi perkantoran, penyediaan ATK telah terealisasi 100% sehingga memperlancar proses administrasi kantor.
   f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; berupa penyediaan Blangko, spanduk serta penggandaan telah terealisasi 100% sehingga dapat memenuhi kebutuhan kantor.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; berupa penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terealisasi 100%.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, berupa penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar Nasional dan Lokal selama 12 bulan untuk meningkatkan sumber informasi, pengetahuan/wawasan pegawai, terealisasi 100%.

i) Penyediaan makanan dan minuman; untuk kebutuhan rapat-rapat dan pelayanan terhadap tamu, selama tahun 2019 penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan tamu telah dapat direalisasi 100% sehingga memberikan kenyamanan tamu dan pelaksanaan rapat-rapat.

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah; berupa fasilitasi kegiatan koordinasi yang dilaksanakan baik di luar maupun di dalam daerah, telah terealisasi 100%, hasilnya dapat meningkatkan sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.

k) Upacara Keagamaan; untuk menyediakan Sesajen Sehari-hari dan Piodalan telah terlaksana 100% sehingga terwujud ketentraman dan kenyamanan di lingkungan kantor.

l) Pengadaan perlengkapan gedung kantor; untuk memenuhi Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor berupa pengadaan meja kerja 7 unit, kursi rapat 17 unit dan pengadaan sofa 1 set terealisasi 100%.

m) Pengadaan peralatan gedung kantor; berupa pengadaan computer /PC 3 unit, printer laser jet 1 unit pengadaan kamera 1 unit dan pengadaan CCTV 1 paket untuk memenuhi Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor terealisasi 100%.

n) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dilaksanakan untuk Terjaganya Kualitas Gedung/Bangunan Kantor berupa pemeliharaan jaringan air, pemeliharaan listrik dan telepon serta pemeliharaan taman telah terealisasi 100%.

o) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; untuk terjaganya Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor berupa pemeliharaan AC dan pemeliharaan meubelair terealisasi 100%.

p) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; berupa pemeliharaan perangkat computer monitor siaran dan TV(server), computer/laptop serta kelengkapannya, pemeliharaan siund system, kamera, LCD proyektor dn genset dilaksanakan untuk terjaganya Kualitas Peralatan Kantor terealisasi 100%.

q) Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja; meliputi penyusunan renja, renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKA/DPA, LKPJ, LKjIP, evaluasi program secara berkala telah terealisasi 100% sehingga Kualitas Program Evaluasi dan Pelaporan meningkat.

2. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik

a) Penyebarluasan Informasi Publik; dilaksanakan agar tersebarnya Informasi Pembangunan Pemerintah melalui Pameran Pembangunan, Pameran Margarana dan Media Center, terealisasi 100%.

b) Pengelolaan Informasi Publik; dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui dan meningkat pemahamannya terhadap Program-program Pembangunan, dalam bentuk Dialog, Pertunjukkan Rakyat dan Evaluasi Media Informasi Publik Lembaga Penyiaran, kegiatan tersebut terealisasi 100%.

c) Kegiatan Layanan Informasi Publik; dilaksanakan agar Keterbukaan Informasi Publik dapat terwujud, dilaksanakan dalam wujud Layanan PPID dan Layanan Pengaduan.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; difokuskan pada Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi ditempuh melalui kegiatan:
   a) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali; dilaksanakan dalam rangka Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat difasilitasi oleh Komisi Informasi melalui sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui Jumlah Informasi Publik yang di akses.
   b) Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi; dilaksana dalam bentuk Pelayanan Sound System untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
   c) Literasi Media; Terlaksana melalui kegiatan berbentuk Literasi Media, untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata pemanfaatan media secara sehat.
   d) Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal; dilaksanakan melalui Dialog Kerjasama dan Jejaring Komunikasi dan Informasi Kehumasan dengan Humas Pusat, Kab/Kota dan Vertikal dalam bentuk Forum Kehumasan, Diseminasi dan penyerapan pertukaran informasi antar aparatur pemerintah, LSM, anggota masyarakat, ormas di Pemerintah Provinsi Bali
4. Program Pengembangan Infrastruktur TIK; Pengembangan Infrastruktur TIK dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui kegiatan:
   a) Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi; dilaksanakan dalam bentuk penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem dalam rangka Pengembangan E-Goverment Provinsi Bali, untuk meningkatkan layanan infrastruktur TIK dalam menunjang kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik.
   b) Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi; berupa pelayanan akses IP Publik dan akses internet kepada OPD, SMA/SMK dan UPT, sehingga Pelaksanaan tugas pada OPD, SMA, SMK dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi lancar.
   c) Standarisasi Perangkat Keamanan Data dan Informasi; berupa mewujudkan keamanan transaksi data antar Lembaga dengan fasilitasi Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis IT serta Implementasi Standarisasi Keamanan Data dan Informasi.
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi; melaksanakan penyusunan master plan TIK, Pengembangan Aplikasi dan Pemeliharaan Website, terealisasi 100%. Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi maka kinerja aparatur meningkat.

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
    a) Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Ekonomi; Telah terlaksana pengumpulan dan penyusunan Statistik Sosial, Budaya dan Ekonomi. Melalui kegiatan ini maka tersedia data statistik sektoral bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi.
    b) Pengumpulan Data Statistik Politik,Hukum dan HAM; melaksanakan pengumpulan dan penyusunan Statistik Politik, Hukum dan HAM. Melalui kegiatan ini maka tersedia data statistik sektoral bidang Politik, Hukum dan HAM.
    c) Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah; Melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan sehingga tersedia Data Analisis Statistik Sektoral.
    d) Kegiatan Forum Satu Data; melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Data Sektoral. Sehingga tersedia data sektoral yang Komprehensif dan Akurat.
    e) Penyusunan Data dan Informasi Hasil Pembangunan; Menyiapkan data dan informasi hasil pembangunan dalam bentuk Buku Bali Membangun.
2. Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik
    a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab / Kota se Bali; Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memenuhi jumlah aparatur yang memiliki kapasitas di bidang persandian, dengan harapan Optimalnya keamanan transaksi data dan informasi publik. Dengan keterbatasan sumber daya manusia maka maka diupayakan untuk mengoptimalkan keamanan transaksi data dan informasi.
    b) Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab / Kota se Bali; Mewujudkan kerahasiaan informasi antar pemerintah melalui Pelayanan dan Keamanan Informasi di Bidang Persandian secara optimal.
    c) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab / Kota se Bali; melaksanakan evaluasi dan monitoring untuk tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi, sehingga tersedia data di bidang persandian.

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali tahun 2019 digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

No	URAIAN	FISIK				KEUANGAN			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Peningkatan kapasitas humas Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal	50 org	100	227.548.000	100	50 org	100	199.771.400	87,79

No	URAIAN	FISIK				KEUANGAN			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa								
3	Pelayanan perijinan terhadap Lembaga penyiaran penyiaran radio dan televisi	25 rekomendasi	100	45.207.500	10	25 rekomendasi	100	45.107.500	99,78
4	Pemantapan Hubungan Jaringan Sandi dan Telekomunikasi								
5	Memantapkan hubunganjaringan Santel Pemerintah Pusat, Pemda Prov dan Pemda Kab/Kota	1 pkt	100	160.192.000	100	1 pkt	100	115.053.796	71,82
B	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah								
1	Pameran Pembangunan dan Pameran Margarana	2 kali	100	612.295.140	100	2 kali	100	605.023.664	98,81
2	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik								
3	Penyelenggaraan keterbukaan Informasi publik di Provinsi Bali	12 kali	100	413.718.000	100	12 kali	100	412.274..200	99,65
4	Pelayanan Sarana Komunikasi								
5	PeningkatanKualitasSaranaKomunikasi	1 tahun	100	96.077.936	100	1 tahun	100	85.575.000	89,07
C	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebar luasan Informasi								
1	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Program Pembangunan Provinsi Bali	80 buku	100	154.034.100	100	80 buku	100	126.491.300	82,12
2	Literasi Media	10 kali	100	231.285.900	100	10 kali	100	222.641.200	96,26
D	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
1	Kegiatan Layanan Informasi	12 bulan	100	274.898.000	100	12 bulan	100	201.128.000	73,16
E	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik	5 kali	100	96.133.700	100	5 kali	100	89.065.050	92,65
F	Program Pengembangan Infrastuktur TIK								
1	Pengelolaan Perangkat dan Jaringan SistemInformasi	12 bulan	100	655.009.202	100	12 bulan	100	643.737.100	98,28
2	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	12 bulan	100	2.874.636.200	100	12 bulan	100	2.763.299.039	96,13
G	Program Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi								
1	Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi	100%	75	51.356.800	100	100	75	37.473.730	72,97
2	Program Pemberdayaan TIK								
A	Pengembangan dan Pemberdayaan TIK	100%	100	402.308.564	100	100	100	302.440.664	75,18
3	Program Tata Kelola E-Government								
4	Standarisasi Keamanan Data danInformasi	100%	100	497.835.600	100	100	100	485.518.060	97,53

Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Secara umum kondisi sarana prasarana yang digunakan relative masih baik, hal ini disebabkan Diskominfos baru terbentuk tahun 2017 dan menempati Gedung bekas perangkat daerah lain dengan beberapa sarana prasarana relative masih baik. Disamping itu sarana prasarana yang digunakan beberapa diantaranya merupakan pengadaan baru.

Permasalahan dan Solusi

Realisasi fisik telah mencapai 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai target 100% karena disebabkan oleh adanya efisiensi terhadap beberapa belanja meliputi:

a. Efisiensi penggunaan listrik, air dan telepon sehingga terjadi efisiensi pembayaran rekening.
b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah terjadi efisiensi penggunaannya disebabkan beberapa kegiatan yang dilakukan di daerah dapat digabung pelaksanaannya.
c. Efisiensi pembayaran bandwidth karena terjadi efisiensi penggunaan.

Adanya sisa anggaran dikembalikan ke kas Daerah

15. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi upaya penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengamanatkan bahwa pembangunan koperasi perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk itu kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM yang disusun melalui upaya – upaya :

1. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dan UMKM
2. Memberikan Bimbingan konsultasi dan sosialisasi dalam perlindungan kepada koperasi

Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan tatakelola yang baik dalam arti manajemen dilaksanakan sesuai dengan kaidah – kaidah yang formal , peningkatan akuntabilitas pertanggung jawaban, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan aspek penting dalam penguatan kelembagaan berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengampu misi 17 yaitu Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali, dengan sasaran Meningkatnya Pusat – Pusat Perekonomian Kecil dan Menengah Krama Bali dengan Indikator mewujudkan jumlah pusat – pusat Perekonomian Lokal Berbasis Koperasi. Potensi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam rangka mewujudkan Pusat –

Pusat Perekonomian Lokal berbasis Koperasi bisa diwujudkan mengingat perkembangan jumlah Koperasi dan UMKM di Provinsi Bali. Dalam tahun 2019 jumlah Koperasi di Provinsi Bali berdasarkan *Online Data System* (ODS) periode Desember 2019 sebanyak 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) Koperasi dengan jumlah anggota 1.109.918, (satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan belas orang) jumlh karyawan 19.345 (sembilan belas ribu tigaratus empat puluh lima orang) , jumlah manajer 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima orang) dengan volume usaha Rp. 14.301.169.404.269, (empat belas triliun tigaratus satu miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan total asset Rp. 14.552.385.103.408. (empat belas triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tiga ribu empat ratus delapan rupiah) Sementara Perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Bali berdasarkan pada online data system (ODS) jumlah UMKM 119.289 (seratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan) UMKM, Tenaga Kerja 100.005 (seratus ribu lima orang) dengan asset Rp. 70.782.302.947 .(tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Dalam rangka Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Bali serta mewujudkan pusat – pusat perekonomian kecil dan menengah krama Bali berbassis koperasi di tahun 2019 Program Prioritas yang dilaksanakan yaitu 5 (lima) Program dan 15 kegiatan

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	a. Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi b. Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha c. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi
2	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	a. Penilaian Kesehatan Koperasih b. Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi c. Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
3	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	a. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian b. Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi c. Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi
4	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan	d. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Program	Kegiatan
	Menengah	e. Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Menengah f. Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM g. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM h.
5	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	i. Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM j. Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	17
2.	Sarjana (S1)	28
3.	Diploma (D3)	1
4.	SLTA	6
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah :	**52**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2019)

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. Berikut ini jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan , jumlah pejabat struktural dan fungsional per Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Golongan IV	14
2.	Golongan III	31
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	-
	Jumlah :	**52**

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)
	JABATAN STRUKTURAL	
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	18
	JABATAN FUNGSIONAL	
1.	Arsiparis	1
2.	Widyaiswara	-
3.	Pranata Humas	-
		-
		27

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
   a. Kegiatan Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi
   b. Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha,
   c. Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi. Jumlah Pagu Program ini yaitu Rp. 407.846.166, Realisasi Rp. 357.013.236. atau 91,48%

Program ini bertujuan melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank , sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan Skim – skim Kredit lainya, peningkatan akses pasar, melalui visualisasi, dan Pameran Dalam Negeri dan kerjasama mitra bisnis serta pelaksanaan pameran dalam rangka ulang tahun koperasi yang melibat kan koperasi sektor riil / koperasi produksi serta UMKM

2. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi
   a. Penilaian Kesehatan Koperasi, melaksanakan penilaian Kesehatan terhadap KSP/USP Koperasi dengan hasil jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya
   b. Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi, melaksanakan pengecekan data koperasi, badan hukum, dan Nomor Induk Koperasi serta pembinaan ke koperasi yang bermasalah
   c. Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi, melaksanakan pemeriksaan terhadap kelembagaan koperasi agar koperasi mematuhi peraturan perkoperasian Jumlah Pagu dari program ini yaitu Rp. 368.001.166, realisasi Rp. 356.018.955 atau 96,34% . Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi baik dari segi keanggotaan, usaha, permodalan serta sistem manajemen agar koperasi dapat secara riil bermanfaat bagi anggotanya serta terwujudnya koperasi yang sehat dan berkualitas. Capaian program ini yaitu jumlah KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya (135 koperasi) , jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi(50 Koperasi) serta jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya
3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
   a. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasiaan
   b. Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi
   c. Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi

   Jumlah Anggaran untuk Program ini yaitu Rp.507.228.563, realisasi Rp. 489.432.417 atau 96,45%. Program ini bertujuan melakukan penguatan berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui upaya berjenjang yaitu membangkitkan, pemberdayaan, pengembangan, penguatan serta penataan administrasi dan pelayanan pengesahan badan hukuum koperasi secara online Capaian Program Penguatan Kelembagaan Koperasi yaitu : jumlah kelompok masyarakat /anggota koperasi yang mendapat penyuluhan penyuluhan koperasi (50 unit) jumlah koperasi yang datanya dimutahirkan (20 unit) , serta dalam pengembangan koperasi 17 unit kelompok masyarakat diberi penyuluhan , terealisasi 28 unit Dari 28 Pokmas dan 16 koperasi yang sudah berbadan hukum yang telah diberikan penyuluhan dan pendampingan. Dari 28 Pokmas yang sudah proses dan telah keluar SK pengesahan badan hukum sebanyak 20 koperasi sedangkan untuk se-Bali berjumlah 107 koperasi. Capaian lain yaitu monitoring capaian RAT koperasi yang merupakan indikator tatakelola koperasi yang baik dan pertanggung

jawaban dalam pengelolaan koperasi. Capaian Rapat Angggota Tahunan Koperasi (RAT) per Nopember Tahun 2019 yaitu 78,85% dan untuk Koperasi Binaan Provinsi capaian RAT yaitu 98,31%. Dalam rangka reformasi total koperasi yang orientasinya lebih pada pertumbuhan jumlah anggota koperasi yang berkualitas sudah diusulkan 205 koperasi untuk dibubarkan.

4. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil Menengah
   a) Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
   b) Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
   c) Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM
   d) Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM

   Capaian kinerja Program ini yaitu : melaksanakan pembekalan kewirausahaan bagi calon wirauasaha sebanyak 50 orang. Dari 50 orang yang memperoleh pembekalan kewirauasahaan sebanyak 58 orang yang lolos untuk mendapat bantuan wirausaha pemula. Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan difasilitasi pameran melalui pameran ke luar daerah di SMESCO sebanyak 10 UMKM, pontianak sebanyak 4 UMKM. Terlaksananya pameran pasar rakyat di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. sebanyak 30 orang.Terlaksananya temu kemitraan antara UKM dengan PM/ PB sebanyak 25 orang. Temu Kemitraan 30 UMKM, menghasilkan MOU dengan Carefour yaitu 4 UMKM (UKM Ceria, Agro Abian Salak , Gula Ambhu,Krisna , Jati Luwih, Pendampingan yang dilakukan dalam 2 kategori yaitu : Kategori Wirausaha Pemula melalui Identifikasi Pendampingan , Monitoring dan Evaluasi sebanyak 23 UMKM , dan Kategori UMKM Menuju Naik Kelas yaitu Pendampingan, Fasilitasi dan Evaluasi 270 UMKM Pendampingan Konsultan Plut Juga Melakukan Pendataan Terhadap UMKM Yang Masuk Pasar Oleh-oleh/Swalayan Seperti : Tiara Dewata 30 UMKM, Lotte Mart 7 UMKM, Karang Kurnia Oleh Oleh 10 UMKM, Alfa Mart 14 UMKM dan Bali Enjoy 1 UMKM

5. Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM

   UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Koperasi, Usaha Kecil danMenengah yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam memfasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah.

   Program ini didukung oleh kegiatan :

   a. Diklat Manajemen Pengeloaan KUKM
   b. Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM

   Jumlah anggaran untuk Program ini Rp. 5.446.808.199 , realisasi 5.218.806.172 atau 97,81%. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kompotensi SDM KUMKM , melalui Diklat dan

Pendampingan baik itu pengurus, pengelola dan anggota KUMKM , mendorong pertumbuhan wirausaha pemula melalui Diklat Kewirausahaan dan mengurangi angka penganguran. Capaian Program ini : Diklat Perkoperasian 7 Angkatan , Diklat berbasis kompotensi dan Uji 15 Angkatan, Diklat Manjerial Untuk UKM 5 Angkatan, Dikllat berbasis IT untuk Pengembangan Bisnis 2 Angkatan, Diklat Manajerial untuk KSP/USP 22 Angkatan , dengan capaian 1.520 , Diklat Manajemen Pengelola KUKM 50 orang , dan Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 1.470 orang peserta diklat dari dua sumber pendanaan yaitu APBD murni dan DAK Tahun 2019

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp)	%	VOLUME	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi**			**407.846.166**				**357.013.236,00**	**91,48**
1	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi Koperasi	50 unit	100	223.682.100,00	100	50 unit	100	200.743.298,00	89,74
2	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	50 unit	100	74.632.100,00	100	50 unit	100	73.187.427,63	98,64
3	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	4 unit	100	96.531.966,00	100	4 unit	100	83.082.511,00	86,07
B	**Program Peningkatan Pengawasan Koperasi**			**368.001.166,00**				**356.018.955,00**	**96,34**
1	Penilaian Kesehatan Koperasi	135 unit	100	166.739.466,00	100	135 unit	100	163.378.548,00	97,98
2	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	50 unit	100	110.231.900,00	100	50 unit	100	107.552.410,00	97,57
3	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	25 unit	100	91.029.800,00	100	25 unit	100	85.085.998,00	93,47
C	**Program Penguatan Kelembagaan Koperasi**			**507.228.563,00**				**489.432.417,00**	96,45
1	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	20 unit	100	124.154.199,00	100	76 unit	380	119.318.496,00	96,11
2	Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi	17 unit	100	225.700.898,00	100	28 unit	165	218.070.161,00	96,62
3	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	15 unit	100	157.373.466,00	10	15 unit	100	152.043.760,00	96,61
D	**Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha**								

	Mikro, Kecil dan Menengah			**927.111.863,00**				**897.270.128,78**	**94,45**
1	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	50 UMKM	100	70.417.100,00	100	50 UMKM	100	68.636.398,00	97,47
2	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Menengah	104 UMKM	100	773.432.663,00	100	104 UMKM	100	751.196.184,00	97,12
3	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	25 UMKM	100	60.417.100,00	100	25 UMKM	100	57.215.648,00	94,7
4	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	25 UMKM	100	22.845.000,00	100	25 UMKM	100	20.221.900,00	88,52
E	**Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM**			**5.446.808.199,00**				**5.218.806.172,00**	**97,81**
1	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	50 KUKM	100	109.018.199,00	100	50 KUKM	100	108.897.145,26	99,89
2	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	1470 Orang	100	5.337.790.000,00	100%	1470 Orang	100	5.109.909.027,00	95,73

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Rtahun 2018-2023 disebutkan , bahwa Visi Pemerintah Provinsi Bali adalah Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dilandasi dengan mempertimbangkan kondisi , permasalahan, tantangan dan peluang yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali.

Berdasarkan keduapuluh dua misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih , maka Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali , mengemban misi yang ke 17 yaitu Membangun dan Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali maka tujuan yang ingin dicapai yaitu : Berkembnagnya Perekonomian Berbasis Budaya Bali dalam rangka meningkatnya Pusat-pusat Perekonomian Kecil dan Menengah Krama Bali dengan sasaran terwujudnya Pusat Pusat Perekonomian Lokal Berbasis Koperasi . Maka untuk mewujudkan misi dalam rangka pengembangan pusat – pusat perekonomian lokal berbasis koperasi maka dalam penyusunan program/kegiatan , kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu kesesuaian pada Renstra, Renja dan RKA Perangkat Daerah , serta Sinkronisasi Program Renja Perangkat Daerah dengan Program RKPD , Program pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali Tahun 2019 dengan 6 Program telah mengakomodir Program pada RKPD Tahun 2019 dan telah diakomodir dengan 6 program RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali Tahun 2019

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Pelaksanaan pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Bali perlu adanya dukungan prasarana dan sarana yang memadai, gedung yang ditempati Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai gedung perkantoran merupakan bangunan gedung yang sudah sangat tua dan lama yaitu gedung sejak berstatus Kantor Wilayah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum pernah sama sekali direnovasi kondisinya belum memadai terutama ruang kerja dan ruangan rapat.

Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun 2019 , meskipun telah mencapai berbagai keberhasilan, namun masih terdapat sejumlah kendala/permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sinergitas program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang mengakibatkan belum optimalnya dalam pencapain tujuan Program/Kegiatan.
2. Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Terbatasnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses permodalan/pembiayaan, akses informasi pasar dan jaringan pemasaran.
4. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.
5. Rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi para pelaku UKM. Sebagian besar UKM belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
6. Rendahnya pertumbuhan usaha dan daya saing UMKM

Tindak Lanjut/Solusi

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengeleminir permasalahan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pendanaan dibidang pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan instansi terkait dan *stakeholde*r terkait dengan Koperasi dan UMKM dalam pengambil kebijakan, sehingga program/kegiatan dapat berkesinambungan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi program pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM lintas sektor agar dalam pelaksanaannya dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM tujuan dan sasaran dari setiap elemen program/kegiatan tidak terkesan tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan di masyarakat.

3. Meningkatkan dukungan fasilitasi perkuatan dibidang permodalan, pemasaran dan kemitraan kepada pelaku UMKM yang baru tumbuh dan berkembang, meningkatkan

16. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Bali adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia termasuk sumber daya manusia (SDM) perlu terus ditingkatkan. SDM hendaknya selalu ditingkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel. Di samping itu sumber daya manusia (SDM) hendaknya dilindungi hak azasinya untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas.

Program dan Kegiatan :

Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah sebagai tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan alat tulis kantor c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan f. Penyediaan makanan dan minuman g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah h. Upacara agama i. Pengadaan perlengkapan gedung kantor j. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor k. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas l. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor m. Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja n. Penerapan ISO 9001 : 2015
2	Program Pengembangan iklim investasi dan realissi investasi	a. Pemetaan peluang dan potensi investasi b. Sinkronisasi informasi realisasi investasi c. Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal d. Analisa implementasi peraturan perundang-undangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
3	Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal	a. Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier b. Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal c. Forum komunikasi pemasaran penanaman modal
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.	a. Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor A1 b. Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor A2 c. Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor A3
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.	a. Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor B1 b. Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor B2 c. Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor B3
6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Pemantauan LKPM pelaksanaan penanaman modal b. Edukasi di bidang penanaman modal c. Pengawasan penanaman modal
7	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	a. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan b. Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan c. Pemantauan perizinan dan non perizinan secara elektronik

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
   a. Kegiatan Pemasaran Potensi Penanaman Modal Sektor Primer, Sekunder Dan Tersier, kegiatan ini bertujuan untuk mengikuti pemasaran Promosi Investasi yang terdiri dari 2 jenis pemasaran dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,37% (Rp.134.875.580,-), dan sisa sebesar (Rp. 14.374.420,-). Ini disebabkan adanya efesiensi perjalanan dinas luar daerah.
   b. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal, kegiatan ini untuk mencetak 100 buku dan 200 brosur serta 4 pamplet. Dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 67,45% (Rp.33,727,100,-) dari pagu sebesar (Rp. 50.000.000,-) ini disebabkan adanya efisensi.
   c. Kegiatan forum komunikasi pemasaran penanaman modal, kegiatan ini menyebarkan penanaman modal antar wilayah Bali Utara, Bali Selatan, Bali Barat dan Bali Timur. Dengan

realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85,70% (42.848.300,-) dari pagu sebesar (Rp. 50.000.000,0) ini disebabkan adanya efisiensi.

2. Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, meliputi kegiatan:

   Pemetaan peluang dan potensi investasi, kegiatan ini membuat dokumen usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali. Dengan realisasi fisi 100% dan realisasi keuangan 77,61% (25.146.400,-) dari pagu sebesar (Rp.32.400.000) ini disebabkan adanya efisensi.

3. Realisasi Investasi PMA dan PMDN

   Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali realisasi investasi PMA Maupun PMDN pada tahun sebesar Rp. 11.63 triliyun (data sampai dengan bulan September) dari Rp. 18.37 triliyun . Dilihat dari realisasi persektor realisasi investasi baik PMA maupun PMDN masih terfokus di sektor Tersier. Ini dapat dilihat dari Tabel perkembangan realisasi investasi persektor dimana sektor Tersier untuk PMDN terealisasi sebesar Rp. 3.9 Triliyun diikuti oleh sektor Sekunder sebesar Rp.1.03 Triliyun dan Primer 353.07 Milyard untuk Sektor PMA realisasi sektor Tersier sebesar Rp. 6.32 Triliyun dan Sekunder Rp. 12 Milyard sementara sektor primer belum ada investor yang berinvestasi.

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Bali digambarkan pada Tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Rp.	%	Volume	%	Rp.	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja :								
1	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	2 jenis	100	159,600,000	100	jenis	100	97,414,567	61,04
2	Penyediaan alat tulis kantor	37 jenis	100	85,000,000	100	37 jenis	100	76,304,000	89,779
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	100	35,012,100	100	13 jenis	100	34,757,400	9,27
4	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	100	6,791,000	100	10 jenis	100	6,461,000	95,45
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	100	11,340,000	100	1 jenis	100	11,340,000	100
6	Penyediaan makanan dan minuman	1400 ktk	100	24,500,000	100	1400 ktk	100	24,020,000	98,04
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 jenis	100	175,000,000	100	1 jenis	100	124,791,580	71,31
8	Upacara agama	6 jenis	100	71,900,000	100	6 jenis	100	71,262,500	99,11
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19 jenis	100	225,000,000	100	19 jenis	100	216,950,000	96,42
10	Pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	100	1,974,929,551	100	1 unit	100	1,707,377,663	86,45

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Rp.	%	Volume	%	Rp.	%
	gedung kantor								
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	20 unit	100	518,130,050	100	20 unit	100	506,898,732	97.83
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11 jenis	100	69,500,000	100	11 jenis	100	66,632,332	95,87
13	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	2 dok	100	75,000,000	100	2 dok	100	67,796,400	90,40
14	Penerapan ISO 9001 : 2015	1 kali	100	30,000,000	100	1 kali	100	29,807,800	99,36
B	Program Pengembangan iklim investasi dan realissi investasi								
1	Pemetaan peluang dan potensi investasi	1 dok	100	32,400,000	100	1 dok	100	25,146,400	77,61
2	Sinkronisasi informasi realisasi investasi	2 dok	100	30,000,000	100	2 dok	100	21,726,270	72,42
3	Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	2 dok	100	43,000,000	100	2 dok	100	35,698,200	83,02
4	Analisa implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	2 dok	100	33,000,000	100	2 dok	100	32,278,900	97,81
C	Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal								
1	Pemasaran potensi penanaman modal sektor primer, sekunder dan tersier	2 jenis	100	32,400,000	100	1 dok	100	25,146,400	77,61
2	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal	100 buku	100	30,000,000	100	2 dok	100	21,726,270	72,42
3	Forum komunikasi pemasaran penanaman modal	4pamplet	100	43,000,000	100	2 dok	100	35,698,200	83,02
D	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.								
1	Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor A1	81 izin	100	24,450,000	100	81 izin	100	23,558,200	96,53
2	Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor A2	13.004 izin	100	34,250,000	100	13.004 izin	100	31,800,000	92.85
3	Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor A3	225 izin	100	17,200,000	100	225 izin	100	17,200,000	100
E	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.								
1	Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor B1	5.000 izin	100	36,162,000	100	5.000 izin	100	27,197,200	75,21
2	Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor B2	90 izin	100	25,212,000	100	90 izin	100	24,915,020	98,82
3	Sinkronisasi, implementasi dan pemantauan izin dan non izin di Sektor B3	2.000 izin	100	27,886,400	100	2.000 izin	100	27,662,600	99,20
F	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
1	Pemantauan LKPM pelaksanaan penanaman modal	21 perusahaan	100	12,882,000	100	21 perusahaan	100	12,842,000	99,69

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Rp.	%	Volume	%	Rp.	%
2	Edukasi di bidang penanaman modal	2 kali	100	5,449,000	100	21 kali	100	5,408,400	99,25
3	Pengawasan penanaman modal	24 perusahaan	100	12,661,000	100	24 perusahaan	100	12,639,200	99,83
G	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan								
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penanganan pengaduan	10 pengaduan	100	33,958,800	100	10 pengaduan	100	25,810,950	76,01
2	Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan\	500 buah buklet	100	43,950,000	100	500 buah buklet	100	41,925,130	95,39
3	Pemantauan perizinan dan non perizinan secara elektronik	9 kali	100	32,150,000	100	9 kal	100	31,284,150	97,31

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.

   Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
2. Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
3. Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota.
4. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

Solusi

1. Gubernur Bali telah mengeluarkan Moratorium/ Penghentian Sementara Penerbitan Izin Prinsip untuk jasa akomodasi di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar melalui surat nomor : 570/1665/BPM tanggal 27 Desember 2010.
2. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar memperioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar investasi (Jalan, Air, Listrik), dan penetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal dan telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dalam upaya menarik minat calon investor/investor untuk menanamkan modalnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Membuat kajian Pemetaan Peluang dan Potensi Investasi sektor tersier per wilayah regional (di luar wilayah regional Bali Selatan) dan Perencanaan Penanaman Modal.

4. Mempromosikan peluang dan potensi bagi Kabupaten-kabupaten yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan investasi kepada calon investor baik melalui promosi di luar negeri maupun dalam negeri.
5. Mereview Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Bali (RUPMP) 2015-2025 yang ditetapkan tanggal 6 Nopember 2014 dalam upaya melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini dan kedepannya.

17. Kepemudaan dan Olah Raga

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta dan daya saing pemuda serta meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, telah mengambil berbagai langkah konkret untuk meningkatkan mutu dan daya saing pemuda serta prestasi olahraga dengan melaksanakan berbagai kegiatan dengan program prioritas/unggulan pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan capaian visi, misi, tujuan dan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dijabarkan dalam program dan kegiatan dengan periode tahunan. Prioritas-prioritas khusus dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga baik yang telah ditetapkan berupa perjanjian kinerja Perangkat Daerah maupun yang menjadi penugasan Gubernur kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Adapun Program Kegiatan prioritas/unggulan/strategis yang telah ditetapkan capainnya dapat dijabarkan dengan narasi dan tabel.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pembudayaan Olahraga	a. Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional b. Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga c. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kemitraan dan Penghargaan
2	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	a. Kegiatan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) b. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) c. Kegiatan Koordinasi Monitoring Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga d. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) e. Pekan Olahraga Nasional KORPRI (PORNAS KORPRI) f. Pencak Silat Gubernur Cup
3	Program Pemberdayaan Pemuda	a. Kegiatan Paskibraka, b. Kegiatan Jambore Pemuda Daerah, c. Peningkatan Potensi Pemuda

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		d. Gita Bahana Nusantara
4	Program Pengembangan Pemuda	a. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor b. Kegiatan Pemilihan Wirausaha Muda dan Pelatihan Wiraushasa Muda Pemula, **c.** Kegiatan Pemilihan Pertukaran Pemuda Luar Negeri dan Kapal Pemuda Nusantara.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

No	Jumlah ASN	Jumlah Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Keterangan
	54 orang	Jumlah Pejabat Struktural adalah 21 orang, tetapi hanya terisi 19 orang	1 orang	Jabatan yang tidak terisi : - Eslon II 1 orang - Eslon IV 1 orang

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program prioritaspada urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali adalah sebagai berikut yaitu :

a) Program Pembudayaan Olahraga

Kegiatan-kegiatan Pembudayaan Olahraga dalam rangka mendukung terwujudnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat. Tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp 1.507.438.416,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.492.399.371,00 (99,00%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Kondisi target dan capaian kinerja Program Pembudayaan Olahraga selama tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

Target dan Sasaran Program Pembudayaan Olahraga

Indikator	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase masyarakat yang berolahraga	29%	29%	30%	30%

Dari tabel diatas, secara kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, organisasi olahraga maupun yang dilakukan secara individu adalah meningkat 1% dari tahun sebelumnya 29% menjadi 30%. Dalam rangka mendukung meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berolahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- **Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional**

  Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan, melestarikan, menggali dan menumbuh kembangkan olahraga tradisional demi ketahanan budaya bangsa, karena kita

menyadari bahwa kebudayaan merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan kualitas jasmani masyarakat,
b. menjadikan olahraga menjadi gaya hidup
c. menjadikan olahraga tradisional sejajar dengan cabang olahraga prestasi
d. sebagai ajang pembibitan olahraga tradisional.

Target sasaran kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional ini adalah masyarakat umum, pelajar dari kabupaten/kota se-Bali dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga antara lain engrang, terompah panjang, dagongan dan hadang. Capaian kinerja sebesar 100%, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 143.572.104,00, realisasi keuangan Rp 140.662.077,63 (97,97%).

- **Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga**

Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada klub-klub olahraga sepak bola usia dini yang ada di kabupaten/kota, setelah dilakukan pembinaan diadakan kompetisi pada bulan Nopember 2019. Klub-klub sepak bola usia dini tersebut dapat melaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga minat dan bakat anak-anak usia dini dapat tersalurkan dengan baik. Melalui klub-klub olahraga ini diharapkan muncul atlet-atlet sepak bola yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Target sasaran kegiatan ini sebanyak 30 (tiga puluh) klub olahraga sepak bola di kabupaten/kota se-Bali. Capaian kinerja sebesar 100%, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 219.294.208,00 dan realisasi keuangan Rp 216.730.795,26 (98,83%).

- **Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kemitraan dan Penghargaan**

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kemitraan dan Penghargaan ini bertujuan untuk memfasilitasi instansi pemerintah, instansi swasta maupun organisasi keolahragaan agar dapat saling bekerjasama dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga. Selain itu kegiatan ini juga memberikan penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi seuai amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistim Keolahragaan Nasional . Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. sebagai penghargaan, pengakuan, pengesahan dan penghormatan atas partisipasi, prestasi dan jasa atas prestasi dibidang olahraga.
b. Sebagai motivasi para tenaga keolahragaan untuk meningkatkan prestasi
c. Meningkatkan jumlah tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih yang telah berprestasi meriah medali pada Kejuaraan Dunia SOIna, Asian School Games, POPNAS dan Peparpenas. Target

atlet dan pelatih yang diberikan penghargaan adalah sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang. Capaian kinerja 100%, pagu anggaran Rp. 1.144,572.104,00, realisasi anggaran Rp. 1.135.006.497,63 (99,16%).

b) Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga dapat dicapai melalui pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, memperbanyak kejuaraan/event olahraga serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi. Tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp 9.791.114.920,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.828.426.322,00 (79,95%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target dan capaian kinerja program peningkatan prestasi olahraga tahun 2018-2019 sebagai berikut :

Target sasaran dan Capaian Program Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar di tingkat wilayah, nasional dan internasional	11	20	85	98

Dari tabel diatas, capaian prestasi olahraga meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga serta jumlah kejuaraan yang diikuti di tingkat nasional lebih banyak, seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dengan meraih 18 emas, 16 perak dan 27 perunggu dengan total medali 61, Pekan Paralymic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) dengan menraih medali 4 emas, 7 perak dan 7 perunggu, dengan total 18 medali dan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI dengan meraih medali 1 perak dan 1 perunggu, total 2 medali, Kejuaraan Dunia dengan mearaih medali emas 1, perak 1 dan Kejuaraan Nasional antar PPLP dengan meraih medali emas 2, perak 2, perunggu 1.

Sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga khususnya olahraga pelajar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melalui Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- **Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)**

  Kegiatan ini merupakan wadah bagi atlet pelajar disabilitas di Indonesia dan dapat menjadi media pemersatu bangsa Indonesia yang mampu memberikan stimulasi untuk berkompetisi secara sehat dan sportif untuk meraih prestasi atas perjuangan atlet pelajar disabilitas. PEPARPENAS juga menjadi media seleksi bagi para atlet pelajar disabilitas yang akan diproyeksikan untuk bertanding pada Pekan Paralympic pelajar tingkat Internasional. Pelaksanaan PEPARPENAS Tahun 2019 yang rencana awal dilaksanakan di Provinsi

Papua dipindahkan ke Provinsi DKI Jakarta dengan alasan keamanan. Provinsi Bali mengirimkan 20 orang atlet, 10 orang pelatih dan 10 orang, meraih peringkat 9 nasional dari 34 provinsi dengan meraih edali 4 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Pagu anggaran Rp. 1.325.000.000,00, realisasi keuangan Rp. 871.299.900 (65,76%).

- **Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional POPNAS)**

  Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) sebagai wadah pembibitan olahraga prestasi dan sebagai bagian pembangunan olahraga sejak usia dini serta untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembinaan pretasi olahraga yang dilakukan di daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan POPNAS Tahun 2019 yang rencana awal dilaksanakan di Provinsi Papua, karena alasan keamanan maka pelaksanaan POPNAS 2019 dipindahkan ke Provinsi DKI Jakarta, dengan mempertandingkan 13 cabang olahraga, yang rencana sebelumnya 20 cabang olahraga. Provinsi Bali mengikuti 11 cabang olahraga, meraih peringkat 5 dari 34 provinsi, dengan memperoleh medali 18 emas, 16 perak dan 27 perunggu. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dengan target 100 orang, capaian 128 orang terdiri dari 101 orang atlet dan 27 orang pelatih, pagu anggaran Rp. 3.640.199.208,00 realisasi keuangan Rp 2.361.421.429,26 (64,87%).

- **Kegiatan Koordinasi, Monitoring Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga.**

  Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendata sarana dan prasarana olahraga yang ada di kabupaten/kota se-Bali. Sarana dan Prasarana olahraga merupakan hal yang mutlak harus ada manakala kita mengharapkan adanya pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga dan merupakan salah satu bagian dari pembangunan sistem pembinaan olahraga dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga. Kegiatan ini dengan target 1 dokumen data sarana dan prasarana olahraga , capaian 1 dokumen (100%), pagu anggaran Rp 79.322.104,00 realisasi keuangan Rp 77.312.097,63(97,47%).

- **Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)**

  Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) merupakan salah satu kegiatan guna menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif serta memberikan wadah bagi atlet-atlet pelajar yang memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga untuk meraih prestasi puncak. Hasil dari kegiatan ini merupakan bibit-bibit atlet yang berprestasi di tingkat nasional (POPWIL, POPNAS). Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) Provinsi Bali dengan target 5.600 orang dengan mempertandingkan 26 cabang olahraga, capaian kinerja 5.600 orang (100%), pagu anggaran Rp 3.359.368.108,00 realisasi keuangan Rp 3.330.957.295,26(99,15%)

- **Kegiatan Pekan Olahraga Nasional KORPRI (PORNAS KORPRI)**

  Dalam rangka meningktakan kebugaran dan kesehatan jasmani dan rohani pegawai, mengangkat jati diri komunitas dan membentuk komunikasi sosial yang sehat diantara sesama pegawai, serta menjaga persatuan/kesatuan dan membentuk watak/kepribadian

bangsa yang bermartabat di lingkunagn PNS, Pengurus Pusat BAPOR KORPRI melaksanakan kegiatan PORNAS KORPRI, yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahun sekali. BAPOR KORPRI Provinsi Bali ikut serta dalam PORNAS KORPRI tahun 2019 dengan mengirimkan sebanyak 25 orang atlet dan 6 orang pelatih. BAPOR KORPRI Provinsi Bali mengikuti 5 cabang olahraga dengan meraih prestasi peringkat 22 dari 38 peserta, meraih 1 perak dan 1 perunggu. Kegiatan PORNAS KORPRI dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 809.906.300,00 (80,99%).

- **Kegiatan Pencak Silat Gubernur Cup**

  Penyelenggaraan kegiatan Pencak Silat Gubernur Cup bertujuan untuk meningkatkan kejuaraan atau pertandingan cabang olahraga Pencak Silat di Tingkat Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan pengalaman bertanding dan peningkatan prestasi atlet khususnya cabang olahraga Pencak Silat. Pencak Silat adalah cabang olahraga unggulan di Provinsi Bali, dengan menyumbang medali yang cukup konsisten pada ajang kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan Pencak Silat Gubernur Cup dengan target 300 orang atlet, capaian kinerja sebanyak 300 orang atlet. Pagu anggaran sebesar Rp. 387.225.500,00 dengan realisasi keuangan Rp. 377.529.300,00 (97,50).

c) Program Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian dan daya saing pemuda. Tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp 2.301.631.312,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.197.853.550,00 (95,49%) dan realisasi fisik 100%. Target dan capaian kinerja program pemberdayaan pemuda pada tahun 2018-2019 seperti tabel berikut :

Target dan Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Pemuda

Indikator	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
persentase organisasi pemuda yang aktif	76%	76%	77%	77%

Dari tabel diatas, target dan capaian kinerja program pemberdayaan pemuda pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun 2018 sebesar 76% menjadi 77% pada tahun 2019.

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah pemuda yang aktif menjadi anggota organisasi kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- **Kegiatan Seleksi Paskibraka**

Kegiatan Seleksi Paskibraka bertujuan untuk meningkatkan jiwa idealisme, integritas kepribadian, kemuliaan ahlak dan moral, patriotik dan tidak cacat hukum yang bermuara pada nilai loyalitas terhadap NKRI, memupuk kecintaan terhadap Bangsa Indonesia, pembentukan karakter. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih pelajar putra dan putri terbaik daerah yang akan mewakili Provinsi Bali pada Pasukan Nasional Paskibraka dan Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Bali. Setiap tahun Provinsi Bali selalu mengirimkan 2 (dua) orang putra dan putri sebagai Pasukan Nasional (PasNas), nama-nama pelajar PasNas dari tahun 2017-2019 sebagai berikut :

No	Tahun	Nama	
1	2017	Putra	Komang Aji Tegak Sidiman (Buleleng)
		Putri	Ni Kadek Natalia Maharani (Jembrana)
2	2018	Putra	Sang Putu Hendra Aditya Jyoty (Klungkung)
		Putri	Ni Putu Sukma Dewi Widiyanti (Jembrana)
3	2019	Putra	I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Jembrana)
		Putri	I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastari (Bangli)

Kegiatan seleksi Paskibraka dengan target 90 orang, capaian kinerja 90 orang (100%), pagu anggaran Rp 1.908.749.104,00 realisasi anggaran Rp 1.832.565.497,63 (96,01%).

- **Jambore Pemuda Daerah**

  Dalam rangka persiapan Jambore Pemuda Indonesia tingkat nasional, Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan kegiatan Jambore Pemuda Daerah. Kegiatan ini merupakan ajang seleksi pembentukan tim Jambore Pemuda Indonesia, selain itu kegiatan ini juga sebagai wadah pembentukan karakter, kreativitas dan pembelajaran pemuda agar dapat berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan kepemudaan. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda dari kabupaten/kota se-Bali. Target kagiatan ini 36 orang, capaian 36 orang(100%), Pagu anggaran Rp. 179.572.104,00, relaisasi anggaran Rp. 160.984.297,63 (89,65%).

- **Peningkatan Potensi Pemuda**

  Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda, maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan Pelatihan dalam rangka meningkatkan potensi pemuda dalam merangkai uang kepeng menjadi suatu hasil karya yang dapat dikembangkan menjadi suatu komoditas dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam Pelatihan ini diiuti oleh 45 orang pemuda dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Target kagiatan ini 45 orang, capaian 45 orang(100%), Pagu anggaran Rp. 95.572.104,00, relaisasi anggaran Rp. 95.406.697,63 (99,83%).

- **Gita Bahana Nusantara**

  Kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter dan jati diri bangsa, memupuk rasa kebersamaan dan nasionalisme serta meningkatkan apresiasi seni dikalangan generasi muda. Selain itu untuk menjalin perstuan dan kesatuan bangsa serta menjaring bakat dikalangan generasi muda khususnya seni suara dan seni musik. Gita Bahana Nusantara memilih wakil Provinsi Bali sebanyak 4 (empat) orang pada Paduan Suara Gita Bahana

Nusantara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara tingkat nasional dalam Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, yang diikuti oleh 50 orang generasi muda dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Adapun 4 orang yang mewakili Provinsi Bali pada Gita Bahana Nusantara tingkat Nasional adalah sebagai berikut :

1. Made Ayu Rindika Wedayanti Netra
2. Kadek Chika Melinda Roziana
3. Ananda Eka Raharja
4. Abhinaya Farhan Ramadhan

Target kagiatan ini 50 orang, capaian 50 orang (100%), Pagu anggaran Rp.117.738.000,00, relaisasi anggaran Rp. 108.897.057,00 (92,49%).

d) Program Pengembangan Pemuda

Progam pengembangan pemuda dibagi tiga yakni Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda; Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilandan kemandirian berusaha; Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Tahun 2019 pagu anggaran sebesar Rp 558.716.312,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 543.415.811,00 (97,26%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Target dan capaian kinerja program pengembangan pemuda pada tahun 2018-2019, seperti tabel berikut :

Target dan Capaian Program Pengembangan Pemuda

No	Indikator	2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	3,50%	3,50%	3,70%	3,70%

Dari tabel diatas, partisipasi pemuda dalam pembangunan meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 3,50% menjadi 3,70% pada tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan partaisipasi pemuda dalam pembangunan, pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- **Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi dan Pelatihan Wirausaha Muda Pemula**

  Pengembangan kewirausahaan pemuda pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional, sehingga kegiatan seleksi wirausaha muda dan pelatihan wirausaha muda pemula menghasilkan wirausaha muda yang berprestasi, mandiri dan berdaya saing. Berdasarkan hasil pemilihan wirausaha

muda berprestasi yang selanjutnya mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional meraih prestasi sebagai berikut :

1. Juara II Wirausaha Muda Berprestasi Bidang Teknopreneur atas nama I wayan Ade Saputra.
2. Juara III wirausaha muda berprestasi bidang pertanian kelautan atas nama I Putu Agi Pratama.

Kegiatan Pemilihan wirausaha muda dan pelatihan wirausaha muda pemula dengan target 30 orang, capaian kinerja 30 orang (100%), pagu anggaran Rp 179.572.104,00 realisasi keuangan Rp 178.396.197,63 (99,35%).

- **Pemilihan Pemuda Pelopor**

Kegiatan pemilihan pemuda pelopor merupakam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperoleh pemuda-pemuda yang siap melakukan terobosan-terobosan melalui bidang pendidikan, bidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pariwisata, bidang pangan, bidang inovasi teknologi dan bidang agama, sosial dan budaya. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan memperoleh pemuda-pemuda yang tanguh, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki lotalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki idealisme, kejujuran, integritas, bijaksana, berbudi perekrti dan bermartabat.

Berdasarkan hasil pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional, wakil Provinsi Bali meraih prestasi sebagai Juara I Pemuda pelopor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, atas nama I Nengah Sueca, S.Pd.,M.Pd.

Kegiatan pemilihan pemuda pelopor dengan target kinerja 72 orang, capaian kinerja 72 orang (100%), pagu anggaran Rp 229.572.104,00 realisasi keuangan Rp 218.220.441,63 (95.06%).

- **PemilihanPertukaran Pemuda Luar Negeri dan Kapal Pemuda Nusantara**

Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pelaksanaannya bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pemilihan Pertukaran Pemuda Luar Negeri dan Kapal Pemuda Nusantara yang memiliki kualitas dan siap bersaing di tingkat nasionla dan internasional. Kegiatan ini bertujuan agar memperoleh pemuda yang tangguh, beraklahk mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan tidak cacat hukum serta memiliki ideliasme, kejujuran, integritas, bijaksana, berbudi pekerti dan bermartabat. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih pemuda yang mewakili Provinsi Bali ke seleksi tingkat nasional, kegiatan pemilihan pertukaran pemuda luar negeri dan kapal pemuda nusantara dengan target kinerja 15 orang, capaian kinerja 15 orang (100%), pagu anggaran Rp 149.572.104,00 realisasi keuangan Rp 146.799.171,63 (98,15%).

Berdasarkan hasil pemilihan tingkat nasional, pemuda yang mewakili Provinsi Bali meraih prestasi sebagai berikut :

No	Nama	Penghargaan/Prestasi
1	2	3
1	Ni Luh Widiantari	Pertukaran Pemuda Luar Negeri Indonesia - Jepang
2	Ni Komang Ernayanti	Pertukaran Pemuda Luar Negeri Indonesia - Australia
3	I Gede Hadika Kresna Wirawan	Pertukaran Pemuda Luar Negeri Indonesia - Singapura
4	I Gusti Ayu Sintya Dewi Suteja	Kapal Pemuda Nusantara
5	Ni Made Asri Wahyuni	Kapal Pemuda Nusantara
6	I Wayan Sugiarta	Kapal Pemuda Nusantara

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program dan Keuangan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Vol	%	(Rp.)	%	Vol	%	(Rp.)	%
1	Program Pemberdayaan Pemuda								
	a. Kegiatan Paskibraka	90 orang	100	1.908.749.104,00	100	90 orang	100	1.832.565.497,63	96,01
	b. Kegiatan Jambore Pemuda Daerah	36 orang	100	179.572.104,00	100	36 orang	100	160.984.297,63	89,65
	c. Kegiatan Peningkatan Potensi Pemuda	45 orang	100	95.572.104,00	100	45 orang	100	95.406.697,63	99,83
	d. Kegiatan Gita Bahana Nusantara	50 orang	100	117.738.000,00	100	50 orang	100	108.897.057,00	92,49
2	Program Pengembangan Pemuda								
	a. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor	72 orang	100	229.572.104,00	100	72 orang	100	218.220.441,63	95,06
	b. Pemilihan Wirausaha Muda Berprestasi dan Pelatihan Wirausaha Muda Pemula	30 orang	100	179.572.104,00	100	30 orang	100	178.396.197,63	99,35
	c Pemilihan Pertukaran Pemuda Luar Negeri dan kapal Pemuda Nusantara	40 orang	100	149.572.104,00	100	40 orang	100	146.799.171,63	98,15
3	Program Pembudayaan Olahraga								
	a. Kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional	4 cabor	100	143.572.104,00	100	4 cabor	100	140.662.077,63	97,97
	b Kegiatan Pembinaan Klub Olahraga	30 klub	100	219.294.208,00	100	30 klub	100	216.730.795,26	98,83
	c Kegiatan Peningkatan	2 dok, 148	100	1.144.572.104,00	100	2 dok, 148	100	1.135.006.497,63	99,16

	Koordinasi Kemitraan dan Penghargaan	orang dan 1 kali				orang dan 1 kali			
NO	**URAIAN**	**TARGET**				**REALISASI**			
		FISIK		**KEUANGAN**		**FISIK**		**KEUANGAN**	
		Volume	**%**	**(Rp.)**	**%**	**Volume**	**%**	**(Rp.)**	**%**
4	Program Peningkatan Prestasi olahraga								
	a. Kegiatan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar nasional (PEPARPENAS)	40 orang	100	1.325.000.000,00	100	40 orang	100	871.299.900,00	65,76
	b. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	100 orang	100	3.640.199.208,00	100	128 orang	128	2.361.421.429,26	64,87
	c. Koordinasi Monitoring Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga	1 dokumen	100	79.322.104,00	100	1 dokumen	100	77.312.097,63	97,47
	d. Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)	5.600 orang	100	3.359.368.108,00	100	5.60 orang	100	3.330.957.295,26	99,15
	e. Pekan Olahraga Nasional KORPRI (PORNAS KORPRI)	50 orang	100	1.000.000.000,00	100	50 orang	100	809.906.300,00	80,99
	f. Pencak Silat Gubernur Cup	300 orang	100	387.225.500,00	100	300 orang	100	377.529.300,00	97,50

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, hal ini disebabkan belum optimalnya program tindak lanjut terhadap pemuda terampil.
2. Tingginya tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan penyalahgunaan informasi dan teknologi, sehingga perlu peningkatan kuantitas dan kegiatan penyadaran pemuda yang berkelanjutan.
3. Belum optimalnya pembinaan organisasi dan manajemen organisasi kepemudaan sebagai akibat dari kurangnya intensitas kegiatan penguatan organisasi kepemudaan.
4. Belum maksimalnya fungsi organisasi keolahragaan untuk mencetak tenaga keolahragaan, sehingga perlu ditingkatkan kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK.
5. Kurangnya frekuensi kompetisi/festival olahraga
6. Kurang optimalnya kegiatan peningkatan prestasi pembibitan atlet potensial.
7. Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
8. Kurangnya kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

Solusi :

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga yakni :

1. meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dan profesionalisme, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, melalui :
   a. bela negara;
   b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
   c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
   d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
   f. pendampingan pemuda;
   g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
   h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan
   i. pengembangan Pendidikan Kepramukaan.
2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui:
   a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
   b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
   c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
   d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:
   a. peningkatan peran pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
   b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;
   c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan
   d. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa.
4. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar di tingkat regional dan nasional, melalui:
   a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
   b. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
   c. pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;

d. pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;
e. pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
f. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
g. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan;
h. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;
i. peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
j. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
m. Meningkatnya Sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan melalui terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
o. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
p. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, melalui:
   a. peningkatan kinerja Penyelenggaraan Kehumasan dan Kepegawaian;
   b. peningkatan kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian, dan Evaluasi Program;
   c. peningkatan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kerumahtanggaan;
   d. peningkatan kinerja Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
   e. peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.

18. Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai pembentuk jati diri, merupakan identitas etnik Bali yang dapat berfungsi majemuk secara lintas etnik dan lintas bangsa, bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Dalam skala Nasional, kebudayaan Bali berperan dalam ikut membangun dan memperkaya kebudayaan

Nasional. Dalam skala Internasional, kebudayaan Bali dapat berperan bagi pengembangan kebudayaan dunia melalui satu entitas warisan budaya dunia. Pengelolaan Kebudayaan sebagai potensi unggulan daerah dan merupakan salah satu modal dasar bagi perkembangan pariwisata di daerah Bali telah dilakukan upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dalam keberadaannya, kebudayaan Bali patut dilestarikan dan dikembangkan secara dinamik dan berwawasan ke depan. Fungsi ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang bertugas dalam upaya pemajuan kebudayaan Bali.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	a) Pesta Kesenian Bali b) Bali International Literary Festival (Festival Internasional Sastra Indonesia di Bali) c) Peragaan dan Pementasan Seni Budaya d) Diplomasi Kebudayaan e) Pembinaan SDM Tenaga Kebudayaan f) Festival Seni Masa kini g) Penghargaan Seni h) Pameran Seni Rupa i) Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sanggar, Yayasan, Sekaa) j) Fasilitasi Hak Cipta dan Paten Karya Seni k) Pemilihan Bintang Radio l) Pawai Budaya
2	Program Pelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra	a) Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Kuno/Lontar b) Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali c) Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali d) Pemeliharaan dan Perawatan Naskah Kuno/Lontar e) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Naskah Kuno/Lontar/Buku
3	Program Pelestarian Nilai Tradisi	a) Inventarisasi Peristiwa dan Tokoh Sejarah b) Penetapan Warisan Budaya Takbenda c) Inventarisasi Tradisi Budaya d) Sabha Budaya e) Utsawa Dharma Gita f) Pekan Kebudayaan
4	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	a) Penyusunan Purana Pura b) Penyuluhan Museum dan Koleksi c) Pemeliharaan dan Pengembangan Cagar Budaya d) Tri Hita Karana Award e) Penyusunan Kajian Seni Lukis Klasik Bali dalam rangka Pengusulan sebagai Warisan Budaya Dunia
5	Program Penguatan Lembaga	a) Penyusunan Ranperda Desa Pakraman

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	Adat	b) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat c) Pendidikan dan Pelatihan Prajuru Desa Adat d) Pendidikan dan Pelatihan Pecalang e) Pendidikan dan Pelatihan Prajuru Sekaa Truna f) Pembinaan Penyusunan Awig-Awig/Pararem Desa Pakraman g) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kebudayaan termasuk ke dalam urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, sehingga Dinas Kebudayaan tidak menyelenggarakan SPM.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan sebagai Dinas Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Dinas Kebudayaan sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, sesuai yang tertuang pada UU Nomor 23 tahun 2014 termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Jumlah Pegawai

NO	UNIT KERJA	PEGAWAI				
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	TOTAL
1	Dinas Kebudayaan	1	4	15	41	61
2	UPT Taman Budaya	-	1	3	26	30

3	UPT Museum Bali	-	1	3	22	26
4	UPT MPRB	-	1	3	19	23
TOTAL		**1**	**7**	**24**	**108**	**140**

Kualifikasi Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMU	SMK	D2	D3	S1	S2	S3
1	Dinas Kebudayaan	2	-	12	-	-	1	27	18	1
2	UPT Taman Budaya	-	1	9	9	-	-	8	3	-
3	UPT Museum Bali	-	-	12	-	-	2	8	4	-
4	UPT MPRB	-	2	13	-	-	-	7	1	-
TOTAL		**2**	**3**	**46**	**9**	**-**	**3**	**50**	**26**	**1**

Pangkat dan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN IV				GOLONGAN III				GOLONGAN II				GOLONGAN I			
		IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	III/a	III/b	III/c	III/d	II/a	II/b	II/c	II/d	I/a	I/b	I/c	I/d
1	DISBUD	6	7	-	-	9	8	10	11	-	1	1	6	-	-	1	1
2	UPT Taman Budaya	1	1	-	-	2	9	6	3	-	-	3	5	-	-	-	-
3	UPT Museum Bali	4	-	-	-	2	7	5	2	-	-	4	2	-	-	-	-
4	UPT MPRB	-	1	-	-	3	7	1	3	-	2	5	-	-	-	1	-
TOTAL		**11**	**9**	**-**	**-**	**16**	**31**	**22**	**19**	**-**	**3**	**13**	**13**	**-**	**-**	**2**	**1**

Pejabat Struktural

NO	ESELON	UNIT KERJA				TOTAL
		Dinas Kebudayaan	UPT Taman Budaya	UPT Museum Bali	UPT MPRB	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	4	1	1	1	7
3	ESELON IV	15	3	3	3	24

Fungsional

NO	FUNGSIONAL	UNIT KERJA				TOTAL
		Dinas Kebudayaan	UPT Taman Budaya	UPT Museum Bali	UPT MPRB	
1	Pustakawan	2	-	1	-	**3**
2	Pranata Humas	1	-	-	-	**1**
3	Penerjemah	-	1	-	1	**2**

Alokasi Dan Realisasi Anggaran :

Alokasi dana yang dianggarkan untuk seluruh kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan UPTD pada Tahun 2019 setelah perubahan adalah: untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 53.526.182.806,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.977.375.788,20 dengan realisasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	DANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEU (%)
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**20.977.375.788,20**	**18.268.363.372,00**	**100**	**87,09**
2	**BELANJA LANGSUNG**	**53.526.182.806,00**	**46.797.199.663,97**	**100**	**87,43**
I. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.480.000	4.200.000	100,00	93,75
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	414.000.000	279.375.700	100,00	67,48
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	548.125.000	510.885.000	100,00	93,21
4	Penyediaan alat tulis kantor	83.000.000	78.325.500	100,00	94,37
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	103.000.000	93.397.000	100,00	90,68
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000	49.525.650	100,00	99,05
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000	72.647.850	100,00	72,65
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	18.000.000	100,00	90,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	76.500.000	62.750.000	100,00	82,03
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	583.223.000	392.787.744	100,00	67,35
11	Upacara Keagamaan	231.000.000	143.600.000	100,00	62,16
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.936.895.200	1.613.473.350	100,00	83,30
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.615.896.312	1.483.982.888	100,00	91,84
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	838.208.528	728.406.249	100,00	86,90
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000	46.470.480	100,00	92,94
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.000.000	46.356.000	100,00	66,22
17	Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	79.572.104	78.476.059	100,00	98,62
18	Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali	0	0	0,00	0,00
19	Kajian Akademis Penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan	297.460.000	141.094.800	100,00	47,43
II. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA					
1	Pesta Kesenian Bali	5.832.950.000	5.630.984.309	100,00	96,54

2	Bali International Literary Festival (Festival Internasional Sastra Indonesia di Bali)	1.000.000.000	946.272.850	100,00	94,63
3	Peragaan dan Pementasan Seni Budaya	3.800.000.000	3.096.937.650	100,00	81,50
4	Diplomasi Kebudayaan	355.888.000	354.819.500	100,00	99,70
5	Pembinaan SDM Tenaga Kebudayaan	2.600.000.000	2.484.979.700	100,00	95,58
6	Festival Seni Masa Kini	3.850.000.000	3.792.015.598	100,00	98,49
7	Penghargaan Seni	2.459.233.000	2.419.255.000	100,00	98,37
8	Pameran Seni Rupa	48.500.000	46.200.000	100,00	95,26
9	Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sanggar, Yayasan, Sekaa)	100.000.000	53.925.000	100,00	53,93
10	Fasilitasi Hak Cipta dan Paten Karya Seni	623.153.664	518.948.594	100,00	83,28
11	Pemilihan Bintang Radio	124.825.000	89.200.150	100,00	71,46
12	Pawai Budaya	675.000.000	625.511.990	100,00	92,67
III. PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA ADAT					
1	Penyusunan Ranperda Desa Pakraman	96.760.000	5.933.400	100,00	6,13
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Adat	1.947.325.912	902.325.381	100,00	46,34
3	Pendidikan dan Pelatihan Prajuru Desa Adat	196.000.000	130.094.400	100,00	66,37
4	Pendidikan dan Pelatihan Pecalang	196.000.000	121.312.400	100,00	61,89
5	Pendidikan dan Pelatihan Prajuru Sekaa Truna	196.000.000	117.655.400	100,00	60,03
6	Pembinaan Penyusunan Awig-Awig/Pararem Desa Pakraman	94.970.000	2.613.400	100,00	2,75
7	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	534.009.456	527.219.394	100,00	98,73
IV. PROGRAM PELESTARIAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA					
1	Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Kuno/Lontar	273.489.376	252.401.527	100,00	92,29
2	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali	500.000.000	358.229.400	100,00	71,65
3	Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	1.000.000.000	947.381.200	100,00	94,74
4	Pemeliharaan dan Perawatan Naskah Kuno/Lontar	100.000.000	90.185.400	100,00	90,19

5	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Naskah Kuno/Lontar/Buku	78.000.000	70.608.200	100,00	90,52
6	Pembuatan Film Budaya Bali	0	0	0,00	0,00
V. PROGRAM PELESTARIAN NILAI TRADISI					
1	Inventarisasi Peristiwa dan Tokoh Sejarah	100.000.000	80.530.700	100,00	80,53
2	Penetapan Warisan Budaya Takbenda	163.628.832	142.181.680	100,00	86,89
3	Inventarisasi Tradisi Budaya	43.000.000	35.354.200	100,00	82,22
4	Sabha Budaya	100.000.000	57.493.200	100,00	57,49
5	Utsawa Dharma Gita	593.770.016	566.355.900	100,00	95,38
6	Pekan Kebudayaan	646.000.000	461.786.160	100,00	71,48
VI. PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN					
1	Penyusunan Purana Pura	176.000.000	158.246.200	100,00	89,91
2	Penyuluhan Museum dan Koleksi	100.000.000	88.343.100	100,00	88,34
3	Pemeliharaan dan Pengembangan Cagar Budaya	472.860.520	370.897.298	100,00	78,44
4	Tri Hita Karana Award	100.000.000	81.164.800	100,00	81,16
5	Penyusunan Kajian Seni Lukis Klasik Bali dalam Rangka Pengusulan Sebagai Warisan Budaya Dunia	246.000.000	105.528.200	100,00	42,90
VII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UPTD. TAMAN BUDAYA					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	576.679.193	100,00	96,11
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	827.500.000	816.354.701	100,00	98,65
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	17.248.750	100,00	86,24
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	3.940.000	100,00	78,80
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	247.481.400	100,00	98,99
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.000.000	7.910.000	100,00	98,88
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	101.696.000	83.400.944	100,00	82,01

10	Upacara Keagamaan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.315.226.824	1.291.795.595	100,00	98,22
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	138.930.000	108.083.900	100,00	77,80
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	207.974.000	205.554.100	100,00	98,84
14	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	127.000.000	64.703.700	100,00	50,95
15	Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya	242.000.000	241.742.600	100,00	99,89
16	Pengadaan Bahan Informasi Taman Budaya	20.000.000	19.800.000	100,00	99,00
17	Temu Budaya Nasional	300.000.000	282.653.512	100,00	94,22
18	Publikasi Taman Budaya	375.000.000	315.944.000	100,00	84,25
19	Pameran Seni Rupa Lukisan	100.000.000	88.955.000	100,00	88,96
20	Pembuatan Stand Pameran PKB	518.237.300	518.010.900	100,00	99,96
21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.122.400.000	1.093.849.000	100,00	97,46
22	Pemeliharaan Aset Taman Budaya	526.950.000	515.416.275	100,00	97,81
23	Penyajian dan Pengembangan Seni	775.050.000	678.030.200	100,00	87,48
VIII. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UPTD. MUSEUM BALI					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	178.122.624	177.859.301	100,00	99,85
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.400.000	135.374.247	100,00	71,48
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	400.000.000	396.966.000	100,00	99,24
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.000.000	28.985.300	100,00	99,95
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.500.000	10.981.800	100,00	95,49
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.500.000	19.387.400	100,00	99,42
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4.000.000	3.770.000	100,00	94,25
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.050.000	8.015.000	100,00	99,57
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	50.000.000	38.791.340	100,00	77,58
10	Upacara Keagamaan	36.900.000	36.348.400	100,00	98,51
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	65.000.000	59.389.050	100,00	91,37

12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	631.590.200	389.274.051	100,00	61,63
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	54.534.000	51.247.800	100,00	93,97
14	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	33.247.000	100,00	66,49
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.600.000	5.640.000	100,00	32,05
16	Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional	325.414.624	299.493.601	100,00	92,03
17	Pengelolaan Koleksi Museum	228.732.312	224.845.192	100,00	98,30
18	Pemeliharaan Aset Museum Bali	290.000.000	78.452.468	100,00	27,05
19	Promosi Museum dan Peningkatan Apresiasi Seni Budaya Daerah	652.500.000	618.396.000	100,00	94,77
20	Peningkatan Kualitas Identitas Koleksi UPTD Museum Bali	507.500.000	355.718.900	100,00	70,09
IX. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UPTD. MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245.000.000	227.912.855	100,00	93,03
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.135.543.490	1.133.706.090	100,00	99,84
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	18.002.300	100,00	90,01
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	6.452.600	100,00	86,03
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	74.893.720	100,00	99,86
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	7.543.500	100,00	75,44
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	148.968.000	77.039.690	100,00	51,72
10	Upacara Keagamaan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	959.309.016	904.921.680	100,00	94,33
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.309.730.496	1.304.661.390	100,00	99,61
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	60.000.000	45.275.300	100,00	75,46
14	Rutin Berkala	60.000.000	47.283.000	100,00	78,81

	Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor				
15	Pameran Bersama Monumen Perjuangan Rakyat	129.000.000	120.400.867	100,00	93,33
16	Publikasi Monumen Perjuangan Rakyat Bali	652.500.000	376.040.000	100,00	57,63
17	Pengelolaan Koleksi Monumen Perjuangan Rakyat Bali	507.500.000	378.012.700	100,00	74,49
18	Pemeliharaan Aset Monumen Perjuangan Rakyat Bali	290.000.000	287.571.800	100,00	99,16
JUMLAH		**53.526.182.806**	**46.797.199.663**	**100**	**87,43**

Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Seluruh kegiatan beserta anggarannya selanjutnya dibahas pada Forum Perangkat Daerah. Hasil pembahasan pada Forum Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam pembahasan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi sampai pada akhirnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas di bidang kebudayaan masih dianggap kurang memadai, seperti pengadaan perlengkapan kantor yang berhubungan dengan kegiatan pengadministrasian, sarana penunjang seperti kendaraan dinas yang terbilang cukup lama dan juga beberapa prasarana yang berkaitan dengan teknologi informasi utamanya internet. Beberapa sarana dan prasarana yang kiranya diperlukan tersebut diharapkan dapat menunjang tugas-tugas di bidang kebudayaan.

Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan serta hambatan/kendala yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah sebagai berikut;

Permasalahan

1. Kondisi sarana prasarana yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas karena kelancaran pelaksanaan suatu pekerjaan sangat tergantung pada kondisi *sarana prasarana yang ada.* Dibutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar penyelenggaraan kegiatan administrasi

maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai akan menghambat aktivitas kerja pegawai dan mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau lembaga.

2. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Selain sarana prasana yang baik, kelancaran pelaksanaan tugas/kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh kesediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan atau lembaga karena manusia memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan utamanya yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau lembaga. Oleh karenanya, faktor sumber daya manusia (SDM) ini memang sangat diperlukan untuk perusahaan / lembaga, utamanya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kebudayan dan juga pengadministrasian.

Solusi dan Upaya Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut di atas dilaksanakan dengan meningkatkan dan memelihara sarana prasana yang ada serta meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Sarana prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan.

Permasalahan sarana dan prasarana seperti alat-alat perkantoran, meubel, kendaraan dinas atau keperluan akan internet dan sebagainya dapat terlaksana dengan baik apabila sumber dana yang diberikan cukup dan juga didukung oleh pengelolaan aset yang baik. Sumber dana disini adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada atau memperbarui sarana dan prasarana yang sudah tidak terpakai lagi. Pengelolaan aset disini adalah untuk penataan, pengawasan dan pemeliharaan atas aset yang sudah dimiliki. Pengelolaan aset tersebut bertujuan untuk mengelola sarana dan prasarana yang ada sehingga dengan sarana dan prasarana yang sudah ada mampu menghasilkan output semaksimal mungkin bagi perusahaan atau lembaga.

Pemasalahan untuk sumber daya manusia disini dapat dioptimalkan dengan cara menyeleksi kembali pegawai yang bekerja dengan menempatkan pegawai tersebut dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki (re-positioning) sehingga hasil capaian yang diinginkan oleh perusahaan atau lembaga menjadi lebih optimal. Disisi lain, dengan adanya penempatan ulang atau re-positioning pegawai akan membuat para pegawai atau sumber daya manusia pada perusahaan lebih segar, karena adanya suasana baru dan juga pegawai menjadi lebih fokus dikarenakan mereka bekerja pada bidang keahliannya sehingga hasil capaian atau output perusahaan menjadi lebih optimal.

19. Perpustakaan dan Kearsipan

Sesuai dengan hakekat dan esensinya, dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan di daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi, diharapkan dapat terus eksis dan bahkan berkembang baik secara kwalitas maupun kwantitas dimasa-masa yang akan datang. Tuntutan kebutuhan informasi akan semakin meningkat dan bervariasi sejalan dengan semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan yang menuntut kualitas intelektual dan profesionalisme.

Dalam upaya mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari meningkatnya intelektualitas masyarakat maka keberadaan Perpustakaan dan Arsip perlu terus dibina dan dikembangkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan melestarikan arsip. Karena dengan tersedianya sumber bacaan yang memadai di level masyarakat akan lebih menjamin dan memberi peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun sumber-sumber pengetahuan yang diperlukan dan secara langsung akan meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan minat baca.

Program dan Kegiatan

Program Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali tahun 2019 adalah:

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kerja
2. Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan
3. Program Pengembangan Perpustakaan
4. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan
5. Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan
6. Program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Arsip

Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

1. Pembinaan, Pengawasan dan Audit Penyelenggaraan Kearsipan

   Bertujuan meningkatkan Pengelola Arsip sesuai dengan kaidah-kaidah Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik dalam Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis, seperti Pembuatan Naskah Dinas, Pengurusan Surat, Penataan dan Penggunaan Arsip serta Penyusutan Arsip, maka sangat perlu ditingkatkan pengelolaannya secara profesional. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Pengelolaan Kearsipan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik Masyarakat maupun Pemerintah. Jumlah Lembaga Kearsipan baik itu Perangkat Daerah Provinsi, LKD Kab/Kota, BUMD, BUMN, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik dan Desa, dapat dilihat seperti tabel sebagai berikut :

Lembaga Kearsipan

No.	*Lembaga Kearsipan*	*Jumlah*	*Sudah Dibina*	*Belum Dibina*	*Sudah Diaudit*	*Belum Diaudit*
1.	*LKD Kab/Kota*	*9*	*9*	*-*	*9*	*-*
2.	*Perangkat Daerah Provinsi*	*44*	*40*	*4*	*36*	*8*
3.	*BUMD*	*4*	*-*	*4*	*-*	*-*
4.	*BUMN*	*11*	*-*	*11*	*-*	*-*
5.	*Organisasi Masyarakat*	*19*	*-*	*19*	*-*	*-*
6.	*Organisasi Politik*	*6*	*-*	*6*	*-*	*-*
7.	*Desa*	*716*	*-*	*716*	*-*	*-*

2. Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis

   Pada Hakekatnya Arsip adalah Rekaman Kegiatan atau Peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Dalam pengelolaannya dilakukan pemeliharaan terhadap Arsip Vital, Arsip Inaktif dan Arsip Statis. Pemeliharaan bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip dari berbagai faktor perusak, sumber kerusakan arsip dapat berasal dari faktor Internal dan Eksternal. Faktor Perusak Internal dapat disebabkan oleh Penyusun Bahan Dasar Arsip itu sendiri, diantaranya penggunaan bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan bahan dasar arsip (misal: leugini dan alumrosin) dan penggunaan tinta yang bersifat asam. Faktor Perusak Eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan tempat arsip statis disimpan seperti suhu dan kelembaban yang tidak stabil, sinar ultraviolet dan polusi udara, hama perusak arsip statis seperti jamur/kapang, serangga dan binatang pengerat, serta faktor manusia seperti ketidak pedulian ketika menangani arsip dan pencurian. Pemeliharaan terhadap arsip dilakukan fumigasi dan pest control pada Depot Arsip. Selain dipelihara arsip-arsip yang ada di Depot Arsip diadakan penilaian dan pemusnahan arsip sesuai umur arsip itu sendiri. Penilaian dan Pemusnahan dilaksanakan setiap tahun, tahun 2017 sebanyak 250 box, tahun 2018 sebanyak 250 box dan tahun 2019 100 box.
3. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Penyelenggaraan Kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,6 (enam koma enam) dari nilai hasil Pengawasan Penyelenggaran Kearsipan tahun 2017 sebesar 71 (tujuh puluh satu) atau kategori cukup sehingga secara keseluruhan tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 77,6 (tujuh puluh tujuh koma enam) atau kategori baik. Nilai Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2019 belum ada hasil penilaian.

4. Perkembangan dunia saat ini banyak diwarnai oleh kemajuan teknologi, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua teknologi ini membuat dunia semakin transparan, mudah terakses dan seakan-akan tidak ada batas wilayah. Kondisi ini menuntut dinamika kehidupan yang produktif, inovatif dan konsumtif. Kondisi dimaksud dapat terwujud bila didukung oleh kehidupan masyarakat yang cerdas dan memiliki semangat belajar sepanjang hayat dengan minat baca dan kegemaran membaca (literasi masyarakat) yang tinggi. Disini peran keluarga, lembaga Sekolah, lembaga Perpustakaan dan/atau taman bacaan merupakan komponen utama dalam membangun budaya kegemaran membaca. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses. Untuk memenuhi kebutuhan para Pemustaka dilakukan penambahan bahan pustaka baik itu berupa pengadaan melalui anggaran APBD ataupun bahan pustaka hasil sumbangan dan hasil hunting kepada penerbit-penerbit yang ada di Daerah. Untuk mengetahui perkembangan secara riil dan berkelanjutan, posisi Provinsi Bali secara Khusus perlu didukung data terintegrasi, akurat dan valid. Pada tahun 2018 telah dilakukan kajian literasi masyarakat umum di Provinsi Bali oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali yang menghasilkan indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Bali sebesar 38,83%.

Jumlah Lembaga Perpustakaan

No.	*Lembaga Perpustakaan*	*Jumlah*	*Sudah Dibina*	*Belum Dibina*
1.	*Perpustakaan Umum*	*9*	*9*	*-*
2.	*Perpustakaan Perguruan Tinggi*	*71*	*-*	*71*
3.	*Perpustakaan SMA*	*338*	*126*	*212*
4.	*Perpustakaan SMP*	*420*	*36*	*384*
5.	*Perpustakaan SD*	*2447*	*36*	*2411*
6.	*Perpustakaan Desa*	*522*	*-*	*71*

Jumlah Koleksi dan Pengunjung

No.	Koleksi dan Pengunjung	*Jumlah*
1.	*Jumlah Koleksi*	*227.150*
2.	*Jumlah Judul Buku*	*10.276*
3.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	41.358

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah pegawai keseluruhan 89 orang
b. Kualifikasi menurut pendidikan:
   SMP = 2 orang, SMA = 31 orang, Sarjana Muda = 5 orang, S1 = 36 orang, S2 = 15 orang
c. Menurut Pangkat dan Golongan:
   Golongan IV = 18 orang, Golongan III = 54 orang, Golongan II = 19 orang, Golongan I = - orang

Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP.)	%	VOLUME	%	(RP.)	%
A	Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan								
1	Layanan Perpustakaan Keliling	36 Sekolah Kab/Kota	100	32,000,000	100	36 Sekolah Kab/Kota	100	32,000,000	100
2	Layanan Jasa Perpustakaan	30.000 Orang	100	91,000,000	100	41.358 Orang	100	89,461,400	98,31
3	Pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan	1000 Eks	100	25,200,000	100	1000 Eks	100	25,200,000	100
4	Layanan Kearsipan Keliling	9 Kab/Kota	100	37,500,000	100	9 Kab/Kota	100	37,334,399	99,56
B	Program Pengembangan Perpustakaan								
1	Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	500 Eks	100	42,350,000	100	500 Eks	100	41,118,800	97,09
2	Hunting dan Evaluasi Karya Cetak	50 Eks	100	31,900,000	100	50 Eks	100	30,204,400	94,68
3	Perbaikan dan Pelestarian Bahan Pustaka	2.000 Eks	100	45,200,000	100	2.000 Eks	100	44,528,600	98,51
4	Penyusunan Literatur Sekunder	2 Judul	100	26,900,000	100	2 Judul	100	22,488,900	83,60
C	Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Perpustakaan								
1	Pembinaan Perpustakaan	30 Perpustakaan	100	58,500,000	100	30 Perpustakaan	100	55,725,000	99,73
2	Lomba Perpustakaan	9 Perpust. Kab/Kota	100	56,300,000	100	9 Perpust. Kab/Kota	100	56,150,000	99,73
3	Lomba Minat Baca	27 Orang	100	68,800,000	100	27 Orang	100	68,605,000	99,72
4	Pengembangan Program Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	18 Perpustakaan	100	19,000,000	100	18 Perpustakaan	100	17,899,200	94,21
5	Bimtek Pengelola Perpustakaan	25 Orang	100	34,500,000	100	25 Orang	100	32,075,000	92,97

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP.)	%	VOLUME	%	(RP.)	%
A	Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan								
1	Pembinaan Kearsipan	19 PD dan Kab/Kota	100	41,500,000	100	19 PD dan Kab/Kota	100	38,572,500	92,95
2	Lomba Fungsional Arsiparis Tk. Provinsi	20 Orang	100	33,500,000	100	20 Orang	100	33,375,920	99,63

3	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan	13 PD, Kab/Kota	100	47,000,000	100	13 PD, Kab/Kota	100	45,832,400	97,52
4	Audit Internal Pengelolaan Kearsipan	13 PD	100	24,000,000	100	13 PD	100	23,052,400	96,05
5	Lomba Kearsipan OPD Tk. Provinsi	15 PD	100	33,000,000	100	15 PD	100	30,458,600	92,30
6	Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan LKD	25 PD dan Kab/Kota	100	24,000,000	100	25 PD dan Kab/Kota	100	23,676,200	98,65
B	Program Pengembangan dan Peningkatan Pengolahan Arsip								
1	Penelusuran Arsip Statis	15 Kali	100	57,169,800	100	15 Kali	100	54,918,800	96,06
2	Pengelolaan Arsip Dinamis	3 PD	100	39,026,500	100	3 PD	100	37,341,300	95,68
3	Preservasi Arsip	4 Kali	100	40,000,000	100	4 Kali	100	40,000,000	100
4	Penilaian dan Pemusnahan Arsip	100 Box	100	79,185,000	100	100 Box	100	78,643,200	99,32

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam perjalanannya Rencana pembangunan daerah dapat mengalami perubahan jika terdapat beberapa hal berikut :

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. terjadi perubahan yang mendasar; atau
3. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan perencanaan dapat setiap saat terjadi yang mengakibatkan gagalnya suatu perencanaan, hal ini biasanya disebabkan beberapa hal :

1. Kurangnya komitmen para pengambil kebijakan terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati dan inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan atau dengan kata lain terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana.
2. Informasi yang kurang lengkap, belum menguasai metodologi, perencanaan yang tidak realistis, pengaruh politis yang sangat besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis lebih diutamakan, aparat perencana yang tidak memiliki kompetensi, kurangnya dukungan masyarakat karena tidak bisa mengakses kesempatan.
3. Filosofi perencanaan yang tidak sesuai kondisi daerah (sosial, ekonomi, budaya, politik dsb). Misalnya suatu perencanaan yang hanya mengejar petumbuhan ekonomi sehingga justru menimbulkan kesenjangan sosial.
4. Akibat perencanaan terlalu jauh mengatur setiap sendi kehidupan masyarakatnya sehingga mematikan kreatifitas masyarakat (perencanaan terpusat).
5. Terjadinya tumpang tindih, inkonsistensi dan konflik perencanaan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Suatu perencanaan bisa dikatakan berhasil jika Sistem perencanaan yang dibangun dapat mendorong berkembanganya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik dibidang sosial maupun ekonomi dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan dunia usaha (swasta). Disamping hal tersebut berhasil/tidaknya suatu perencanaan juga akan terlihat dalam indikator-indikator makro sosial maupun ekonomi yang terus mengalami peningkatan/penurunan, meskipun indikator makro tidak secara riil menampilkan secara utuh keseluruhan data namun setidaknya dapat memberikan gambaran dalam memetakan potensi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk dapat menampilkan perencanaan yang utuh dan bersinergi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat maka idealnya perencanaan minimal mengandung beberapa prinsip berikut :

1. Prinsip partisipatif : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
2. Prinsip kesinambungan : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap tapi harus terus berlanjut sehingga menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat.
3. Prinsip holistic masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
4. Mengandung sistem yang dapat berkembang
5. Terbuka dan demokratis

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup, atau kurang)

Untuk sarana dan prasarana yang meliputi gedung dan peralatan kantor lainnya belum cukup memadai.

Permasalahan dan Solusi
Permasalahan

Urusan Kearsipan

1. Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan
3. Terbatasnya Dukungan dana/anggaran untuk Pembangunan dan Pengembangan Kearsipan
4. Kurangnya Pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang Arsip

Urusan Perpustakaan

1. Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Perpustakaan
2. Terbatasnya Jumlah Koleksi Perpustakaan
3. Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan E-Library

Solusi

Urusan Kearsipan

1. Menciptakan SDM Kearsipan dengan memberikan kesempatan kepada ASN melakukan inpassing ke Jabatan Fungsional Arsiparis
2. Memanfaatkan secara Optimal Sarana dan Prasarana yang ada.
3. Mengupayakan penambahan dana/anggaran yang dibutuhkan dalam Pengelolaan Arsip
4. Mengadakan Pembinaan dan Sosialisasi tentang pengelolaan Arsip secara rutin setiap tahun akan pentingnya Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja birokrasi

5. Mengupayakan agar pengelolaan Arsip dapat dicantumkan dalam tupoksi Sekretariat yang membawahi ketatausahaab di masing-masing perangkat daerah.

Urusan Perpustakaan

1. Memanfaatkan secara Optimal, sarana dan prasarana yang ada.
2. Mengupayakan peningkatan dukungan anggaran penyelenggaraan Perpustakaan dalam peningkatan jumlah Koleksi Perpustakaan
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat dalam pengembangan Perpustakaan untuk menuju E-Library

b. Ringkasan Urusan Pilihan

Prioritas urusan pilihan yang di laksanakan di Provinsi Bali selama ini antara lain:

1. Kelautan dan Perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
   3.1. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
   3.2. Peternakan.
4. Kehutanan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Industri dan Perdagangan.
7. Transmigrasi

1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan kedepan selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor kelautan dan perikanan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk jasa-jasa kelautan. Di sisi lain, pembangunan kelautan dan perikanan dituntut untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pesisir dan Laut	a. Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut b. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali c. Penyusunan dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali d. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali e. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap:	a. Pemberdayaan Kelompok Perikanan Tangkap b. Pengelolaan Sumber Daya Ikan c. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
3	Program Pengembangan Budidaya Ikan	Pengembangan Perikanan Budidaya
4	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5	Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan
6	Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	a. Penerapan Teknologi Perikanan b. Peningkatan Keberlanjutan Perikanan Budidaya
7	Program Peningkatan Pengujian dan Pemasaran Mutu Hasil Perikanan	a. Pengujian Mutu Hasil Perikanan b. Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan
8	Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	a. Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan b. Pengelolaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	a. Pengawasan, Monitoring, Sumberdaya dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan b. Identifikasi Potensi Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk pelaksanaan program tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 7.967.736.584,00 dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan realisasinya sebagai berikut :

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan anggaran Rp.2.489.625.488,00 dengan realisasi fisik 99.57 % dan keuangan Rp.2.300.918.519,87 (92,42%) yang terinci untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana Rp.1.500.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 1.500.000,00 (100%).

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana Rp.116.100.000,00 realisasi fisik 95,69% dan keuangan Rp. 105.309.544,00 (90.71%).
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana Rp.70.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 68.939.500,00 (98,49%).
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana Rp.24.350.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 24.280.000,00 (99,71%).
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp.14.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 13.550.000,00 (96,79%).
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dana Rp.28.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 27.980.000,00 (99,93%).
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana Rp.18.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 18.000.000,00 (100%).
h. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana Rp.52.500.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 52.400.000,00 (99,81%).
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan dana Rp.443.364.800,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 332.254.372,00 (74,94%).
j. Upacara keagamaan dengan dana Rp.75.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 75.000.000,00 (100%).
k. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan dana Rp.951.153.664,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 927.858.745,08 (97,55%).
l. Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas dengan dana Rp.595.957.024,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 572.993.278,79 (97,55%).
m. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor dengan dana Rp.29.700.000,00 realisasi fisik 80,81% dan keuangan Rp. 24.000.000,00 (80,81%).
n. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan dana Rp.70.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 56.853.080,00 (81,22%).

2) Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut
   a. Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
      - Realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebanyak 2 Kawasan. Secara keseluruhan kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dengan alokasi dana anggaran induk Rp. 489.200.000,- dan anggaran setelah rasionalisasi sebesar Rp. 62.350.000,- telah terlaksana dengan realisasi fisik sebesar 100 %, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.877.158,- atau 92.83% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.472.842,- atau 92.83 %.
      - Permasalahan yang dihadapi adalah Pada beberapa kawasan (Badung, Kota Denpasar dan Jembrana) masih perlu dilaksanakan identifikasi potensi untuk pengembangan

kawasan konservasi perairan melalui penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP pada tahun anggaran mendatang. Proses penetapan dan langkah-langkah dalam upaya menuju penetapan KKP yang efektif dan efisien memerlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/prasarana yang memadai.

- Upaya Tindak Lanjut yang dilakukan adalah Kegiatan rehabilitasi terumbu karang secara berkesinambungan melalui program / kegiatan konservasi dan rehabilitasi terumbu karang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan terus dilaksanakan. Pengelolaan terumbu karang hendaknya tetap memperhatikan kaedah lingkungan lestari, pelaku pariwisata dive hendaknya mempunyai SOP yang menjadi patokan didalam memandu pariwisata dive di seluruh Bali. RPP (Rencana Proyek Perubahan) dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menjadi pedoman. Kawasan konservasi yang sudah di tetapkan agar terus diawasi pengelolaanya agar benar-benar sesuai dengan peruntukannya, dari pemantauan lapangan masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan pengumuman, papan informasi yang sudah dipasang pada daerah daerah yang menjadi kunjungan wisata. Masyarakat pengawas mempunyai tugas pemantauan dan pembinaan sesuai dengan pengelolaan yang kolaboratif. Desa adat mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mengelola sumberdaya kelautannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi ekosistem pesisir hendaknya dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, BPSPL Denpasar, LSM Peduli Lingkungan, Tokoh Adat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

b. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil WP3K Provinsi Bali
   - Realisasi Kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil
   - Terlaksananya kegiatan peninjauan lokasi, pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut.
   - Anggaran Kegiatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil WP3K Provinsi Bali sebesar Rp 49.660.000, telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi keuangan mencapai Rp 37.110.080,00 atau mencapai 74.73 %, sedangkan kegiatan fisik telah mencapai 100,00 %
c. Penyusunan dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil WP3K Provinsi Bali
   - Hasil kegiatan penyelarasan penyusunan dokumen RZWP-3-K Provinsi Bali tahun 2019 meliputi: dokumen awal, dokumen antara, dokumen final, Ranperda RZWP-3-K dan album peta RZWP-3-K

- Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) sebesar Rp 534.281.000 (Lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi keuangan mencapai Rp 420.033.390 atau mencapai 78,62%, sedangkan kegiatan fisik telah mencapai 85,69%.
- Permasalahan
  - Terdapat usulan rencana alokasi ruang yang diajukan oleh stakeholder setelah tahapan penyusunan alokasi ruang telah selesai dilaksanakan, disetujui dan/atau disepakati dalam konsultasi publik.
  - Usulan alokasi ruang yang diajukan oleh para stakeholder tidak dilengkapi dengan kajian teknis dan/atau dukungan dari instansi atau sektor yang membidangi.
  - Terdapat alokasi ruang dalam RZWP-3-K belum sejalan alokasi ruang yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.
  - Peserta FGD dari instansi terkait yang diundang sering kali diwakilkan kepada petugas yang tidak berkompeten dibidang penataan ruang sehingga tidak berani mengambil keputusan ketika memverifikasi data atau peta.
  - Kegiatan yang diagendakan tertunda pelaksanaannya karena pejabat yang harus memimpin rapat ditugaskan oleh pimpinan mengikuti acara lain sehingga berpengaruh terhadap tahapan penyusunan RZWP-3-K yakni konsultasi publik dokumen antara serta pemberian tanggapan dan/atau saran dokumen final RZWP-3-K.
  - Seksi Tata Ruang dan Pemberdayaan Masyarakat belum memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang memadai dibidang pemetaan atau penataan ruang laut.
  - Pembahasan RZWP-3-K di DPRD Provinsi Bali dan Evaluasi Ranperda RZWP-3-K Provinsi di Kementerian Dalam Negeri belum terlaksana karena dokumen final masih belum mendapat persetujuan substantif dari KKP.
- Upaya Tindak Lanjut
  - Usulan alokasi ruang yang belum diakomodir karena tahapan penyusunan rencana alokasi ruang sudah selesai agar diajukan dalam pembahasan RZWP-3-K di DPRD Provinsi Bali.
  - Stakeholder yang mengajukan rencana usulan alokasi ruang harus dilengkapi dengan data dukung yang dibutuhkan.
  - Kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga sudah diselaraskan dengan alokasi ruang dalam RZWP-3-K Provinsi Bali.
  - Peserta yang diberi tugas untuk mewakili dalam pembahasan RZWP-3-K agar diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dalam meverifikasi data dan/atau menandatangani berita acara FGD.

- Peningkatan SDM bidang pemetaan (GIS).
- Pembahasan RZWP-3-K di DPRD Provinsi Bali dan Evaluasi Ranperda RZWP-3-K Provinsi Bali di Kementerian Dalam Negeri yang belum tercapai sehingga proses penetapan RZWP-3-K harus direncanakan kembali pada pada tahun 2020

d. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali (DAK)

- Terlaksananya kegiatan pengadaan papan informasi KKP Nusa Penida
- Pengadaan sarana prasarana kantor KKP Nusa Penida
- Realisasi anggaran dari pagu anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 1.580.786.000,- dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, realisasi anggaran tercapai hanya Rp. 227.650.000,- atau 14,40 %. Kegiatan yang terealisasi adalah belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 39.000.000,- dari total anggaran Rp. 40.000.000,- dan pengadaan papan informasi KKP Nusa Penida Rp. 188.650.000,- dari total anggaran Rp. 189.000.000,-. Anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.353.136.000,- atau 85,60%.
- Permasalahan:

  Alokasi dana DAK untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2019 sebesar Rp. 1.580.786.000,- Besarnya nilai kegiatan yang tertera dalam DPA tidak sama dengan RKA aplikasi krisna.

e. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil

- Bimbingan Teknis Teknologi Produksi Garam

  Tahun 2019, telah dilaksanakan Bimtek Teknologi Produksi Garam di Ruang Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, pada tanggal 28 Juni 2019. Jumlah peserta bimtek sebanyak 30 orang yang terdiri petani garam dan petugas penyuluh perikanan serta staf dinas perikanan Kabupaten/kota.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin

  Lingkup Pekerjaan pekerjaan Belanja Hibah Barang Peralatan dan Mesin Bantuan Peralatan Pengembangan Teknologi Produksi Garam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, meliputi pengadaan Mesin Pompa Air Portable sebanyak 4 unit, Plastik Geomembran (geoisolator) sebanyak 1400 m2, Selang spiral Input/Isap sebanyak 450 m dan Selang Output/Lempar sebanyak 300 m dan Gerobak Dorong sebanyak 20 buah serta mengirimkan peralatan tersebut ke lokasi di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dan Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
- Penyerahan Bantuan Hibah Barang Peralatan dan Mesin

  Tahun 2019, jumlah kelompok usaha garam yang dibina dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut sebanyak 6 (enam) kelompok usaha garam (Kugar).

  Kelompok Kugar yang menerima bantuan hibah barang adalah :

Kelompok Usaha Garam Rakyat Kabupaten Buleleng :

- Kugar Tasik Segara I, Alamat Desa Les, Kecamatan Tejakula.
- Kugar Tasik Segara II, Alamat Desa Les, Kecamatan Tejakula.
- Kelompok Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Karangasem
- Kugar Pandan Sari, Alamat Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- Kugar Mina Karya I, Alamat Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu.
- Kugar Segara Nadi Pekurenan II, Alamat Br. Dinas Pekurenan Desa Tianyar Kecamatan Kubu.
- Kugar Candi Gora II, Alamat Br. Dinas Tunas Sari Desa Tianyar Kecamatan Kubu.

- Penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

  Lingkup Pekerjaan Penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Provinsi Bali adalah memfasilitasi dan membantu seluruh tahapan kegiatan proses penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Provinsi Bali, melakukan pengumpulan data, pembahasan melalui konsultasi publik/diskusi terfokus (FGD). Hasil dari Penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir meliputi : 1) laporan pendahuluan; 2) laporan antara/pertengahan; 3) laporan akhir; 4) backup laporan soft copy.
- Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp 224.872.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi keuangan mencapai Rp 207.789.800,00 atau mencapai 92,40 %, sedangkan kegiatan fisik telah mencapai 100,00 %.
- Permasalahan
  - Masih banyak jumlah kelompok garam rakyat yang belum memiliki sarana dan prasarana produksi garam yang memadai untuk mendukung kuantitas dan kualitas produksi garam.
  - Usaha garam rakyat masih terkendala dengan lemahnya pemasaran hasil produksi dan masih rendahnya harga ditingkat petani garam.
  - Dalam pemasaran produk garam yang dihasilkan dari kelompok usaha rakyat belum dilakukan pengemasam secara baik.
- Upaya Tindak Lanjut
  - Melakukan inventarisasi data kelompok usaha garam rakyat yang perlu fasilitasi dukungan sarana dan prasarana produksi garam.
  - Melakukan pembinaan kontinuitas produksi dan kualitas produksi, serta melakukan upaya kerjasama dengan pelaku pengolah garam.
  - Merencanakan kegiatan pelatihan pengemasan produk garam rakyat.

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

   a. Pemberdayaan Kelompok Perikanan Tangkap

- Terlaksananya kegiatan dalam rangka identifikasi dan diversifikasi usaha perikanan tangkap dan pembinaan penyiapan izin usaha perikanan tangkap di 8 kabupaten/kota
- Kendala yang dihadapi nelayan dalam mengembangkan diversifikasi usahanya adalah :
  - Kurangnya permodalan
  - Peralatan penyimpanan, pengolahan dan pengemasan ikan belum memadai.
  - Kurangnya promosi produk olahan yang dihasilkan oleh nelayan
  - Terbatasnya pemasaran hasil diversifikasi usaha yang dilakukan nelayan
- Upaya Tindak Lanjut.
  - Memfasilitasi permodalan/kridit bekerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan usahanya menjadi lebih maju
  - Memberikan peralatan yang diperlukan untuk penyimpanan bahan baku, pengolahan dan pengemasan ikan
  - Mengikutsertakan dalam kegiatan pameran untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan jaringan kemitraan
  - Memberikan pelatihan pengolahan ikan yang lebih inovatif dan bervariasi

b. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Terlaksananya kegiatan rapat evaluasi pengelolaan SDI
- Terlaksananya kegiatan monitoring pengelolaan sumberdaya ikan ke 8 kabupaten/kota
- Dari anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan dengan jumlah dana Rp. 58.254.000 dengan realisasi keuangan Rp. 46.814.600,- (80,28 %) dan fisik 97%.

c. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap terhadap 5 (lima) Pelabuhan Perikanan yang tersebar di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, Jembrana, Badung , Klungkung dan Karangasem di Provinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 06/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan. dengan hasil hanya 2 (dua) Pelabuhan Perikanan layak ditetapkan kelasnya sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan dan 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan identifikasi sarana prasarana pelabuhan perikanan di lima kab/kota
- Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan untuk APBD tahun 2019 sebesar Rp 22.698.000.- (Dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)sampai dengan bulan Desember 2019 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 22.498.000.- (Dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau telah mencapai 99,12%.

- Permasalahan yang dihadapi adalah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 16 Oktober 2015 mengacu pada hal tersebut sampai saat ini kita sudah bisa proses Pengalihan P3D dari Kabupaten ke Provinsi yaitu PPI Sangsit, Desa Santgsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan PPI Kedongan belum bisa pengalihan P3D disebabkan karena masih menunggu kesepakatan tentang aset yang ada di PPI Kedonganan.

4) Program Pengembangan Budidaya Ikan

a. Pengembangan Perikanan Budidaya

- Terlaksananya kegiatan identifikasi kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan pengembangan budidaya ikan
- Terlaksananya kegiatan pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CPIB)
- Terlaksananya kegiatan monitoring perijinan pembudidaya ikan di 8 kabupaten/kota
- kegiatan pemetaan potensi perikanan air tawar, air payau, air laut karena kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri tanpa membebani anggaran yang dialokasikan sehingga realisasinya sebesar 0 % Namun secara fisik kegiatan pemetaan potensi perikanan budidaya air tawar, air payau, air laut telah dilaksanakan, sehingga realisasi telah tercapai sebesar 100 %.
- pagu awal sebesar Rp. 211.624.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), dan mengalami rasionalisasi sebasar Rp. 148.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 63.624.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Adapun dana yang bisa di manfaatkan sebesar Rp. 63.624.000,-,- telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi fisik 100 % dan keuangan mencapai Rp. 44,29 %
- Permasalahan:
  - Kegiatan pengembangan perikanan budidaya seperti yang tertuang dalam RKA APBD 2019 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena terkait dengan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Kurangnya pemahaman dan informasi terkait prosedur pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga menyebabkan beberapa kegiatan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- Upaya Tindak Lanjut:
  - Untuk mengantisipasi segala permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan perikanan budidaya perlu adanya data dukung yang memadai terutama menyangkut peraturan dan perundang-undangan.

- Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif terhadap para pemangku kepentingan terkait peraturan perundang-undangan dan prosedur pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan yang telah disusun sebagaimana tertuang dalam DPA Satker Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Bali

5) Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan

a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Terlaksananya kegiatan lomba masak serba ikan tingkat provinsi
- Terlaksananya lomba masak serba ikan tingkat nasional
- Terlaksanya kegiatan Gemarikan dalam rangka merayakan hari ikan
- Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi harga ikan melalui media cetak
- Terlaksananya kegiatan pembinaan SKP ke unit pengolahan ikan (UPI)
- Jumlah produk perikanan bersertifikat sebanyak 267 SKP dari target sebanyak 142 SKP
- Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang dibina sebanyak 20 UPI
- Terlaksananya kegiatan pembinaan pasar dan montoring harga ikan
- Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan rincian yaitu realisasi keuangan sebesar Rp. 252.723.870,00 (84,24 %) dan realisasi fisik 100,00 % dengan sisa anggaran yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. : 47.276.130,00 (15,76 %).
- Permasalahan

  Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jumlah produk perikanan yang telah bersertifikat dari target 142 SKP terealisasi sebanyak 267 SKP. Sementara untuk jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang dibina yang ditargetkan sebanyak 20 UPI semuanya terlaksana baik yang sekala kecil, menengah dan besar.
- Upaya Tindak Lanjut

  Melakukan pembinaan secara bersama-sama dengan bidang lain. Melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan.

6) Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan

a. Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan

- Terlaksananya kegiatan pengawasan perikanan budidaya
- Terlaksananya kegiatan pengawasan pengolahan hasil perikanan
- Terlaksananya kegiatan pengawasan perikanan tangkap
- Jumlah pengawas yang aktif sebanyak 38 kelompok
- Alokasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 55.524.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), kemudian diadakan rasionalisasi atas anggaran tersebut menjadi Rp. 39..000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi keuangan mencapai Rp.

39.000.000,00 atau telah mencapai 100 %, dan realisasi kegiatan fisik juga telah mencapai 100 %

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari:

1) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

   Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana Rp.450.000,00 realisasi fisik 100 % dan keuangan Rp.450.000,00 (100%).
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana Rp.98.470.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.79.288.681,00 (80,52%).
   c) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana Rp. 3.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.3.000.000,00 (100%).
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana Rp.7.000.000,00 realisasi fisik 77,86% dan keuangan Rp. 5.410.000,00 (77,29%).
   e) Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp.1.260.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.1.260.000,00 (100%).
   f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dana Rp.3.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.2.970.000,00 (99,00%)
   g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana Rp.1.800.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.1.800.000,00 (100%)
   h) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana Rp.5.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 4.655.000,00 (93,10%)
   i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan dana Rp.10.440.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.10.400.000,00 (99,62%)
   j) Upacara keagamaan dengan dana Rp.17.296.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.17.296.000 (100%)
   k) Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan, Penataan, dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana Rp.307.712.808,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.289.453.344,77 (94.07%)
   l) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas dengan dana Rp.120.515.376,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.115.952.295,30 (96,21%)
   m) Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung dengan dana Rp.11.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.9.467.000,00 (86,06%)
   n) Penerapan Teknologi Perikanan
      - Tersedianya benur udang vaname untuk budidaya udang di tambak
      - Tersedianya benur udang vaname untuk pembesaran udang vaname di kolam terpal
      - Tersedianya bahan kimia untuk budidaya udang vaname
      - Tersedianya bahan alat kerja untuk budidaya udang vaname

- Terlaksananya uji coba pembesaran udang vaname di kolam terpal bulat
- Terlaksananya percontohan pembesaran udang vaname di tambak
- kegiatan di Seksi Penerapan Teknologi pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut secara keseluruhan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Realisasi fisik 100 % Realisasi Keuangan Rp. 207.235.600 (90,99 %)
- Permasalahannya :

  Pada dasarnya semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun dalam pelaksanaan kegiatan Penerapan Teknologi Perikanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut, terdapat masalah terkait kreatifitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan uji coba perikanan budidaya serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan uji coba penerapan teknologi perikanan budidaya seperti misalnya : daya listrik di Dempond Tambak Kombading masih kurang dan hanya cukup untuk menggerakkan kincir 7 buah serta belum ada pompa untuk menyedot air tawar.
- Upaya Tindak Lanjut

  Diharapkan ada peningkatan kreatifitas dan inovasi SDM, penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan uji coba peikanan budidaya seperti misalnya penambahan daya listrik dan tersedianya air tawar di Tambak Kombading serta adanya bantuan dari Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang perikanan budidaya air payau/laut sehingga dapat melaksanakan uji coba atau kaji terap perikanan budidaya untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat petani pembudidaya ikan.

o) Peningkatan Keberlanjutan Perikanan Budidaya
- Tersedianya bahan kimia/ alat kerja dan pakan untuk operasional UPTD
- Terlaksananya kegiatan survailance/pengawasan ke pokdakan kabupaten/kota se-Bali
- pagu awal sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi keuangan mencapai Rp. 271.818.800,00 (Dua ratus tujuh puluh satu delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) atau 97 %, fisik 100 %

2) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Program Peningkatan Pengujian dan Pemasaran Mutu Hasil Perikanan

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana Rp.180.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.180.000,00 (100%).
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana Rp.120.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.85.552.923,00 (71,29%).
c) Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan, Penataan, dan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan dana Rp.90.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.89.900.000,00 (99,89%).

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana Rp.4.600.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.4.260.500,00 (92,62%).
e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana Rp.4.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.3.996.200,00 (99,91%).
f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dana Rp.5.500.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.5.247.200,00 (95,40%).
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana Rp.2.160.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.2.160.000,00 (100%).
h) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana Rp.4.920.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.4.630.000,00 (94.11%).
i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan dana Rp.36.124.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.34.460.405,00 (95,39%).
j) Upacara keagamaan dengan dana Rp.21.240.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.20.94.000,00 (98,59%).
k) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan dana Rp.262.076.832,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.261.976.782,16 (99,96%).
l) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas dengan dana Rp.122.429.976,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.116.563.45,30 (95,21%).
m) Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung dengan dana Rp.43.372.104,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.43.330.097,63 (99,90%).
n) Pengujian Mutu Hasil Perikanan
   - Tersedianya bahan kimia dan media reagensia untuk operasional pengujian
   - Terlaksanya kegiatan jasa kalibrasi alat laboratorium
   - Terlaksananya Asesman KAN (Komisi Akreditasi Nasional)
   - Terlaksananya kegiatan profisiensi test/ uji banding
   - Terlaksananya kegiatan monitoring mutu hasil perikanan
   - Terlaksananya kegiatan bimtek SNI/ISO/IEC/17025:2017
   - Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat Laboratorium (Spare Part)
   - Jumlah dana kegiatan pengujian mutu hasil perikanan sebesar Rp. 315.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 305.669.910,- atau 97,04 % dan Realisasi Fisik 100 %
   - Permasalahan:
     - Terdapat alat laboratorium (AAS) yang mengalami kerusakan
     - Limbah Pengujian logam berat (Pb, Cd, dan Hg) yang telah ditampung bertahun - tahun belum bisa didistribusikan ke tempat pengolahan limbah sehingga jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.
   - Upaya Tindak Lanjut:

- Mengajukan tambahan anggaran pada RKA 2020 untuk perbaikan alat sebesar Rp. 126.553.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Tiga Ribu Rupiah)
- Untuk belanja jasa pengolahan limbah pada RKA 2020 yaitu sebesar 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

o) Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan

- Terlaksananya kegiatan survailance/penilaian sertifikasi pengunaan tanda SNI (SPPT SNI)
- Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
- Pagu anggaran sebesar Rp. 105.000.000,00 telah dapat dilaksanakan dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 101.784.640,00 atau telah mencapai 96,94 %, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100 %, sisa anggaran sebesar Rp. 3.215.360,00 dikembalikan ke kas daerah

3) UPTD Pelabuhan Perikanan

Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan

a) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas dengan dana Rp.17.600.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.17.582.250,00 (99,90%).

b) Belanja Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan dana Rp.44.200.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.769.388,00 (1,74%).

c) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan dana Rp.6.600.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.4.150000,00 (62.88%).

d) Upacara keagamaan dengan dana Rp.18.400.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.7.835.000,00 (42,58%).

e) Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan di dua kabupaten
- Terlaksannaya kegiatan pembinaan dan identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di dua kabupaten
- Pagu anggaran sebesar Rp. 20.088.000,00 (Dua puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), total realisasi keuangan mencapai Rp. 15.182.100,00 atau realisasi keuangan 75,58 %, dan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan

  Kurangnya SDM yang ada di UPTD Pelabuhan Perikanan, dan belum maksimalnya produksi tangkapan bagi nelayan yang mendarat di PPI Sangsit sehingga perlu inovasi maupun sarana prasarana penunjang agar nelayan mau mendaratkan hasil tanggkapan di kawasan PPI.
- Upaya Tindak Lanjut

Sebagai upaya tindak lanjut sehubungan dengan adanya permasalahan pada kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan tahun anggaran 2019 menentukan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai tingkat kepentingan atau urgensinya serta sosialisasi Rancangan perda restribusi.

f) Pengelolaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan di dua kabupaten
- Terlaksananya kegiatan pembinaan dan identifikasi sarana dan prasarana pengelolaan pelabuhan perikanan di dua kabupaten
- Pagu anggaran sebesar Rp. 20.088.000,00 (Dua puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), total realisasi keuangan mencapai Rp. 15.123.100,00 atau realisasi keuangan 75,28 %, dan realisasi fisik 100 %
- Permasalahan
  - Kegiatan Belanja Alat tulis Kantor dari anggaran Rp. 1.338.000,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) realisasi Rp. 1.373.100 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) terdapat sisa Rp. 14.900,- (empat belas ribu sembilan ratus rupiah) karena efisiensi. Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.700.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) realisas Rp. 13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah terdapat sisa anggaran Rp. 4.950.000 (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena efisiensi.
  - Kurangnya SDM yang ada di UPTD Pelabuhan Perikanan, dan belum maksimalnya produksi tangkapan bagi nelayan yang mendarat di PPI Sangsit sehingga perlu inovasi maupun sarana prasarana penunjang agar nelayan mau mendaratkan hasil tanggkapan di kawasan PPI.
- Upaya Tindak Lanjut

  Sebagai upaya tindak lanjut sehubungan dengan adanya permasalahan pada kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan tahun anggaran 2019 menentukan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai tingkat kepentingan atau urgensinya serta sosialisasi Rancangan perda restribusi

4) UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

a) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan dana Rp.2.418.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.2.418.000,00 (100%).

b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan dana Rp.2.095.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.2.065.000,00 (98,57%).
c) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana Rp.350.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.350.000,00 (100%).
d) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana Rp.6.000.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.1.508.250,00 (25,14%).
e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana Rp.1.800.000,00 realisasi fisik 91,67% dan keuangan Rp.1.320.000,00 (73,33%).
f) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan dana Rp.7.875.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.1.575.000,00 (20%).
g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan dana Rp.20.362.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.3.950.000,00 (19.40%).
h) Upacara keagamaan dengan dana Rp.7.650.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 7.650.000,00 (100%).
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dana Rp.600.000,00 realisasi fisik 100% dan keuangan Rp.0,00 (0,00%).
j) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas dengan dana Rp.13.000.000,00 realisasi fisik 41,29% dan keuangan Rp.5.466.750,00 (41,10%).
k) Pengawasan, Monitoring, Sumberdaya dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan
   - Terlaksananya monitoring dan evaluasi KKP Nusa Penida
   - Terlaksananya kegiatan patroli laut bersama tim Polres Klungkug, Pos TNI AL Nusa Penida, Yayasan CTC dan dari UPTD KKP Bali.
   - Pagu anggaran sebesar Rp 22.550.000,- secara dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 18.550.000,- (82,26%)
   - Permasalahan:

     Peningkatan eksistensi KKP Nusa Penida pasca pemindahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung ke Pemerintah Provinsi, Pemahaman teknis pengawasan dan monitoring, belum adanya penataan batas kawasan, tidak adanya tanda pengenal tim patroli, belum optimalnya pendataan dan pemantauan seluruh kegiatan Rehabilitas karang di Wilayah Perairan, masih adanya isu perusakan dan pencemaran KKP Nusa Penida, belum terbitnya RZWP-3-K.
   - Upaya Tindak Lanjut:

     Mengadakan sosialisasi, melakukan patroli, mengusulkan anggaran, pembuatan bendera patroli, mengusulkan anggaran, pembuatan bendera patroli, semua pihak melakukan kegiatan Rehabilitasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, mendorong percepatan pembahasan Perda RZWP-3-K.

l) Identifikasi Potensi Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan

- Terlaksananya kegiatan koordinasi ke lapangan
- Pagu anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 14.050.000,- (93,67%)

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mendapat alokasi belanja langsung dari APBD Provinsi Bali sebanyak **Rp. 7.967.736.584,00** dengan realisasi fisik **81,56%** dan keuangan **Rp. 5.937.002.980,03 (74,51 %).**

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan

SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah pegawai : 102 orang

b. Kualifiksi pendidikan :

1). Pasca Sarjana (S2)	:	16 orang
2). Sarjana (S1)	:	43 orang
3). DIII	:	1 orang
4). SMA	:	36 orang
5). SMP	:	2 orang
6). SD	:	4 orang

c. Pangkat dan Golongan :

1). IV/c	:	1 orang
2). IV/b	:	3 orang
3). IV/a	:	14 orang
4). III/d	:	24 orang
5). III/c	:	12 orang
6). III/b	:	18 orang
7). III/a	:	5 orang
8). II/d	:	11 orang
9). II/c	:	8 orang
10). II/b	:	1 orang
10). II/a	:	2 orang
11). I/d	:	2 orang
12). I/c	:	1 orang

d. Jumlah Pejabat : 31 orang

1) Jumlah Pejabat Struktural : 24 orang

2) Jumlah Pejabat Fungsional : 7 orang

Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural terlampir.

Alokasi dan Realisasi Anggaran

No	Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	APBD	7.967.736.584,00	5.937.002.980,03 (74,51%)	

Proses Perencanaan Pembangunan

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan.

Penyusunan RKPD ini dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang mengacu pada proses botton up dan top down serta partisipatif secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Tingkat Provinsi.

Musrenbang Tingkat Provinsi diawali dengan penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD) yang merupakan forum koordinasi antar Pelaku Pembangunan untuk menjaring aspirasi program/kegiatan Pembangunan pada Tingkat Provinsi berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan usulan program OPD/lintas OPD Provinsi yang dituangkan dalam bentuk Renja OPD, Renja OPD disusun berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program tahun lalu, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Renstra OPD.

Forum Musrenbang ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan dan mensikronisasikan Renja OPD ke dalam berbagai program/kegiatan Prioritas secara terpadu yang bertujuan untuk:

1. Mensikronkan prioritas program/kegiatan pembangunan yang diprogramkan oleh Kabupaten/Kota dan Rencana Kerja OPD Provinsi.
2. Menetapkan prioritas program/kegiatan dalam Renja-OPD Provinsi berdasarkan hasil sinkronisasi.
3. Menyusun indikasi plafon anggaran berdasarkan rancangan Renja OPD.
4. Menilai efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD.
5. Menjaring aspirasi masyarakat dan berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja.

   Dari forum Musrenbang ini akan dihasilkan : Program prioritas serta rancangan pembiayaan pembangunan yang selanjunya dituangkan ke dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas

serta plafon anggaran yang selanjutnya dibahas dan disetujui oleh DPRD, Dokumen ini sebagai acuan untuk penyusunan APBD.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana prasarana yang digunakan mencukupi (daftar terlampir)

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali senilai Rp. 1.580.786.000 baru terealisasi sebesar Rp. 227.650.000. diakibatkan karena rincian kegiatan di DPA tidak sesuai dengan Juknis DAK sehingga kegiatan tidak memenuhi target 100 % dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali senilai Rp. 534.281.000 baru terealisasi sebesar Rp. 420.033.390 kegiatan jasa kehumasan tidak direalisasikan karena RZ-WP3K sudah melalui konsultasi publik dan tidak terlaksananya uji klinis dan evaluasi Ranperda RZ-WP3K sehingga kegiatan tidak memenuhi target 100 %.
2) Program/Kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai 100% merupakan hasil dari efisiensi anggaran.

Sedangkan permasalahan umum dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1) Pokmaswas belum mampu melaksanakan perannya secara optimal, karena keterbatasan dana operasional dan sarana pengawasan berupa kapal/speed/perahu pengawas, alat komunikasi (HT), teropong dan lain-lain.
2) Terbatasnya prasarana dan sarana kelautan dan perikanan

Solusi dari permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Tahap uji klinis dan evaluasi Ranperda RZ-WP3K dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020.
2) Untuk memenuhi kebutuhan sarana pengawas untuk pokmaswas Pemerintah Provinsi diharapkan memberikan dukungan sarana pengawasan (Boat) dengan pengadaan kapal pengawas bagi Pokmaswas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
3) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana perikanan, baik di bidang perikanan tangkap (Pelabuhan Perikanan/PP dan Tempat Pelelangan Ikan/TPI), bidang budidaya serta

meningkatkan sarana Balai Benih Udang Galah (BBUG).maupun sarana Laboratorium Pengujian.

2. Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan urusan yang cukup strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi Bali. Sebagai Provinsi yang mempunyai panorama alam yang indah, wisata alam dapat menjadi daya tarik dan menciptakan efek ganda pada sektor-sektor yang lain. Dalam rangka meningkatkan kinerja urusan kepariwisataan telah dilaksanakan program dan kegiatan. Adapun program tersebut seperti Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Kelembagaan Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Industri Pariwisata. Semua program tersebut di dukung oleh beberapa kegiatan yang sudah mengacu ke VISI dan MISI Gubernur Bali. Akan tetapi Sektor pariwisata sebagai andalan utama ekonomi Bali sangat rentan dipengaruhi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan, yang sifatnya baik lokal, regional, maupun global. Adanya berbagai peristiwa dan konflik pada beberapa daerah di Bali sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan Bali. Perkembangan Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal maupun Pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara ke Daerah Bali sangat berfluktuasi sebagai akibat berbagai insiden, baik lokal, regional, maupun global. Pengembangan pariwisata ke depan perlu tetap mempertahankan kearifan lokal, serta keharmonisan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung VISI **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI yaitu pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru.**

Pogram dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	a. Kegiatan Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Budaya b. Kegiatan Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Alam c. Kegiatan Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Buatan
2	Program Kelembagaan Pariwisata	a. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan b. Kegiatan Peningkatan Peran Kelembagaan Kepariwisataan c. Kegiatan Peningkatan SDM Kepariwisataan
3	Program Pemasaran Pariwisata	a. Kegiatan Analisa pasar dan Indek Kepuasaan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara b. Kegiatan Penyusunan Data MICE dan Statistik Kepariwisataan c. Kegiatan Forum Kerjasama Inter-Islands Tourism Policy

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		(ITOP Forum) d. Kegiatan Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata e. Kegiatan Pelaksanaan Promosi MICE dan Pariwisata Bali di dalam dan luar negeri f. Kegiatan Pelaksanaan Event Pariwisata Bali
4	Program Pengembangan Pariwisata	a. Kegiatan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata b. Kegiatan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata c. Kegiatan Penyusunan Data Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Pegawai

NO	KETERANGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	5
3	Pejabat Eselon IV	15
4	Staf	50
5	Fungsional	1
6	CPNS	-
7	Tenaga Honorer	-
8	Tenaga Harian	-
9	Tenaga Kontrak	36
JUMLAH		**108**

Jumlah pegawai yang melakukan Tupoksi di Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebanyak:

1. Jumlah pegawai keseluruhan 72 orang
2. Kualifikasi menurut pendidikan: SD : 1 orang, SMP : 1 orang, SLTA/Kejuruan 25 orang, D2 : 0 orang, D3 : 3 orang, D/4S1 : 26 orang, S2 : 16 orang
3. Menurut pangkat dan golongan: golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak 40 orang dan golongan IV sebanyak 12 orang.

Pola pembinaan karir pegawai telah terlaksana melalui prosedur yang berlaku seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan, disiplin pegawai, kesejahteraan, dan sebagainya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Kenaikan gaji berkala	7 orang
2	DP3	- orang
3	Kartu Pegawai	- orang
4	KARIS/KARSU PNS	1 orang
5	Satya Lencana Karya Satya 10 tahun	- orang
6	Satya Lencana Karya Satya 20 tahun	- orang
7	Satya Lencana Karya Satya 30 tahun	- orang
8	Kenaikan pangkat	7 orang

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
9	Taspen	- orang
10	Hukuman disiplin	- orang

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya 1 kali award dan 24 daya tarik wisata budaya. Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 88,89 %.
2. Terlaksananya 1 Dokumen Rancangan Desa Wisata dan 30 daya tarik wisata alam. Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 88,63 %
3. Terlaksananya pembinaan terhadap 30 daya tarik wisata buatan di 9 Kab/Kota se-Bali. Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 100%.
4. Meningkatnya pemahaman 630 masyarakat seperti kelompok sadar wisata dan siswa SMA/SMK di Bali terhadap kepariwisataan Bali. Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 97,42%.
5. Terselenggaranya uji pengetahuan budaya Bali terhadap 120 pemandu wisata dan 1 dokumen Ranperda/Ranpergub standar pelayanan kepariwisataan . Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 88,49 %.
6. Terpilihnya 18 Duta Wisata Bali melalui even Jegeg Bagus. Realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 93,77%
7. Terlaksananya analisis pasar wisatawan nusantara dan karakteristik wisatawan nusantara di 3 lokasi (Padang Bai, Ketapang, dan Bandara Ngurah Rai). Realisasi fisik 100% dan Realisasi keuangan 98,30 %
8. Tersusunnya buku data MICE dan statistik pariwisata Bali (200 buku). Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,31 %.
9. Tersedianya 1 dokumen keikutsertaan dalam Inter-Islands Tourism Policy (ITOP) Forum dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 45,93 %.
10. Terwujudnya 1 dokumen kesepakatan bersama antar anggota Inter Island Tourism Policy (ITOP) Forum. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 49,39%
11. Tersedianya jumlah bahan promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara seperti Bali at Glance dalam Bahasa Inggris (750 buah), Map of Bali dalam Bahasa Inggris (750 buah), Leaflet dalam Bahasa Inggris (500 buah), Sekilas Bali (450 buah), Tas (300 buah). realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,80 %.

12. Terlaksananya event MICE dan promosi pariwisata Bali di dalam dan luar negeri (2 event dalam negeri dan 5 event luar negeri) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Realisasi fisik 100% dan keuangan 39,95 %
13. Terlaksananya jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara (1 event Mekepung Gubernur Cup). Realisasi fisik 100% dan keuangan 92,45 %
14. Terlaksananya pengawasan usaha jasa pariwisata yang memiliki ijin dan tersertifikasi dalam rangka meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (125 usaha jasa pariwisata). Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 100 %
15. Terlaksananya pengawasan usaha sarana pariwisata yang memiliki ijin dan tersertifikasi dalam rangka meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (125 usaha sarana pariwisata). Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 98,56 %
16. Tersusunnya jumlah buku usaha pariwisata dan buku ekonomi kreatif yang disusun tepat waktu dalam rangka meningkatkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara (100 buku). Realisasi fisik 100% realisasi keuangan 81,05 %

Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	81	100	2,580,715,464	100	81	100	2,442,984,264	94.66
1	Penyediaan jasa surat menyurat	100	100	3,213,000	100	100	100	3,213,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	182,000,000	100	100	100	130,648,768	71.79
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	100	208,218,763	100	100	100	207,742,389	99.77
4	Penyediaan alat tulis kantor	100	100	38,043,775	100	100	100	35,427,300	93.12
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	33,016,940	100	100	100	33,010,740	99.98
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	100	11,149,900	100	100	100	11,108,000	99.62
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	10,680,000	100	100	100	10,680,000	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	100	100	47,730,000	100	100	100	40,440,000	84.73
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	100	100	267,760,800	100	100	100	229,384,875	85.67
10	Upacara keagamaan	100	100	48,200,000	100	100	100	48,050,000	99.69
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	100	100	62,850,000	100	100	100	54,336,100	86.45
12	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	100	100	834,985,189	100	100	100	828,075,298	99.17

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
13	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas	11 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2	100	539,183,085	100	11 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2	100	519,707,284	96.39
14	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	100	100	74,500,000	100	100%	100	74,300,000	99.73
15	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen perencanaan dan 3 laporan	100	219,184,012	100	1 dokumen perencanaan dan 3 laporan	100	216,860,510	98.94
B	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	9,8 hari dan 4,5 hari	100	497,148,000	100	8,2 hari dan 4,3 hari	89.61	450,997,791	90.72
1	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Budaya	1 kali award dan 24 DTW Budaya	100	273,653,792	100	1 kali award dan 24 DTW Budaya	100	243,255,595	88.89
2	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Alam	1 Dokumen Rancangan Desa Wisata dan 30 DTW Alam	100	138,572,104	100	1 Dokumen Rancangan Desa Wisata dan 30 DTW Alam	100	122,822,098	88.63
3	Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Buatan	30 DTW Buatan	100	84,922,104	100	30 DTW Buatan	100	84,920,098	100
C	Progam Kelembagaan Pariwisata	748 orang	100	1,162,725,000	100	748 orang	100	1,087,248,374	93.51
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisataan	630 orang	100	226,772,104	100	630 orang	100	220,930,598	97.42
2	Peningkatan Peran Kelembagaan Kepariwisataan	120 orang dan 1 dokumen	100	214,814,792	100	120 orang dan 1 dokumen	100	190,086,595	88.49
3	Peningkatan SDM Kepariwisataan	18 orang duta wisata	100	721,138,104	100	18 orang duta wisata	100	676,231,181	93.77
D	Program Pemasaran Pariwisata	7.100.000 orang dan 8,200.000 orang	100	3,081,240,208	100	5.738.385 orang dan 10.200.000 orang	80.41	1,995,437,871	64.76
1	Analisa pasar dan indeks kepuasan wisatawan mancanegara dan nusantara	2 dokumen	100	372,822,104	100	2 dokumem	100	366,727,698	98.37
2	Penyusunan Data MICE dan Statistik Kepariwisataan	100 buku	100	122,572,104	100	100 buku	100	122,001,198	99.53
3	Forum Kerjasama Inter-Islands Tourism Policy (ITOP Forum)	1 kesepakatan	100	354,572,104	100	1 kesepakatan	100	162,845,198	45.93

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
4	Pengadaan bahan promosi pariwisata	Bali at Glance dlm bhs Inggris (750 buah), Map of Bali dlm bhs Inggris (750 buah), Leaflet dlm bhs Inggris (500 buah), Sekilas Bali (450 buah), Tas (300 buah)	100	146,829,792	100	Bali at Glance dlm bhs Inggris (750 buah), Map of Bali dlm bhs Inggris (750 buah), Leaflet dlm bhs Inggris (500 buah), Sekilas Bali (450 buah), Tas (300 buah)	100	143,592,545	97.8
5	Pelaksanaan Promosi MICE dan Pariwisata Bali di Dalam dan Luar Negeri	2 event dalam negeri dan 4 event luar negeri	100	1,384,444,104	100	2 event dalam negeri dan 1 event luar negeri	64	553,093,232	39.95
6	Pelaksanaan Event Pariwisata Bali	1 Event Mekepung Gubernur Cup	100	700,000,000	100	1 Event Mekepung Gubernur Cup	100	647,178,000	92.45
E	Program Industri Pariwisata	142 USD dan Rp. 463.000,-	100	439,676,904	100	145 USD dan Rp. 530.000	108	401,901,641	91.41
1	Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	125 usaha jasa pariwisata	100	110,872,104	100	125 usaha jasa pariwisata	100	110,872,098	100
2	Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata	125 usaha sarana pariwisata	100	110,872,104	100	125 usaha sarana pariwisata	100	109,272,098	98.56
3	Penyusunan Data Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif	100 buku dan 1 website	100	217,932,696	100	100 buku	83.42	181,757,445	83.4

Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu melalui tahapan sebagai berikut:

1. Forum SKPD, menghasilkan Rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan masukan dari kebijakan pusat dan hasil evaluasi untuk bahan Musrenbang.
2. Sebagai bahan didalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. KUA dilaksanakan bulan Juni menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara).
4. KUA dan PPAS dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bulan Juni/ Juli.
5. Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang KUA dan PPAS.

6. Berdasarkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
7. Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi rancangan RAPBD untuk dilajukan dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bulan September – Oktober.
8. Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah pada Bulan Desember.

Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pariwisata pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan :

1. Di Bidang Destinasi Pariwisata

Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan Bali selatan dan Bali.

2. Di Bidang Kelembagaan Pariwisata

Belum Optimalnya Kualitas SDM di Bidang Pariwisata

3. Di Bidang Pemasaran Pariwisata

Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata

4. Di Bidang Industri Pariwisata

Belum Optimalnya Kualitas Industri di Bidang Kepariwisataan

B. Solusi :

1. Solusi Destinasi Pariwisata

Untuk mempercepat mempersempit kesenjangan di pengembangan kepariwisataan, dinas pariwisata mengembangkan dan meningkatkan Jumlah Destinasi yang berdaya saing dengan meningkatkan Jumlah produk pariwisata berbasis budaya dan Jumlah Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif. Disamping itu tampaknya perlu segera dibuatkan peraturan daerah (perda). Perda yang disertai dengan kewajiban dan sanksi bagi pemilik modal yang berinvestasi dalam bidang pariwisata akan menjadi kekuatan untuk menekan investor agar kegiatannya tidak semata-mata hanya mengeruk keuntungan akan tetapi ikut membantu mengembangkan destinasi dan memberdayakan masyarakatnya.

2. <u>Solusi Kelembagaan Pariwisata</u>

Untuk mengatasi permasalahan di bidang pengembangan SDM pariwisata lokal Bali, dan untuk mewujudkan organisasi pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat, regulasi dan mekanisme yang efektif dan efisien, bisa dilakukan dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan, penyuluhan kepariwisataan, dan melaksanakan Sertifikasi Kompetensi di bidang Pariwisata

terutama sertifikasi kompetensi bagi SDM Pariwisata Bali sehingga kemampuan, wawasan dan skill kepariwisataan yang dimiliki mempunyai daya saing dan diakui.

3. Solusi Pemasaran Pariwisata

Untuk meningkatkan pemasaran pariwisata perlu ditingkatkan pemasaran luar negeri dan dalam negeri. Dengan melakukan peningkatan pasar luar negeri dan dalam negeri akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga kontribusi terhadap PDRB akan turut meningkat juga serta jumlah devisa juga ikut meningkat. Dengan mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu, efektif, efesien, terukur, dan berkualitas akan menjaga pasar pariwisata Bali di luar dan dalam negeri.

4. Solusi Industri Pariwisata

Untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata yang kredibel, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya perlu dilaksanakannya Sertifikasi Profesi dan Usaha di bidang pariwisata. Penerapan peraturan yang terkait pariwisata secara konsisten dengan 'law enforcement' yang tegas untuk menjaga kepariwisataan Bali yang Pariwisata Budaya berdasarkan Tri Hita Karana yang dijiwai Agama Hindu. Dan Kepariwisataan Bali dikelola dengan prinsip "One Island Management" untuk mensukseskan Visi NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI menuju BALI ERA BARU.

3. Pertanian dan Perkebunan

3.1. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pembangunan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan daerah yang mempunyai peranan penting dalam struktur perekonomian daerah Bali, utamanya turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan produktivitas dan kwalitas hasil, perbaikan sistem usaha, mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani serta menjaga pelestarian sumber daya alam dan linkungan hidup dalam rangka terwujudnya Bali Clean and Green menuju Bali organik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).

Adapun fokus pembangunan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diarahkan kepada pengembanagn komoditi, khususnya komoditi andalan dan unggulan yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan wilayah, pendektan pasar dan pendekatan daya saing. Untuk dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal, serta meningkatkan pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan sekaligus meningkatkan

kesejahteraan para petani, hal ini dapat ditempuh melalui 2 (dua) kebijakan, yaitu kebijakan dasar dan kebijakan teknis.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali antara lain :

1. Meningkatnya produksi pangan pokok dengan indikator kinerja antara lain :
   - Jumlah produksi pangan pokok (padi) (ton) dengan target kinerja 830.97 ton
2. Meningkatnya produksi dan daya saing produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator kinerja antara lain :
   - Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%) dengan target kinerja 0.31%
   - Persentase peningkatan produksi hortikultura (%) dengan target kinerja 0.37%
   - Persentase peningkatan produksi perkebunan (%) dengan target kinerja 0.36%
   - Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP) sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%) dengan target kinerja 27%
3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian krama bali dengan indikator kinerja antara lain :
   - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%) dengan target kinerja 2%

Untuk menjawab sasaran utama tersebut diatas maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebuan menindaklanjuti dengan program dan kegiatan antara lain

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja	1) penyediaan surat menyurat 2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) penyediaan jasa kebersihan kantor 4) penyediaan alat tulis kantor 5) penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor 7) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 8) penyediaan makanan dan minuman 9) rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 10) upacara agama 11) pengadaan perlengkapan gedung kantor 12) pengadaan peralatan gedung kantor 13) pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 14) pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 15) penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 16) pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2	program peningkatan prasarana sarana dan penyuluhan pertanian	1) inventarisasi data lahan dan irigasi subak 2) fasilitasi perlindungan kesuburan tanah, pembinaan, pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin perta 3) fasilitasi perbaikan saran irigasi tingkat usaha tani

NO	PROGRAM		KEGIATAN
		4)	pemberian insentif dan penghargaan kepada petani berprestasi serta pembinaan kelembagaan penyuluhan
		5)	fasilitasi pengembangan koperasi tani dan pebiayaan pertanian
3	program peningkatan produksi dan pengembangan agribisnis komoditas perkebunan	1)	penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
		2)	pengembangan taman bumi banten
		3)	pembinaan kelembagaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
		4)	pengolahan data statistik kwalitas perkebunan
		5)	penyediaan sarana pengolahan limbah kopi
4	program pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1)	pengumpulan data statistik tanaman pangan dan hortikultura
		2)	pengembangan padi hibrida
		3)	pengembangan tanaman buah (nangka dll)
		4)	festival agribisnis
		5)	Pengembangan tanaman sayuran
		6)	study FS pembangunan pasar sentra produksi buah - buahan dan sayuran
		7)	sosialisasi pergub penghijauan lahan telajakan dan bahu jalan
		8)	Penumbuhan dan pengembangan sekee manyi
		9)	Studi pengembangan industry pangan
		10)	pengembangan kelembagaan subak melalui RMU
		11)	pemetaan kawasan pertanian
5	program penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	1)	penyediaan jasa surat menyurat
		2)	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3)	penyediaan jasa kebersihan kantor
		4)	Penyediaan alat tulis kantor
		5)	penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		6)	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		7)	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
		8)	penyediaan makanan dan minuman
		9)	rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
		10)	upacara agama
		11)	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
		12)	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		13)	perbanyakan benih sumber padi yang menjadi unggulan daerah
		14)	perbanyakan benih sumber palawija yang menjadi potensi daerah
		15)	perbanyakan benih sumber sayuran yang menjadi unggulan daerah
		16)	perbanyakan/pemeliharaan/pelestariaan aneka tanaman buah dan tanaman hias
		17)	pembangunan/rehab gedung dan penyediaan sarana prasarananya
6	program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	1)	penyediaan jasa surat menyurat
		2)	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3)	penyediaan jasa kebersihan kantor
		4)	penyediaan alat tulis kantor
		5)	penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		6)	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		7)	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
		8)	penyediaan makanan dan minuman
		9)	rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
		10)	upacara agama
		11)	pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
		12)	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		13)	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
		14)	perbanyakan benih sumber palawija yang menjadi potensi daerah
		15)	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
		16)	pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan
		17)	pengembangan sistem perlindungan OPT hortikultura
		18)	pengembangan sistem pengendalian OPT hortikultura
		19)	oprasional lab OPT TPH
		20)	pembangunan/rehab gedung dan penyediaan sarana prasarananya

NO	PROGRAM	KEGIATAN
7	program sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura	1) penyediaan jasa surat menyurat 2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air 3) penyediaan jasa kebersihan kantor 4) penyediaan alat tulis kantor 5) penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6) penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor 7) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 8) penyediaan makan dan minum 9) rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 10) upacara agama 11) pengadaan peralatan gedung kantor 12) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13) pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 14) pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15) sertifikasi benih tanaman pangan 16) sertifikasi benih tanaman pangan
8	program peningkatan produksi, sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan dan arboretum	1) penyediaan jasa surat menyurat 2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air 3) penyediaan alat tulis kantor 4) penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5) penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor 6) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 7) penyediaan makan dan minum 8) rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 9) upacara agama 10) pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 11) pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12) peningkatan pemeliharaan dan pengembangan kebun induk 13) sertifikat dan pengawasan peredaran mutu benih 14) pembangunan taman gumi banten dan puspa dewata 15) pembangunan/rehab gedung dan penyaediaan sarana dan prasarananya
9	program perlindungan tanaman perkebunan	1) penyediaan jasa surat menyurat 2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air 3) penyediaan jasa kebersihan kantor 4) penyediaan alat tulis kantor 5) penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6) penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor 7) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 8) penyediaan makan dan minum 9) rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 10) upacara agama 11) pengadaan perlengkapan gedung kantor 12) pengadaan peralatan gedung kantor 13) pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 14) pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung 15) pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir 16) bimtek pengembangan blsck soldier flay (BSF) 17) pengendalian hayati dan pestisida nabati 18) pembangunan/rehab gedungdan penyediaan sarana dan prasarannya
10	program peningkatan kapasitas sumber daya pertanian	1) penyediaan jasa surat menyurat 2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air 3) penyediaan jasa kebersihan kantor 4) penyediaan alat tulis kantor 5) penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6) penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor 7) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 8) penyediaan makan dan minum 9) rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		10) upacara agama 11) pengadaan perlengkapan gedung kantor 12) pengadaan peralatan gedung kantor 13) pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 14) pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15) pengembangan model pertanian organik/bio industry 16) pembinaan pertanian terpadu/bio industry 17) kaji trap pengembangan teknologi pertanian terpadu/bio industry 18) pengembangan aplikasi E - Comerce produk pertanian

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Produksi pertanian dan perkebunan provinsi Bali seperti padi mengalami penurunan 1,86% dari 851.908 ton padi pada tahun 2018 menjadi 836.081 ton pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena luas panen mengalami penurunan 0,26%, pada tahun 2018 luas panen 141,866 Ha sedangkan pada tahun 2019 luas panen 141,486 Ha. Produktivitas mengalami peningkatan 1,59% hal ini disebabkan oleh karena terjadinya EL NINO yakni musim kemarau yang berkepanjangan. Produksi palawija yang meliputi jagung mencapai 50.088 ton pada tahun 2018 mengalami peningkatan 8,79% dibandingkan tahun 2019 produksinya 54.920 ton dan produksi kedelai pada tahun 2019 mencapai 1.896 ton mengalami penurunan 27,16%, dibandingkan tahun 2018 produksi mencapai 2.411 ton. Sedangkan untuk produksi buah-buahan 656.734 ton tahun 2019 dan mengalami peningkatan 3,01% dibandingkan tahun 2018 produksinya 636.918 ton dan sayuran poduksinya 290.750 ton pada tahun 2019 mengalami penurunan 52,63% dibandingkan tahun 2018 produksinya 139.753 ton, sedangkan pada capaian indikator kinerja kunci urusan perkebunan dengan komoditi unggulan adalah : Produksi kopi Arabika mengalami penurunan produksi sebesar 0,53%, jambu Mete tidak mengalami peningkatan produksi, Kopi Robusta mengalami peningkatan produksi 0,75% dan kakao mengalami peningkatan produksi 4,96%.

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan

Adapun jumlah pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali sebanyak 283 orang dengan rincian sbb. :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. (s/d 31 - 12- 2019)

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN KEPANGKATAN									
NO	NAMA DINAS	GOLONGAN KEPANGKATAN				JUMLAH			
		I	II	III	IV				
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	54	121	39	214			
DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN									
NO	NAMA DINAS	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH

		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2	3	76	8	100	24	1	214
DATA TENAGA KONTRAK APBD DAN APBN									
NO	**NAMA DINAS**	**APBD**	**APBN**	**JUMLAH**					
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	285	6	291					

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun anggaran 2019 dengan jumlah anggaran Rp.30.620.133.862,- realisasi sebesar Rp.23.991245527,27 (77,76%) dan realisasi fisik 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan pagu Rp. 2.870.187.846,- realisasi keuangan Rp. 2.245.648.094 (78,24%), realisasi fisik 100% kegiatan antara lain :**
   1. kegiatan : penyediaan surat menyurat (2 Jenis)
   2. kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 Bln)
   3. kegiatan : penyediaan jasa kebersihan kantor (12 Bulan)
   4. kegiatan : penyediaan alat tulis kantor (41 Jenis)
   5. kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan (2 Jenis)
   6. kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor (6 Jenis Barang/Alat, 12 bulan)
   7. kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (4 Jenis)
   8. kegiatan : penyediaan makanan dan minuman (1038 Kotak)
   9. kegiatan : rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah (10 kali)
   10. kegiatan : upacara agama (1 Jenis)
   11. kegiatan : pengadaan perlengkapan gedung kantor (7 Jenis)
   12. kegiatan : pengadaan peralatan gedung kantor (3 Jenis)
   13. kegiatan : pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor (1 Jenis)
   14. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (19 Unit Roda 4 dan 81 Roda 2)
   15. kegiatan : penyusunan, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (1 Dokumen, 25 Buku).
2. **program peningkatan prasarana sarana dan penyuluhan pertanian dengan Pagu Rp. 1.045.382.234,- realisasi keuangan Rp. 874.182.310,71,- realisasi fisik 100% kegiatan antara lain :**
   1. kegiatan : inventarisasi data lahan dan irigasi subak (2 jenis Dokumen)
   2. kegiatan : fasilitasi perlindungan kesuburan tanah, pembinaan, pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin perta (12500 ton, 16 Sempel)
   3. kegiatan : fasilitasi perbaikan saran irigasi tingkat usaha tani (140 Ha)
   4. kegiatan : pemberian insentif dan penghargaan kepada petani berprestasi serta pembinaan kelembagaan penyuluhan (3 Orang, 57 unit)
   5. kegiatan : fasilitasi pengembangan koperasi tani dan pebiayaan pertanian (2

unit, 5000 Ha).

3. **program peningkatan produksi dan pengembangan agribisnis komoditas perkebunan dengan pagu kegiatan Rp. 2.644.334.612,- realisasi keuangan 2.269.108.321,62 realisasi fisik 100% kegiatan antara lain :**

1.	kegiatan	:	penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (3 Jenis)
2.	kegiatan	:	pengembangan taman bumi banten (7500 phn)
3.	kegiatan	:	pembinaan kelembagaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (1 kali, 1 kali, 6 SA/UPH/KWT)
4.	kegiatan	:	pengolahan data statistik kwalitas perkebunan (20 Buku)
5.	kegiatan	:	penyediaan sarana pengolahan limbah kopi 1 Klp Tani)

4. **program pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan pagu kegiatan Rp. 2.312.938.791,- realisasi Rp. 1.813.315.142,- realisasi fisik 100% dengan kegiatan antara lain :**

1.	kegiatan	:	pengumpulan data statistik tanaman pangan dan hortikultura (30 Buku)
2.	kegiatan	:	pengembangan padi hibrida (45 Ha)
3.	kegiatan	:	pengembangan tanaman buah (nangka dll)
4.	kegiatan	:	festival agribisnis (4 Jenis)
5.	Kegiatan	:	Pengembangan tanaman sayuran (2 kabupaten)
6.	kegiatan	:	study FS pembangunan pasar sentra produksi buah - buahan dan sayuran (1 Kajian)
7.	kegiatan	:	sosialisasi pergub penghijauan lahan telajakan dan bahu jalan
8.	kegiatan	:	Penumbuhan dan pengembangan sekee manyi (9 klp tani)
9.	kegiatan	:	Studi pengembangan industry pangan
10.	kegiatan	:	pengembangan kelembagaan subak melalui RMU (1 Kabupaten)
11.	kegiatan	:	pemetaan kawasan pertanian (1 Dokumen)

UPTD

5. **program penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu dengan Pagu Rp. 3.489.613.262,- realisasi keuangan Rp. 3.022.838.504,22,- realisasi fisik 100% dengan kegiatan antara lain :**

1.	kegiatan	:	penyediaan jasa surat menyurat (1jenis)
2.	kegiatan	:	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (4 Jenis)
3.	kegiatan	:	penyediaan jasa kebersihan kantor (1 orang, 1 paket)
4.	kegiatan	:	Penyediaan alat tulis kantor (18 Jenis)
5.	kegiatan	:	penyediaan barang cetakan dan penggandaan (2 jenis)
6.	kegiatan	:	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (2 jenis barang/alat penerangan)
7.	kegiatan	:	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (2 jenis)
8.	kegiatan	:	penyediaan makanan dan minuman (240 kotak)
9.	kegiatan	:	rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (4 tingkat)
10.	kegiatan	:	upacara agama (6 jenis)
11.	kegiatan	:	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (4 unit roda 4 dan 20 unit roda 2)
12.	kegiatan	:	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (4 jenis)
13.	kegiatan	:	perbanyakan benih sumber padi yang menjadi unggulan daerah (2 Ha)

14 kegiatan : perbanyakan benih sumber palawija yang menjadi potensi daerah (2 Ha)
15 kegiatan : perbanyakan benih sumber sayuran yang menjadi unggulan daerah (0,5 Ha dan 23.000 bag log)
16 kegiatan : perbanyakan/pemeliharaan/pelestariaan aneka tanaman buah dan tanaman hias (5000 phn jeruk, 3000 phn durian, 2000 phn tanaman hias, 500 phn induk)
17 kegiatan : pembangunan/rehab gedung dan penyediaan sarana prasarananya (7 unit pembangunan gedung, 8 unit rehab gedung, 25 peralatan pertanian)

6. program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dengan pagu kegiatan Rp. 2.611.992.329,- realisasi anggaran Rp. 2.526.313.449,50 realisasi fisik 100% dengan antara lain :

1. kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat (2 jenis)
2. kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (3 Jenis)
3. kegiatan : penyediaan jasa kebersihan kantor (2 Paket)
4. kegiatan : penyediaan alat tulis kantor (19 Jenis)
5. kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan (2 Jenis)
6. kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (2 Jenis)
7. kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (2 jenis)
8. kegiatan : penyediaan makanan dan minuman (320 kotak)
9. kegiatan : rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (4 tingkat)
10. kegiatan : upacara agama (3 jenis)
11. kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (1 paket)
12. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1 unit)
13. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (9 unit roda 4 dan 25 unit roda 2)
14. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (2 Jenis)
15. kegiatan : pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (9 kab/kota)
16. kegiatan : pengembangan sistem perlindungan OPT hortikultura (9 kali)
17. kegiatan : pengembangan sistem pengendalian OPT hortikultura (5 kali)
18. kegiatan : Pengawasan dan Dampak Pengguanaan Pestisida (9 Kab/Kota)
19. kegiatan : oprasional lab OPT TPH (9 Jenis,200 Kg,ltr)
20 kegiatan : pembangunan/rehab gedung dan penyediaan sarana prasarananya (2 Unit, 1 Unit, 1 Pkt)

7. program sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura dengan Pagu anggaran Rp. 1.002.348.099,- realisasi anggaran Rp. 937.302.745,- , realisasi fisik 100% dengan kegiatan antara lain :

1. kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat (2 Jenis)
2. kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (3 Jenis)
3. kegiatan : penyediaan jasa kebersihan kantor (6 gedung)
4. kegiatan : penyediaan alat tulis kantor (27 Jenis)
5. kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan (3 Jenis)
6. kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor (1 Jenis)
7. kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (2 Jenis)
8. kegiatan : penyediaan makan dan minum (2 Jenis)
9. kegiatan : rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (4 tingkat)
10. kegiatan : upacara agama (7 Jenis)

11. kegiatan : pengadaan peralatan gedung kantor (3 Jenis)
12. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (1 Jenis)
13. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (2 Jenis)
14. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor (5 Jenis)
15. kegiatan : sertifikasi benih tanaman pangan (50 Ha (20 unit)
16. kegiatan : sertifikasi benih tanaman pangan (200 unit (70.000 batang dan 50 ton)

8. program peningkatan produksi, sertifikasi dan pengawasan benih tanaman perkebunan dan arboretum dengan Pagu anggaran Rp. 4.434.588.528,- realiasasi anggaran Rp. 2.888.302.997,- realisasi fisik 100% dengan kegiatan antara lain :

1. kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat (2 jenis)
2. kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (1 Jenis)
3. kegiatan : penyediaan alat tulis kantor (9 Jenis)
4. kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan (2 Jenis)
5. kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor (1 Jenis)
6. kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (2 Jenis)
7. kegiatan : penyediaan makan dan minum (160 kotak)
8. kegiatan : rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (4 tingkat)
9. kegiatan : upacara agama (3 jenis)
10. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (2 Unit)
11. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (3 komputer, 2 printer)
12. kegiatan : peningkatan pemeliharaan dan pengembangan kebun induk (45 ha)
13. kegiatan : sertifikat dan pengawasan peredaran mutu benih (50.000kg, 30.000 phn, 580.000 ros, 533.500 phn, 75.000 phn, 240.000 mata, 1.000.000 phn, 6.000.000 phn, 2 Ha)
14. kegiatan : pembangunan taman gumi banten dan puspa dewata (2 Ha)
15. kegiatan : pembangunan/rehab gedung dan penyaediaan sarana dan prasarananya (1 Paket)

9. program perlindungan tanaman perkebunan dengan Pagu anggaran 5.508.866.815,- realisasi anggaran Rp. 2.667.197.717,34,- realisasi fisik 100% dengan kegiatan antara lain :

1. kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat (3 Jenis)
2. kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (3 Jenis)
3. kegiatan : penyediaan jasa kebersihan kantor (1 pkt)
4. kegiatan : penyediaan alat tulis kantor (17 Jenis)
5. kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan (3 Jenis)
6. kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor (4 unit)
7. kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (12 bulan)
8. kegiatan : penyediaan makan dan minum (220 kotak)
9. kegiatan : rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (1 tahun)
10. kegiatan : upacara agama (12 bulan)
11. kegiatan : pengadaan perlengkapan gedung kantor (1 unit)
12. kegiatan : pengadaan peralatan gedung kantor (3 unit)
13. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (3 unit)
14. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung (2 Jenis)
15. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala taman dan tempat parkir (70 m^2)

16. kegiatan : bimtek pengembangan blsck soldier flay (BSF) (2 orang, 20 orang petugas)
17. kegiatan : pengendalian hayati dan pestisida nabati (1 ton starter APH)
18. kegiatan : pembangunan/rehab gedungdan penyediaan sarana dan prasarannya (9 unit, 2 unit).

10. program peningkatan kapasitas sumber daya pertanian dengan Pagu anggaran Rp. 4.699.881.346,- realisasi anggaran Rp. 4.645.177.243,86,- realisasi fisik 100% kegiatan antara lain :

1. kegiatan : penyediaan jasa surat menyurat (2 Jenis)
2. kegiatan : penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (2 Jenis)
3. kegiatan : penyediaan jasa kebersihan kantor (1 unit gedung
4. kegiatan : penyediaan alat tulis kantor (24 jenis)
5. kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan (2 jenis)
6. kegiatan : penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor (2 jenis)
7. kegiatan : penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan (2 jenis)
8. kegiatan : penyediaan makan dan minum (325 kotak)
9. kegiatan : rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (4 tingkat)
10. kegiatan : upacara agama (6 Jenis)
11. kegiatan : pengadaan perlengkapan gedung kantor (3 Jenis)
12. kegiatan : pengadaan peralatan gedung kantor (3 unit)
13. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (3 Unit)
14. kegiatan : pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor (3 komputer, 4 AC)
15. kegiatan : pengembangan model pertanian organik/bio industri (1 unit,7 paket, 8 kab)
16. kegiatan : pembinaan pertanian terpadu/bio industry
17. kegiatan : kaji trap pengembangan teknologi pertanian terpadu/bio industri (2 kali, 100 klp)
18. kegiatan : pengembangan aplikasi E - Comerce produk pertanian (100 klp)

Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu melaui tahapan sebagai berikut :

1. Forum SKPD, menghasilkan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan merujuk kebijakan Pusat dan Hasil Evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk dimantapkan dalam Musrenbang.
2. Musrenbang menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), antara lain meliputi :
    a. Kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk menyempurnakan rancangan RKPD dan Renja SKPD.

b. Sebagai bahan didalam penyusunan kebijakan umum anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon anggaran sementara (PPAS)
c. Daftar Usulan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .

3. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada bulan Mei yang antara lain telah ditetapkan KUA (Kebijakan Umum APBD)
4. KUA dilaksanakan bulan Juni menghasilkan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
5. KUA dan PPAS dibahas bersama-sama denga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan Juni/Juli
6. Nota kesepakatan antara Gubernur dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang KUA dan PPAS
7. Berdasrkan KUA dan PPAS selanjutnya dilakukan penelitian RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
8. Kompilasi RKA yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi rancangan RAPBD untuk diajukan dan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan September-Oktober.
9. Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah pada bulan Desember.
10. Setelah APBD ditetapkan, disusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang diharapkan bulan Januari sudah selesai.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Prasarana berupa Gedung Kantor sudah cukup memadai. Sarana seperti alat kantor juga sudah cukup memadai

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Pemanfaatan lahan belum Optimal
b. Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit
c. Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi
d. Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
e. Penguasaan teknologi bagi petani lemah
f. Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
g. Mutu produksi dan sistem perbenihan belum memadai

b. Solusi dan Upaya Tindak Lanjut

a. Usaha peningkatan IP lahan baik di lahan sawah maupun di lahan kering
b. Pengembangan teknologi hemat air, perbaikan jaringan irigasi

c. Promosi, pameran dan pengembangan kemitraan usaha serta penyaluran kredit usahatani
d. Dilaksanakannya pelatihan / kursus bagi petani, serta peningkatan koordinasi penyuluhan sampai ke tingkat BPP.

3.2. Peternakan

Sesuai dengan RPJM Daerah Bali tahun 2013 – 2018, pembangunan peternakan termasuk prioritas urusan pilihan. Program Pembangunan Peternakan mengacu pada kebijakan pembangunan peternakan secara nasional dan Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Provinsi Bali 2013 – 2018. Pelaksanaan Program diarahkan pada delapan fokus utama yaitu : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Populasi Peternakan, (4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Penyuluhan Peternakan dan (5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; d) Penyediaan Alat Tulis Kantor; e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan; h) Penyediaan Makanan dan Minuman; i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; j) Upacara Keagamaan; k) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; l) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas; n) Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor; o) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; p) Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja.
2	Program Peningkatan Populasi Ternak	a) Pengawasan Perbibitan Ternak b) Pengembangan Ternak Ruminansia c) Pengembangan Ternak Non Ruminansia
3	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	a) Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis b) Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak c) Pengawasan dan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok d) Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan	a) Pengawasan Obat dan Lalulintas Hewan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	Penyakit Ternak /Hewan	b) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
		c) Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif
		d) Pengawasan Produk Asal Hewan
		e) Pengawasan Pemgolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
5	Program Pengembangan Semen	a) Produksi dan Distribusi semen.
		b) Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB
6	Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	a) Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner
		b) Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan prioritas urusan sub Sektor Peternakan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Populasi Ternak

Program Peningkatan Populasi Ternak dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 630.362.816 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 592.416.350,52 (93,98%) dan realisasi fisik sebesar 97,90% serta efisiensi Rp. 24.196.465,48 (3,92%). Dana SIAP program ini adalah Rp. 13.250.000,- (2,10%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana. Hasil pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengawasan Perbibitan Ternak.

Pengawasan Perbibitan Ternak dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbibitan ternak. Keluaran dari kegiatan Perbibitan Ternak adalah Jumlah Ternak yang Tersertifikasi (25 ekor), Terseleksinya Ternak Sapi Unggul (5 Paket), Terseleksinya Petugas Berprestasi (4 Paket) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Perbibitan Ternak adalah Jumlah Ternak yang Tersertifikasi (25 ekor), Terseleksinya Ternak Sapi Unggul (5 Paket), Terseleksinya Petugas Berprestasi (4 Paket) Kegiatan Perbibitan Ternak dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 465.158.608 dengan realisasi keuangan Rp. 429.808.795,26,- (92,40%) dan realisasi fisik sebesar 97,15% serta efisiensi Rp. 22.099.812,74,- (4,75%%). Dana SIAP sebesar 13.250.000,-(2,85%) merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana.

b. Pengembangan Ternak Ruminansia

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia dilaksanakan dalam rangka pembinaan ternak ruminansia agar dapat berkembang dengan baik. Keluaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia adalah : Jumlah Kelompok Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Ruminansia (25 Kelompok) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia adalah : Jumlah Kelompok Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Ruminansia (25 Kelompok) Kegiatan Pengembangan

Ternak Ruminansia dengan pagu anggaran Rp. 110.844.208 dengan realisasi keuangan Rp. 108.495.255,26 (97,881%) dan realisasi fisik sebesar 100%) serta efisiensi Rp. 2.348.952,74 (2.12%).

c. Pengembangan Ternak Non Ruminansia Kegiatan Pengembangan Ternak Non Ruminansia dilaksanakan dalam rangka pembinaan ternak non ruminansia agar dapat berkembang dengan baik. Keluaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Non Ruminansia adalah : Jumlah Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Non Ruminansia (25 babi dan 25 itik) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Non Ruminansia adalah : Jumlah Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Non Ruminansia (25 babi dan 25 itik) Kegiatan Pengembangan Ternak Non Ruminansia dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 54.360.000 dengan realisasi keuangan Rp. 54.112.300.00,- (99,54%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 247.700,- (0,46%).

2) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Program Pengembangan Agribisnid Peternakan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. ,502.269.262 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 497.683.242,89,- (99,09%) dan realisasi fisik sebesar 99,86% serta efisiensi Rp. 3.886.019,11,- (0,77%). Dana SIAP program ini adalah Rp. 700.000 (0,14%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana. Hasil pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan lomba-lomba kelompok dalam kaitannya dengan pemberdayaan kelompok tani ternak yang beroriensi agribisnis. Keluaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis adalah : Jumlah kelompok tani ternak yang berprestasi (15 Kelompok) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis adalah : Jumlah kelompok tani ternak yang berprestasi sebanyak 15 Kelompok. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis dilaksanakan dengan pagu Rp. 118.707.704 dengan realisasi keuangan Rp. 117.732.097,63,- (99,18%) dan realisasi fiisik sebesar 99,41% serta efisiensi Rp. 275.606,37 (0,23%). Dana SIAP sebesar 700.000,-(0,59%) merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana.

b. Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak

Kegiatan Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak dilaksanakan dalam rangka pembinaan permodalan kelompok peternak. Keluaran dari kegiatan Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak adalah : Pembinaan permodalan kelompok peternak (10 kelompok) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak adalah : Pembinaan permodalan kelompok peternak

sebanyak kelompok. Kegiatan Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak dilaksanakan dengan pagu Rp. 37.486.500 dengan realisasi keuangan Rp. 34.331.000 (91,58%) dan realisasi fiisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 3.155.500 (8,42%).

c. Pengawasan dan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok

Kegiatan Pengawasan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemberian bimtek pengolahan pakan ternak agar dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak petani / peternak. Keluaran pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok adalah : Jumlah kelompok yang melakukan pengolahan pakan ternak (10 kelompok) dan Jumlah pengawasan mutu pakan ternak (18 Kali) Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan pengolahan pakan ternak di Kelompok adalah : Jumlah kelompok yang melakukan pengolahan pakan ternak sebanyak 10 kelompok dan Jumlah pengawasan mutu pakan ternak sebanyak 18 kali. Kegiatan Pengawasan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok dilaksanakan dengan pagu anggran Rp. 136.805.958 dengan realisasi keuangan Rp. 136.693.645,26,- (99,92%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 112.312,74,- (0,08%).

d. Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan.

Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan dilaksanakan dalam rangka penyediaan, pembinaan, dan penataan terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana peternakan. Keluaran pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan adalah : Jumlah Alat Pengolah Pupuk Organik yang disediakan (6 Unit) dan Jumlah kelompok yang terbina dalam memanfaatkan sarana dan prasarana peternakan (10 Kelompok) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan adalah : Jumlah Alat Pengolah Pupuk Organik yang disediakan (6 Unit) dan Jumlah kelompok yang terbina dalam memanfaatkan sarana dan prasarana peternakan (10 Kelompok) Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 209.269.100 dengan realisasi keuangan Rp. 208.926.500,- (99,84%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 342.600 (0,16%).

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan, Penanggulangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Hewan, Penanggulangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 3.098.631.420 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.075.908.573,26,- (99,27%) dan realisasi fisik sebesar

100% serta efisiensi Rp. 22.722.846,74,- (0,73%). Hasil pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengawasan Obat dan Lalu lintas Hewan

Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu lintas Hewan dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan lalu lintas hewan Keluaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu lintas Hewan adalah : Jumlah monitoring dan pengawasan lalulintas hewan/ternak/satwa (5 Kali) dan Jumlah monitoring dan pengawasan unit usaha obat hewan (5 Kali) Hasil capaian Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu lintas Hewan dan Penilaian Dokter Hewan adalah : Jumlah monitoring dan pengawasan lalulintas hewan/ternak/satwa (5 Kali) dan Jumlah monitoring dan pengawasan unit usaha obat hewan (5 Kali) Kegiatan Pengawasan Obat dan Lalu lintas Hewan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.816.678,- (99,90%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 3.183.322,- (9,10%).

b. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit ternak / hewan menular strategis yang bersifat zoonosis (flu burung dan rabies). Keluaran pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah : Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi (150.000 dosis) Hasil capaian Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak adalah : Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi (150.000 dosis) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 2.964.831.420 dengan realisasi keuangan Rp. 2.958.212.795,26,- (99,78%) dan realisasi fisik sebesar 100%) serta efisiensi Rp. 6.618.624,74,- (0,22%).

c. Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Kegiatan Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemotongan Sapi betina produktif di RPH agar ternak yang dipotong memenuhi persyaratan / ketentuan yang berlaku. Keluaran pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Jumlah RPH/TPH yang dibina dalam pemotongan ternak/hewan sesuai standar yang berlaku (8 RPH) Hasil capaian pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif adalah Jumlah RPH/TPH yang dibina dalam pemotongan ternak/hewan sesuai standar yang berlaku (8 RPH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 24.100.000 dengan realisasi keuangan Rp. 20.749.800,- (86,10%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 3.350.200,- (13,90%).

d. Pengawasan Produk Asal Hewan

Kegiatan Pengawasan Produk Asal Hewan dilaksanakan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Produk Asal Hewan agar PAH terkait dengan penerapan higine sanitasi dan bebas dari penyakit hewan zoonosis serta food borne disease. Keluaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Asal Hewan adala : Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang terbina dalam penerapan higiene sanitasi (4 Unit Usaha Hasil capaian pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Asal Hewan adalah : Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang terbina dalam penerapan higiene sanitasi (4 Unit Usaha Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Asal Hewan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 36.215.200 (90,54%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 3.784,800 (9,46%).

e. Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Kegiatan Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pembinaan serta bimtek terkait dengan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan agar olahan yang beredar aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Keluaran pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan adalah : Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (9 kelompok) Hasil capaian pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan adalah : Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (9 kelompok) Kegiatan Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 34.700.000 dengan realisasi keuangan Rp. 34.914.100 (83,33%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 5.785.900 (16,67%).

4) Program Pengembangan Semen

Program Pengembangan Semen dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 3.488.339.557 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.348.938.074,87 (96%) dan realisasi fisik sebesar 99,67% serta efisiensi Rp. 127.843.482,13 (3,67%). Dana SIAP program ini adalah Rp. 11.558.000 (0,33%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana. Hasil pelaksanaan kegiatan prioritasnyanya sebagai berikut :

a. Produksi dan Distribusi Semen.

Produksi dan Distribusi Semen dilaksanakan untuk memproduksi dan mendistribusikan semen dalam rangka pelayanan kegiatan IB (inseminasi buatan). Keluaran dari kegiatan Produksi dan Distribusi Semen adalah Jumlah penyediaan sarana produksi dan distribusi benih ternak (4 paket sarana produksi dan distribusi, 12 jenis uji, 3 ekor ternak) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Produksi dan Distribusi Semen adalah Jumlah

penyediaan sarana produksi dan distribusi benih ternak (4 paket sarana produksi dan distribusi, 9 jenis uji, 3 ekor ternak) Kegiatan Produksi dan Distribusi Semen dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 3.022.920.885 dengan realisasi keuangan Rp. 2.905.844.540,30 (96,13%) dan realisasi fisik sebesar 99,62% serta efisiensi Rp. 105.518.344,70 (3,49%). Dana SIAP kegiatan ini adalah Rp. 11.558.000 (0,38%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana.

b. Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB

Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB dilaksanakan dalam rangka penguatan kelompok dan inseminator dalam kaitannya dengan peningkatan penerapan teknologi IB. Keluaran pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB adalah : Jumlah kelompok ternak yang dibina teknologi IB (9 Kelompok), Jumlah Lembaga IB yang dibina (57 SPIB) Hasil capaian pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB adalah : Jumlah kelompok ternak yang dibina teknologi IB (9 Kelompok), Jumlah Lembaga IB yang dibina (57 SPIB) Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB dengan pagu Rp. 72.924.208 dengan realisasi keuanganRp. 72.724.195,26 (99,73%) dan realisasi fisik sebesar 100% serta efisiensi Rp. 200.012,74,- (0,27%).

5) Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner

Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 1.410.385.877 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.333.319.783,19 (94,54%) dan realisasi fisik sebesar 98,11% serta efisiensi Rp. 50.406.093,81 (3,57%). Dana SIAP program ini adalah Rp. 26.624.000 (1,89%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana. Hasil pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner

Kegiatan Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner dilaksanakan dalam rangka pengambilan dan penerimaan sampel, terkait dengan Identifikasi dan Pemetaan Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan /Hasil Bahan Asal Hewan. Keluaran Kegiatan Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner adalah : Jumlah Sampel Yang Diambil dan Diterima (15.000 sampel) Hasil capaian Kegiatan Kegiatan Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner adalah Jumlah Sampel Yang Diambil dan Diterima (15.000 sampel) Kegiatan Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 692.693.285 dengan realisasi keuangan Rp. 664.562.432,67 (95,94%) dan realisasi fisik sebesar 96,88% serta efisiensi Rp. 6.470.852,33 (0,94%). Dana SIAP kegiatan ini adalah Rp. 21.624.000 (3,12%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana.

b. Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium

c. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium dalam rangka Pemeriksaan dan Pengujian Kasus Penyakit Hewan dan Bahan Asal Hewan /Hasil Bahan Asal Hewan. Keluaran Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium adalah: Jumlah Hasil Pengujian Veteriner (110 LHU) Hasil capaian Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium adalah Jumlah Hasil Pengujian Veteriner (110 LHU) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 197.171.176 dengan realisasi keuangan Rp. 173.557.923 (88,02%) dan realisasi fisik sebesar 97,46% serta efisiensi Rp. 18.613.253 (9,44%). Dana SIAP pkegiatan ini adalah Rp. 5.000.000 (2,54%) yang merupakan dana operasional yang kegiatannya tidak terlaksana.

Lebih lanjut tentang Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas urusan sub Sektor Peternakan seperti Tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Satuan Ternak) (591.678)	100	630,362,816	100	Jumlah Populasi Ternak (Satuan Ternak) (623.915)	97,90	592,416,350	93,98
1	Pengawasan Pembibitan Ternak	Jumlah Ternak yang Tersertifikasi (25 ekor), Terseleksinya Ternak Sapi Unggul (5 Paket), Terseleksinya Petugas Berprestasi (4 Paket)	100	465,158,608	100	Jumlah Ternak yang Tersertifikasi (25 ekor), Terseleksinya Ternak Sapi Unggul (5 Paket), Terseleksinya Petugas Berprestasi (4 Paket)	97,15	429,808,795	92,40
2	Pengembangan Ternak Ruminansia	Jumlah Kelompok Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Ruminansia (25 Kelompok)	100	110,844,208	100	Jumlah Kelompok Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Ruminansia (25 Kelompok)	100	108,495,255	97,88
3	Pengembangan Ternak Non Ruminansia	Jumlah Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Non Ruminansia (25 babi dan 25 itik)	100	54,360,000	100	Jumlah Peternak yang Memahami Budidaya Ternak Non Ruminansia (25 babi dan 25 itik)	100	54,112,300	99,54

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
B	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Agribisnis Peternakan (35 Kelompok)	100	502,269,262	100	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Agribisnis Peternakan (35 Kelompok)	99,86	497,683,242	99,09
1	Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Berorientasi Agribisnis	Jumlah kelompok tani ternak yang berprestasi (15 Kelompok)	100	118,707,704	100	Jumlah kelompok tani ternak yang berprestasi (15 Kelompok)	99,41	117,732,097	99,18
2	Pengembangan Permodalan Kelompok Tani Ternak	Jumlah Kelompok Ternak yang Dibina Mengenai Permodalan (10 Kelompok)	100	37,486,500	100	Jumlah Kelompok Ternak yang Dibina Mengenai Permodalan (10 Kelompok)	100	34,3310	91,58
3	Pengawasan dan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok	Jumlah kelompok yang melakukan pengolahan pakan ternak (10 kelompok) Jumlah pengawasan mutu pakan ternak (18 Kali)	100	136,805,958	100	Jumlah kelompok yang melakukan pengolahan pakan ternak (10 kelompok) Jumlah pengawasan mutu pakan ternak (18 Kali)	100	136,693,645	99,92
4	Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah Alat Pengolah Pupuk Organik yang disediakan (6 Unit) Jumlah kelompok yang terbina dalam memanfaatkan sarana dan prasarana peternakan (10 kelompok)	100	209,269,100	100	Jumlah Alat Pengolah Pupuk Organik yang disediakan (6 Unit) Jumlah kelompok yang terbina dalam memanfaatkan sarana dan prasarana peternakan (10 kelompok)	100	208,926,500	99,84
C	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (200 kasus rabies dan 6 kasus flu burung)	100	3,098,631,420	100	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (230 kasus rabies dan 2 kasus flu burung)	100	3,075,908,573	99,27

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
1	Pengawasan Obat dan Lalulintas Hewan	Jumlah monitoring dan pengawasan lalulintas hewan/ternak/ satwa (5 Kali) Jumlah monitoring dan pengawasan unit usaha obat hewan (5 Kali)	100	35,000,000	100	Jumlah monitoring dan pengawasan lalulintas hewan/ternak/satwa (5 Kali) Jumlah monitoring dan pengawasan unit usaha obat hewan (5 Kali)	100	31,816,678	90,90
2	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi (150.000 dosis)	100	2,964,831,420	100	Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi (150.000 dosis)	100	2,958,212,795	99,78
3	Pengawasan Pemotongan Sapi Betina Produktif	Jumlah RPH/TPH yang dibina dalam pemotongan ternak/hewan sesuai standar yang berlaku (8 RPH)	100	24,100,000	100	Jumlah RPH/TPH yang dibina dalam pemotongan ternak/hewan sesuai standar yang berlaku (8 RPH)	100	20,749,800	86,10
4	Pengawasan Produk Asal Hewan	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang terbina dalam penerapan higiene sanitasi (4 Unit Usaha	100	40,000,000	100	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang terbina dalam penerapan higiene sanitasi (4 Unit Usaha	100	36,215,200	90,54
5	Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (9 kelompok)	100	34,700,000	100	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (9 kelompok)	100	28,914,100	83,33
D	Program Pengembangan Semen	Jumlah Produksi Semen (101.000 Dosis)	100	3,488,339,557	100	Jumlah Produksi Semen (106.955 Dosis)	99,67	3,348,938,074	96

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
1	Produksi dan Distribusi Semen	Jumlah penyediaan sarana produksi dan distribusi benih ternak (4 paket sarana produksi dan distribusi, 12 jenis uji, 3 ekor ternak)	100	3,022,920,885	100	Jumlah penyediaan sarana produksi dan distribusi benih ternak (4 paket sarana produksi dan distribusi, 9 jenis uji, 3 ekor ternak)	99,62	2,905,844,540	96,13
2	Penguatan dan Peningkatan Penerapan Teknologi IB	Jumlah kelompok ternak yang dibina teknologi IB (9 Kelompok), Jumlah Lembaga IB yang dibina (57 SPIB)	100	72,924,208	100	Jumlah kelompok ternak yang dibina teknologi IB (9 Kelompok), Jumlah Lembaga IB yang dibina (57 SPIB)	100	72,724,195	99,73
E	Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner (82,50)	100	1,410,349,877	100	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner (81,95)	98,11	1,333,319,783.19	94,54
1	Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner	Jumlah Sampel Yang Diambil dan Diterima (15.000 sampel)	100	692,657,285	100	Jumlah Sampel Yang Diambil dan Diterima (15.000 sampel)	86,88	664,562,432.67	95,94
2	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium	Jumlah Hasil Pengujian Veteriner (110 LHU)	100	197,171,176	100	Jumlah Hasil Pengujian Veteriner (110 LHU)	97,46	173,557,923	88,02

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional.

1. Jumlah Pegawai : 154

- Jumlah PNS = 79 orang
- Tenaga Kontrak = 75 orang

2. Kualifikasi Pendidikan :

- S3 = 1 orang
- S2 = 14 orang
- S1 = 39 orang
- D III = 3 orang
- SLTA = 22 orang
- SLTP = 0 orang
- SD = 0 orang

3. Pangkat dan Golongan :

- Golongan IV = 17 orang
- Golongan III = 49 orang
- Golongan II = 13 orang
- Golongan I = 0 orang

4. Jumlah Pejabat Struktural : 22 orang

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 6 orang
- Eselon IV = 15 orang

5. Jumlah Pejabat Fungsional : 57 orang

Jabatan Fungsional Umum sebanyak 50 Orang dan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 7 orang.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan adalah :

- Tingginya permintaan sapi potong (Sapi Bali) dari luar Provinsi Bali dan masih adanya pemotongan sapi betina produktif, sehingga perlu meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait, agar keberadaan Sapi Bali tetap berkembang dan lestari di Provinsi Bali
- Akses pemasaran dan permodalan peternak masih lemah.serta ketersediaan pakan relatif terbatas akibat terjadinya alih fungsi lahan, sehingga menyebabkan harga pakan terus meningkat dan terkendala dalam mencukupi biaya produksi
- Kurang optimalnya pemanfaatan limbah budidaya /pertanian / peternakan sebagai bagian dari diversifikasi usaha kegiatan
- Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Rabies dan flu burung

Upaya dan tindak lanjut yang perlu dilakukan agar pembangunan di sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Bali dapat terlaksana sesuai rencana adalah :

- Meningkatkan pengawasan sebagai implementasi dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali di Provinsi Bali yang didalamnya mengatur tentang pengeluaran sapi potong dan pengawasan tempat-tempat pemotongan hewan (RPH)
- Melakukan pembinaan penguatan kelembagaan kelompok peternak, memfasiltasi permodalan melalui perkreditan dan asuransi ternak serta melakukan pembinaan dan bimtek pengolahan pakan ternak dan penanaman HPT
- Memfasilitasi pengolahan dan sertifikasi pupuk organik
- Untuk mengatasi adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Rabies dan flu burung, maka perlu dilakukan kegiatan :
  a. peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi Rabies,

b. peningkatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal rabies secara berkelanjutan serta eliminasi HPR secara selektif dan targeted
c. peningkatan penerapan pelaksanaan biosecurity pada kandang-kandang penampungan unggas, pasar unggas dan tempat pemotongan unggas
d. pengawasan lalu lintas hewan yang ketat tentang masuknya HPR dan Unggas ke Provinsi Bali.

4. Kehutanan

Luas kawasan hutan di Provinsi Bali 132.171,47 Ha (23,44%) yang terdiri dari : hutan daratan 127.201,12 Ha. dan hutan perairan 4.970,35 Ha., sebagian besar sebagai Hutan Lindung (HL) 96.687,86 (73,15%), Hutan Produksi Tetap (HP) 2.013,07 (1,52%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) 6.904,37 (5,22%), Hutan Produksi Yang Dapat Konservasi 169,85 (0,13%), Taman Hutan Raya (Tahura) 1.158,08 (0,88%), Cagar Alam (CA) 1.749,97 (1,32%), Taman Wisata Alam (TWA) 4.461,30 (3,38%), "Taman Nasional Bali Barat (TNBB) 19.026,97 (14,40%) (Darat 14.056,62 Ha. dan Perairan 4.970,35 Ha.). Dari luasan tersebut di atas belum semuanya berfungsi optimal karena luasnya juga masih di bawah 30%, disamping masih adanya lahan kritis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu diupayakan peningkatan fungsi kawasan hutan melalui peningkatan kualitas tegakan hutan dan peningkatan fungsi lindung di luar kawasan hutan, sehingga fungsi hutan dalam mendukung penataan alam lingkungan Bali bisa lebih optimal.

Ditinjau dari aspek geomorfologis dan geografis bahwa keberadaan kawasan hutan di Provinsi Bali merupakan satu-satunya harapan dalam pengaturan tata hidrologis dan tata alam lingkungan, sehingga perlu dikelola secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek ekologi, sosial, budaya dan ekonomi, yang dilandasi filosofi ”TRI HITA KARANA”.Dari sisi ekologi, sektor kehutanan dituntut untuk memberikan dukungan bagi terlaksananya pembangunan sektor lain secara berkelanjutan melalui penyediaan berbagai produk dan jasa ekologi, termasuk stabilitas lingkungan dan perlindungan tata air guna menciptakan kenyamanan, kebersihan udara dan lingkungan, stabilitas pasokan air dan keindahan serta terjaganya keanekaragaman hayati sumber daya hutan.

Dari sisi sosial, keberadaan hutan mempunyai hubungan yang dinamis dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga pengelolaan hutan dituntut untuk dapat memanfaatkan tata nilai kearifan lokal (falsafah Tri Hita Karana, Tri Mandala, Awig–awig, Perarem, dll.) dan kelembagaan lokal (desa pakraman/adat) dengan mengimplementasikan nilai yang dianut masyarakat dan memfungsikan kelembagaan yang ada secara lebih kongkrit, sehingga pembangunan kehutanan akan tetap berlangsung atas dukungan dan partisipasi masyarakat. Dari sisi ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat menjamin distribusi manfaat

yang berkeadilan dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	a) Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial b) Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial c) Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan

Jumlah Pegawai

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tk. I (IV/b)	8
4	Pembina (IV/a)	13
5	Penata Tk. I (III/d)	56
6	Penata (III/c)	33
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	39
8	Penata Muda (III/a)	24
9	Pengatur Tk. I (II/d)	10
10	Pengatur (II/c)	25
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
12	Pengatur Muda (II/a)	-
13	Juru Tk. I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
TOTAL		**211**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial, Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan dengan rincian pelaksanaan:
   - Target 4,99% (150 Ha.).
   - Realisasi 11,14% (3.150 Ha.).
   - Capaian Kinerja 223,24%.
2) Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial, (Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan

Hutan Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan dan Bali Barat) dengan pagu dana Rp. 2.442.479.800 realisasi Rp. 2.340.774.532 (95,84%), fisik 100%. Secara terinci terdiri dari :

- Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, dengan pagu dana Rp. 154.509.100 realisasi Rp. 148.851.162 (96,34%), fisik 100%.
- Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Perhutanan Sosial di UPTD. KPH. Bali Timur, dengan pagu dana Rp. 6.107.700 realisasi Rp. 6.089.900 (99,71%), fisik 100%.
- Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Perhutanan Sosial di UPTD. KPH. Bali Barat, dengan pagu dana Rp. 10.500.000 realisasi Rp. 10.490.000 (99,90%), fisik 100%.
- Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali, di UPTD. KPH. Bali Utara (Sumber DAK), dengan pagu dana Rp. 623.787.000 realisasi Rp. 598.009.010 (95,87%), fisik 100%.
- Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali, di UPTD. KPH. Bali Timur (Sumber DAK), dengan pagu dana Rp. 623.789.000 realisasi Rp. 567.729.160 (91,01%), fisik 100%.
- Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali, di UPTD. KPH. Bali Selatan (Sumber DAK), dengan pagu dana Rp. 623.787.000 realisasi Rp. 615.557.760 (98,68%), fisik 100%.
- Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali, di UPTD. KPH. Bali Barat (Sumber DAK), dengan pagu dana Rp. 400.000.000 realisasi Rp. 394.047.540 (98,51%), fisik 100%.

3) Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan adalah Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan dengan rincian pelaksanaan:

- Target 4,93% (831,98 Ha).
- Realisasi 4,11% (693,42 Ha).
- Capaian Kinerja 83,37%.

Kegiatan dan Program yang mendukung sebagai berikut :

1) Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, (Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara, Bali Timur, Bali Selatan, Bali Barat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ngurah Rai) dengan pagu dana Rp. 764.577.682 realisasi Rp. 690.846.905 (90,36%), fisik 100%.

   Secara terinci terdiri dari :

- Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, di Dinas Kehutanan, dengan pagu dana Rp. 383.590.270 realisasi Rp. 339.997.437 (88,64%), fisik 100%.
- Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, di UPTD. KPH. Bali Utara, dengan pagu dana Rp. 60.641.536 realisasi Rp. 58.037.200 (95,71%), fisik 100%.
- Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, di UPTD. KPH. Bali Timur, dengan pagu dana Rp. 35.877.300 realisasi Rp. 35.877.300 (%), fisik 100%.
- Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, di UPTD. KPH. Bali Selatan, dengan pagu dana Rp. 43.459.200 realisasi Rp. 29.409.200 (67.67%), fisik 100%.
- Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, di UPTD. KPH. Bali Barat, dengan pagu dana Rp. 60.105.150 realisasi Rp. 58.198.000 (96,83%), fisik 100%.
- Perlindungan Hutan, Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan/ Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan, di UPTD. Tahura Ngurah Rai, dengan pagu dana Rp. 42.088.000 realisasi Rp. 41.916.400 (99,59%), fisik 100%.

Rencana Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2019

Sasaran Strategis		Target	Strategi	
Uraian	**Indikator Kinerja**	**2019**	**Kebijakan**	**Program**
Menurunnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan; (150 Ha.)/(4,99%)	Persentase Penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan.	4,99%. (150 ha).	Meningkatkan Rehabilitasi hutan dan Lahan.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.
Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan. (831,98 Ha.)/(4,93%)	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan.	4,93% (831,98 Ha).	Meningkatkan perlindungan dan keamanan hutan serta konservasi keanekaragaman hayati.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Target danRealisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kehutanan Tahun 2019

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	RP.	%	VOLUME	%	RP.	%
	Dinas Kehutanan	16 Keg.	100	1,858,928,646	100	16 Keg.	100	1,677,129,145	90.22
A.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	14 Keg.	100	1,320,829,276	100	14 Keg.	100	1,188,280,546	89.96
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Keg.	100	450,000	100	1 Keg.	100	315,000	70
2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Keg.	100	85,520,000	100	1 Keg.	100	71,993,712	84.18
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	100	110,398,000	100	1 Keg.	100	110,224,000	99.84
4	Penyediaan alat tulis kantor	1 Keg.	100	27,419,800	100	1 Keg.	100	27,419,800	100
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Keg.	100	22,490,400	100	1 Keg.	100	22,490,400	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg.	100	3,200,000	100	1 Keg.	100	3,200,000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Keg.	100	13,946,000	100	1 Keg.	100	13,946,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	1 Keg.	100	36,050,000	100	1 Keg.	100	35,875,000	99.51
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 Keg.	100	140,190,000	100	1 Keg.	100	122,655,630	87.49
10	Upacara Keagamaan	1 Keg.	100	52,796,000	100	1 Keg.	100	52,700,000	99.82
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Keg.	100	383,447,496	100	1 Keg.	100	366,529,697.63	95.59
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Keg.	100	23,449,000	100	1 Keg.	100	23,430,000	99.92
13	Peningkatan kualitas tenaga khusus kehutanan	1 Keg.	100	289,045,080	100	1 Keg.	100	227,213,761.54	78.61
14	Perencanaan Pembangunan Kehutanan	1 Keg.	100	132,427,500	100	1 Keg.	100	110,287,545	83.28
B.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.	1 Keg.	100	154,509,100	100	1 Keg.	100	148,851,162	96.34
1	Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	1 Keg.	100	154,509,100	100	1 Keg.	100	148,851,162	96.34
C.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan. Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	1 Keg.	100	383,590,270	100	1 Keg.	100	339,997,437	88.64
1	Perlindungan Hutan. Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan / Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan	1 Keg.	100	383,590,270	100	1 Keg.	100	339,997,437	88.64
	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	14 Keg.	100	609,421,376	100	14 Keg.	100	59,014,690,826	96.84
A.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	2 Keg.	100	410,500,000	100	2 Keg.	100	404,537,540	98.55
1	Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali	1 Keg.	100	400,000,000	100	1 Keg.	100	394,047,540	98.51

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	RP.	%	VOLUME	%	RP.	%
2	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Perhutanan Sosial	1 Keg.	100	10,500,000	100	1 Keg.	100	10,490,000	99.9
B.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan. Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	12 Keg.	100	198,921,376	100	12 Keg.	100	185,609,368.26	93.31
1	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Keg.	100	24,700,000	100	1 Keg.	100	14,973,573	60.62
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	100	30,072,104	100	1 Keg.	100	30,000,097.63	99.76
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 Keg.	100	2,713,918	100	1 Keg.	100	2,688,700	99.07
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Keg.	100	7,501	100	1 Keg.	100	737,000	98.25
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg.	100	1,108,000	100	1 Keg.	100	1,107,600	99.96
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Keg.	100	1,200,000	100	1 Keg.	100	1,200,000	100
7	Upacara Keagamaan	1 Keg.	100	8,750,000	100	1 Keg.	100	8,695,000	99.37
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Keg.	100	1,250,000	100	1 Keg.	100	1,250,000	100
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Keg.	100	1,200,000	100	1 Keg.	100	1,200,000	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Keg.	100	37,500,000	100	1 Keg.	100	35,987,300	95.97
11	Peningkatan kualitas tenaga khusus kehutanan	1 Keg.	100	29,572,104	100	1 Keg.	100	29,572,097.63	100
12	Perlindungan Hutan. Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan / Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan	1 Keg.	100	60,105,150	100	1 Keg.	100	58,198,000	96.83
	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	11 Keg.	100	1,022,521,068	100	11 Keg.	100	978,428,109.41	95.69
A.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	1 Keg.	100	623,787,000	100	1 Keg.	100	598,009,010	95.87
1	Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali	1 Keg.	100	623,787,000	100	1 Keg.	100	598,009,010	95.87
B.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan. Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	10 Keg.	100	398,734,068	100	10 Keg.	100	380,419,099.41	95.41
1	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Keg.	100	27,480,000	100	1 Keg.	100	18,301,916	66.6
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	100	34,572,304	100	1 Keg.	100	34,555,197.63	99.95
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 Keg.	100	7,250,000	100	1 Keg.	100	6,975,900	96.22

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	RP.	%	VOLUME	%	RP.	%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Keg.	100	4,737,000	100	1 Keg.	100	4,737,000	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Keg.	100	2,520,000	100	1 Keg.	100	2,520,000	100
6	Upacara Keagamaan	1 Keg.	100	25,000,000	100	1 Keg.	100	25,000,000	100
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Keg.	100	5,400,000	100	1 Keg.	100	5,400,000	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Keg.	100	43,600,000	100	1 Keg.	100	37,359,300	85.69
9	Peningkatan Kualitas Tenaga Khusus Kehutanan	1 Keg.	100	187,533,228	100	1 Keg.	100	187,532,585.78	100
10	Perlindungan Hutan. Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan / Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan	1 Keg.	100	60,641,536	100	1 Keg.	100	58,037,200	95.71
	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	11 Keg.	100	839,803,888	100	11 Keg.	100	806,520,423.63	96.04
A.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	1 Keg.	100	623,787,000	100	1 Keg.	100	615,557,760	98.68
1	Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali	1 Keg.	100	623,787,000	100	1 Keg.	100	615,557,760	98.68
B.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan. Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	10 Keg.	100	216,016,888	100	10 Keg.	100	190,962,663.63	88.4
1	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Keg.	100	15,000,000	100	1 Keg.	100	8,489,932	56.6
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	100	30,757,688	100	1 Keg.	100	30,757,681.63	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 Keg.	100	15,000,000	100	1 Keg.	100	15,000,000	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Keg.	100	3,500,000	100	1 Keg.	100	3,500,000	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Keg.	100	1,800,000	100	1 Keg.	100	1,797,500	99.86
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg.	100	1,500,000	100	1 Keg.	100	1,500,000	100
7	Upacara Keagamaan	1 Keg.	100	22,500,000	100	1 Keg.	100	19,339,500	85.95
8	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Keg.	100	2,500,000	100	1 Keg.	100	2,460,000	98.4
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Keg.	100	80,000,000	100	1 Keg.	100	78,708,850	98.39
10	Perlindungan Hutan. Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan / Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan	1 Keg.	100	43,459,200	100	1 Keg.	100	29,409,200	67.67

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	RP.	%	VOLUME	%	RP.	%
	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	14 Keg.	100	929,252,789	100	14 Keg.	100	868,829,718.89	93.5
A.	Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	2 Keg.	100	629,896,700	100	2 Keg.	100	573,819,060	91.1
1	Pengelolaan dan Pengamanan Hutan di Provinsi Bali	1 Keg.	100	623,789,000	100	1 Keg.	100	567,729,160	91.01
2	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta Perhutanan Sosial	1 Keg.	100	6,107,700	100	1 Keg.	100	6,089,900	99.71
B.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan. Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	12 Keg.	100	299,356,089	100	12 Keg.	100	295,010,658.89	98.55
1	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Keg.	100	19,200,000	100	1 Keg.	100	17,000,766	88.55
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	100	32,537,688	100	1 Keg.	100	32,537,597.63	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 Keg.	100	9,607,000	100	1 Keg.	100	9,607,000	100
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Keg.	100	3,605,584	100	1 Keg.	100	3,605,400	99.99
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Keg.	100	2,400,000	100	1 Keg.	100	2,400,000	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg.	100	500	100	1 Keg.	100	500,000	100
7	Upacara Keagamaan	1 Keg.	100	16,000,000	100	1 Keg.	100	16,000,000	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Keg.	100	3,500,000	100	1 Keg.	100	3,500,000	100
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Keg.	100	4,870,000	100	1 Keg.	100	4,870,000	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Keg.	100	141,686,413	100	1 Keg.	100	139,540,497.63	98.49
11	Peningkatan Kualitas Tenaga Khusus Kehutanan	1 Keg.	100	29,572,104	100	1 Keg.	100	29,572,097.63	100
12	Perlindungan Hutan. Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan / Pemanfaatan Hutan serta Penertiban Hasil Hutan	1 Keg.	100	35,877,300	100	1 Keg.	100	35,877,300	100
	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	13 Keg.	100	359,427,688	100	13 Keg.	100	329,476,675.63	91.67
A.	Program Peningkatan Perlindungan Hutan. Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	13 Keg.	100	359,427,688	100	13 Keg.	100	329,476,675.63	91.67
1	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	1 Keg.	100	22,092,000	100	1 Keg.	100	12,070,158	54.64
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Keg.	100	30,072,688	100	1 Keg.	100	30,053,397.63	99.94
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 Keg.	100	7,000,000	100	1 Keg.	100	6,822,800	97.47

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	RP.	%	VOLUME	%	RP.	%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Keg.	100	3,500,000	100	1 Keg.	100	3,166,750	90.48
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Keg.	100	2,328,000	100	1 Keg.	100	2,318,500	99.59
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Keg.	100	1,084,000	100	1 Keg.	100	1,084,000	100
7	Upacara Keagamaan	1 Keg.	100	15,000,000	100	1 Keg.	100	15,000,000	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Keg.	100	4,000,000	100	1 Keg.	100	4,000,000	100
9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Keg.	100	4,000,000	100	1 Keg.	100	4,000,000	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 Keg.	100	50,750,000	100	1 Keg.	100	49,448,350	97.44
11	Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura Ngurah Rai	1 Keg.	100	75,000,000	100	1 Keg.	100	69,924,830	93.23
12	Pembuatan Desain Tapak Taman Mangrove di Tahura Ngurah Rai	1 Keg.	100	102,513,000	100	1 Keg.	100	89,671,490	87.47
13	Perlindungan Hutan. Pengendalian Tata Batas dan Penggunaan / Pemanfaatan Hutan Serta Penertiban Hasil Hutan	1 Keg.	100	42,088,000	100	1 Keg.	100	41,916,400	99.59

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan yang belum optimal karena masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan belum optimal karena masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan penebangan liar (illegal loging);
3. Pemantapan kawasan hutan belum optimal karena masih banyaknya permasalahan tata batas;
4. Tertib tata usaha kayu pada industri hasil hutan belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu;
5. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan belum optimal karena belum tersedianya data base yang akurat.
6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum optimal karena kurangnya komitmen dan persepsi yang berbeda terhadap pengelolaan hutan
7. Pembinaan dan pengawasan penangkaran/lembaga konservasi serta peredaran flora dan fauna belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang konservasi

8. Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kehutanan dan pelayanan belum optimal karena terbatasnya tenaga teknis di bidang kehutanan
9. Pemenuhan Sarana Prasarana pengelolaan hutan yang belum memadai

Solusi:

1. Menurunkan luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.
2. Mengurangi Kerusakan Hutan melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
3. Meningkatkan Kejelasan Jalur Tata Batas Kawasan Hutan melalui Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
4. Meningkatkan Tertib Tata Usaha Kayu Industri Hasil Hutan melalui Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
5. Meningkatkan Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan melalui Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.
7. Meningkatkan pembinaan dan Pengawasan Penangkaran/Lembaga Konservasi serta Peredaran Flora dan Fauna melalui Program Peningkatan Perlindungan Hutan, Pemanfaatan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
8. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kehutanan dan pelayanan tenaga teknis di bidang kehutanan, melalui Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja.
9. Meningkatkan Pemenuhan Sarana Prasarana pengelolaan hutan, melalui Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tergabung dalam struktur Dinas Tenaga Kerja dan ESDM, dengan tugas dan fungsi sebagai pendukung kegiatan pariwisata dan pembangunan di Bali, dengan kewenangan provinsi untuk menangani Air Tanah, Pertambangan, Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan.

Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Pengembangan Kegiatan ketenagalistrikan
- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan
- Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pengembangan dan Pemantauan Air Tanah dan Geologi Lingkungan
- Pengelolaan dan Pengembangan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral kegiatan :
    - Peningkatan Rasio elektrifikasi Rumah Tangga yang berlistrik dan laporan pembangunan kegiatan ketenagaklistrikan, laporan pemutakhiran data energi dan ketenaglistrikan, serta terbentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali dengan realisasi fisik sebesar 95,76% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 221.024.946 (89,82%);
    - Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Pembinaan usaha ketenagalistrikan dan energi dengan realisasi fisik sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 170.753.160 (86,61%);
    - Terbinanya kegiatan usaha pertambangan sehingga terwujud kegiatan pertambangan yang baik dan benar serta tersedianya rekomendasi teknis izin usaha pertambangan sengan realisasi fisik sebesar 80,01% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.899.800 (79,53%);
    - Tersedianya data pemantauan kualitas dan kuantitas air tanah melalui sumur pantau, dan terlaksananya kegiatan konservasi air tanah dengan realisasi fisik sebesar 79,82% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.635.332 (72,66%);
    - Tersedianya data terkini kegiatan pertambangan, Produktivitas bahan tambang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembangunan di Provinsi Bali dengan realisasi fisik sebesar 93,51% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 172.037.214 (89,30%);
    - Tersedianya rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah, terbinanya kegiatan pengambilan dan pengusahaan air tanah serta terbangunnya sumur resapan dengan realisasi fisik sebesar 96,46% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 348.955.028 (96,25%).

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai : PNS/CPNS : 139 Orang

1. Pegawai Berdasarkan Kualitas Pendidikan :
    SD : 0 Orang

SLTP : 0 Orang
SLTA : 28 Orang
D3 : 6 Orang
Sarmud : 0 Orang
S1 : 82 Orang
S2 : 23 Orang

2. Pangkat/Golongan :
   I : -
   II : 10 Orang
   III : 87 Orang
   IV : 42 Orang
3. Jumlah Pejabat Struktural
   28 Orang
   Eselon II : 1 orang
   Eselon III : 6 orang
   Eselon IV : 21 orang
4. Jumlah Pejabat Fungsional
   56 orang

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Pengelolaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Pengembangan Kegiatan ketenagalistrikan	1 laporan, 1 bh RUED	100	246,078,000	100	1 laporan, 1 bh RUED	95,75	221,024,946	89,82
2	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan	1 laporan, 225 buah	100	197,150,000	100	1 laporan, 225 buah	98.0	170,753,160	86,61
3	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50 buah	100	149,500,000	100	50 buah	80,01	118,899,800	79,53
b.	Pengembangan dan Pemantauan Air Tanah dan Geologi Lingkungan	60 prsh	100	144,000,000	100	60 prsh	79,82	104,653,332	72,66
1	Pengelolaan dan Pengembangan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	40 prsh	100	192,660,700	100	40 prsh	93,51	172,037,214	89,30
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah	225 buah	100	362,552,416	100	225 buah	96,46	348,955,028	96,25

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana seperti gedung dan perlengkapan kantor lainnya yang digunakan mencukupi.

Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

a. Pertambangan Mineral Batuan Bukan Logam dan Batuan
    - IUP OP Batuan perseorangan di Bali, Pemegang ijinnya lemah dalam hal Administrasi dan IT;
    - Pemegang Ijin tidak bisa memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan produksi, penjualan, tri wulan, semesteran dan tahunan kepada Pemerintah;
    - Masih ada pertambangan tanpa ijin.
b. Ketenagalistrikan
    - Kurang Sosialisasi Peraturan mengenai Ketenagalistrikan
c. Energi Baru Terbarukan
    - Kurangnya Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
    - Bauran Energi Baru Terbarukan yang masih kecil
d. Geologi dan Air dan Air Tanah
    - Pemegang SIPA tidak menyampaikan laporan produksi, belum optimal melaksanakan konservasi air tanah;
    - Tarif pajak air tanah yang dipungut oleh kabupaten/kota relatif jauh lebih murah dari air PDAM;
    - PDAM belum bisa menjamin ketersediaan air untuk dunia usaha, sehingga Air Tanah terbatas dari segi kualitas dan kuantitas;
    - Sumur-sumur existing untuk kegiatan usaha banyak yang belum memiliki SIPA.

Solusi :

Solusi sebagai upaya pemecahan masalah antara lain :

a. Agar Dibuatkan regulasi terkait pengelolaan IUP OP Batuan yang luasnya dibawah 5 ha (sekala kecil).
b. Adanya Sosialisasi peraturan mengenai ketenagalistrikan
c. Adanya dana dari pusat dalam pendanaan untuk pemanfaatan EBT, Adanya Bantuan pemerintah pusat dalam implementasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (sosialisasi).
d. Pengawasan yang dioptimalkan diusulkan di bentuk UPTD Pengawasan dan Pengendalian ESDM;
    - Akan Diajukan Pergub NPA;
    - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait;
    - Mengoptimalkan pemanfaatan air permukiman di hilir dengan pengolahan SPAM;
    - Peningkatan monitoring dan inspeksi oleh aparat Hukum.

6. Industri dan Perdagangan

6.1. Urusan Perindustrian

Berdasarkan peraturan yang ada, secara kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali menangani Industri Menengah, tetapi mengingat keberadaan IKM di Bali yang merupakan lokus utama yang tersebar di Kabupaten se-Provinsi Bali maka kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan serta tenun/kain tradisional. Untuk meningkatkan peran industri kecil dan menengah, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara lain meliputi :

a) Dalam rangka keberpihakan terhadap industri kecil dan menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
b) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas, dan
c) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Dalam lima tahun terakhir (2015 – 2019) perkembangan jumlah unit usaha industri Provinsi Bali mengalami peningkatan rata-rata 6,28% per tahun, dimana pada tahun 2015 jumlah unit usaha industri sebanyak 12.084 unit usaha dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 15.884 unit usaha.

Secara terinci perkembangan Industri Kecil Provinsi Bali seperti pada Tabel 1.

Perkembangan Industri di Bali dalam 5 Tahun (2015 – 2019)

NO	TAHUN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp. 000)	NILAI PRODUKSI (Rp. 000)	NILAI BB/BP (Rp. 000)
1	2015	12.326	93.180	3.130.497.937	6.953.338.467	3.798.110.202
2	2016	12.730	96.601	3.392.041.722	7.183.291.023	3.893.799.198
3	2017	14.992	103.969	4.570641.753	18.717.383.919	7.919.403.536
4	2018	15.216	104.193	4.066.078.917	9.176.136.045	4.099.843.362

5	2019	15.884	104.417	4.066.398.819	9.271.813.267	4.151.346.693

Untuk mendukung kebijakan pengembangan Industri di Provinsi Bali, dilaksanakan pengelolaan Program Pengembangan Industri.

Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Industri dengan Kegiatan :

1. Pengembangan Produk Industri Unggulan
2. Pameram pada Pesta Kesenian Bali (PKB)
3. Pendataan Industri di Bali
4. Pembinaan Pengawasan Industri Pangan
5. Temu Bisnis Produk Industri
6. Peningkatan Penyediaan Bahan Baku Industri

Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Indikator kinerja kunci urusan industri adalah :

1. Pertambahan jumlah Industri Besar ; 8,77%
2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait; 100 %
3. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP; 0% (Perda RPIP belum belum selesai, masih menunggu Perda RTRW yang belum disahkan)
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait; 0%
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait; 0%
6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini; tersedia data informasi bahan baku dan penolong, produksi, tenaga kerja dan investasi
7. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2018 ; capaian kinerja 6.07% (atas dasar harga berlaku 2018 sumber BPS Bali)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data PNS menurut Pendidikan :

Pasca Sarjana (S2) sebanyak	5	Orang
Sarjana (S1) sebanyak	11	Orang
SLTA	3	Orang
Tenaga Kontrak	4	Orang

Sedangkan data PNS menurut golongan adalah :

Golongan IV	7	Orang
Golongan III	12	Orang

Data pejabat struktural :

Eselon II	0	Orang
Eselon III	2	Orang
Eselon IV	4	Orang
Penyuluh Perindag	6	Orang
Staf	7	Orang

Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

1) Pogram pengembangan Industri kegiatan:
   a. Pengembangan Produk Industri Unggulan dengan Pagu sebesar Rp.2.871.403.052 Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 77,35% (Rp.2.220.990.480) dengan hasil sebanyak 135 Perajin yang dibina untuk meningkatkan kualitas produknya dan 7 Kali Pameran diluar daerah sehingga terpromosikannya produk 22 perajin. Sedangkan pameran didalam daerah dilakukan di Bajra Sandi dengan mempromosikan produk 100 Orang Perajin dan mengikut sertakan juga promosi produk 4 Orang Perajin pada Pameran Pesata Kesenian Bali.
   b. Pameran Pada Pesta Kesenian Bali (PKB) dengan Pagu sebesar Rp.290.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 95,51% (Rp.276.969.650) dengan hasil sebanyak 325 Perajin yang terpromosikan produknya pada pameran PKB.
   c. Pendataan Industri di Bali dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 45,23% (Rp. 67.853.200) dengan hasil 10 Buku Data Industri Bali yang tersedia tepat waktu.
   d. Pembinaan pengawasan industri pangan dengan Pagu sebesar Rp.50.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 94,48% (Rp.47.240.000) dengan hasil sebanyak 35 industri pangan yang dibina dan diawasi menaati aturan.

e. Temu Bisnis Produk Industri dengan Pagu sebesar Rp.167.530.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 77,91% (Rp.130.523.541) dengan hasil sebanyak 53 MoU Pemasaran Produk industri Bali dengan pelaku usaha Sarinah, Krisna Oleh-Oleh, Aprindo, APBBI DPD Bali.

f. Peningkatan Penyediaan Bahan Baku Industri dengan Pagu sebesar Rp.167.300.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 76,41% (Rp. 127.842.545) dengan hasil sebanyak 2 MoU Bahan Baku Kayu dan Benang dengan UD Seno Sejati Meubel Nganjuk Jawa Tengah (Bahan Baku Kayu) dan PT Laku Mas Atau PT Laksana Kurnia Sejati Tanggerang (Bahan Baku Benang).

2) Pogram Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan dengan kegiatan:

Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan dengan Pagu sebesar Rp.100.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 95,44% (Rp. 95.443.800) dengan hasil Jumlah Industri Olahan Pangan yang Mendapat Pendampingan sebanyak 40 IKM dan jumlah industri olahan pangan didampingi yang sesuai standar sebanyak 10 IKM.

Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada sub sektor Industri digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Industri Tahun 2019

NO	PROGRAM KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP.)	%	VOLUME	%	(RP.)	%
A	Pogram Pegembangan Industri								
1	Pengembangan Produk Industri Unggulan	121 Perajin, 45 perajin	100	2.871.403.052	100	121 Perajin, 45 perajin	100	2.220.990.480	77,35
2	Pameran Pada Pesta Kesenian Bali (PKB)	215 Perajin	100	290.000.000	100	325 Perajin	100	276.969.650	95,51
3	Pendataan Industri di Bali	10 Buku	100	150.000.000	100	10 Buku	100	67.853.200	22,82
4	Pembinaan pengawasan industri pangan	35 Industri	100	50.000.000	100	35 Industri	100	47.240.000	94,48
5	Temu Bisnis Produk Industri	2 Kali	100	167.530.000	100	2 Kali	100	130.523.541	77,91
6	Peningkatan Penyediaan Bahan Baku Industri	2 Jenis	100	167.300.000	100	2 Jenis	100	125.964.045	75,29
B	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan								
7	Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan	40 IKM	100	100.000.000	100	25%	100	95.443.800	95,44

Keseuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 disebutkan bahwa Visi Pemerintah Provinsi adalah; “Nangun

Sat Kerthi Loka Bali" yang dilandasi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat Bali.

Berdasarkan kedua puluh dua Misi Kepala Daerah yang terpilih, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali mendukung Misi Pertama **"Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali"** dan mengampu misi Ke enambelas yaitu **"Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kab/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas"** dan misi ke tujuh belas **"Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali"**.

Mengacu pada Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 2023, tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, tahun 2018 – 2023, yaitu:

a. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal
b. Meningkatnya kualitas IKM branding bali berorientasi ekspor

Sasaran sektor industri dan perdagangan tahun 2018 - 2023, yaitu:

a. Terjaganya stabilitas harga barang pokok
b. Meningkatnya penggunaan produk lokal Bali
c. Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen
d. Meningkatnya Nilai ekspor
e. Jumlah barang yang tersertifikasi
f. Meningkatnya Produktifitas produk industri
g. Jumlah industri olahan pangan yang tumbuh dan berkembang

Kondisi Sarana Dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Provinsi Bali masih perlu ditingkatkan berupa Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran seperti kendaraan operasional, komputer, laptop, meja dan kursi pegawai, dll.

Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

1. Lemahnya daya saing kualitas produk industri
2. Terbatasnya bahan baku yang tersedia tergantung pada luar daerah

3. Masih rendahnya penguasaan teknologi
4. Kurangnya promosi

S o l u s i

1. Meningkatkan kualitas produk industri, meningkatkan ragam desain dalam merebut pasar, meningkatkan pemahaman Industri terkait dengan mekanisme pendaftaran hasil karya, melakukan pendampingan kepada Industri produk kayu yang belum memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), meningkatkan kemasan produk pangan sesuai standard, dan melakukan pengawasan secara periodik terhadap usaha industri
2. Memfasilitasi kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku
3. Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
4. Memfasilitasi pemasaran produk-produk industri.

6.2. Urusan Perdagangan

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui Kebijakan dan Pengendalian yang diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektifitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian usaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting adalah jenis barang kebutuhan pokok yaitu : Beras, Kedelai, Cabe, Bawang merah, Gula, Minyak goreng, Tepung terigu, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam Ras, Ikan Segar: Bandeng, Kembung dan Tongkol. Dan jenis Barang Penting lainnya adalah Benih Padi, Pupuk, Gas Elpiji (3 Kg), Triplek, Semen, Besi Baja, Baja Ringan. Dalam pelaksanaan Pemantauan Perkembangan harga, dipantau 27 jenis bahan pokok di Pasar Tradisional dan Pasar Modern, serta pemantauan ketersediaan dilakukan pada Distributor.

Adapun Perkembangan harga kebutuhan barang Pokok menunjukkan :

- Terjadinya lonjakan harga pada setiap hari raya, libur Nasional, Tahun Baru karena terkait dengan ketersediaan dan permintaan yang meningkat disebabkan oleh kunjungan wisatawan dan kebutuhan hari raya.
- Ketika cuaca buruk yang berpotensi terjadinya kekurangan persediaan yang disebabkan karena gagal panen. Hal ini terjadi biasanya terhadap produk hortikultura seperti bawang merah dan cabai, yang terjadi mulai bulan Nopember s.d. Februari.

Untuk menjaga ketersediaan, terutama untuk Komoditi Agro dan menjaga Stabillitas Harga, maka diadakan Pasar Murah di Kabupaten/Kota se-Bali, dan Pasar tani. Dalam rangka efektivitas Perdagangan dan Pengembangan serta penguatan UMKM, maka dilakukan Pembinaan Pasar Tradisional sampai dengan Tahun 2019 sejumlah 106 pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha serta memberikan perhatian khusus kepada perusahaan kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan serta menghindarkan konsumen dari akses negatif terhadap unsur keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L) atas penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau serta dalam rangka membangun iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dalam transaksi Perdagangan Konsumen memegang peranan yang sangat penting sehingga Pemberdayaan Konsumen diperlukan dengan jalan menjadikan masyarakat sebagai Konsumen Cerdas yaitu: Teliti sebelum membeli, pastikan produk berstandar SNI, Perhatikan Label dan masa kadaluwarsa, Beli sesuai dengan Kebutuhan bukan sesuai dengan Keinginan. Tahun 2019, produk SNI wajib yang beredar yang diawasi adalah mainan anak-anak, pakaian bayi, melamin peralatan makanan dan minuman, air mineral kemasan, kompor gas, pompa air listrik, saklar, kabel listrik, penanak nasi dan lampu hemat energi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui Kebijakan dan Pengendalian di Bidang Ekspor dan Impor. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri dan peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.

Dalam lima tahun terakhir (2014 – 2018) realisasi ekspor daerah Bali berdasarkan SKA yang diterbitkan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12,07 %, dimana pada tahun 2014 nilai ekspor daerah Bali sebesar US$.503.826.213,14 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US$.839.550.122.90. Secara terinci nilai ekspor Daerah Bali per komoditi dalam lima tahun (tahun 2014-2018) seperti tabel.

Tabel Perkembangan Realisasi Ekspor Daerah Bali dalam 5 Tahun (2014-2018)

KOMODITI	2014 (US$)	2015 (US$)	2016 (US$)	2017 (US$)	2018 (US$)
Hasil Kerajinan	220,037,839.58	203,369,660.39	200,766,824.47	220,608,525.27	252.346.577,779
Hasil Industri	166,203,889.31	156,985,859.13	146,089,968.57	126,233,580.55	159.979.599,60

KOMODITI	2014 (US$)	2015 (US$)	2016 (US$)	2017 (US$)	2018 (US$)
Hasil Pertanian	113,068,070.87	116,980,536.76	222,524,867.75	326,574,224.32	423.814.562,67
Hasil Perkebunan	2,580,510.43	1,908,933.68	1,385,358.41	1,562,613.93	670.892,78
Lain-lain	1,935,902.95	2,157,793.84	3,509,881.05	4,615,534.45	2.738.490,06
TOTAL	503,826,213.14	481,402,783.80	574,276,900.25	679,594,478.52	839.550.122,90

Adapun negara tujuan ekspor daerah Bali sudah mencapai 104 negara dengan jumlah eksportir sebanyak 485 perusahaan, dimana pertumbuhan rata-rata eksportir dalam lima tahun terakhir (2014 – 2018) sebesar 10.96 % per tahun.

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Perlindungan Konsumen, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :

- Pelaksanaan Pasar Murah / Operasi Pasar
- Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pelaku Usaha Distribusi
- Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan:

- Peningkatan Pengawasan Terhadap Barang yang Beredar.
- Peningkatan Penerapan Tertib Niaga
- Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan:

1. Pemasaran Produk Unggulan Daerah Bali
2. Pengendalian Impor
3. Peningkatan Pelayanan Surat keterangan Asal (SKA)

Program Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang, dengan kegiatan :

- Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen

Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Indikator Kinerja Kunci urusan perdagangan adalah:

a) Pertumbuhan nilai ekspor non migas tahun 2019 ; 23,54%
b) Persentase penanganan pengaduan konsumen ;100%
c) Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku;100%
d) Persentase tertib usaha; 100%
e) Persentase kinerja realisasi pupuk; 80,06%
f) Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100%
g) Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok; 169%
h) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ; capaian kinerja : 8,45 % (atas dasar harga berlaku 2018 sumber BPS Proinsi Bali)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data PNS menurut Pendidikan :

Pasca Sarjana (S2) sebanyak	18 Orang
Sarjana (S1) sebanyak	20 Orang
Sarjana Muda	0 Orang
SLTA SLTP	17 Orang 3 Orang
Tenaga Kontrak	26 Orang

Sedangkan data PNS menurut golongan adalah :

Golongan IV	14 Orang
Golongan III	39 Orang
Golongan II	5 Orang

Data pejabat struktural :

Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Orang
Eselon IV	14 Orang

Penguji Mutu barang	2 Orang
Staf	36 Orang

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Efiesiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan:

- Pasar Murah/Operasi Pasar dengan Pagu sebesar Rp. 36.110.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 99,72% (Rp.36.010.000) dengan hasil pelaksanaan pasar murah sebanyak 24 Kali sehingga Fluktuasi harga kebutuhan barang pokok dan penting berada dibawah 10%.
- Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pelaku Usaha Distribusi dengan Pagu sebesar Rp. 78.588.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 99,72% (Rp.78.015.560) dengan hasil, sebanyak 50 Pelaku Usaha meningkat pengetahuannya tentang regulasi pendaftaran pelaku usaha distribusi dan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 79 , 80 , 97 dan 99 tahun.
- Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Pagu sebesar Rp. 28.590.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 98,47% (Rp.28.152.200) dengan hasil Jumlah Kesepakatan kerjasama pemasaran produk yang terjalin antara Pelaku Usaha dengan UKM sebanyak 6 Kesepakatan Pemasaran.

Adapun realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Program Peningkatan digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2019

No.	Program Kegiatan	Target				Realisasi			
		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
1.	Pelaksanaan Pasar Murah/ Operasi Pasar	11 kali	100	36.110.000	100	11 kali	100	36.010.000	99,72
2	Peningkatan Sarana Perdagangan dan Pelaku Usaha Distribusi	50 Orang	100	78.588.000	100	50 Orang	100	78.015.560	99,72
3	Pemasaran Produk Dalam Negeri	1 Kali	100	28.590.000	100	6 Kesepakatan	100	28.152.200	98,47

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :
   - Pemasaran Produk Unggulan Daerah Bali dengan Pagu sebesar Rp.176.600.000 Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 92.45% (Rp. 163.261.188) dengan hasil, terpromosinya produk berorientasi ekspor 4 pelaku usaha pada pameran trade expo Indonesia. Melalui anggaran APBN terpromosinya produk berorientasi ekspor 2 pelaku usaha tenun.

- Pengendalian Impor dengan Pagu sebesar Rp.50.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 97,26% (Rp.48.628.285) dengan hasil Pengendalian impor ke 100 importir pemilik Angka Pengenal Impor (API).
- Peningkatan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan Pagu sebesar Rp.251.546.102. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 99,74% (Rp.250.903.472) dengan hasil Jumlah SKA yang diterbitkan sebanyak 34.163 SKA, jumlah komplain dagang yang ditangani sebanyak 6 Komplin dagang dan jumlah eksportir baru sebanyak 58 Eksportir

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :

Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen dengan Pagu sebesar Rp.100.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan 90,30% (Rp.135.454.388) dengan hasil laboratorium UPT BPSMB Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terakreditasi.

Adapun realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Program Peningkatan adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program pada Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP.)	%	VOLUME	%	(RP.)	%
A	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor								
1	Pemasaran Produk Unggulan Daerah Bali	1 Kali	100	176.600.000	100	4 Pelaku Usaha	100	163.261.188	92.45
2	Pengendalian Impor	100 Importir	100	50.000.000	100	100 Importir	100	48.628.285	97,26
3	Peningkatan Pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA)	531 Eksportir, 10 Kasus	100	251.546.102	100	24.000 SKA, 10 Kasus, 20 Eksportir	100	250.903.472	99,74
B	Program Pengembangan Pelayanan Penguji Mutu Barang								
1	Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen	3 Komoditi (Kopi, Panili, Kakao	100%	150.000.000	100	3 Komoditi (Kopi, Panili, Kakao	100	135.454.388	90,30

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Pengawasan Terhadap Barang Yang Beredar dengan Pagu sebesar Rp.45.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 100% (Rp.45.000.000) dengan hasil produk SNI yang beredar yang diawasi (Kabel listrik, ACCU, Tepung Terigu, Regulator, Helm, Mainan Anak,Pakaian Bayi, Semen, Lampu

Hemat Energi, Ban Sepeda Motor, Kloset Duduk, Air Minum Dalam Kemasan, Tusuk Kontak serta produk-produk yang di lengkapi kartu manual garansi).

2. Peningkatan Penerapan Tertib Niaga dengan Pagu sebesar Rp.35.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 99,3% (Rp.34.755.239) dengan hasil pelaku usaha dagang yang dibina sebanyak 85 Pelaku Usaha dan 47% pelaku usaha dagang yang sudah menerapkan tertib niaga.
3. Penguatan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK) dengan Pagu sebesar Rp.35.000.000. Realisasi Fisik 100% dan penyerapan Anggaran kegiatan sebesar 98,59% (Rp.34.506.464) dengan hasil Calon Anggota BPSK yang di rekrut sebanyak 15 Orang

Adapun realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Program Peningkatan adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Bidang Perlindungan Konsumen Tahun 2019

NO	PROGRAM KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP.)	%	VOLUME	%	(RP.)	%
A	Program Perlindungan Konsumen								
1	Peningkatan Pengawasan terhadap barang yang beredar	14 produk ber SNI	100	45.000.000	100	14 produk ber SNI	100	45.000.000	100
2	Peningkatan Penerapan Tertib Niaga	30 Pelaku Usaha	100	35.000.000	100	30 Pelaku Usaha	100	34.755.239	99,30
3	Penguatan Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen (BPSK)	15 Orang	100	35.000.000	100	15 Orang	100	34.506.464	98,59

Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan :

a) Perdagangan Dalam Negeri

1. Masih adanya fluktuasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting menjelang hari-hari besar keagamaan.
2. Masih kurangnya informasi perdagangan antar pulau
3. Masih rendahnya pemahaman pengelola pasar rakyat/pasar tradisional terhadap peraturan Perundang-Undangan
4. Masih kurangnya pemasaran dan promosi produk dalam negeri.
5. Masih kurangnya fasilitasi pemasaran produk lokal pada pasar tradisional/pasar rakyat dan pasar modern/toko swalayan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat baik produsen (Pelaku Usaha) maupun konsumen atas hak dan kewajibannya dalam mendistribusikan dan mengkonsumsi barang sesuai dengan standard yang berlaku

7. Dipasaran masih banyak diperdagangkan produk-produk yang sudah harus di tetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib namun kenyataanya tidak sesuai standar atau belum disertai garansi dari pabrik.
8. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan barang beredar dan jasa dan menambah petugas pengawas tertib niaga
9. Belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Provinsi sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,dimana kewenangan perlindungan konsumen menjadi kewenangan provinsi.

b) Perdagangan Luar Negeri

1. Masih kurangnya fasilitasi promosi di dalam dan luar negeri
2. Masih rendahnya kemampuan eksportir untuk mengakses pasar global
3. Masih rendahnya kualitas desain mutu produk ekspor
4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di Negara Tujuan Ekspor dan hasil perundingan perdagangan internasional
5. Kurangnya dukungan infrastruktur berupa tempat promosi bersama dan pelabuhan ekspor sehingga biaya logistik masih tinggi.
6. Kurangnya dukungan laboratorium untuk peningkatan mutu produk ekspor.

Solusi :

a) Perdagangan Dalam Negeri

1. Peningkatan volume Pasar Murah sampai ke Desa-Desa terutama Desa miskin untuk memberikan akses kebutuhan bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi harga yang bergejolak diperlukan peran Pusat Distribusi Provinsi Bali menjadi Pusat Logistic Provinsi untuk mendampingi peran Bulog dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dalam rangka menjaga ketersediaan dan Distribusi. Serta pentingnya tersedia informasi kebutuhan barang pokok dan barang penting antar pulau.
2. Untuk memotong mata rantai Perdagangan dan membentuk harga yang transparan perlu adanya pasar lelang.
3. Peningkatan pemahaman pengelola pasar rakyat/tradisional terhadap peraturan perundangan-undangan dan fasilitasi pemasaran/promosi produk lokal/dalam negeri dalam rangka peningkatan daya saing
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik produsen (Pelaku Usaha) maupun konsumen atas hak dan kewajibannya dalam mendistribusikan dan mengkonsumsi barang sesuai dengan standard yang berlaku.

5. Meningkatkan pengawasan karena dipasaran banyak di perdagangkan produk-produk yang sudah harus di tetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib namun kenyataanya tidak sesuai standar atau belum disertai garansi dari pabrik.
6. Memfasilitasi Penanganan kasus perlindungan konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Provinsi sebagai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,dimana kewenangan perlindungan konsumen menjadi kewenangan provinsi, sehingga secara tersirat Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi kewenangan provinsi dimana sebelumnya menjadi kewenangan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan barang beredar dan jasa dan menambah petugas pengawas tertib niaga.

b) Perdagangan Luar Negeri

1. Promosi untuk menembus peluang pasar internasional.
2. Meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam menganalisa pasar dalam mengoptimalkan produksi yang tersedia pada pengusaha/eksportir.
3. Meningkatkan informasi pasar luar negeri bagi eksportir Bali.
4. Meningkatkan ragam desain dalam merebut pasar.
5. Memfasilitasi kerjasama untuk memenuhi pasokan bahan baku kerajinan terutama kayu dan perak .
6. Meningkatkan Pemahaman pengusaha tentang mekanisme untuk mendaftarkan hasil cipta karyanya.
7. Memfasilitasi akses permodalan dan akses promosi/pemasaran.

7. Transmigrasi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi, disamping itu untuk mendorong perbaikan iklim investasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan badan usaha.

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang dirancang sebagai wilayah perkotaan baru.

Pembangunan lokasi permukiman baru meliputi tempat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan penduduk sekitar guna mendukung pengembangan wilayah.

Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan pembangunan bidang transmigrasi sebagaimana pada tabel dibawah ini.

No	Program	Kegiatan
1	Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian.

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai : PNS/CPNS : 139 Orang

Pegawai Berdasarkan Kualitas Pendidikan :

SD	:	0	Orang
SLTP	:	0	Orang
SLTA	:	28	Orang
D3	:	6	Orang
Sarmud	:	0	Orang
S1	:	82	Orang
S2	:	23	Orang

Pangkat/Golongan :

I	:	-	
II	:	10	Orang
III	:	87	Orang
IV	:	42	Orang

Jumlah Pejabat Struktural
28 Orang

Eselon II	: 1	orang
Eselon III	: 6	orang
Eselon IV	: 21	orang

Jumlah Pejabat Fungsional
56 orang

Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian, dengan kegiatan Tersusunnya buku laporan ketransmigrasian, dengan realisasi fisik 96% dan realisasi keuangan Rp. 100.203.300 (63,43%). Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Sektor Ketransmigrasian digambarkan pada tabel dibawah ini :

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ketransmigrasian Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP.)	%	VOLUME	%	(RP.)	%
A	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi								
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian	3 dok	100	104,371,750	100	3 dok	100	98,266,200	94,15

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Mencukupi.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dibidang ketransmigrasian, yaitu :

1. Masih adanya warga transmigran asal Provinsi Bali yang di temptakan di unit pemukiman setempat mengalami permasalahan lahan, seperti lahan pekarangan dan lahan usaha yang tidak sesuai dengan subtansi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang telah disepakati bersama serta masalah pengsertifikatan lahan.
2. Masih adanya warga transmigran yang meninggalkan lokasi transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi tanpa sepengetahuan pemerintah setempat, mengingat kurang siapnya mental warga transmigran untuk mengikuti program ketransmigrasian

Sedangkan usaha pemecahan masalah adalah :

1. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Daerah Penempatan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Pengirim dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Pengirim akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga transmigran di unit pemukiman transmigrasi setempat sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta KSAD yang telah disepakati.
2. Kegiatan pembinaan bagi warga transmigran di lokasi penempatan lebih ditingkatkan baik dari pemerintah daerah asal maupun pemerintah daerah penempatan sehingga warga transmigran merasa ikut memiliki serta memberikan kontribusi dalam rangka mensukseskan program ketransmigrasian.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke daerah penempatan transmigrasi perlu diintensifikasikan sehingga warga transnigran tidak merasa dibuang hanya sekedar rutinitas memindahkan penduduk ke daerah terpencil, tanpa ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Daerah Pengirim.

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan yang handal merupakan kunci keberasilan suatu pembangunan, perencanaan memberi arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam mewujudkan tercapainya target perencanaan pembangunan, tidak terlepas dari berbagai

faktor penghambat/ issu dalam setiap periode pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam mengantisipasi dan menginventarisir hambatan dan issu pembangunan, diperlukan adanya suatu mekanisme pengelolaan issu pembangunan dan melakukan pengkajian yang komprehensif, sehingga target capaian pembangunan dapat dioptimalkan.

Mengawali proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah diawali dengan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di daerah untuk mewujudkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD diformulasi melalui penjaringan aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan di daerah maupun pemerintah pusat. RKPD juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bappeda Litbang Provinsi Bali juga sebagai lembaga yang mengkoordinasikan epnyusunan perencanaan Perangkat Daerah yang diawali dengan Persiapan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Rancangan Renja SKPD, Pelaksanaan Forum SKPD, dan Penetapan Renja SKPD. Penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD dan berdasarkan usulan Program serta Kegiatan dari bidang di lingkungan internal Bappeda Litbang Provinsi Bali.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan h. Penyelenggaraan Musrenvang Provinsi Bali i. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Provinsi Bali 2005-2025 dan Musrenbang RPJMD Provinsi Bali -2023 j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah l. Upacara Keagamaan m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		q. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Capaian Kinerja r. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
2	Program Pembangunan Daerah	a. Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan b. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah c. Penyediaan Data Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah e. Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah f. Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun -2013 g. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) h. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) i. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah j. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali k. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) l. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat di Daerah m. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Daerah.
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	a. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Ekonomi b. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Investasi c. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia b. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan c. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	a. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi b. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum c. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah

NO	PROGRAM	KEGIATAN
6	Program Penelitian dan Pengembangan	a. Pemecahan Masalah Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan b. Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS c. Inovasi d. Pemecahan Masalah Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah

Jumlah Pegawai

Berdasarkan Jabatan

No	Keterangan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	6
3	Pejabat Eselon IV	18
4	Fungsional Umum	49
5	Fungsional	
	1) Arsiparis	2
	2) Pustakawan	1
	3) Perencana	3
	4) Pranata Humas	1
6	Tenaga Kontrak	90
	Jumlah	**171**

Berdaarkan Kualifikasi Pendidikan ASN

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	S2	30
2	S1/D4	32
3	SMA/STM	18
4	SMP	1
	Jumlah	**81**

Berdasarkan Golongan ASN

No	Golongan	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	4
3	IV/a	11
4	III/d	13
5	III/c	27
6	III/b	6
7	III/a	5
8	II/d	3
9	II/c	8
10	II/b	2
11	1/c	1
	Jumlah	**81**

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan	1190 buku	100	1,011,440,834	100	1190 buku	98,03	963,288,312	95,24
2	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 bulan	100	690,081,804	100	12 Bulan	96,28	661,538,268	95,86
3	Penyediaan Data Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	75 buku, 75 dokumen, 75 dokumen	100	241,218,750	100	75 buku, 75 dokumen, 75 dokumen	100	191,454,917	79,37
4	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah	25 buku	100	235,000,000	100	25 buku	100	164,071,071	69,82
5	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	75 buku	100	146,357,936	100	75 buku	90,75	87,755,055	59,96
6	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023	120 jenis, 120 buku, 125 buku, 120 buku, 125 buku, 50 buku, 50 buku	100	433,635,800	100	120 jenis, 120 buku, 125 buku, 120 buku, 125 buku, 50 buku, 50 buku	96,80	418,077,120	96,41
7	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	75 buku	100	374,378,741	100	75 buku	100	289,774,445	77,40
8	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	10 buku	100	63,246,200	100	10 buku	100	63,031,500	99,66
9	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	145 buku, 145 buku	100	262,716,612	100	145 buku, 145 buku	100	156,742,178	59,66
10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Bali	18 laporan	100	235,407,224	100	18 laporan	100	135,234,795	57,45
11	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)	10 buku, 10 buku	100	334,723,824	100	10 buku, 10 buku	100	206,539,095	61,70
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat di Daerah	4 laporan, 40 laporan	100	268,910,920	100	4 laporan, 40 laporan	100	179,070,488	66,59
13	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di daerah	40 laporan	100	377,288,069	100	40 laporan	100	238,358,399	63,18
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	2 rekomendasi Renja, 2 rekomendasi Renstra, 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	382,522,208	100	2 rekomendasi Renja, 2 rekomendasi Renstra, 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	256,097,445	66,95
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Investasi	2 rekomendasi Renja, 2 rekomendasi Renstra, 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	326,092,288	100	2 rekomendasi Renja, 2 rekomendasi Renstra, 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	227,792,505	69,86
3	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	390,004,832	100	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	223,969,885	57,43
C	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	533,072,080	100	20 buku, 20 buku,	100	416,242,928	78,08
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	416,943,248	100	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	329,247,085	78,97
3	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	756,129,028	100	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	453,185,402	59,93
D	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	498,565,646	100	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	439,636,382	88,18
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	478,974,000	100	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	404,632,540	84,48
3	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	487,943,248	100	2 Rekomendasi Renja, 2 rekomendasi renstra dan 4 laporan pengendalian dan evaluasi	100	402,054,711	82,40
E	Program Penelitian dan Pengembangan								
1	Pemecahan Masalah Daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan	4 Buku dan 8 Dokumen	100	11,740,888,620	100	4 Buku dan 8 Dokumen	95,81	9,836,155,603	83,78
2	Pembinaan dan Penilaian Pengembangan IPTEKS	4 Pemenang dan 1 Dokumen	100	567,271,202	100	4 Pemenang dan 1 Dokumen	100	328,369,525	57,89
3	Inovasi	1 Dokumen, 1 Dokumen, 50 Orang	100	602,045,500	100	1 Dokumen, 1 Dokumen, 50 Orang	100	437,865,889	72,73
4	Pemecahan Masalah daerah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen, 300 Peserta, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 7 Dokumen	100	3,214,9062	100	1 Dokumen, 300 Peserta, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 7 Dokumen	95	2,442,777,806	75,98
F	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	100	6,150,000	100	12 bulan	100	6,150,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	100	462,000,000	100	12 bulan	100	239,967,212	51,94
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	100	511,100,000	100	12 bulan	100	504,593,250	98,73
4	Penyediaan alat tulis kantor	47 jenis	100	73,841,800	100	47 jenis	100	69,089,455	93,56
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19 jenis	100	105,322,000	100	19 jenis	100	79,506,800	75,49
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis	100	15,950,000	100	13 jenis	100	15,186,000	95,21

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis	100	37,440,000	100	6 jenis	100	37,440,000	100
8	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Bali	1 kegiatan	100	260,653,000	100	1 kegiatan	100	201,085,439	77,15
9	Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD Provinsi Bali 2005-2025 dan Musrenbang RPJMD Provinsi Bali 2018-2023	30 buku	100	144,078,000	100	30 buku	100	123,268,440	85,56
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	100	148,750,000	100	12 bulan	100	148,720,000	99,98
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	12 bulan	100	701,542,187	100	12 bulan	100	532,828,601	75,95
12	Upacara keagamaan	9 jenis	100	75,000,000	100	9 jenis	100	74,000,000	98,67
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	100	102,250,000	100	1 unit	100	96,784,000	94,65
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	9 orang, 32 unit	100	773,915,376	100	9 orang, 32 unit	100	709,346,770	91,66
15	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	34 orang, 17 jenis	100	1,306,055,368	100	34 orang, 17 jenis	100	1,185,796,194	90,79
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	100	13,900,000	100	3 jenis	100	10,050,000	72,30
17	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	9 jenis	100	226,625,000	100	9 jenis	100	176,921,400	78,07
18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7 jenis	100	488,500,000	100	7 jenis	100	452,459,900	92,62

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM belum optimal
2. Ketersediaan data pendukung untuk penyusunan rencana pembangunan belum optimal
3. Sering terjadi mutasi
4. Kesulitan dalam mengumpulkan data-data dasar untuk perencanaan (pengaruh otonomi daerah)
5. Tenaga fungsional peneliti, fungsional perencana dan tenaga yang berlatar belakang pendidikan statistik yang ada kurang memadai jumlahnya
6. Dalam penyusunan program sulit merencanakan anggaran dengan terbatasnya pagu, tetapi dalam pelaksanaannya banyak belanja yang tidak terduga harus didanai, sehingga sulit tercapainya efisiensi
7. Monitoring pada beberapa kegiatan khususnya prasarana wilayah tidak dapat dilakukan dengan optimal karena kurangnya dukungan sarana mobilitas

8. Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

Solusi yang harus dilakukan :

1. Mengkoordinasikan/mengusulkan dukungan anggaran dan peremajaan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk membangun sinergitas perencanaan pembangunan.
2. Mengusulkan adanya penambahan tenaga fungsional peneliti, fungsional perencana dan tenaga yang berlatar belakang pendidikan statistik melalui perekrutan pegawai baru.
3. Mengupayakan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang perencanaan melalui kursus yang diselenggarakan oleh Bappenas, maupun pendidikan yang lain berkaitan dengan perencanaan.
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan.

   Melakukan pengelolaan pegawai dalam penempatan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan

2. Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuan dari setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah haruslah senantiasa sinergi dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan nasional, yaitu mendorong terwujudnya cita-cita luhur bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undan-undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan salah satu prinsip yang dituangkan dalam Konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali melalui Visi Nangun Sat Kertih Loka Bali, yang telah dipertegaskan dalam salah satu misi yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terbuka, transparan dan akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat pasti dan murah.

Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali yang berkewajiban memberikan gambaran terkait pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

Program dan Kegiatan :

Adapun program dan kegiatan pada urusan Otonomi Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan;	a) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan se Bali; b) Kegiatan Pembinaan dan Pencegahan Permasalahan Peruntukan Tanah; c) Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi; d) Kegiatan Penegasan Batas Daerah di Wilayah Provinsi Bali; e) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Bali Dan Monitoring LPPD Kab/Kota; f) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan; g) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan
2	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	a) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Kapasitas Daerah; b) Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah; c) Kegiatan Penyelengaraan Dukungan Tugas dan Fungsi Pejabat Negara dan Daerah; d) Kegiatan Penyelesaian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan/Anggota DPRD; e) Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali;
3	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	a) Peningkatan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; b) Peningkatan Kerjasama Daerah Dan Pihak Ketiga/Badan Usaha; c) Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah ; d) Peningkatan Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara; e) Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU); f) Peningkatan Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) g) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; c) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan; d) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor f) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas; g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor; h) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor; i) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur; j) Kegiatan Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	capaian kinerja	

Jumlah Pegawai

Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/b)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bagian (Eselon III/a)	3 orang	-	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	6 orang	3 orang	9 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-
Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-
Pejabat Fungsional Arsiparis	1 orang	-	1 orang
Pejabat Fungsional Pustakawan	-	-	-
C. Staf Fungsional Umum			
Penata Tk. I (III/d)	3 orang	3 orang	6 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	4 orang	9 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	2 orang	-	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	21	12	33

Kondisi Kepegawaian menurut golongan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	-	1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang	-	2 orang
Pembina (IV/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Penata Tk. I (III/d)	5 orang	8 orang	13 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	3 orang	8 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	1 orang	1 orang	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)		-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	17	16	33

Kondisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	-	-	-
Sarjana S2	2 orang	3 orang	5 orang
Sarjana S1	12 orang	11 orang	23 orang
Diploma IV	1 orang	-	1 orang
Diploma III/SM (DIII/SM)	-	-	-
SLTA	2 orang	2 orang	4 orang
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-

Realiasai Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	VOL	%	VOL	%	VOL	%
1.	Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan	Peringkat LPPD (12)	100	488.993.000	94	Peringkat LPPD (11)	100	457.239.570	94
2.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	Peningkatan Kualitas Bahan Rumusan Penyelenggarann Adpem dan Otda	20	622.660.000	82	Peningkatan Kualitas Bahan Rumusan Penyelenggarann Adpem dan Otda	20	509.352.499	82
3.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Implementasi kerjasama Pemerintah Daerah (2 Kesepakatan Kerjasama)	2 KB	1.157.703.000	92	Implementasi kerjasama Pemerintah Daerah (2 Kesepakatan Kerjasama)	2 KB	1.063.701.885	9
4.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Persentase pelaporan dan capaian kinerja yang ditangani	4 Lap	935.894.728	95	Persentase pelaporan dan capaian kinerja yang ditangani	4 Lap	887.007.092	95

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali telah melakukan Sinkronisasi Program Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja (RENJA) dengan Program dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 - 2024. Adapun Jumlah Program RKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 sebanyak 4 Pogram :

1. Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahan
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
3. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

4. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

Sarana Prasarana Yang Digunakan

Sarana Prasarana Yang digunakan sudah lengkap dan memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
   a. Penyusunan LPPD sering mengalami kendala karena ketepatan penyampaian data LPPD sebagai konsekuensi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum tepat waktu dan pemahaman terkait pengisian IKK yang terbatas karena SDM yang menangani belum memahami pedoman penyusunan LPPD.
   b. Masih ada daerah-daerah di wilayah Provinsi Bali yang belum berkoordinat sedangkan Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki sumber daya manusia yang berkompenten di bidang Toponimi.
   c. Masih ada potensi munculnya kasus sengketa tanah yang terkait dengan pembangunan fasilitas umum.
2. Solusi
   1. Membangun Sistem Informasi Terintegrasi (aplikasi) Penyusunan LPPD se Provinsi Bali didukung dengan peningkatan kapasitas petugas penyusun LPPD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
   2. Melibatkan Pihak Ketiga dari TopDam IX Udayana untuk melakukan pekerjaan penegasan batas wilayah antar kabupaten/kota.
   3. Melakukan percepatan penanganan Penetapan lokasi yang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum.

3. Kepegawaian

Aparatur Negara merupakan unsur penting dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Negara menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia. Sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara peranan aparatur negara tersebut menjadi semakin strategis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini. Peranan tersebut juga menjadi penting dijalankan untuk menghadapi dan mengantisipasi dinamika lingkungan strategis yang begitu pesat, yaitu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kinerja aparatur merupakan hasil dari upaya terpadu yang pada hakekatnya terdiri dari perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen yang terbuka, adil dan transparan, peningkatan

kompetensi secara terus-menerus, pengembangan pola karir dengan *merit system*, penerapan sistem *reward and punishment*, serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Keseluruhan proses tersebut harus dilaksanakan dengan baik untuk memastikan agar Pemerintah Provinsi Bali memiliki pegawai yang kompeten dan termotivasi dengan jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan organisasi saat ini maupun mengantisipasi perkembangan organisasi di masa yang akan datang.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan,Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi ASN Kegiatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	a. Kegiatan Sumpah Janji b. Kegiatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara c. Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS d. Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan PNS menjelang Pensiun e. Kegiatan Peningkatan Bakat dan Minat f. Kegiatan Pelayanan Data Kepegawaian g. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Administrasi Pensiun PNS
2	Program Pengembangan Manajemen Karier	a. Kegiatan Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural b. Kegiatan Pemberian bantuan dana diklat/kursus/job traning bagi PNS di lingkungan Pemprov Bali. c. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar/Ijin Belajar d. Kegiatan Mutasi PNS e. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas f. Kegiatan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional g. Kegiatan Pemetaan Talenta ASN
3	Program Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	a. Kegiatan Pembinaan dan Penegakan Disiplin ASN b. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali c. Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali d. Kegiatan Monitoring Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali e. Kegiatan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali f. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Pengembalian Tabungan Perumahan ASN g. Kegiatan Penilaian ASN Teladan

Jumlah Pegawai

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali serta Peraturan gubernur Bali Nomor 94 tahun 2016

tentang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali terdiri atas sekretariat dan tiga bidang, yang masing-masing dibantu oleh sub bagian dan sub bidang sebagai berikut:

a. Sekretariat, terdiri dari:
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Sub Bagian Penyusunan Program,Keuangan Evaluasi dan Pelaporan
b. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi kepegawaian, terdiri dari:
    1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
    2) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
    3) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian
c. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari :
    1) Sub Bidang Mutasi
    2) Sub Bidang Kepangkatan
    3) Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
d. Bidang Penilaian Kinerja Apratur dan Penghargaan, terbagi menjadi:
    1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
    2) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
    3) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan

Dilihat dari struktur jabatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 terdiri atas 1 jabatan Eselon II yaitu Kepala Badan, 4 jabatan Eselon III yaitu Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang, 11 jabatan Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, serta 2 jabatan fungsional yaitu arsiparis penyelia dan analis kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali didukung oleh pegawai sejumlah 66 orang PNS (data per 31 Desember 2019), yang terdiri atas 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang,11 orang Kepala Sub.bag dan Kepala Sub.bid. 50 orang staf diantaranya 22 orang staf Sekretariat, 8 orang staf Pengadaan Pemberhentian dan Informasi kepegawaian, 12 orang staf Bidang Mutasi dan Promosi,8 orang staf Bidang Penilaian Kinerja Apratur dan Penghargaan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

Dilihat dari golongan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah provinsi Bali terdiri dari 1 orang golongan I, 2 orang golongan II,58 orang golongan III, dan 5 orang golongan IV.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi ASN
    a) Kegiatan Sumpah Janji

Calon Pegawai Negeri Sipil setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Sumpah Pegawai Negeri Sipil diucapkan dihadapan pejabat yang berwenang. Tujuan dilaksanakanya sumpah/janji ASN adalah agar ASN dapat melaksanakan tugas dengan penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap pancasila UUD 1945 negara dan pemerintah serta bermoral baik, bersatu padu, bersih jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tangungjawab terhadap tugasnya. Kegiatan ini tidak terlaksana berkenaan dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang direkrut tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019, karena pengangkatan CPNS ditetapkan TMT 1 Maret 2019, maka Sumpah Janji akan dilaksanakan tahun 2020.

b) Kegiatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Kegiatan ini meliputi penyusunan formasi ASN, seleksi penerimaan praja IPDN, serta Pengadaan ASN. Penyusunan formasi ASN merupakan implementasi dari PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tujuan kegiatan ini agar tersedia data formasi ASN Pemerintah Provinsi Bali. Seleksi penerimaan praja IPDN melaksanakan fasilitasi seleksi calon praja IPDN yang terdiri dari sejumlah tahap seleksi, yaitu Tes kompetensi dasar, Tes kesehatan, tes psikologi, integritas dan kejujuran, yang dilaksanakan di Provinsi Bali, selanjutnya tes pemantapan akhir, tes kesemamptaan dan tes wawancara yang dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor. Peserta yang lulus sebagai Capra IPDN Tahun 2019 dari Kontingen provinsi Bali sebanyak 33 orang. Pada Tahun Anggaran 2019 dilakukan pengangkatan ASN Formasi Tahun 2018 sejumlah 773 Orang dan dilaksanakan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 790 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, sebanyak 676 formasi

c) Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tenaga non ASN pada jabatan-jabatan tertentu yang bersifat teknis dan tidak ada penjenjangan karir yang tidak dapat terpenuhi/dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dan Perangkat Daerah lainnya, maka dipenuhi oleh tenaga non ASN melalui sistem pengadaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, hasil yang ingin dicapai terpenuhinya tenaga non ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 148 orang.

d) Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan PNS menjelang Pensiun

Pembekalan diberikan kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 100 orang. Peserta pelatihan diberikan pembekalan kewirausahaan oleh narasumber yang berasal dari Bank BPD Bali, dan UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi ASN yang telah purna tugas.

e) Kegiatan Peningkatan Bakat dan Minat

Bakat Minat terdiri dari korsik, instruktur senam, sekaa gong (penabuh gamelan), sekaa pesantian (kelompok kidung) dan paduan suara yang bertujuan mendukung pegawai dalam menyalurkan bakat dan minatnya di bidang kesenian dan olahraga. Sasaran kegiatan berjumlah 198 orang.

f) Kegiatan Pelayanan Data Kepegawaian

Kegiatan ini terdiri atas penyusunan daftar susunan pegawai (DSP), penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), penyusunan profil keadaan Pegawai, pengurusan karpeg, karis/karsu, pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan pengelolaan aplikasi PNS Online. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan data kepegawaian yang *up-to-date* dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, antara lain mutasi, kenaikan pangkat, serta promosi. Hasil yang dicapai adalah tingkat persentase data ASN yang *terupdate* dalam SIMPEG dan SAPK sebesar 100%

g) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Administrasi Pensiun PNS

Kegiatan ini memberikan pemahaman ASN akan peraturan pensiun dan meningkatkan pelayanan kepada ASN yang pensiun sehingga SK pensiun dapat diterbitkan tepat pada waktunya dan akhirnya pensiunan dapat menerima hak-haknya tanpa mengalami keterlambatan. Pada tahun 2019 sebanyak 810 SK Pensiun telah diterbitkan. Hasil yang dicapai adalah selesainya proses administrasi ASN yang pensiun untuk memenuhi syarat agar pensiun memperoleh hak-haknya tepat waktu.

2) Program Pengembangan Manajemen Karier

a. Kegiatan Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural

Pelaksanaan Mutasi Pejabat struktural merupakan salah satu pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil melalui promosi maupun mutasi horisontal. Promosi maupun mutasi merupakan proses pemberian penghargaan maupun hukuman kepada ASN yang dinilai dari capaian kinerja, kemampuan manajerial dan teknis dalam jabatan, serta kemampuan ASN dalam beradaptasi dalam lingkungan eksternal maupun internal instansi. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan merupakan sistem pengembangan karir ASN yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Frekwensi Pengangkatan Pejabat struktural telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pelantikan.

b. Kegiatan Pemberian bantuan dana diklat/kursus/job traning bagi PNS di lingkungan Pemprov Bali.

Kegiatan ini untuk mendanai pegawai yang mengikuti kursus/bimtek/*job training* dan sejumlah diklat teknis, dan penjenjangan dengan target 30 orang pegawai. Realisasi dari

kegiatan ini adalah 9 orang. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Bali.

c. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar/Ijin Belajar

Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui program-program pendidikan formal. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, telah dilaksanakan sejumlah upaya. Pertama, melakukan analisis kebutuhan Pendidikan sebelum menetapkan program tugas belajar dan ijin belajar yang akan diberikan bantuan. Kedua, melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai jenis program yang dibiayai sehingga hasilnya tidak hanya berupa keberhasilan pegawai meraih gelar akademik lebih tinggi tetapi juga dibarengi peningkatan kompetensinya. Target dari kegiatan ini adalah 20 orang ASN menerima bantuan UKT, dan 16 orang ASN menerima bantuan penelitian. Keluaran yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Pemberian beasiswa tugas belajar S3 Ilmu Ekonomi sejumlah 17 orang
- Pemberian beasiswa tugas belajar S3 Ilmu Hukum sejumlah 3 orang

hasil yang dicapai adalah meningkatnya kompetensi ASN yang memperoleh bantuan tugas belajar sebanyak 20 orang bantuan UKT, dan 4 orang untuk bantuan penelitian.

d. Kegiatan Mutasi PNS

Kegiatan Mutasi PNS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Sumber daya manusia (SDM) pada perangkat daerah serta pelayanan akan permohonan pindah antar instansi dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai serta memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Dari target 200 orang jumlah mutasi, telah tercapai 261 orang. Hasil yang ingin dicapai yaitu kecukupan SDM dilingkungan Pemprov. Bali.

e. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas

Salah satu peningkatan kompetensi dan kualifikasi adalah berupa penghargaan Kenaikan Pangkat ASN yang sangat strategis dalam menunjang peningkatan kinerja pemerintah.

Selama tahun 2019 proses kenaikan pangkat dilaksanakan 2 (dua) kali periode yaitu:

- Periode 1 April 2019: usul kenaikan pangkat periode 1 April 2019 bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berjumlah 815 usul, Kabupaten/Kota berjumlah 960 usul total 1.775.
- Periode 1 Oktober 2019 : usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019 bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berjumlah 854 usul, Kabupaten/Kota berjumlah 1021 usul total 1875.

Selama tahun 2019 juga dilaksanakan ujian penyesuaian ijazah yang diikuti oleh 171 orang, serta ujian dinas tingkat I dan II sebanyak 50 orang.

f. Kegiatan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang tata cara pengusulan, pengumpulan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional untuk meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional melalui kegiatan sosialisasi jabatan fungsional tertentu serta proses administrasi pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Jumlah yang diangkat dan menerima kenaikan jenjang jabatan sebanyak 621 orang dari target 200 orang, dengan rincian 167 proses pengangkatan dalam jabatan fungsional, 22 pemberhentian dalam jabatan fungsional, dan 460 kenaikan jenjang jabatan.

g. Kegiatan Pemetaan Talenta ASN

Untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki dan pendidikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh ASN, perlu dilakukan *assesment* terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa disusun manajemen karir ASN berdasarkan talenta yang sering disebut dengan manajemen talenta. Ketika manajemen talenta ini sudah tersusun, untuk membuat suksesi jabatan sangat mudah dilakukan, tidak seperti saat ini. Setiap akan dilakukan pengisian, disusun berdasarkan senioritas, tidak dinilai apakah yang bersangkutan. berkompeten atau tidak, bahkan kadang kala jabatan tersebut diisi oleh ASN yang belum pernah melaksanakan tugas di bidang tersebut atau memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi berkaitan dengan jabatan tersebut. Manajemen talenta adalah pengelolaan SDM yang dilakukan dengan menggunakan proses analisis, pengembangan dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan potensi ASN untuk meningkatkan kinerjanya demi mencapai tujuan organisasi. Hasil yang dicapai adalah jumlah pejabat administrasi yang dipetakan sebanyak 200 orang.

3) Program Peningkatan Penilaian Kinerja ASN

a. Kegiatan Pembinaan dan Penegakan Disiplin ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, ASN wajib mematuhi disiplin ASN dan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN yang memuat 17 kewajiban dan 15 larangan serta tingkat dan jenis hukuman disiplin, memiliki esensi bahwa ASN sanggup untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Kondisi yang diharapkan kedepan dihadapkan dengan kuantitas ASN yang cukup besar adalah terlaksananya pembinaan disiplin ASN secara berkesinambungan, terintegrasi dan berkelanjutan, yang dapat mencakup lebih luas secara kuantitas dan meningkatnya

pemahaman tentang peraturan disiplin, dan diimbangi dengan penanganan kasus-kasus terkait disiplin diantaranya memberi sanksi kepada ASN yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan disiplin.

Dengan kegiatan ini diharapkan ASN lebih termotivasi untuk memahami peraturan disiplin, melaksanakan kewajiban, tidak melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan disiplin dan menurunnya jumlah kasus-kasus pelanggaran disiplin sehingga dapat mewujudkan ASN yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan sehingga terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Realisasi dari kegiatan ini adalah 700 orang peserta dan 13 kasus penangganan

b. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

   Kegiatan ini memberikan penghargaan kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Target sasaran kegiatan ini adalah sejumlah 1173 orang ASN dan telah terealisasi sejumlah 1089 orang. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa berkas usulan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat tahapan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Sekretariat Negara.

c. Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

   Kegiatan ini dilaksanakan guna mengetahui kinerja pegawai dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier ASN yang bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja. Adapun persentase Jumlah ASN yang memiliki dokumen penilaian prestasi kerja baik sebesar 99,16% dari target 80%. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

d. Kegiatan Monitoring Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

   Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali selaku *leading sector* dalam hal manajemen kepegawaian berupaya untuk mendukung pengembangan *e-government* dengan memanfaatkan teknologi dan informasi salah satunya dengan menerapkan aplikasi e-kinerja. Aplikasi e-Kinerja merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur, menilai dan meningkatkan kinerja PNS. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bahwa penyelenggaraan pembinaan PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan prestasi kerja PNS. Monitoring implementasi aplikasi e-kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan guna mengetahui aktivitas harian pegawai dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk perhitungan tunjangan kinerja. Realisasi dari kegiatan ini antara lain persentase pelaporan kegiatan melalui aplikasi e-kinerja di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang mencapai sebesar 95% dari target 91% dan terlaksananya SKP berbasis Online pada 46 perangkat daerah.

e. Kegiatan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercermin melalu perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan professional dalam pendekatan *system merit* mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, *external equity*), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi dan disiplin. Dengan adanya pengukuran indeks profesionalitas ASN, tujuan yang hendak dicapai akan diketahui jumlah dan tingkat profesionalitas pegawai ASN dilihat dari aspek kompetensi, kinerja, kompensasi serta tingkat disiplin sesuai dengan hasil tersebut diatas. Hal ini akan menggambarkan manfaat baik bagi pemerintah sebagai pemberi kerja dan pegawai ASN sebagai pekerja. Pemerintah akan mendapatkan data tentang berapa jumlah dan tingkat profesionalisme ASN baik dari sisi kompetensi, kinerja, kompensasi dan disiplin untuk evaluasi guna melakukan perbaikan. Sedangkan bagi pegawai dapat digunakan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kompetensi, kinerja, kesejahteraan dan disiplin. Realisasi dari kegiatan ini antara lain jumlah pejabat perangkat daerah yang Indeks Profesionalitasnya terukur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sejumlah 1035 Pejabat dan hasil persentase menurunnya GAP kompetensi pejabat Perangkat Daerah sebesar 19,09% dari target yang ditentukan 19,13%.

f. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Pengembalian Tabungan Perumahan ASN.

Pemerintah menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk membantu membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan, setiap Pegawai Negeri Sipil baik Pusat maupun Daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan (TAPERUM) yang dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh BAPERTARUM dengan berbagai fasilitas mendukung kepemilikian rumah PNS maupun pengembalian dana TAPERUM-PNS kepada PNS yang belum memanfaatkan dana TAPERUM-PNS pada saat berhenti sebagai PNS baik karena pensiun, meninggal dunia atau sebab lain. Selain hal tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara mengamanatkan tentang pemberian perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja. Badan Kepegawaian Daerah sebagai Badan Pembina Kepegawaian sesuai kewenangan yang diberikan untuk menetapkan kecelakaan kerja melaksanakan kegiatan-kegiatan fasilitasi penyelenggaraan program Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Bapertarum PNS sehingga Pegawai ASN memahami hak-hak sebagai pegawai ASN serta prosedur pengurusannya. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan optimal maka diperlukan perencanaan penyelenggaraan yang lebih intensif serta dukungan anggaran yang sesuai. Dengan demikian diharapkan kegiatan tersebut mampu mendukung penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN. Realisasi dari kegiatan ini adalah 700 peserta yang mengikuti sosialisasi.

g. Kegiatan Penilaian ASN Teladan

Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk mewujudkan budaya kerja yang kompetitif serta untuk memperbaiki kualitas manajemen SDM aparatur dan memberikan apresiasi kepada ASN yang berprestasi melalui penyelenggaraan kegiatan penilaian ASN Teladan.di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, penilaian ASN teladan harus didasarkan pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta pelaksanaan tugas oleh masing-masing pegawai sesuai dengan jabatan yang diemban. Penilaian ASN teladan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari jadi Pemerintah Provinsi Bali sehingga penyerahan penghargaan bagi ASN yang dipilih menjadi ASN teladan akan dilaksanakan pada saat peringatan hari Jadi Provinsi Bali. Melalui penilaian ASN teladan dimaksud diharapkan akan memotivasi para pegawai ASN untuk bekerja secara lebih baik, menumbuhkan semangat kompetitif, menimbulkan iklim kerja yang inovatif, kreatif dan dinamis serta tidak saja dapat menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali pada umumnya. Realisasi dari kegiatan ini adalah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagai ASN Teladan dengan hasil terwujudnya ASN Teladan di Pemerintah Provinsi Bali.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALIASASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi ASN Kegiatan Pengadaan Aparatur Sipil Negara								

NO	URAIAN	TARGET				REALIASASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
1	Kegiatan Sumpah Janji	32 Orang	100	10,087,000	100	0	0	-	0
2	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	724 formasi	100	373,986,000	100	773 Formasi	100	274,288,675	73,34
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS	148 orang	100	3,060,926,256	100	148 orang	100	2,874,905,492	93,92
4	Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan PNS menjelang Pensiun	100 Orang	100	98,174,950	100	100 Orang	100	72,179,385	77,67
5	Kegiatan Peningkatan Bakat dan Minat	198 Orang	100	864,977,500	100	198 Orang	100	825,124,550	95,39
6	Kegiatan Pelayanan Data Kepegawaian	11.362 data	100	252,815,200	100	11.362 data	100	234,302,834	92,68
7	Kegiatan Pembinaan dan Penataan Administrasi Pensiun PNS	640 SK	100	78,987,900	100	810 SK	126	61,759,812	78,19
B	Program Pengembangan Manajemen Karier								
1	Kegiatan Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural	3 kali Pelantikan	100	798,043,000	100	3 kali pelantikan	100	572,978,298	71,80
2	Kegiatan Pemberian bantuan dana diklat/kursus/job traning bagi PNS di lingkungan Pemprov Bali	30 orang	100	233,400,000	100	9 orang	87,16	167,204,476	71,64
3	Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar/Ijin Belajar	20 orang	100	650,846,500	100	4 orang	75,2	459,513,013	70,60
4	Kegiatan Mutasi PNS	200 orang	100	126,296,400	100	261 orang	130,5	111,140,353	88
5	Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas	2500 SK KP	100	288,255,500	100	3609 SK KP	144,4	268,979,983	93,31
6	Kegiatan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	200 SK	100	60,500,000	100	621 SK	310	58,600,000	96,86
7	Pemetaan Talenta ASN	200 orang	100	455,250,000	100	200 orang	100	278,133,100	61,09
C	Program Peningkatan Penilaian Kinerja ASN								
1	Kegiatan Pembinaan dan Penegakan Disiplin ASN	700 orang dan 40 kasus	100	112,314,000	100	700 orang dan 13 kasus	100	108,844,835	96,91
2	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi ASN diLingkungan Pemerintah Provinsi Bali	1173 ASN	100	57,611,500	100	1089 orang	100	53,272,711	92,47
3	Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	80%	100	223,828,200	100	99,16%	123	193,534,591	86,47
4	Kegiatan Monitoring Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	91%	100	132,773,600	100	95%	104	120,806,584	90,99
5	Kegiatan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	1126 pejabat	100	165,635,800	100	1035 pejabat	100	145,933,821	88,11
6	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),	700 orang	100	103,639,900	100	700 orang	100	91,118,047	87,92

NO	URAIAN	TARGET				REALIASASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
	Jaminan Kematian (JKM) dan Pengembalian Tabungan Perumahan ASN								
7	Kegiatan Penilaian ASN Teladan	3 orang	100	95,860,700	100	3 orang	100	79,661,900	83,10

Kondisi Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali cukup lengkap, tetapi beberapa sarana dan prasarana perlu diperbaharui seperti komputer untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan secara cepat dan efisien.

Permasalahan Dan Solusi

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, terdapat beberapa kegiatan tidak tercapai sesuai target karena :

a. Permasalahan :

1. Kegiatan Sumpah Janji, tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan ke kegiatan pengadaan Aparatur Sipil Negara, hal ini disebabkan karena pengangkatan CPNS ditetapkan TMT 1 Maret 2019, sehingga pelaksanaan Sumpah Janji akan dilaksanakan tahun 2020.
2. Kegiatan pemberian izin/tugas belajar sudah dapat dilaksanakan dengan memberikan beasiswa kepada 20 orang ASN, dan bantuan penelitian untuk 16 orang ASN, namun yang bisa terealisasikan hanya untuk bantuan UKT saja sedangkan untuk bantuan penelitian hanya bisa terealisasi sebanyak 4 orang saja, dikarenakan hanya baru 4 orang saja yang telah mencapai tahap penelitian.
3. Pemberian bantuan dana diklat untuk 30 orang hanya bisa terealisasi untuk 9 orang, karena tidak adanya permohonan dari ASN unuk bantuan dana pelaksanaan diklat, hal ini juga diakibatkan sudah diperbolehkannya penganggaran untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi pada perangkat daerah.
4. Realisasi keuangan pada Kegiatan Pemetaan Talenta ASN hanya mencapai 61,09% meskipun target kegiatan tercapai 100% yaitu telah terpetakannya talenta 200 ASN. Hal ini disebabkan terjadinya efisiensi akibat dari perubahan penyelenggara asessment. Yang awalnya direncanakan dilaksanakan oleh Kanreg X BKN, namun dalam perjalanannya pihak BKN tidak menyanggupi pelaksanaanya dikarenakan jadwal mereka yang sudah penuh di akhir tahun, kemudian dilakukan penjajagan dengan BPSDM Provinsi Bali untuk menggunakan tenaga asesor yang dimiliki oleh BPSDM, sehingga terjadi efisiensi pada honorarium tenaga ahli sebesar 63, 04%.

b. Solusi :

1. Dikarenakan pendanaan pelaksanaan diklat sudah bisa dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah,maka untuk tahun 2020 kegiatan ini tidak dianggarkan kembali.
2. Karena rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan bagi penerima beasiswa, maka akan dilakukan evaluasi terhadap pemberian bantuan dana pendidikan, dan akan diingatkan kepada penerima bantuan dana pendidikan untuk segera menyelesaikan pendidikannya. Dan pada tahun anggaran 2020, kegiatan ini tidak dianggarkan kembali.
3. Untuk pelaksanaan assesment ke depannya, dicarikan alternatif lembaga penyelenggara assesment yang sudah terakreditasi, sehingga bisa dipastikan apakah bisa menyelenggarakan atau tidak, agar tidak terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.

4. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan fungsi penting dalam setiap organisasi pemerintah. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah. Rendahnya kinerja pengadaan barang/jasa pada gilirannya berdampak buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah termasuk pelayanan publik. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Biro yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Tugas pokok Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali yaitu membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas pembinaan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali berupaya meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa dengan Manajemen Kinerja Pengadaan Barang/Jasa :

1. Ketepatan waktu pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP);
2. Ketepatan waktu melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
3. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan serah terima barang/jasa;
4. Efisiensi dari sisi pagu dan kontrak pengadaan barang/jasa;
5. Efisiensi dari sisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kontrak pengadaan barang/jasa;
6. Partisipasi Penyedia Barang/Jasa;
7. Kualitas penawaran penyedia;
8. Kepuasan pelanggan internal
9. Kepuasan penyedia.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyediaan Alat Tulis Kantor b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur h. Penatausahaan Biro i. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Biro j. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
2	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Pengadaan Kendaraan Dinas b. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Pembinaan Rencana Pengadaan Barang/Jasa dan Distribusi d. Penyusunan Standar Harga dan E-Katalog
3	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	a. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengadaan b. Penyusunan Juklak dan Juknis Pengadaan Barang/Jasa c. Penilaian Tingkat Kematangan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa d. Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Hukum Pengadaan Barang/Jasa
4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	a. Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Pegawai

No	Keterangan	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	3 orang
3	Pejabat Eselon IV	9 orang
4	Staf	25 orang
5	Fungsional	13 orang
6	CPNS	-
7	Tenaga Honorer	-
8	Tenaga Harian	-
9	Tenaga Kontrak	15 orang
Jumlah		**66 orang**

Realisasi Program dan Kegiatan

Secara umum pelaksanaan 4 (empat) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 mencapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,07%, dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini.

Realisasi Program Kegiatan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	TARGET				REALISASI			
		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan	
		Vol	%	Rp	%	Vol	%	Rp	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	10	100	9,793,192,200	100	10	100%	7,928,010,953	80.95%
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	100	223,300,000	100	1	100%	124,040,745	55.55%
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	100	325,600,000	100	1	100%	186,497,600	57.28%
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	100	145,200,000	100	1	100%	97,888,997	67.42%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	1	100	497,183,200	100	1	100%	373,094,304	75.04%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1	100	71,500,000	100	1	100%	43,750,000	61.19%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	100	253,000,000	100	1	100%	51,816,000	20.48%
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	1	100	55,000,000	100	1	100%	38,364,000	69.75%
8	Penatausahaan Biro	1	100	1,142,502,000	100	1	100%	755,013,384	66.08%
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Biro	1	100	433,300,000	100	1	100%	365,264,001	84.30%
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1	100	6,646,607,000	100	1	100%	5,892,281,922	88.65%
B	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4	100	7,746,462,422	100	4	100%	7,079,345,242	91.39%
11	Pengadaan Kendaraan Dinas	1	100	6,825,175,522	100	1	100%	6,397,771,169	93.74%
12	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	100	454,392,900	100	1	100%	299,940,219	66.01%
13	Pembinaan Rencana Pengadaan Barang/Jasa dan Distribusi	1	100	153,918,000	100	1	100%	138,674,954	90.10%
14	Penyusunan Standar Harga dan E-Katalog	1	100	312,976,000	100	1	100%	242,958,900	77.63%
C	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	4	100	1,352,666,547	100	4	100%	1,136,514,314	84.02%
15	Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengadaan	1	100	575,538,000	100	1	100%	504,844,240	87.72%
16	Penyusunan Juklak dan Juknis Pengadaan Barang/Jasa	1	100	169,548,000	100	1	100%	138,372,006	81.61%
17	Penilaian Tingkat Kematangan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	1	100	223,183,547	100	1	100%	203,516,024	91.19%
18	Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Hukum Pengadaan Barang/Jasa	1	100	384,397,000	100	1	100%	289,782,044	75.39%
D	Program Pengelolaan Sistem Informasi	3	100	1,066,009,050	100	3	100%	835,570,490	78.38%

No.	Program/ Kegiatan	TARGET				REALISASI			
		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan	
		Vol	%	Rp	%	Vol	%	Rp	%
	Pengadaan Barang/Jasa								
19	Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1	100	208,204,050	100	1	100%	139,199,325	66.86
20	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1	100	580,541,000	100	1	100%	484,321,695	83.43%
21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	1	100	277,264,000	100	1	100%	212,049,470	76.48%

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

   Keterlambatan proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa khususnya dalam bidang konstruksi disebabkan karena adanya perubahan aturan dan kebijakan terkait metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.

2) Solusi

   a. Melakukan FGD dengan menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidang konstruksi termasuk kementerian teknis yang membidangi
   b. Membuat surat edaran tentang dokumen dan pengadaan pekerjaan konstruksi

5. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tanggal 10 Nopember 2016. BPKAD Provinsi Bali merupakan gabungan dari Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Bagian Aset pada Biro Aset Setda Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, mempunyai tugas : melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPKAD Provinsi Bali mempunyai fungsi :

~~a.~~ Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, d. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, e. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, h. Penyediaan Makanan dan Minuman, i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah, j. Upacara Keagamaan, k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas l. Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja m. Penataan Dokumen Keuangan Daerah. n. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor,
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, d. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD (Induk/Perubahan) dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD (Induk/Perubahan) Kabupaten/Kota se-Bali, e. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah,	a. Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah, b. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, c. Penataan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, e. Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali. f. Penyediaan jasa asuransi kendaraan dan properti Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali g. Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Penguasaan Pemerintah

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Provinsi Bali h. Penataan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,	a. Penatausahaan Belanja Daerah, b. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD), c. Peningkatan kompetensi penatausahaan keuangan daerah, d. Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah, e. Penilaian Penerapan PPK BLUD, f. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali.

Jumlah Pegawai

Kondisi Kepegawaian menurut golongan

Nama Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Madya (IV/d)	1 orang
Pembina Utama Muda (IV/c)	-
Pembina Tk. I (IV/b)	5 orang
Pembina (IV/a)	11 orang
Penata Tk. I (III/d)	28 orang
Penata (III/c)	23 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	64 orang
Penata Muda (III/a)	11 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-
Pengatur (II/c)	8 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 orang
Pengatur Muda (II/a)	-
Juru (I/c)	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-
Juru Muda (I/a)	-
Total	153

Kondisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama Jabatan	Jumlah
Sarjana S3	-
Sarjana S2	50 orang
Sarjana S1	65 orang
Sarjana Muda	1 orang
Diploma IV	14 orang
Diploma III/SM (DIII/SM)	2 orang
SLTA	21 orang
SLTP	-
SD	-

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BPKAD Provinsi Bali Tahun 2019 mengelola anggaran sebesar Rp. 17.748.428.406 dengan realisasi fisik 88,73% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.075.403.120,63,- (79,31%). Hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada BPKAD Provinsi Bali sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.815.482.798 realisasi keuangan Rp.3.077.711.244,13 (80,66%) dan realisasi fisik (99,69%).
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.900.000 realisasi keuangan Rp. 2.400.000 (82,76%) dan realisasi fisik (100%).
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 576.000.000 realisasi keuangan Rp. 276.717.245 (48,04%) dan realisasi fisik 95,65%.
   c) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 199.190.000 realisasi keuangan Rp. 191.889.310 (96,33%) dan realisasi fisik (100%).
   d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.880.000 realisasi keuangan Rp. 77.751.200 (81,09) dan realisasi fisik (100%).
   e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 190.000.000 realisasi keuangan Rp. 185.353.000 (97,55%) dan realisasi fisik (100%).
   f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.060.940.000 dengan realisasi keuangan Rp. 1.020.560.500(96,19%) dan realisasi fisik (100%).
   g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi keuangan Rp. 17.241.000 (68,96%) dan realisasi fisik (100%).
   h) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu anggaran sebesar Rp.68.250.000 realisasi keuangan Rp. 56.085.000 (82,18%) dan realisasi fisik (100%).
   i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.488.926.000 realisasi keuangan Rp. 218.554.879 (44,70%) dan realisasi fisik (100%).
   j) Upacara Keagamaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000 realisasi keuangan Rp. 49.293.300 (82,16%) dan realisasi fisik (100%).
   k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 465.900.000 realisasi keuangan Rp. 424.391.579 (91,09%) dan realisasi fisik (100%).
   l) Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.550.000 realisasi keuangan Rp. 33.259.000.00 (96,26%) dan realisasi fisik (100%).

m) Penataan Dokumen Keuangan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 254.946.798 realisasi keuangan Rp.254.326.781,13 (99,76%) dan realisasi fisik (100%).

n) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 293.000.000 realisasi keuangan Rp. 269.915.450 (92,12%) dan realisasi fisik (100%).

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.843.194.564 realisasi keuangan Rp.5.136.382.961,60,- (87,90%) dan realisasi fisik (85,30%).

a) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 984.962.000 realisasi keuangan Rp. 833.444.340 (84,62%). dan realisasi fisik (100%).

b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran Rp.1.994.356.532 realisasi keuangan Rp.1.915.088.295 (96,03%) dan realisasi fisik (100%).

c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran Rp.2.127.942.332 realisasi keuangan Rp.2.009.820.686,30 (94,95%) dan realisasi fisik (100%).

d) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota se-Bali dengan pagu anggaran Rp.378.765.100 realisasi keuangan Rp.194.025.900 (51,23%) dan realisasi fisik (75%).

e) Peningkatan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.357.168.600 realisasi keuangan Rp.184.003.740 (51,52%) dan realisasi fisik (51,52%).

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.444.696.712 realisasi keuangan Rp.3.751.668.620,64 (68,91%) dan realisasi fisik (73,45%).

a) Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran Rp. 424.452.832 realisasi keuangan Rp. 390.236.711 (91,94%) dan realisasi fisik (91,94%)

b) Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran Rp.220.000.000 realisasi keuangan Rp.199.064.285 (90,48%) dan realisasi fisik (100%).

c) Penataan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 124.975.300 realisasi keuangan Rp. 111.775.095,29 (89,44%) dan realisai fisik (93,17%).

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 3.146.867.580 realisasi keuangan Rp.2.953.429.289,05 (93,85%) dan realisasi fisik (99,88%).

e) Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp.153.284.000 realisasi keuangan Rp.83.536.440 (54,50%) dan realisasi fisik (54,72%).

f) Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Properti Aset Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 1.375.117.000 realisasi keuangan Rp.13.626.800 (0,99%) dan realisasi fisik (0,99%) disebabkan Gagal Tender/Lelang.

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran Rp.1.422.524.432 realisasi keuangan Rp. 1.090.561.314,26 (76,66%) dan realisasi fisik (89,99%).

a) Penatausahaan Belanja Daerah dengan pagu anggaran Rp. 619.302.000 realisasi keuangan Rp.427.959.125 (69,10%) dan realisasi fisik (100%).

b) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD) dengan pagu anggaran Rp.105.124.000 realisasi keuangan Rp. 51.030.800 (48,54%) dan realisasi fisik (82%).

c) Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran Rp. 179.613.016 realisasi keuangan Rp. 151.618.770,63 (84,41%) dan realisasi fisik (84,41%).

d) Peningkatan Kompetensi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 117.009.416 realisasi keuangan Rp.108.628.593,63 (92,84%) dan realisasi fisik (100%).

e) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 354.702.000 realisasi keuangan Rp.316.938.825 (89,35%) dan realisasi fisik (100%).

f) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota se-Bali dengan pagu anggaran Rp. 46.774.000 realisasi keuangan sebesar Rp. 34.385.200 (73,51%) dan realisasi fisik (73,51%).

5) Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah pada UPT. Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.222.529.900 realisasi keuangan Rp.1.019.078.980,- (83,36%) dan realisasi fisik (97,61%).

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran Rp.1.925.000 realisasi keuangan Rp. 1.924.500 (99,97%) dan realisasi fisik (100%).

b) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp. 40.765.800 realisasi keuangan Rp. 36.208.000 (88,82%) dan realisasi fisik (100%).

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 13.395.100 realisasi keuangan Rp. 11.935.000 (89,10%) dan realisasi fisik (100%).

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran Rp. 4.140.000 realisasi keuangan Rp. 4.039.500 (97,57%) dan realisasi fisik (100%).

e) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu anggaran Rp.8.000.000 realisasi keuangan Rp. 8.000.000 (100%) dan realisasi fisik (100%).

f) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah, dengan pagu anggaran Rp.32.548.000 realisasi keuangan Rp. 26.130.520 (80,28%) dan realisasi fisik (100%).

g) Upacara Keagamaan, dengan pagu anggaran Rp. 5.700.000 realisasi keuangan Rp. 4.542.000 (79,68%) dan realisasi fisik (100%).

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dengan pagu anggaran Rp. 102.300.000 realisasi keuangan Rp. 96.464.350 (94,30%) dan realisasi fisik (100%).

i) Pengamanan dan Persertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp.711.950.000 realisasi keuangan Rp.541.813.624 (76,10%) dan realisasi fisik (76,10%).

j) Penataan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp.301.806.000 realisasi keuangan sebesar Rp.288.021.486 (95,43%) dan realisasi fisik (83,36%).

BPKAD selaku SKPKD pada Tahun Anggaran 2019 juga mengelola dana PPKD berupa Belanja Tidak Langsung (BTL), dengan pagu anggaran Rp. 3.287.725.971.445,20 dan realisasi Rp. 3.111.610.287.227,53 (94,64%). Adapun rincian Belanja Tidak Langsung PPKD sebagai berikut :

1) Belanja Subsidi, dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.9.903.628.000,- (99,04%).

2) Belanja Hibah, dengan pagu anggaran Rp.1.065.541.042.600,- dan realisasi keuangan Rp.981.774.255.575,81,- (92,14%).

3) Belanja Bantuan Sosial, dengan pagu anggaran Rp.4.220.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.3.884.500.000,- (92,05%).

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa, dengan pagu anggaran Rp.1.339.553.585.283,20 dan realisasi keuangan Rp.1.302.125.715.639,33 (97,21%).

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, dengan pagu anggaran Rp. 856.313.067.054,- dan realisasi keuangan Rp. 812.739.470.085,21 (94,91%).

6) Belanja Tidak Terduga, dengan pagu anggaran Rp.12.098.276.508,- dan realisasi keuangan Rp.1.182.717.927,18,- (9,78%).

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
A	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		100	3.815.482.798	100		99,69	3.077.711.244,13	80,66
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	100	2.900.000	100	2 jenis	100	2.400.000	82,76
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	100	576.000.000	100	4 jenis	95,65	276.717.245	48,04

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
3	Penyediaan alat tulis kantor	1 jenis	100	199.190.000	100	1 jenis	100	191.889.310	96,33
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	100	95.880.000	100	3 Jenis	100	77.751.200	81,09
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	100	190.000.000	100	2 jenis	100	185.353.000	97,55
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	100	1.060.940.000	100	2 jenis	100	1.020.560.500	96,19
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	100	25.000.000	100	2 jenis	100	17.241.000	68,96
8	Penyediaan makanan dan minuman	3 jenis	100	68.250.000	100	3 jenis	100	58.085.000	82,18
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	2 jenis	100	488.926.000	100	2 jenis	100	218.554.879	44,70
10	Upacara Keagamaan	1 jenis	100	60.000.000	100	1 jenis	100	49.293.300	82,16
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 jenis	100	465.900.000	100	2 jenis	100	424.391.579	91,09
12	Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	10 kegiatan	100	34.550.000	100	10 kegiatan	100	33.259.000	95,28
13	Penataan Dokumen Keuangan Daerah	3 jenis	100	254.946.798	100	3 jenis	100	254.326.781,13	99,76
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	100	293.000.000	100	6 jenis	100	269.915.450	92,12
B	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	5.843.194.564	100		85,30	5.136.382.961,60	87,90
1	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	74 dokumen	100	984.962.000	100	74 dokumen	100	833.444.340	84,62
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	1 Ranperda dan 2 Ranpergub	100	1.994.356.532	100	1 Ranperda dan 2 Ranpergub	100	1.915.088.295,30	96,03
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.	1 Ranperda dan 1 Ranpergub	100	2.127.942.332	100	1 Ranperda dan 1 Ranpergub	100	2.009.820.686,30	94,45
4	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD (Induk/Perubahan) dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD (Induk/Perubahan) Kabupaten/Kota se-Bali	18 SK Gubernur	100	378.765.100	100	18 SK Gubernur	100	194.025.900	51,23
5	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	- 1 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota - 8 orang	100	357.168.600	100	- 1 Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota - 8 orang	100	184.003.740	51,52
C	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100	5.444.696.712	100		73,45	3.751.668.620,64	68,91
1	Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 laporan	100	424.452.832	100	2 laporan	91,94	390.236.711,30	91,94
2	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	20 SK	100	220.000.000	100	20 SK	100	199.064.285	90,48

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
3	Penataan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali	5 SK	100	124.975.300	100	5 SK	93,17	111.775.095,29	89,44
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali	4 laporan	100	3.146.867.580	100	4 laporan	99,88	2.953.429.289,05	93,85
5	Pendataan dan Pemetaan Aset Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bal	1 laporan	100	153.284.000	100	1 laporan	54,72	83.536.440	54,50
6	Penyediaan jasa asuransi kendaraan dan properti aset Pemerintah Provinsi Bali	100 buah kendaraan dinas dan 15 unit gedung	100	1.375.117.000	100	100 buah kendaraan dinas dan 15 unit gedung	0,99	13.626.800	0,99
D	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	1.422.524.432	100		89,99	1.090.561.314,26	76,66
1	Penatausahaan Belanja Daerah	- 25.000 SP2D; - 31 laporan	100	619.302.000	100	- 25.000 SP2D; - 31 laporan	100	427.959.125	69,10
2	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)	3 temuan	100	105.124.000	100	3 temuan	82	51.030.800	48,54
3	Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah	36 laporan	100	179.613.016	100	36 laporan	84,41	151.618.770,63	84,41
4	Penilaian Penerapan PPK BLUD	-	100	-	100	-	-	0	-
5	Peningkatan kompetensi penatausahaan keuangan daerah	172 bendahara	100	117.009.416	100	172 bendahara	100	108.628.593,63	92,84
6	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali	2 laporan; 1 Perda; dan 1 Pergub	100	354.702.000	100	2 laporan; 1 Perda; dan 1 Pergub	100	316.938.825	89,35
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali	9 SK Gubernur	100	46.774.000	100	9 SK Gubernur	73,51	34.385.200	73,51
E	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada UPTD PBMD		100	1.222.529.900	100		97,61	1.019.078.980	83,36
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	100	1.925.000	100	2 jenis	99,97	1.924.500	99,7
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 jenis	100	40.765.800	100	1 jenis	88,82	36.208.000	88,82
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	100	13.395.100	100	3 jenis	89,10	11.935.000	89,10
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	100	4.140.000	100	1 jenis	97,57	4.039.500	97,57
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 jenis	100	8.000.000	100	1 jenis	100	8.000.000	100
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	2 jenis	100	32.548.000	100	2 jenis	80,28	26.130.520	80,28
7	Upacara Keagamaan	1 jenis	100	5.700.000	100	1 jenis	79,68	4.542.000	79,68
8	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	2 jenis	100	102.300.000	100	2 jenis	94,30	96.464.350	94,30
9	Pengamanan dan Persertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	1 paket; 100 bidang tanah; 200 buah patok	100	711.950.000	100	1 paket; 100 bidang tanah; 200 buah patok	76,10	541.813.624	76,10

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%
		batas; 40 papan nama kepemilikan; dan 1 sistem informasi dan data tanah aset pemerintah provinsi bali berbasis website				batas; 40 papan nama kepemilikan; dan 1 sistem informasi dan data tanah aset pemerintah provinsi bali berbasis website			
10	Penataan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bali	40 Buku	100	301.806.000	100	40 Buku	95,43	288.021.486	95,43

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- Belum konsistennya PPTK melaksanakan rencana kegiatan dengan aliran kas yang sudah ditetapkan sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
- Belum memadainya penguasaan SDM tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah terhadap teknologi informasi khususnya system informasi pengelolaan keuangan dan aset (Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD) serta jaringan internet yang belum lancar/*trouble* di SKPD.
- Belum optimalnya rekonsiliasi nilai perolehan dan perhitungan aset sebagai akibat belum terindentifikasinya asset *idle* secara menyeluruh pada perangkat daerah/unit pengguna.
- Kurangnya pengamanan fisik (belum dipasang patok batas dan papan nama kepemilikan aset) terhadap aset Pemerintah Provinsi Bali.
- Belum optimalnya penyusunan RKBMD yang mengacu pada daftar inventaris barang dan rencana pemeliharaan barang.
- Belum optimalnya pengamanan asset tanah Pemprov Bali karena masih terdapat gugatan dan penguasaan oleh pihak ketiga.

2) Solusi :

- Perlunya kedisiplinan bagi PPTK agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui evaluasi dan pembinaan kepada SKPD dengan mengadakan pelatihan secara berkala.
- Melakukan rekonsiliasi data asset secara berkala dan mensosilisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan asset.

- Melakukan pengaman asset Pemerintah Provinsi Bali dengan pemasangan patok dan papan nama secara berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta asset-asset yang strategis.
- Lebih cermat dalam memverifikasi perencanaan RKA SKPD terkait dengan Belanja Modal dan sudah tercatat dalam penyusunan RKBMD SKPD.
- Perlunya adanya sosialisasi Peraturan-Peraturan dengan masyarakat terkait dengan Asset Tanah sehingga tidak adanya peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Memasuki era globalisasi yang semakin kompetitif, sumber daya manusia aparatur khususnya PNS menghadapi tantangan yang tidak ringan seiring dengan tuntutan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan paradigma dalam administrasi publik, penyelenggaraan otonomi daerah, perwujudan *good governance* dan reformasi birokrasi, mensyaratkan sumber daya manusia aparatur untuk memiliki kompetensi yang handal dalam menghadapi tantangan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (BPSDM Provinsi Bali) merupakan Badan Daerah Provinsi Bali dengan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan. BPSDM Provinsi Bali merupakan fungsi penunjang tugas Gubernur yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional merupakan program prioritas dalam pencapaian sasaran ini terutama diukur melalui peningkatan kualitas para pejabat struktural dan fungsional serta staf yang telah mengikuti berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka fasilitas dan sarana prasarana untuk pendukung kegiatan kediklatan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan diklat, tanpa didukung fasilitas sarana dan prasarana diklat yang memadai serta lingkungan yang representatif pelaksanaan diklat tidak dapat berjalan secara optimal.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah l. Upacara keagamaan m. Rehab mess, ruang belajar dan gedung kantor n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor o. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor p. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi q. Pengembangan Sumber Daya Aparatur r. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
2	Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	a. Penerbitan Media Diklat, Leaflet Profil BPSDM b. Evaluasi Pasca/Dampak Diklat c. Penyusunan Kurikulum, Silabi, Modul Pembelajaran Diklat dan Kerjasama d. Pameran Karya Inovatif Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV e. Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Konstribusi f. Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Diklat h. Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi i. Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j. Uji Kompetensi Polisi Kehutanan k. Implementasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) l. Pengembangan Kompetensi Widyaiswara/Pejabat Struktural S3
3	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	a. Diklat Peningkatan Kapasitas Widyaiswara dan Pejabat Struktural b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV c. Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontribusi d. Diklat Kepemimpinan Tk. III e. Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontribusi f. Diklat Kepemimpinan Tk. II g. Diklat Kepemimpinan Tk. II Pola Kontribusi h. Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III i. Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Pola Kontribusi j. Diklat Prajabatan Gol. I, II, dan III (K1, K2) Pola Kontribusi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		k. Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan l. Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Pola Kontribusi
4	Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	a. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah c. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah d. Diklat Satpol PP Pola Kontribusi e. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah f. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi g. Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik h. Diklat Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural i. Diklat Training Officer Course (TOC) Pola Kontribusi j. Diklat Training Officer Course (TOC) k. Diklat Pengelolaan Pendapatan Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk belanja langsung pada Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.992.389.915 dan terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 42.447.205.848,37 atau 75,80%. Dengan rincian Program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan alokasi dana Rp. 6.332.111.915,- terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 5.534.411.445,37,- atau 87,40%
- Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dengan alokasi dana Rp. 1.781.721.600,- terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 1.473.606.998,- atau 82,71%
- Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan alokasi dana Rp.44.640.568.400,- terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 32.736.699.708,- atau 73,33%
- Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural dengan alokasi dana Rp.3.237.988.000,- terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 2.702.487.697,- atau 83,46%

Dari pelaksanaan ketiga Program tersebut Tahun 2019 jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Bali yang mengikuti Diklat sebanyak 1128 orang, dan jumlah aparatur Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang mengikuti diklat dengan pola kontribusi sebanyak 3119 orang seperti uraian dibawah ini :

- Tersedianya data informasi kediklatan melalui media diklat, profil, dan kalender BPSDM
- Tersedianya Pengkajian Dampak Diklat
- Tersedianya data hasil Pelaksanaan Diklat di OPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali

- Tersedianya kajian Analisis Kebutuhan Diklat prioritas bagi OPD
- Terpilihnya Inovasi terbaik Peserta Diklat pada Pameran Karya Inovatif Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV
- Meningkatnya Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 25 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Barang/Jasa Pemerintah pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 24 orang aparatur Kabupaten/Kota
- Meningkatnya sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 24 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 10 orang aparatur Kabupaten/Kota
- Meningkatnya kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja pada 34 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya kompetensi Widyaiswara/Pejabat Struktural jenjang pendidikan S3 pada 10 orang Widyaiswara/Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 23 orang aparatur Kabupaten/Kota.
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Satuan Polisi Pamong Praja pada 30 orang aparatur Kabupaten Badung
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Training Officer Course (TOC) pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 30 orang aparatur Kabupaten/Kota.
- Meningkatnya Kompetensi Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kapasitas Widyaiswara dan Pejabat Struktural pada 60 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali
- Meningkatnya Kapasitas Polisi Hutan pada 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali.
- Meningkatnya Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas pada 350 orang Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Terdidiknya 5 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 55 orang aparatur Kabupaten/Kota di bidang kepemimpinan nasional Tk. II.

- Terdidiknya 20 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 127 orang aparatur Kabupaten/Kota di bidang kepemimpinan Tk. III.
- Terdidiknya 30 orang aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 246 orang aparatur Kabupaten/Kota di bidang kepemimpinan Tk. IV.
- Terselenggaranya pelatihan prajabatan CPNS 87 orang aparatur Kabupaten/Kota Gol. I, II dan III (K1, K2).
- Terselenggaranya pelatihan dasar CPNS gol. II dan III sebanyak 773 aparatur Pemerintah Provinsi Bali dan 2171 aparatur Kabupaten/Kota.

Adapun target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, BPSDM Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

NO.	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan								
1	Penerbitan Media Diklat, Leaflet Profil BPSDM	480 eksemplar	100	138,588,000	100	480 eksemplar	100	130,481,600	94,15
2	Evaluasi Pasca/Dampak Diklat	1 laporan	100	157,026,000	100	1 laporan	100	118,417,099	75,41
3	Penyusunan Kurikulum, Silabi, Modul Pembelajaran Diklat dan Kerjasama	1 Paket	100	138,588,000	100	1 Paket	100	122,501,700	88,39
4	Pameran Karya Inovatif Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV	1 Laporan	100	99,776,000	100	1 Laporan	100	80,078,400	80,25
5	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi	25 orang	100	160,000,000	100	10 orang	40	89,773,999	56,10
6	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	25 orang	100	101,490,000	100	25 orang	100	99,960,200	98,49
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Diklat	1 Laporan	100	617,000,000	100	1 Laporan	100	495,412,800	80,29
8	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi	30 orang	100	35,400,000	100	24 orang	96	27,953,300	78,96
9	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 orang	100	35,310,400	100	30 orang	100	32,715,800	92,65
10	Uji Kompetensi Polisi Kehutanan	53 orang	100	99,955,200	100	34 orang	64,15	87,140,300	87,17
11	Implementasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)	1 Laporan	100	88,588,000	100	1 Laporan	100	81,311,800	91,78
12	Pengembangan Kompetensi Widyaiswara/Pejabat Struktural S3	10 orang	100	110,000,000	100	10 orang	100	107,900,000	98,09
B	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								
1	Diklat Peningkatan Kapasitas Widyaiswara dan Pejabat Struktural	60 orang	100	404,352,000	100	60 orang	100	136,103,300	33,65

NO.	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(Rp.)	%	VOLUME	%	(Rp.)	%
2	Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontribusi	135 orang	100	2,986,925,000	100	127 orang	94,07	2,445,708,820	81,88
3	Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontribusi	285 orang	100	5,765,550,000	100	246 orang	86,31	4,523,950,737	78,46
4	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	30 orang	100	719,088,000	100	30 orang	100	511,974,490	71,19
5	Diklat Kepemimpinan Tk. III	20 orang	100	530,688,000	100	30 orang	150	381,755,480	71,93
6	Diklat Kepemimpinan Tk. II	10 orang	100	378,891,400	100	5 orang	50	197,694,400	52,17
7	Diklat Kepemimpinan Tk. II Pola Kontribusi	200 orang	100	448,400,000	100	55 orang	27,5	1,611,415,705	359,37
8	Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	30 orang	100	284,388,000	100	30 orang	100	220,913,200	77,68
9	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III	773 orang	100	7,152,322,000	100	773 orang	100	5,135,190,350	71,79
10	Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Pola Kontribusi	2171 orang	100	20,181,616,000	100	2171 orang	100	15,898,019,749	78,74
11	Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III (K1, K2) Pola Kontribusi	200 orang	100	448,400,000	100	87 orang	43,5	148,330,850	33,08
12	Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Pola Kontribusi	350 orang	100	2,100,000,000	100	350 orang	100	1,525,642,627	72,64
C	Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural								
1	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 orang	100	308,250,000	100	30 orang	100	274,256,300	88,97
2	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	30 orang	100	333,400,000	100	30 orang	100	294,084,830	88,20
3	Diklat Satuan Polisi Pamong Praja Pola Kontribusi	30 orang	100	544,500,000	100	30 orang	100	493,638,608	90,65
4	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	30 orang	100	333,600,000	100	30 orang	100	299,913,500	89,90
5	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi	30 orang	100	234,000,000	100	23 orang	76,66	171,156,699	73,14
6	Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik	30 orang	100	315,138,000	100	30 orang	100	298,268,180	94,64
7	Diklat Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural	30 orang	100	320,600,000	100	30 orang	100	302,296,400	94,29
8	Diklat Training Officer Course (TOC)	30 orang	100	313,400,000	100	30 orang	100	296,648,880	94,65
9	Diklat Pengelolaan Pendapatan Daerah	30 orang	100	295,100,000	100	30 orang	100	271,594,300	92,03

Selain itu Capaian Kinerja yang dihasilkan BPSDM Provinsi Bali kurun waktu tahun 2013-2019 yang merupakan prestasi dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 485/K.1/PDP.10.4, dengan sertifikat Akreditasi Nomor 3859/K.1/PDP.10.5 tanggal 29 Desember 2015 menyatakan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali) sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori akreditasi A untuk masa berlaku 5 (Lima) tahun
2. Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori akreditasi A untuk masa berlaku 5 (Lima) tahun

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 380/K.1/PDP.09/2017 dengan Sertifikat Akreditasi Nomor : 191/K.1/PDP.09 tanggal 16 November 2017 menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II dengan kategori Akreditasi A untuk masa berlaku 5 (lima) tahun
2. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dengan kategori Akreditasi A untuk masa berlaku 5 (lima) tahun
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali) memperoleh Akreditasi A dalam menyelenggarakan Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2016 s/d 1 Oktober 2021.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 64 Tahun 2016, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali) ditetapkan juga sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri), Sertifikat Nomor : TUK -089-002 tanggal 2 Desember 2016.Berdasarkan hasil penilaian akreditasi tersebut maka BPSDM Provinsi Bali merupakan satu-satunya Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program kediklatan di Provinsi Bali. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Bali, maka BPSDM Provinsi Bali resmi mendirikan LSP-PDN Provinsi sebagai unit non-struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan
    - Dalam aspek Sumber Daya Aparatur pengelola diklat, jumlah dan kompetensi Pejabat Fungsional belum memadai
    - Penyelenggaraan diklat aparatur yang belum sepenuhnya dikaitkan dengan pola pembinaan karier, baik dalam penempatan jabatan maupun penilaian prestasi kerja.
    - Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan Diklat berbasis kompetensi bagi aparatur sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 bahwa setiap

pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat, seminar, kursus dan penataran belum dapat dipenuhi

2) Solusi

- Berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya kediklatan, utamanya tenaga fungsional Widyaiswara, BPSDM Provinsi Bali memfasilitasi Widyaiswara melaksanakan Orasi Ilmiah, menyusun karya tulis, menyusun buku/modul diklat dan penulisan jurnal diklat sebagai persyaratan menjadi Widyaiswara Utama. Selain itu BPSDM Provinsi Bali juga mengundang pakar/praktisi yang kompeten dibidangnya untuk memberikan materi Diklat.
- Melakukan reorientasi diklat dengan fokus penyelenggaraan diklat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi aparatur serta memberikan masukan dan melakukan pembahasan yang terkait dengan pembinaan penyelenggaraan diklat aparatur dan hubungannya dengan pola pembinaan karier.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar ada peningkatan alokasi anggaran diklat sekurang-kurangnya 0.34% dari total belanja daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Meningkatkan koordinasi antara OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Program Kediklatan secara rutin serta memfasilitasi pelaksanaan kediklatan melalui pola Kontribusi (MoU) agar pelaksanaan "Diklat Satu Pintu" dapat terlaksana dengan baik.
- Memanfaatkan keterlibatan seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Provinsi Bali sebagai panitia dan memanfaatkan para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai tenaga pengajar.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik haruslah senantiasa melibatkan seluruh elemen baik di dalam birokrasi maupun di luar birokrasi. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Governance)* adalah akuntabilitas *(Accountability),* transparansi *(Transparancy),* keterbukaan *(Openness)* dan kerangka hukum *(rule of low).* Sesuai dengan susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, maka dikembangkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat daerah untuk kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD Provinsi Bali. Sebagai konsekwensinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali harus mampu mendukung pelaksanaan Fungsi dan Tugas Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Dewan. Untuk itu diperlukan organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provisi Bali Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
   a. Terlaksananya kegiatan Reses sebanyak 2 kali untuk 55 orang anggota DPRD Provinsi dengan masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan. Tujuan kegiatan adalah memfasilitasi pertemuan antara Anggota Dewan dengan konstituennya selama 10 hari setiap pelaksanaan reses. Dalam 1 tahun kegiatan Reses sebanyak 2 kali sesuai dengan PP 12 Tahun tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa masa Reses bagi Anggota DPRD pada persidangan terkahir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD yaitu masa Reses ditiadakan dan PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   b. Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 14 kali dimana kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Dewan ke luar daerah dalam rangka studi banding.
   c. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi serta Menghadiri Undangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 12 kali, Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Dewan ke luar daerah dalam rangka melakukan koordinasi/konsultasi atau menghadiri undangan.
   d. Terlaksananya pengawasan dari anggota DPRD Provinsi Bali terhadap kerjasama internasional sebanyak 1 kali untuk 55 orang anggota untuk 13 negara. Kegiatan ini meliputi perjalanan ke luar negeri Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali untuk mengawasi kerja sama internasional bersama mitra kerja eksekutif
   e. Terbentuknya Perda Mengenai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perda APBD dan Perubahan APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Perda LKPJ Gubernur, Perubahan APBD 2019 dan Penyusunan APBD 2020 serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun .
   f. Terlaksananya Rapat-Rapat Fraksi sebanyak 35 kali untuk 5 Fraksi yaitu Fraksi Partai PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi

Nasdem, Hanura dan PSI. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak seluruh kegiatan Dewan selama 1 tahun dalam sidang paripurna serta Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Fraksi-Fraksi dalam melakukan rapat, yang terdiri dari penyediaan ATK dan konsumsi serta Menyusun, Menghimpun dan Mencetak Risalah Resmi DPRD Provinsi Bali dalam setahun selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk mencetak seluruh kegiatan Dewan selama 1 tahun yang terdiri dari Perda, Keputusan DPRD dan Usul Saran.

g. Terbentuknya 15 Perda yang terdiri dari 3 Perda inisiatif Dewan dan 11 Perda dari eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali. Dan tersusun dan terhimpunnya Produk Dewan, Keputusan DPRD/Pimpinan dan Usul/Saran DPRD Provinsi Bali sebanyak 240 buku. Yang pelaksanaannya di dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/keputusan Dewan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah serta Kebijakan Daerah Lainnya yang bertujuan untuk membahas Rancangan Perda baik yang merupakan usulan dari eksekutif.

h. Kegiatan Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai Permendagri nomor 14 tahun tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali dan kinerja Dewan berupa Bintek sebanyak 6 kali untuk 55 orang anggota baik bintek dalam daerah sebanyak 3 kali dan bintek luar daerah sebanyak 3 kali.

i. Meningkatnya disiplin Anggota DPRD Provinsi Bali melalui pengawasan Badan Kehormatan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Ketugasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali dimana Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Badan Kehormatan yang merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang bertugas untuk menjaga kedisiplinan Anggota DPRD dan koordinasi dengan provinsi lainnya serta konsultasi ke pusat

2) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi.

a. Meningkatnya peliputan dan penyebarluasan informasi anggota DPRD Provinsi Bali melalui media cetak sebanyak 100 kali seperti nusa, warta, jawa post, radar dan melalui media elektronik sebanyak 21 kali melalui RRI denpasar, TVRI, Dewata TV, BMC TV serta terwujudnya parlementaria kegiatan dewan oleh media cetak dan elektronik sebanyak 19 kali yang dilaksanakan pada kegiatan Peliputan dan penyebarluasan informasi.

b. Terhimpunnya pengaduan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Bali sebanyak 2000 eksemplar dan terhimpunnya Risalah Resmi DPRD Provinsi Bali sebanyak 900 buku pada kegiatan Pengaduan Aspirasi Masyarakat. Tujuan kegiatan adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Jumlah Pegawai

a. Jumlah pegawai keseluruhan 70 orang

b. Kualifikasi menurut pendidikan: SD 2 orang, SMP 1 orang, SLTA 22 orang, Sarjana Muda 5 orang, S1 : 30 orang, S2 : 10 orang.

c. Menurut pangkat dan golongan: I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 19 orang, golongan III sebanyak 42 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.

d. Jumlah jabatan: 11 orang terdiri dari jabatan fungsional 1 orang, dengan jumlah jabatan struktural terisi sampai dengan 1 Juli 2019 adalah sebanyak 10 jabatan struktural.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program prioritas pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali adalah sebagai berikut yaitu :

a) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.213.007.664 realisasi keuangan Rp. 70.631.869.743 (89,26%) realisasi fisik 100%

- Kegiatan Reses Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi berbagai Aspirasi Masyarakat yang berkembang dan permasalahan di masyarakat maka dianggap perlu Anggota DPRD Provinsi Bali terjun kelapangan bertemu dengan konstituennya dengan pagu anggaran Rp. 14.921.812.000 relaisasi keuangan Rp. 12.009.559.000 (80,48%).
- Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan ini bertujuan untuk mencari masukan dan/atau perbandingan terhadap daerah lain mengenai apa yang menjadi program prioritas DPRD Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp. 17.000.000.000 realisasi keuangan
  Rp. 12.982.049.370 (76,36%).
- Kegiatan Penyelenggaraan Ketugasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali Kegiatan ini bertujuan untuk Koordinasi dan Konsultasi serta Menghadiri Undangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah di seluruh Indonesia agar Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali dapat melaksanakan tugas dan Fungsinya secara maksimal, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dan pihak lainnya yang bermanfaat bagi daerah Bali dengan pagu anggaran Rp. 18.700.000.000 realisasi keuangan Rp. 13.601.081.263 (72,73%).
- Kegiatan Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali melalui bimbingan teknis yang mana materi lebih menekankan tugas dan fungsi DPRD secara sistematis, dengan pagu anggaran Rp. 4.500.000.000 realisasi keuangan Rp. 2.666.675.250 (59,26%).
- Kegiatan Pengawasan terhadap Kerjasama Internasional dan Undangan Bersama Mitra Kerja Eksekutif Kegiatan ini bertujuan untuk Terjalinnya kerjasama Internasional untuk

meningkatkan kunjungan wisawatan ke daerah Bali, dengan pagu anggaran Rp. 9.122.664.664 realisasi keuangan Rp. 6.370.309.450 (69,83%).

- Kegiatan Menyusun, Menghimpun, dan Mencetak Risalah Resmi DPRD Provinsi Bali dan Dukungan Operasional Fraksi-Fraksi Kegiatan ini bertujuan tersusunnya buku Risalah kegiatan DPRD Provinsi Bali yang merupakan himpunan atau kumpulan dari kegiatan-kegiatan anggota selama satu tahun, yang nantinya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dari kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 1.848.531.000 realisasi keuangan Rp. 1.431.091.400 (77,42%).
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Himpunan Laporan Dewan/Pansus, Pandangan Umum Fraksi, Makalah Dewan Kegiatan ini merupakan rencana kerja kegiatan Anggota DPRD Provinsi Bali dalam satu tahun sebagai kerangka acuan pelaksanaan kegiatan Anggota DPRD Provinsi Bali dalam 1 Tahun, dengan pagu anggaran Rp. 4.600.000.000 realisasi keuangan Rp. 3.411.117.700 (74,15%).
- Kegiatan Penyelenggaraan Ketugasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali Kegiatan ini meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dan pihak lainnya yang bermanfaat bagi daerah Bali, dengan pagu anggaran Rp. 1.150.000.000 realisasi keuangan Rp. 62.045.000 (5,40%).
- Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemerintah Daerah Provinsi Bali Kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan untuk memperingati dan merayakan terbentuknya Pemerintah Daerah Provinsi Bali, dengan pagu anggaran Rp. 420.000.000 realisasi keuangan Rp. 291.539.500 (69,41%).
- Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Peraturan Daerah serta Kebijakan Lainnya Pembahasan peraturan daerah, monitoring, evaluasi dan pengawasan peraturan daerah serta kebijakan daerah lainnya merupakan kegiatan Anggota DPRD Provinsi Bali dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol untuk menghasilkan produk-produk dewan dan peraturan daerah, dengan pagu anggaran Rp. 14.800.000.000 realisasi keuangan Rp. 10.114.352.276 (68,34%).
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Bali Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan serta sebagai bahan pembanding dalam pembahasan dinamika dan tugas-tugas DPRD sesuai dengan bidang pemerintahan yang mereka kerjakan (Bidang Pemerintahan oleh Komisi 1 (satu), Bidang Perekonomian oleh Komise II (dua), Bidang Pembangunan oleh Komisi III (tiga), dan Bidang Kesejahteraan oleh Komisi IV (empat), dengan pagu anggaran Rp. 1.650.000.000 realisasi keuangan Rp. 1.142.663.992 (69,25%).

- Kegiatan Pembahasan Raperda mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya, APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan APBD Tahun Berikutnya Kegiatan ini dilaksanakan untuk Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka Pembahasan Ranperda Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, Perubahan APBD tahun berjalan dan Penyusunan APBD tahun yang akan datang guna terwujudnya draf Peraturan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 9.500.000.000 realisasi keuangan Rp. 6.549.385.542 (68,94%).

b) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

- Kegiatan Peliputan dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan segala bentuk kegiatan yang ada pada secretariat DPRD terhadap masyarakat, sehingga apa yang menjadi program pembangunan yang dirancang DPRD Provinsi Bali bisa diketahui oleh masyarakat, dengan pagu anggaran Rp. 3.100.000.000 realisasi keuangan Rp. 2.294.538.364 (74,02%).
- Kegiatan Pengaduan Aspirasi Masyarakat Kegiatan ini Dalam rangka menyikapi berbagai Pengaduan Aspirasi Masyarakat yang berkembang dan permasalahan di masyarakat yang disampaikan ke DPRD Provinsi Bali maka perlu ditampung dan ditindak lanjuti permasalahan tersebut,dengan pagu anggaran Rp. 8.150.000.000 realisasi keuangan Rp. 7.397.355.910 (90,77%).

Realisasi Pelaksaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Rp.	%	Volume	%	Rp.	%
A	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.								
1	Kegiatan Reses	2 kali	100	15,422,936,100	100	2 kali	100	13,632,716,500	88.39
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	14 kali	100	21,083,311,976	100	14 kali	100	14,958,963,499	70.95
3	Penyelenggaraan Ketugasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	12 kali	100	19,946,311,400	100	12 kali	100	15,946,689,194	79.95
4	Studi Komparasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Berbasis Internasional	13 negara	100	7,123,021,000	100	13 negara	100	5,229,498,100	73.42
5	Pembahasan Ranperda Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan dan Penyusunan APBD Tahun Berikutnya	4 Kpts	100	10,000,000,000	100	4 Kpts	100	7,411,296,096	74.11
6	Persidangan dan Risalah	400 buku	100	3,646,148,144	100	400 buku	100	3,068,147,595	84.15

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	Rp.	%	Volume	%	Rp.	%
7	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/keputusan Dewan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah serta Kebijakan Daerah Lainnya	15 Kpts	100	21,180,422,504	100	15 Kpts	100	17,353,876,869	81.93
8	Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kali	100	9,811,995,023	100	6 kali	100	7,712,269,660	78.6
B	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi								
1	Peliputan dan Penyebarluasan informasi	21 kali	100	3,431,546,128	100	21 kali	100	2,535,690,717	73.89
2	Penyampaian/Koordinasi Aspirasi Masyarakat	300 buku	100	9,755,850,000	100	300 buku	100	8,579,807,650	87.95

Sarana dan Prasarana

Untuk Sarana dan Prasarana yang meliputi gedung, dan peralatan kantor lainnya, untuk melaksanakan program kegiatan urusan bidang pemerintahan umum cukup memadai. Untuk secara rinci dapat di lihat dalam lampiran.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dibidang urusan pemerintahan umum yaitu:

- Masih kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi, latar belakang pendidikan aparat yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tugas pokok dan fungsi bagian yang diemban yang akhirnya mengakibatkan produktifitas aparatur tidak optimal;
- Kurangnya koordinasi dan perencanaan yang baik sehingga ada kegiatan yang terkesan dipaksakan dan tidak terencana.

Solusi

Dari beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian maka perlu adanya beberapa solusi yaitu :

- Menetapkan agenda Program / Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta qualifikasi staf berdasarkan pertimbangan administratif dan substantif serta di mungkinkan adanya rekrutmen untuk staf fungsional;
- Perlunya disusun perencanaan yang matang dan terkoordinasi secara baik.

8. Pengawasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab Kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, pemberian kewenangan yang luas tersebut dimaksudkan sebagai upaya Pemberdayaan Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik. Agar pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan adanya Pengawasan yang ketat, objektif dan transparan.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu fungsi manajemen yang harus ada, karena pengawasan merupakan kegiatan mencocokkan antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan sehingga dapat diketahui suatu program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Hasil pengawasan disamping sebagai koreksi terhadap pelaksanaan tugas, juga merupakan umpan balik penyusunan rencana pada tahun berikutnya.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan Pengawalan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pembinaan dan Pengawasan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan meliputi Pemeriksaan, Review dan Evaluasi serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal. Pemeriksaan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Kasus. Review dilaksanakan melalui Review Dokumen Perencanaan, Review Pengadaan Barang dan Jasa dan Review LKPD, Evaluasi melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD), Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK). Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan melalui Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bali dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan BPK RI. Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini sangat penting karena semua hasil pemeriksaan itu tidak akan ada artinya jika tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud. Dalam implementasinya kebijakan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e) Penyediaan Alat Tulis Kantor f) Penyediaan Barang Cetakan g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan i) Penyediaan Makanan dan Minuman j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah k) Upacara Keagamaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		l) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor n) Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja o) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor p) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	Monitoring Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	a) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan b) Pemantauan Tindak Lanjut dan Pemuktahiran Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
3	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH	a) Perlengkapan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah b) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional c) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas d) Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blowers System e) Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah f) Pemeriksaan Reguler g) Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah h) Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai i) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah j) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah k) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah l) Pengawasan Dana Desa m) Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar n) Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah o) Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/Kota p) Evaluasi PPRG q) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi r) Pembentukan Tunas Integritas Anti Korupsi dan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi s) Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah t) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah u) Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Bali per 31 Desember 2019 seluruhnya berjumlah 148 orang terdiri dari 102 orang PNS dan 46 orang tenaga kontrak.

PNS dengan kualifikasi :

a. Pendidikan : SMP 2 orang , SMA 10 orang, Sarjana (S1) 39 orang Magister (S2) 48 orang.

b. Pangkat/Golongan : Golongan IV sebanyak 23 orang, Golongan III sebanyak 67 orang dan Golongan II sebanyak 12 orang.
c. Jabatan struktural 9 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang eselon III dan 3 orang eselon IV dan jabatan fungsional 57 orang terdiri dari Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 23 orang dan Auditor 34 orang.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Inspektorat Provinsi Bali adalah sebagai berikut yaitu :

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp.v4.412.995.520 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.945.522.346 (89,41%)
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Bulan capaian 12 Bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 realisasi keuangan Rp. 9.016.000 (60,11%)
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik target 12 Bulan capaian 12 Bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 252.100.000 realisasi keuangan Rp. 245.599.568 (97,42%)
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Keberishan Kantor target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 872.539.200 realisasi keuangan Rp. 862.682.185 (98,87%)
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 251.546.200 realisasi keuangan Rp. 249.656.719 (99,25%)
   - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 realisasi keuangan Rp. 98.697.610 (98,70%)
   - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 12 bulan capaian 12 bulan (100%), pagu anggaran Rp. 40.000.000 realisasi keuangan Rp. 39.710.800 (99,28%)
   - Kegiatan Penanganan Whistle Blower Sistem dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000 realisasi keuangan Rp. 23.700.000 (94,80%)
   - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000 realisasi keuangan Rp. 34.984.000 (99,95%)
   - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan target 12 bulan, capaian 12 bula (100%), dengan pagu anggaran Rp. 158.750.000 realisasi keuangan Rp. 157.025.000 (98,91%)

- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 1.082.071.420 realisasi keuangan Rp. 746.136.159 (68,95%)
- Kegiatan Upacara Keagamaan dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000 realisasi keuangan Rp. 74.794.500 (99,73%)
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 939.700.000 realisasi keuangan Rp. 846.011.980 (90,03%)
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 320.515.500 realisasi keuangan Rp. 314.596.731 (98,15%)
- Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan target 4 laporan, capaian 4 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 70.000.000 realisasi keuangan Rp. 67.978.200 (97,11%)
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 150.773.200 realisasi keuangan Rp. 150.236.294 (99,64%)
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000 realisasi keuangan Rp. 24.696.600 (98,79%)

2) Program Monitoring Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 715.860.716 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 693.062.988 (96,81%)
   - Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan target 100 persen, capaian 100 persen (100%), pagu anggaran Rp. 390.345.216 realisasi keuangan Rp. 371.587.392 (95,19%)
   - Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut dan Pemuktahiran Data Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dengan target 35 LHP, capaian 35 LHP (100%), dengan pagu anggaran Rp. 325.515.500 realisasi keuangan Rp. 321.475.596 (98,76%)
3) Program Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH dengan pagu anggaran Rp. 4.216.216.796 realisasi keuangan Rp. 3.998.875.607 (94,85%)
   - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 632.067.100 realisasi anggaran Rp. 560.658.819 (88,70%)

- Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan target 2 laporan, capaian kinerja 2 laporan (100%), pagu anggaran Rp. 100.000.000 realisasi keuangan Rp. 81.833.301 (81,83%)
- Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan target 2 laporan, capaian 2 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 realisasi keuangan Rp. 90.550.100 (90,55%)
- Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System dengan target 4 laporan, capaian 4 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 65.000.000 realisasi keuangan Rp. 61.348.500 (94,38%)
- Kegiatan Review Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Barang Jasa Pemerintah Daerah dengan target 4 laporan, capaian 4 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 125.515.500 realisasi keuangan Rp. 111.310.796 (88,68%)
- Kegiatan Pemeriksaan Reguler dengan target 55 laporan, capaian 55 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 840.000.000 realisasi keuangan Rp. 810.850.412 (96,53%)
- Kegiatan Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah dengan target 8 dokumen, capaian 8 dokumen (100%), dengan pagu anggaran Rp. 88.719.432 realisasi keuangan Rp. 88.388.596 (99,63%)
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai dengan target 12 bulan, capaian 12 bulan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 209.659.632 realisasi anggaran Rp. 201.069.492 (95,90%)
- Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan target 2 laporan, capaian 2 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 70.000.000 realisasi keuangan Rp. 67.316.558 (96,17%)
- Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target 9 laporan, capaian 9 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 169.850.000 realisasi keuangan Rp. 158.232.100 (93,16%)
- Kegaitan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target 38 entitas, capaian 38 entitas (100%), dengan pagu anggaran Rp. 79.116.432 realisasi keuangan Rp. 78.956.996 (99,80%)
- Kegiatan Pengawasan Dana Desa dengan target 40 desa (2 laporan), capaian 40 desa (2 laporan) (100%), dengan pagu anggaran Rp. 275.773.200 realisasi keuangan Rp. 271.327.894 (98,39%)
- Kegiatan Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan target 12 laporan, capaian 12 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000 realisasi keuangan Rp. 198.817.480 (99,41%)

- Kegiatan Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah dengan target 16 laporan, capaian 16 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 realisasi keuangan Rp. 95.557.109 (95,56%)
- Kegiatan Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/Kota dengan target 1 laporan, capaian 1 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000 realisasi keuangan Rp. 49.383.200 (98,77%)
- Kegiatan Evaluasi PPRG dengan target 1 laporan, capaian 1 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000 realisasi keuangan Rp. 70.913.400 (94,55%)
- Kegiatan Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan target 3 laporan, capaian 3 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 275.000.000 realisasi keuangan Rp. 268.964.560 (97,81%)
- Kegiatan Pembentukan Tunas Integritas Anti Korupsi dan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikas dengan target 11 laporan, capaian 11 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 325.515.500 realisasi keuangan Rp. 310.491.714 (95,38%)
- Kegiatan Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan target 50 laporan, capaian 50 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000 realiasi keuangan Rp. 94.605.910 (94,61%)
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan target 1 laporan, capaian 1 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 135.000.000 realisasi keuangan Rp. 128.778.800 (95,39%)
- Kegiatan Pemeriksaan Kasus, Khsus, dan Tujuan Tertentu dengan target 8 laporan, capaian 8 laporan (100%), dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000 realisasi keuangna Rp. 199.519.870 (99,76%)

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(Rp.)	%	VOL	%	(Rp.)	%
A	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		100	4,412,995,520	100		100	3,945,522,346	89,41
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	100	15,000,000	100	12 bulan	100	9,016,000	60,11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	100	252,100,000	100		100	245,599,568	95,22
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 bulan	100	872,539,200	100	12 Bulan	100	862,682,185	98,87
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	100	251,546,200	100	12 bulan	100	249,656,719	99,25
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	100	100,000,000	100	12 bulan	100	98,697,610	98,70

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(Rp.)	%	VOL	%	(Rp.)	%
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	100	40,000,000	100	12 bulan	100	39,710,800	99,28
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	100	40,000,000	100	12 bulan	100	39,710,800	99,28
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	100	25,000,000	100	12 bulan	100	23,700,000	94,80
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	100	35,000,000	100	12 bulan	100	34,984,000	99,95
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	100	158,750,000	100	12 bulan	100	157,025,000	98,91
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 bulan	100	1,082,071,420	100	12 bulan	100	746,136,159	68,95
12	Upacara Keagamaan	12 bulan	100	75,000,000	100	12 bulan	100	74,794,500	99,73
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	100	939,700,000	100	12 bulan	100	846,011,980	90,03
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	100	320,515,500	100	12 bulan	100	314,596,731	98,15
15	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja	4 laporan	100	70,000,000	100	4 laporan	100	67,978,200	97,11
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	100	150,773,200	100	12 bulan	100	150,236,294	99,64
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	100	25,000,000	100	12 bulan	100	24,696,600	98,79
B	Monitoring Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal		100	715,860,716	100		100	693,062,988	96,81
1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	100 persen	100	390,345,216	100	100 persen	100	371,587,392	95,19
2	Pemantuan Tindak Lanjut dan Pemuktahiran Data Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	35 LHP	100	325,515,500	100	35 LHP	100	321,475,596	98,76
C	Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH		100	4,216,216,796	100		100	3,998,875,607	94,85
1	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	12 bulan	100	632,067,100	100	12 bulan	100	560,658,819	88,70
2	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	2 laporan	100	100,000,000	100	2 laporan	100	81,833,301	81,83
3	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	2 laporan	100	100,000,000	100	2 laporan	100	90,550,100	90,55

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(Rp.)	%	VOL	%	(Rp.)	%
4	Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System	4 laporan	100	65,000,000	100	4 laporan	100	61,348,500	94,38
5	Review Penyerapan Anggaran dan Penggadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah	4 laporan	100	125,515,500	100	4 laporan	100	111,310,796	88,68
6	Pemeriksaan Reguler	55 laporan	100	840,000,000	100	55 laporan	100	810,850,412	96,53
7	Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	8 dok	100	88,719,432	100	8 dok	100	88,388,596	99,63
8	Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai	12 bulan	100	209,659,632	100	12 bulan	100	201,069,492	95,90
9	Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	2 laporan	100	70,000,000	100	2 laporan	100	67,316,558	96,17
10	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9 laporan	100	169,850,000	100	9 laporan	100	158,232,100	93,16
11	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38 entitas	100	79,116,432	100	38 entitas	100	78,956,996	99,80
12	Pengawasan Dana Desa	40 desa (2 laporan)	100	275,773,200	100	40 desa (2 laporan)	100	271,327,894	98,39
13	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	12 laporan	100	200,000,000	100	12 laporan	100	198,817,480	99,41
14	Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah	16 laporan	100	100,000,000	100	16 laporan	100	95,557,109	95,56
15	Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/Kota	1 laporan	100	50,000,000	100	1 laporan	100	49,383,200	98,77
16	Evaluasi PPRG	1 laporan	100	75,000,000	100	1 laporan	100	70,913,400	94,55
17	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	3 laporan	100	275,000,000	100	3 laporan	100	268,964,560	97,81
18	Pembentukan Tunas Integritas Anti Korupsi dan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	11 laporan	100	325,515,500	100	11 laporan	100	310,491,714	95,38
19	Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	50 laporan	100	100,000,000	100	50 laporan	100	94,605,910	94,61
20	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 laporan	100	135,000,000	100	1 laporan	100	128,778,800	95,39
21	Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu	8 laporan	100	200,000,000	100	8 laporan	100	199,519,870	99,76

Kondisi Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan parasana yang tersedia di Inspektorat Provinsi Bali cukup memadai, namun mengingat pelaksanaan tugas-tugas pengawasan terutama penyelesaian

LHP harus tepat waktu, maka ketersediaan sarana prasarana siap pakai perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilakukan penambahan dan pemeliharaan secara berkala, misalnya komputer.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah :

1. Pengelolaan keuangan dan aset belum maksimal sehingga sering menjadi temuan pihak pemeriksa eksternal dalam hal ini BPK RI;
2. Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota baik itu hasil pemeriksaan APIP maupun eksternal belum sepenuhnya dapat dipenuhi tepat waktu karena adanya permasalahan internal pada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dimaksud.

Solusi

Solusi yang harus dilakukan untuk permasalahan tersebut diatas antara lain :

a) Meningkatkan intensitas pembinaan pada perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset serta mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset dimaksud.
b) Meningkatkan koordinasi dan monitoring dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

9. Penyelenggaraan Pelayan Publik

Dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan reformasi birokrasi, dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali dengan ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dimaksud, tuntutan peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik, Pelayanan Publik yang berkualitas tidak dapat dihindarkan karena tatakelola pemerintahan yang baik. Pelayanan Publik merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (good governance) dan Clean Government sebagai ukuran pencapaian sasaran tatakelola pemerintah di pelayanan publik adalah index reformasi birokrasi sehingga road map reformasi birokrasi menjadi program prioritas untuk dilaksanakan. Dalam hubungan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah melakukan beberapa program/kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	a. Penyusunan Evaluasi Jabatan b. Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali c. Pembinaan dan Pengendalian Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	Perangkat Daerah	d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan e. Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional
2	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	a. Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali b. Pembangunan ZI WBK/WBBM c. Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali d. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik e. Pembinaan Tatalaksana Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	a. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali b. Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi c. Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali d. Penataan Administrasi Kepegawaian PNS Setda e. Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor b. Penyediaan Alat Tulis Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur k. Penyusunan,Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tk. I (IV/b)	4
4	Pembina (IV/a)	3
5	Penata Tk. I (III/d)	8
6	Penata (III/c)	3
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
8	Penata Muda (III/a)	6
9	Pengatur Tk. I (II/d)	-
10	Pengatur (II/c)	2
11	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
12	Pengatur Muda (II/a)	-
13	Juru Tk. I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
TOTAL		**33**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali selama Tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
   - Realisasi/pencapaian Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali sebanyak 1 Laporan dengan realisasi Anggaran Rp. 159.328.480,- (84,90%)
   - Realisasi/pencapaian Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 9 Kab/Kota dengan realisasi anggaran Rp. 142.281.238,- (94,64%)
   - Realisasi/pencapaian Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional
   - sebanyak 36 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 146.165.203,- (88,18%)
   - Realisasi/pencapaian Penyusunan Evaluasi Jabatan Sebanyak 1 Dokumen
   - dengan realisasi anggaran Rp. 95.055.000,- (64,59%)
   - Realisasi/pencapaian Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sebanyak 36 Dokumen
   - dengan realisasi anggaran Rp. 78.864.080,- (67,30%)
2) Program Peningkatan Ketatalaksana Dan Kualitas Pelayanan Publik
   - Realisasi/pencapaian Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bal sebanyak 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 78.728.000,-(95,96%)
   - Realisasi/pencapaian Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 36 OPD dengan realisasi anggaran Rp. 54.597.500,-(93,19)
   - Realisasi/pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sebanyak 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 37.832.400,- (42,04%)
   - Realisasi/pencapaian Pembangunan ZI WBK/WBBM sebanyak 3 OPD dengan realisasi anggaran Rp. 45.245.900,- (90,49%)
   - Realisasi/pencapaian Tatalaksana Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Balisebanyak 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 119.749.708,-(91,85%)
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
   - Realisasi/pencapaian Penataan Administrasi Kepegawaian PNS Setda sebanyak 540 orang dengan realisasi anggaran Rp. 113.082.800,- (74,31%)
   - Realisasi/pencapaian Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 1 Laporan,1 Dokumen dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 168.745.200,- (97,55%)
   - Realisasi/pencapaian Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Keluaran 80% Dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 57.595.200,- (74,63%)
   - Realisasi/pencapaian Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebanyak 2 Laporan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 408.270.811,- (93,44%)

- Realisasi/pencapaian Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional sebanyak 1 Laporan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 70.344.000,- (61,93%)

4) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

- Realisasi/pencapaian Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 1 Tahun dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (100%)
- Realisasi/pencapaian Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.372.400,- (99,77%)
- Realisasi/pencapaian Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.998.200,- (99,97%)
- Realisasi/pencapaian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 Tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (100%)
- Realisasi/pencapaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 23.899.200,- (91,92%)
- Realisasi/pencapaian Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah selama 1 Tahun dengan realisasi anggaran Rp. 339.785.061,- (77,83%)
- Realisasi/pencapaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (100%)
- Realisasi/pencapaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas sebanyak 5 unit roda 4 dan 10 unit roda 2 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.259.288.950,-(99,65)
- Realisasi/pencapaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor selama 1 Tahun dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (100%)
- Realisasi/pencapaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur selama 1 Tahun dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (100%)
- Realisasi/pencapaian Penyusunan,Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja sebanyak 3 Dokumen dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (100%)

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp.	%	VOLUME	%	Rp.	%
A	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah			768,130,000				621,693,761	
1	Penyusunan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	100	147,176,000	100	1 Dokumen	99,50	95,055,000	64,59%
2	Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	1 Laporan	100	187,676,000	100	1 Laporan	96,67	159,328,240	84,90%
3	Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota	9 Kab/kota	100	150,338,000	100	9 Kab/kota	100,00	142,281,238	94,64%
4	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	36 Dokumen	100	117,176,000	100	36 Dokumen	99,00	78,864,080	67,30%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp.	%	VOLUME	%	Rp.	%
5	Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional	36 OPD	100	165,764,000	100	36 OPD	99,05	146,165,203	88,18%
B	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik			411,014,000				336,153,508	
1	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan	100	82,044,000	100	1 Laporan	100	78,728,000	
2	Pembangunan ZI WBK/WBBM	3 OPD	100	50,000,000	100	3 OPD	100	45,245,900	90,49%
3	Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	36 OPD	100	58,588,000	100	36 OPD	100	54,597,500	93,19%
4	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1 Laporan	100	90,000,000	100	1 Laporan	100	37,832,400	42,04%
5	Pembinaan Tatalaksana Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan	100	130,382,000	100	1 Laporan	100	119,749,708	91,85
C	Program Peningkatan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi			952,856,000				818,038,011	
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan,1 Dokumen	100	172,976,000	100	1 Laporan,1 Dokumen	100	168,745,200	97,55%
2	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	2 Laporan	100	436,940,000	100	2 Laporan	100	408,270,811	93,44%
3	Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	0.8	100	77,176,000	100	0.8	100	57,595,200	74,63%
4	Penataan Administrasi Kepegawaian PNS Setda	540 Orang	100	152,176,000	100	540 Orang	88,00	113,082,800	74,31%
5	Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	1 Laporan	100	113,588,000	100	1 Laporan	100	70,344,000	61,93%
6	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		100	828,200,000	100			728,343,811	
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	100	5,000,000	100	1 Tahun	100	5,000,000	100
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	100	30,442,000	100	1 Tahun	100	30,372,400	99,77%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	100	7,000,000	100	1 Tahun	100	6,998,200	99,97%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	100	5,000,000	100	1 Tahun	100	5,000,000	100
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	100	26,000,000	100	1 Tahun	100	23,899,200	91,92%
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	100	436,558,000	100	1 Tahun	100	339,785,061	77,83%
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	100	6,000,000	100	1 Tahun	100	6,000,000	100
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	5 Unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	100	260,200,000	100	5 Unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2	100	259,288,950	99,65%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	100	35,000,000	100	1 Tahun	100	35,000,000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp.	%	VOLUME	%	Rp.	%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	1 Tahun	100	7,000,000	100	1 Tahun	100	7,000,000	100
17	Penyusunan,Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	100	10,000,000	100	3 Dokumen	100	10,000,000	100

Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tidak mengalami permasalahan yang berarti, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

10. Penyelenggaraan Hukum

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel, diperlukan adanya pembangunan sistem hukum dan produk hukum daerah yang efektif dan mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembangunan bidang hukum dan Hak Asai Manusia (HAM) diarahkan untuk meningkatkan peranan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya menjadi landasan hukum kewenangan bagi kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu ditujukan pula dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan HAM bagi masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kondisi yang lebih tenteram dan aman di daerah.

Pembangunan hukum dan HAM dilakukan melalui pembinaan produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah, penegakan hukum, mendokumentasikan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum dan pemasyarakatan hak asasi manusia.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengembangan Produk Hukum	a. Penyusunan Raperda b. Penyusunan Peraturan Gubernur c. Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota d. Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab./Kota e. Penyusunan Produk Hukum Penetapan
2	Program Bantuan Hukum dan HAM	a. Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) b. Penanganan Perkara c. Pendampingan Hukum d. Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM e. Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
3	Program Pembinaan dan Dokumentasi Hukum	a. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum b. Bimbingan Teknis JDIH c. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum d. Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah e. Penyamaan Persepsi Pembangunan Hukum dan HAM
4	Program Peningkatan	a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	Akuntabilitas Capaian Kinerja	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur k. Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebanyak 32 orang PNS dengan kualifikasi :

1. Pendidikan
   - SMA : 4 orang
   - S1 : 18 orang
   - S2 : 10 orang
   - S3 : - orang
2. Pangkat/Golongan
   - Gol. IV/b : 1 orang
   - Gol. IV/a : 7 orang
   - Gol. III/d : 4 orang
   - Gol. III/c : 11 orang
   - Gol. III/b : 6 orang
   - Gol. II/d : 1 orang
   - Gol. II/c : 2 orang
3. Jabatan
   - Struktural 13 orang terdiri dari :
     Eselon II/b : 1 orang
     Eselon III/a : 3 orang
     Eselon IV/a : 9 orang

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali selama Tahun 2019 seperti tabel dibawah ini.

1) Program Pengembangan Produk Hukum

Realisasi/pencapaian penyelesaian produk hukum daerah meliputi :

- Dari target 8 raperda dapat diselesaikan 10 raperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
- Dari target 75 Peraturan Gubernur dapat diselesaikan 57 Peraturan Gubernur sedangkan Draf Peraturan Gubernur yang masuk pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali berjumlah 70 draf pergub.
- Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota dengan target 50 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota terealisasi sejumlah 617 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota.
- Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab./Kota dengan target 50 Produk Hukum Kab./Kota dapat terealisasi sejumlah 54 Produk Hukum Kab./Kota.

- Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan target 2000 Kepgub dapat terealisasi sejumlah 2978 kepgub.

2) Program Bantuan Hukum Dan Ham

Realisasi/pencapaian penyelesaian bantuan dan pendampingan hukum meliputi :

- Penyelesaian Harmonisasi 798 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari target 300 NPHD.
- Penanganan perkara dapat dilaksanakan terhadap 10 Perkara dari target 12 Perkara.
- Pendampingan Hukum dapat dilaksanakan terhadap 18 orang dari target 18 orang.
- Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM dengan realisasi/capaian 30 orang dari target 30 Aparatur Kab./Kota. Panitia RANHAM yang dapat dibina dalam rangka persamaan persepsi terhadap Rencana Aksi Nasional HAM.
- Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Msikin dapat dilaksanakan terhadap 11 Masyarahat dari target 8 Perkara Non Litigasi.

3) Program Pembinaan Dan Dokumentasi Hukum

Realisasi/pencapaian produk hukum yang teRp.ublikasi melalui jaringan dan informasi hukum meliputi :

- Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum berupa penataan dan klasifikasi produk hukum sebanyak 400 Produk Hukum dari target 400 Produk Hukum.
- Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap 40 orang pengelola jaringan dari target 40 orang pengelola jaringan.
- Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum terhadap 75 orang.
- Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah dilakukan dalam bentuk pencetakan 360 buku produk hukum yang didistribusikan kepada anggota jaringan, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai target kegiatan.
- Penyamaan Persepsi Pembangunan Hukum dan HAM terhadap 30 orang.

4) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

Realisasi/pencapaian pelayanan administrasi perkantoran meliputi :

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terealisasi 1 paket sesuai target kegiatan.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor terealisasi 17 jenis sesuai target kegiatan.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi 4 jenis sesuai target kegiatan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 1 paket sesuai target kegiatan.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 1 paket sesuai target kegiatan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terealisasi 1 paket sesuai target kegiatan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas terealisasi 11 unit sesuai target kegiatan.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor terealisasi 10 unit sesuai target kegiatan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor terealisasi 5 paket sesuai target kegiatan.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Mebeleur terealisasi 1 paket sesuai target kegiatan.
- Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja terealisasi 6 buku sesuai target kegiatan.

Proses Perencanaan Pembangunan

Program/kegiatan pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali merupakan kebutuhan riil yang sangat diperlukan oleh Biro Hukum dan HAM sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan kebutuhan dimaksud, maka masing-masing Bagian yang ada di Biro Hukum dan HAM membuat usulan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan. Mengingat usulan kegiatan untuk menjadi rencana kegiatan sangat tergantung pada dana yang tersedia, maka usulan tersebut terlebih dahulu dibahas di Biro Hukum dan HAM untuk dilakukan koreksi dan pembahasan, untuk kemudian disusun berdasarkan skala prioritas yang nantinya diusulkan pada Bappeda sebagai Usulan Rencana Kegiatan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Kondisi Sarana Dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan di Biro Hukum dan HAM sudah cukup memadai, tetapi mengingat kebutuhan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kinerja sangat tergantung pada kondisi kerja, perkembangan teknologi dan perkembangan jumlah pegawai, maka setiap saat sarana yang telah ada masih perlu diadakan pengadaan dan pemeliharaan sesuai standar kerja Pemerintah Daerah.

Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali ditemukan beberapa permasalahan, terdiri dari :

a. kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah; dan
b. kemampuan aparatur yang masih kurang.

2. Solusi

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat melalui lokakarya, penyuluhan, pemasyarakatan, sosialisasi, dan lain-lain; dan

b. meningkatkan kemampuan aparatur dengan cara mengikuti seminar-seminar, pendidikan latihan (diklat) dan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

11. Kehumasan

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya di satu pihak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah, dan menampung aspirasi serta memperhatikan masukan, usul, saran termasuk kritik dari masyarakat dan berperan menciptakan iklim yang kondusif, serta berkewajiban untuk mengumpulkan, mengelola serta mempublikasikan semua informasi terkait dengan Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Bali.

Dinamika perubahan menuntut humas pemerintah harus adaptif atas perkembangan dunia global, regional maupun nasional. Profesi humas adalah profesi terbuka, yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kompetensi. Untuk itu, mempersiapkan praktisi humas pemerintah yang berwawasan luas kini bukan semata tuntutan, tetapi kebutuhan, demikian juga halnya dengan pelayanan keprotokolan, pelayanan keprotokolan yang pro aktif sangat diperlukan dalam pelayanan seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang selalu terlibat dalam *event-event* internasional. Adapun beberapa Isu Strategis tersebut, yaitu :

1) Mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyebarluasan informasi yang cepat dan akurat menuju *Good Government*.
2) Pengembangan jejaring komunikasi dengan media massa, kelompok masyarakat, lembaga masyarakat dan Instansi vertikal yang akuntabel.
3) Mengoptimalkan pelayanan keprotokolan terhadap pimpinan serta tamu VIP dan VVIP baik dalam maupun luar negeri.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Biro Humas dan Potokol dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Secara garis besar tugas pokok Biro Humas dan Potokol Setda Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan dengan unit kerja lainnya;
2) Melaksanakan juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi;
3) Melaksanakan kebijakan bidang kehumasan dan keprotokolan.

Dalam mendukung tugas pokok tersebut Biro Humas dan Potokol menjabarkannya melalui Program dan Kegiatan yang seluruhnya bersumber dari APBD, adapaun Program dan Kegiatan tersebut sebagaimana tabel dibawah ini.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Program Kehumasan	a. Media Informasi Pembangunan b. Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Cetak c. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Media Elektronik d. Analisa Berita dengan anggaran e. Sosialisasi Program Pemprov Bali melalui Pentas Seni Budaya
2	Keprotokolan	1. Pengaturan Prosesi Penyambutan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP 2. Peningkatan Pengaturan Acara Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP 3. Peningkatan Pelayanan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP
3	Program Peningkatan Layanan Informasi	1. Penerbitan Media Humas Pemerintah Provinsi Bali 2. Pendokumentasian kegiatan Pemprov Bali melalui Media Elektronik 3. Pendokumentasian Kegiatan Pemprov Bali melalui Media Non Elektronik 4. Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta hasil yang telah dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - Media Informasi Pembangunan

      Media Informasi Pembangunan memiliki anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 909.600.620 atau sebesar 79,10% yang diakibatkan dari upaya efisiensi anggaran. Media Informasi Pembangunan merupakan salah satu kegiatan Biro Humas dan Potokol yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai inovasi-inovasi program Pemerintah Daerah lain yang memungkinkan untuk dapat diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Bali, pada Tahun 2019 Media Informasi Pembangunan dilaksanakan sebanyak 3 tiga kali.
    - Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Cetak

      Kegiatan Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Cetak memiliki anggaran sebesar Rp. 8.136.550.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.923.287.583 atau sebesar 97,38%. Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Cetak merupakan penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui media massa, cetak sebanyak 1.800 kali pemberitaan selama tahun 2019 yang dikemas dalam berita Advertorial, dalam kegiatan ini Biro Humas dan Potokol juga selalu melakukan

klarifikasi mengenai berita-berita yang menyimpang mengenai program-program pembangunan Pemrov. Bali di masyarakat.

- Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Elektronik

  Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Elektronik memiliki anggaran sebesar Rp. 4.547.620.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.239.873.196 atau 93,23%. Penyebarluasan Program Pemprov. Bali melalui Media Elektronik merupakan penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui media elektronik yang dikemas dalam dialog interaktif, Liputan Khusus, Running Text Information, Kuis interaktif dan iklan layanan masyarakat, dalam Penyebarluasan Informasi Program Pemprov. Bali yang pada Tahun 2019 telah ditayangkan sebanyak 3000 kali tayang diseluruh stasiun televise, radio dan media online.

- Analisis Berita

  Kegiatan Analisa Berita merupakan kegiatan yang bertujuan mengkompilkasi seluruh berita dari media massa dan diolah menjadi informasi-informasi sebagai masukan dan salah satu acuan dalam menyusun kebijakan, pada Tahun 2019 telah disusun sebanyak 365 laporan, dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 452.057.300 atau sebesar 90,41%.

- Sosialisasi Program Pemprov Bali melalui Pentas Seni Budaya

  Sosialisasi Program Pemprov Bali melalui Pentas Seni Budaya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.341.230.000 atau sebesar 93,52%, Sosialisasi Program Pemprov Bali melalui Pentas Seni Budaya bertujuan untuk mensosialisasikan seluruh Program Pemprov Bali di 9 Kabupaten/Kota di Bali yang dikemas dalam pentas seni dan budaya, pada tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 80 kali pentas seni budaya.

2) Program Keprotokolan

- Pengaturan Prosesi Penyambutan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP

  Pengaturan Prosesi Penyambutan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP memiliki anggaran sebesar Rp. 1.640.422.416. dengan target fisik 100% sedangkan realisasi fisik mencapai angka 75,73%. Untuk realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 1.242.248.412 atau sebesar 75,73% dari pagu anggaran, karena dalam kegiatan ini perjalanan dinas dalam dan luar daerah menyesuaikan dengan agenda kegiatan pimpinan sehingga. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan merupakan kegiatan yang bertujuan dalam memberikan pelayanan terhadap kunjungan pimpinan dan tamu.

- Peningkatan Pengaturan Acara Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP

  Pada Tahun 2019 Peningkatan Pengaturan Acara Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP dianggarkan sebesar Rp. 800.000.000 dengan target fisik 100% dan realisasi fisik 79,12%.

Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 632.998.716 atau sebesar 79,12% selisih realisasi keuangan terjadi karena adanya efesiensi penggunaan anggaran.

- Peningkatan Pelayanan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP

  Peningkatan Pelayanan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP memiliki anggaran sebesar Rp. 700.000.000 dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 473.800.143 dengan persentase sebesar 67,69% dari anggaran, hal ini diakibatkan karena Perjalanan dinas dalam dan luar daerah menyesuaikan dengan agenda kegiatan pimpinan. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Akomodasi bertujuan untuk memberikan layanan akomodasi terhadap pimpinan dan tamu saat melaksanakan kegiatan di Provinsi Bali.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

- Penerbitan Media Humas Pemerintah Provinsi Bali

  Kegiatan Media Humas Pemerintah Provinsi Bali memiliki anggaran sebesar Rp. 400.000.000 secara fisik sudah terealisasi 100% dan untuk realisasi sebesar keuangan Rp. 364.474.400 atau 91,12%. Majalah Media Humas merupakan media cetak yang memuat program-program Pemerintah Provinsi Bali yang dikemas secara menarik dalam bentuk Majalah dengan tujuan memotivasi masyarakat agar turut aktif berperan dalam program-program Pemerintah Provinsi Bali. Pada Tahun 2019 Majalah Media Humas telah disebarkan di 9 Kab/Kota se-Bali sebanyak 12 edisi.

- Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali melalui Media Elektronik

  Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali Melalui Media Elektronik memiliki anggaran sebesar Rp. 1.851.087.408 dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.621.291.831 atau mencapai 87,59% yang diakibatkan dari efesiensi anggaran. Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali melalui media elektronik merupakan kegiatan pengumpulan bahan untuk mendokumentasikan proses dan hasil-hasil dari program-program Bali Mandara melalui filler dan iklan layanan sebanyak 145 buah.

- Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali Melalui Media Non Elektronik

  Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali Melalui Media Non Elektronik memiliki anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 dengan realisasi fisik mencapai 100% dan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.258.406.050 atau mencapai 89,89% karena adanya efesiensi anggaran. Pendokumentasian kegiatan Pemprov. Bali melalui media non elektronik merupakan kegiatan pengumpulan bahan untuk mendokumentasikan proses dan hasil-hasil dari program-program Bali Mandara melalui Cetak Foto, Spanduk, Baliho, pada Tahun 2019 Baliho tercetak dan spanduk sebanyak 519 buah yang disebar ke 9 Kab/Kota termasuk seluruh UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

- Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

  Kegiatan Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat memiliki pagu anggaran di Tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah sebesar 100%, sedangkan untuk realisasi keuangannya sebesar 140.133.600 atau 56,05%, hal ini disebabkan karena efesiensi anggaran. Kegiatan Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan merupakan implementasi kehumasan sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat serta menggali seluruh potensi-potensi yang ada di masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Bali.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kehumasan Tahun 2019

No	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		volume	%	(Rp.)	%	volume	%	(Rp.)	%
A	Program Kehumasan								
1	Media Informasi Pembangunan	3 kali	100	1,150,000,000	100	3 kali	100	909,600,620	79,10
2	Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Cetak	1800 berita	100	8,136,550,000	100	1800 berita	100	7,923,287,583	97,38
3	Penyebarluasan Program Pemprov Bali melalui Media Elektronik	3000 tayang	100	4,547,620,000	100	3000 tayang	100	4,239,873,196	93,23
4	Analisa Berita	365 laporan	100	500,000,000	100	365 laporan	100	452,057,300	90,41
5	Sosialisasi Program Pemprov Bali melalui Pentas Seni Budaya	80 kali	100	1,434,130,000	100	80 kali	100	1,341,230,000	93,52
B	Program Keprotokolan								
1	Pengaturan Prosesi Penyambutan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP	12 bulan	100	1,640,422,416	100	12 bulan	76,20	1,242,248,412	75,73
2	Peningkatan Pengaturan Acara Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP	12 bulan	100	800,000,000	100	12 bulan	94,30	632,998,716	79,12
3	Peningkatan Pelayanan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP	12 bulan	100	700,000,000	100	12 bulan	100	473,800,143	67,69
C	Program Peningkatan Layanan Informasi								
1	Penerbitan Media Humas Pemerintah Provinsi Bali	12 Edisi	100	400,000,000	100	12 Edisi	100	364,474,400	91,12
2	Pendokumentasian kegiatan Pemprov Bali melalui Media Elektronik	145 buah	100	1,851,087,408	100	145 buah	100	1,621,291,831	87,59
3	Pendokumentasian Kegiatan Pemprov Bali melalui Media Non Elektronik	519 buah	100	1,400,000,000	100	519 buah	100	1,258,406,050	89,89
4	Penyerapan Aspirasi dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	60 buku	100	250,000,000	100	60 buku	100	140,133,600	56,05

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh Biro Humas dan Potokol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Media bersikap sangat kritis terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
b. Semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.
c. Banyaknya peredaran berita dan informasi hoax di media sosial.
d. Program-program Pemerintah Daerah terhambat, seperti mendapat penolakan pihak-pihak tertentu/kelompok masyarakat tertentu karena pemberitaan yang tidak berimbang.
e. Bali menjadi salah satu ajang *event-event* Internasional, sekaligus dihadiri Negara-negara lain sehingga memerlukan layanan keprotokolan yang berkualitas dari Pemerintah Provinsi Bali.

2) Solusi

Beberapa solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain :

a. Melaksanakan kunjungan lapangan bersama media dan jajaran SKPD dan terkait.
b. Aktif mengupload berita/informasi yang faktual dan terpercaya di media sosial untuk menghindarkan masyarakat dari berita/informasi yang bersifat hoax.
c. Aktif menyerap aspirasi masyarakat dan lebih peka dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta aktif berkomunikasi dalam mencari solusi bersama
d. Membuat iklan-iklan layanan masyarakat melalui video maupun papan media informasi dalam mensosialisasikan program-program Pemerintah.

12. Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan Sekretariat Daerah Tipe A. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan salah satu Biro yang berada dibawah koordinator Asisten Administrasi Umum dan Asisten sendiri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah. Lebih Lanjut di atur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Ruang lingkup pelayanan pada Biro Umum Setda Provinsi Bali meliputi Administrasi Umum, Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Setda serta Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 10. Upacara Keagamaan 11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 16. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip 18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19. Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip di Lingkungan Setda Provinsi Bali 20. Penataan dokumen Keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Bali
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Peningkatan dan pengembangan tenaga pengelola keuangan setda b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) d. Monitoring dan Pengamanan Aset Setda Provinsi Bali e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
3	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	a. Penyediaan barang/jasa kegiatan rutin pimpinan daerah b. Penyediaan makanan, minuman, dan akomodasi tamu pemprov. Bali

Jumlah Pegawai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali sejumlah 78 Orang, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai:
    a. Magister (S2) : 6 Orang

b. Sarjana (S1) : 24 Orang

c. Diploma : 1 Orang

d. SLTA : 46 Orang

e. SLTP : 1 Orang

2. Berdasarkan Golongan :

a. Golongan IV : 6 Orang

b. Golongan III : 33 Orang

c. Golongan II : 39 Orang

3. Pejabat Struktural sebanyak 13 Orang terdiri dari:

a. Pejabat Eselon II : 1 Orang

b. Pejabat Eselon III : 3 Orang

c. Pejabat Eselon IV : 9 Orang

Tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Bali Tahun 2019

NO.	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
	BELANJA LANGSUNG			60,710,788,458				52,504,321,398	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bln	100	100,000,000	100	12 bln	100	98,936,377	98.94
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	100	1,800,000,000	100	12 bln	100	1,194,092,408	66.34
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	100	4,694,705,969	100	12 bln	100	4,624,865,896	98.51
4	Penyediaan alat tulis kantor	12 bln	100	186,601,550	100	12 bln	100	181,700,000	97.37
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	100	227,724,500	100	12 bln	100	224,854,350	98.74
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bln	100	266,100,352	100	12 bln	100	255,876,891	96.16
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	100	853,000,000	100	12 bln	100	836,821,720	98.10
8	Penyediaan makanan dan minuman	12 bln	100	5,899,871,602	100	12 bln	83.00	4,565,691,470	77.39
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bln	100	6,000,000,000	100	12 bln	98.00	5,235,122,042	87.25
10	Upacara Keagamaan	12 bln	100	864,230,000	100	12 bln	95.31	823,668,500	95.31
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bln	100	14,230,903,327	100	12 bln	100	13,148,949,098	92.40
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	12 bln	100	7,635,702,032	100	12 bln	100	6,186,264,070	81.02
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bln	100	450,000,000	100	12 bln	100	220,004,000	48.89
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bln	100	83,678,000	100	12 bln	100	58,267,500	69.63
15	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 bln	100	180,000,000	100	12 bln	100	180,000,000	100.00
16	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	100	4,000,825,264	100	12 bln	100	3,794,665,117	94.85
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip	12 bln	100	234,277,034	100	12 bln	100	230,383,488	98.34
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bln	100	1,119,307,328	100	12 bln	100	1,091,659,625	97.53
19	Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip di Lingkungan Setda Provinsi Bali	12 bln	100	610,584,376	100	12 bln	100	568,781,608	93.15

NO.	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP.)	%	VOL	%	(RP.)	%
20	Penataan dokumen Keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Bali	12 bln	100	734,331,560	100	12 bln	100	696,288,021	94.82
21	Peningkatan dan pengembangan tenaga pengelola keuangan setda	12 bln	100	514,259,728	100	12 bln	80.00	394,906,383	76.79
22	Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	12 bln	100	53,856,300	100	12 bln	80.00	10,329,700	19.18
23	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	12 bln	100	80,000,000	100	12 bln	93.12	74,492,850	93.12
24	Monitoring dan Pengamanan Aset Setda Provinsi Bali	12 bln	100	502,200,704	100	12 bln	100	475,153,421	94.61
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bln	100	110,000,000	100	12 bln	80.00	77,574,265	70.52
26	Penyediaan barang/jasa kegiatan rutin pimpinan daerah	12 bln	100	5,878,628,832	100	12 bln	80.00	4,544,397,598	77.30
27	Penyediaan makanan, minuman, dan akomodasi tamu pemprov. Bali	12 bln	100	100,000,000	100	12 bln	79.73	2,710,575,000	79.72

Kondisi Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang terdapat pada Biro Umum Setda Provinsi Bali sudah cukup memadai. Akan tetapi mengingat kebutuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja sangat bergantung pada kondisi kerja, perkembangan teknologi serta perkembangan jumlah pegawai, dengan demikian maka setiap saat sarana dan prasana yang ada perlu dilakukan peningkatan dan masih diperlukan adanya pengadaan dan pemeliharaan sesuai dengan standard kerja Pemerintah Daerah.

Permasalahan dan Solusi

Masalah yang dihadapi di Biro Umum Setda Provinsi Bali :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Dinamika kerja yang tinggi sehingga perencanaan dan pelaksanaan menjadi belum maksimal.

Solusi terhadap masalah yang telah dilaksanakan adalah :

1. Kualitas SDM (sumber daya manusia) di kembangkan melalui pelatihan/ Bimtek khususnya yang terkait dengan Biro-Biro secara keseluruhan di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
2. Menyiapkan data alokasi waktu kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai dasar Perencanaan sehingga dalam pelaksanaan tidak bergeser jauh dari yang sudah direncanakan utamanya dalam pelayanan tugas-tugas pimpinan.

13. Perekonomian Pembangunan

Sebagai pengejawantahan tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun, Biro Perekonomian melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Penjabaran dari pelaksanaan kegiatan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 107 tahun 2018, tugas Biro Perekonomian setda Provinsi Bali:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknik pelaksanaan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal, BUMD, Pertanian dalam arti luas, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Perkreditan Desa;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, BUMD, Pertanian dalam arti luas, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Perkreditan Desa.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pemberdayaan Perekonomian	1. Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah. 2. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Usaha Ekonomi. 3. Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian. 4. Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 5. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pariwisata 6. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Perhubungan
2	Pengembangan Produksi Daerah	1. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan. 3. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Industri dan Perdagangan.
3	Pengembangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan	1. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air. 2. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Kehutanan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan rasonalisasi anggaran tahun 2019 telah dilaksanakan. Biro Perekonomian di Tahun anggaran 2019 setelah mengalami rasionalisasi, secara

keseluruhan mengelola anggaran sebesar Rp. 1.444.417.508,- dengan realisasi fisik telah mencapai 96.33% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.246.986.669,- (86,33%). Alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah :

1) Program Pemberdayaaan Perekonomian

- Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi, pemantauan keterjangkauan barang dan jasa ke produsen, sentra produksi, sub terminal agribisnis (STA) , pasar dan koordinasi/ konsultasi/rapat-rapat pengendalian inflasi daerah, dalam mengatasi masalah harga di bidang kebutuhan pokok. Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran Rp. 150.000.000,-setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 146.237.200,- dan secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 134.889.820,- (92,24%).

- Monitoring dan Evaluasi Lembaga Usaha Ekonomi.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Pusat. Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran Rp.200.000.000,- setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 183.884.000,- dan secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai

  Rp. 175.689.064,- (95,54%).

- Pembinaan Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Perekonomian.

  Kegiatan ini telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi LPD yang ada di Kab/Kota dan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kab/Kota, LPLPD dan BKS LPD. Alokasi anggaran Rp. 150.000.000,-setelah perubahan (rasionalisasi) menjadi Rp. 131.959.600,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.116.485.200,- (88,27%).

- Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan koordinasi dengan instansi terkait dengan alokasi anggaran Rp. 35.854.600,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.14.010.200,- (39,08%).

- Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang pariwisata.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi , koordinasi dengan instansi terkait dan konsultasi di bidang pariwisata. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 38.098.800,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.32.078.900,- (84,19%).

- Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Perhubungan.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang perhubungan serta koordinasi dengan instansi terkait. Alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- , secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.41.720.600,- (69,53%).

2) Program Pengembangan Produksi Daerah

- Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang energy dan sumber daya mineral dan HET LPG 3 kg, serta koordinasi dengan instansi Pusat dan Kab/Kota. Alokasi anggaran setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 70.690.204,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.68.468.798,- (96,85%).

- Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta koordinasi dengan instansi terkait. Alokasi anggaran Rp. 45.000.000,- setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 43.496.000,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.39.860.200,- (91,63%).

- Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Industri dan Perdagangan.

  Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang industry dan perdagangan dan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait. Alokasi anggaran Rp. 75.000.000,- setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 72.768.400,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.69.425.360,- (95,40%).

3) Program Pengembangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan.

b. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air serta Kehutanan.

   Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang lingkungan hidup dan sumber daya air , konsultasi/rapat ke Pusat serta koordinasi dengan instansi terkait. Alokasi anggaran Rp. 40.000.000,- setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 32.223.500,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.28.500.900,- (88,44%).

c. Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di bidang Kehutanan.

   Kegiatan ini telah melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kehutanan dan konsultasi/rapat ke Pusat serta koordinasi dengan instansi terkait. Alokasi anggaran Rp. 70.546.416,- setelah perubahan (rasionalisasi) sebesar Rp. 69.617.104,- secara fisik sudah terealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.67.675.698,- (97,21%).

Realisasi Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2019

NO	URAIAN	Target				Realisasi			
		Volume	%	Keuangan	%	Volume	%	Keuangan	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan alat tulis kantor	47 jenis	100	36,851,400	100	47 jenis	100	36,851,400	100

NO	URAIAN	Target				Realisasi			
		Volume	%	Keuangan	%	Volume	%	Keuangan	%
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	15	15,000,000	100	7 jenis	100	14,933,000	99.55
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 jenis	100	8,060,000	100	6 jenis	100	8,040,000	99.75
4	Penyediaan makanan dan minuman	165 kotak	100	5,775,000	100	165 kotak	100	4,985,000	86.32
5	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 laporan	100	220,701,000	100	12 laporan	100	148,707,779	67.38
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	4 roda 4, 5 roda 2	100	238,200,000	100	4 roda 4, 5 roda 2	100	209,929,750	88.13
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	6 jenis	100	35,000,000	100	6 jenis	100	34,735,000	99.24
C	Program Pemberdayaan Perekonomian								
1	Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pembedayaan Lembaga Perekonomian	20 laporan	100	131,959,600	100	20 laporan	100	116,485,200	88.27
2	Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	15 Laporan	100	146,237,200	100	15 Laporan	100	134,889,820	92.24
3	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Usaha Ekonomi	10 Laporan	100	183,884,100	100	10 Laporan	100	175,689,064	95.54
4	Percepatan Pelaksanaan Berusaha	20 Laporan	100	35,854,600	100	20 Laporan	100	14,010,200	39.08
5	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pariwisata	1 Laporan	100	38,098,800	100	1 Laporan	100	32,078,900	84.2
6	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Perhubungan	1 Laporan	100	60,000,000	100	1 Laporan	100	41,720,600	69.53
D	Program Pengembangan Produksi Daerah								
1	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan	5 Laporan	100	43,496,600	100	5 Laporan	100	39,860,200	91.64
2	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Mineral	5 Laporan	100	70,690,204	100	5 Laporan	100	68,468,798	96.86
3	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan di Bidang Industri dan Perdagangan	5 Laporan	100	72,768,400	100	5 Laporan	100	69,425,360	95.41

Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan yang ada di Biro Perekonomian berjalan sesuai rencana.

14. Administrasi Pembangunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam bentuk perhitungan reaslisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2019 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat stakeholders yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 dan disesuaikan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali, dimana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali dalam meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan, pelaksanaan teknis di bidang administrasi pembangunan.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengendalian Pembangunan	a. Penyusunan Bahan Pengendalian Program Pembangunan. b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan.
2	Program Pelayanan Aparatur,	a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah. b. Penyelenggaraan Sistem Informasi, Evaluasi dan pelaporan (SIEP) serta Monitoring Pembangunan pemerintah Provinsi Bali. c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
3	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan	a. Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah. b. Pengendalian Administrasi Jasa Konstruksi. c. Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah.

Jumlah Pegawai Biro Administrasi Pembangunan

Pada tahun 2019, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Biro

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	20
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	-
JUMLAH TOTAL		**28**

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	-
2.	S2	5
3.	S1	16
4.	Diploma	-
5.	SLTA	7
6.	SLTP	-
7.	SD	-
JUMLAH TOTAL		**28**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kebijakan Pemerintah Daerah melakukan rasonalisasi anggaran di tahun 2019 dengan menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam DPPA tahun anggaran 2019, Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Bali secara keseluruhan mengelola anggaran sebesar Rp. 1.695.558.812,- dengan realisasi fisik telah mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.614.339.989,- (95,21%). Alokasi dan realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut adalah :

1) Program Pengendalian Pembangunan

- Penyusunan Bahan Pengendalian Program Pembangunan.

  Kegiatan ini telah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait untuk melakukan antisipasi penanganan berbagai masalah-masalah terutama bidang infrastruktur yang merupakan salah prioritas program Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Di alokasikan anggaran sebesar Rp.

106.995.200,- dan secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 103.070.099,63,- (96,33%).

- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan.

  Kegiatan ini telah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait tingkat Provinsi maupun Kab./Kota dan juga dengan masyarakat guna mengendalikan dan menyerap berbagai aspirasi terhadap implementasi program pembangunan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Di alokasikan anggaran sebesar Rp. 187.837.500,- dan secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 179.858.991,63,- (95,75%).

2) Program Pelayanan Aparatur

d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah.

Hasil dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah adalah dokumen evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran tahun 2019 sebanyak 12 laporan. Di alokasikan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 167.997.016,- secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 164.406.957,63,- (97,86%).

e. Penyelenggaraan Sistem Informasi, Evaluasi dan pelaporan (SIEP) serta Monitoring Pembangunan pemerintah Provinsi Bali.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil 60 buku laporan realisasi fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi Bali per triwulan dan 4 kali pelaksanaan rapat kerja evaluasi program/kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.199.566.900,- secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 181.570.550,- (90,98%).

f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil 1 dokumen monev pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN/sektoral yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di daerah pemerintah Provinsi Bali tersebar di 8 kabupaten se-Bali dan 4 buku laporan. Di alokasikan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 89.833.400,- secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp.85.084.560,- (94,71%).

3) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan

a. Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil 12 laporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan. Di alokasikan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 96.852.100,- secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 89.480.400,- (92,39%).

b. Pengendalian Administrasi Jasa Konstruksi.

Kegiatan Koordinasi pengembangan Kerjasama Pembangunan Daerah serta Pemberdayaan Jasa kontruksi adalah melakukan koordinasi terkait pemberdayaan Jasa Kontruksi di 9 Kab/Kota. Di alokasikan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 91.520.000,- secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 87.509.997,63,- (95,62%).

c. Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil adanya dokumen pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disusun dan disampaikan tepat waktu. Di alokasikan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 95.548.300,- secara fisik sudah terrealisasi 100% dan realisasi keuangan mencapai Rp. 92.430.800,- (96,74%).

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Administrasi Pembangunan Tahun 2019

NO.	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja								
1	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	2 komputer, 2 AC, 1 printer, 1 laptop	100	29,161,800	100	2 komputer, 2 AC, 1 printer, 1 laptop	100	29,161,800	100
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 jenis ATK	100	8,915,600	100	8 jenis ATK	100	8,912,800	99.97
3	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Jenis Bahan Bacaan	100	9,000,000	100	8 jenis Barang Bacaan	100	9,000,000	100
4	Penyediaan makanan dan minuman	6 jenis bahan bacaan	100	10,000,000	100	6 jenis bahan bacaan	100	9,720,000	97.2
5	Penyediaan makanan dan minuman	270 nasi kotak, 270 snack kotak	100	9,450,000	100	270 nasi kotak, 270 snack kotak	100	9,450,000	100
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	15 Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100	142,620,000	100	15 Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100	120,207,964	84,29
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan 4 unit roda 4 dan 5 unit roda 2	100	290,500,000	100	Pemeliharaan 4 unit roda 4 dan 5 unit roda 2	100	286,887,295	98.76
8	Penyusunan, Perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	4 dokumen	100	30,815,096	100	4 dokumen	100	30,807,896	99,98
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	11 jenis	100	64,770,000	100	11 jenis	100	62,324,000	96,22

NO.	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
10	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 komputer notebook, 2 Printer warna dan 1 paket CCTV	100	74,175,900	100	1komputer notebook, 2 Printer warna dan 1 paket CCTV	100	7,417,587,763	100
B	Program Pengendalian Pembangunan								
1	Penyusunan bahan pengendalian program pembangunan	1 kali rapat koordinasi, 20 kali monev	100	106,995,200	100	1 kali rapat koordinasi, 20 kali monev	100	103,070,099.63	96,33

Permasalahan Dan Solusi

1) **PERMASALAHAN**

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan yang mengganggu jalannya kinerja pada tahun 2019. Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2019, diantaranya :

1. Penanganan terhadap berbagai permasalahan pembangunan bidang infrastruktur khususnya kerusakan yang terjadi karena bencana alam, dirasa masih belum optimal/cepat dapat ditangani karena tahapan proses/prosedur pencairan anggaran masih memerlukan waktu yang cukup panjang.
2. Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, bahwa permasalahan perencanaan pembangunan daerah tidak banyak mengalami kemajuan, masih berada pada seputaran permasalahan antara lain: kesulitan dalam memperoleh data, kesulitan merumuskan indikator (baik output maupun outcome, in-konsistensi perencanaan dan penganggaran, kurangnya pengetahuan dan pemahaman sumberdaya aparatur, dan kemauan perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Untuk terwujudnya Pembangunan Bali yang Berkelanjutan terdapat berbagai permasalahan yakni, tidak meratanya potensi yang ada di daerah kabupaten/ kota.
4. Belum memadainya kemampuan Sumber Daya Manusia yang menangani atau pengelola kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Kurangnya pemahaman SDM di Perangkat Daerah yang bertugas sebagai operator SIEP.
6. Penyampaian laporan SIEP dari beberapa Perangkat Daerah sering keliru dan tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi rekapitulasi akhir laporan SIEP.

7. Internet sering error sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan input data dalam aplikasi SIEP maupun TEPRA.
8. Dalam Kegiatan Peningkatan kualitas Pelaksanaan Administrasi pembangunan sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan yang prinsipil.
9. Dalam Kegiatan Peningkatan Kegiatan Koordinasi pengembangan Kerjasama Pembangunan Daerah serta Pemberdayaan Jasa kontruksi adalah belum semua Kabupaten yang membentuk Tim Pembina Jasa Kontruksi.

2) **SOLUSI**

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Meningkatkan SDM Aparatur bidang perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan pengawasan secara terintegrasi dalam pencapaian target program pembangunan daerah yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada operator SIEP di Perangkat Daerah cara penginputan data dalam aplikasi SIEP.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah dan atasan langsung operator SIEP.
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik.
6. Mengajukan usulan tambahan sarana prasarana ke Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali.
7. Melakukan Koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali

15. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut, Badan Pendapatan Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan**.** Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan dibidang pendapatan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki peranan penting dan strategis dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah

Provinsi Bali. Untuk itu diperlukan dukungan dari aparatur Pemerintah yang memiliki kemampuan profesionalisme, pandangan jauh ke depan dan memiliki komitmen yang tinggi sesuai dengan tuntutan dan tingkat perubahan masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, mensinergikan kegiatan Badan Pendapatan Provinsi Bali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 maka Badan Pendapatan Provinsi Bali merumuskan Tujuan yang dijiwai oleh Visi Provinsi Bali yaitu "Optimalisasi PAD Guna Meningkatkan Kemandirian Fiskal Menuju Bali Era Baru"

Program dan kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa kebersihan kantor d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan h. Penyediaan makanan dan minuman i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah j. Upacara Keagamaan k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor n. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor o. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja p. Pengadaan Perlengkapan Unit Pelayanan q. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan r. Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian s. Pembinaan dan Penataan Arsip t. Penyusunan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
2	Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	a. Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah b. Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah c. Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah d. Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Pendapatan Asli Daerah e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi
3	Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	a. Penyusunan Dokumen Peraturan NJKB b. Peningkatan Penerimaan Non Pajak Daerah c. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah d. Pengelolaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah e. Pengelolaan Piutang dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah f. Penyuluhan Kesadaran Wajib Pajak Daerah
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	a. Pembinaan Samsat b. Evaluasi Pendapatan Daerah c. Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah d. Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Non Pajak Daerah	a. Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah b. Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Pegawai

a. Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Pasca Sarjana	54 orang
2	Sarjana	299 orang
3	Sarjana Muda	2 orang
4	Diploma IV	2 orang
5	Diploma III	20 orang
6	Diploma II	0 orang
7	Diploma I	1 orang
8	SMA-K	36 orang
9	SMA	158 orang
10	SMP	2 orang
11	SD	1 orang
Jumlah		**575 Orang**

b. Kepangkatan / Golongan Ruang

NO	URAIAN	GOL/RUANG	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
	Pembina Utama Madya	IV/d	1 orang
	Pembina Utama Muda	IV/c	0 orang
	Pembina Tingkat I	IV/b	8 orang
	Pembina	IV/a	23 orang
	Penata Tingkat I	III/d	117 orang
	Penata	III/c	138 orang
	Penata Muda Tingkat I	III/b	107 orang
	Penata Muda	III/a	69 orang

	Pengatur Tingkat I	II/d	32 orang
	Pengatur	II/c	68 orang
	Pengatur Muda Tk. I	II/b	10 orang
	Pengatur Muda	II/a	1 orang
	Juru Tingkat I	I/d	0 orang
	Juru	I/c	0 oang
	Juru Muda Tingkat I	I/b	1 orang
	Juru Muda	I/a	0 orang
Jumlah			**575 Orang**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
PEJABAT STRUKTURAL		
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	13 orang
3	Eselon IV	37 orang
PEJABAT FUNGSIONAL		
1	Analis Kepegawaian	2 orang
2	Pustakawan	5 orang
3	Pranata Humas	3 orang
4	Arsiparis	5 orang
5	Fungsional Umum	509 orang
Jumlah		**575 Orang**

Realisasi Program dan Kegiatan Pendapatan Daerah Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	87	100	14,779,484,569	100			13,722,978,870.53	92.9
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650 lbr materai	100	3,000,000	100	650 lbr Materai	100	2,925,500	97.5
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	400,000,000	100	3 jenis	100	324,995,664	81.2
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	100	249,273,329	100	1 paket	100	248,824,329	99.8
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis	100	178,365,300	100	38 jenis	128.9	178,365,300	100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17 jenis; 200.000 lembar	100	1,752,205,800	100	17 Jenis, 231.463 lembar	102.0	1,639,000,013	93.5
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	5 jenis	100	15,000,000	100	5 jenis	100	14,927,500	99.5
7	Penyediaan Bahan	3 koran; 1	100	35,520,000	100	3 koran, 1	100	35,520,000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	majalah				majalah			
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	3628 nasi kotak; 7430 snack kotak	100	165,000,000	100	1570 Nasi kotak, 2330 Snack Kotak	68.9	117,500,000	71.2
9	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam daerah	155 DL / 786 DD	100	707,690,000	100	120 DL, 1063 DD	71.8	592,505,458	83.7
10	Upacara Keagamaan	7 Kegiatan	100	75,000,000	100	7 kegiatan	100	73,800,000	98.4
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	13 kantor, 17 orang	100	1,442,271,502	100	14 kantor, 17 orang	100	1,416,136,069.84	98.2
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas	14 Roda 4; 9 Roda 2; 6 Orang	100	1,136,695,734	100	14 Roda 4, 9 Roda 2, 6 Orang	100	1,095,008,644.39	96.3
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	12 jenis; 5 orang	100	318,327,600	100	13 jenis, 5 orang	125	297,002,966.34	93.3
14	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	9 paket	100	1,847,440,822	100	8 paket	88.9	1,731,860,000	93.7
15	Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	5 Dokumen	100	30,000,000	100	8 Dokumen	100	29,869,600	99.6
16	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Unit Pelayanan	39 jenis	100	5,450,708,976	100	38 Jenis	92.3	5,012,610,030	92.0
17	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	500 set	100	425,000,000	100	500 set	90	383,679,300	90.3
18	Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian	1 sistem	100	192,661,346	100	1 sistem	100	188,238,936.53	97.7
19	Pembinaan dan Penataan Arsip	20 orang; 10 arsip kantor	100	192,662,080	100	20 orang; 10 arsip kantor	100	188,970,955.45	98.1
20	Penyusunan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 Dokumen	100	162,662,080	100	5 Dokumen	100	151,238,603.98	93.0
B	Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan dan Regulasi Pendapatan Daerah			1,048,842,000				880,997,024	84.0
1	Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah	2 dokumen	100	616,892,000		2 Dokumen	50.0	535,794,350	86.9
2	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	6 SOP	100	30,000,000		6 SOP	33.0	28,101,000	93.7
3	Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah	1 dokumen	100	94,650,000		1 Dokumen	100	71,510,900	75.6
4	Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah	2 produk hukum	100	207,300,000		5 produk hukum	100	162,671,262	78.5
5	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi	9 Ranperda Kab/Kota	100	100,000,000		7 Ranperda Kab/Kota	78.0	82,919,512	82.9
C	Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah			1,731,452,500	100			1,579,735,000	91.2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
1	Penyusunan Dokumen Peraturan NJKB	1 dokumen	100	131,000,000	100	1 dokumen	100	111,869,600	85.4
2	Peningkatan Penerimaan Non Pajak Daerah	12 laporan	100	182,764,000	100	12 laporan	100	143,330,800	78.4
3	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	12 Laporan	100	993,250,000	100	12 laporan	100	936,088,200	94.2
4	Pengelolaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	12 dokumen	100	104,310,000	100	12 laporan	100	92,485,600	88.7
5	Pengelolaan Piutang dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	2 dokumen	100	54,128,000	100	2 dokumen	100	46,618,800	86.1
6	Penyuluhan Kesadaran Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	100	145,000,000	100	2 laporan	100	130,834,900	90.2
7	Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	1000 brosur; 2 promosi	100	121,000,500	100	4000 brosur; 2 promosi	100	118,507,100	97.9
D	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			1,056,500,000					
1	Pembinaan Samsat	2 Laporan	100	702,500,000	100	2 laporan	100		
2	Evaluasi Pendapatan Daerah	12 laporan; 1 buku profil	100	116,300,000	100	1 buku profil			
3	Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah	1 Pengembangan	100	200,000,000	100	4 pengembangan			
4	Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah	1 Laporan	100	37,700,000	100	1 laporan	100		
	UPT KABUPATEN BULELENG								
E	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			3,552,034,292				3,438,686,721.99	96.8
1	Penyediaan jasa surat menyurat	390 lembar materai	100	1,860,000	100	390 lembar materai	100	1,860,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	248,355,084	100	3 jenis	100	202,472,717	81.53
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	100	87,000,000	100	1 Paket	100	86,472,700	99.39
4	Penyediaan alat tulis kantor	55 jenis	100	199,973,700	100	55 jenis	100	181,757,600	90.89
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13 jenis ; 36000 lembar	100	12,825,000	100	13 jenis ; 36000 lembar	100	12,825,000	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	100	9,283,500	100	9 jenis	100	9,283,500	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis	100	10,200,000	100	4 jenis	100	10,200,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	384 nasi ; 384 snack ; 1547 dus air mineral	100	52,650,000	100	288 nasi ; 288 snack ; 1307 dus air mineral		52,650,000	100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	6 DL ; 336 DD	100	124,360,000	100	3 DL, 313 DD	86.39	107,437,800	86.4

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	dan dalam daerah								
10	Upacara Keagamaan	4 kegiatan	100	25,000,000	100	4 kegiatan	100	24,500,000	98.0
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 gedung ; 8 orang	100	405,217,248	100	1 gedung ; 8 orang	98.16	397,752,281.04	98.2
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 roda 4 ; 5 roda 2 ; 1 orang	100	150,690,104	100	2 roda 4 ; 5 roda 2 ; 1 orang	100	142,727,347.63	94.7
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7 jenis pemeliharaan	100	68,465,000	100	7 jenis pemeliharaan	100	66,715,000	97.4
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	1,109,419,432	100	5 jenis	100	1,099,197,749.79	99.1
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	1,046,735,224	100	3%	100	1,042,835,026.53	99.6
	UPT KABUPATEN JEMBRANA								
F	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			1,483,315,688	100			1,423,761,897.13	96.0
1	Penyediaan jasa surat menyurat	360 lbr materai ; 94 lbr perangko	100	1,936,000	100	360 lbr materai ; 94 lbr perangko	100	1,936,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	154,000,000	100	3 jenis	100	136,061,896	88.4
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	100	86,150,000	100	1 paket	100	85,821,500	99.6
4	Penyediaan alat tulis kantor	34 jenis	100	176,304,500	100	34 jenis	100	160,603,100	91.1
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16 jenis ; 39592 lbr	100	23,505,400	100	4 jenis ; 10200 lbr	63.7	19,448,000	82.7
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	100	3,500,000	100	5 jenis	100	3,500,000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	100	2,880,000	100	1 jenis	100	2,880,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	250 nasi kotak ; 285 snack kotak ; 180 dus air mineral	100	14,500,000	100	66 nasi kotak ; 66 snack kotak ; 45 dus air mineral	50.1	14,300,000	98.6
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	4 DL ; 102 DD	100	59,250,000	100	1 DL ; 33 DD		50,618,800	85.4
10	Upacara Keagamaan	3 kegiatan	100	25,000,000	100	3 kegiatan	100	25,000,000	100.0
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung ; 5 orang	100	247,510,520	100	1 gedung ; 5 orang	100	246,221,488.21	99.5
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 roda 4 ; 8 roda 2 ; 2 orang	100	117,557,708	100	1 roda 4 ; 8 roda 2 ; 2 orang	100	116,140,695.29	98.8
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	6 jenis	100	35,340,000	100	4 jenis	67.0	25,573,953	72.4
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi	5 jenis	100	282,076,832	100	5 jenis	100	281,901,781.13	99.9

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	Daerah								
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	253,804,728	100	3%	100	253,754,683.50	100
	UPT KABUPATEN TABANAN								
G	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			1,877,921,492				1,794,857,864.75	95.6
1	Penyediaan jasa surat menyurat	415 materai; 280 perangko	100	3,157,000	100	415 materai; 280 perangko	100	3,157,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	182,000,000	100	3 jenis	100	148,109,343	81.4
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	100	160,297,500	100	1 paket	100	159,494,000	99.5
4	Penyediaan alat tulis kantor	46 Jenis	100	196,113,500	100	46 jenis	100	177,288,900	90.4
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis; 50.010 lembar	100	21,252,000	100	2 jenis; 50.010 lembar	100	14,127,000	66.5
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	100	8,250,000	100	5 jenis	100	7,152,725	86.7
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	100	12,960,000	100	2 jenis	100	11,490,000	88.7
8	Penyediaan makanan dan minuman	202 nasi kotak ; 202 snack kotak ; 956 dus air mineral	100	35,750,000	100	202 nasi kotak ; 202 snack kotak ; 956 dus air mineral	100	35,470,000	99.2
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	4 DL ; 298 DD	100	82,965,000	100	4 DL ; 298 DD	100	73,845,200	89.0
10	Upacara Keagamaan	6 kegiatan	100	25,000,000	100	6 kegiatan	100	25,000,000	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung ; 10 orang	100	358,921,040	100	1 gedung ; 10 orang	100	358,228,980	99.8
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 unit roda 4 ; 7 unit roda 2 ; 2 orang	100	141,578,184	100	1 unit roda 4 ; 7 unit roda 2 ; 2 orang	100	141,078,572	99.6
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	6 jenis	100	22,990,000	100	6 jenis	100	22,922,000	99.7
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	326,737,936	100	5 jenis	100	324,937,882	99.4
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	299,949,332	100	3%	100	292,556,262.75	97.5
	UPT KABUPATEN BADUNG								
H	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			3,693,951,574				3,563,696,775	96.5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	300 meterai; 130 perangko	100	2,000,000		300 meterai; 130 perangko	100	2,000,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber	3 jenis	100	360,000,000	100	3 jenis	100	321,206,714	89.2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	daya air dan listrik								
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	100	199,950,000	100	1 paket	100	198,178,800	99.1
4	Penyediaan alat tulis kantor	27 jenis	100	391,530,000	100	27 jenis	100	347,124,000	88.7
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 jenis; 60.000 lembar	100	90,000,000	100	4 jenis; 59,504 lembar	95.36	85,819,900	95.4
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	100	9,500,000	100	6 jenis	100	9,138,000	96.2
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	100	9,600,000	100	1 jenis	100	9,600,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	426 nasi kotak; 426 snack kotak; 1503 dus air mineral	100	51,565,000	100	185 nasi kotak; 185 snack kotak		51,475,000	99.8
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	5 DL ; 200 DD	100	92,750,000	100	4 DL ; 190 DD		76,745,200	82.7
10	Upacara Keagamaan	6 kegiatan	100	25,000,000	100	6 kegiatan	100	25,000,000	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung; 11 orang	100	495,107,560	100	1 gedung; 11 orang	100	492,295,573.93	99.4
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 roda 4; 7 roda 2; 1 orang	100	178,372,104	100	1 roda 4; 7 roda 2;		160,806,997.63	90.2
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7 jenis	100	77,000,000	100	6 jenis	99.06	76,280,000	99.1
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	1,403,422,182	100	5 jenis	100	1,399,871,905.85	99.7
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	308,154,728	100	2943%		308,154,683.41	100
	UPT KOTA DENPASAR								
I	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			4,212,097,857				3,810,762,490	90.5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	91 materai; 2 perangko	100	477,800	100	91 materai	98.58	471,000	98.6
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	705,636,000	100	3 jenis	100	390,473,096	55.3
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	100	199,875,850	100	1 Paket	100	198,391,600	99.3
4	Penyediaan alat tulis kantor	25 jenis	100	397,009,688	100	25 jenis	100	367,583,000	92.6
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis; 41.648 lembar	100	47,970,950	100	8 jenis; 3700 lembar		47,609,800	99.2
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	100	8,987,300	100	5 jenis	100	8,967,500	99.8
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	3 jenis	100	17,925,000	100	3 jenis	100	17,316,000	96.6

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	perundang-undangan								
8	Penyediaan makanan dan minuman	100 nasi kotak; 100 snack kotak; 2545 dus air mineral	100	79,850,000	100	600 dus air mineral		75,500,000	94.6
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	2 DL; 58 DD	100	45,000,000	100	0		32,868,850	73.0
10	Upacara Keagamaan	2 kegiatan	100	25,000,000	100	4 kegiatan	200	25,000,000	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 gedung; 12 orang	100	490,615,248	100	2 gedung		479,750,076	97.8
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 roda 4; 4 roda 2; 2 orang	100	118,873,914	100	2 unit roda 2		113,868,796	95.8
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	10 jenis	100	96,643,000	100	2 genzet dan 8 AC		77,966,500	80.7
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	1,898,661,003	100	5 jenis	100	1,895,424,174	99.8
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3.00%	100	79,572,104	100	102.52		79,572,098	100
	UPT. KABUPATEN GIANYAR								
J	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			2,773,056,612				2,703,820,513	97.5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	250 materai; 135 perangko	100	1,650,000	100	250 materai; 135 perangko	100	1,650,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 Jenis	100	208,000,000	100	3 Jenis	100	183,773,221	88.4
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	100	124,500,000	100	1 Paket	100	124,264,300	99.8
4	Penyediaan alat tulis kantor	38 jenis	100	245,215,100	100	38 jenis	100	214,774,800	87.6
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 jenis; 64.900 lembar	100	19,210,000	100	8 jenis; 64.900 lembar	100	19,210,000	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	100	17,170,000	100	9 jenis	100	17,162,400	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	100	4,320,000	100	3 jenis	100	4,320,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	176 nasi kotak; 176 snack kotak; 363 dus air mineral	100	17,050,000	100	176 nasi kotak; 176 snack kotak; 363 dus air mineral	100	17,050,000	100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	2 DL; 168 DD	100	47,850,000	100	4 DL; 118 DD		46,295,600	96.8
10	Upacara Keagamaan	4 kegiatan	100	25,000,000	100	4 kegiatan	100	24,250,000	97.0
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung; 15 orang	100	718,081,560	100	1 gedung; 15 orang	100	715,980,770	99.7
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1 roda 4; 8 roda 2; 1 orang	100	86,872,104	100	1 roda 4; 8 roda 2; 1 orang	100	83,570,546	96.2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	dinas								
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	9 jenis	100	40,600,000	100	7 jenis	100	37,623,250	92.7
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	642,749,976	100	5 jenis	100	641,188,062	99.8
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	574,787,872	100	7.15		572,707,564	99.6
	UPT KABUPATEN BANGLI								
K	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			1,740,763,614				1,699,561,092.46	97.6
1	Penyediaan jasa surat menyurat	240 materai; 334 perangko	100	2,750,000	100	240 materai; 334 perangko	100	2,750,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	122,500,000	100	3 jenis	100	92,493,309	75.5
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	100	152,000,000	100	1 paket	100	151,161,000	99.4
4	Penyediaan alat tulis kantor	35 Jenis	100	126,513,400	100	35 Jenis	100	125,963,400	99.6
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis; 59.950 lembar	100	16,500,000	100	4 Jenis; 59.950 lembar	100	16,500,000	100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis	100	4,027,000	100	3 Jenis	100	4,027,000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	100	6,120,000	100	2 Jenis	100	6,120,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	50 nasi kotak; 50 snack kotak; 235 dus air mineral	100	7,000,000	100	44 nasi kotak; 44 snack kotak; 182 dus air mineral		7,000,000	100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	6 DL; 159 DD	100	64,150,000	100	2 DL; 154 DD		58,431,000	91.1
10	Upacara Keagamaan	5 kegiatan	100	24,300,000	100	5 (9.053 tanding)	99.99	23,930,000	98.5
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung ; 10 orang	100	306,546,224	100	1 gedung ; 7 orang	99.99	306,530,806.55	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 roda 4; 7 roda 2; 1 orang	100	75,507,294	100	3 roda 4, 5 roda 2	99.61	75,214,421.72	99.6
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	5 jenis	100	19,565,000	100	5 jenis	100	19,565,000	100
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	477,809,456	100	5 jenis	100	474,450,698.86	99.3
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	335,475,240	100	57%	100	335,424,456.33	100
	UPT KABUPATEN KLUNGKUNG								
L	Program Peningkatan			1,960,719,275				1,807,603,682.77	92.2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	264 materai; 78 perangko	100	1,500,000	100	264 materai; 78 perangko	100	1,500,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	170,000,000	100	3 jenis	100	114,370,364	67.3
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	100	52,800,000	100	1 Paket	100	52,723,000	99.9
4	Penyediaan alat tulis kantor	30 jenis	100	136,225,100	100	30 jenis	100	123,850,600	90.9
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 jenis; 20.905 lembar	100	19,785,700	100	20.905 lembar	100	18,940,400	95.7
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	100	2,000,000	100	5 jenis	100	1,996,000	99.8
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	100	2,090,000	100	1 jenis	100	2,090,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	100 nasi kotak; 100 snack kotak; 231 dus air mineral	100	10,430,000	100	100 nasi kotak; 100 snack kotak; 231 dus air mineral	100	10,430,000	100
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	2 DL; 73 DD	100	95,842,800	100	3 DL; 129 DD		71,921,600	75.0
10	Upacara Keagamaan	7 jenis	100	25,000,000	100	7 jenis		25,000,000	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung; 15 orang	100	743,262,719	100	14 orang		739,687,020.91	99.5
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1 roda 4; 1 roda 2	100	160,800,000	100	2 roda 4; 2 roda 2	200	133,751,931	83.2
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	9 jenis	100	41,413,500	100	6 jenis	67	23,973,400	57.9
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	313,378,936	100	5 jenis	100	312,128,878.70	99.6
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	186,190,520	100	3%	100	175,240,488.16	94.1
	UPT. KABUPATEN KARANGASEM								
L	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			1,444,355,980				1,408,778,287.81	97.5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	130 perangko; 350 materai	100	2,000,000	100	130 perangko; 350 materai	100	2,000,000	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	100	129,000,000	100	3 jenis	100	121,200,451	94.0
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	100	92,795,500	100	1 Paket	100	92,629,180	99.8
4	Penyediaan alat tulis kantor	41 jenis	100	183,297,400	100	41 jenis	100	182,797,400	99.7
5	Penyediaan barang cetakan dan	9 jenis; 53.750 lembar	100	18,350,000	100	9 jenis; 40.700 lembar		17,765,000	96.8

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	Rp.	%	VOL	%	Rp.	%
	penggandaan								
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	100	6,329,000	100	8 jenis	100	6,329,000	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	100	7,920,000	100	3 jenis	100	7,920,000	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	420 nasi kotak; 420 snack kotak; 624 dus air mineral	100	29,340,000	100	270 nasi kotak; 270 snack kotak; 600 dus air mineral		27,450,000	93.6
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	5 DL; 152 DD	100	73,536,000	100	3 DL; 182 DD		67,514,400	91.8
10	Upacara Keagamaan	7 kegiatan	100	25,000,000	100	7 kegiatan	100	25,000,000	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung; 6 orang	100	199,198,624	100	1 gedung; 6 orang	100	198,885,435.84	99.8
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	2 roda 4; 8 roda 2; 1 orang	100	89,682,104	100	2 roda 4; 8 roda 2; 1 orang	100	88,503,101.63	98.7
13	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7 jenis	100	53,400,000	100	7 jenis	100	49,525,150	92.7
14	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	5 jenis	100	320,272,832	100	5 jenis	100	312,698,181.13	97.6
15	Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	3%	100	214,234,520	100	3%	100	208,560,988.21	97.4

Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan

Walaupun pendapatan asli derah atau Pajak daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaran Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan, Namun masíh terdapat permasalahan pokok yang dihadapi dibidang pendapatan daerah yaitu :

1). Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemunggutan terhadap Pendapatan Daerah.

2). Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum dibidang pendapatan, baru dilaksanakan sebatas pembinaan dan Belum sampai pada pengenaan sanksi.

3). Kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, terutama dalam bidang pelayanan masih perlu ditingkatkan.

4). Penyampaian Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah terlambat diterima dari Kasda (BPD Bali) sehingga pembuatan laporan realisasi pendapatan menjadi terlambat.

Solusi

Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain sebagai berikut :

1). Menggali potensi yang ada dan mewujudkan peraturan Perundang-undangan serta kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemunggutan.
2). Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur di bidang Pendapatan melalui pelatihan, bimtek, dan sosialisasi.
3). Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya,
4). Mengadakan penagihan tunggakan pajak secara intensif.

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Urusan satuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum yaitu dengtan mensinergikan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, TNI/POLRI serta unsur pemerintah terkait lainnya secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan Bali yang Aman dan Nyaman serta terhindar dari ancaman intervensi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti : terorisme, dan anarkhisme.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Keamanan Lingkungan	a) Pemantauan Orang asing
		b) Pengembangan,Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
		c) Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	a) Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas Provinsi Bali
		b) Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah
		c) Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali
		d) Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)
3.	Program Bina Idiologi	a) Pemantapan Wawasan Kebangsaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		b) Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK)se Bali
		c) Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Guru-guru SLTA, Tokoh-tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas
		d) Sosialisasi Peraturan Daerah Bali No 7 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
		e) Revolusi Mental

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebanyak : 7 orang terdiri dari 4 orang S2 dengan pangkat Pembina Tk. I Muda 1 orang, S2 dengan pangkat Pembina 2 orang, S2 dengan pangkat Penata Tk .I 1 orang, 1 orang S1 dengan pangkat Penata Muda Tk.I, 2 orang SLTA dengan pangkat 1 orang Penata Muda dan 1 orang Pengatur.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program peningkatan keamanan Lingkungan dengan 3 (tiga) Kegiatan yaitu

1. Program peningkatan keamanan Lingkungan dengan 3 (tiga) Kegiatan yaitu
   a. Koordinasi Pemantauan Orang Asing, dengan total anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp. 101.588.600,- (67,73%)
   b. Pengembangan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan total anggaran sebesar Rp. 465.000.000,- dan realisasi Rp. 393.071.920,- (84,53%)
   c. Pemantauan dan Penanganan Konflik sosial, dengan total anggaran sebesar Rp.457.000.000,- dan realisasi Rp. 339.921.152,- (74,38%)
2. Program Pendidikan politik Masyarakat dengan 4 (empat) kegiatan yaitu
   a) Pengembangan dan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah, dengan total anggaran sebesar Rp.300.076.000,- dan realisasi Rp.216.844.166,- (72.26%).
   b) Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas Provinsi Bali, dengan total anggaran sebesar Rp.67.288.000,- dan realisasi Rp.63.975.300,- (95.08%).
   c) Penguatan Demokrasi lokal Dalam Peningkatan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI) dengan total anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.127.401.156,- (79.63%)
   d) Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali, dengan total anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp. 138.143.080,- (88,01%).
3. Program Bina Idiolagi dengan 5 (lima) kegiatan yaitu

a) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Bali, dengan total anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dan realisasi RP.70.330.600,- (78.15%)
b) Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan total anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dan realisasi Rp. 73.700.000,- (81.89%)
c) Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Guru-Guru SLTA, Tokoh-tokoh agama, adat, Etnis dan Ormas,dengan total anggaran sebesar Rp.160.000.000,- dan realisasi Rp.143.145.200,- (89.47%)
d) Sosialisasi Peraturan Daerah Bali No 7 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,dengan total anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan Realisasi Rp.81.286.561,- (90.32%)
e) Revolusi Mental dengan total anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dan Realisasi RP.217.096.800,- (77.53%)

Berdasarkan ulasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan diatas, dapat dilihat realisasi fisik sudah semua 100% dengan realisasi keuangan diatas 75% dan hanya 3 kegiatan dengan realisasi keuangan dibawah 75%. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri digambarkan pada tabel dibawah ini.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2019

No	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Peningkatan Keamanan Lingkungan								
1	Pemantauan orang asing	1 jenis buku laporan	100	150,000,000	100	1 jenis buku laporan	100	101,588,600	67,73
2	Pengembangan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terpeliharanya 67 titik CCTV, Terpeliharanya jaringan infra struktur link wireless, 2 jenis buku laporan	100	465,000,000	100	Terpeliharanya 67 titik CCTV, Terpeliharanya jaringan infra struktur link wireless, 2 jenis buku laporan	100	393,071,920	84,53
3	Pemantauan dan Penanganan Konflik social	3 janis laporan	100	457,000,000	100	3 janis laporan	100	339,921,152	74,38
B	Program Pendidikan Politik Masyarakat								
1	forum komunikasi dan konsultasi ormas provinsi bali	50 orang	100	67,288,000	100	50 orang	100	63,975,000	95,08
2	Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah	1 laporan	100	300,076,000	100	1 laporan	100	216,844,166	72,26
3	Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali	20 ormas	100	150,000,000	100	20 ormas	100	138,143,080	88,01

No	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
4	Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	100 orang	100	160,000,000	100	100 orang	100	127,401,156	79,63
C	Program Bina Ideologi dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan								
1	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100 Orang	100	90,000,000	100	50 orang	100	70,330,600	78,15
2	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	100 Orang	100	90,000,000	100	50 orang	100	73,700,000	81,89
3	Pemantapan Kesadaran Bela Negara Bagi Guru Guru SLTA, Tokoh-Tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas	100 Orang	100	160,000,000	100	200 orang	100	143,145,200	89,47
11	Sosialisasi Peraturan Daerah Bali No. 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	100 Orang	100	90,000,000	100	100 Orang	100	81,286,561	90,32
12	Revolusi Mental	250 Orang	100	280,000,000	100	250 orang	100	217,096,800	7,53

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas tugas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas .
3. Pada kenyataan kita dihadapkan pada tantangan internal maupun global dengan dinamika perubahan sosial dan politik yang berpotensi ditunggangi isu-isu global sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa serta sangat berpotensi untuk memicu dan memacu terjadinya disintegrasi bangsa;
4. Berbagai pengaruh globalisasi sering membuat terlena dan terbawa arus dengan mengadopsi dan meniru nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa;

Solusi Pemecahan Masalah program dan kegiatan sbb.:

1) Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah
2) Melaksanakan koordinasi Intelijen daerah secara intensif.
3) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
4) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Politik dan pemerintahan umum tentang pelaksanaan kegiatan pusat yang harus dihadiri.
5) Salah satu aspek dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melaksanakan pembauran bangsa memberdayakan masyarakat melalui ormas maupun forum yang ada dan disisi lain yang sangat penting dalam menunjang tetap kukuhnya persatuan dan kesatuan

bangsa adalah memantapkan kerukunan hidup beragama dengan melibatkan para tokoh umat beragama. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama akan lebih efektif dilaksanakan melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

6) Melaksanakan bimbingan teknis wawasan kebangsaan kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah;

D. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.1 (terlampir).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan:

1) Administrasi Umum (8 Aspek)

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format LampiranI.2 (terlampir).

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b. Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu badan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya), fungsi kesekretariatan (Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRD).

3) Urusan Pemerintahan Umum

a. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan urusan pemerintahan umum merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b. Yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesbangpol.

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingka tCapaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.3 (terlampir).

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Dekonsentrasi sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan selain desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan pusat dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat atas dana APBN yang diberikan pusat ke daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan pentingnya pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan sehingga pemanfaatan sumber daya berjalan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4.1 Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
e) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

4.2 Kementerian/Lembaga Pemberi Dana Dekonsentrasi

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2019 yang melimpahkan sebagian kewenangan melalui Dana Dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi Bali adalah :

a) Kementerian Dalam Negeri
b) Kementerian Pertanian
c) Kementerian Perdagangan
d) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
e) Kementerian Pemuda Dan Olahraga
f) Kementerian Kesehatan
g) Kementerian Ketenagakerjaan
h) Kementerian Sosial
i) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
j) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
k) Kementerian Kelautan Dan Perikanan
l) Kementerian Pariwisata
m) Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
n) Kementerian Pemeberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

o) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
p) Perpustakaan Nasional
q) Badan Koordinasi Penanaman Modal

4.3 Perangkat Daerah yang menerima Dana Dekonsentrasi

a) Sekretariat Daerah Provinsi Bali
b) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali
c) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali
d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali
e) Dinas Pendidikan Provinsi Bali
f) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
g) Dinas Kesehatan Provinsi Bali
h) Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
i) Dinas Sosial Provinsi Bali
j) Dinas Kehutanan Propinsi Bali
k) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali
m) Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
n) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
o) Dinas Pariwisata Provinsi Bali
p) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali
q) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
r) Bappeda Provinsi Bali
s) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali
t) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

4.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
I	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**		**222.072.000**	**222.072.000**	**172.030.400**	**47.132.000**	**219.162.400**	**100**	**100**	**100**	**98,7**	**2.909.600**
1	229068	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	222.072.000	222.072.000	172.030.400	47.132.000	219.162.400	100	100	100	98,7	2.909.600
II	**KEMENTERIAN PERTANIAN**		**25.088.488.000**	**26.346.088.000**	**21.689.374.031**	**3.354.085.128**	**25.043.459.159**	**100**	**97,4**	**100**	**95,1**	**1.302.628.841**
2	229027	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali	4.060.610.000	4.693.510.000	3.846.997.800	599.738.743	4.446.736.543	100	95,8	100	94,7	246.773.457
3	229029	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali	1.441.600.000	1.441.600.000	1.206.311.670	181.594.765	1.387.906.435	100	98,0	100	96,3	53.693.565
4	229030	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali	7.169.820.000	7.169.820.000	5.958.380.055	684.833.100	6.643.213.155	100	96,2	100	92,7	526.606.845

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
5	229061	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali	1.292.757.000	1.292.757.000	936.615.264	281.315.160	1.217.930.424	100	97,3	100	94,2	74.826.576
6	229067	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali	2.313.861.000	2.313.861.000	1.944.567.952	299.232.240	2.243.800.192	100	98,0	100	97,0	70.060.808
7	229164	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali	8.809.840.000	9.434.540.000	7.796.501.290	1.307.371.120	9.103.872.410	100	99,0	100	96,5	330.667.590
III	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**		**4.411.825.000**	**4.411.825.000**	**3.663.654.831**	**286.466.050**	**3.950.120.881**	**100**	**86,2**	**100**	**89,5**	**461.704.119**
8	229020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	615.123.000	615.123.000	498.530.212	63.285.800	561.816.012	100	88,2	100	91,3	53.306.988
9	229065	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	1.712.402.000	1.712.402.000	1.298.906.219	71.481.650	1.370.387.869	100	80,1	100	80,0	342.014.131
10	229163	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	2.084.300.000	2.084.300.000	1.866.218.400	151.698.600	2.017.917.000	100	90,2	100	96,8	66.383.000

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
IV	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**		**5.754.130.000**	**5.754.130.000**	**4.851.678.043**	**438.060.863**	**5.289.738.906**	**100**	**96,0**	**100**	**91,9**	**464.391.094**
11	220042	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	381.312.000	381.312.000	334.569.200	41.629.400	376.198.600	100	100	100	98,7	5.113.400
12	229064	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	4.427.757.000	4.427.757.000	3.792.194.643	302.534.123	4.094.728.766	100	98,1	100	92,5	333.028.234
13	361190	Dinas Pendidikan Provinsi Bali	945.061.000	945.061.000	724.914.200	93.897.340	818.811.540	100	90,0	100	86,6	126.249.460
V	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**		**1.752.640.000**	**1.752.640.000**	**1.325.377.100**	**306.714.800**	**1.632.091.900**	**100**	**99,0**	**100**	**93,1**	**120.548.100**
14	220062	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	1.752.640.000	1.752.640.000	1.325.377.100	306.714.800	1.632.091.900	100	99,0	100	93,1	120.548.100
VI	**KEMENTERIAN KESEHATAN**		**20.305.735.000**	**20.283.135.000**	**16.008.975.800**	**2.419.093.357**	**18.428.069.157**	**100**	**95,2**	**100**	**90,9**	**1.855.065.843**
15	220006	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2.107.218.000	2.107.218.000	1.711.305.788	195.303.400	1.906.609.188	100	92,0	100	90,5	200.608.812
16	229000	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	7.422.715.000	7.422.715.000	5.586.396.817	1.269.176.641	6.855.573.458	100	95,7	100	92,4	567.141.542
17	229001	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1.819.109.000	1.819.109.000	1.456.723.486	9.300.000	1.466.023.486	100	90,7	100	80,6	353.085.514

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
18	229002	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	5.552.354.000	5.552.354.000	4.250.726.500	757.885.100	5.008.611.600	100	98,3	100	90,2	543.742.400
19	229003	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1.391.537.000	1.391.537.000	1.270.787.639	80.558.016	1.351.345.655	100	99,0	100	97,1	40.191.345
20	229004	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2.012.802.000	1.990.202.000	1.733.035.570	106.870.200	1.839.905.770	100	95,3	100	92,4	150.296.230
VII	**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**		**8.050.006.000**	**8.408.996.000**	**7.528.676.285**	**403.173.437**	**7.931.849.722**	**100**	**96,7**	**100**	**94,3**	**477.146.278**
21	229014	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	1.540.564.000	1.540.564.000	1.449.614.013	24.900.000	1.474.514.013	100	97,0	100	95,7	66.049.987
22	229016	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	747.709.000	747.709.000	659.708.149	46.684.640	706.392.789	100	99,2	100	94,5	41.316.211
23	229017	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	5.761.733.000	5.761.733.000	5.160.824.473	301.588.797	5.462.413.270	100	92,2	100	94,8	299.319.730

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
24	229063	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	358.990.000	358.990.000	258.529.650	30.000.000	288.529.650	100	98,3	100	80,4	70.460.350
VIII	**KEMENTERIAN SOSIAL**		**12.891.469.000**	**13.243.209.000**	**11.271.754.395**	**1.210.017.500**	**12.481.771.895**	**100**	**98,84**	**100**	**94,3**	**761.437.105**
25	220032	Dinas Sosial Provinsi Bali	224.692.000	224.692.000	208.116.100	13.600.000	221.716.100	100	100	100	98,7	2.975.900
26	229011	Dinas Sosial Provinsi Bali	1.936.302.000	1.936.302.000	1.612.325.000	228.594.000	1.840.919.000	100	99,6	100	95,1	95.383.000
27	229012	Dinas Sosial Provinsi Bali	1.822.565.000	1.720.165.000	1.297.962.300	328.613.000	1.626.575.300	100	98,1	100	94,6	93.589.700
28	229013	Dinas Sosial Provinsi Bali	4.672.610.000	4.672.610.000	3.694.567.695	539.920.500	4.234.488.195	100	100	100	90,6	438.121.805
29	418973	Dinas Sosial Provinsi Bali	4.235.300.000	4.235.300.000	4.073.128.500	89.340.000	4.162.468.500	100	100	100	98,3	72.831.500
30	418853	Dinas Sosial Provinsi Bali	454.140.000	454.140.000	385.654.800	9.950.000	395.604.800	100	95,3	100	87,1	58.535.200
IX	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**		**512.300.000**	**512.300.000**	**374.961.780**	**72.764.780**	**447.726.560**	**100,0**	**100**	**100**	**87,4**	**64.573.440**

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
31	220049	Dinas Kehutanan Propinsi Bali	338.800.000	338.800.000	237.878.600	45.756.200	283.634.800	100	100	100	83,7	55.165.200
32	400542	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali	173.500.000	173.500.000	137.083.180	27.008.580	164.091.760	100	100	100	94,6	9.408.240
X	**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**		**25.337.001.000**	**25.515.820.000**	**18.918.699.877**	**3.847.907.342**	**22.766.607.219**	**100**	**90,5**	**100**	**89,2**	**2.749.212.781**
33	350325	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali	24.879.811.000	25.058.630.000	18.717.624.977	3.725.906.542	22.443.531.519	100	95,7	100	89,6	2.615.098.481
34	418244	Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	457.190.000	457.190.000	201.074.900	122.000.800	323.075.700	100	85,3	100	70,7	134.114.300
XI	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**2.681.932.000**	**2.681.932.000**	**2.097.671.669**	**304.373.500**	**2.402.045.169**	**100**	**94,2**	**100**	**89,6**	**279.886.831**
35	225127	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	887.332.000	887.332.000	708.234.125	81.452.400	789.686.525	100	95,5	100	89,0	97.645.475
36	229053	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	363.528.000	363.528.000	271.892.640	29.091.700	300.984.340	100	85,0	100	82,8	62.543.660
37	229054	Dinas Kelautan dan	606.875.000	606.875.000	462.235.565	69.015.400	531.250.965	100	90,3	100	87,5	75.624.035

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
		Perikanan Provinsi Bali										
38	229055	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	313.056.000	313.056.000	269.536.299	11.340.000	280.876.299	100	94,1	100	89,7	32.179.701
39	229056	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	321.141.000	321.141.000	221.976.976	94.962.200	316.939.176	100	100	100	98,7	4.201.824
40	229057	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	190.000.000	190.000.000	163.796.064	18.511.800	182.307.864	100	100	100	96,0	7.692.136
XIII	**KEMENTERIAN PARIWISATA**		**2.113.268.000**	**2.113.268.000**	**1.821.803.477**	**74.534.566**	**1.896.338.043**	**100**	**90,4**	**100**	**89,7**	**216.929.957**
41	400593	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	2.113.268.000	2.113.268.000	1.821.803.477	74.534.566	1.896.338.043	100	90,4	100	89,7	216.929.957
XIV	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**		**3.672.653.000**	**3.672.653.000**	**2.866.816.056**	**590.370.550**	**3.457.186.606**	**100**	**98,2**	**100**	**94,1**	**215.466.394**
42	220009	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali	3.672.653.000	3.672.653.000	2.866.816.056	590.370.550	3.457.186.606	100	98,2	100	94,1	215.466.394
XV	**KEMENTERIAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**1.000.000.000**	**1.100.000.000**	**884.901.210**	**136.838.600**	**1.021.739.810**	**100**	**95,1**	**100**	**92,9**	**78.260.190**
43	220037	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000.000	1.100.000.000	884.901.210	136.838.600	1.021.739.810	100	95,1	100	92,9	78.260.190

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Awal	Revisi Pagu	REALISASI							Sisa Dana
					s.d. November	Desember	s.d 31 Desember (Semester IV)	Fisik		Keuangan		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10	11	12=7/5*100	13=(5-7)
		Provinsi Bali										
XVI	**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**		**976.291.000**	**976.291.000**	**479.569.688**	**26.059.900**	**505.629.588**	**100**	**80,0**	**100**	**51,8**	**470.661.412**
44	220060	Bappeda Provinsi Bali	976.291.000	976.291.000	479.569.688	26.059.900	505.629.588	100	80,0	100	51,8	470.661.412
XVII	**PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**		**771.920.000**	**771.920.000**	**644.480.908**	**95.649.200**	**740.130.108**	**100**	**100**	**100**	**95,9**	**31.789.892**
45	220025	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali	493.483.000	493.483.000	442.628.930	27.709.200	470.338.130	100	100	100	95,3	23.144.870
46	220030	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali	278.437.000	278.437.000	201.851.978	67.940.000	269.791.978	100	100	100	96,9	8.645.022
XVIII	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**		**494.499.000**	**494.499.000**	**398.658.214**	**17.264.000**	**415.922.214**	**100**	**95,0**	**100**	**84,1**	**78.576.786**
47	220022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	494.499.000	494.499.000	398.658.214	17.264.000	415.922.214	100	95,0	100	84,1	78.576.786
TOTAL DEKONSENTRASI PROVINSI			**116.036.229.000**	**118.260.778.000**	**94.999.083.764**	**13.630.505.573**	**108.629.589.337**	**100**	**94,86**	**100**	**91,86**	**9.631.188.663**

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 5 ayat (4) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menggunakan asas otonomi *(desentralisasi), dekonsentrasi* dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ataudesa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakanya itu pemberian tugas untuk melaksanakan bagian urusan pemerintahan tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada Desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan pada penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang akan lebih efisien dan efektif jika ditugaskan kepada Daerah Otonom.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

a) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
c) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
d) Keputusan Gubernur Bali Nomor 178/03-P/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan

Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2019 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali adalah :

a) Kementerian Pertanian;
b) Kementerian Pekerjaan Umum

3. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

a) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
c) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.

4. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

4.1 Bidang Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali antara lain :

1. Meningkatnya produksi pangan pokok dengan indikator kinerja antara lain : Jumlah produksi pangan pokok (padi) (ton) dengan target kinerja 830.97 ton
2. Meningkatnya produksi dan daya saing produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan indikator kinerja antara lain :
    - Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%) dengan target kinerja 0.31%
    - Persentase peningkatan produksi hortikultura (%) dengan target kinerja 0.37%
    - Persentase peningkatan produksi perkebunan (%) dengan target kinerja 0.36%
    - Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP) sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%) dengan target kinerja 27%
3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian krama bali dengan indikator kinerja antara lain: Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%) dengan target kinerja 2%

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pembangunan dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1) Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp. 8.929.609.000, realisasi anggaran Rp.8.481.351.528 (94,98%), sisa anggaran Rp. 448.257.472(5,02%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.184.044.594 (92,02%), realisasi fisik 100%.
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan pagu Rp.3.073.909.000, realisasi anggaran Rp. 2.970.658.000 (96,64%), realisasi fisik 100%.
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan pagu Rp.3.512.300.000, realisasi anggaran Rp. 3.314.801.675 (94,38%), realisasi fisik 100%.
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp. 578.000.000, realisasi anggaran Rp.510.024.910 (88,24%), realisasi fisik 100%.
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp. 1.565.400.000, realisasi anggaran Rp. 1.501.822.349 (95,94%), realisasi fisik 100%.

2) Hortikultura

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu anggaran Rp. 13.043.336.000, realisasi anggaran Rp. 12.388.030.740 (94,98%), sisa anggaran Rp. 655.305.260 (5,02%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan pagu anggaran Rp.9.084.261.000, realisasi anggaran Rp.8.541.581.052 (94,03%), realisasi fisik 100%.
- Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura pagu anggaran Rp. 180.000.000 realisasi keuangan Rp.164.984.842, (91,66%) realisasi fisik 100%.
- Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan pagu anggaran Rp.2.749.075.000, realisasi keuangan Rp. 2.679.489.290 (97,47%), realisasi fisik 100%.
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan pagu anggaran Rp.1.030.000.000, realisasi keuangan Rp. 1.001.975.556 (97,28%), realisasi fisik 100%.

3) Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 19.806.305.000, realisasi keuangan Rp.19.346.538.386 (97,68%), sisa anggaran Rp. 459.766.614 (2,32%) realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengolahan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp.9.385.000.000, realisasi anggaran Rp. 9.350.593.730 (99,63%), realisasi fisik 100%
- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan pagu anggaran Rp.50.000.000, realisasi keuangan Rp. 50.000.000 (100%), realisasi fisik 100%.

- Pengolahan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 2.373.235.000, realisasi anggaran Rp.2.318.869.462 (97,71%), realisasi fisik 100%.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp.6.475.640.000, realisasi anggaran Rp. 6.236.014.916 (96,30%), realisasi fisik 100%.
- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran Rp.849.000.000, realisasi keuangan Rp. 808.155.663 (95,19%), realisasi fisik 100%.
- Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan pagu anggaran Rp.673.430.000, realisasi anggaran Rp. 582.904.615 (86,56%), realisasi fisik 100%.

4) Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan pagu anggaran Rp 14.579.782.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp.13.806.642.259,- (94,70%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan Pagu Anggaran Rp.7.842.900.000 realisasi anggaran Rp. 7.692.176.854 (98,08%) dan realisasi fisik 100%.
- Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp.3.090.182.000, realisasi anggaran Rp. 3.062.755.700 (99,11%), realisasi fisik 100%.
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Perkebunan dengan pagu anggaran Rp. 514.643.000 dan realisasi anggaran Rp.464.685.700 (90,29%), dan realisasi fisik 100%.
- Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan pagu anggaran Rp. 1.224.198.000 dan realisasi anggaran Rp. 945.427.671 (77,23%), realisasi fisik 100%.
- Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu anggaran Rp. 742.655.000 dan realisasi Rp. 739.888.610 (99,63%), realisasi fisik 100%.
- Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan pagu anggaran Rp.1.165.204.000 dan realisasi Rp.901.707.724 (77,39%), realisasi fisik 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Tugas Pembantuan pada prinsipnya adalah tugas yang diberikan Pemerintah kepada daerah, namun demikian untuk dapat mewujudkan efektivitas dan optimalisasi dalam pelaksanaannya di lapangan maka perencanaan Tugas Pembantuan perlu melibatkan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 menyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Selanjutnya pada akhirnya sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk

program/kegiatan (DIPA) sudah jadi/final. Disamping itu juga sering diiketemukan DIPA Tugas Pembantuan dengan tanda bintang yang mengalami kesulitan untuk dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan sering ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga akan mengalami keterlambatan pelaksanaan di lapangan. Selain hal tersebut pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) sampai saat ini belum menyampaikan pagu program/kegiatan indikasi ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.

2) Dalam upaya menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi yang intensif sehingga tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Tugas Pembantuan dapat terwujud sesuai dengan dengan harapan masyarakat di daerah.

4.2 Bidang Peternakan

a. Program dan Kegiatan

1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
2) Direktorat Jenderal Prasrana dan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat: (Ditjen PKH). Tugas Pembantuan (TP). 229102 (06) dengan total anggaran sebesar Rp.31.236.856.000,- dengan realisasi keuangan Rp.29.114.778.273,- (93,21%) dan realisasi fisik (99,27%).
   - Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan pagu anggaran Rp.313.750.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 294.988.830,- (94,02%) dan realisasi fisik (100%).
   - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu anggaran Rp 18.250.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp16.816.045.130,- (92,14%) dan realisasi fisik (100%).
   - Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu anggaran Rp. 10.928.650.000,- dengan realisasi keuangan Rp.10.369.336.026,- (94,88%) dan realisasi fisik (98,33%).
   - Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dengan pagu anggaran Rp. 351.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 340.761.108,- (97,08%), dan realisasi fisik (100%).
   - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu anggaran Rp 948.256.000,- dengan realisasi keuangan Rp883.074.179,- (93,13%) dan realisasi fisik (95,73%). Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan pagu anggaran Rp445.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp 410.573.000,- (92,22%) dan realisasi fisik (98,55%).

2) Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Tugas Pembantuan (TP). 229107 (08) dengan total anggaran sebesar Rp. 2.209.000.000,-, dengan realisasi keuangan Rp.2.157.424.610 (97,67%) dan realisasi fisik (99,35%).
   - Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp.1.650.000.000,-, realisasi keuangan Rp. 1.649.000.000,- (99,94%) realisasi fisik (100%).
   - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 524.000.000,-, realisasi keuangan Rp 475.067.910,- (90,60%) realisasi fisik (97,25%).
   - Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi keuangan Rp 33.356.700,- (95,30%) realisasi fisik (100%).

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan adalah :

- Tingginya permintaan sapi potong (Sapi Bali) dari luar Provinsi Bali dan masih adanya pemotongan sapi betina produktif, sehingga perlu meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait, agar keberadaan Sapi Bali tetap berkembang dan lestari di Provinsi Bali
- Akses pemasaran dan permodalan peternak masih lemah.serta ketersediaan pakan relatif terbatas akibat terjadinya alih fungsi lahan, sehingga menyebabkan harga pakan terus meningkat dan terkendala dalam mencukupi biaya produksi
- Kurangnya optimalnya pemanfaatan limbah budidaya/pertanian/ peternakan sebagai bagian dari diversifikasi usaha kegiatan
- Kurangnya ketersediaan air untuk lahan peternakan terutama di daerah kering
- Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Rabies dan Flu Burung

2. Solusi dan upaya tindak lanjut

Solusi dan tindak lanjut yang perlu diupayakan agar pembangunan di sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Bali dapat terlaksana sesuai rencana adalah:

- Meningkatkan pengawasan sebagai implementasi dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sapi Bali di Provinsi Bali yang didalamnya mengatur tentang pengeluaran sapi potong dan pengawasan tempat-tempat pemotongan hewan (RPH).
- Melakukan pembinaan penguatan kelembagaan kelompok peternak, memfasiltasi permodalan melalui perkreditan dan asuransi ternak serta melakukan pembinaan dan bimtek pengolahan pakan ternak dan penanaman HPT.
- Memfasilitasi pengolahan dan sertifikasi pupuk organic.

- Memfasilitasi pembangunan irigasi dan embung terkait dengan penyediaan air untuk kegiatan peternakan
- Untuk mengatasi adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Rabies dan flu burung, maka perlu dilakukan kegiatan:
  a. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi Rabies,
  b. Peningkatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal rabies secara berkelanjutan serta eliminasi HPR secara selektif dan *targeted*
  c. Peningkatan penerapan pelaksanaan *biosecurity* pada kandang-kandang penampungan unggas, pasar unggas dan tempat pemotongan unggas
  d. Pengawasan lalu lintas hewan yang ketat tentang masuknya HPR dan unggas ke Provinsi Bali.

4.3 Bidang Pekerjaan Umum

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 dengan sumber dan jumlah anggaran serta realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan SP. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) sepanjang 14,42 Km dengan pagu anggaran sebesar Rp. 590.315.000,00 dan realisasi keuangan Rp.590.315.000,00 (100%) dan fisik 100%.
2. Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan SP. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) sepanjang 19,68 Km dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.672.971.000,00 dan realisasi keuangan Rp.1.661.876.000,00 (99,34%) dan fisik 100%.
3. Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan SP. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) sepanjang 0,59 Km' dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.087.000,00 dan realisasi keuangan Rp.53.087.000,00 (100%) dan fisik 100%.
4. Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan SP. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) sepanjang 691 M' dengan pagu anggaran sebesar Rp. 469.101.000,00 dan realisasi keuangan Rp.469.101.000,00 (100%) dan fisik 100%.
5. Kegiatan Preservasi Jembatan Preservasi Jalan SP. Tohpati - Sakah - Blahbatuh - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) sepanjang 16 M' dengan pagu anggaran sebesar Rp. 118.704.000,00 dan realisasi keuangan Rp.118.704.000,00 (100%) dan fisik 100%.
6. Kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Satker selama 12 bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 666.737.000,00 dan realisasi keuangan Rp.542.495.000,00 (81,37%) dan fisik 100%.
7. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA yang meliputi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 3.843.838.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 3.831.048.050,00 (99,67%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA dilakukan selama 12 bulan pada Daerah Irigasi (DI) Tukad Ayung, Daerah Irigasi (DI) Mambal, dan Daerah Irigasi (DI) Kedewatan. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA yang meliputi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara terdiri dari beberapa paket pekerjaan antara lain :

a) Operasi DI. Tukad Ayung Mambal dan Kedewatan, Kab. Badung;
b) Pemeliharaan Berkala DI. Tukad Ayung, Kota Denpasar;
c) Pemeliharaan Bangunan Sadap dan Saluran DI. Tukad Ayung Kedewatan;
d) Pemeliharaan Saluran DI. Tukad Ayung Mambal;
e) Pemeliharaan Rumah Pintu Air, Pintu Air dan Petunjuk Bangunan DI. Tukad Ayung Mambal;
f) Pemeliharaan Rumah Pintu Air, Pintu Air dan Petunjuk Bangunan DI. Tukad Ayung Kedewatan;
g) Pemeliharaan Rutin DI. Tukad Ayung, Kota Denpasar.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 bersumber dari APBN dengan total (jumlah anggaran) perbidang masing-masing :

1.	Bidang Pertanian	Rp. 56.358.932.000
2.	Bidang Peternakan	Rp. 33.445.856.000
3.	Bidang Pekerjaan Umum	Rp. 7.414.753.000

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Pemerintah Provinsi Bali tidak menyelenggarakan atau memberikan Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota maupun Desa.

BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Kerja Sama Antar Daerah (selanjutnya disingkat KSAD) semakin dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga KSAD yang telah ada, akan dibentuk dan dikembangkan. Keinginan dan inisiasi untuk membentuk lembaga KSAD ini didorong oleh tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah, bahwa mereka tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan hanya bersandar pada kemampuannya sendiri, tetapi juga tergantung kepada daerah lain, khususnya daerah-daerah tetangga.

KSAD telah dipandang sebagai salah satu bentuk solusi untuk meningkatkan kapasitas potensi daerah melalui pengembangan kinerja dengan memadukan potensi beberapa daerah dalam satu ikatan kerjasama. Pada era otonomi, setiap daerah dituntut untuk mampu berkompetisi dan bersaing dengan daerah lain agar mampu menarik investor dan mengoptimalkan pemanfaatan potensinya. Selain berkompetisi, peningkatan kapasitas daerah dapat dilakukan dengan bentuk lain. KSAD mampu menawarkan alternatif lain disamping dengan berkompetisi tersebut, yaitu dengan bekerja sama membangun dan memanfaatkan potensi masing-masing secara bersama. Kerjasama ini dilakukan untuk membangun potensi kewilayahan yang lebih besar, di dalam kerangka berkompetisi pada skala yang lebih luas. Melalui KSAD, daerah diajak untuk tidak hanya memandang potensi untuk berkompetisi melalui potensinya sendiri, tetapi memandangnya sebagai bagian dari sinergi kewilayahan yang lebih luas dan besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Kerja Sama Daerah adalah Usaha Bersama antara Daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 bahwa untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga.

Selain KSAD juga dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri. Adapun Peraturan yang mendasari pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang – undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri, dan pembuatan perjanjian internasional. Kedua perangkat hukum ini menunjukkan adanya paradigma baru bagi Indonesia dalam melakukan hubungan dengan luar negeri, bahwa hubungan luar negeri tidak lagi merupakan monopoli negara (State Actor) tetapi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam mengimplementasikan KSAD terutama untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, menentukan kebijakan lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

Program dan Kegiatan.

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	a) Peningkatan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; b) Peningkatan Kerjasama Daerah Dan Pihak Ketiga/Badan Usaha; c) Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah ; d) Peningkatan Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara; e) Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU); f) Peningkatan Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) g) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Satuan Perangkat Kerja yang melaksanakan Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah adalah **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali**.

Jumlah Pegawai

Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/b)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bagian (Eselon III/a)	3 orang	-	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	6 orang	3 orang	9 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-
Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-
Pejabat Fungsional Arsiparis	1 orang	-	1 orang
Pejabat Fungsional Pustakawan	-	-	-
C. Staf Fungsional Umum			
Penata Tk. I (III/d)	3 orang	3 orang	6 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	4 orang	9 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	2 orang	-	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	21	12	33

Kondisi Kepegawaian menurut golongan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	-	1 orang
Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang	-	2 orang
Pembina (IV/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Penata Tk. I (III/d)	5 orang	8 orang	13 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	3 orang	8 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	1 orang	1 orang	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)		-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	17	16	33

Kondisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	-	-	-
Sarjana S2	2 orang	3 orang	5 orang
Sarjana S1	12 orang	11 orang	23 orang
Diploma IV	1 orang	-	1 orang
Diploma III/SM (DIII/SM)	-	-	-
SLTA	2 orang	2 orang	4 orang
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-

Realiasai Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	VOL	%	VOL	%	VOL	%
1.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Implementasi kerjasama Pemerintah Daerah (2 Kesepakatan Kerjasama)	2 KB	1.157.703.000	92	Implementasi kerjasama Pemerintah Daerah (2 Kesepakatan Kerjasama)	2 KB	1.063.701.885	9

Realisasi Program dan Kegiatan

KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2019		
NO.	**NOMOR PKS**	**JUDUL PKS**
1	075/02/PKS/B.Pem.Otda/I/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bali tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Klungkung
2	075/04/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Buleleng
3	075/05/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktur RSUD Kabupaten Bangli tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Bangli
4	075/06/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Gianyar
5	075/18/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali
6	075/19/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali

7	075/20/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali
8	075/21/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali
9	075/22/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali
10	075/23/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali
11	075/24/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali.
12	075/27/PKS/B.Pem.Otda/VI/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Politeknik Negeri Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
13	075/28/PKS/B.Pem.Otda/VII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kota Denpasar ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali
14	075/29/PKS/B.Pem.Otda/VII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tentang Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Pangan
15	075/30/PKS/B.Pem.Otda/VII/2019	Perjanjian Kerja Sama tentang Perubahan Atas Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Provinsi Bali
16	075/34/PKS/B.Pem.Otda/XI/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provisi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara
17	075/36/PKS/B.Pem.Otda/XII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Rumah Sakit Tk. II Udayana tentang Pelayanan Laboratorium Kesehatan
18	075/37/PKS/B.Pem.Otda/XII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Klinik Pratama Rawat Jalan FKTP Sudirman Kesdam IX/Udayana tentang Pelayanan Laboratorium Kesehatan
19	075/38/PKS/B.Pem.Otda/XII/2019	Adendum/Perubahan Perjanjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) Kepada Masyarakat

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kerja sama antar daerah, antara lain:

1. Aparatur Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami tentang arti penting kerja sama antar daerah;
2. Belum ada inventarisasi potensi daerah yang bisa dikerjasamakan dengan daerah lain untuk saling mendukung dan menguntungkan.

b. Solusi

Solusi yang didapatkan dalam melakukan kerja sama antar daerah, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
2. Memfasilitasi OPD melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Bali dalam pembahasan usulan kerjasama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	h) Peningkatan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; i) Peningkatan Kerjasama Daerah Dan Pihak Ketiga/Badan Usaha; j) Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah ; k) Peningkatan Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara; l) Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Mitra Praja Utama (MPU); m) Peningkatan Peningkatan Kerjasama Antar Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) n) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Satuan Perangkat Kerja yang melaksanakan Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah adalah **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali**.

Jumlah Pegawai

Jabatan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/b)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bagian (Eselon III/a)	3 orang	-	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	6 orang	3 orang	9 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-
Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-
Pejabat Fungsional Arsiparis	1 orang	-	1 orang
Pejabat Fungsional Pustakawan	-	-	-
C. Staf Fungsional Umum			
Penata Tk. I (III/d)	3 orang	3 orang	6 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	4 orang	9 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	2 orang	-	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	21	12	33

Kondisi Kepegawaian menurut golongan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	-	1 orang

Pembina Tk. I (IV/b)	2 orang	-	2 orang
Pembina (IV/a)	1 orang	3 orang	4 orang
Penata Tk. I (III/d)	5 orang	8 orang	13 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	3 orang	8 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	1 orang	1 orang	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)		-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	17	16	33

Kondisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	-	-	-
Sarjana S2	2 orang	3 orang	5 orang
Sarjana S1	12 orang	11 orang	23 orang
Diploma IV	1 orang	-	1 orang
Diploma III/SM (DIII/SM)	-	-	-
SLTA	2 orang	2 orang	4 orang
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-

Realiasai Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	VOL	%	VOL	%	VOL	%
1.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Implementasi kerjasama Pemerintah Daerah (2 Kesepakatan Kerjasama)	2 KB	1.157.703.000	92	Implementasi kerjasama Pemerintah Daerah (2 Kesepakatan Kerjasama)	2 KB	1.063.701.885	9

Realisasi Program dan Kegiatan.

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHKA KETIGA		
NO.	NOMOR PKS	JUDUL PKS
1	075/01/PKS/B.Pem.Otda/I/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denapasar tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2	075/03/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Akademi Keperawatan Mandiri di Bangli tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

3	075/07/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan PT. IMQ Multimedia Utama tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik
4	075/08/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Perluasan Kepesertaan, Kepatuhan, dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bali
5	075/09/PKS/B.Pem.Otda/II/2019	Perjanjain Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Perluasan Kepesertaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kepada Pemohon Ijin Berusaha
6	075/11/PKS/B.Pem.Otda/IV/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali
7	075/12/PKS/B.Pem.Otda/IV/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Kapolri, Kemendagri, PT. Jasa Raharja dengan 34 Provinsi se-Indonesia dengan PT. Bank BPD se-Indonesia dengan PT Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, CIMB Niaga, Permata, Bukopin, Danamon tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Samsat Online Nasional Untuk Pelayanan di Wilayah Administrasi/ Hukum pada 34 Provinsi se-Indonesia
8	075/13/PKS/B.Pem.Otda/IV/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Kapolri, Kemendagri, PT Jasa Raharja dengan 34 Provinsi Seluruh Indonesia dengan PT. BPD se-Indonesia dengan PT Value Stream Indonesia (VSI) tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Samsat Online Nasional, Modern Channel untuk Pelayanan di Wilayah Administrasi/Hukum pada ke-34 Provinsi Seluruh Indonesia
9	075/16/PKS/B.Pem.Otda/IV/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Perluasan Kepesertaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
10	075/26/PKS/B.Pem.Otda/V/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dengan CV. Setiawan, CV. Kantih Tani, CV. Amerta Jaya, CV. Timan Agung, CV. Dharma Pertiwi, CV. Ananta Winangun, CV. Kerambitan Agro, CV. Dharma Kerti Sedana, Koperasi Tani Nandini, Koperasi Panca Kawi Artha, Yayasan Pemilahan Sampah Temesi tentang Penyediaan Pupuk Organik Yang Disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019

11	075/31/PKS/B.Pem.Otda/VIII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT PLN (Persero) tentang Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih di Provinsi Bali
12	075/32/PKS/B.Pem.Otda/VIII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
13	075/33/PKS/B.Pem.Otda/X/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Bali
14	075/35/PKS/B.Pem.Otda/XII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
15	075/39/KB/B.Pem.Otda/XII/2019	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kerja sama badan usaha/swasta, antara lain:

1. Aparatur Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami tentang peraturan dan tata cara kerjasama dengan badan usaha/swasta;
2. Belum terinventarisasinya potensi yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha/swasta.

b. Solusi

Solusi yang didapatkan dalam melakukan kerja sama dengan badan usaha/swasta, antara lain:

1. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha Swasta dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.
2. Perlu kiranya menginventarisasi potensi-potensi yang ada baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui oleh masyarakat maupun dari kalangan swasta.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kegiatan Forum Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada tahun 2019 tidak berbentuk forum tapi berbentuk Tim/Panitia Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerntah untuk mengadakan koordinasi dengan Ketua Partai Politik, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Polda Bali dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perlindungan Masyarakat atau sebutan lain Kabupaten/Kota Se-Bali dalam rangka Pemilihan Presiden 2019.

Adapun Kegiatan Kegiatan tersebut antara lain :

- Melaksanakan rapat rapat dengan Partai Politik, rapat rapat dengan tim verifikasi Bantuan Politik (Banpol) dalam menentukan besaran bantuan Politik dalam rangka pencairan Bantuan Politik 2019.
- Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemantauan perkembangan politik dalam rangka Pemilihan Presiden 2019.

2. Materi Koordinasi

- Mengembangkan dialog antara partai politik dengan pemerintah yang merupakan partner dalam rangka mensinergikan peran dan fungsi partai politik dengan lembaga esksekutif.
- Mengkomunikasikan berbagai kebijakan politik terkait dengan partai politik yang ada dan strategi partai politik dalam implementasinya.
- Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam membangun etika dan budaya politik
- Meningkatkan dan mewujudkan tata kelola penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel desuai dengan Peratutan perundang undangan yang berlaku.

3. Instansi Vertikal Yang Terkait

Dalam Kegiatan ini instansi vertical di daerah yang terlibat adalah :

a. Ketua Partai Politik
b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali
c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
d. Polda Bali

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran dalam kegiatan ini adalah dari APBD Provinsi Bali yang termuat dalam DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk Bidang Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah dengan kode kegiatan No. 4.12.4.12.01.06.001 Tahun Anggaran 2019 dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- *(Tiga ratus dua puluh juta Rupiah)* dan setelah dirasionalisasi menjadi Rp. 300.076.000,- *(Tiga Ratus Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)*.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi dengan instansi vertical di daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yaitu melalui Bidang Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai pada Bidang Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah adalah berjumlah 8 *(Delapan)* orang dan 2 (dua) orang tenaga kontrak dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Dilihat Dari Tingkat Pendidikan menurut Pangkat/Golongan :

No	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal	Status
1	2	3	4	5	6
1.	I Ketut Santikaadi, SE., M.Si. Nip. 19671231 198803 1 152	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	S2	ASN
2.	Drs. I Gusti Made Putra Wijana Nip. 19620610 199103 1 009	Penata Tk I (III/d)	Kasubid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	S1	ASN
3.	Hidayat Mursid, S.S., M.Si. Nip. 19700522 199703 1 006	Pembina (IV/a)	Pelaksana	S2	ASN
4.	I Nyoman Ruwayat, SH. Nip. 19651227 199103 1 011	Penata Tk I (III/d)	Pelaksana	S1	ASN
5.	Ni Made Putri Mas, S.Sos. Nip. 19620502 198503 2 009	Penata Tk I (III/d)	Pelaksana	S1	ASN
6.	Ni Kadek Rudiani, SH., MH. Nip. 19761219 201001 2 010	Panata (III/c)	Pelaksana	S2	ASN
7.	Gusti Ayu Ngurah Mulianti Nip. 19620809 198412 2 005	Panata (III/c)	Pelaksana	SMA	ASN
8.	Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos. Nip. 19740519 201001 1 008	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	S1	ASN

No.	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah	Status Kepegawaian
		IV	III	II	I		
1.	S2	3	-	-	-	3	ASN
2.	S1	-	4	-	-	4	ASN
3.	S1	-	-	-	-	2	NON ASN
3.	SMA	-	1	-	-	1	ASN

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Pada Tahun 2019 intensitas kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah adalah

- Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan sebanyak 6 kali yaitu

Tanggal 13 s/d 25 Februari 2019

Tanggal 10 s/d 15 April 2019

Tanggal 2 s/d 7 Mei 2019

Tanggal 2 s/d 14 Oktober 2019

Tanggal 23 s/d 30 April 2019

Tanggal 28 Nopember 2019

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

a. Tersampaikannya berbagai kebijakan politis terkait dengan Partai Politik yang ada dan staf Partai Politik dalam implementasinya.
b. Semakin kuatnya partai politik sebagai pilar demokrasi bangsa sebagai partner pemerintah guna mewujudkan system politik yang demokratis (terwujudnya sistem politik yang demokratis).
c. Terwujudnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam membangun etika dan budaya politik.
d. Terwujudnya pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Tindak lanjut dari hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah melaporkan hasil koordinasi kepada Gubernur.

10. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah tidak mengalami hambatan dan kendala, sehingga kegiatan berjalan dengan baik secara keseluruhan dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Jumlah dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- *(Tiga ratus dua puluh juta Rupiah)* dan setelah dirasionalisasi menjadi Rp. 300.076.000,- *(Tiga Ratus Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)*.
b. Realisasi keuangan sebesar Rp. 216.844.166,-
c. Realisasi Fisik 100%
d. Realisasi Keuangan 72,26%
e. Sisa Anggaran sebesar Rp. 83.231.834,-

D. Pembinaan Batas Wilayah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas dan proporsional kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya di daerah yang disertai dengan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penentuan Batas Daerah dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanan otonomi daerah khususnya dalam hal penataan

wilayah suatu daerah otonom serta dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang menyangkut permasalahan antar daerah, maka penetapan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjadi salah satu prioritas Program/Kegiatan Kementerian Dalam Negeri.

Guna mengantisipasi terjadinya permasalahan perbatasan yang cenderung dapat menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan politik dalam kerangka pembangunan daerah, maka Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Tupoksi Penanganan Penegasan Batas Daerah di Wilayah Provinsi Bali.

Dengan dukungan dana pada APBD Provinsi Bali Tahun 2019, maka dilaksanakan penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung dalam rangka penetuan Batas koordinat secara pasti. Adapun letak sasaran Penegasan Batas Daerah tepatnya antara Desa Beraban dengan Desa Cemagi, Desa Buit dengan Desa Cemagi, Desa Kaba-Kaba dengan Desa Munggu, Desa Cepaka dengan Desa Munggu, Desa Cepaka dengan Desa Tumbakbayuh, Desa Cepaka dengan Desa Buduk, Desa Nyambu dengan Desa Kekeran, Desa Kaba-kaba dengan Desa Kekeran, dan Kelurahan Abiyantuwung dengan Desa Mengwitani.

Kegiatan pembinaan penegasan batas daerah /perapatan pilar batas daerah merupakan amanah dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta untuk meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, yang memerlukan kepastian Batas Daerah dalam penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata dilapangan dengan berpedoman pada Permendagri No.76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kegiatan penegasan batas daerah/perapatan pilar batas dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 76 tahun 2012 sebagai berikut. :

a. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas dan proporsional kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya di daerah yang disertai dengan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Salah satu kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penentuan Batas Daerah dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanan otonomi daerah khususnya dalam hal penataan wilayah suatu daerah otonom serta dalam upaya mengantisipasi

permasalahan yang menyangkut permasalahan antar daerah, maka penetapan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjadi salah satu prioritas Program/Kegiatan Kementerian Dalam Negeri.

c. Guna mengantisipasi terjadinya permasalahan perbatasan yang cenderung dapat menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat yang akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan politik dalam kerangka pembangunan daerah, maka Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Tupoksi Penanganan Penegasan Batas Daerah di Wilayah Provinsi Bali.

d. Dengan dukungan dana pada APBD Provinsi Bali Tahun 2019, maka dilaksanakan penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung dalam rangka penetuan Batas koordinat secara pasti. Adapun letak sasaran Penegasan Batas Daerah tepatnya antara Desa Beraban dengan Desa Cemagi, Desa Buit dengan Desa Cemagi, Desa Kaba-Kaba dengan Desa Munggu, Desa Cepaka dengan Desa Munggu, Desa Cepaka dengan Desa Tumbakbayuh, Desa Cepaka dengan Desa Buduk, Desa Nyambu dengan Desa Kekeran, Desa Kaba-kaba dengan Desa Kekeran, dan Kelurahan Abiyantuwung dengan Desa Mengwitani.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2019 pada DPA OPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali Nomor : 918/037/DPA/2019 tanggal 2 Januari 2019 dengan Kode Rekening Kegiatan 4.09.4.09.01.02.10.004 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.548.000,00,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran Pemerintah Provinsi Bali, maka alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 70.563.000,- (tujuh puluh juta Lima Ratus Enam Puluh tiga Ribu Rupiah). Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI DANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE	KET.
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.000,-	2.175.000,-	100%	
2.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000,-	75.000,-	100%	
3.	Belanja Dokumentasi	136.000,-	0	0%	
4.	Belanja Penggandaan dan Penjilidan	1.020.000,-	1.020.000,-	100 %	
5.	Belanja Fotocopy	832.000,-	832.000,-	100%	
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.125.000,-	5.800.000,-	94,7%	
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,-	15.200.000,-	100%	
8.	Jasa Konsultasi	45.000.000,-	45.000.000,-	100%	
	Total	**70.563.000**	**70.102.000,-**	99,35%	

Capaian Kinerja Kegiatan Penegasan Batas Daerah Tahun 2019 yaitu :

1. Sosialisasi Penegasan Batas Daerah

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Bali dalam rangka memberi pemahaman ketentuan perundang-undangan tentang Batas Wilayah antar Kabupaten yang bersangkutan yang akan ditindaklanjuti dengan pelacakan dilokasi yang akan dilakukan Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah. Adapun kegiatan sosialisasi di lakukan di lokasi 2 (dua) Kabupaten yang menjadi sasaran kegiatan yaitu Desa Beraban dengan Desa Cemagi, Desa Buit dengan Desa Cemagi, Desa Kaba-Kaba dengan Desa Munggu, Desa Cepaka dengan Desa Munggu, Desa Cepaka dengan Desa Tumbakbayuh, Desa Cepaka dengan Desa Buduk, Desa Nyambu dengan Desa Kekeran, Desa Kaba-kaba dengan Desa Kekeran, dan Kelurahan Abiyantuwung dengan Desa Mengwitani dengan menghadirkan Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kabupaten, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat setempat.

2. Pelacakan Untuk Pilar Pemeliharaan dan Perapatan

Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Bali mendatangi lokasi sekaligus mengambil gambar pilar sebelum dilaksanakan perawatan dan mengecek posisi koordinar pilar dengan GPS Garmin 62 S. Kemudian setelah diambil gambar kegiatan Tim melaksanakan perbaikan pilar-pilar tersebut dan dilaksanakan pengecatan kembali.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas Daerah adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang belum memiliki keahlian di bidang Topografi. Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan terhadap Tenaga Ahli dari luar instansi Pemprov Bali.

Satuan Perangkat Kerja yang melaksanakan Program Kegiatan pembinaan penegasan batas daerah /perapatan pilar batas daerah adalah **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali**.

Jumlah Pegawai

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/b)	1 orang	-	1 orang
Kepala Bagian (Eselon III/a)	3 orang	-	3 orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	6 orang	3 orang	9 orang
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-
Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-
Pejabat Fungsional Arsiparis	1 orang	-	1 orang

Pejabat Fungsional Pustakawan	-	-	-
C. Staf Fungsional Umum			
Penata Tk. I (III/d)	3 orang	3 orang	6 orang
Penata (III/c)	-	1 orang	1 orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang	4 orang	9 orang
Penata Muda (III/a)	1 orang	-	1 orang
Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
Pengatur (II/c)	2 orang	-	2 orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
Juru Muda (I/a)	-	-	-
Total	21	12	33

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman dan kejadian bencana, melalui pengurangan risiko bencana dan kerentanan bencana. Pencegahan bencana ini merupakan langkah pertama dalam upaya penanggulangan bencana, selain penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Upaya pencegahan ini meliputi aspek pengetahuan, pemanfaatan modal sosial dan tradisi yang menunjang pencegahan, dan langkah-langkah nyata untuk melakukan pencegahan, baik oleh masyarakat atau penentu kebijakan. Pencegahan Bencana ini telah menjadi konsen di dalam UU No. 7 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Pencegahan bencana selalu berkaitan dengan tipe bencana itu sendiri. Dalam kajian kebencanaan, paling tidak ada dua tipe: tipe bencana alam yang tidak mungkin dilakukan pencegahan, misalnya berkaitan dengan proses geologi atau proses meteorologi, seperti gunung meletus, badai angin, dan gempa bumi. Maka yang dilakukan dalam pencegahan adalah pengurangan kerentanan elemen-elemen yang mungkin terpengaruh, misalnya dengan mengurangi dampak-dampak tertentu, dengan cara pembuatan tanggul-tanggul air yang benar dan baik atau membuat konstruksi bangunan yang tahan gempa. Ada juga tipe bencana yang mungkin bisa dilakukan pencegahan, semisal pada bencana kecelakaan industri. Yang perlu dilakukan dalam tipe bencana ini adalah penciptaan sistem keamanan tertentu sebagai bentuk pencegahan bencana.

Baik subjek atau objek dalam pencegahan bencana perlu mentransfer pengetahuan tentang mitigasi bencana, yang meliputi fisik dan non-fisik. Bentuknya bisa berupa penataan kawasan dan jenis-jenis struktur bangunan yang mesti dibangun di wilayah yang rentan menghadapi ancaman dan kejadian bencana, sesuai dengan tipe bencana yang mungkin ada;

dan sosialisi-pendidikan tentang kebencanaan, cara-cara evakuasi, dan pengungsian yang aman. Mensosialisasikan mitigasi bencana fisik dan non-fisik berarti mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan kejadian bencana.

Contoh untuk konteks bencana tanah longsor, suatu bencana bisa diminimalisir untuk dicegah, maka aspek pengetahuan yang mesti dimiliki oleh subjek dan objek pencegahan bencana berkaitan, misalnya: mencetak sawah dan membuat kolam pada tanah berlereng di atas pemukiman akan membahayakan masyarakat; bila terjadi retakan pada lereng tanah segera dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan; melakukan penggalian di bawah lereng terjal membahayakan masyarakat di bawahnya; menebang pohon di lereng akan memudahkan terjadinya banjir bila datang hujan; dan membangun rumah atau pemukiman di bawah tebing atau di tepi tebing akan menciptakan kerentanan bencana yang dihadapi masyarakat.

Selain memperdalam pengetahuan mitigasi kebencanaan, tradisi-tradisi yang menunjang pencegahan dan pengetahuan mitigasi bencana mesti dijaga dan dipertahankan. Sementara tradisi yang membahayakan dan mengancam terhadap kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana, harus ditinggalkan. Contoh tradisi yang baik dan harus dipertahankan, adalah tradisi masyarakat yang menempatkan pohon-pohon besar sebagai sesuatu yang tidak boleh dijamah dan tidak boleh diganggu. Kalau di zaman dulu, tradisi ini di berbagai masyarakat berkaitan dengan adanya si penunggu di pohon-pohon besar itu. Tetapi sekarang, cara berargumentasinya ditambah, misanya dengan adanya pohon besar itu, akan tersedia cadangan air besar dan bisa menahan laju erosi tanah. Tradisi ini termasuk tradisi untuk menjaga lingkungan hidup yang mesti dipertahankan.

Sedangkan di dalam masyarakat, langkah-langkah berdisplin lingkungan yang dijaga terus menerus akan menjadi modal sosial pencegahan yang sangat bermanfaat. Langkah-langkah nyata ini meliputi kemauan dan tindakan agar masyarakat sendiri tidak tinggal di area berbahaya dan membangun struktur bangunan yang tahan bencana; dan siap melakukan evakuasi dengan langakah-langkah tertentu bila sewaktu-waktu diperlukan.

Tindakan pencegahan

Perka BNPN No. 4 tahun 2008 membagi pasif dan aktif dalam tindakan pencegahan bencana:

1. Tindakan pencegahan pasif antara lain:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur;
4. Pembuatan brosur/leaflet/poster;
5. Penelitian/ pengkajian karakteristik bencana;

6. Pengkajian / analisis risiko bencana;
7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan;
8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan;

2. Tindakan pencegahan aktif antara lain:

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

A. Rekapitulasi Kejadian Bencana Dan Musibah Januari - Desember 2019

KEJADIAN	DENPA SAR	BADUNG	TABANAN	KLUNG KUNG	GIANYAR	BANGLI	KARANG ASEM	BULE LENG	JEM BRANA	JUMLAH
GEMPA BUMI	1	1	1	0	1	0	5	2	8	19
TSUNAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEBAKARAN	75	90	8	5	9	8	44	8	17	264
BANJIR	0	0	0	0	0	0	7	2	5	14
TANAH LONGSOR	0	9	5	4	13	5	31	8	0	75
PUTING BELIUNG	0	7	1	0	2	1	1	5	3	20
GUNUNG MELETUS	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25
KECELAKAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POHON TUMBANG	15	116	44	98	133	16	145	27	26	620
BANGUNAN ROBOH	0	6	3	3	0	0	2	4	0	18
KEKERINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORANG HILANG	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6

ORANG TENGGELAM	0	0	5	2	1	1	0	1	0	10
KAPAL TENGGELAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENEMUAN MAYAT	0	9	0	1	1	0	0	0	1	12
PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KONFLIK SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAIN - LAIN	1	5	0	2	8	0	14	1	1	32
JUMLAH	**92**	**243**	**67**	**115**	**168**	**31**	**274**	**63**	**62**	**1.115**

B. Rekapitulasi Korban Bencana Dan Musibah Januari – Desember 2019

KABUPATEN	MENINGGAL	LUKA BERAT	KETERANGAN
DENPASAR	0	0	
BADUNG	0	0	
TABANAN	2	0	
KLUNGKUNG	1	0	
GIANYAR	1	1	
BANGLI	1	2	
KARANGASEM	3	3	
BULELENG	4	1	
JEMBRANA	2	0	
JUMLAH	**14**	**7**	

Kejadian korban jiwa karena bencana : tanah longsor, tersambar petir, pohon tumbang karena angin kencang, dan Tersengat Listrik dari kabel putus akibat tertimpa pohon. Penanganan Penanggulangan Bencana dilakukan bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat setempat, sesuai peta bencana dengan menyiapkan bantuan Buffer Stock Logistik dan Peralatan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan melalui BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi Bali, Dinas PU Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta BASARNAS Denpasar.

Penanggulangan yang telah dilaksanakan :

- Pencarian korban dan Penyelamatan korban
- Evakuasi
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- Menyiapkan lokasi pengungsi
- Memberikan Santunan

Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi/Lokal/Kabupaten/Kota)

Status bencana yang terjadi adalah status lokal, dimana penanganan dilakukan di Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat dan Tim SAR bila terjadi korban jiwa, dan kerugian harta benda diberikan bantuan sesuai ketentuan berlaku serta kebutuhan logistik didukung oleh BPBD Provinsi Bali dan BPBD Kabupaten/Kota.

Sumber dan Jumlah Anggaran

Secara keseluruhan Total Anggaran APBD tahun 2019 yang diperoleh Rp. **28.732.212.289,-** untuk ***Kegiatan Belanja Tidak Langsung*** Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp 9.629.863.665,-** dengan realisasi sebesar **Rp8. 8.230.571.785 ,- (**85,47**%) ,-** dari Total Anggaran dengan capaian **realisasi fisik 100%.**

Kegiatan Belanja Langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp 19.102.348.624,-** dengan realisasi sebesar **Rp16.834.331.425 ,-** atau **88,13%** dari Total Anggaran dengan capaian **realisasi fisik kegiatan 99,95 %.** ***Realisasi keuangan secara keseluruhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Realisasi keuangan sebesar 87,24 % dan realiasasi fisik 99,98 %.***

Rincian anggaran yang mendukung program dan kegiatan BPBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana Tabel dibawah :

Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2019

NO	URAIAN BELANJA	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP)	%	VOL	%	(Rp)	%
A	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1330 lembar	100	6,000,000	100	1330 lembar	100	6,000,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100	110,000,000	100	12 bulan	100	84,570,553	76,88
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	9 unit roda 6, 10 unit roda 4, 15 unit roda 2	100	1,776,546,881	100	9 unit roda 6, 10 unit roda 4, 15 unit roda 2	100	1,485,508,783	83,62
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	100	180,000,000	100	12 bulan	98,40	177,123,700	98,40
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47 jenis	100	53,075,990	100	47 jenis	100	51,795,600	97,59
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	100	20,900,000	100	12 jenis	100	19,633,600	93,94
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	100	13,200,000	100	4 jenis	100	12,310,000	93,26
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	100	17,500,000	100	4 jenis	99,88	17,479,800	99,88
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	100	23,100,000	100	12 bulan	100	20,535,000	88,90
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	12 bulan	100	488,450,000	100	12 bulan	100	409,487,821	83,83

NO	URAIAN BELANJA	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP)	%	VOL	%	(Rp)	%
11	Upacara Keagamaan	12 bulan	100	70,000,000	100	12 bulan	100	70,000,000	100
12	Pembangunan Garase Kendaraan Operasional Tanggap Darurat Bencana	1 Unit	100	197,155,000	100	1 Unit	100	189,420,000	96,08
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25 jenis	100	385,500,000	100	25 jenis	100	322,178,170	83,57
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 unit gedung kantor, 5 orang penjaga kantor,2 orang penjaga gudang	100	483,335,830	100	2 unit gedung kantor, 5 orang penjaga kantor,2 orang penjaga gudang	100	411,183,143	85,07
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11 jenis	100	81,800,000	100	11 jenis	100	76,122,300	93,06
16	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja	2 dokumen	100	70,000,000	100	2 dokumen	93,33	65,329,680	93,33
17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 laporan	100	175,000,000	100	4 laporan	91,66	160,399,473	91,66
B	Pencegahan,Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		100		100				
1	Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	450 orang	100	176,000,000	100	450 orang	100	169,997,275	96,59
2	Pengurangan Risiko Bencana	1 kali PRB, 100 orang	100	120,000,000	100	1 kali PRB, 100 orang	100	111,418,000	92,85
3	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1 desa/ Kelurahan	100	165,000,000	100	1 desa/ Kelurahan	100	146,897,330	89,03
4	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	1 sekolah	100	110,000,000	100	1 sekolah	100	101,135,566	91,94
5	Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	50 orang	100	148,500,000	100	50 orang	100	135,633,316	91,34
6	Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)	100	66,497,805	100	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)	100	49,229,666	74,03
7	Pembuatan dan pemasangan Peta /tanda/rambu rawan bencana Kab/Kota se-Bali	24 rambu rawan bencana	100	200,000,000	100	24 rambu rawan bencana	100	186,469,383	93,23
8	Gladi Penanggulangan Bencana	400 orang	100	440,000,000	100	400 orang	100	408,040,000	92,74
C	Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan		100		100		100		
1	Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan	9 kab/kota	100	475,000,000	100	9 kab/kota	100	368,449,600	77,57
2	Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	100%	100	530,000,000	100	100%	100	485,591,929	91,62
3	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB	40 orang	100	150,000,000	100	40 orang	100	143,846,710	95,90
D	Pemulihan Pasca Bencana		100		100				
1	Penilaian kerusakan / kerugian / Verifikasi Bantuan Pasca Bencana	100%	100	225,000,000	100	100%	100	182,410,500	81,07

NO	URAIAN BELANJA	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOL	%	(RP)	%	VOL	%	(Rp)	%
2	Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana	100%, 12 buku	100	225,000,000	100	100%, 12 buku	93,65	210,718,700	93,65
E	Program Pengendalian Bencana								
1	Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB	9 kab/kota	100	3,089,765,618	100	9 kab/kota	100	2,262,138,353	73,21
2	Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini	9 kab/kota, 3 sertifikat	100	1,036,506,474	100	9 kab/kota,	99,17	958,108,682	92,44
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Peringatan dini Tsunami	9 menara TEWS + 1 peta	100	1,450,260,138	100	9 menara TEWS + 1 peta	100	1,400,267,328	96,55
4	Peningkatan kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan	125 orang	100	3,286,367,548	100	125 orang	100	3,259,004,430	99,17
5	Penyediaan jasa surat menyurat	400 lembar	100	1,800,000	100	400 lembar	100	1,800,000	100,00
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	100	524,508,000	100	1 tahun	100	374,495,789	71,40
7	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	9 unit roda 4, 6 unit roda 2, 1 tahun	100	525,000,000	100	9 unit roda 4, 6 unit roda 2, 1 tahun	100	445,811,452	84,92
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	100	170,000,000	100	1 tahun	100	167,259,444	98,39
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	100	60,000,000	100	6 jenis	100	56,136,400	93,56
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	100	40,000,000	100	8 jenis	100	37,188,250	92,97
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	100	25,000,000	100	3 jenis	100	24,843,000	99,37
12	Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	100	267,857,500	100	1 tahun	100	254,602,500	95,05
13	Upacara keagamaan	1 tahun	100	20,000,000	100	1 tahun	100	18,345,000	91,73
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23 jenis	100	196,400,000	100	23 jenis	100	174,889,726	89,05
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	15 jenis	100	428,150,000	100	15 jenis	100	404,773,240	94,54
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	100	130,125,000	100	2 unit	100	124,726,332	95,85
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	49 jenis	100	595,566,840	100	49 jenis	100	523,206,900	87,85
18	Pengadaan peralatan kesehatan	21 jenis	100	72,480,000	100	21 jenis	100	67,819,000	93,57

Realisasi bantuan bencana Bansos Tidak Terencana :
Sarpras Perekonomian = 3 unit
Rumah Masyarakat = 467 unit
Fasilitas Umum = 27 unit
Santunan : Luka berat 7 orang dan Meninggal 14 Orang

Antisipasi Daerah dalam Menghadapai Kemungkinan Bencana.

Penanganan Penanggulangan Bencana dalam kerjasama tiga pilar penanggulangan bencana yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus terjalin dengan baik yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan dan strategi yang diarahkan kepada peningkatan kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali (BPBD Prov.Bali) untuk membangun ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :

a. Pemantapan dan penguatan regulasi kelembagaan;
b. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu dengan pelibatan semua pihak;
c. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain dalam penanggulangan bencana;
d. Pendidikan dan pelatihan;
e. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang efektif dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana dibuat Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Bali 2013-2018 dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2013. Program/kegiatan penanggulangan bencana meliputi Program Pra Bencana (Pencegahan, Kesiapsiagaan, Mitigasi, Pemberdayaan Masyarakat), Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekontruksi).

Selain kebijakan tersebut juga dibuat program prioritas dan kegiatan yang dapat mengantisipasi terjadinya bencana di Provinsi Bali yaitu :

1. **Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dengan 8 Kegiatan :**
    1) Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
    2) Pengurangan Risiko Bencana.
    3) Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
    4) Pembentukan Sekolah Aman Bencana.
    5) Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana.
    6) Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana.
    7) Pembuatan dan pemasangan Peta /tanda/rambu rawan bencana Kab/Kota se-Bali.
    8) Gladi Penanggulangan Bencana.
2. **Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan dengan 3 Kegiatan :**
    1) Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan.
    2) Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penaggulangan Bencana.
    3) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB.

2. **Program Pemulihan Pasca Bencana dengan 2 Kegiatan :**
    1) Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana.
    2) Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana.
3. **Program Pengendalian Bencana dengan 4 Kegiatan :**
    1) Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB.
    2) Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini.
    3) Peningkatan Kapasitas Sistem Peringatan dini Tsunami.
    4) Peningkatan kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan.

OPD Yang Menangani Bencana

Penanganan bencana dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai exovisio. Dengan demikian penanganan penanggulangan bencana adalah merupakan tanggung jawab bersama. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD melaksanakan fungsi-fungsi KOORDINASI, KOMANDO, dan PELAKSANA sesuai dengan tahapan-tahapan penanggulangan bencana yaitu PRA BENCANA melaksanakan fungsi Koordinasi dan Pelaksana, SAAT BENCANA melaksanakan fungsi Koordinasi,Komando dan Pelaksana, serta pada PASCA BENCANA melaksanakan fungsi Koordinasi dan Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali sesuai dengan tugasnya adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata. Untuk mendukung hal tersebut BPBD Provinsi Bali yang menangani penanggulangan bencana selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali; Dinas PU Provinsi Bali; Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas/Badan/Instansi vertikal yang pada saat terjadi bencana bersama-sama membantu penanganan bencana seperti TNI, Polri, PMI, Basarnas, BMKG, unsur relawan dan lainnya.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, telah tersusun struktur organisasi Badan Penangggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yang terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Kepala Pelaksana.
3. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari :
    a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub. Bagian Keuangan;

c. Sub. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :

a. Sub. Bidang Pencegahan;

b. Sub. Bidang Kesiapsiagaan.

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :

a. Sub. Bidang Penanganan Darurat Bencana;

b. Sub. Bidang Logistik dan Peralatan.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di pimpin oleh Kepala Bidang terdiri dari :

a. Sub. Bidang Kajian dan Verifikasi Rehabilitasi dan Rekontruksi;

b. Sub. Bidang Bantuan dan Monev Rehabilitasi dan Rekontruksi.

7. UPTD. Pengendalian Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengendalian Operasi;

c. Seksi Pelayanan dan Kegawatdaruratan.

Secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon adalah :

a. Eselon II : 1 Orang.

b. Eselon III : 5 Orang.

c. Eselon IV : 12 Orang.

Jumlah Pegawai :

Keadaan pegawai BPBD Provinsi Bali berjumlah 60 orang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)	Keterangan
1	S D	-	-	
2	S L T P	-	-	
3	S L T A	15	25	
4	D-III/SARMUD	2	3.33	
5	S - 1	30	50	
6	S - 2	12	20	
7	S - 3	1	1.67	
	Jumlah keseluruhan	**60**	**100**	

Jumlah Pegawai BPBD Provinsi Bali Menurut Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase (%)	Ket.
1	I/a	-	-	
2	I/b	-	-	
3	I/c	-	-	
4	I/d	-	-	

5	II/a	-	-	
6	II/b	4	6.67	
7	II/c	-	-	
8	II/d	5	8.33	
9	III/a	2	3.33	
10	III/b	13	21.67	
11	III/c	6	10	
12	III/d	21	35	
13	IV/a	6	10	
14	IV/b	2	3.33	
15	IV/c	1	1.67	
16	IV/d	-	-	
	Jumlah Keseluruhan	**60**	**100**	

Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Untuk mengantisipasi terhadap terjadinya bencana di daerah Bali dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (UPT. Pusdalops PB) dibawah BPBD Provinsi Bali. Sejarah terbentuknya UPT. Pusdalops PB adalah adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Palang Merah Prancis pada tanggal 25 Agustus 2008 untuk mendirikan Pusdalops PB di Provinsi Bali, dengan melaksanakan fungsi Pusat Data dan Informasi, Peringatan Dini Bencana dan Operasi Tanggap Darurat. Pada bulan September 2008 setelah audensi dengan Bapak Gubernur (Made Mangku Pastika) disepakati bahwa fungsi Pusdalops PB ditambah dengan fungsi Pelayanan Kegawatdaruratan (Emergency Service Response / ESR).

Pada tanggal 12 November 2008 peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali yang dihadiri oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB pada tanggal 27 Mei 2009. Pada **tanggal 28 Agustus 2009** dilakukan *Soft Lounching Pusdalops PB* yaitu serah terima gedung dari BNPB kepada Pemerintah Provinsi Bali dengan penandatanganan prasasti Pusdalops PB oleh Gubernur Bali.

Gubernur Bali menginstruksikan agar ada integrasi semua sistem, agar terwujud sistem keamanan yang berstandar Internasional. Untuk itu pada tanggal 31 Desember 2009 dilakukan peresmian pengoprasian LED Display yang berlokasi di Simpang Dewa Ruci, Portal Bali Safety dan Aktivasi Sirine Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS) oleh Wakil Gubernur Bali.

UPT. Pusdalops PB berubah namanya menjadi UPTD.Pengendalian Bencana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2018. Untuk mendukung instruksi Gubernur tersebut yaitu mewujudkan keamanan yang berstandar Internasional mengemban fungsi yaitu :

1. Pusat data dan informasi kebencanaan;
2. Sistem Peringatan Dini;

3. Pengendalian operasi tanggap darurat, dan
4. Pelayanan kegawat daruratan.

UPTD.Pengendalian Bencana secara struktural berada dibawah BPBD Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala UPTD. Setingkat Eselon III. Dalam kegiatan operasional didukung oleh staf UPTD (PNS) dan personil ESR (Non PNS) terdiri dari Dokter, Perawat, Administrasi dan Sopir, yang fungsinya untuk memberikan pertolongan pertama apabila masyarakat mengalami bencana atau musibah, dengan sarana mobilitas Ambulance.

Potensi Bencana yang diperkirakan akan terjadi

Semua bencana bisa saja terjadi di pulau Bali , karena pulau Bali memiliki lautan, pegunungan dan dataran rendah, potensi bencana kemungkinan terjadi yaitu meliputi :

1. Gempa Bumi;
2. Tsunami;
3. Erupsi Gunung Berapi;
4. Banjir;
5. Tanah Longsor;
6. Kekeringan / Krisis Air;
7. Kebakaran Lahan
8. Angin Puting beliung

Untuk mengantisipasi potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi terdapat permasalahan dan solusi yang dihadapi adalah :

A. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih terdapatnya korban baik jiwa harta maupun benda akibat terjadinya bencana
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana
3. Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
4. Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik
5. Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi.
6. Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi geologis, hidrologis

B. Solusi Pemecahan Masalah program dan kegiatan sbb.:

1. Memberdayakan Aparatur dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi potensi ancaman bencana.

2. Secara bertahap terus menyusun perencanaan penanggulangan Bencana seperti Rencana Aksi Daerah, Rencana Kontijensi, Kajian Resiko, Rencana Penaggulangan Bencana.
3. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya fasilitas koodinasi kebencanaan yang ada.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi kebencanaan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat melalui para tokohnya, kepada organisasi kemasyarakatan.
5. Melaksanakan pelatihan/gladi bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menghadapi bencana.
6. Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain untuk melakukan upaya pengurangan faktor dasar penyebab risiko bencana.
7. Membangun lebih banyak sistem peringatan dini.

Capaian Predikat dan Prestasi yang telah diraih oleh BPBD Provinsi Bali adalah :

1. Juara I : Katagori Pencegahan dan Kesiapsiagaan diberikan oleh BNPB pada Tanggal 10 Maret 2014 se-Indonesia;
2. Juara III : Katagori Pasca Bencana, diberikan oleh BNPB pada tanggal 10 Maret 2014 se-Indonesia;
3. Juara III : Lomba Pemetaan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Idonesia dalam Peringatan Pengurangan Risiko Bencana 2014, diberikan oleh BNPB pada tanggal 13 Oktober 2014;
4. Juara III : WEBSETE Terbaik dalam TANGGUH WORRD 2014 diberikan oleh BNPB pada tanggal 13 Oktober 2014;\
5. Juara I : Lomba Pemetaan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam Peringatan Pengurangan Risiko Bencana Nasional tanggal 16-18 Oktober 2015 dengan Tema : Pengurangan Risiko Bencana Untuk Pembangunan Berkelanjutan se-Indonesia, diberikan oleh BNPB;
6. Penghargaan dari OMBUDSMAN Provinsi Bali dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, pada tanggal 3 Desember 2014;
7. Penghargaan Pengelola Data Bencana dan Pusdalops Tingkat Provinsi Tahun 2016; dan
8. Penganugerahan BPBD Provinsi Terbaik wilayah III (Jawa dan Bali) Tahun 2016.
9. Penganugrahan BPBD Provinsi Terbaik 2 wilayah 2 dari BNPB Tahun 2018
10. Penghargaan dari Gubernur Bali Terbaik Pertama Adhyasta Prajaniti bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kawasan Khusus adalah Kawasan Strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Dalam Kawasan Khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentusesuai kepentingan nasional yang dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas dan kegiatan industri dan sebagainya. Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana.

Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan khusus sangat identik dengan kawasan strategis yang dapat berupa Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bali antara lain :

1). Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (SARBAGITA);
2). Kawasan Lindung Nasional yaitu : Cagar Alam Batukaru; Taman Nasional Bali Barat; Taman Hutan Raya Ngurah Rai; Taman Wisata Alam Sangeh; Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tamblingan; dan Taman Wisata Laut Buleleng.
3). Kawasan Budidaya yang menjadi sektor unggulan bernilai strategis nasional ditetapkan sebagai Kawasan Andalan yaitu : Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) dengan pengembangan pada sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Perikanan; Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani(Bali Selatan) dengan pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian, Industri dan Perikanan; Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan pengembangan sektor unggulan Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata.
4). Sebanyak 11 (sebelas) ruas jalan bebas hambatan antar kota dan dalam kota.
5). Sistem jaringan Transportasi Utama yaitu Pengembangan Pelabuhan Internasional Benoa, Transportasi Udara Bandara Ngurah Rai.
6). Sistem jaringan Sumberdaya Air Wilayah sungai Bali – Penida.
7). Pengaturan kawasan-kawasan khusus/kawasan strategis nasional yang ada di Provinsi Bali, sudah tertuang sebagai materi muatan teknis dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Perwujudan program untuk kawasan strategis nasional dilaksanakan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota melalui perwujudan program/kegiatan prioritas 5 (lima) tahunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8). Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan merupakan satu-satunya kawasan Strategis Nasional di Provinsi Bali yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan sebgai acuan pengendalian pemanfaatan ruang.

G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yaitu menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka seluruh elemen penyelenggara negara/pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum sampai tahun 2019 dikatakan telah dapat diwujudkan, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan sosial, ekonomi, politik dan masalah adat yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik. Untuk itu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Kesejahteraan di bidang ketentraman dan ketertiban akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Dalam upaya mendukung terwujudnya sistem keamanan berstandar internasional, kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait terus dilakukan dan ditingkatkan. Terciptanya suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara memerlukan regulasi yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 thn 2018 Tentang Satpol PP dan Peraturan Gubernur Bali No 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Perda/Perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat, pada tahun 2019 melaksanakan 3 (tiga) Program prioritas sebagai berikut :

a. Program Penegakan Produk Hukum Daerah
b. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Bali untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum yaitu dengtan mensinergikan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali, TNI/POLRI serta unsur pemerintah terkait lainnya secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan Bali yang Aman dan Nyaman serta terhindar dari ancaman intervensi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti : terorisme, dan anarkhisme.

1. Gangguan yang terjadi selama tahun 2019, antara lain :
   - Unjuk Rasa : 50 kali
   - Sengketa Adat : 12 kali
   - Konflik antarWarga : 9 kali
   - Konflik Tempat Ibadah : 9 kali
   - Teror bom lewat telpon : 0 kali
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, TNI dan Polri.

Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	a) Kegiatan Penegakan Perda b) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Perda c) Kegiatan Deteksi Dini
2	Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman	a) Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibumas dan Linmas b) Kegiatan Pengawalan c) Kegiatan Patroli Wilayah d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor e) Kegiatan Gelar Pasukan
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a) Kegiatan Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; b) Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Kelinmasan c) Kegiatan Pengendalian dan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

1. Program Penegakan Produk Hukum Daerah

a) Kegiatan Penegakan Perda

Kegiatan penegakkan peraturan pada tahun 2019 dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali, dalam implementasinya ada dua jenis penyelesaian kasus pelanggaran yaitu penyelesaian kasus pelanggaran secara Yustisi atau melalui proses peradilan dan penindakan secara Non Yustisi yaitu dengan memberikan peringatan dan menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar perda, seperti tampak pada Tabel berikut :

Data Pelanggaran Perda Tahun 2019
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No.	No.dan Tahun Perda	Tentang	Pelanggaran			Ket.
			Yustisi	Non Yustisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies	0	15	15	
2	Perda No. 16 Tahun 2009	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	0	1	1	
3	Perda No. 1 Tahun 2010	UJPW	0	5	5	
4	Perda No. 5 Tahun2011	Pengelolaan Sampah	0	7	7	
5	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok	0	26	26	
6	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak	0	0	0	
7	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0	26	26	
8	Perda No. 5 Tahun 2016	Pramuwisata	34	27	61	
9	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	2	2	
10	Perda No. 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan bukan Logam dan Batuan	0	27	27	
11	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali	0	1	1	
12	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah	0	0	0	
13	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali	0	3	3	
14	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali	0	67	67	
15	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik	0	60	60	
	j u m l a h :		**34**	**267**	**301**	

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa pada tahun 2019 terdapat 15 jenis Perda/Perkada yang ditegakkan dengan 301 kasus pelanggaran secara yustisi dan non yustisi, dimana terdapat 34 kasus yang diselesaikan secara yustisi dan 267 kasus diselesaikan secara non yustisi, jumlah ini lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 350 kasus sehingga realisasi capaiannya sebesar 114%.

Namun sesuai amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persentase Penegakan Perda sudah tercapai 100% .

b) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat terhadap Perda

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mentaati Perda/Perkada selain pelaksanaan penegakan perda/perkada secara langsung juga secara berkelanjutan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat/pengusaha yang berpotensi melanggar Perda/Perkada. Untuk tahun 2019 telah diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap 48 Obyek Sasaran (Obs) dari 48 Obs yang ditargetkan (100%) yang terdiri dari: masyarakat umum dan pengusaha seperti pramuwisata, siswa, pengusaha biro perjalanan wisata dan lainnya. Pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat Bali dihuni oleh penduduk yang heterogen dengan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami perkembangan/perubahan regulasi yang mengatur tatanan kehidupan masayarakat baik dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sosisal dan budaya.

c) Kegiatan Deteksi Dini.

Selama pelaksanaan deteksi dini diduga terjadi pelanggaran terhadap 20 Peraturan Daerah antara lain: Perda Nomor 7 tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Wisata Tirta, Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies, Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP, Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW), Perda No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Air Permukaan), Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu (Retribusi Perpanjangan IMTA), Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Nomor 44 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintahan Daerah, Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali serta Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Satu Kali Pakai.

2) Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

a) Kegiatan Pengawalan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya tugas Satpol PP adalah melaksanakan penegakan

perda, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, termasuk dalam memberikan pelayanan/melaksanakan pengawalan bagi unsur pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas, baik dikantor maupun dalam melaksanakan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota se Bali. Kegiatan pengawalan juga dilaksanakan bagi tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Bali termasuk pengawalan pejabat negara dan tamu negara. Pemberian pengawalan dan protokoler pada tahun 2019 sebanyak 1060 Obs dari target sebanyak 700 Obs, Realisasi tahun ini melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena aktivitas pimpinan pada tahun 2019 yang meningkat dan erat hubungannya dengan pelaksanaan Pilpres di seluruh Indonesia.

b) Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan Trantibumas dan Linmas

Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan Trantibumas dan Linmas Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani para pihak. Dalam pelaksanaannya Kegiatan Monev dilakukan dengan mengadakan kegiatan pemantauan dan pengawasan serta melakukan evaluasi atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat baik di wilayah perbatasan Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Bali. Pada Tahun 2019 realisasi Kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan Trantibumas dan Linmas telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebanyak 4 (empat) Dokumen Laporan dan 4 (empat) Dokumen Kerja Sama.

c) Kegiatan Patroli Wilayah

Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat salah satunya adalah berdasarkan jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) yang terjadi/terselesaikan. Dari 1080 obyek sasaran (Obs) Kegiatan Patroli Wilayah di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali dan diseluruh kabupaten/kota se Bali Pada tahun 2019 terdapat 235 gangguan/pelanggaran K3 yang terdiri dari: Pelanggaran di bidang Ketertiban a l. : Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kegiatan yang dilakukan dikawasan Civic Centre sebanyak 115 Kali, penertiban dan pengamanan galian C serta pemanfaatan tata ruang perijinan usaha tertentu sebanyak 112 pelanggar, dan penanganan unjuk rasa sebanyak 8 Kali.

Tetapi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Tingkat penyelesaian

pelanggaran Ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) sudah dapat tertangani 100%.

d) Kegiatan Gelar Pasukan

Penyelenggaraan HUT Pol PP dan HUT Linmas secara regular yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rakornas Satpol PP pada tingkat nasional diselenggarakan setiap tahun dan secara bergiliran di seluruh Provinsi di Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk hadir dalam acara dimaksud. Selanjutnya secara regional diikuti oleh daerah di masing-masing Provinsi yang biasanya juga pelaksanaannya ditetapkan secara bergilir dengan menunjuk salah satu Kabupaten/Kota se Bali. Sehubungan dengan hal tersebut, Satpol PP Provinsi Bali pada tahun 2019 telah melaksanakan Apel Siaga melalui Kegiatan Gelar Pasukan bersama seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan peringatan HUT Satpol PP ke 69, Satlinmas ke 57 dan Damkar ke 100 di Kabupaten Klungkung.

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor pada tahun 2019 telah melakukan Pengadaan Jasa Tenaga Satpam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang yang telah ditempatkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna memadai kebutuhan pengamanan di OPD tersebut agar terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Kegiatan Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Keberadaan lembaga Satuan Linmas khususnya di desa-desa/kelurahan sampai saat ini masih tetap dibutuhkan perannya oleh masyarakat, didalam memberi bantuan dan perlindungan kepada masyarakat serta ikut membantu aparat pemerintah dalam menjaga/memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengingat beban tugas serta tantangan yang dihadapi oleh Satuan Linmas ke depan yang semakin meningkat, pada tahun 2019 Satpol PP Provinsi Bali juga telah melakukan upaya peningkatan kompetensi melalui Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dari anggota Satuan Linmas Desa dari Kabupaten/Kota se Bali, dengan harapan Satgas Linmas kedepan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga mampu berperan aktif dalam penanggulangan kebencanaan, kewaspadaan dini dalam mengantisipasi kebencanaan, menjaga keamanan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.

b) Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Kelinmasan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan masyarakat ke 9 (Sembilan) Kabupaten/kota se Bali di 34 Kecamatan dan 153 Desa/kelurahan. Harapannya bahwa setiap terjadi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban maupun Bencana akan terjadi penanganan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi. Seiring perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota Se-Bali yang mengamanatkan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ada pada Satuan Polisi Pamong Praja baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan yang sudah ada selama ini dirasakan masih belum optimal sehingga perlu lebih ditingkatkan upaya pembinaan/sosialisasi terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsinya maupun peraturan yang mengatur keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pembinaan/Sosialisasi kepada 672 orang anggota Satlinmas Desa/Kelurahan yang ada di 9 (Sembilan) Kabupaten/kota se Bali.

c) Kegiatan Pengendalian dan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan diperoleh data bahwa Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota se Bali secara rata-rata mencapai: 35,53% dan Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten/Kota se Bali secara rata-rata baru mencapai 44,62%, sedangkan Peta daerah yang rawan bencana kebakaran di seluruh Kabupaten/Kota di Bali belum tersedia, sehingga agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilaksanakan secara maksimal dan sumber daya yang dimiliki dapat optimal digunakan diperlukan suatu pedoman. Satu langkah yang sangat perlu dilaksanakan adalah penyusunan dokumen pemetaan rawan bencana kebakaran. Dengan adanya dokumen peta rawan bencana tersebut diharapkan dapat sebagai *"early warning system"* dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Sehingga akan membantu pengambil keputusan untuk bertindak dalam masa sebelum bencana, evaluasi dan penyelematan.

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan :

(1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

(2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
(3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
(4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali selaku penyelenggara pemerintahan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan sekaligus sebagai pengampu/menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dengan jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan 3 (tiga) program prioritas yaitu: Program Penegakan Produk Hukum Daerah, Program penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

a) Penerapan dan Pencapaian SPM

Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar :

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

2. Target Pencapaian SPM :

Mengingat peraturan turunan sesuai pasal 9 ayat (6) PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang mengatur lebih lanjut standar teknis penerapan SPM berupa Permendagri yang mengatur tentang SPM baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, untuk sementara dalam laporan ini secara pasti belum dapat disajikan target pencapaian penerapan SPM secara utuh yang mengacu pada pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa **Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum** dilakukan dengan tahapan :

a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayalan Dasar.

Maka untuk laporan tahun 2019 yang dapat disajikan sementara adalah point (***a) pengumpulan data,*** namun untuk point b, c dan d, pada tahun anggaran 2020-2023

sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2020.

b) Realisasi

Telah diuraikan sebelumnya mengingat Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, maka realisasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum pada point (***a) pengumpulan data*** sebagai berikut :

Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019

1. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 54 Tahun 2011)

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
4	Pengawalan pejabat/orang-orang penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada

Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 17 Tahun 2019)
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	**GEDUNG**	1 unity	LP (Layak Pakai)	
	Milik/Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)			
2	**KENDARAAN OPERASIONAL**			
	Motor/Kendaraan roda 2	16	LP (Layak Pakai)	
	Motor/Kendaraan roda 4	21	LP (Layak Pakai)	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)	1	LP (Layak Pakai)	Boogy
3	**PERLENGKAPAN OPERASIONAL**			
	Tameng			
	Pakaian Huru/Body Protector	354	LP (Layak Pakai)	
	Perlengkapan Lainnya			
5	**JENIS LAINNYA**	100		Pentongan
		35		Borgol

Inventarisasi Dan Identivikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi
Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 16 Tahun 2009	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
3	Perda No. 1 Tahun 2010	UJPW
4	Perda No. 5 Tahun2011	Pengelolaan Sampah
5	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
6	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
7	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
8	Perda No. 5 Tahun 2016	Pramuwisata
9	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pentgelolaan Lingkungan Hidup
10	Perda No. 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan bukan Logam dan Batuan
11	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
12	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
13	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
14	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
15	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2019, yang baru dapat dilaporkan adalah Data identifikasi Jenis mutu pelayanan Dasar terkait :

a) Standar Operasional Prosedur;
b) Standar sarana dan Prasarana; dan
c) Standar peningkatan Kapasitas Anggota satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan untuk Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Pergub, pada tahun 2019 tidak pernah terjadi, dan memang kondisi inilah sesungguhnya yang menjadi harapan kita. Besar harapan kita memang seharusnya kita dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan, dengan argumentasi bahwa bila sudah tersedia standar operasional prosedur (SOP), Sarana dan prasarana yang memadai dan secara reguler dan berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur sudah seharunya kita dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2019, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 170 Orang dengan status :

PNS = 119 Orang
Non PNS = 46 Orang
Total PNS + Non PNS = 165 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Jumlah PNS Berdasarkan Kulaifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	15
2	S1	30
3	D3	2
4	SLTA	70
5	SLTP	-
6	SD	2
JUMLAH		119

Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	1
2	II	38
3	III	67
4	IV	13
JUMLAH		119

Berdasarkan Jenis Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah Orang
1	Struktural	16
2	Fungsional	1
3	Pemerintah	-
4	Teknis	96
5	Diklat Dasar	57

Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	TARGET				Realisasi			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	(RP)	%	VOLUME	%	(RP)	%
1	**Program Penegakan Produk Hukum Daerah**								
	a Penegakan Perda	350 Orang/ Badan Hukum	100	462.000.000	100	301 Orang/ Badan Hukum	114	456.170.324	98.74
	b Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat terhadap Perda	48 Obs	100	270.000.000	100	48 Obs	100	264.157.356	97.84
	c Deteksi Dini	13 Dokumen	100	150.000.000	100	13 Dokumen	100	149.487.664	99.66
2	**Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**								
	a Kerjasama Penyelenggaraan Tramtibumas dan Linmas	4 dok laporan & 4 dok kerjasama	100	250.000.000	100	4 dok laporan & 4 dok kerjasama	100	244.972.700	97.99
	b Pengawalan	700 Obs	100	1.200.000.000	100	1060 Obs	151	1.137.847.512	94.82
	c Patroli Wilayah	1080 Obs	100	1.879.314.416	100	1080 Obs	100	1.814.505.826	96.55
	d Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	350 Orang	100	14.339.110.160	100	350 Orang	100	14.305.335.860	99.76
	e Gelar Pasukan	1 Kali	100	270.000.000	100	1 Kali	100	263.594.600	97.63
3	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**								
	1 Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 Orang	100	200.000.000	100	100 Orang	100	186.133.300	93.07
	2 Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi Kelinmasan	672 Orang	100	200.000.000	100	672 Orang	100	194.431.100	97.22

	3	Pengendalian dan Pemetaan Rawan bencana kebakaran	1 Dokumen	100	270.000.000	100	1 Dokumen	100	216.589.100	80.22

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan Utama tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Satpol PP dari APBD Provinsi Bali tahun 2019 secara keseluruhan (termasuk belanja langsung dan balanja tidak langsung) berjumlah Rp. 40.295.297.716,- terealisasi sebesar Rp. 38.367.783.977,- atau sebesar 95,22%, dengan rincian ***Anggaran Belanja Tidak Langsung*** sebesar Rp. 17.123.663.140,- terealisasi sebesar Rp. 15.698.673.718,- atau sebesar 91,68% dan ***Anggaran Belanja Langsung*** sebesar Rp. 23.171.634.576,- terealisasi sebesar Rp. 22.669.110.259,- atau sebesar 97,83% seperti yang tertuang pada Tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja TA. 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Pendapatan	-	-	-
1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
2	Dana perimbangan			
	Total Pendapatan	-	-	-
B	Belanja	40.295.297.716,00	38.367.783.977,41	95,22
1	Belanja Tidak Langsung	17.123.663.140,89	15.698.673.718,00	91,68
2	Belanja langsung	23.171.634.576,00	22.669.110.259,41	97,83

Permasalahan dan Solusi :

a) Permasalahan

1) Tingginya urbanisasi dan kunjungan wisatawan di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga terdampak terhadap kepastian hukum.
3) Kemajuan Teknologi Informasi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

b) Solusi :

1) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;

2) Menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan melalui kegiatan Paroli wilayah dan Operasi Gabungan;
3) Meningkatkan kompetensi Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP; dan
4) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dan Satpol PP Kabupaten /Kota melalui rapat koordinasi.

BAB VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, adalah :

A. Urusan Pendidikan;
B. Urusan Kesehatan;
C. Urusan Pekerjaan Umum;
D. Urusan Perumahan Rakyat'
E. Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat; dan
F. Urusan Sosial;

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2019 termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target Capaian dan Pagu Anggaran SPM Pendidikan 2019

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian SPM Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan akses pendidikan penduduk	Terlaksananya wajib belajar 12 tahun	APM SMA/SMK	100%	199.899.513.630,00	Program Pembinaan SMA & SMK
			APK PLB	70,26%	35.736.026.102,00	Program Pembinaan Pendidikan Khusus
Meningkat nya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Meningkatkan mutu layanan pendidikan penduduk	Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu	Jumlah penduduk miskin yang terlayani pendidikan SMA Negeri Bali Mandara	352 siswa	9.583.975.296,00	Penyelenggaraan SMA Negeri Bali Mandara
			Jumlah penduduk miskin yang terlayani pendidikan SMK Negeri Bali	434 siswa	13.178.038.772,00	Penyelenggaraan SMK Negeri Bali Mandara

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian SPM Tahun 2019	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
		(*quality assurance*)	Mandara			
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya	Guru SMA/SMK /MA yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	96.39%	1.101.784.168,00	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA	32 sekolah	8.105.149.000,00	Program pembinaan SMA
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK	5 sekolah	8.661.522.000,00	Program pembinaan SMK
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Khusus	2 sekolah	1.000.000.000,00	Program pembinaan pendidikan khusus
			Pembangunan Unit Sekolah Baru	2 sekolah	6.047.880.000,00	Program pembinaan SMA

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai dalam pelaksanaan SPM Pendidikan. Pelaksanaan kegiatan capaian SPM Pendidikan yang menjadi kewenangan urusan layanan Dinas Pendidikan Provinsi Bali tahun anggaran 2019 terdiri dari 2 sasaran, 2 strategi, 3 arah kebijakan, dan 10 indikator dengan 10 kegiatan. Keseluruhan program/kegiatan dapat dilaksanakan 100%. Kesepuluh kegiatan SPM Pendidikan dipertanggungjawabkan oleh 4 (empat) Bidang lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Bali yaitu : 1) Bidang Pembinaan SMA; 2) Bidang Pembinaan SMK; 3) Bidang Pembinaan PKLK; dan 4) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan SPM Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Realisasi fisik dan keuangan SPM Pendidikan 2019

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Progres Fisik		Progres Keuangan (Rp)		Penanggung jawab
				Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan akses pendidikan penduduk	Terlaksananya wajib belajar 12 tahun	APM SMA/SMK/MA	100%	73,21%	199.899.513.630,00	174.666.163.059,00 (87,38%)	Program Pembinaan SMA & SMK
			APK PLB	70,19%	70,26%	35.736.026.102,00	33.403.896.454,00 (93,05%)	Program Pembinaan Pendidikan Khusus
Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Meningkatkan mutu layanan pendidikan penduduk	Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*)	Jumlah penduduk miskin yang terlayani pendidikan SMA Negeri Bali Mandara	352 siswa	352 siswa (100%)	8.803.573.996,00	8.556.605.974,00 (97,19%)%)	Penyelenggaraan SMA Negeri Bali Mandara
			Jumlah penduduk miskin yang terlayani pendidikan SMK Negeri Bali Mandara	434 siswa	434 siswa (100%)	12.251.087.872,00	11.466.503.218,00 (93,60%)	Penyelenggaraan SMK Negeri Bali Mandara
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya	Guru SMA/SMK /MA yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	96.39%	99,10%	1.101.784.168,00	1.063.517.200,00 (75,40%)	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA	32 sekolah	32 sekolah (100%)	8.105.149.000,00	7.898.223.115,00 (97,45%)	Program pembinaan SMA
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK	5 sekolah	(100%)	8.661.522.000,00	8.591.251.593,00 (99,19%)	Program pembinaan SMK
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Khusus	2 sekolah	(100%)	1.000.000.000,00	968.579.000,00 (96,86%)	Program pembinaan pendidikan khusus
			Pembangunan Unit Sekolah Baru	2 sekolah	(100%)	6.047.880.000,00	2.365.020.661,00 (39,10%)	Program pembinaan SMA

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah pembiayaan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam rangka penerapan dan capaian SPM Pendidikan Tahun 2019. Adapun pembiayaan bersumber dari APBD, APBN dan Hibah Kabupaten Badung. Secara proporsional pembiayaan SPM Pendidikan adalah 91,54% APBD, 6,31% APBN, dan 2,15% Hibah Kabupaten Badung.

Pagu dan Sumber Anggaran Pembiayaan SPM Pendidikan 2019

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Meningkatkan akses pendidikan penduduk	Terlaksananya wajib belajar 12 tahun	APM SMA/SMK/MA	205.947.393.630,00	APBD
			APK PLB	35.736.026.102,00	APBD
Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Meningkatkan mutu layanan pendidikan penduduk	Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*)	Jumlah penduduk miskin yang terlayani pendidikan SMA Negeri Bali Mandara	8.803.573.996,00	APBD
			Jumlah penduduk miskin yang terlayani pendidikan SMK Negeri Bali Mandara	12.251.087.872,00	APBD
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya	Guru SMA/SMK /MA yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	1.101.784.168,00	APBD
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA	8.105.149.000,00	APBN
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pendidikan SMK	8.661.522.000,00	APBN
			Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Khusus	1.000.000.000,00	APBN
			Pembangunan 2 Unit Sekolah Baru: (SMAN 2 Abiansemal dan SMAN 2 Kuta Selatan)	112.325.042.088,00	Hibah Kabupaten Badung

Proporsional Anggaran SPM Pendidikan Tahun Anggaran 2019

Sumber Anggaran	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	257.791.985.768,00	91,54
APBN	17.766.671.000,00	6,31
Hibah Kabupaten Badung	6.047.880.000,00	2,15
T o t a l	**281.606.536.768,00**	**100,00**

5. Dukungan Personil

Penerapan SPM Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2019 berturut-turut untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB menyasar 5.287 sekolah; total peserta didik **867.402** siswa; total tenaga kependidikan (pegawai) 11.916 orang; dan total tenaga pendidik (guru) 53.178 orang. Pelaksanaannya didukung 110 orang PNS Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Sumber Daya Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2019

No	Satuan Pendidikan	Jumlah (sekolah)	Jumlah (siswa)	Tenaga Kependidikan	Pendidik (guru)
1	PAUD	2.066	88.513	2.428	6.365
2	SD	2.452	400.102	3.551	24.050
3	SMP	418	190.308	2.965	11.566
4	SMA	161	87.732	1.643	5.297
5	SMK	176	98.650	1.244	5.539
6	SLB	14	2.097	85	361
T o t a l		**5.287**	**867.402**	**11.916**	**53.178**

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Bali dalam pelaksanaan SPM Pendidikan tahun 2019, antara lain :

a) Masih adanya siswa putus sekolah pada semua jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK).
b) Angka Partisipasi Murni (APM) baik pada satuan pendidikan dasar maupun menengah belum 100%.
c) Angka melanjutkan tamatan SMP ke SMA/SMK belum 100%.
d) Partisipasi sekolah swasta terhadap pelayanan pendidikan penduduk miskin belum optimal.

e) Penanganan pendidikan penduduk miskin pada semua jenjang satuan pendidikan belum merata.

f) Sinergisitas perencanaan SPM Pendidikan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi belum optimal.

b. Solusi

Beberapa solusi yang direncanakan:

a) Meningkatkan perhatian, aktivasi, fasilitasi dan memberikan layanan khusus pada kasus siswa putus sekolah.

b) Penyusunan RKA Sekolah agar lebih berpihak pada konsep pemenuhan kebutuhan minimal peserta didik.

c) Menyelenggarakan pendidikan menengah melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) bagi satuan unit sekolah swasta.

d) Membangun harmonisasi perencanaan terpadu antara kabupaten/kota dengan provinsi terkait dengan target capaian SPM Pendidikan.

e) Meningkatkan peran komite sekolah dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2018-2019

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian	
					2018	2019
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang atau jasa	100%	2019	100%	100%
		Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan	100%	2019	100%	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian	
					2018	2019
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2019	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang atau jasa	100%	2019	100%	100%
		Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan	100%	2019	100%	100%
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2019	100%	100%

3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2019

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Target Pencapaian 2019	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang atau jasa	100%	100%
		Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan	100%	100%
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang atau jasa	100%	100%
		Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan	100%	100%
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	100%

Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Tahun 2019

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	174.841 jiwa	174.841 jiwa	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi	46.159 jiwa	46.159 jiwa	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Dana
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Rp. 95.096.000,-	APBD
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi	Rp. 75.920.000,-	APBD
		Rp. 272.060.000,-	APBN

5. Dukungan Personil

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

   Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dibutuhkan dukungan personil dari seluruh fasilitas kesehatan, yang bila dimaksimalkan berasal dari: 68 rumah sakit, 120 puskesmas, 9 PSC Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

   Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas kesehatan Provinsi Bali.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan :

a. belum optimalnya peran masyarakat dalam rangka penemuan kasus-kasus potensial KLB dan kondisi yang mengarah ke KLB.
b. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan terkini kepada petugas masih belum secara rutin dan berkesinambungan dilaksanakan.
c. kemampuan/kapasitas laboratorium belum sepenuhnya mendukung dalam penegakan diagnosis untuk beberapa penyakit potensial KLB, karena masih didukung oleh BBTKL Surabaya, BLK Surabaya dan Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI.
d. Masih terkendala dalam menentukan target sasaran (masyarakat) berdasarkan potensi bencana berdasarkan koordinasi dengan BPBD Provinsi.

e. Masih terkendala dalam menentukan target sasaran (masyarakat) yang berisiko mengalami KLB.

Solusi :

a. menjalin kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat untuk berperan dalam penanganan KLB melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat atau dengan pembentukan petugas surveilans KLB di setiap desa.
b. mengadakan pelatihan terhadap petugas yang dilaksanakan secara rutin dengan tujuan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta mempererat jejaring kerja baiklintas program maupun lintas sektor.
c. meningkatkan kemampuan kapasitas laboratorium yang ada di Provinsi Bali dalam rangka penegakan diagnosisn beberapa KLB yang terjadi di Provinsi Bali melalui peningkatan peralatan dan kemampuan sumber daya manusia.
d. melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Bali.
e. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayana Dasar SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

1. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2019 adalah seperti tabel dibawah ini :

Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2019

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
3	**Pekerjaan Umum**					
3.1	• Pemenuhan kebutuhan air minum	a) Standar jumlah dan kualitas	100 %	2019	100 %	100 %

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
	curah lintas kabupaten/kota	barang dan atau jasa;				
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %	100 %
3.2	• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100 %	100 %
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %	100 %

3. Realisasi Target dan Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2019 adalah seperti tabel dibawah ini :

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2019

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2019	2019	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
3	**Bidang Pekerjaan Umum**							
3.1	• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100%	100 %	-	Rp. 27.202.925.578,-
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
3.2	• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100%	100 %	-	Rp. 18.739.450.000,-
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%			

4. Dukungan Personel

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III a	9 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III b	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	6 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	30 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	22 Orang
2.	Umum	Golongan III	106 Orang
3.	Umum	Golongan II	58 Orang
4.	Umum	Golongan II	1 Orang
	Tenaga Kontrak	-	433 Orang

5. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota baik pada jaringan perpipaannya maupun instalasi pengolahannya (IPAL) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pelanggan katagori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40 % yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi;
2. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke House Inlet (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah diareal rumah atau di jalan raya. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk kedalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan raya;
3. Akibat lanjutan dari masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar sehingga daya kerja pompa tiak optimal.
4. Kondisi kolam aerasi (*aerasi pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimantasi pond*) sudah penuh dengan endapan pasir dan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal.
5. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak. Akibatnya sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian instalasi.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Terganggunya pendistribusian air SPAM Penet ke PDAM Kota Denpasar khusunya wilayah Denpasar Barat dan PDAM Kabupaten Badung khususnya wilayah Petitenget, Kuta akibat sering bocornya bending karet pada *Long Storage* Tukad Penet sehingga SPAM Penet tidak bisa berproduksi.
2. Distribusi SPAM Guyanga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (produksi air kurang dari kebutuhan masyarakat) akibat pompa pada mata air guyangan yang bisa beroperasi hanya 1 unit disebabkan kurangnya catu daya listrik PLN.
3. Belum Optimalnya penyerapan air SPAM petanu oleh PDAM Denpasar, Badung dan Gianyar (*idle capacity* sekitar 50%) karena PDAM Badung dan Denpasar masih mampu menyediakan air melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimilikinya. PDAM Gianyar belum secara optimal mengembangkan sambungan rumah khususnya di wilayah saba dan sekitarnya akibat terkendala elevasi.
4. Terjadi beberapa kali kebocoran pada Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu sehingga mengganggu pendistribusian air wilayah Denpasar Timur, Saba, Ketewel dan wilayah Kuta Selatan.

2. Solusi

a. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:

1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi pemeliharaan jaringan pipa air limbah;
2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL;
3. Melakukan rehabilitasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran;
4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan;
5. Akan dilakukan pengurasan kolam sedimen dan kolam aerasi. Namun mengingat keterbatasan anggaran, pengurasan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama pada tahun 2020 akan dilakukan pengurasan kolam sedimentasi (sisi bagian timur) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2 milyar;
6. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam instalasi IPLT.

b. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan SPAM lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:

1. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS-Bali Penida telah merencanakan pergantian karet bendung pada *Long Storage* Tukad Penet dan optimalisasi perangkat pendukung,

2. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS-Bali Penida telah merencanakan optimalisasi SPAM Guyangan diantaranya menaikkan catu daya listrik PLN, pergantian pipa transmisi dari PVC ke GIP, perbaikan beberapa pompa yang tidak optimal.
3. Percepatan pengkoneksian pipa PDAM Denpasar ke Taping Serangan Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu untuk menambah penyerapan air SPAM Petanu.
4. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali akan membangun jaringan tersendiri dari IPA Petanu ke Wilayah Guwang untuk menambah penyerapan dari PDAM Gianyar.
5. Peningkatan pemantauan kondisi jaringan dan aksesoris dan menyediakan lebih banyak suku cadang untuk mempercepat penanganan kebocoran/kerusakan.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 3 (tiga) jenis pelayanan dasar dengan 4 (empat) jumlah indikator sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk dapat melaksanakan target Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi Bali. 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi Bali.
2	Kawasan Permukiman	3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
3	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4. Penyelenggaraan PSU permukiman.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Waktu Capaian	Target Capaian
I.	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi Bali.	2019	100
		2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi Bali.	2019	100
II.	Kawasan Permukiman	3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.	2019	100
III.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4. Penyelenggaraan PSU permukiman.	2019	100

3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal
di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator kinerja	Target Pencapaian 2019	Realisasi
1.	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi Bali.	100%	100%
		2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi Bali.	100%	100%
2.	Kawasan Permukiman	3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.	2019	100
3.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4. Penyelenggaraan PSU permukiman.	2019	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada program dan kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahu 2019 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

   Tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas pengembangan perumahan permukiman, menyediakan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman, tersusunnya rencana strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan terlaksananya penghimpunan, penyusunan dan mendokumentasikan data informasi dan standar pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas pengembangan perumahan dan permukiman. Pada tahun 2019 telah terlaksana program pengembangan kawasan permukiman dengan kegiatan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) kawasan permukiman serta melaksanakan pekerjaan peningkatan kualitas saluran drainase di kawasan Kubu 2 Kabupaten Bangli.

   Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2019 dapat disampaikan bahwa semua kegiatan sudah terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 422.510.898,93 dari pagu induk anggaran Rp. 433.310.080,- dengan persentase 97.51% realisasi fisik 100%.

2. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

   Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum (PSU) pada Kawasan Kumuh, Bidang Permukiman Tahun Anggaran 2019 mendapat Dana sebesar Rp. 181.761.460,-. Program Pengembangan Kawasan Permukiman serta Persentase lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan antara lain: Termonitornya Peningkatan Kualitas PSU Permukiman, Kegiatan Penyusunan dan Penggandaan, serta Penjilidan Buku Laporan Akhir Kegiatan 2019. Realisasi anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Kumuh dengan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 170.562.890,58 dari pagu induk anggaran Rp. 181.761.460,- dengan persentase 93,84% realisasi fisik 100%.

3. Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Permukiman

   Kegiatan Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan kumuh telah terlaksana dengan baik, dimana yang telah dilaksanakan antara lain :

- Monitoring yang dilakukan adalah dalam rangkaian mencari data terkait kegiatan Permukiman dan Pertanahan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Fisik dan Keuangan.
- Kegiatan dilaksanakan selama selama 12 (dua belas) bulan di 9 (sembilan) Kabupaten/Koa se Bali, dimana ruang lingkup kegiatan antara lain melakukan koordinasi penanganan kawasan kumuh di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali dan menyusun database kawasan permukiman kumuh di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Bali.
- Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dimana kegiatan ini baru pada tahap pengumpulan data beberapa OPD di kabupaten /kota karena baru terbentuk pada awal tahun 2017 dan belum memiliki data yang cukup terkait dengan penyelenggaraan permukiman. Data sementara yang dapat dikumpulkan adalah SK Bupati tentang Kawasan Kumuh di 8 Kabupaten/Kota dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Badung yang tidak menetapkan Kawasan Kumuh di daerahnya. Data kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satker Bangkim yang merupakan peRp.anjangan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi tidak ada data sama sekali. Realisasi anggaran kegiatan Pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Kumuh, capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 144.993.422,93 dari pagu induk anggaran Rp. 157.594.220,- dengan persentase 92% realisasi fisik 100%.

B. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

   Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pekerjaan bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga tahun 2019 dilakukan secara swakelola oleh panitia pelaksana Desa di Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang dirancang sebanyak 7 (tujuh) unit. Peningkatan kualitas meliputi kegiatan perbaikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan atau terpenuhi kelayakan/kesehatan bangunan dengan nilai nominal bantuan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per unitnya. Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 425.148.274,59 dari pagu induk anggaran Rp. 445.116.960,- dengan persentase 95,51% realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan

   Hasil yang telah dicapai pada Kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan pada tahun 2019 antara lain :

   - Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Bali, dengan menggali masukan hasil penyusunan draf Raperda RP.3KP dari masyarakat serta menyempurnakan draf Raperda RP3KP Provinsi Bali setelah dilakukan uji substansi dan uji materi teknis RP3KP Provinsi Bali. Sehingga

nantinya Pemerintah Provinsi Bali dan *stakeholder* lainnya mempunyai landasan hukum serta dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi sebagai upaya untuk rencana penanganan sektor perumahan kawasan permukiman, serta mengisi RTRWP dibidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.

- Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Perumahan Terintegrasi di Provinsi Bali, guna untuk mendapatkan data atribut maupun data lokasi serta mengintegrasikannya dalam satu sistem digital/aplikasi. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini antara lain : mendata dan/atau melengkapi data penanganan sektor perumahan di Provinsi dengan data yang berbasis lokasi/peta, mengintegrasikan data adalah sistem informasi yang memudahkan pelaporan dan operasional pekerjaan lainnya serta sinkronisasi data Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 667.002.727,59 dari pagu induk anggaran Rp. 696.859.410,- dengan persentase 95,72% realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan

   Pelaksanaan kegiatan antara lain melaksanakan penyusunan laporan kegiatan monitoring, melaksanakan kegiatan pertemuan rutin kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan membuat hasil Evaluasi kegiatan kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Realisasi anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan dengan capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 215.535.713,87 dari pagu induk anggaran Rp. 265.838.960,- dengan persentase 81,08% realisasi fisik 100%.

Target dan Realisasi Pelaksaaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
A	Program Pengembangan Kawasan Permukiman								
1	Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan kumuh.	1 Paket	100	433,310,080	100	1 Paket	100	422,510,898.93	97,51
2	Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan kumuh.	1 Laporan	100	181,761,460	100	1 Laporan	100	170,562,890.58	93,84
3	Pendataan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada	2 Dok	100	157,594,220	100	2 Dokumen	100	144,993,422.93	92,00

NO	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		Volume	%	(Rp.)	%	Volume	%	(Rp.)	%
	kawasan kumuh.								
B	Program Pengembangan Perumahan								
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1 Laporan	100	445,116,960	100	1 Laporan	100	425,148,274.59	95,51
2	Pendataan dan perencanaan perumahan	1 Raperda, 1 Aplikasi Online, 1 kali/1 tahun/1 Laporan	100	696,859,410	100	1 Raperda, 1 Aplikasi Online, 1 kali/1 tahun/1 Laporan	100	667,002,727.59	95,72
3	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan	2 Laporan	100	265,838,960	100	2 Laporan	100	215,535,713.87	81,08

5. Dukungan Personil

Jumlah Personil pendukung program kegiatan yang terkait SPM bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Gol. / Ruang	Sekretariat		Bidang Perumahan		Bidang Kawasan Permukiman		Jumlah		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	Org.	%
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	1	1	-	-	-	1	1	2	8,33
III/b	1	-	1	-	2	-	4	-	4	16,67
III/c	1	-	1	1	2	-	4	1	5	20,83
III/d	3	2	1	1	-	-	4	3	7	29,17
IV/a	-	1	-	-	1	-	1	1	2	8,33
IV/b	1	1	1	-	1	-	3	1	4	16,67
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	5	5	2	6	-	17	7	24	100
%	54,55	45,45	71,43	28,57	100	-	70,83	29,17		
L+P	11		7		6		24			
%	45,83		29,17		25		100			

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Perumahan Rakyat		Bidang Kawasan Permukiman		Jumlah		Total	
	L	P	L	P	L	P	L	P	ORG	%
SMA/SMK	1	-	1	-	2	-	4	-	4	16,67
S1	4	3	2	1	2	-	8	4	12	50
S2	1	2	2	1	2	-	5	3	8	33,33
Jumlah	6	5	5	2	6	-	17	7	24	100
%	54,55	45,45	71,43	28,57	100	-	70,83	29,17		
L+P	11		7		6		24			
%	45,83	29,17	25	100	25		100			

6. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain :

- Berkembangnya bangunan baru yang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah khususnya tentang Arsitektur Bali yang disebabkan oleh belum semua Kabupaten/Kota mempunyai peraturan daerah tentang bangunan gedung.
- Munculnya kawasan kumuh baru diperkotaan secara periodik
- Tingginya alih lahan produktif
- Masih banyak masyarakat yang belum menempati rumah layak huni akibat perekonomian yang belum merata.

Solusi

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

- Percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di masing-masing Kabupaten/Kota dan diterapkan secara konsisten.
- Penanganan terhadap bermunculnya kawasan kumuh yang dilakukan secara bertahap dengan disusun secara terintegrasi dengan berbagai tingkat pemerintah, swasta, masyarakat dan termasuk pengendalian penduduk imigran.
- Pengendalian lahan agar tertib dan tidak melanggar peraturan perundangan yang ada, seperti antara lain dengan menyusun pedoman penataan ruang dan peraturan zoning.

Peningkatan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Swasta maupuan melalui program bantuan stimulant perumahan swasta, bedah rumah, rusunawa dan sebagainya.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.**

2. **Target Pencapaian SPM**

Mengingat peraturan turunan sesuai pasal 9 ayat (6) PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM , yang mengatur lebih lanjut standar teknis penerapan SPM berupa Permendagri yang mengatur

tentang SPM baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, untuk sementara dalam laporan ini secara pasti belum dapat disajikan target pencapaian penerapan SPM secara utuh yang mengacu pada pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa **Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum** dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayalan Dasar.

Maka untuk laporan tahun 2019 yang dapat disajikan sementara adalah point (***a) pengumpulan data,*** namun untuk point b,c dan d, pada tahun anggaran 2020 -2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2020, dan pada tahun 2020.

3. Realisasi

Telah diuraikan sebelumnya mengingat Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, maka realisasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum pada point (***a) pengumpulan data*** sebagai berikut :

FORM I : Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019

Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 54 Tahun 2011)

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
4	Pengawalan pejabat/orang-orang	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
	penting	Perguib No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP		Perda/Perkada
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada

Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019
Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 17 Tahun 2019) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
1	2	TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	**GEDUNG**	1 unity	LP (Layak Pakai)	
	Milik/Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)			
2	**KENDARAAN OPERASIONAL**			
	Motor/Kendaraan roda 2	16	LP (Layak Pakai)	
	Motor/Kendaraan roda 4	21	LP (Layak Pakai)	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)	1	LP (Layak Pakai)	Boogy
3	**PERLENGKAPAN OPERASIONAL**			
	Tameng			
	Pakaian Huru/Body Protector	354	LP (Layak Pakai)	
	Perlengkapan Lainnya			
5	**JENIS LAINNYA**	100		Pentongan
		35		Borgol

Inventarisasi Dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2019

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 16 Tahun 2009	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
3	Perda No. 1 Tahun 2010	UJPW
4	Perda No. 5 Tahun2011	Pengelolaan Sampah
5	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
6	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
7	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
8	Perda No. 5 Tahun 2016	Pramuwisata
9	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pentgelolaan Lingkungan Hidup
10	Perda No. 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan bukan Logam dan Batuan
11	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
12	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
13	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
14	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
15	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik

Berdasarkan tabel 1 s/d tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2019 , yang baru dapat dilaporkan adalah Data identifikasi Jenis mutu pelayanan Dasar terkait :

a) Standar Operasional Prosedur;
b) Standar sarana dan Prasarana;
c) Standar peningkatan Kapasitas Anggota satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan untuk Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukun terhadap Pelanggaran Perda dan Pergub , pada tahun 2019 tidak pernah terjadi, dan memang kondisi inilah sesungguhnya yang menjadi harapan kita. Besar harapan kita memang seharusnya kita dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan, dengan argumentasi bahwa bila sudah tersedia standar operasional (SOP), Sarana dan prasarana yang memadai dan secara reguler dan berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur sudah seharunya kita dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: a. APBD; b. APBN; dan c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS
PROVINSI BALI

No	JUMLAH POL PP	JUMLAH PJT JAFUNG	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	126	60	8	4	1	-	26	21	-	65	11	21.356	

6. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

1) Tingginya urbanisasi dan kunjungan wisatawan di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga terdampak terhadap kepasitan hukum.
3) Kemajuan Teknologi Informasi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

b) Solusi :

1) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;
2) Menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan melalui kegiatan Paroli wilayah dan Operasi Gabungan;
3) Meningkatkan kompetensi Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP.
4) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mebidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.
5) Optimalisasi Internal dalam rangka peningkatan sumber daya (sumber daya manusia maupun sumber dana).

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM

JENIS PELAYANAN DASAR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 2019

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
					2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
6	**Bidang Sosial**				
6.1	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100 %
		d) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100 %
		e) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %
6.2	• Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100 %
		d) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100 %
		e) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %
6.3	• Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %
6.4	• Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %
6.5	• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100 %

2. Realisasi dan Alokasi Anggaran

REALISASI TARGET DAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG SOSIAL TAHUN 2019

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2019	2019	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
6	**Bidang Sosial**							
6.1	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100%	50 %	-	Rp. 481.600.000,-
		d) Standar jumlah dan kualitas sumber daya	100 %	2019	100%	50 %		

		manusia kesejahteraan sosial; dan						
		e) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.2	• Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	c) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2019	100%	100 %	Rp. 332.190.000,-	Rp. 1.081.287.800,-
		d) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	60 %		
		e) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.3	• Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100%	80 %	-	Rp. 1.392.973.360,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	50 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.4	• Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100%	100%	Rp. 120.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		
6.5	• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2019	100%	100 %	Rp. 2.858.530.000,-	Rp. 397.200.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2019	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2019	100%	100 %		

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali pada Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

INDIKATOR YANG SESUAI TARGET DAN TIDAK SESUAI TARGET:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti
  a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 ditargetkan 100% tetapi ditangani 1 panti dengan capaian realisasi 50%, karena keterbatasan anggaran dan masih melaksanakan penanganan di luar panti karena penetapan anggaran dan target telah selesai sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM ditetapkan.
  b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 ditargetkan 100% dengan capaian 50%, karena minimnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional kesejahteraan sosial.
  c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2019 ditargetkan 100% telah terealisasi capaian 100%.
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
  a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 target 100% capaian realisasi 100%.
  b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 ditargetkan 100% dengan realisasi 60% karena minimnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional kesejahteraan sosial.
  c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
  a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 target 100% dengan capaian realisasi 75% yang tertangani 2 Panti Pemerintah.
  b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 ditargetkan 100% namun dengan realisasi 50% karena minimnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional kesejahteraan sosial.
  c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti dengan realisasi capaian 100%.
- Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti
  a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2019 capaian realisasi 100%.
  b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2019 sudah mencapai target yang ditangani.
  c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti telah mencapai target dengan realisasi capaian 100%.

- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi
  a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi telah memenuhi standar dengan realisasi 100%.
  b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100%.
  c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi telah tersedia dengan realisasi 100%.

3. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari:

Data Personil DINAS dan UPTD Urusan Sosial

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	4 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	14 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	-
2.	Umum	Golongan III	41 Orang
3.	Umum	Golongan II	30 Orang
Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	2 Orang
2.	Pekerja Sosial	Golongan III	1 Orang
3.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
4.	Pustakawan	Golongan III	1 Orang
5.	Penyuluh Sosial	Golongan III	3 Orang
	Tenaga Kontrak	-	48 Orang

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB VIII
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019 yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah, informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja;
2. Pengukuran capaian kinerja dibdandingkan dengan target perjanjian kinerja;
3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
5. Analisis Efisensi penggunaan Sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
6. Analis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Bali

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.5
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	16
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	27
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.1
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116.6
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	71.8
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019
1	2	3	4
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.49
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.07
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.85
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.28
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.77
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	72.48
14	Meningkatnya pasar Periwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	0
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	77
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6.25
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	11
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2.7
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	4.138
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	79
		Indeks Pemberdayaan gender	64.23

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019
1	2	3	4
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17.11
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.08
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	9.7
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0.43
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68

2. Pengukuran capaian kinerja dibdandingkan dengan target perjanjian kinerja

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.5	2.37
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100	n/a
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	16	n/a
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	27	n/a
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.1	104.93
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116.6	103.33
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	71.8	71.68
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10	9.89
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54	82.54
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.49	13.49

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.07	74.77
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	n/a
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	3.85	3.61
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.28	1.52
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75.77	73.87
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	72.48	72.48
14	Meningkatnya pasar Periwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	0	19,458,000
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	77	79
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6.25	5.34
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	11	n/a
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2.7	2.5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	4.138	4.037
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	79	82.37
		Indeks Pemberdayaan gender	64.23	64.18
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17.11	n/a
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.08	62.62

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	9.7	8.57
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0.43	0
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68	n/a

3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Inflasi Bali	3,4	3.5	2.37	147.68
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	n/a	0
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	15	16	n/a	0
4	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	25	27	n/a	0
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,87	104.1	104.93	100.79
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116	116.6	103.33	88.62
7	Umur Harapan Hidup	71,4	71.8	71.68	99.83
8	Rata-rata lama sekolah	9,72	10	9.89	98.9
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,35	82.54	82.54	100
10	Angka harapan lama sekolah	13,21	13.49	13.49	100
11	Indeks Pembangunan Manusia	74,45	75.07	74.77	99.60
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	65		0
13	Persentase Kemiskinan	3,91	3.85	3.61	106.64
14	Tingkat pengangguran terbuka	1,4	1.28	1.52	84.21
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,51	75.77	73.87	97.49
16	Indeks Kebahagiaan	72,48	72.48	72.48	100
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	45	100

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
18	Jumlah Devisa sektor pariwisata	6.000.000	0	19,458,000	N/A
19	Indeks Kepuasan wisatawan	75	77	79	102.59
20	Pertumbuhan Ekonomi	6,35	6.25	5.34	85.44
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	10	11	n/a	0
22	Indeks konektivitas	2,74	2.7	2.5	92.59
23	Angka Kriminalitas	4.607	4.138	4.037	97.56
24	Indeks domokrasi	78,8	79	82.37	104.26
25	Indeks Pemberdayaan gender	63,76	64.23	64.18	99.92
26	Persentase Daya dukung lingkungan	16,93	17.11	n/a	0
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,51	62.08	62.62	100.86
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	8,7	9.7	8.57	88.35
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0,40	0.43	0	0
30	Indeks Reformasi Birokrasi	66,16	68	n/a	0

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2019 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Inflasi Bali	3,4	3.5	2.37	147.68	3.00	102,59
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	n/a	0	100.00	0
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	15	16	n/a	0	25.00	0
4	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	25	27	n/a	0	35.00	0
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,87	104.1	104.93	100.79	106.00	98.99

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2019 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	116	116.6	103.33	88.62	119.20	86.68
7	Umur Harapan Hidup	71,4	71.8	71.68	99.83	72.50	98.86
8	Rata-rata lama sekolah	9,72	10	9.89	98.9	11.40	86.75
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,35	82.54	82.54	100	83.30	99.087
10	Angka harapan lama sekolah	13,21	13.49	13.49	100	14.05	96.02
11	Indeks Pembangunan Manusia	74,45	75.07	74.77	99.60	80.00	93.46
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	65	n/a	0	75.00	0
13	Persentase Kemiskinan	3,91	3.85	3.61	106.64	1.50	41.55
14	Tingkat pengangguran terbuka	1,4	1.28	1.52	84.21	0.90	59.21
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,51	75.77	73.87	97.49	76.80	96.18
16	Indeks Kebahagiaan	72,48	72.48	72.48	100	74.98	96.66
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	45	100	45.00	100
18	Jumlah Devisa sektor pariwisata	6.000.000	0	19,458,000	N/A	12.015.000	N/A
19	Indeks Kepuasan wisatawan	75	77	79	102.59	85.00	92.94
20	Pertumbuhan Ekonomi	6,35	6.25	5.34	85.44	7.00	76.28
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	10	11	n/a	0	13.00	0
22	Indeks konektivitas	2,74	2.7	2.5	92.59	2.30	108.69
23	Angka Kriminalitas	4.607	4.138	4.037	97.56	2.26	56.03
24	Indeks domokrasi	78,8	79	82.37	104.26	81.00	101.69

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	2019			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2019 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Indeks Pemberdayaan gender	63,76	64.23	64.18	99.92	65.00	98.73
26	Persentase Daya dukung lingkungan	16,93	17.11	n/a	0	17.82	0
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,51	62.08	62.62	100.86	64.34	97.32
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	8,7	9.7	8.57	88.35	15.00	57.13
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0,40	0.43	0	0	20.00	0
30	Indeks Reformasi Birokrasi	66,16	68	n/a	0	76.00	0

5. Analisis Efisensi penggunaan Sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai :

a. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani (*Farmers Term of Trade*) merupakan salah satu indikator proksi untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar *(term of trade)* dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani untuk biaya produksi usaha pertaniannya maupun untuk konsumsi rumah tangganya. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Semakin tinggi indeks NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula peranannya pada ukuran tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mengakhiri tahun 2019, Indeks NTP Provinsi Bali pada bulan Desember 2019 tercatat meningkat setinggi 0,55 persen, dari 104,35 pada bulan November 2019 menjadi 104,93. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi daripada kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) tercatat 139,65 atau naik setinggi 1,08 persen dibandingkan bulan November 2019 yang tercatat besarnya 138,16. Sementara itu, indeks yang dibayar petani (Ib) tercatat meningkat setinggi 0,52 persen dari 132,40 di bulan November 2019 menjadi 133,09.

Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Perubahannya Menurut Subsektor November 2019 - Desember 2019 (2012=100)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	November 2019	Desember 2019	
1. Tanaman Pangan (NTP-P)	**101,78**	**101,52**	**-0,25**
a. Indeks Diterima Petani	139,11	139,65	0,39
- Padi	133,70	133,94	0,18
- Palawija	154,91	156,33	0,91
b. Indeks Dibayar Petani	136,68	137,56	0,64
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	137,88	138,93	0,77
- Indeks BPPBM	131,13	131,19	0,04
2. Hortikultura (NTP-H)	**105,04**	**105,60**	**0,54**
a. Indeks Diterima Petani	140,38	141,93	1,10
- Sayur-sayuran	151,04	154,18	2,08
- Buah-buahan	135,63	136,46	0,62
- Tanaman Obat	141,34	143,82	1,75
b. Indeks Dibayar Petani	133,65	134,40	0,56
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	136,50	137,50	0,74
- Indeks BPPBM	125,92	125,98	0,05
3. Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	**92,43**	**94,61**	**2,36**
a. Indeks Diterima Petani	123,06	126,64	2,91
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	123,06	126,64	2,91
b. Indeks Dibayar Petani	133,13	133,85	0,54
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	138,11	139,06	0,69
- Indeks BPPBM	118,17	118,22	0,04
4. Peternakan (NTP-Pt)	**114,43**	**114,54**	**0,10**
a. Indeks Diterima Petani	146,34	147,04	0,48
- Ternak Besar	150,85	152,19	0,89
- Ternak Kecil	146,62	145,84	-0,53
- Unggas	139,84	138,30	-1,10
- Hasil Ternak	126,94	128,62	1,33
b. Indeks Dibayar Petani	127,89	128,37	0,38
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	137,59	138,55	0,69
- Indeks BPPBM	119,38	119,46	0,06
5. Perikanan (NTP-Pi)	**103,84**	**103,33**	**-0,50**
a. Indeks Diterima Petani	139,45	139,33	-0,08
- Tangkap	153,51	152,58	-0,61
- Budidaya	118,60	119,70	0,93
b. Indeks Dibayar Petani	134,29	134,85	0,41
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	143,50	144,20	0,49
- Indeks BPPBM	116,52	116,77	0,22
NTP Gabungan	**104,35**	**104,93**	**0,55**
a. Indeks Diterima Petani	138,16	139,65	1,08
b. Indeks Dibayar Petani	132,40	133,09	0,52
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	137,60	138,58	0,71
- Indeks BPPBM	123,17	123,23	0,05

Pada bulan Desember 2019, Indeks NTP gabungan secara nasional tercatat 104,46 naik setinggi 0,35 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) nasional yang naik setinggi 0,59 persen, sebaliknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) tercatat meningkat lebih rendah, yaitu 0,24 persen.

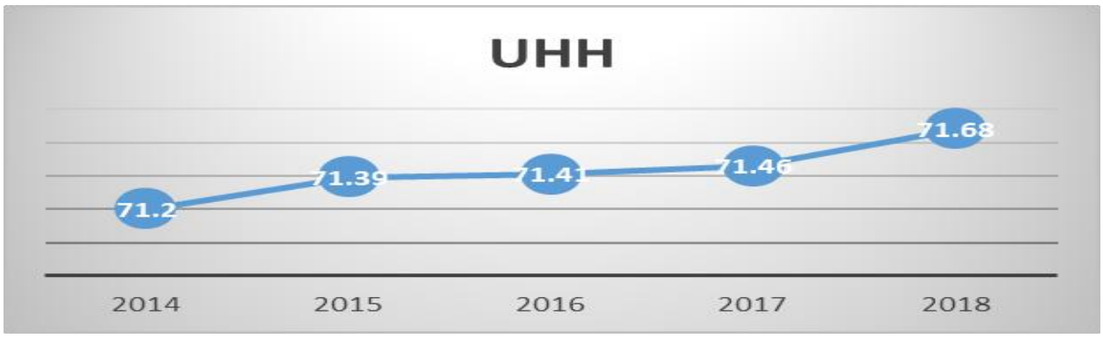
Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali dan Nasional serta Persentase Perubahannya, November 2019 - Desember 2019 (2012=100)

Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	November 2019	Desember 2019	%	November 2019	Desember 2019	%
Indeks yang Diterima Petani	138,16	139,65	1,08	142,72	143,56	0,59
Indeks yang Dibayar Petani	132,40	133,09	0,52	137,10	137,42	0,24
NTP	104,35	104,93	0,55	104,10	104,46	0,35

b. UHH

Umur Harapan Hidup merupakan salah satu dari tiga dimensi dasar yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Umur Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur harapan hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang uang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur harapan hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Grafik UHH Provinsi Bali dari tahun 2014 sd 2018 :



Selama lima tahun terakhir, UHH Provinsi Bali mengalami peningkatan seperti grafik di atas. Hal ini merupakan hasil capaian dari UHH Kabuapten/Kota yang juga mengalami peningkatan seperti tabel di bawah ini.

Kab/kota	Capaian		Pertumbuhan
	2017	2018	2017-2018
Badung	74,53	74,71	0,18
Bangli	69,83	70,05	0,22
Buleleng	71,14	71,36	0,22
Denpasar	74,17	74,38	0,21
Gianyar	73,06	73,26	0,2
Jembrana	71,70	71,91	0,21

Karangasem	69,85	70,05	0,2
Klungkung	70,45	70,70	0,25
Tabanan	73,03	73,23	0,2
BALI	**71,46**	**71,68**	**0,22**

Tahun 2018, Kabupaten Badung tercatat mencapai UHH tertinggi di Provinsi Bali yaitu 74,71, sedangkan yang terendah adalah Kabuapten Bangli dan Kabuapten Karangasem yaitu 70,05.

Selama periode 20017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan pencapaian Umur Harapan Hidup. Pada periode ini, kabuapten Badung tercatat mengalami peningkatan UHH paling lambat (0,18) meski sebagai kabuapten/kota dengan UHH tertinggi di provinsi Bali. Sedangkan yang tercatat mengalami peningkatan UHH paling tinggi pada periode ini adalah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 0,25.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang dicapai:

UHH merupakan indikator komposit dari indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Untuk indikator kesehatan, yang berperan adalah akses pelayanan kesehatan yang meliputi tercukupinya sarana, parasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, upaya kesehatan yang optimal baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat serta sanitasi dan kesehtaan lingkungan. Peningkatan UHH Provinsi Bali dari tahun ke tahun tidak terlepas dari adanya pemanfaatan sarana kesehatan yang optimal, ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan diseluruh Provinsi Bali yang makin meningkat dan adanya Jaminan Kesehatan Nasional *Krama* Bali Sejahtera untuk pembiayaan kesehatan untuk seluruh masyarakat Bali.

c. Rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data publikasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana tentang Agregat Kependudukan Provinsi Bali Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2019 ternyata Jumlah penduduk Provinsi Bali telah mencapai 4.236.983 jiwa dengan perbandingan laki-perempuan (sex-ratio) 101 artinya ada 100 penduduk perempuan dalam 101 laki-laki.

Menyangkut urusan layanan Dinas Pendidikan Provinsi Bali maka komponen vital data kependudukan yang menjadi sasaran adalah agregat data terkait dengan jumlah penduduk kelompok usia balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua. Empat varibel utama keadaan kependudukan yakni usia balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua dibutuhkan untuk selanjutnya dipakai acuan dalam pelaksanaan program-program : Pembinaan SMA; Pembinaan SMK; dan Pembinaan Pendidikan Khusus. Sebagaimana amanah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 yakni terkait dengan kewenangan urusan Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB).

Berdasarkan data keadaan penduduk menurut kelompok usia balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua lihat Tabel berikut :

Keadaan penduduk menurut kelompok umur balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua tahun 2019

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
00-04	131.918	3,11	122.075	2,88	253.993	5,99
05-06	65.996	1,56	62.233	1,47	128.229	3,03
07-12	213.922	5,05	199.541	4,71	413.463	9,76
13-15	105.527	2,49	99.403	2,35	204.930	4,84
16-18	109.250	2,58	102.626	2,42	211.876	5,00
19-25	239.400	5,65	226.046	5,34	465.446	10,99
26-64	1.095.050	25,85	1.110.376	26,21	2.205.426	52,05
65+	166.963	3,94	186.657	4,41	353.620	8,35
TOTAL PROVINSI	**2.128.026**	**50,23**	**2.108.957**	**49,77**	**4.236.983**	**100**

Sumber : Dukcapil dan KB Pemerintah Provinsi Bali, Semester I 2019.

Keadaan penduduk menurut kelompok umur balita, usia sekolah, usia produktif dan usia tua tahun 2019 memperlihatkan bahwa total penduduk usia sekolah dengan rentangan umur antara 7 -18 tahun mencapai 830.269 jiwa atau 19,60% yang harus mendapat layanan minimal pendidikan. (Tabel 2). Sementara capaian prestasi Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang terukur berdasarkan indikator angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Menengah (SMA/SMK) di tahun 2019 telah mencapai 98,00% artinya masih ada 2% penduduk usia sekolah yang belum menempuh pendidikan SMA/SMK. Jika dilihat dari keadaan penduduk usia 16-18 tahun yang berjumlah 211.876 jiwa atau sebesar 5% dari total jumlah penduduk. Jika disandingkan dengan capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Bali di tahun 2019 terhadap angka partisipasi murni (APM) penduduk usia 16-18 tahun yang mencapai 73,21% maka ada penduduk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 26,79% yang belum menempuh pendidikan SMA/SMK. Jika, antara APK dan APM disandingkan maka APK (98,00%) yang lebih besar dari APM (73,21%) yakni sebesar 24,79%, artinya ada tambahan partisipasi penduduk usia sekolah lagi sebesar 24,79% baik yang berasal dari kelompok umur sama atau dibawah 16 tahun maupun dari kelompok umur sama atau lebih besar dari 18 tahun.

Kemudian yang menjadi indikator kinerja utama dalam RPJMD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 adalah rata-rata lama sekolah. Searah dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Pendidikan Provinsi Bali 2018-2023 maka fokus rata-rata lama sekolah merupakan indikator tujuan yaitu : “Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkwalitas”.

Berdasarkan hasil perhitungan data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2019 (Lihat Tabel 3) diperoleh angka meyakinkan bahwa rata-rata lama sekolah di tahun 2019 mencapai 9,89 tahun telah melampui data awal tahun 2018 sebesar 9,72 tahun artinya telah meningkat sebesar 0,17 tahun. Namun, masih dibawah target 10 tahun. Harapannya meningkat sebesar 0,28 tahun kenyataannya hanya 0,17 tahun. Keadaan ini, terjadi karena APM penduduk usia 16-18 belum 100% yang berkontribusi besar untuk perhitungan agregat rata-rata lama sekolah. Lihat Tabel.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditamatkan

PENDIDIKAN AKHIR	LK	PR	JUMLAH	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	481.515	497.517	979.032	23,11
BELUM TAMAT SD	197.233	198.671	395.904	9,34
TAMAT SD	441.885	553.327	995.212	23,49
TAMAT SLTP	248.704	246.653	495.357	11,69
TAMAT SLTA	562.142	450.255	1.012.397	23,89
D1/D2	38.463	24.098	62.561	1,48
D3/SARJANA MUDA	29.799	32.460	62.259	1,47
S1/DIV	116.630	99.184	215.814	5,09
S2	10.619	6.385	17.004	0,40
S3	1.036	407	1.443	0,03
TOTAL PROVINSI	**2.128.026**	**2.108.957**	**4.236.983**	**100,00**

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

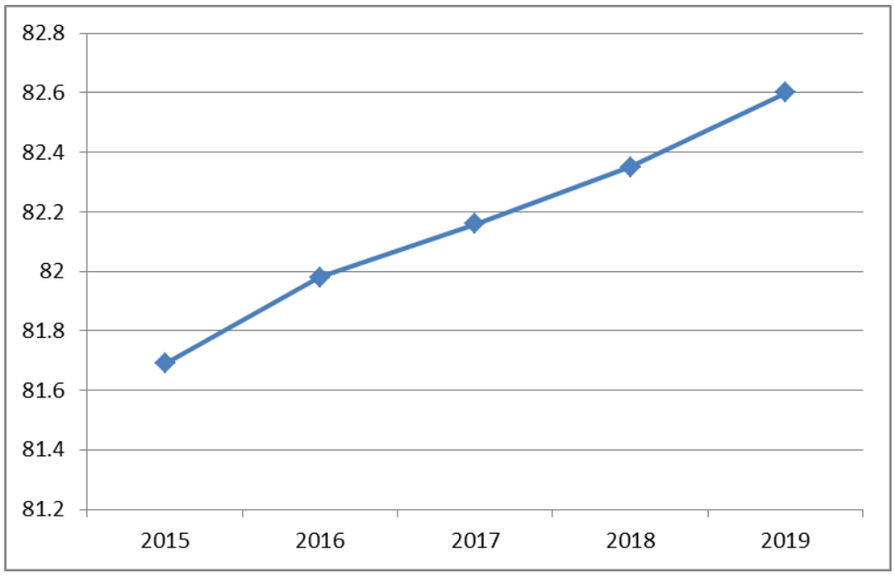
Rumus APS:

- *APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk umur 7—12 tahun) X 100 }*
- *APS(13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) X 100}*
- *APS (16-18)= {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) X 100}*

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Provinsi memiliki tanggungjawab besar terkait urusan pelayanan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SLB). Searah pula dengan Tujuan RPJMD Semesta Berencana Provinsi

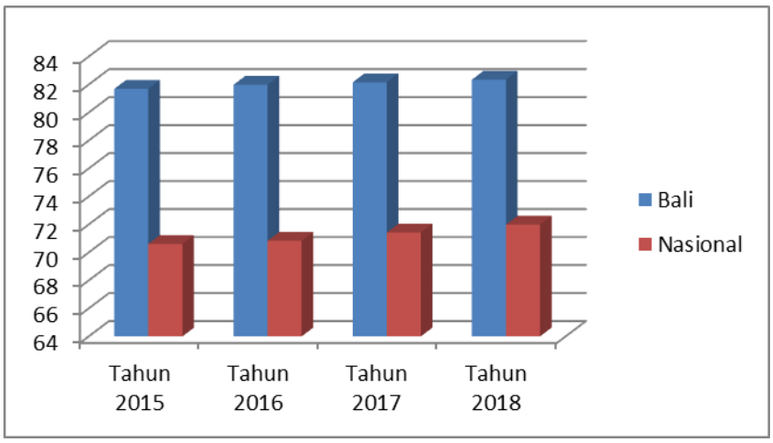
Bali 2018-2023 bahwa untuk urusan layanan bidang pendidikan diarahkan untuk tercapainya : "Terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkwalitas". Capaian pendekatannya dilakukan dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yakni : 1) Rata-rata lama sekolah; dan 2) Angka partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali secara berturut-turut dalam rentang waktu 5 tahun terhitung : 2015; 2016; 2017; 2018; dan 2019 capaian APS penduduk usia 16-18 tahun Provinsi Bali adalah 81,69%; 81,98%; 82,16%; 82,35%; dan 82,60%. Lihat Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan APS Penduduk Usia 16-18 tahun Provinsi Bali

Secara nasional APS Penduduk Usia 16-18 tahun Provinsi Bali untuk tahun 2018 menduduki peringkat 5 (lima) dibawah Jogja 88,39%; Kepulauan Riau 83,78%; Sumatera Barat 83,08%; Aceh 82,92%; dan Bali 82,35%. Lihat Gambar 2.

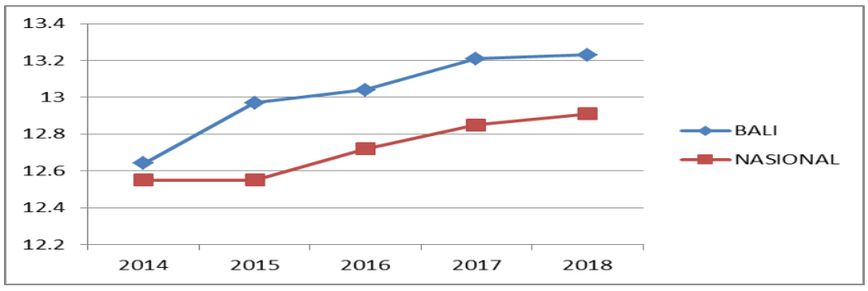


Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan APS Penduduk Usia 16-18 tahun Provinsi Bali dan Rata-rata APS nasional

e. Angka Harapan Lama Sekolah (sedang proses).

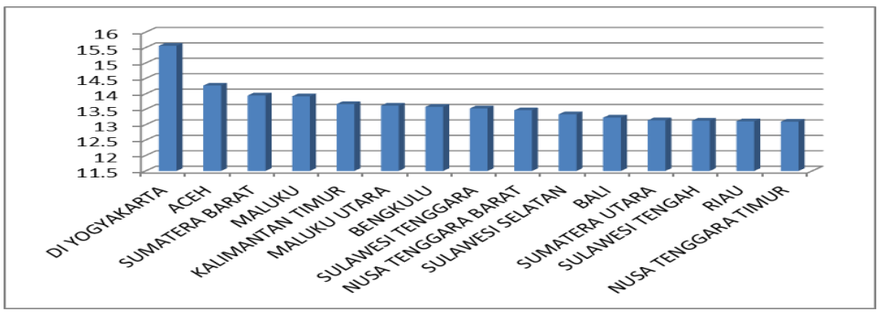
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya **sekolah** (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Indonesia 5 tahun terakhir terhitung 2014; 2015; 2016; 2017 dan 2018 berturut-turut 12,39 tahun; 12,55 tahun; 12,72 tahun; 12,85 tahun; dan 12,91 tahun.

Sementara perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Bali dalam rentang waktu lima tahun terakhir terhitung 2014; 2015; 2016; 2017 dan 2018 berturut-turut 12,64 tahun; 12,97 tahun; 13,04 tahun; 13,21 tahun; dan 13,23 tahun. Jika, dibandingkan posisi HLS Bali dengan rata-rata nasional Bali selalu berada di atas rata-rata nasional. Lihat Gambar 3.



Gambar 3. Posisi HLS Bali dibandingkan rata-rata nasional

Provinsi Bali saat ini menduduki peringkat ke-11 Harapan Lama Sekolah di Indonesia. Posisi ini jauh di bawah DIY yang menduduki peringkat 1. Bahkan di kawasan Bali-Nusra, Bali berada di bawah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada di peringkat 9. Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator dari penentuan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) nasional. "Harapan Lama Sekolah ini berkaitan dengan umur orang Bali yang sudah sekolah atau belum. Ini dihitung dari usia 7 tahun, jadi berapa persen sebenarnya usia 7 tahun sudah sekolah, berapa persen yang 8 tahun, 9 tahun, ternyata masih rendah untuk di Bali.



Gambar 4. Grafik posisi HLS Bali di tingkat nasional

f. Persentase Kemiskinan

Persentase kemiskinan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali. Semakin rendah angka kemiskinan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan daerah tersebut. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali memasang target persentase

kemiskinan di angka 3,85%. Target tersebut diturunkan sebasar 0,06% dari angka kemiskinan Provinsi Bali pada tahun 2018 yakni 3,91%. Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan melampaui target pada angka 3,61%. Dari 34 provinsi, provinsi Bali termasuk provinsi yang memiliki angka kemiskinan di bawah angka nasional, yakni 9,22 persen. Secara nasional, persentase kemiskinan Bali menduduki urutan terendah kedua setelah DKI Jakarta dan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat sangat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

g. Tingkat pengangguran terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Agustus 2019, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali tercatat sebanyak 3.338.767 orang (76,99 persen dari total penduduk). Dari penduduk usia kerja tersebut, 73,87 persen tercatat sebagai angkatan kerja (2.466.230 orang) dan 26,13 persen (872.537 orang) tercatat sebagai bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Provinsi Bali pada Agustus 2019 turun sedalam -2,34 persen (59.125 orang) dibandingkan dengan Agustus 2018. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah penduduk bekerja sedalam -2,50 persen (62.191 orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali pada Agustus 2019 tercatat sebesar 73,87 persen, turun sedalam -2,91 poin dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 76,78 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Agustus 2019 tercatat sebesar 1,52 persen, meningkat setinggi 0,15 poin dibandingkan TPT Agustus 2018 yang tercatat sebesar 1,37 persen. Pekerja formal pada Agustus 2019 tercatat sebanyak 1.219.297 orang (50,20 persen). Sementara pekerja informal tercatat sebanyak 1.209.382 orang (49,80 persen). Sementara pada Agustus 2018, pekerja formal tercatat sebanyak 1.254.577 orang (50,37 persen), sedangkan pekerja informal tercatat sebanyak 1.236.293 orang (49,63).

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah Angkatan Kerja bila dibandingkan dengan Agustus 2018. Pada Agustus 2019, sebanyak 3.338.767 orang tercatat sebagai penduduk usia kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.466.230 orang tercatat sebagai Angkatan Kerja (penduduk usia kerja yang siap bekerja atau membuka usaha) dan sebanyak 872.537 orang tercatat sebagai Bukan Angkatan Kerja (penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya). Dari total Angkatan Kerja, sebanyak 2.428.679 orang (98,48 persen) tercatat sebagai penduduk bekerja sedangkan sebanyak 37.551 orang (1,52 persen) tercatat sebagai penduduk yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2019 tercatat sebesar 73,87 persen, turun sedalam -2,91 poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2018 yang tercatat sebesar 76,78 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,52 persen,

meningkat setinggi 0,15 poin dibandingkan TPT Agustus 2018 yang tercatat sebesar 1,37 persen.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Tahun 2018-2019

Kegiatan Utama	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja	3.235.563	3.288.908	3.338.767
2. Angkatan Kerja	2.434.450	2.525.355	2.466.230
a. Bekerja	2.398.307	2.490.870	2.428.679
b. Menganggur	36.143	34.485	37.551
3. Bukan Angkatan Kerja	801.113	763.553	872.537
4. TPAK (%)	75,24	76,78	73,87
5. TPT (%)	1,48	1,37	1,52
6. Pekerja Tidak Penuh Waktu (<35 Jam)	550.541	583.676	605.581

h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK), dan Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali yang terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air

Tabel 1. Status Indeks Pencemaran Sungai di Bali Tahun 2019

NO	Nama Sungai	Tahun 2019		RATA - RATA INDEKS PENCEMARAN	
		Nilai IP	Status Mutu		
1	Tukad Saba 1	0,50	MEMENUHI BM	0,57	MEMENUHI BM
2	Tukad Saba 2	0,59	MEMENUHI BM		
3	Tukad Saba 3	0,54	MEMENUHI BM		
4	Tukad Sungi 1	0,49	MEMENUHI BM		
5	Tukad Sungi 2	0,59	MEMENUHI BM		
6	Tukad Sungi 3	0,73	MEMENUHI BM		
7	Tukad Badung 1	0,47	MEMENUHI BM	0,59	MEMENUHI BM
8	Tukad Badung 2	0,57	MEMENUHI BM		
9	Tukad Badung 3	0,74	MEMENUHI BM		
10	Tukad Unda 1	0,55	MEMENUHI BM	1,52	CEMAR RINGAN
11	Tukad Unda 2	1,55	CEMAR RINGAN		
12	Tukad Unda 3	1,90	CEMAR RINGAN		
13	Tukad Melangit 1	0,71	MEMENUHI BM		
14	Tukad Melangit 2	3,47	CEMAR RINGAN		
15	Tukad Melangit 3	0,92	MEMENUHI BM		
16	Tukad Pekerisan 1	1,47	CEMAR RINGAN	1,03	CEMAR RINGAN
17	Tukad Pekerisan 2	1,37	CEMAR RINGAN		
18	Tukad Pekerisan 3	0,25	MEMENUHI BM		
19	Tukad Sangsang 1	0,66	MEMENUHI BM	0,92	MEMENUHI BM
20	Tukad Sangsang 2	0,69	MEMENUHI BM		
21	Tukad Sangsang 3	1,41	CEMAR RINGAN		
22	Tukad Bilok Poh 1	0,61	MEMENUHI BM	0,67	MEMENUHI BM
23	Tukad Bilok Poh 2	0,70	MEMENUHI BM		
24	Tukad Bilok poh 3	0,69	MEMENUHI BM		

Di lihat dari status indeks pencemaran sungai di Bali, seperti tabel di atas terdapat beberapa sungai telah memenuhi baku mutu antara lain Tukad Saba, Tukad Sungi, Tukad Badung, Tukad Sangsang, Tukad Bilok Poh. Sedangkan sungai yang masih tercemar ringan yaitu Tukad Unda, Tukad Melangit, Tukad Pakerisan.

Tabel 2. Nilai Indeks Pencemaran Danau di Bali Tahun 2019

Nama Sungai	Titik Pantau	Tahun 2019		RATA - RATA INDEKS PENCEMARAN	
		Nilai IP	Status Mutu		
DANAU BATUR				3,20	CEMAR RINGAN
Danau Batur 1	Dermaga Penyebrangan Desa Kedisan	3,16	CEMAR RINGAN		
Danau Batur 2	Depan Pura Ulun Tirta, Ulun Danu, Desa Songan	3,24	CEMAR RINGAN		
DANAU BERATAN				1,66	CEMAR RINGAN
Danau Beratan 1	Dermaga/Restoran Bedugul	1,61	CEMAR RINGAN		
Danau Beratan 2	Pura Ulun Danu Beratan	1,71	CEMAR RINGAN		
DANAU BUYAN				1,69	CEMAR RINGAN
Danau Buyan 1	Br. Yuhmas, Desa Pancasari (Kawasan pemukiman & perkebunan)	1,54	CEMAR RINGAN		
Danau Buyan 2	Pinggir Danau Buyan (Pura Ulun Danu Batu Meringgit)	1,84	CEMAR RINGAN		
DANAU TAMBLINGAN				2,20	CEMAR RINGAN
Danau Tamblingan 1	Pinggir Danau Tamblingan (Depan Pura Bubug/dermaga)	1,72	CEMAR RINGAN		
Danau Tamblingan 2	Pinggir Danau Tamblingan (Depan Pura Ulun Danu Tamblingan)	2,68	CEMAR RINGAN		

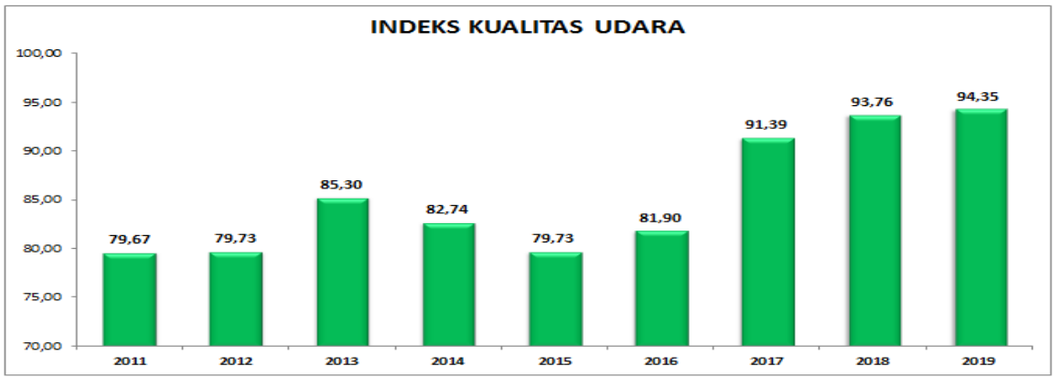
Berdasarkan tabel diatas dari 4 (empat) danau di Provinsi Bali rata-rata status nilai Indeks Pencemaran Danau yaitu cemar ringan.

Tabel 3. Nilai Indeks Pencemaran Air Laut Tahun 2018-2019

NO	LAUT	Tahun 2018-2019	Status	NO	LAUT	Tahun 2018-2019	Status	NO	LAUT	Tahun 2018-2019	Status
		Nilai IP				Nilai IP				Nilai IP	
1	PANTAI LEBIH	9,73	CEMAR SEDANG	10	PANTAI KELATING	9,51	CEMAR SEDANG	19	PANTAI CANDI DASA	4,04	CEMAR RINGAN
2	PANTAI KUSAMBA	9,73	CEMAR SEDANG	11	PANTAI TANAH LOT	9,58	CEMAR SEDANG	20	PANTAI GILIMANUK	10	CEMAR BERAT
3	PANTAI NUSA DUA	9,41	CEMAR SEDANG	12	PANTAI C. BAWANG	8,31	CEMAR SEDANG	21	PANTAI PENGAMBENGAN	10,67	CEMAR BERAT
4	PANTAI GEGER	9,63	CEMAR SEDANG	13	PANTAI SANGSIT	0,6	MEMENUHI BM	22	PANTAI MEDEWI	9,12	CEMAR SEDANG
5	PANTAI KEDONGANAN	9,65	CEMAR SEDANG	14	PANTAI LOVINA	3,1	CEMAR RINGAN	23	PANTAI PERANCAK	8,79	CEMAR SEDANG
6	PANTAI KUTA	9,97	CEMAR SEDANG	15	PANTAI BARUNA	4,49	CEMAR RINGAN	24	PANTAI BENOA	8,2	CEMAR SEDANG
7	PANTAI SEMINYAK	7,71	CEMAR SEDANG	16	PANTAI PADANGBAI	0,55	MEMENUHI BM	25	PANTAI SANUR	8,24	CEMAR SEDANG
8	PANTAI BERAWA	9,21	CEMAR SEDANG	17	PANTAI TULAMBEN	6,86	CEMAR SEDANG	26	PANTAI TANJUNG BENOA	9,18	CEMAR SEDANG
9	PANTAI SOKA	8,23	CEMAR SEDANG	18	PANTAI UJUNG	8,17	CEMAR SEDANG				

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 (dua) sungai yang telah memenuhi baku mutu di Provinsi Bali yaitu Pantai Sangsit (Buleleng) dan Pantai Padangbai (Karangasem). Sedangkan pantai berstatus cemar berat di Bali yaitu di Pantai Gilimanuk (Jembrana) dan Pantai Pengambengan (Jembrana).

▪ Indeks Kualitas Udara



Gambar 1. Indeks Kualitas Udara Bali Tahun 2011-2019 (Udara Ambien → Metode Hisap).

Indeks Kualitas Udara di Bali dari Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2019 yaitu 94,35 lebih tinggi dibanding Tahun 2018 yaitu 93,76.

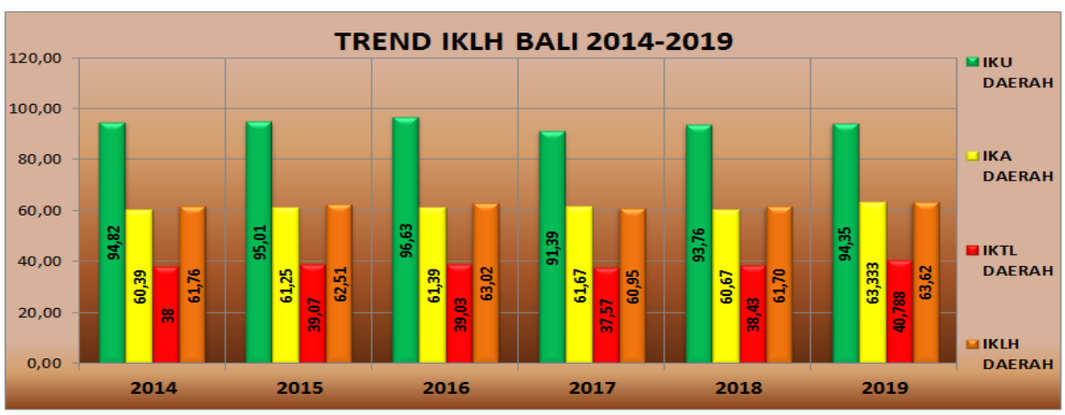
▪ Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018-2019

ITL BALI				
Tahun	Luas Hutan/lahan (km^2)	Luas Wilayah (km^2)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITL 100 - (84,3 - % Luas tutupan lahan) x (100-50) / (84,3-30)
2019	112711,8222	563.666,00	19,996	40,788
2018	100867,4812	563.666,00	17,895	38,854

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Bali Tahun 2019 sebesar 40,788 mengalami peningkatan dibanding dengan IKTL Tahun 2018 yaitu sebesar 38,854, dengan persentase luas tutupan hutan/lahan Tahun 2019 sebesar 19,996%.

▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

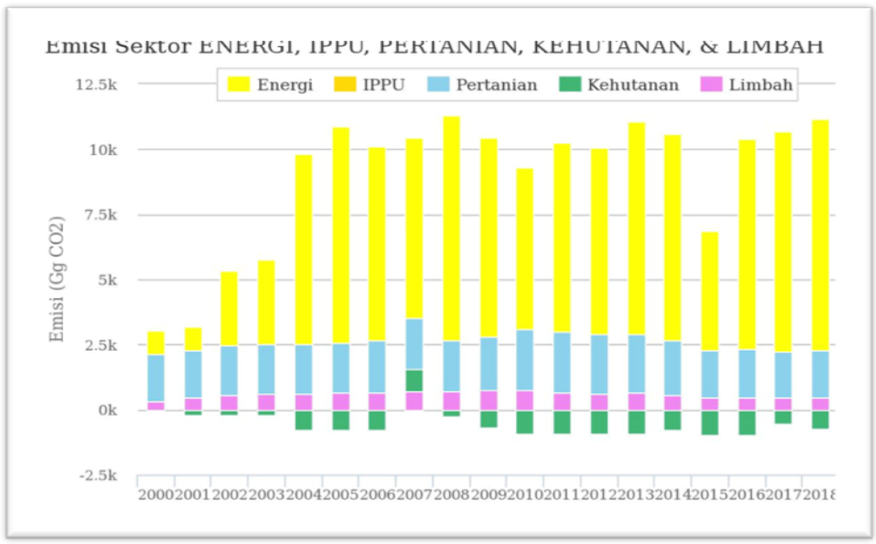


Gambar 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bali Tahun 2019 menunjukkan angka 63,62, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 94,35, Indeks Kualitas Air sebesar 63,33 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 40,788. IKLH Tahun 2019 telah mengalami peningkatan dibanding dengan IKLH Tahun 2018 yaitu sebesar 61,70. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar 94,35 lebih tinggi dibanding Tahun 2018 yaitu 93,76 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 sebesar 40,788 mengalami peningkatan dibanding dengan IKTL Tahun 2018 yaitu sebesar 38,854.

▪ Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali dilakukan dengan pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK yang dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor utama yaitu energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Inventarisasi GRK di Provinsi Bali yang dilakukan di 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota menunjukan adanya kenaikan emisi GRK yaitu sebesar 312,52Gg CO_2 e atau 3,09% dari tahun sebelumnya.

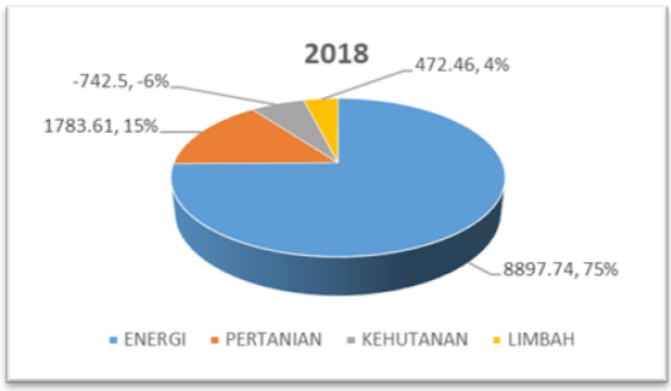


Gambar 4. Grafik Jumlah Emisi CO2eq tahunan dari tahun 2000 sampai 2018 di Bali
Sumber: SIGN SMART 2019

Berdasarkan grafik di atas total emisi pada tahun 2018 adalah 10.411,31 Gg CO_2 e, 312,52Gg CO_2 e atau 3,09% dari tahun sebelumnya. Dari total emisi GRk tersebut sektor energi berkontribusi paling tinggi terhadap peningkatan emisi GRK yaitu 8.897,74 Gg CO_2 e atau 74,79%.

Emisi pada sektor pertanian dan limbah juga mengindikasikan kencenderungan meningkat, dimana sektor pertanian pada tahun 2018 menghasilkan emisi sebesar 1783,61 Gg CO_2 e atau mengalami peningkatan sebesar 26,92 Gg CO_2 e dari tahun 2017, sektor limbah pada tahun 2018 menghasilkan emisi sebesar 472,46 Gg CO_2 e atau mengalami peningkatan sebesar 1,05 Gg CO_2 e dari tahun 2017. Sementara itu, sektor Kehutanan mengindikasikan

penyerapan emisi CO2 sebesar (742,50) Gg CO_2 e pada Tahun 2018, meningkat dari sebelumnya (565,22) Gg CO_2 e. Sektor kehutanan berkontribusi cukup tinggi dalam mengurangi emisi GRK di Provinsi Bali. Penjelasan di atas dapat digambarkan pada diagram berikut**:**



Gambar 4. Grafik Persentase Emisi CO2eq Tahun 2018 di Bali
Sumber: SIGN SMART 2019

Penggunaan sumber daya terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Gas Rumah Kaca dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Taman Keanekeragaman Hayati di tingkat Provinsi dan masing-masing Kabupaten/ Kota yang melibatkan OPD dan *stakeholders* sebagai wadah untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi dan perencanaan secara terpadu dan komprehensif;
2. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, *stakeholders* serta masyarakat setempat melalui berbagai media sehingga tercipta pemahaman yang sama dan terwujud kesadaran terhadap pentingnya pelestarian Keanekaragaman Hayati
3. Melakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran air yaitu:
    - sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua *stakeholder* seperti Pemerintah Kabupaten/ Kota, pihak swasta, LSM dan lembaga adat (banjar,desa adat) akan arti pentingnya sungai, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tidak membuang sampah di sungai;
    - melaksanakan pengawasan dan penegakan aturan dengan sanksi bagi para pelaku usaha yang membuang limbah secara langsung ke sungai;
    - mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan upaya pengendalian pencemaran air melalui pembuatan instalasi pengolahan air limbah;
    - perlu dibangun IPAL komunal pada daerah yang berpotensi menyebabkan pencemaran sungai khususnya pada kawasan padat penduduk;

- perlunya pengawasan terhadap kelayakan perijinan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha;
- mengendalikan aktivitas pertanian di sekitar daerah tangkapan air danau yang berpotensi mencemari kualitas air danau;
- perlunya kajian inventarisasi sumber-sumber pencemar sehingga diketahui berbagai kegiatan/ usaha yang berpotensi menurunkan kualitas air;
- perlunya dilakukan penetapan kelas air sebagai dasar pemanfaatan sumber-sumber air di Provinsi Bali.

4. Sektor energy menyumbangkan emisi GRK sebesar yaitu 4.130.820 ton CO2 e atau 84,27% di Provinsi Bali. Meskipun demikian jumlah emisi sektor energy mengalami penurunan yang signifkan pada tahun 2016 dan 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor energy terdiri dari sub-sektor industry energy, industry manufaktur dan konstruksi, rumah tangga dan transportasi. Secara keseluruhan, sub-sektor transportasi menyumbangkan emisi GRK terbesar yaitu 3.383.250 ton CO2 e atau 70,21% dan mengalami peningkatan sebesar 236.060 ton CO2 e atau 7,5% dari tahun sebelumnya (2016). Selama kurun waktu 2004-2017 sub-sektor ini secara konsisten menghasilkan emisi terbesar pada sektor energy sehingga sub-sektor transportasi menjadi salah satu sub-sektor kunci emisi GRK di Provinsi Bali. Untuk sub-sektor transportasi jumlah kendaraan menjadi salah satu kunci utama emisi GRK karena jumlah kendaraan berbanding lurus dengan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di Pulau Bali. Dibandingkan dengan data tahun 2016, jumlah penggunaan bahan bakar untuk transportasi darat cencerung meningkat meskipun dengan jumlah yang sangat kecil. Peningkatan jumlah emisi ini tidak lepas dari tingginya angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Pulau Bali. Tercatat Pada tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor mencapai 3.907.094 unit meningkat sekitar 181.702 unit dari tahun sebelumnya.

6. Analis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Program dan Kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Bali tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman dengan Kegiatan Bedah Rumah. Alokasi anggaran Rp.5.500.000.000,- terealisasi 5.334.307.800,- dengan target kinerja 100 unit dapat terealisasi 100 unit. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial Provinsi Bali pada tahun 2019 memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 100 unit yang tersebar di 6 kabupaten antara lain Jembrana (6 unit), Tabanan (6 unit), Klungkung (6 unit), Bangli (6 unit), Karangasem (30 unit), dan Buleleng (46 unit).
2. Program Penanganan Fakir Miskin dengan Kegiatan Penanganan Fakir Miskin. Alokasi anggaran Rp.70.000.000,- terealisasi Rp.66.250.000,- dengan target kinerja 1 laporan dapat

terealisasi 1 laporan hasil monitoring. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untu memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah disalurkan pada tahun berjalan dengan tujuan mengetahui apakah Bantuan Pangan Non Tunai yang didanai dari APBN tahun 2019 telah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), apakah telah tepat sasaran, tepat jumlah dan sesuai ketentuan, serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan *Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.* Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Bali bertujuan:
   - Untuk mengetahui kualitas air (sungai, danau, dan air laut) melalui pengujian parameter sesuai yang dipersyaratkan;
   - Untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambien terutama untuk parameter PM_{10}, $PM_{2,5}$. NO_2, SO_2, Pb dan CO.
   - Tersedianya data-data emisi Gas Rumah Kaca secara akurat dari sektor-sektor terkait.
   - Tersedianya informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
   - Jumlah kawasan pariwisata strategis yang terpantau di Provinsi Bali.
   - Terpantaunya kerusakan di kawasan pesisir dan laut dan kegiatan yang ada di kawasan pesisir di Provinsi Bali.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Air

Pemantauan kualitas air Tahun 2019 dilaksanakan di 8 (delapan) Sungai lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dengan 24 (dua puluh empat) titik sampling, 4 (empat) Danau meliputi Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan dengan 8 (delapan) titik sampling. Air Laut dilakukan pada perairan pesisir dekat pantai, yang meliputi pantai di kawasan pariwisata dan pelabuhan di Pantai Celukan Bawang, Pantai Padangbai, Pantai Gilimanuk, Pantai Pengambengan dan Pantai Benoa dengan 9 (sembilan) titik sampel. Total 41 sampel air.

Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara Tahun 2019 dilaksanakan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) parameter, CO, NO_2, SO_2, timbal Pb, PM_{10} dan $PM_{2,5,}$ dengan 4 (empat) titik pantau lokasi *sampling* yang meliputi Kawasan Terminal, Kawasan Pelabuhan/ Bandar Udara,

Kawasan Pariwisata, Pasar dan Pusat Kota/ padat lalu-lintas yang ditetapkan di masing-masing 4 (empat) lokasi *sampling* di setiap kabupaten/ kota. Total 36 sampel udara.

Sub Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Provinsi Bali dilakukan dengan pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon serta penetapan faktor emisi dan faktor serapan GRK yang dikelompokkan dalam 4 (empat) sektor utama yaitu energi, pertanian, kehutanan, dan limbah. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dituangkan dalam 1 (satu) dokumen Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Sub Kegiatan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Flora dan Fauna

Keanekaragaman hayati meliputi berbagai jenis tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan pola kehidupannya masing-masing. Setiap jenis tumbuhan, satwa dan organisme mempunyai manfaat dan peran yang berbeda-beda bagi fungsi ekologis dan kehidupan manusia. Pelaksanaan pembelian bibit tanaman dan penanaman pohon untuk meningkatkan tutupan lahan di luar kawasan hutan menuju taman Kehati seluas 1 (satu) Hektar yang dilaksanakan di Areal Pura Dalem Pingit, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu

Sumberdaya alam wilayah pesisir Provinsi Bali ditopang oleh keberadaan ekosistem pesisir yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem tersebut menyediakan beragam jasa-jasa lingkungan sebagai daya tarik dan atraksi wisata. Pelaksanaan pemantauan ekosistem pesisir dan laut terpadu dilakukan di 13 (tiga belas) kawasan di Provinsi Bali.

Adapun realisasi fisik kegiatan ini telah mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 272.902.620,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 98,03 % dari pagu anggaran.

BAB IX
PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat pula ditingkatkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Bali, 18 Maret 2020

LAMPIRAN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

LAMPIRAN:I.1 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban Penataan Ruang	1	Kab/kotamemiliki PerdaIMB	Jumlah kab/kota memiliki Perda IMB dibagi jumlah yang wajib menyampaikan LPPD kab/kota dalam provinsi	- Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak 9 daerah - Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD sebanyak 9.	**100 %**	**Dasar Hukum:** PP Nomor 36 Th 2005 (psl. 112) Permen PUPR No.5 Tahun 2016 tentang IMB Pasal 52
		Peraturan ttg Ketertiban Umum	2	Kab/kota memiliki perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Kab/Kota memiliki Perda Ketertiban Umum dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPDx100%	- Kab/Kota yang memiliki perda Ketertiban Umum, sebanyak 12 Daerah dari (Terlampir) - Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 9 daerah.	**100 %**	**Dasar Hukum:** Permendagri no 121 Tahun 2018 tentang SPM Trantibum psl 1 nomor 5
		Personil(Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadapj umlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	- Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun2019 =119orang - Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019= 4.362.000 orang	1.36 Per 50.000 penduduk	**Dasar Hukum:** Permen No. 121 Tahun 2018 tentang SPM Trantibum Pasal 3
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM	Penyampaian laporan kepada Pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal15 Januari 2020 sesuai surat pengantar Nomor800/630/Set/Itprov tanggal 14 Januari 2020.	Tepat	**Dasar Hukum:** PP No. 13 Tahun 2019 tentang LEPPD Pasal 11

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporankinerja berdasarkan PP8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan tahun 2019, disampaikan pada tanggal 29 Januari 2020 sesuai surat pengantar Nomor 700/1125/Set/Itprov tanggal tanggal 29 Januari 2020 - Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal 16 Januari 2020 sesuai surat pengantar Nomor 700/686/Set/Itprov tanggal 16 Januari 20202020	-Tepat -Tepat	**Dasar Hukum:** - Kemenkeu Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan LKPasal 9 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 296 ayat 1
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6	Pemerintah Daerah yang Memiliki Produk Hukum Daerah tentang Penerapan SPM	Total Kabupaten/Kota yang sudah Memiliki Peraturan Daerah/Perkada tentang Penerapan SPM X100% Rata-rata= ……urusan= …….Kab/kota	1. Kab Badung = ada 2. Kab bangli = ada 3. Kab Buleleng = ada 4. Kab Gianyar = ada 5. Kab Jembrana = ada 6. Kab karangasem = ada 7. Kab Klungkung = ada 8. Kab Tabanan = ada 9. Kota Denpasar = ada	9 Kab/Kota	**Dasar Hukum :** PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Pasal 15 dan 16

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2019)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 34 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabu paten Klungkung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bali tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kabupaten Klungkung 2) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktur RSUD Kabupaten Buleleng tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Buleleng 3) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktur RSUD Kabupaten Bangli tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Bangli 4) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar tentang Pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Gianyar 5) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali 6) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali	34 MOU	Sumber Hukum : PP No.28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah Pasal 3

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						7) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali 8) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali 9) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali 10) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali 11) MOU dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tentang Pengelolaan Portal Digital Usaha Ekonomi Kreatif di Bali.		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						12) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Politeknik Negeri Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 13) MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar tentang Pasokan Sampah Pemerintah Kota Denpasar ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Provinsi Bali 14) MOU dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tentang Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Distribusi Pangan 15) MOU tentang Perubahan Atas Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Titab Provinsi Bali 16) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provisi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						17) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Rumah Sakit Tk. II Udayana tentang Pelayanan Laboratorium Kesehatan 18) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Klinik Pratama Rawat Jalan FKTP Sudirman Kesdam IX/Udayana tentang Pelayanan Laboratorium Kesehatan 19) MOU temtang Perjanjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) Kepada Masyarakat 20) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Indonesia Denapasar tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 21) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Akademi Keperawatan Mandiri di Bangli tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 22) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan PT. IMQ Multimedia Utama tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						23) MOU dengan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Perluasan Kepesertaan, Kepatuhan, dan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bali 24) MOU dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Perluasan Kepesertaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kepada Pemohon Ijin Berusaha 25) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						26) MOU dengan Kapolri, Kemendagri, PT. Jasa Raharja dengan 34 Provinsi se-Indonesia dengan PT. Bank BPD se-Indonesia dengan PT Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, CIMB Niaga, Permata, Bukopin, Danamon tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Samsat Online Nasional Untuk Pelayanan di Wilayah Administrasi/ Hukum pada 34 Provinsi se-Indonesia 27) MOU dengan Kapolri, Kemendagri, PT Jasa Raharja dengan 34 Provinsi Seluruh Indonesia dengan PT. BPD se-Indonesia dengan PT Value Stream Indonesia (VSI) tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Samsat Online Nasional, Modern Channel untuk Pelayanan di Wilayah Administrasi/Hukum pada ke-34 Provinsi Seluruh Indonesia 28) MOU dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Perluasan Kepesertaan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						29) MOU dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dengan CV. Setiawan, CV. Kantih Tani, CV. Amerta Jaya, CV. Timan Agung, CV. Dharma Pertiwi, CV. Ananta Winangun, CV. Kerambitan Agro, CV. Dharma Kerti Sedana, Koperasi Tani Nandini, Koperasi Panca Kawi Artha, Yayasan Pemilahan Sampah Temesi tentang Penyediaan Pupuk Organik Yang Disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 30) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan PT PLN (Persero) tentang Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih di Provinsi Bali 31) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 32) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						33) MOU dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 34) MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi		
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas1 pembangunan nasional	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak 5 program. - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak 5 program	100 %	**Sumber Hukum :** Lampiran Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019,
		Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 24(Jumlah urusan wajib di UU No 23 Tahun 2014)X100%	- Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPDX100% - Rata-rata= ……urusan=…….Kab/kota	1. Kab Badung =34 urusan. 2. Kab bangli =34 urusan. 3. Kab Buleleng- =34 urusan. 4. Kab Gianyar =34 urusan. 5. Kab Jembrana =34urusan 6. Kab Karangasem =34 urusan 7. Kab Klungkung =34 urusan 8. Kab Tabanan =34 urusan 9. Kota Denpasar =34 urusan Jumlah = 34 urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak 9 Kab/Kota.	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Keuangan	10	Waktupenetapan perdaAPBDtahun 2019	Tepatatautidaktepatwaktu penetapanperdaAPBD Tahun 2019 (31Desember2018)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019	Tepat	**Tidaktepat**,apabilaAPBD ditetapkansetelah31 Desember2017. **Dasar Hukum :** Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 104
			11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	**Dasar Hukum :** PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 3 dan 4)
			12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. 1.200.748.887.063,36 2) Urusan Kesehatan Rp. 544.554.048.143,13 3) PU dan Tata Ruang Rp.362.379.765.728,68 4) Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. 8.017.882.561,87 5) Trantibum dan Linmas Rp.38.367.783.977,41 6) Sosial Rp. 26.971.585.845 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 2.181.039.953.319,45	35,41%	**Dasar Hukum :** Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman APBD Tahun 2019 (hal.25)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik[2] sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar pelayanan publik	Tidak Ada Sebutkan dasar hukum,Perda Nomor ------ Tahun-------tentang--------(standar pelayananpublik')	Tidak Ada Karena tidak ditetapkan dengan peerda tersendiri tetapi sudah diatur dalam perda sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah	**Dasar Hukum:** UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 20), dan PP. Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 27).
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 sebanyak 11.310 orang. - Jumlah penduduk provinsi tahun 2019 sebanyak 4.220.000 orang.	0,27 %	**Dasar Hukum :** UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 56).
			16	Persentase PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100%	Jumlah PNS Provinsi tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) 4028 orang	35,6 %	**Dasar Hukum :** UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Pasal 62).

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Kelembagaan	17	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah,sbb: 1) Biro (Setda) = 9 unit 2) Dinas = 24 unit 3) Badan = 8 unit 4) Kantor = -unit 5) Rumah Sakit = 3 unit 6) Lembaga Teknis lainya = 3 unit 7) Inspektotar = 1 unit Jumlah Perangkat Daerah = 47 unit	47 unit	**Dasar Hukum :** PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Pasal 2 dan 3) Perda Provinsi Bali no 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2019	Perda yang ditetapkan dalamTahun 2019, sebanyak 12Perda (Daftar Perda terlampir)	150%	**Dasar Hukum:** Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1 point 4
		Raperda yang diajukan tahunberjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2019	- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019, sebanyak 12 RAPERDa dari 8 target. - RAPERDA yang diusulkan tahun 2019, sebanyak26 RAPERDA.	150%	**Dasar Hukum:** Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal 16 ayat 1)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
5	EFEKTIVITASPROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAKLANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang DPRD ditindaklanjuti olehDPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun 2019 X 100%	- Keputusan DPRD yangditindaklanjutioleh DPRD dalam tahun2019,sebanyak 40 keputusan. - Keputusan DPRD yang dihasilkan oleh DPRD dalam tahun2019, sebanyak 40 keputusan. -	100 %	**Dasar Hukum:** Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1 point 9
6	EFEKTIVITASPROSES PENGAMBILAN KEPUTUSANOLEH KEPALADAERAH BESERTATINDAKLANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindak lanjuti	Jumlah KepGub yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah KepGub yang dihasilkan dalam tahun 2019X100%	- Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak 2925 keputusan - Keputusan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanya 2925 keputusan.	146,25%	**Dasar Hukum:** Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1 point 9
		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindak lanjuti	Jumlah PerGub yang ditindak- lanjuti dibagi Jumlah PerGub yang dihasilkan dalam tahun2019X100%	- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dalam tahun 2019, sebanyak 129 Pergub. - Peraturan Gubernur yang dihasilkan dalam tahun 2019, sebanyak 70 Pergub.	93.33 %	**Dasar Hukum:** Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah psl 1 point 5

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	KETAATANPELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH PADAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	- Perda yang dibatalkan, sebanyak-----, yang terdiri dari: 1) Perda Nomor------Tahun2019 tentang------ 2) Perda Nomor------Tahun 2019 tentang------ 3) Dst. - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah	Tidak Ada	**Dasar Hukum:** Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Pasal 128 s/d 156)
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DANRELEVANUNTUK DAERAH	Konsultasi Publik	24	Ada atau tidaknya kegiatan konsultasi publik	Ada atau tidaknya	ADA, Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2020 No 050/2415/SP/Bappeda Litbang	Ada (Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali	Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Forum Konsultasi Publik
		Media informasi PEMDA yangdapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas,leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerGub	ApabilaAda, - Website baliprov.go.id - Pos pengaduan, leaflet, brosur - Majalah online - Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) - -----	Ada	UU nomo 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 2

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DANBAGIHASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbanganX100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. 2.548.063.873.035 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 2.662.026.888.500	95,72 %	PP Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 Nomor 8 (Dana Perimbangan) Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27
		Alokasi Belanja pada APBDdariDAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp. 2.240.373.168.887 - DAU APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 1.325.847.555.000	168,97 %	Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 36 ayat 3 (belanja Langsung) PP Nomor 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 Nomor 23 (DAU)
		Alokasi Belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBDX100%	- Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp 2.240.373.168.887 - Total Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 1.838.997.936.962	82,08 %	Permendagri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 36 ayat 3 (belanja Langsung)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlahtotal pendapatan APBDX100%	- PAD APBD Tahun 2019, sebesar Rp 3.762.785.679.903 Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019 (Realisasi), sebesar Rp. 4.023.621.242.821	106,93 %	Permendagri No 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 26 ayat 1 (PAD), pasal 25 (Pendapatan Daerah)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA ,PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: WTP	Opinitahun 2018= WTP Opinitahun 2019=WTP	Opini,: WTP/*unqualifiedopinion*); WDP/*qualifiedopinion*); TMP/*disclaimeropinion*), atauTIDAKWAJAR(TW/*adverseopinion*).
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibag ijumlah pendapatan X 100%	- SILPA d a l a m A P B D Tahun 2019, sebesar Rp. 832.128.756.535,06 - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 6.645.753.799.856,20	12,52 %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. 3.762.785.679.903 - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 6.645.753.799.856,20	56,61 %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thdp anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp. 6.158.215.565.922,61 - Total Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. 7.201.196.359.769,47	90,52 %	Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja/LRA
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPKRI Yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun2019	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 1308 temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 1336 temuan	0.98 %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yangsudah ditindaklanjuti
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH ANGKA POTENSI DAERAH DIAMBIL DARI PENDAPATANASLIDAERAH (PAD) YANG TERCANTUM DALAM RPJMD	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagidengan potensi PAD X100%	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. 3.718.499.635.346,14 - Potensi PAD Tahun 2019 , sebesar Rp. 3.762.785.679.903,00	98.82%	Sumber data dari BPKAD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENISDATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD Dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau (PAD 2019-PAD 2018) : PAD 2018X100%	- Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. 3.566.962.941.605 - Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.762.785.679.903	5,49%	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN/ INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak 3 yang terdiri dari 1) Penghargaan Opini WTP 2) Piagam Penghargaan Tindak Lanjut 3) Penghargaan terbaik Kinerja Pokja Yustisi	3 Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada E- procurement	Apabila ADA Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2010	Ada	SumberdatadariULP.Data berupaprosese-procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2019	- Realisasi Proyek Investasi PMDN Tahun 2019, - Realisasi Proyek Investasi PMA Tahun 2019,	814 Proyek 2.443 Proyek	**BKPM RI** **29 Januari 2020**

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : Bali
NAMA PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Provinsi Bali

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	..... Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	**Apabila Ada, sebutkan ada banyak 35 yang terdiri dari:** **1. SOP ttg Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor.** **2. SOP ttg Penyediaan Alat Tulis Kantor.** **3. SOP ttg Pengadaan bahan Bakar Minyak.** **4. SOP Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas** **5. SOP LHKPN.** **6. SOP Rapat - rapat Koordinasi dalam dan Luar Daerah .** **7. SOP Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.** **8. SOP Penyediaan Makanan dan Minuman.** **9. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penanganan**	**35 Jumlah**	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						Surat Keluar. 10. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Surat Masuk. 11. Standar Operasi Prosedur Pelaksanaan Laporan absensi pegawai. 12. SOP Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 13. SOP LHKPASN 14. SOP Prosedur Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 15. SOP Upacara Keagamaan 16. SOP Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan. 17. SOP Penyediaan Bahan Logistik. 18. SOP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 19. SOP Diklat Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 20. SOP Kenaikan Jabatan Fungsional. 21. SOP Kartu Pegawai. 22. SOP Kartu Istri / suami 23. SOP Ijin Belajar. 24. SOP Kenaikan gaji berkala. 25. SOP Pelaksanaan Kegiatan Jasa Surat Menyurat. 26. SOP Kenaikan pangkat. 27. SOP Pengusulan Persetujuan Teknis Auditor. 28. SOP Satya Lencana Karya Satya. 29. SOP SK Pensiun.		

						30. SOP Penilaian Angka Kredit **31. SOP Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.** **32. SOP Koordinasi Internal.** **33. SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.** **34. SOP Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah.** **35. SOP Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Tahunan Daerah.**		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	**Apabila ada sebutkan** **1.Perda nomor. 7 Tahun 2019**	**Ada**	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- **Jabatan yang ada sebanyak 9 Orang terdiri;** 1. **Inspektur; I Wayan Sugiada.SH.,MH** 2. **Sekretaris; I Komang Hendri Lesmana ,SH.,MH** 3. **Irban Wil I; I Gst.Ayu Ekaputri Kusumayoni,SH.,M.Si** 4. **Irban Wil II; I Gst Ngurah Putra Wiradnyana,ST.,MT** 5. **Irban Wil III; I Wayan Badung Adiyasa,AP,SH,MH** 6. **Irban Wil IV; Made Widhi Dharma,SE.,AK,M.Si**	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

						7. **Kasubag Kepegawaian; Monika,SE.,MAP** 8. **Kasubag Evaluasi dan Pelaporan; I Dewa Gede Agung Saputra,SH.,M.Si** 9. **Kasubag Keuangan dan Program; Ida Ayu Srinadi,SE.,MH**		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	**Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,55 orang** ----------**P2UPD 22 org** ----------**Auditor 33 org**	**Ada**	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- **PNS, sebanyak 102 Personil** - **Total PNS Provinsi, sebanyak10.543 personil**	**100 %**	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- **Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 2 org.** - **Pejabat yang ada, sebanyak 9 org**.	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- **Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 1 org.** - **Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.**	**100 %**	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	**Apabila Ada.** **Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:** **1. Renstra** **2. Renja** **3. RKA**	**3 jenis dokumen**	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- **Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.** - **Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program.**	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- **Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.** - **Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.**	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- **Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program** - **Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.**	**100 %**	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- **Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 30.896.412.884,-** - **Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 30.896.412.884,-**	**100 %**	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- **Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.29.903.951.512,-** - **Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.29.903.951.512,-**	**100 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- **Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.642.597.741,16,-** - **Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.642.597.741,16,-**	**100 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- **Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.261.353.771,-** - **Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.261.353.771,-**	**1 00 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1…….. 2…….. 3……..	Ada/ Tidak Ada sebanyak ------ jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. -	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.-- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	..... %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	**Sebutkan jenisnya 2 jenis** **1.Papan Pengumuman** **2.Pos Pengaduan**	**Jumlah sebanyak 2 jenis.**	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : Bali
NAMA PERANGKAT DAERAH : Bappeda Litbang Provinsi Bali

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perencanaan Pembangunan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 2. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali Tahun 2019 3. RKA- Bappeda Litbang Provinsi Bali 2019	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Provinsi: Bali
NAMA PERANGKAT DAERAH: BAPPEDA LITBANG
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Penelitian dan Pengembangan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Penelitian dan Pengembangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan Pembangunan	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	- Program Pembangunan Daerah Anggaran= **Rp. 4.674.406.714,-**		Ada		Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
			2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada/tidak	Realisasi= **Rp. 3.754.935.643,-**		Ada		
			3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Ada		
			4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah	Ada/tidak	Anggaran= **Rp. 1.098.619.328 ,-**		Ada		

				ditetapkan dengan PERDA		Realisasi= **Rp. 707.859.835,-**				
			5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah Program RKPD tahun berkenan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan X100%	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Anggaran= **Rp. 1.706.144.356 ,-** Realisasi= **Rp. 1.198.675.415,-**		100%		
			6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah Program RKPD tahun berkenan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan X100%			100%		
			7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang/dokumen RTRW X100%	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Anggaran = **Rp. 1.465.482.894,-** Realisasi= **Rp. 1.246.323.633,-**		100%		
		Penelitian dan Pengembangan	1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD/Jumlah kelitbangan dalam RPJMD x100%					
			2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti/ Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x100%		Program Penelitian dan Pengembangan Anggaran= **Rp. 16.125.111.324,-** Realisasi=			

			3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi/ Jumlah total perangkat daerah x100%		**Rp. 13.045.168.823,-**			
			4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan Jumlah inovasi yang diusulkan x100%					
			2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Ada, sebanyak 12 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan RPJPD 2. SOP ttg Penyusunan RPJMD 3. SOP ttg Penyusunan RKPD 4. SOP ttg Pengendalian dan verifikasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 5. SOP Pengendalian dan verifikasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah 6. SOP ttg Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 7. SOP ttg Penyusunan Buku Profil Daerah 8. SOP ttg Penyusunan Buku	Ada, sebanyak 10 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengolahan Masalah Daerah 2. SOP ttg Pelaksanaan Penelitian 3. SOP ttg Diseminasi Penelitian 4. SOP ttg Seminar Makro Ekonomi 5. SOP ttg Rakor kelitbangan 6. SOP ttg Seminar Nasional 7. SOP ttg Penghargaan Silpakara 8. SOP ttg Penghargaan Labdakretia 9. SOP ttg Inovasi Government Award 10. SOP ttg Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	12 Jumlah	10 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						Data SIPD 9. SOP ttg Penyusunan Data Keyahanan Nasional Daerah Bali 10. Penyusunan Data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) 11. SOP ttg Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah 12. SOP ttg Penyusunan LKPJ				

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) ------	Urusan (1) -	Urusan (2) -	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada	Pergub 67 tahun 2019	Pergub 67 tahun 2019	Ada	Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 21 - Jabatan yang ada, sebanyak 21	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada	Fungsional Perencana Fungsional Pustakawan Fungsional Arsiparir	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --.	Ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebanyak 71. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil	- PNS yang menangani urusan Penelitian dan Pengembangan, sebanyak 10. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- Personil	71	10	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai perjenjangan, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100%	100%	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) ------	Urusan (1) -	Urusan (2) -	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100%	100%	Sumber Data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak3 jenis, yg - terdiri dari: RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada. dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rencana Strategis Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 2. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali Tahun 2019 3. RKA- Bappeda Litbang Provinsi Bali 2019	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	100 % 100%	100% 100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) ------	Urusan (1) -	Urusan (2) -	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak - 5 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -- 1 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) ------	Urusan (1) -	Urusan (2) -	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp 31.896.314.963,75** - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp **7.201.196.359 .769,47**	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **16.125.111.324** - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp **7.201.196.359 .769,47**	0,44%	0,22%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar **Rp. 28.207.259.756** - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp……	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar Rp. **13.045.168.823** - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.-----			Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. **11.570.987.987** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 41.252.428.607,07**	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. **13.045.168.823** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 41.252.428.607,07**	28,05 %	31,62 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Bappeda Litbang, sebesar Rp. **16.636.271.769,-** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **41.252.428.607,07**		40,33%		Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

-

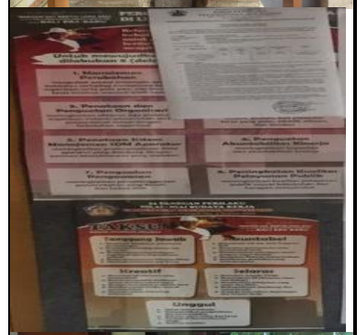
-

-

-

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) ------	Urusan (1) -	Urusan (2) -	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Operasional 3. Neraca 4. Laporan Perubahan Equitas 5. CaLK		Ada sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Operasional 3. Neraca 4. Laporan Perubahan Equitas 5. CaLK		Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada 8 jenis dokumen yaitu: 1.Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset 2. Buku Inventaris 3. KIB A 4. KIB B 5. KIB C 6. KIB D 7. KIB E 8. KIB F		Ada 8 jenis dokumen yaitu: 1.Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset 2. Buku Inventaris 3. KIB A 4. KIB B		Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

								5. KIB C 6. KIB D 7. KIB E 8. KIB F		
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp 26.013.751.792,01 Dengan rincian: Tanah Rp 10.561.600.000,00 Peralatan Mesin 15.067.107,692,01 Gedung dan Bangunan 2.095.4 08.632,00 Jalan Irigasi jaringan 385.044. 1 00,00	- Asset yang tidak digunakan,Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. 26.013.751.792,01			Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) ------	Urusan (1) -	Urusan (2) -	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet/poster 4. Pengumuman di Media elektronik 5. Media Masa	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan 3. Leaflet/poster 4. Pengumuman di Media elektronik 5. Media Masa	Jumlah sebanyak 5 jenis.		Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)    

		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	tidak	tidak	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : Bali
NAMA PERANGKAT DAERAH : BPKAD Provinsi Bali

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Sub Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	..... Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak------yang terdiri dari: 36. SOP ttg ----- 37. SOP ttg ----- 38. SOP ttg ----- 4. Dst -----	…… Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak – - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	.....%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak -----. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak --------- personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -------org.	..... %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak------org. - Jabatan yang ada, sebanyak------jbt.	..... %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak -----jenis, yg terdiri dari: 1. ..... 2. ..... 3.	..... jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak -------- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --------program.	..... %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak program.	..... %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak program.	..... %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 47.944.741.496 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 7.201.196.359.769,47	0,24 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.075.403.120,63 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 6.518.215.565.922,61	0,22 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.075.430.120,63 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 43.281.494.151,63	32,52 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 29.206.064.031 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 43.281.494.151,63	67, 48 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1 LRA 2 Neraca 3 CALK 4 LO	Ada sebanyak 4 jenis (dokumen CALK diperiksa Inspektorat)	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Berita Acara Rekonsiliasi asset tetap dan asset lainnya .	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.873.838.798.748,54	0%	Pembilang: 3. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 4. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak ------ jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Keuangan Pengelolaan Pendapatan

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	12 Program Nilai Anggaran Rp.41.354.495.453,-* Realisasi Rp. 38.787.361.944,26*	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 6 yang terdiri dari: 39. SOP pengesahan STNK setiap tahun melalui samsat kerti 40. SOP Sistem pengaduan pelayanan publik layanan aspirasi dan pengaduan Online rakyat Pemerintah Provinsi Bali 41. SOP Kendaraan bermotor warisan dan/ atau hibah 42. SOP Kendaraan ganti alamat 43. SOP ganti warna kendaraan bermotor 44. Perubahan Kedua SOP pengenaan Pajak progresif untuk kendaraan bermotor	6 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 51 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 52	98,07%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada,sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Pranata Humas Madya 2. Arsiparis Penyelia 3. Arsiparis Pelaksana 4. Arsiparis Muda 5. Pustakawan Muda 6. Pustakawan Madya 7. Analis Kepegawaian Muda	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 575. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak --------- personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.

			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 31 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 51 org.	60,78 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 51 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 51 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Bapenda 2018-2023 2. Renja 2019 3. RKT 2019 4. RKA 2019	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 188.132.493.444,45** - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 134.370.728.284,00** - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.-----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 38.787.361.944,26** - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. **173.158.090.228,26**	22,39%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar **Rp.134.370.728.284,00** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp.173.158.090.228,26**	78,50 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. Laporan Keuangan OPD	Ada/ Tidak Ada sebanyak 1 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.-- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	..... %	Pembilang: 5. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 6. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 11. Papan Pengumuman 12. Pos Pengaduan 13. Leaflet 14. Mobil keliling 15. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuma 2. Mobil Samsat Keliling 3. Baliho 4. Brosur 5. Pengumuman Media(website Bapenda)	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada UPTD Pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kab/Kota	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: **KEPEGAWAIAN**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi ASN 2. Program Pengembangan Manajemen Karier 3. Program Peningkatan Penilaian Kinerja ASN (Data terlampir)	3 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada, terlampir	101 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	1.---------- Arsiparis 2.---------- Analis Kepegawaian	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS BKD Prov. Bali sebanyak 66 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0,58 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 12 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 orang.	75 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan,Sebanyak 16 orang. - Jabatan yang ada Sebanyak 16 Jabatan	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 Jenis jenis, yg terdiri dari: 1.RENSTRA 2.RENJA 3.RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
NO	**ASPEK**	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS/ PERHITUNGAN**	**JENIS DATA (TAHUN 2019)**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program.	4/4 x 100% 100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	4/4 x 100% 100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	4/4 x 100% 100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.

6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 21.032.713.734 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 7.201.190.333.569,47	0,29 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
NO	**ASPEK**	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS/ PERHITUNGAN**	**JENIS DATA (TAHUN 2019)**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.378.413.881,22 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp 6.518.215.565.922,61	0,28 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.800.512.884,22 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.378.413.881,22	53,32 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.577.900.997 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.378.413.881,22	46,67 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. LPE 5. LO	Ada sebanyak 5 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	1. Buku Inventaris 2. Kartu Inventaris Ruangan 3. Buku Pengeluaran barang 4. Buku Penerimaan Barang	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.397.939.901,50 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.521.344.932,95	3,12 %	Pembilang: 7. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 8. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 16. Papan Pengumuman 17. Pos Pengaduan 18. Leaflet 19. Mobil keliling 20. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman media massa 3. Web BKD Provinsi Bali	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Survey kepuasan terhadap layanan BKD Provinsi Bali	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	0%	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 34 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala 2. SOP ttg SKP 3. SOP ttg Pembuatan, menghimpun, memelihara daftar urut kepangkatan (DUK) 4. SOP ttg pengajuan mutasi internal Badan 5. SOP ttg Penyusunan rancagan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6. SOP ttg Laporan Absensi Pegawai 7. SOP ttg Pembuatan Usulan Kenaikan pangkat 8. SOP ttg Penghapusan barang milik daerah 9. SOP ttg Sistem Pengendalian Intern 10. SOP ttg Pengajuan SPM 11. SOP ttg Pengajuan SPP	34 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						12. SOP ttg Pencairan SP2D LS 13. SOP ttg Verifikasi SPJ 14. SOP ttg Pembuatan daftar gaji 15. SOP ttg Penyusunan Renstra 16. SOP ttg Penyusunan Renja kegiatan dan Program 17. SOP ttg Penyusunan Rencana Kerja Angggaran (RKA) 18. SOP ttg Penyusunan Dokumen Pelaksana Angggaran(DPA) 19. SOP ttg Penyusunan RKA Perubahan 20. SOP ttg Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 21. SOP ttg Laporan Neraca 22. SOP ttg Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing 23. SOP ttg Pengembangan, Pemeliharan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kebangsaan 24. SOP ttg Melaksanakan Operasi/kerjasama aparat Keamanan 25. SOP ttg Penyusunan kegiatan Bidang Kewaspadaan dini 26. SOP ttg Pelaksanan Pelaporan rencana aksi daerah penanganan Gangguan Keamanan Daerah 27. SOP ttg Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial 28. SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan 29. SOP ttg Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Bali 30. SOP ttg Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Guru-guru SLTA, Tokok-tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas 31. SOP ttg Penyusunan Renja Pengembangan dan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah		

						32.SOP ttg Penyusunan Renja Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas Provisi Bali 33.SOP ttg Penyusunan Renja penelitian dokumen dan penelitian lapangan pendaftaran organisasi kemasyarakatan Provinsi Bali 34.SOP ttg Penyusunan Renja Penguatan Demokrasi Lokal dalam meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,Tidak ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 38 orang. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.572 personil	0.33%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	57.14 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 14 org. ----------Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Kesbangpol 2. Renja Kesbangpol 3. RKA Kesbangpol	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.488.859.341,- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 5.005.329.707.432,57	1.90 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.488.859.341,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 5.005.329.707.432,57	1.90 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.844.942.175,34 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.550.000.000,-	84.50 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.5.643.917.166,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.990.916.796,-	94.21 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Laporan Operasional 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Neraca 5. CALK	Ada sebanyak 5 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Buku Inventaris - Laporan Rekonsiliasi Aset	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.535.101.425,42	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran 3. Website Kesbangpol 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 - Jumlah program nasional yang dilaksanakan BPBD Prov.Bali, sebanyak 0 program	0	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, Sebanyak 10 SOP yang terdiri dari: 28. SOP ttg Unit Layanan Pengaduan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali 29. SOP ttg Tanggap Darurat Bencana Provinsi Bali 30. SOP ttg Kegiatan Harian UPT.Pusdalops PB 31. SOP ttg Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini UPT. Pusdalops PB	Ada 10 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						32. SOP ttg Pusat Data dan Informasi Kebencanaan UPT. Pusdalops PB 33. SOP ttg Pelaporan UPT. Pusdalops PB 34. SOP ttg Tanggap Darurat UPT. Pusdalops PB 35. SOP ttg Pelayanan Kesehatan Pra Hospital (layanan ambulans) Emergency Service Response (ESR) UPT.Pusdalops PB 36. Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana 37. Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Bali		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 (satu) - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	100 %	Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan da Susunan Perangkat Daerah
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : 1 (satu) orang Arsiparis	Ada 3 (tiga) orang	Mengacu kondisi BPBD Prov.Bali terakhir/updated Tahun 2019.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						2 (dua) orang pustakawan		
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS BPBD Prov.Bali, sebanyak 60 personil	60 personil	Mengacu kondisi BPBD Prov.Bali terakhir/updated Tahun 2018.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 18 org.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 18 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 18 jbt.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 (tiga) jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 (tiga) jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja BPBD Prov.Bali, sebanyak 5 program. - Program Renja BPBD Prov.Bali yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja BPBD Prov.Bali.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA BPBD Prov.Bali, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA BPBD Prov.Bali, sebanyak 5 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan Renja BPBD Prov.Bali.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA BPBD Prov.Bali yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA BPBD Prov.Bali, sebanyak 5 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA tahun 2019 dan dokumen DPA BPBD Prov.Bali tahun 2019.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 28.732.212.289,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 25.064.903.210	87,24%	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 1.325.341.000,- - Total Belanja BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 25.064.903.210	5,29 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 2.273.781.036,- - Total belanja barang dan jasa BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 14.620.695.288,-	15,55 %	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 2.273.781.036,- - Total belanja BPBD Prov.Bali, sebesar Rp. 25.064.903.210	9,07%	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 (tiga) jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada sebanyak 3 (tiga) jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada, Jenis dokumennya: - Buku Inventaris BPBD - Buku Inventaris UPT Pusdalops PB	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 79.282.422.788,-	100 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Satelit 3. Website 4. Mobil Ambulan 5. Mobil Tangki Air 6. Mobil Toilet 7. Mobil Dapur Umum 8. Mobil Evalog (Evaluasi dan logistik) 9. Mobil Water Treatment 10. Perahu Karet 11. Mobil Truk Serbaguna	Jumlah sebanyak 11 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: **LINGKUNGAN HIDUP**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Pagu Rp.278.393.420,- Realisasi Rp.272.902.620,-). 2. Program Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pagu Rp.202.241.600,- Realisasi Rp.185.306.029,-). 3. Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (Pagu Rp.202.000.000,- Realisasi Rp.175.742.410,-). 4. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan (Pagu Rp.335.994.064,- Realisasi Rp.320.829.193,-). 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan (Pagu Rp.4.305.707.336,- Realisasi Rp.4.030.271.344,-).	5 Program	-

		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP Penilaian Dokumen AMDAL dan UKL-UPL. 2. SOP Pengelolaan Pengaduan Lingkungan. 3. SOP Kegiatan Kemitraan dalam Pengaduan Lingkungan Hidup. 4. SOP Kegiatan Inventarisasi GRK. 5. SOP Kegiatan Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna. 6. SOP Kegiatan Pemantauan Kualitas Air. 7. SOP Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara. 8. SOP Kegiatan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu. 9. SOP Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan. 10. SOP Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan. 11. SOP Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan. 12. SOP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. 13. SOP Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 14. SOP Pelaksanaan Pengelolaan TPA Regional Sarbagita.	14 Jumlah	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda No. 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. 3. Perda No.1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Ada	-
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 24 orang - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24 orang	100%	-

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada.	Tidak ada	-
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 63 personil. - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.324 personil.	0,56%	-
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklat pim sesuai penjenjangan, sebanyak 19 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 24 orang.	79,17%	-
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 orang. - Jabatan yang ada sebanyak 24 jabatan.	100%	-
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. DPA OPD	3 jenis dokumen	-

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	100%	-
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	-
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100%	-
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.16.439.560.476,- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.3.287.725.971.445,20	0,50%	-

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.15.321.515.738,69 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.16.439.560.476,-	93,20%	-
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.6.574.537.700,69 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.7.136.310.040,-	92,13%	-
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.746.978.038,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.9.303.250.436,-	94,02%	-
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. CALK 3. Neraca 4. LPE 5. LO	Ada sebanyak 5 jenis	Laporan Keuangan sedang dalam proses review oleh Inspektorat Provinsi Bali.
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, - Buku inventaris barang	Ada	-

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.19.573.224.145,-	-%	Aset yang tidak digunakan telah dihapuskan.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 21. Papan Pengumuman 22. Pos Pengaduan 23. Leaflet 24. Mobil keliling 25. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Website 2. Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter)	Jumlah sebanyak 2 jenis.	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Survey kepuasan tentang Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Ada	-

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	4 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 17 yang terdiri dari: **SOP Teknis** 38. SOP Lab Site Tata Kelola Pemerintah Desa 39. SOP Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan 40. SOP Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian 41. SOP Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa 42. SOP Petunjuk Teknis Gerbang Sadu Mandara 43. SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Desa	Ada 59 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						44. SOP Bimbingan Teknis SIM dan Pelaporan Pengelolaan BUMDESA 45. SOP Lomba Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan 46. SOP Pencairan Hibah Berupa Uang Kepada badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 47. SOP Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 48. SOP Peningkatan SDM Pengelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (PAMSIMAS) 49. SOP Pendataan Potensi Desa 50. SOP Penyusunan Peta Pengemabngan Kawasan Perdesaan 51. SOP Penyusunan Pedoman Strata Posyandu 52. SOP Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 53. SOP Monitoring dan Evaluasi Usuluhan Hibah Berupa Uang Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan 54. SOP Pelaksanaan bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat **SOP Pelaksanaan kegiatan Umum :** 1. SOP Pelaksanaan Pelatihan 2. SOP Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. SOP Perjalanan Dinas Luar Daerah 4. SOP Sarasehan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						5. SOP Pembuatan Surat Keputusan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja 6. SOP Pencairan Hibah Berupa Uang Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan **SOP terkait Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan :** 1. Pencarian Data dan Informasi 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DISPMD 3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DISPMD 4. Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran 5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DIPMD Pemerintah Provinsi Bali 6. Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahunan DISPMD Provinsi Bali 7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DISPMD 8. Penyusunan Laporan Tahunan DISPMD 9. Penyusunan Evaluasi Kinerja DISPMD 10. Penyusunan Penetapan Kinerja DISPMD 11. Penyusunan Renstra DISPMD Provinsi Bali **SOP Umum dan Kepegawaian :** 1. SOP Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						2. SOP Penyediaan jasa kebersihan kantor 3. SOP Penyediaan alat tulis kantor 4. SOP penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. SOP Penyediaan komponen Instansi listrik/penerangan bangunan kantor 6. SOP Penyediaan peralatan perlengkapan kantor 7. SOP Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. SOP Penyediaan Makan Minum Rapat 9. SOP Upacara Keagamaan 10. SOP Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 11. SOP Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12. SOP Pembangunan Sarana Gedung Kantor 13. SOP Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 15. SOP Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16. SOP Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 17. SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas 18. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 19. SOP Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Persdiaan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						20. SOP Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 21. SOP Surat Masuk 22. SOP Surat Keluar 23. SOP Pengadaan, Pencatatan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah 24. SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah 25. SOP Usul Pengapusan Barang Milik Daerah		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 53 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0.46%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA- Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 24.751.803.348 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 6.498.850.974.403	0,38%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.346.182.090.20 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 6.645.312.989.850,63	0,35 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 16.220.324.655,20 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.346.182.090.20	69.48 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.125.857.435 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.346.182.090.20	30,52 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1 LRA 2 Neraca 3 CALK	Ada/ Tidak Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. -Buku Invetaris -Laporan Rekonsilidasi	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.7.818.952.601	0 %	Pembilang: 9. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 10. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 26. Papan Pengumuman 27. Pos Pengaduan 28. Leaflet 29. Mobil keliling 30. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya 1. Papan Penguman 2. Kotak Saran/Pengaduan 3. Leafleat Kegiatan 4. Website DISPMD Provinsi Bali	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : Bali
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Bali
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Perempun dan Perlindungn Anak

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [2] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang di laksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program	100%	Lihat Program Nasional RKP 2019 untuk masing-masing urusan, terlampir. Program Nasional (RKP): 1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Perlindungan Anak Program SKPD : 1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan. 2. Penigkatan Perlindungan Perempuan 3. Peningkatan Perlindungan Anak
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 55. SOP tentang Pelayanan Pengaduan 56. SOP tentang Pelayanan Rujukan Kesehatan 57. SOP tentang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Sosial 58. SOP tentang Pelayanan Rujukan Rehabilitasi Sosial 59. SOP tentang Pelayanan Rujukan Bantuan Hukum		yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	100 %	1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% **(15 : 16) x 100% = 93,75%**	- Jabatan yang ada sebanyak ***15*** - Jabatan yang harus ada, sebanyak ***16***	93,75%	Ada 1 jabatan yang belum terisi adalah : 1. Kepala Bidang
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional.	Tidak Ada	Tidak ada.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi **(28: 11.381) x 100%**	- PNS SKPD , sebanyak ***28*** personil - Total PNS Provinsi, sebanyak **11.381** personil	**0,25 %**	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2019.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% **(12:15) x 100%**	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ***12*** org. - Pejabat yang ada, sebanyak ***15*** org.	80 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% **(15:15) x 100%**	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ***15*** org. - Jabatan yang ada, sebanyak **15** jbt.	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak ***3*** jenis, yg terdiri dari: 1**. Renstra SKPD 2018-2023** **2. Renja Tahun 2019** **3. RKA – Tahun 2019**	***3 (tiga)*** jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% **(4 : 4) x 100% = 100%**	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program	**100 %**	Mengacu pada dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% **(4 : 4) x 100% = 100%**	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.	**100 %**	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% **(4 : 4)x 100% = 100%**	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.	**100 %**	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2019.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% **9.421.525.748,75 x 100%** **6.498.850.974.403,96**	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. **9.421.525.748,75**,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **6.498.850.974.403,96**	**0,145 %**	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% **71.000.000,00 x 100%** **9.421.525.748,75**,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. **71.000.000,00** - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. **9.421.525.748,75**,-	0,75 %	Mengacu pada dokumen DPA-SKPD tahun 2019.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% **302.791.606,00 x 100%** 4**.163.874.230,00**	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.**302.791.606,00** - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4**.163.874.230,00**	7,27 %	Mengacu pada dokumen DPA-SKPD tahun 2019.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% **302.791.606,00 x 100%** **9.421.525.748,75**,-	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **302.791.606,00** Total belanja SKPD, sebesar Rp. **9.421.525.748,75**,-	3,13 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak *3* jenis, sbb: 1.**Neraca** 2.**LRA** 3.**CaLK**	Ada sebanyak 3 jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. (**Buku Inventaris Barang Milik Daerah**)	**Ada**	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp **3.275.210.617,00**	0 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 Tahun.
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 6. Papan pengumuman 7. Pos Pengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pelayanan Pengaduan P2TP2A	Ada(10) jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media		3. Kotak saran. 4. Mobil Keliling (Molin/Torlin) 5. Sekretariat KPPAD 6. Sekretariat FAD 7. Sekretariat Forum PUSPA 8. Pojok ASI 9. Telepon 10. Rumah Singgah Sementara		
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PARIWISATA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	**6 Program**	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada, sebanyak **1** yang terdiri dari: *1. SOP perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pariwisata (KTPP)*	Ada **1 SOP**	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Ada, yaitu : 1. Ranperda ttg Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan 2. Ranperda ttg Kontribusi Wisatawan utk Perlindungan Alam dan Budaya Bali (bersama Bapenda) 3. Rapergub ttg Tata Kelola Kepariwisataan	**Ada**	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak **21** - Jabatan yang harus ada, sebanyak **21**	**100 %**	*Eselon II (1 orang),* *Eselon III (4 orang),* *Eselon IV (15 orang)*

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada, yaitu jabatan fungsional; *1. Kehumasan (1 orang)*	**Ada**	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak **72** Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak **11.310** personil	**0,64 %**	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak **21** org. - Pejabat yang ada, sebanyak **21** org.	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak **21** org. - Jabatan yang ada, sebanyak **21** jbt.	**100 %**	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada, dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak **3** Jenis yang terdiri dari : *1. RENSTRA* *2. RENJA SKPD* 3. *RKA SKPD*	**3 jenis dokumen**	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak **5** program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak **5** program.	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak **5** program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak **5** program.	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak **5** program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak **5** program.	**100 %**	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 18.164.319.488,-** - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar **Rp.7.201.196.359.769,47**	**0,25 %**	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp.14.821.382.807,-** - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar **Rp.6.518.215.565.922,61**	**0,23 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 6.347.840.936,24** - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar **Rp.14.821.382.807,-**	**42,83 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar **Rp.8.473.541.871,-** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp.14.821.382.807,-**	**57,17 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Ada, Laporan keuangan sebanyak **5** Jenis sbb: *1. Neraca* *2. Calk* *3. LRA* *4. LO* 5. *LPE*	**Ada, sebanyak 5 jenis**	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, yaitu 1. *Buku Inventaris Barang* 2. *KIR*	**Ada**	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar **Rp.0,-** - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar **Rp.11.191.135.375,-**	**0,00 %**	Pembilang: 11. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 12. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 31. Papan Pengumuman 32. Pos Pengaduan 33. Leaflet 34. Mobil keliling 35. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada, berupa: *1. Papan Pengumuman* *2. Kotak Saran* 3. *Brosur, banner, CD*	**Ada sebanyak 3 jenis**	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	**Tidak ada**	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Provinsi : Bali
NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

3. **Urusan Kearsipan**
4. **Urusan Perpustakaan**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan Kearsipan	Urusan Perpustakaan	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	2 Program	3 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
			2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP tentang Layanan Arsip	SOP tentang Layanan Perpustakaan	1 Jumlah	1 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	-	Perda No. 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pergub No. 79 tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyusutan Arsip Pergub No. 66 tahun 2019 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis	-	Ada	Tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang terisi sebanyak 9 Jabatan yang ada, sebanyak 9	Jabatan yang terisi sebanyak 16 Jabatan yang ada, sebanyak 16	100 %	100 %	Eselon II = 1 Eselon III = 6 Eselon IV = 17
			5	Keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Fungsional Arsiparis 9 Orang	Funsional Pustakawan 16 Orang	Ada 9 Orang Fungsional Arsiparis	Ada 16 Orang Fungsional Pustakawan	Fungsional Arsiparis 9 Orang Fungsional Pustakawan 16 Orang
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak 22 Personil Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak 67 Personil Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0.00 %	0.01 %	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.

			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai perjenjangan, sebanyak7org. Pejabat yang ada, sebanyak 25 org.	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 14 org. Pejabat yang ada, sebanyak 25 org.	28 %	56,5 %	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	36 %	60 %	Sumber Data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di RENSTRA Perangkat Daerah RENJA Perangkat Daerah RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 Jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	umlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	umlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran Belaanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 15.526.921.979 Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 7.280.707.083.216	Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp -	0,21 %	-	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)

		Realisasi Belanja	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar Rp. 15.132.795.219 Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 6.520.590.315.648,24	Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar Rp. - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. -	0,00 %	-	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.305.087.884 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.132.795.219	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 470.927.700 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.132.795.219	15 %	3 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.356.779.635 Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.132.795.219	Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. -	82 %	- %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada Sebanyak 3 jenis	Ada Sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	1. KIR 2. KIB 3. Buku Inventaris	-	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, Rp. 165.567.636,36 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. 26.214.662.629,97 -	Asset yang tidak digunakan,Rp - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. - -	1 %	-	Pembilang: Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran 3. Mobil Keliling 4. Leaflet -	1. Papan Pengumuman 2. Kotak Saran 3. Mobil Keliling 4. Leaflet -	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data Urusan Pekerjaan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak 9 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 6 program
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 4 SOP yang terdiri dari: 1. Rekomendasi Teknis Galian 2. SOP Pelayanan Laboratorium UPT. Balai Peralatan dan Pengujian dan Penyewaan Alat Berat 3. SOP Pembayaran Pemakaian Kekayaan Daerah 4. SOP Menyiapkan Surat Tagihan Pemakaian Air Minum / Air Curah
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Peraturan - Perda Prov Bali No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 32 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 32
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Arsiparis Penyelia
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 181 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 10.802 personil
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 32 org.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan,

				kepangkatan	kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	sebanyak 32 org.
						- Jabatan yang ada, sebanyak 32 jbt.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari :
						1. RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023
						2. RENSTRA Dinas PUPR Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023
				-RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah		3. RENJA Dinas PUPR Provinsi Bali Tahun 2019
						4. RKA Dinas PUPR Provinsi Bali Tahun 2019
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.
						- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 14 program.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 494.964.392.538,-
						- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, 7.201.190.333.569,47
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 202.023.788.754,00
						- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 336.313.123.737,41
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.072.934.075,00
						- Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 123.490.996.767,41
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.072.934.075,00
						- Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 336.313.123.737,41
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada laporan keuangan	Apabila Ada, Laporan keuangan ada,

				(LRA, Neraca, Calk)	Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	sebanyak 1 jenis, sbb: 1. Laporan Keuangan Dinas PUPR Provinisi Bali
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan 4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
						6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan 7. Kartu Inventaris Barang (KIB) L Aset Lainnya
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 . - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.027.624.979.300
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website 3. Leaflet
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang : 1. Laporan Kepuasan Pelanggan Pengelolaan Air Limbah 2. Laporan Analisa Kepuasan Pelanggan Air Minum 3. Laporan Responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboraturium Pengujian dan Alat Berat

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KEBUDAYAAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Tidak Ada Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	-	-	-	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Cq. Kementerian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	4/4 x 100% yang terdiri dari SOP pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum Bali, dan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Ada	100%	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	5/5 x 100%	Perda Pelaksanaan sebanyak 5 Perda yang seharusnya sebanyak 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106 Tahun 2013	100%	

						tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia-Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi- Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman dan Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan-Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penghargaan Seni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi		

						Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan-Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian Struktur Jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	32/33 x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 32 jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 33 jabatan	96.97%	
			5	Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3 Jabatan	- Pustakawan 3 orang - Pranata Humas 1 orang - Penerjemah 2 orang	Ada	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang releven dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	140/11.572 x 100%	- PNS Perangkat Daerah sebanyak 140 personil - Total PNS Provinsi sebanyak 11.572 personil	1,21 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyarakatan pendidikan pelatihan kepemimpinan	22/32 x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sesuai penjejangan sebanyak 22 orang - Pejabat yang ada sebanyak 32 orang	68,75 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	32/32 x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 32 orang - Jabatan yang ada	100%	

						sebanyak 32 jabatan		
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan Dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	Ada	- RENSTRA - RENJA - RKA - RKPD	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Perangkat Daerah	9/9x100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 Program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 9 Program	100%	
		Sinkronisasi Program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	9/9x100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 Program - Program dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 9 Program	100%	

		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	9/9x100%	- Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 program - Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 9 Program	100%	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Rp. 74.503.558.594,20/ Rp. 6.498.850.974.403,00 x100%	- Total anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 74.503.558.594,20 - Total Anggaran Belanja APBD sebesar Rp. 6.498.850.974.403,00	1,15 %	
		Besaran Belanja Modal	14	Belanja Modal terhadap total Belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Rp. 3.719.429.230,00/ Rp. 65.065.563.035,97 x100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.719.429.230,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 65.065.563.035,97	5,72 %	

		Besaran Belanja Pemeliharaan	15	Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Rp. 3.530.395.408,00/ Rp. 42.315.335.433,97 x100%	- Realisasi Belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.530.395.408,00 - Total Realisasi Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah sebesar Rp. 42.315.335.433,97	8,34 %	
			16	Total Belanja Pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Rp. 3.530.395.408,00/ Rp. 65.065.563.035,97 x100%	- Realisasi Belanja Pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.530.395.408,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 65.065.563.035,97	5,43 %	
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada	Laporan Keuangan ada, sebanyak 4 jenis sbb : - Tabel Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Fungsional - Laporan Kinerja	Ada 4 Jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen Asset Perangkat Daerah	18	Adanya Inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah	Ada	- Buku Inventaris - Laporan Mutasi Barang	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Rp. 2.545.125.997,19 / Rp. 311.145.400.160,51 X 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 2.545.125.997,19	0,82 %	

						- Aset yang dikuasai Perangkat Daerah sebanyak Rp. 311.145.400.160,51		
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil Keliling Pengumuman di Mass Media	4 fasilitas/ prasarana partisipasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	4 jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	-	Tidak Ada	Tidak Ada

]

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Provinsi : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Industri
2. Urusan Perdagangan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Pengembangan Industri Anggaran : Rp. 3.696.233.052 Realisasi : Rp. 2.871.419.416 2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan Anggaran : Rp. 197.121.684 Realisasi : Rp. 189.673.348	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Anggaran : Rp. 143.288.000 Realisasi : Rp. 142.178.060 2. Program Pengembangan Ekspor Anggaran : Rp. 478.146.102 Realisasi : Rp. 462.792.945 3. Program Perlindungan Konsumen Anggaran : Rp. 115.000.000 Realisasi :	2 Program	4 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

							4. Program Pengembangan Pelayanan Penguji Mutu Barang Anggaran : Rp. 537.252.684 Realisasi : Rp. 489.766.877			
			2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ------- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	ada sebanyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA 2. SOP tentang Permohonan Menjadi Eksportir Baru 3. SOP Verifikasi Luar Negeri 4. SOP Pembelian Blangko/Form SKA 5. SOP Penanganan Pengaduan 6. SOP Pelayanan Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (kopi, panili dan kakao)	……. Jumlah	5 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda No. 7 Tahun 2019	1. Perda Bali No. 7 Tahun 2019 2. Pergub Bali No. 99 Tahun 2018	Ada	Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 7 - Jabatan yang ada, sebanyak 7	- Jabatan yang terisi sebanyak 20 - Jabatan yang ada, sebanyak 20	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Bidang Perindustrian, jabatan fungsional penyuluh perindag	1. UPTD. BPSMB. Jabatan fungsional penguji mutu barang 2. Bidang Perdagangan, Jabatan fungsional penyuluh perindag	Ada	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak 22. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak 74. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0,0019	0,0065	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai perjenjangan, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 7 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.	71,42 %	90 %	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.	100 %	100 %	Sumber Data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: 1. ---------- 2. ---------- 3. ----------	Dokumen Perencanaan yang ada pada tahun 2019 sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak -2 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -2 program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak - 2 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belaanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.877.405.835 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 7.201.196.359.769,47	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 12.168.770.260 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 7.201.196.359.769,47	0.10 %	0.17 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja	14	RealisasiBelanja PerangkatDaerah terhadap total Realisasi Belanja APBD belanja	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar Rp. 5.497.293.324 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.6.520.590.315.648,24	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar Rp. 9.007.038.722 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.6.520.590.315.648,24	0.08 %	0.14 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.756.879.678 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.497.293.324	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.561.526.250 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.168.076.463	50,15 %	15,36 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.740.395.646 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.497.293.324	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.606.550.213 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 10.168.076.463	49,85 %	84,64 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ------- jenis, sbb: 1. …… 2. …..	1 Neraca 2. LRA 3. Calk 4. LO 5. LPE	Tidak Ada	Ada sebanyak 5 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. -	KIB Buku Inventaris -	Tidak ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. …. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp….. -	- Asset yang tidak digunakan,Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. 22.858.634.990 -	..... %	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
						Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (1) Industri	Urusan (2) Perdagangan	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan/ kotak saran 3. Pengumuman di media masa	Jumlah sebanyak ---- jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	1. Survey pelayanan penerbitan surat keterangan asal 2. Survey kepuasan pelanggan terhadap pengujian mutu barang	Tidak ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI

NAMA OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

- **Urusan Ketenagakerjaan**
- **Urusan Transmigrasi**

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasinya	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasinya	Ada 6 program, dengan nilai anggaran Rp. 13.071.945.798 Serta realisasi Rp. 10.347.103.156,64	Ada 1 Program, dengan nilai anggaran Rp. 157.980.000 Serta realisasi Rp. 100.203.300	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
			2	Keberadaan Standard Operasional Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 8 yang terdiri dari: 1. SOP Sekretariat 2. SOP Pentaluas 3. SOP Lattas 4. SOP BHI 5. SOP Pengawasan 6. SOP ESDM 7. SOP UPTD BLK-IP 8. SOP UPTD HYPERKES	Apabila Ada, sebutkan ada yang terdiri dari: 1. SOP Ketransmigrasian	Ada 8 SOP	Ada 1 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	-Perda No. 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan				Sumber data di Biro Hukum
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	-Jabatan yang ada sebanyak 28 -Jabatan yang harus ada, sebanyak 29	- Jabatan yang ada sebanyak 1 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 1	96,55%	100%	Sumber data BKD/DUK Perangakat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : -Pengantar Kerja: 8 -Pengawas: 24 -Mediator : 2 -Instruktur: 12 -Perekayasa : 2 -Peranata Lab : 2 -Arsiparis : 2 -Penguji K3 : 3	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional :-	Ada 55 Jafung		Sumber data BKD/ Perangakat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	-PNS Perangkat Daerah, sebanyak 135 personil -Total PNS Provinsi, sebanyak 11.572 Orang	- PNS Perangkat Daerah, sebanyak 4 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.572 Orang			Sumber data BKD/ Perangakat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	-Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 28 org. -Pejabat yang ada, sebanyak 28 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, - Pejabat yang ada,	100%		Sumber data BKD/ Perangakat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 28 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 29 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, - Jabatan yang ada,	96,55%		Sumber data BKD/ Perangakat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 2 jenis yang terdiri dari : 1. DIPA 2. POK	3 jenis dokumen	2 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program	100%	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100%	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja Perangkat Daerah ybs.

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	-Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. -Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	-Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. -Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100%	100%	Sumber data dari dokumen RKA Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA Perangkat Daerah ybs tahun 2019 .
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total anggaran APBD x 100%	-Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 40.342.712.421,88 -Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 40.342.712.421,88	-Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 157.980.000 -Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 157.980.000			Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	-Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 14.213.348.634,21 -Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.213.348.634,21	-Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 100.203.300 -Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 100.203.300	100 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.387.579.515,00 -Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.313.551.934,21	-Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar -Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar	82,32%		

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100 %	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Sebesar Rp. 22.955.114.906,88 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 40.342.712.421,88	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah Sebesar - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar	57 %		Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak Ada jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak Ada jenis, sbb: 1. CaLK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 1 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. **Buku Inventaris Barang Pemerintah Provinsi Bali**	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Tidak ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.69.947.039.907,20	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp.0			Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
										Penyebut : Aset layak pakai tetapi yang tidak digunakan / dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas /prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mess Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mess Media	Sebutkan jenisnya :	Jumlah sebanyak 5 jenis.		Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (difoto, dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh Perangkat Daerah ybs)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	6 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 37 yang terdiri dari: 45. SOP . Profil dan Informasi Pendidikan 46. SOP Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 47. SOP Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 48. SOP Olympiade Sains Nasional (OSN) SMA Tk. Provinsi ke Tk. Nasional 49. SOP Penyelenggaraan Pembinaan SMA 50. SOP Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Reguler Bidang Pendidikan SMA	37 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						51. SOP Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA ke Tingkat Nasional Tahun 2019. 52. SOP Oympiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SMA Tk Provinsi ke Tingkat Nasional. 53. SOP Lomba Kompetensi Siswa SMK 54. SOP FLS2N Tingkat SMK Tahun 2019. 55. SOP Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan SMK berbasis WEB Tahun 2019 56. SOP Prosedur Buku Pelaksanaan Kegiatan 57. SOP Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 58. SOP Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59. SOP rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah 60. SOP Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 61. SOP Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 62. SOP Penyediaan Makanan dan Minuman 63. SOP Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 64. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		

						65. SOP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 66. SOP Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali 67. SOP Pembuatan Studio Mini 68. SOP Pembuatan Konen Pembelajaran TIK Bidang Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal 69. SOP dan Lomba Penyusun an Media Pembelajaran Berbasis Tik 70. SOP Manajemen Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbais TIK 71. SOP Penilaian Penetapan dan Penataran Angka Kredit Guru dan Pengawas Tahun 2019 72. SOP Pengkajian Nilai-nilai Kaearifan Lokal Bali dan Workshop GTK jenjang SMA/SMK/SLB 73. SOP Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah 74. SOP Kurikulum Pelatihan Kurikulum Bagi Guru SMA 75. SOP Penataan dan Pemerataan Guru 76. SOP Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi 77. SOP Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Khusus		

						78. SOP Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik reguler Bidang Pendidikan Khusus. 79. SOP Lomba Prestasi dan Kreativitas Siswa SLB 80. SOP Pembinaan Lomba Prestasi dan Kreativitas Siswa SLB ke Tingkat Nasional. 81. SOP Pembinaan dan Penyuluhan Bahasa bali Tahun 2019.		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 128 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25	19,53.%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada ~~atau tidak ada~~ jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. ---------- Analis Kepegawaian 2. ---------- Arsiparis 3. ---------- Pranata Humas 4. ---------- Pengawas 5. ---------- Guru	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019

4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 110. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.038 personil	0,99 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 59 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 128 org.	46,09 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhi r/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 25 org. ----------Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.305.821.997.908,85 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 7.201.196.359.769,47	18,13 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.203.123.636.788,99 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.6.518.215.565.972,61	18,45 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.408.294.712.726,99 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.838.997.936.962,08	22,2%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.794.828.924.062,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.679.217.628.960,53	16,98%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.LRA 2. Neraca 3.CALK	Ada/ ~~Tidak Ada~~ sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIR 2. KIB	Ada/ ~~tidak ada~~	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.401.644.000 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 49.065.216.943,05	0,82 %	Pembilang: 13. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 14. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 36. Papan Pengumuman 37. Pos Pengaduan 38. Leaflet 39. Mobil keliling 40. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Massa Media	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	~~Ada~~/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2 : Format IKK untuk Provinsi

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SKPD Penanggung jawab : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [3] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 4 program **4/4 x 100%**	***100 .%***	Dispora mempunyai 1 DIPA yang terdiri 4 Program.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)	**Ada**	**1 (satu) SOP Yaitu SOP Kegiatan Tahun Anggaran 2019**	***ada***	
2	**KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN t x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 Perda - PERDA yang seharusnya sebanyak 2	***50 %***	- Perda yang ada adalah Perda Keolahragaan. - Perda yang harus ada adalah Perda Kepemudaan dan Keolahragaan
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 % **19 x 100%**	- Jabatan yang terisi sebanyak 19 orang - jabatan yang ada , sebanyak 21	***90,48 %***	Jabatan yg kosong Yaitu : Kepala Dinas dan Kepala Seksi Organisasi kepemudaan dan

					21			kepramukaan
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD **ada**	Fungsional Analis Kepegawaian Muda	***ada***	
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan SKPD, sebanyak 54 .personil - Total PNS Provinsi , sebanyak 11.310 personil	***0,51 %***	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 19 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 19. org.	***100 %***	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% **19x 100%** **19**	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 19 Org - Jabatan yang ada sebanyak 21..jbt.	***90,48 %***	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yang terdiri dari : • RENSTRA SKPD • RENJA SKPD • RKA-SKPD	3. Jenis dokumen	

		Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan program Renja RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% **7/7 x 100%**	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5	***100%***	Dokumen RKPD.dan Renja
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA PD yang tidak diakomodir dalam RKA PD	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD dibagi jumlah program dalam RKA PD x 100% **7/7 x 100%**	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 - Program dalam RKA SKPD , sebanyak 5 Program	***100%***	Renja dan RKA 2019
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD	Jumlah Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA PD dibagi jumlah program dalam DPA PD x 100% **7/7 x 100%**	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 5 program - Program dalam DPA SKPD , sebanyak 5 Program	***100. %***	DPA 2019
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi Anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 24.627.450.696,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp.7.201.196.359.769,47	***0,34 %***	Total anggaran APBD 2019
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (PD)	Belanja modal dibagi total belanja PD x 100%	- Belanja modal SKPD sebesar Rp 227.709.600,00 - Total belanja SKPD sebesar Rp . 16.604.050.696,00	***1,37 %***	Pagu APBD 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar, Rp. 42.400.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD sebesar	***0,26 %***	Pagu APBD 2019

						Rp .16.163.646.096,00		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja PD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja PD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan PD sebesar, Rp 31.705.000,- Total Realisasi belanja PD sebesar Rp . 14.138.058.901,04	***0,22 %***	Realisasi APBD 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah (PD)	17	Keberadaan laporan keuangan PD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan PD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila ada, Laporan keuangan ada, Sebanyak 3 Jenis, sbb : 1 Neraca 2. LRA 3. CALK	ada Sebanyak 3 jenis :	laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk) 2019
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen aset Perangkat Daerah (PD)	18	Adanya inventarisasi barang atau asset PD	Ada atau tidak inventarisasi barang asset PD **Ada**	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya 1**. KIR, KIB,**	***ada***	***Dokumen Inventaris barang***
		Penggunaan asset Perangkat Daerah (PD)	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh PD	Jumlah asset yang tidak digunakan PD dibagi total asset yang dikuasai PD x 100%	- Aset yang tidak digunakan , sebanyak Rp. 108.178.000,00 - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 18.925.544.845,88	***0,57 %***	Inventarisasi minimal dilakukan 1 kali dalam 5 tahun
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 11. Papan Pengumuman 12. Pos Pengaduan 13. Leaflet 14. Mobil keliling 15. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1 Papan Pengumuman 2. Tabloid 3. 4. …… 5. ……	Jumlah sebanyak 2 jenis	Sebutkan jenis fasilitas / prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang …….	***Tidak ada***	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKKPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI **: BALI**
NAMA SKPD **: DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI**
URUSAN YANG DILAKSANAKAN **:**
1. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
						1. Urusan Perhubungan	1. Urusan Perhubungan	
1	2	3	4	5	6	7 (A)	8 (A)	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Program Nasional yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Daftar program Nasional (RKP) - Daftar program Daerah (RKPD)	-	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah cq. Departemen/LPND	2	Keberadaan Standar Operational Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau kepala SKPD	- Ada	
2	KETAATAN THD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg. SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg. SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -NIHIL- - PERDA yang seharusnya sebanyak 6 SPM	-	Belum terdapat PERDA SPM terkait Perhubungan
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 37 - Jabatan yang ada, sebanyak 37	(37 : 37) x 100% = 100%	

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
						1. Urusan Perhubungan	1. Urusan Perhubungan	
1	2	3	4	5	6	7 (A)	8 (A)	9
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Sekertariat/ Penata Humas	1 Orang	1 Orang Jafung Pranata Humas di Sekertariat
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 107 personil. - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	(107 : 11.310) x 100% = 1,00 %	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 23 orang. - Pejabat yang ada, sebanyak 37 orang	(23:37) x 100% = 62,16%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 37 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 37 jabatan	(37:37) x 100% = 100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Dokumen sebanyak 3 jenis: - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	3 jenis dokumen	

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
						1. Urusan Perhubungan	1. Urusan Perhubungan	
1	2	3	4	5	6	7 (A)	8 (A)	9
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 9 progam - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 9 program	(9 : 9) x 100 % = 100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja SKPD yang bersangkutan.
		Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 progam - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 9 Program	(9 : 9) x 100 % = 100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan Renja SKPD yang bersangkutan
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 progam - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 Program	(9 : 9) x 100 % = 100%	Mengacu Dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Anggaran	13	Realisasi Belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 27.718.778.145,60 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 6.834.255.626.694	Rp. 27.718.778.145,60 / Rp.6.834.255.626.694 X 100 = 0,41%	Mengacu Dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2019

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
						1. Urusan Perhubungan	1. Urusan Perhubungan	
1	2	3	4	5	6	7 (A)	8 (A)	9
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.278.147.200 - Total Belanja SKPD, sebesar . Rp.27.718.778.145	Rp. 1.278.147.200 Rp. 27.718.778.145 X 100 = 4,61 %	Mengacu LKD tahun 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 1.354.804.900 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 13.791.033.299,60	Rp. 1.096.673.950 Rp. 13.791.033.299,60 X 100 = 8,0%	Mengacu LKD tahun 2019
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 1.354.804.900 - Total belanja SKPD, sebesar, Rp. 27.718.778.145	Rp. 1.354.804.900 Rp. 27.718.778.145 X100 = 4,89%	Mengacu APBD tahun 2019
		Laporan Keuangan	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila ada, laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK	Ada sebanyak 3 jenis	Teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Buku Inventaris Barang Daerah ada	ada	
		Penggunaan asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	- Asset yang dikuasai sebanyak 6 jenis aset meliputi: Tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun

NO.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET.
						1. Urusan Perhubungan	1. Urusan Perhubungan	
1	2	3	4	5	6	7 (A)	8 (A)	9
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di sosial media (Facebook dan Instagram) 4.Mobil Pengawasan(isuzu elf)	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan informasi pelayanan AKDP 2. Kondisi pelayanan , rute, waktu pelayanan, visi misi dan slogan Trans Sarbagita 3. Pengumuman Trans Sarbagita (sosial media dan call center) 4. Mobil pengawasaan angkutan barang	4 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN I. 2 : Format IKK untuk Provinsi

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (komunikasi, informatika, statistik dan persandian)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak 6 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 6 program	100 %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada ----------SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak ----- - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	.....%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak -----. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ---------- personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ----------org.	..... %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ---------- jbt.	..... %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ..... 2. ..... 3.	..... jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ---------- program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -------	..... %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak ---- - program.	..... %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ----- program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ---- - program.	..... %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, ----- - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp, -----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.-----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. ----- - Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. ------	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1…….. 2…….. 3……..	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp ------. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	..... %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak ------ jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2 : Format IKK untuk Provinsi

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. **Urusan Komunikasi Informatika**
2. **Urusan Statistik**

No	ASPEK	FOK US	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) ------	Urusan (2) ------	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(	(7	(8A)	(8B)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	100 %	100 %	Lihat Program Nasional untuk masing- masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 20 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan dokumen perencanaan (3 SOP) 2. SOP ttg umum dan kepegawaian (16 SOP) 3. SOP ttg penyusunan program dan rencana bidang pengembangan dan komunikasi publik.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP ttg pelaksanaan penyusunan data dan informasi hasil pemb. 2. SOP ttg Pengumpulan Data Statistik Pol. Hukum dan HAM 3. SOP Analisis pengolahan data statistik 4. SOP pelaksanaan forum satu data	Ada 20 SOP / Ada:	Ada 4 SOP / Ada:	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak - 1	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 21 - Jabatan yang ada, sebanyak 21	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) ------	Urusan (2) ------	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(	(7	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Arsiparis, kehumasan.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --	Ada	Tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah sebanyak 41 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak -----	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 5 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil	.....	.....	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak	- Pejabat yang telah diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	100 %	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	Sumber Data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: Digabung .	3 jenis dokumen	Digabung	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jeni		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) ------	Urusan (2) ------	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(	(7	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak - 1 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	1 0 0 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.24.758.824.9	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 640.380.200 Total Anggaran Belanja	..... %	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerahx 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.130.359.90 4	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Belanja Perangkat Daerah	8,39 %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.696.286.036 - Total belanja	- Total Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. - - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah,	4,54 %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jeni		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) ------	Urusan (2) ------	Urusan (1) ------	Urusan (2) ------	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(	(7	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total Realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.	- total realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total realisasi belanja	2,63 %	0. %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 1 jenis, sbb: 1. Laporan Keuangan (Neraca, LRA Calk)	Apabila Ada(digabung) Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. ..... 2.	Ada	d i g a b u n g	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Digabu ng	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai PD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. ……. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp.5.824.876.476,37	- Asset yang tidak digunakan,Rp ----- -. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. …..	0%	0%	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Kotak Saran 3. Pos Pengaduan 4. Banner 5. Mobil Keliling 6. Leafet 7. Pelayanan Informasi	Sebutkan jenisnya 1. Buku Bali Membangun 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak -- 7 jenis.	Jumlah sebanyak -- 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: **SOSIAL**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	6 Program	1. Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman anggaran Rp.5.500.000.000,- dengan realisasi Rp.5.334.307.800,- 2. Program Penanganan Fakir Miskin anggaran Rp.70.000.000,- dengan realisasi Rp.66.250.000,- 3. Program Rehabilitasi Sosial anggaran Rp.1.318.100.000,- realisasi Rp.1.007.887.616,- 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial anggaran Rp.397.200.000,- realisasi Rp.397.200.000,- 5. Program Pelayanan Sosial anggaran Rp.2.137.357.160,- realisasi Rp.2.075.243.860,- 6. Program Pemberdayaan Sosial anggaran Rp.300.634.000,- realisasi Rp.298.447.000,-

		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 buku yang terdiri dari: 82. SOP ttg Standar Pelayanan	1 Buku	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Peratuuran Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Ada	Sumber data Dinas SOsial
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 25 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 8. -Fungsional Arsiparis: 1 -Fungsional Pustakawan: 1 -Fungsional Peksos: 3 -Fungsional Pensos : 3	Ada 8 Jafung	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 110. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0,0097	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 25 org.	80 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 25 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak -----jenis, yg terdiri dari: - 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA- Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 program.	85,71 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 28.397.573.224,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 7.201.196.359.769,47	0,394 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 26.971.585.845,00 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.6.645.312.989.850 ,63	0,4 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.699.420.061,00 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 26.971.585.845,00	47,08 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.272.165.784,00 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 26.971.585.845,00	52,91 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 1 buku, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada/ dalam 1 buku	Sumber data dari Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Bali.
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 4.880.838.833,07	0 %	Pembilang: 15. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 16. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 41. Papan Pengumuman 42. Pos Pengaduan 43. Leaflet 44. Mobil keliling 45. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Posko Bencana dan Posko PKH 3. Leaflet 4. Kotak Saran 5. Website dan email 6. Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 6 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : Bali
NAMA OPD : Dinas Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Bali
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanian (Pilihan)

Diisi oleh OPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [4] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak **5** program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak **5** program	**5 X 100%** **5** **= 100 %**
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ---137 bh-- yang terdiri dari: **1. 97 SOP bersifat pendukung** **2.40 SOP bersifat teknis**	**Ada 137 bh SOP**

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak **2** - PERDA yang seharusnya, sebanyak **2**	**2 X 100%** **2** **= 100 %**
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak - Jabatan yang harus ada, sebanyak	**37 X 100%** **40** = **92,50 %**
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS OPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS OPD , sebanyak **214** personil - Total PNS Provinsi, sebanyak **11.324.000** personil	**214** **11.572** **= 0,018%**
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak **31** org. - Pejabat yang ada, sebanyak **40** org.	**31X 100%** **40** = **77,50%**
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak **31** org. - Jabatan yang ada, sebanyak **40** jbt.	**31 X 100%** **40** **= 77,50%**

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD -RENSTRA OPD -RENJA OPD -RKA-OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: **1. Renstra.** **2.Renja** **3. RKA** **4.Tapkin** **5.IKU**	**5 jenis dokumen**
		Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program OPD	10	Jumlah Program OPD yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program OPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja OPD, sebanyak **6** program. - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD,sebanyak **6**	**10 X 100%** **10** = **100%**
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak **10** program. - Program dalam RKA OPD, sebanyak **10** program.	**10 X 100%** **10** = **100%**
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA OPD diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD, sebanyak **10** program. - Program dalam DPA OPD, sebanyak **10** program.	**10 X 100%** **10** = **100%**

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran OPD, sebesar Rp, **66.587.667.356,-** - Belanja APBD, sebesar Rp**. 6.634.000.000.000**	**Rp. 66.587.667.356/ 6.634.000.000.000 Rp. = 1,00%**
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Realisasi Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	- Realisasi Belanja Modal OPD, sebesar Rp. **9.941.298.401,-** - Total Anggaran Belanja OPD, sebesar Rp. **66.587.667.356**	**Rp. 9.941.298.401/ Rp. 66.587.667.356** Rp**. = 14,92%**
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. **400.412.004** - Total Realisasi Belanja barang dan jasa OPD, sebesar Rp. **20.566.895.461**	**Rp. 400.412.004 / Rp. 20.566.895.461 Rp. = 1,94%**
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja OPD x 100%	- total Realisasi Belanja pemeliharaan OPD, sebesar Rp. **400.412.004** - Total Realisasi Belanja OPD, sebesar Rp. **66.587.667.356**	=**Rp. 400.412.004/ Rp. 66.587.667.356 = 0,60%**
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (LRA)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (LRA)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: **1.LRA** **2.Neraca** **3. CaLK**	**Ada sebanyak 3 jenis**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. **Tanah, bangunan, kendaraan**	**Ada**
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **0** asset. - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak **3** asset.	**0 X 100%** **3** = **0%**

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 16. Papan Pengumuman 17. Pos Pengaduan 18. Leaflet 19. Mobil keliling 20. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya **1. Papan pengumuman.** **2. Pos pengaduan.** **3. Leaflet.** **4. Radio/TV.** **5. Mobil keliling.**	**Jumlah sebanyak 5 jenis.**
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	**tidak ada**

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR (URUSAN KOPERASI DAN UKM)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya Anggaran : 7.656.995.975 Realisasi: 7.318.540.908	5 . Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----------yang terdiri dari: 83. SOP ttg ----- 84. SOP ttg ----- 85. SOP ttg ----- 4. Dst -----	…… Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 25 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 25	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 52 . Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0,46 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 22 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 25 org.	88 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 25 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 25 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak -----jenis, yg terdiri dari: 1. 1 Renstra 2. 2 Renja 3. 2 RKA	5 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.

6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.946.333.683,50 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **17.788.877.561,11** - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. **9.646.386.242,11** - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. **17.788.877.561**	54,23 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. **8.142.491.319** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp**. 17.788.877.561**	45,77 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1.LRA 4. NERACA 2. LPE 5. CALK 3. LO	**Ada**/ Tidak Ada sebanyak 5 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Ada BUKU INVENTARIS BARANG (BMD) BARANG MILIK DAERAH	**Ada/** tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.— (TIDAK ADA) - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar **Rp.22.299.448.844**	..... %	Pembilang: 17. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 18. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 46. Papan Pengumuman 47. Pos Pengaduan 48. Leaflet 49. Mobil keliling 50. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak ------ jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

PROVINSI : BALI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	9 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pelayanan Sertifikat Mutu (Standar ISO 9001)	4 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						2. SOP tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan (ISO 17025) 3. SOP tentang Cara Pembenihan Yang Baik (CPIB) 4. SOP Prosedur Penerbitan Izin Perikanan		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan 1. Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian Perikanan dan Industri Lokal Bali	Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 24 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1. Pranata Humas 2. Arsiparis Pelaksana 3. Analis Kepegawaian 4. Analis Pasar	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 102 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.324 personil	0,9 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.

		Daerah yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 24 org.	4,16 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 24 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA OPD 2. RENJA OPD 3. RKA OPD	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

		RKPD		Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program.		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 22.297.388.484 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 22.297.388.484	100%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.19.202.115.696	100%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019

				APBD	100%	- Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.19.202.115.696		
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	-Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.937.002.980 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.202.115.696	30,91 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.265.112.716 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.202.115.696	69,08 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada (Buku Barang Pakai Habis)	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.5.807.000 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 122.315.715.023,82	0,0047%	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil keliling 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : Bali
NAMA SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Bali
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanian

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [5] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 (dua)-program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 (dua) program	100 %	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 107 SOP yang terdiri dari: 60. SOP Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 61. SOP Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) 62. SOP Kegiatan Penyediaan Foto Copy 63. SOP Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 64. SOP Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 65. SOP Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 66. SOP Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 67. SOP Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 68. SOP Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 69. SOP Kegiatan Pencetakan Laporan 70. SOP Kegiatan Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas 71. SOP Kegiatan Pengadaan, Pencatatan dan	Ada 107 SOP	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Pendistribusian Barang Milik Daerah 72. SOP Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Persediaan 73. SOP Kegiatan Usul Penghapusan Barang Milik Daerah 74. SOP Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan 75. SOP Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76. SOP Kegiatan Persiapan Administrasi Rapat- Rapat dan Koordinasi 77. SOP Kegiatan Pengelolaan Surat Keluar 78. SOP Kegiatan Pengelolaan Surat Masuk 79. SOP Kegiatan Penyediaan Upacara Keagamaan 80. SOP Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 81. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disnakkeswan Provinsi Bali 82. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 83. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Disnakkeswan Provinsi Bali 84. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disnakkeswan Provinsi Bali 85. SOP Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						(PPAS) Tahunan Disnakkeswan Provinsi Bali 86. SOP Penyusunan DPA 87. SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran Disnakkeswan Provinsi Bali 88. SOP Penyusunan Kinerja Disnakkeswan Provinsi Bali 89. SOP Penatausahaan Keuangan 90. SOP Bendahara Pengeluaran 91. SOP Bendahara Penerimaan 92. SOP Urusan Verifikasi SPJ /Pembantu Verifikasi SPJ 93. SOP Urusan Penyiapan SPM 94. SOP Pembantu Dokumen Pengeluaran Uang 95. SOP Pengurus Gaji 96. SOP Pembuat SPJ Fungsional dan SPJ Administratif 97. SOP Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 98. SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja Disnakkeswan Provinsi Bali 99. SOP Laporan Tahunan Disnakkeswan 100. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disnakkeswan 101. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Disnakkkeswan 102. SOP Penyusunan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Informasi Data Peternakan 103. SOP Penyusunan Cacah Jiwa Ternak 104. SOP Penyusunan Neraca Bahan Makanan Ternak 105. SOP Penyusunan Survey Daging 106. SOP Penyusunan Usaha Pemilikan Ternak 107. SOP Pengawasan dan Perbibitan Ternak 108. SOP Pengawasan dan Pengembangan Ternak Non Ruminansia 109. SOP Pengembangan Ternak Ruminansia 110. SOP Penilaian Kelompok Tani Ternak 111. SOP Pengawasan dan Pengolahan Pakan Ternak di Kelompok 112. SOP Proses Penyelesaian Hibah 113. SOP Pembinaan Permodalan Kelompok Tani Ternak 114. SOP Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan 115. SOP Melaksanakan Pengolahan Hasil Peternakan, Pengawasan Mutu Produk Pangan Non Pangan, Monitoring Harga Pasar di Pasar Tradisional dan Pasar Hewan 116. SOP Rekomendasi Lalulintas Hewan dan Produk Asal Hewan		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						117. SOP Penerbitan Sertifikan NKV 118. SOP Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan Sementara (IKPHS) 119. SOP Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif 120. SOP Vaksinasi Rabies 121. SOP Euthanasia / Eliminasi 122. SOP Penanganan Kasus Gigitan 123. SOP rekomendasi Distributor Obat Hewan 124. SOP Pemeliharaan Ternak Sapi Pejantan 125. SOP Pemotongan Kuku Ternak Sapi Pejantan 126. SOP Prosesing Semen Beku 127. SOP Pemeliharaan Ternak Babi 128. SOP Distribusi Semen Beku 129. SOP Distribusi Semen Cair 130. SOP Prosesing Semen Cair Babi 131. SOP Penyusunan Jadwal Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Pelayanan IB 132. SOP Kegiatan Surat Menyurat 133. SOP Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 134. SOP Kegiatan Penyediaan Jasa Cleaning		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Service 135. SOP Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 136. SOP Kegiatan Pencetakan Laporan 137. SOP Kegiatan Penyediaan Foto Copy 138. SOP Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 139. SOP Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 140. SOP Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 141. SOP Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi ke Luar Daerah 142. SOP Kegiatan Penyediaan Banten 143. SOP Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor 144. SOP Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor,Kendaraan,Peralatan dan Perlengkapan 145. SOP Pelaksanaan Investigasi dan Pengambilan Sampel Penyakit Veteriner Wilayah Provinsi 146. SOP Pelaksanaan Pencatatan dan Pemetaan Terhadap Hasil Pengujian Penyakit Veteriner 147. SOP Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Terhadap Penyakit Veteriner Provinsi 148. SOP Sertifikasi Hasil Pengujian Penyakit Veteriner Wilayah Provinsi 149. SOP Retribusi Pelayanan Pengujian 150. SOP Pengelolaan Surat Masuk 151. SOP Pengelolaan Surat Keluar 152. SOP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 153. SOP Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 154. SOP Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 155. SOP Penyediaan Spanduk 156. SOP Pencetakan Laporan 157. SOP Penyediaan Foto Copy 158. SOP Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 159. SOP Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan 160. SOP Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 161. SOP Penyediaan Banten 162. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						163. SOP Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas 164. SOP Pemerliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 165. SOP Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 166. SOP Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 3 (tiga)-. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -3 (tiga)	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 22 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 24	91,66 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada,7 orang sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Penyuluh pertanian madya 1 org 2. Pengawas bibit ternak pertama 1 org 3. Pengawas mutu hasil Pertanian madya 1 org. 4. Medik Veteriner (MV) muda 1 org; MV pertama 2 org. 5. Pengawas mutu pakan muda 0 org. 6. Arsip paris 1 org. 7. Pranata Humas 0 org.	Ada 7 orang	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 79. personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 10.543 personil	0,75 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 22 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 22 org.	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak -22 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 24 jbt.	91,66 %	
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1.Renstra SKPD tahun 2018 2. Renja SKPD tahun 2019 3. RKA SKPD tahun 2019	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6	100 %	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD,	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					SKPD x 100%	sebanyak 6 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi SKPD, sebesar Rp, 11.090.804.816,48,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.523.496.713.,-	96,25 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.543.802.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp 22.099.566.399,-	6,98 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 171.100.065,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 9.491.642.816,-	1,80 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 171.100.065,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 22.099.566.399,-	0,77 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 10 jenis, sbb: 1. Lap. BKU 2. Lap.Penutupan Kas 3. Lap. Administratif 4.Lap. Fungsional 5.Buku Pajak 6.Buku Panjar 7. LPJ UP 8. Buku Pembantu Simpanan Bank 9. Buku Kas Umum 10.Buku Pembantu Kas Tunai	Ada sebanyak 10 jenis :	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1.Daftar Barang. 2.Daftar Asset SKPD	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, senilai Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, senilai Rp. 34.219.334.298,-	0 %	1. Aset tanah Rp. 4.349.156.250,- 2. Aset Peralatan dan Mesin Rp. 17.665.171.783,- 3. Aset Gedung dan Bangunan Rp. 11.059.458.565,- 4. Aset Jalan Irigari dan Jaringan Rp. 441.157.600 5. Aset tetap Lainnya Rp. 481.218.600,- 6. Aset Lainnya Rp 223.171.500,-
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 21. Papan Pengumuman 22. Pos Pengaduan 23. Leaflet 24. Mobil keliling 25. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Laboratorium Kesehatan Hewan 2. Buku Panduan 3. Perda 4. Kartu Registrasi 5. Mobil LAB Keliling 6. Pengumuman di media massa	Jumlah sebanyak 6 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Index Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali	Ada SKM = 81,95	

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Kesehatan)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	18 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak------yang terdiri dari: 86. SOP ttg ----- 87. SOP ttg ----- 88. SOP ttg ----- 4. Dst -----	…… Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 101 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 101	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: 1. ---------- J.F Epidemiologi 2. ---------- J.F Perencana 3. ---------- J.F Administrator Kesehatan 4. ---------- J.F Arsiparis Mahir 5. ---------- J.F Pranata Laboratorium Kesehatan 6. ---------- J.F Dokter 7. ---------- J.F.Nutrisionis Muda 8. ---------- J.F Bidan 9. ---------- J.F Apoteker 10. ---------- J.F Asisten Apoteker 11. ---------- J.F Perawat 12. ---------- J.F Perekam Medis 13. ---------- J.F Refraksionis Optisien 14. ---------- J.F Teknisi Elektromedis	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 974. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak --------- Personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.

			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 50 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 101 org.	49,50 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 97 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 101 jbt.	96,03 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 18 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 18 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 18 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 18 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 18 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 18 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6		Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 616.227.809.297,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 7.201.196.359.769	8,56 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 544.553.970.645 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.-----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 424.115.456.118 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 544.553.970.645	77,88 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 120.438.514.527 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 544.553.970.645	22,12 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CaLK	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.-- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	..... %	Pembilang: 19. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 20. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 51. Papan Pengumuman 52. Pos Pengaduan 53. Leaflet 54. Mobil keliling 55. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5.	Jumlah sebanyak ------ jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN PEMERINTAH DAERAH (PENUNJANG)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya Anggaran : 479.479.365.569 Realisasi: 469.737.371.958	5 . Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 89. SOP ttg ----- 90. SOP ttg ----- 91. SOP ttg ----- 4. Dst -----	…… Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan	Ada atau tidak	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1 orang (Fungsional Arsiparis).	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 70 . Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0,62 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	50 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 5 (lima) jenis, yg terdiri dari: 1. 1 Renstra 2. 2 Renja 3. 2 RKA	5 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 163.853.750.000,00 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASP EK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 129.337.069.934,11 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. **120.755.382.867,11** - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. **129.337.069.934,11**	93,37 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. **8.581.687.067,00** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **129.337.069.934,11**	6,64 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1.LRA 4. NERACA 2. LPE 5. CALK 3. LO	Ada 5 Jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Ada BUKU INVENTARIS BARANG (BMD) BARANG MILIK DAERAH	**Ada**	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.— (TIDAK ADA) - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar **Rp.67.798.242.022,11**	..... %	Pembilang: 21. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 22. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 56. Papan Pengumuman 57. Pos Pengaduan 58. Leaflet 59. Mobil keliling 60. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak **NIHIL** jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang **nihil**	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA SKPD : SATPOL PP PROV. BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [6] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Tidak ada	- %
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada	Permendagri RI. No.54 Tahun 2011 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja .
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Pergub No. 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajaprovinsi Bali	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), PP.Nomor 16 thn 2018 Tentang SatpolPP. Permendagri. No.38 Th. 2010 ttg Pedoman Diklat Dasar Pol.PP. Permendagri. No.37 Th. 2008 ttg Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemda, Permendagri No. 54 ttg. SOP Satpol.PP. Permedagri 69 . Tahun 2012 ttg Perubahan atas Permendagri No.62 Th. 2008 ttg SPM bidang Pemeneritahan Dalam Negeri, Pergub Nomor : 27 tahun 2018 Tentang SOP Satpol PP. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

.

							Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 21 jbt - Jabatan yang harus ada, sebanyak 21 jbt	21/ 21X 100% = 100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	- Jabatan Fungsional Arsiparis - Jabatan Fungsional Pol PP	Ada
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak 119 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.572 personil	119 / 11.572 x 100% = 1.02%
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	15 / 21 x 100% = 71%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.	21 / 21 x 100% = 100%
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: • RENSTRA SKPD • RENJA SKPD • DPA • LRA. • LKjIP	5 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	5/5 x 100% = 100% 5/6 *100= 83%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak **5** program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.	5/5 x 100% = 100% = 100%

		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.	5/5*100 = 100%
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 40.295.297.716,89,- - Total Belanja APBD,sebesar Rp. 6.834.255.626.694,00,-	(40.295.297.716,89 / 6.834.255.626.694,00) X 100% = 0.58%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 457.000.000,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 40.295.297.716,89,-	(457.000.000,00/ 40.295.297.716,89) X 100% = 1,13%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 707.300.544,- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.580.034.576,-	(707.300.544 / 22.580.034.576) X 100% =3,13 %
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 707.300.544,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 40.295.297.716,89,-	(707.300.544 / 40.295.297.716,89) =1.75 %
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 2 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca	Ada sebanyak 2 jenis
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Daftar barang atau asset SKPD yang aktif	Kartu Inventaris Barang (KIB)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.12.942.968.768	Tidak Ada
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 26. Papan Pengumuman 27. Pos Pengaduan 28. Leaflet 29. Mobil keliling 30. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya Papan Pengumuman Pos Jaga **Kendaraan Roda 4** Mobil Operasional dan Mobil keliling (Mobil Patroli) **Kendaraan Roda 2**	Jumlah Papan 1 buah Jumlah Pos Jaga 1 unit **Jumlah Mobil sebanyak 21 unit** Ford Ranger : 2 Unit, Kijang Inova-G :1 Unit, Toyota Avansa : 7 Unit, Daiatsu Zenia : 2 Unit, Toyota Kijang Krista : 1 Unit , Toyota Elf Mikrobus : 1 Unit, Toyota Hiluk : 3 Unit, Kijang Super : 1 Unit. Toyota Hilux Double Kabin : 3

							Unit **Kendaraan Roda 2 : 16 Unit** Honda Supra X 125 : 3 Unit, Honda/GL : 2 Unit, Honda/NF : 1 Unit, Suzuki/GS : 2 unit, Kawasaki KLX: 6 Unit, Kawasaki Trail : 2 Unit.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang	ada

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: **PEMERITAHAN DAERAH**

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya	4 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 64 SOP (Terlampir)	64 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada	12 Raperda	Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,---------.	Tidak Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 33. Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.310 personil	0,29%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, Sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	76,92%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, Sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat 26 Daerah, sebanyak program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat 26 Daerah, sebanyak program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat 26 Daerah, sebanyak program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 26 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.918.089.277 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp. 6.498.850.974.403	0.24 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.676.850.999 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.6.645.312.989.850 ,63	0,21 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.460.863.442 - Total Realisasi Belanja perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.676.850.999	47,24%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.215.987.557 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.676.850.999	52,76%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.Laporan penutupan kas bulanan 2. Laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu 3. Buku kas umum	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Buku Inventaris barang milik daerah	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.-- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. -----	Tidak Ada	Pembilang: 23. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 24. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/Dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 61. Papan Pengumuman 62. Pos Pengaduan 63. Leaflet 64. Mobil keliling 65. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Website : jdih.baliprov.go.id	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	- Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional dan Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah	%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sejumlah 16 SOP. Yang terdiri dari:	16 SOP Pada Biro Perekonomian Setda Prov. Bali	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
						1. SOP ttg Penyediaan Makanan dan minuman. B.Ek/082/2019 2. SOP ttg Rapat Rapat Koordinasi. B.Ek/081/2019 3. SOP ttg Sekretaris. B.Ek/182/2019 4. SOP ttg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas. B.Ek/083/2019 5. SOP Penatausahaan barang milik daerah . B.Ek/109/2019		

						6. SOP Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. B.Ek/085/2019 7. SOP Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. B.Ek/133/2019 8. SOP Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. B.Ek/134/2019 9. SOP Penyediaan alat tulis kantor. B.Ek/187/2019 10. SOP Belanja tidak langsung SKPD (Gaji) . B.Ek/136/2019 11. SOP Penilaian kinerja staff dengan SKP. B.Ek/177/2019 12. SOP Penyusunan rencana kerja anggaran RKA . B.Ek/179/2019 13. SOP Pengelolaan surat keluarB.Ek/178/2019 14. SOP Pengelolaan surat masukB.Ek/180/2019 15. SOP Absensi sidik jari. B.Ek/181/2019 16. SOP Penyusunan rencana kerja dan anggaran/RKA sub bagian energi sumber daya mineral. B.Ek/036/2019		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	PERDA yang dilaksanakan pada Biro Perekonomian adalah no 10 Tahun 2016 ttg Organisasi perangkat daerah , PERDA No 2 Tahun 2017 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018	100%	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	13 Orang Pemegang Jabatan Eselon, terdiri dari : 1 Kepala Biro, 3 Kepala Bagian dan 9 Kepala Sub. Bagian	46,4%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	1 Orang	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019

4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	38 Orang Berbanding 11.324 PNS Provinsi	0,229600848	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	13 Orang Pemegang Jabatan Eselon, terdiri dari : 1 Kepala Biro, 3 Kepala Bagian dan 9 Kepala Sub. Bagian	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Jumlah Pejabat Eselon yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali Sebanyak 13 Orang, semuanya telah memenuhi syarat Kepangkatan dan Sertifikasi Diklat PIM IV, PIM II	100%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah -RKA - Perangkat Daerah	Ada	Biro Perekonomian memiliki Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA	Jenis Dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program	4 Program	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

				Daerah	dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%			
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	4 Program	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	4 Program	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	1.444.417.508 / 6.634.000.000.000	1,50%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Nihil	0%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	1.414.467.508 / 273.200.000		Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	1.414.467.508 / 1.444.417.508		Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

				Perangkat Daerah				
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	8 Berbanding 210 Buah	3,80%	Pembilang: 1. Sumber Data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset Layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yang tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitasi / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman Media massa	Jumlah fasilitas / prasaran partisipasi	Nihil	Tidak Ada	Sebutkan jenis fasilitas / prasarana informasi yang ada (difoto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nihil	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : *BALI*
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO KESRA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (***SEKRETARIAT DAERAH***)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional , sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak ----- program	..... %	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.

		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak **18** yang terdiri dari: **1. SOP ttg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor** **2. SOP ttg Penyediaan Alat Tulis Kantor** **3. SOP ttg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** **4. SOP ttg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** **5. SOP ttg Penyediaan Makanan dan Minuman** **6. SOP ttg Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah** **7. SOP ttg Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** **8. SOP ttg Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas** **9. SOP ttg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor** **10. SOP ttg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor** **11. SOP ttg Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur** **12. SOP ttg Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja** **13. SOP ttg Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pasraman** **14. SOP ttg Pemilihan Bintang Radio**	Ada **18** SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						15. SOP ttg Kegiatan Suara Gita Praja Pemerintah Provinsi Bali **16. SOP ttg Gita Bahana Nusantara** **17. SOP ttg Pemberian Penghargaan Widya Kusuma Bidang Pendidikan** **18. SOP ttg Pemberian Tunjangan dan Santunan bagi Veteran pejuang kemerdekaan RI, janda dan/ dudanya di Provinsi Bali**		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak ----- - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak – **13**- - Jabatan yang harus ada, sebanyak --**13**--	**100.%**	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---**tidak ada**---	~~Ada~~/tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak --**50** -- personil - Total PNS Provinsi, sebanyak –-- ..... personil		Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak –**0**-- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- **13**--org.	**%**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak –13- - org. - Jabatan yang ada, sebanyak ---- ---**13**--- jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak …**3**…jenis, yg terdiri dari: **1. Renstra** **2. Renja** **3. RKA/DPA**	…**3**…jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak ---- ..**4**.. program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak …**4**..-	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak - **4**- - program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak –**4**- -- program.	**100 %**	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak -- **4**- program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak –**4**- - program.	**100 %**	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **26.379.980.713,-** - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp…	**%**	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. –**0**-- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.— **22.349.359.390,-**	**--0-- %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 446.495.520,- - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.329.980.713,-**	**0.0169 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **446.495.520,-** - Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **22.349.359.390,-**	**0.0199 %**	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak -**0**-- jenis, sbb: 1…….. 2…… 3……	Tidak Ada/ ~~Ada~~ sebanyak ---- 0 --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. **Buku inventaris barang**	Ada/ ~~tidak ada~~	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp . **126.596.000-** - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. **18.804.581.195,40-**	**%**	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 4. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	Jumlah sebanyak --**0**-- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	~~Ada~~/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN: I.2 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA PERANGKAT DAERAH : BIRO UMUM SETDA PROVINSI BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional, sebanyak - program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak - program	%	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Terdapat 36 SOP yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengelolaan Dan Penyimpanan Arsip 2. SOP tentang Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Di Lingkungan Setda Provinsi Bali 3. SOP tentang Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 4. SOP tentang Pelayanan Pengajuan Hibah dan	Terdapat 36 SOP pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

						Bantuan Sosial 5. SOP tentang Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. SOP tentang Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah Di Lingkungan Setda Provinsi Bali 7. SOP tentang Usulan Pegawai 8. SOP tentang Pembuat Usulan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Inpassing Dan Cuti Pegawai 9. SOP tentang Belanja Honorarium Biro – Biro		
	ASPEK	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS**	**JENIS DATA**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						10. SOP tentang Belanja TPP Biro- Biro 11. SOP tentang Belanja Uang Makan Biro - Biro 12. SOP tentang Belanja Gaji Biro - Biro 13. SOP tentang SK Pengelola Keuangan 14. SOP tentang Alat Tulis Kantor Dan Barang Cetakan Di Lingkungan Setda Provinsi Bali 15. SOP tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)		

						16. SOP tentang Penyusunan RKBMD 17.SOP tentang Peningkatan Dan Pengembangan Tenaga Pengelola Keuangan 18.SOP tentang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 19.SOP tentang Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 20.SOP tentang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 21.SOP tentang Monitoring Dan Pengamanan Aset Seketariat Daerah Provinsi Bali 22.SOP tentang Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 23.SOP tentang Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor 24.SOP tentang Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25.SOP tentang		

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		
	ASPEK	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS**	**JENIS DATA**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						26. SOP tentang Penataan Dokumen Keuangan Di Lingkungan Setda Provinsi Bali 27. SOP tentang Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 28. SOP tentang Peminjaman Tempat Pertemuan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 29. SOP tentang Upacara Keagamaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 30. SOP tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 31. SOP tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah 32. SOP tentang Penyediaan Makanan, Minuman Dan Akomodasi Tamu		

						Pemprov Bali 33. SOP tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 34. SOP tentang Pengajuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 35. SOP tentang Pembayaran Pajak Kendaraan 36. SOP tentang Pengajuan Servis Kendaraan		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	Peraturan Daerah yang dilaksanakan pada Biro Umum adalah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023	100%	Normalisasi
	ASPEK	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS**	**JENIS DATA**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

						- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.		
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan fungsional sebanyak : 1 orang	Ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS PerangkatDaerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 78 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11310 personil	0,68%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak : 9 pejabat	69,2%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.

				kepemimpinan	kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%			
	ASPEK	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS**	**JENIS DATA**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhipersyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 pejabat. - Jabatan yang ada, 13 jabatan.	23,07%	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA - Perangkat Daerah - RENJA- Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada	Apabila Ada Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: 1. RPJMD 2. Renstra 3. Renja 4. RKA 5. DPA 6. DPPA	6 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah	100%	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

					yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100%	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100%	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
	ASPEK	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS**	**JENIS DATA**	**CAPAIAN KINERJA**	**KETERANGAN**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 75.191.095.689,00** - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar **Rp. 7.201.190.333.569,47**	1,04%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Total anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 11.699.614.858,00** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 66.020.375.429,00**	17,72%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari	total belanja pemeliharaan dari	- Realisasi belanja pemeliharaan	8,65%	

				total belanja barang dan jasa	total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 3.529.942.929,00** - Total Realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 40.787.406.540,00**		Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x100%	- Realisasi belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 3.529.942.929,00** - Total Realisai belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 66.020.375.429,00**	5,34%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Laporan keuangan sebagai berikut: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ada	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Jenis dokumennya : Laporan Mutasi Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Provinsi Bali	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar **Rp. 342.500.000,00** - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 149.082.961.201,00**	0,22%	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari BPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi
	ASPEK	**FOKUS**	**NO**	**IKK**	**RUMUS**	**JENIS DATA**	**CAPAIAN**	**KETERANGAN**

							KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas/ prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya Tidak ada	Jumlah sebanyak -jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
NAMA SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. BALI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PEMERINTAHAN UMUM

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Urusan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak **0** program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	**Tidak ada**	Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 21 yang terdiri dari: 1. SOP LPSE Provinsi Bali	**Ada**	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedurer Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak ----- - PERDA yang sehatusnya, sebanyak -----	**Tidak Ada**	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak **13** - Jabatan yang harus ada, sebanyak **13**	**13/13 x 100.% = 100%**	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, **arsiparis Penyelia.**	**Ada** jabatan fungsional **arsiparis Penyelia.**	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah`. Mengacu kondisi Perangkat Daerah

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Urusan	Capaian Kinerja	Keterangan
								terakhir/updated Tahun 2019.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak **28** Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak **11.572** personil	**28/11.572 x 100.%** **= 0,24%**	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak **12** org. - Pejabat yang ada, sebanyak **12**-org.	**12/12 x 100%** **= 100. %**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak **12**- org. - Jabatan yang ada, sebanyak **12** jbt.	**12/12 x 100%** **= 100. %**	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis yaitu RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, DPA Perangkat Daerah dan RKA Perangakat Daerah	**4 jenis dokumen yaitu : 1. RENSTRA Perangkat Daerah** **2. RENJA Perangkat Daerah** **3. DPA Perangkat Daerah** **4. RKA Perangkat Daerah**	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD, sebanyak **4** program. - Program Renja PD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak **4**	**4/4x 100. %** **= 100%**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PD, sebanyak **4**- program. - Program dalam RKA PD, sebanyak **4**- program.	**4/4x 100. %** **= 100%**	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Urusan	Capaian Kinerja	Keterangan
								Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA PD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak **4** program. - Program dalam DPA PD, sebanyak **4** program.	**4/4 x 100. %** **= 100%**	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran PD, sebesar Rp, 1.695.558.812 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.614339.989	**(**1.614339.989**/** 1.695.558.812**) x 100%** **= 95,21 %**	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran perubahan)
		Besaran belanja modal	14	Realisasi Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal PD, sebesar Rp. **42.353.780** - Total Belanja PD, sebesar Rp..**7.322.748.932**	**(42.353.780 / 7.322.748.932) x 100%** **= 0,58%**	Sumber data dari realisasi APBD P tahun 2019
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp. **355.270.000** - Total belanja barang dan jasa PD, sebesar Rp.**1.407.114.080**	**(355.270.000/ 1.407.114.080) x 100%** **= 25,24 %**	Sumber data dari realisasi APBD P tahun 2019 terakhir.
			16	Total Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	Total Realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan PD, sebesar Rp. **249.211.259** - **Total belanja SKPD, sebesar .- Rp. 7.322.748.932**	**(249.211.259/ 7.322.748.932) x 100%** **= 3.40 %**	Sumber data dari realisasi APBD P tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	ada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu	**ada**	Sumber data dari Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1.Buku Inventaris 2.Kartu Inventaris Ruangan 3.Buku Barang Persediaan 4. Dokumen Aset Daerah	**ada**	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai PD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp.0	**tidak ada**	Sumber data dari BPKAD , dokumennya

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Urusan	Capaian Kinerja	Keterangan
								(Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 31. Papan Pengumuman 32. Pos Pengaduan 33. Leaflet 34. Mobil keliling 35. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5.	**Tidak ada**	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	**tidak ada**	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

-

hLAMPIRAN: I.3 FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN		CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
	URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI …… X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	1201 / 1295 X 100%	92,74 %	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali /Dinas Dukcapil & KB
		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS ……X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	541 / 680 X 100%	79,56%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali /Dinas Dukcapil & KB
		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA …… X 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	467 / 1169 X 100%	39,95 %	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali /Dinas Dukcapil & KB
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C ---------- x 100 % Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 - 18 tahun	145.880 / 199.250 X 100%	73,21%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali
		5	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya	60.278 / 60.296 X 100%	99,97%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali

		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA ---------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada ta hun ajaran	1049 / 186.815 X 100%	0.56%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali
		7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMA/SMK/MA ---------- x 100 % Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya	66.136 / 68.330 X 100%	96,79%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali
		8	Pembinaan Guru Jenjang SD/MI	Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi kompetensi ---------- x 100 % Jumlah Guru pada jenjang SD/MI	12.185 / 25.245 X 100%	48,27%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali
		9	Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTS	Jumlah Guru jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi kompetensi ---------- x 100 % Jumlah Guru pada jenjang SMP/MTs	5.798 / 12.264 X 100%	47,28%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali
		10	Pembinaan Guru Jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi kompetensi ---------- x 100 % Jumlah Guru pada jenjang SMA/SMK/MA	7.652 / 11.468 X 100%	66,72%	Sumber data Dinas Pendidikan Provinsi Bali
		11	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peta penjaminan mutu pendidikan	-	Ada	Sumber data Dinas Pendidikan dan LPMP Bali

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	Kesehatan	14	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi --- Jumlah Penduduk Provinsi	648 ——— = 0,015 4.336.900	Dinas Kesehatan atau RSUD Provinsi
		15	Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi minimal Tingkat Utama --- Jumlah RS Provinsi	3 — x 100 % = 100% 3	Dinas Kesehatan atau RSUD Provinsi
		16	Persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensibencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun --- Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	174.841 ——— x 100 % = 100% 174.841	Dinas Kesehatan atau RSUD Provinsi
		17	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar --- Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	46.159 ———x 100 % = 100% 46.159	Dinas Kesehatan atau RSUDProvinsi
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Provinsi	Jumlah Tenaga Kesehatan --- Jumlah Penduduk Provinsi	2.181 ———x 100 % = 0,05 % 4.336.900	Dinas Kesehatan atau RSUDProvinsi

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		19	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	757,7 / 9 = 84,19	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		20	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	775,2 / 9 = 86,13	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		21	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	900 / 9 = 100	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22a	Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapatkan Perawatan Kesehatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	900 / 9 = 100	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22b	Cakupan Balita *Stunting* yg mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	900 / 9 = 100	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		23	Cakupan ~~penemuan dan~~ **penanganan** penderita penyakit TBC BTA	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	592,8 / 9 = 65,87	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	138,69 / 9 = 15,41	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		25	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	803,5 / 9 = 89,28	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		26	Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota --- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	775,72 / 9 = 86,19	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	791,6 ———— = 87,96 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		28	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	565,54 ———— = 62,84 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		29	Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	642,47 ———— = 71,39 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		30	Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanankesehatan sesuaistandar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	376,25 ———— = 41,81 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		31	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	818,9 ———— = 90,99 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		32	Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	481,68 ———— = 53,52 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		33	Cakupan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	548,8 ———— = 60,98 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	854,809 ———— = 94,98 9	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

No	Urusan	No	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik ---------- x 100% Panjang seluruh jalan provinsi	$= \frac{614,39}{743,34} x\ 100\% = 82,65\%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		36	Presentase Panjang Jalan Provinsi yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan provinsi yang di rehabilitasi/direkonstruksi ---------- x 100% Panjang jalan provinsi yang seharusnya di rehabilitasi/direkonstruksi	$= \frac{16,20}{65,40} x\ 100\% = 24,77\%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		37	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha) ---------- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)	= 16%	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang **BWS**
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi (ha) ---------- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (ha)	$= \frac{108,31}{215,82} x\ 100\% = 50,18\%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		39	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ---------- x 100% luas daerah irigasi kewenangan provinsi	$= \frac{6859,66}{9271} x\ 100\% = 73,99\%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		40	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota ---------- x 100% Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.	$= \frac{9.446.682}{18.921} x\ 100\ \%$ $= 49,93\ \%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang **CK**

		41	Ketersediaan Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada atau tidaknya Sistem Pengolah Air Limbah Domestik (SPALD)	Ada	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		42	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional ---------- x 100% Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional	$= \frac{9.031.419,62}{18.360.000} = 49,19\ \%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		43	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli ---------- x 100% jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	$= \frac{2110}{12.780} = 16,51\ \%$	Sumber data dari Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang
		44	Rumah tangga bersanitasi	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- x 100% Jumlah seluruh kabupaten dan kota	$= \frac{842,14}{9} = 93,46\ \%$	Sumber data dari agresi Kabupaten dan Kota
		45	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- x 100% Jumlah seluruh kabupaten dan kota	$= \frac{823,77}{9} = 91,53\ \%$	Sumber data dari agresi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	46	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Tidak ada	Permen PU PR Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat psl 10 **(Anggaran Kegiatan Belum Dianggarkan pada Tahun 2019)**
		47	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Tidak ada	Permen PU PR Nomor 29 Tahun 2018 tentang SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat psl 10 **(Anggaran Kegiatan Belum Dianggarkan pada Tahun 2019)**
		48	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani pada tahun 2019 seluas 1 Ha 1/49,74 Ha x 100 % Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	0.02 %	Permen PU PR nomor 2 tahun 2016 tentang Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
		49	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU 16.32 x 100 % Jumlah satuan perumahan	16.32 %	UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		50	Rumah Layak Huni	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 7.169 ---------- x 100 % 38.855 Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	18,45%	Jumlah Capaian Kinerja Kab/Kota = 7.169 Jumlah seluruh RTLH Kab/Kota = 38.855
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	51	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	0% (tidak ada)	Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang SPM Trantibum Linmas

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		52	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	13/15*100% = 86.6 %	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan = 13 Jumlah keseluruhan Perda/Perkada = 15
		53	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun 48 x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	100 %	8 dokumen kebencanaan, 40 peta dan 10 peta potensi dan rawan provinsi bali
		54	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana 9 Kabupaten/Kota x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah Provinsi	100 %	BPBD
		55	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana 0 x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	0 %	Karena belum ada bencana yang statusnya tanggap darurat, Status Tanggap Darurat bencana ditetapkan oleh Kepala Daerah
		56	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ---------- x 100 % Jumlah Personil Satpol PP	12/119*100% =10.08%	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS = 12 orang Jumlah Satpol PP = 119 orang

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	Sosial	57	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 120 x 100 % 36.200 Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	0,58 %	Dinas Sosial
		58	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 215 x 100 % 11.337 Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	1,93 %	Dinas Sosial
		59	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 230 x 100 % 34.743 Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	0,66 %	Dinas Sosial

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		60	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	0 %	Dinas Sosial (Belum ada Panti Gepeng di Bali)
		61	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	100%	Dinas Sosial
		62	Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	1 Orang	Dinas Sosial
		63	Tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	Tenaga Kerja	64	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja 9 / 9 x 100% Jumlah Kabupaten/Kota	100%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		65	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 150.623 / 2.428.679 x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	6,20%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		66	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 162.783.940,20 / 2.428.679 x 100% Jumlah tenaga kerja	67,02%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		67	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 993 / 11.700 x 100% Jumlah Perusahaan	8,48%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		68	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan 3.024 / 7.138 x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	42,36%	Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Naker

		69	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n 1.630 / 8.801 x 100% Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor	18,52%	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja psl 50, psl 67 – 101,
		70	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 17 / 24 x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	70,83%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		71	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi / x 100% Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	1 LPTKS (PT. Prismas Jamintra, Nomer Induk Berusaha : 9120401942845, Kode KBLI : 78101)	Permenaker Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan LPK
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD (4.163.874.230 / 2.240.373.168.887) × 100% Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi	0.186%	Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender
		73	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlahanak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi (217 / 2.152.800) × 100.000 Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	10,08%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		74	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan (111: 1.346.400)× 10.000 Jumlah penduduk perempuan	0,82%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		75	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota (56,48+68,13+64,09+69,94+72,16+80,52+77,49+61,07+69,94) ---------- x 100% Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota (9)	65,86%	Dinas Pem-berdayaan Perempuan dan PA.
9	Pangan	76	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan provinsi ---------- x 100% Jumlah kebutuhan pangan provinsi 571.041 X 100% 424.324	134.57%	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan psl 27
		77	Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
10	Pertanahan	78	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ---------- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	.....%	Permen Agraria TR BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi psl 9
		79	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ---------- x 100% Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	.....%	UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

		80	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	Luas pemanfaatan yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi lintas kab/ kota ---------- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	.....%	Dinas Pertanahan
		81	Luas lahan bersertifikat	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
11	Lingkungan Hidup	82	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	63,62	63,62	Sumber data dari agregasi Elemen Data Kabupaten dan Kota
		83	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ---------- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	153,33% $\frac{46}{30} x\ 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
		84	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi ---------- x 100% Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	0% $\frac{0}{46} x\ 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
		85	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	93,94% $\frac{93\ TPST\ 3R}{9\ kab/kota} x\ 100\%$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		86	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ---------- Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	611,11% $\frac{55}{9} x\ 100\%$	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	87	Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman	Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman ---------- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el 3.109.709 ——————— X 100% = 97,69% 3.183.227	97,69%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		88	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 - 18 tahun	Jumlah anak (0-18 tahun) yang sudah memiliki akta kelahiran ---------- x 100% Jumlah anak 0-18 tahun 1.088.159 ——————— X 100% = 90,12% 1.207.372	90,12%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	89	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 0 x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	0 %	Sumber data dari IDM Tahun 2019
		90	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun 19 ------ x 100% = 6,07% 313 Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	6,07%	Sumber data dari IDM Tahun 2019
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = 5 $\sum_{ii}^{7}$ = 1 ASFR *i*	2,1 %	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		92	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFRi = $\frac{b_i}{P_{if}}$ = 1 ASFR i	40 %	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		93	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ---------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur $\frac{554.479}{675.115}$ X 100 = 82,13%	82.13%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		94	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur $\frac{36.492}{675.115}$ X 100 = 5,41%	5.41%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
15	Perhubungan	95	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektvitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) ○ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) ○ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhanlintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis	0,97	

				dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) 92/96 x 70%) (5/5 x 30%) = (0,67) + (0,3)		

		96	Kinerja lalu lintas provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi 27,19/59	0,46 (Kategori C)	
16	Komunikasi dan Informatika	97	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 49 ------- x 100% 49 Jumlah OPD	100%	
		98	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2 layanan ---------- x 100% 2 layanan Jumlah Layanan Publik	100%	
		99	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi 4.247.341 orang ---------- x 100% 4.247.341 orang Jumlah penduduk	100%	
		100	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	tidak	Belum tersedia peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government
		101	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi Tidak ada ---------- x 100% Tidak ada Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	0%	

17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset 3.401 ---------- x 100% = 84,92% 4.005 Jumlah seluruh koperasi	84,92.%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		103	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha 915 ---------- x 100% = 5,49% 16.658 Jumlah usaha kecil keseluruhan	5,49 %	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		104	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 411 ---------- x 100% = 2,47% 16.658 Jumlah usaha kecil keseluruhan	2,47%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		105	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi 1.470 ---------- x 100% = 36,7 % 4.005 Jumlah Koperasi seharusnya mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dalam 1 Provinsi	36,7%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		106	Koperasi aktif	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 4.005 x 100 % = 79,67 % 5.027 Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota	79,67%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
18	Penanaman Modal	107	Posentase Peningkatan Investasi (PMDN) di Provinsi	5.296.461.123.492 - 7.393.200.000.000 x 100 % 7.393.200.000.000 Ralisasi PMDN Tahun 2018 dikurang Realisasi PMDN Tahun 2019 dibagi Realisasi PMDN Tahun 2019 dan dikali seratus persen.	5,29%	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

			Prosentase Peningkatan Investasi (PMA) di Provinsi	6.336.016.407.280 – 6.390.000.000.000 x 100 % 6.390.000.000.000 Ralisasi PMA Tahun 2018 dikurang Realisasi PMA Tahun 2019 dibagi Realisasi PMA Tahun 2019 dan dikali seratus persen.	6,33%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	108	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi 40 ---------- x 100% 150.000 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	0,26%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		109	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi social kemasyarakatan di provinsi 89.145 ---------- x 100% 150.000 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	59%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		110	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	98 medali	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		111	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan 400 ---------- x 100% 2000 Jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	20%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20	Statistik	112	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 49 OPD ---------- x 100% 49 OPD jumlah OPD	100%	
		113	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 49 OPD ---------- x 100% 49 OPD jumlah OPD	100%	
21	Persandian	114	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian	0%	belum ada peniaian dari BSSN
22	Kebudayaan	115	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan …… x 100% Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan = (2820 / 33) x 100% = 8.545 % Keterangan : Cagar Budaya di Bali adalah Living Monumen sehingga semua Cagar Budaya dilestarikan	8.545 %	Dinas Kebudayaan
		116	Penyelenggaraan festifal seni & budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	4	Dinas Kebudayaan
23	Perpustakaan	117	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah Pengunjung	41.358	UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan psl 8 dan psl 48

		118	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	38,83	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		119	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah *10.276* ---------- X 100 % *227.150* Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	5 %	UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan psl 8
24	Kearsipan	120	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	 100 % 80 % 75 % 0 %	UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
		121	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	 90 % 100 % 60 % 50 % 30 % 0 % 0 %	UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
		122	Pengelolaan Arsip secara baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku 5 ---------- X 100 % 47 Jumlah Perangkat Daerah	11 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25	Kelautan Perikanan	123	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP) Tangkap : 109.335,22 Ton Budidaya : 18.534,44 Ton	*Jumlah 127.869,66 Ton	Dinas Kelautan Perikanan
		124	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$= \frac{\sum_{i=1}^{n} (\frac{c_i}{s_i} \cdot 100\%)}{n}$ Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i: jumlah pelaku usaha KP yang patuh 75 s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa 75 i: jenis komponen pelaku usaha KP 3 n: jumlah komponen pelaku usaha KP 92	123 %	Sumber data dari Dinas Kelautan & Perikanan
		125	Exspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (ton pertahun) 26.951,80 Ton = 26.951.800 Kg ---------- X 100 % Target daerah (dalam IKU Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali Tahun 2019 tidak ada target eksport)	100 %	Sumber data dari Dinas Kelautan & Perikanan
		126	Konsumsi ikan	Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota (31,77) ---------- x 100% Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota (33,52)	95%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
26	Pariwisata	127	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) **(6.291.141 – 6.070.473)** ---------- X 100 % **6.070.473**	3,64 %	**Dinas Pariwisata Provinsi Bali**
		128	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) **(10.545.039 –9.757.991)** ---------- X 100 % **9.757.991**	8,07 %	**Dinas Pariwisata Provinsi Bali**

		129	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual **20.037** ---------- X 100 % **33.636**	59,57 %	**Dinas Pariwisata Provinsi Bali**
		130	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp. 148.402.500.000.000 ---------- X 100 % Rp. 252.600.000.000.000	58,75 %	Data dari BPS Provinsi Bali
27	Pertanian	131	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x 100% Luas panen 1. Padi = 836.081/1/12 X 100% 141.866 2. Jagung = 54.920/1/12 X 100% 16.616 3. Kedelai = 1.896/1/12 X 100% 1.421	49,24% (padi) 27,54% (jagung) 11,11% (kedelai)	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		132	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ---------- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 1. Rabies = 230 -140 X 100% 149 2. Flu burung = 2 -1 X 100% 1	54,36% (rabies) 100,00% (flu burung)	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		133	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2019	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian ---------- X 100 % Jumlah total PDRB	13,60%	Sumber data dari Buku PDRB sektor pertanian (harga berlaku)

28	Kehutanan	134	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal 43 KTH. ---------- x 100% Jumlah Total Usulan KTH yang terintegrasi 488 KTH.	8,81 %	Dinas Kehutanan
		135	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	Realisasi pencegahan kerusakan hutan seluas 693,42 ha (4,11 %) ---------- x 100% Target pencegahan kerusakan hutan seluas 831,98 ha (4,93 %)	83,37 %	Dinas Kehutanan
		136	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Realisasi rehabilitasi lahan kritis 1 tahun seluas 3.150,00 ha (11,14 %) ---------- x 100% Target rehabilitasi lahan kritis 1 tahun seluas 150,00 ha (4,99 %)	223,24%	Dinas Kehutanan
29	Energi Sumber Daya Mineral	137	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda 83 / 105 x 100% Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	79%	
		138	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik 636 / 636 x 100% Jumlah desa	100%	Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan
		139	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2019	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan 1.623.635.56 / 187.547.695 X 100 % Jumlahtotal PDRB	0,86%	

		140	PERDA/PERGUB terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi		Ada	PERGUB NO. 5 Tahun 2016 Tentang Perizinan Air Tanah
30	Perdagangan	141	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya 839.550.122,90 - 679.594.478.,52 ----------x 100% 679.594.478.,52 Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	23,54 %	
		142	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSKsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan 8 ---------- x 100% 8 Jumah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan	100 %	UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
		143	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan 85 ---------- x 100% 85 Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun	100 %	Kepmendag Nomor 164 tahun 1996 tentang Pengawasan Mutu thdp Produk ekspor Tertentu
		144	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB 1 ---------- x 100% 1 Jumlah pelaku usaha MB TBB	100 %	
		145	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi 58.170,36 ---------- x 100% 72.661,47 RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)	80,06%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

		146	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 10 ---------- x 100% 10 Jumlah barang beredar yang diawasi	100 %	Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang/Jasa beredar
		147	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{510,4}{23.204} 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember	2,8 %	
		148	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan 19.802.333,83 (juta rupiah) ---------- X 100 % 234.430.724,43 (juta rupiah) Jumlahtotal PDRB	8,45 %	Sumber data dari Buku PDRB sektor perdagangan
31	Perindustrian	149	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	62 - 57 ---------- x 100% 57	8,77 %	Dinas Perindustrian
		150	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	57 ----------x 100% 57	100 %	Dinas Perindustrian
		151	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	RPIP belum selesai masih menunggu RTRW yang belum disahkan		Dinas Perindustrian

		152	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Dinas Perindustrian
		153	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0%	Dinas Perindustrian
		154	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/ energy - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi	- - Rp.9.271.813.267.000 Rp.4.151.346.693.000 - 104.417 orang Rp. 4.066.398.819.000	Dinas Perindustrian
		155	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2018	14.238.294,03 (juta rupiah) ---------- X 100 % 234430724,43 (juta rupiah)	6,07.%	Sumber data dari Buku PDRB sektor perindustrian
32	Transmigrasi	156	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Poso dan Sulteng	2 Lokasi	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					

		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi (SIPKD, SIKI, SIEP/SIPP, SIKEPO, SIPD)	5 sistem informasi	Sumber data dari Dinas Kominfo/ Perangkat Daerah yg menangani
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	(266/270)x 100% = 98,52%	Sumber data Bappeda
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan 964.178.315.351,56 x 100 % 7.201.196.359.769,47 Disdik : Rp. 838.779.334.898,56 Diskes : Rp. 125.398.980.453,00	13,39 %	Sumber Bagian Keuangan
		4	Rasio PAD	3.762.785.679.903 4.704.727.280.000 X 100% Jumlah PDRB non migas 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan : 34.175.155.960.000 2. Industri Pengolahan : 10.713.726.780.000 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang : 426.615.730.000 4. Kontruksi : 24.323.373.940.000 5. Perdagangan Besar dan Eceran; reparasai mobil dan sepeda motor : 21.628.388.000.000 6. Transportasi dan Pergudangan : 24.568.918.470.000 7. Penyedia Akomodasi Makan dan Minum : 58.747.107.760.000 8. Informasi dan Komunikasi : 13.399.411.560.000 9. Jasa Keuangan dan Asuransi : 10.041.625.650.000 10. Real Estate : 9.694.092.310.000 11. Jasa Perusahaan : 2.629.432.590.000 12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib : 12.391.563.650.000 13. Jasa Pendidikan : 12.984.974.470.000 14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial : 5.485.769.140.000 15. Jasa Lainnya : 4.074.727.280.000	79,97%	Sumber Bagian Keuangan

				TOTAL : 4.704.727.280.000		
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ---------- X 100% jumlah belanja APBD Belanja BTL : 4.960.823.190.882,47 Jumlah Belanja APBD : 7.201.196.359.769,47	68,88 %	Sumber Bagian Keuangan
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (sudah dinilai level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Inspektorat Provinsi
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (sudah dinilai dan level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Inspektorat Provinsi
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n 0 ---------- X 100% 175 jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0%	Sumber data LPSE
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 193 ----------X 100% 20.137 Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	0,96%	Sumber data LPSE

		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan 1.652.886.000.000 ---------- X 100% 2.240.000.000.000 Total belanja langsung	79,79%	Sumber data LPSE
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 516/5710 X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,03 %	Sumber BKD
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 468 ---------- X 100% 468 Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	Sumber BKD
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ---------- X 100% Total belanja APBD dikurangi satu Realisasi : 6.518.215.565.922,61 Total Pagu : 7.201.196.359.769,47	90,52 % dikurang 1 menjadi 89,52 %	Sumber Bagian Keuangan
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya);	ADA	Sumber BPKAD
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ---------- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya Rp. 832.128.756.535,06 X 100% = Rp. 6.595.712.545.306,96	12,61 %	Sumber Bagian Keuangan

		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ---------- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda Total Pagu Belanja Dinas PMPTSP : 15.353.574.150,13 Total Realisasi Belanja Dinas PMPTSP : 13.454.783.534,88	87,63 %	Sumber Bagian Keuangan
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda (43 dokumen) ---------- X 100% (43 dokumen) total jumlah dokumen yang telah dirinci	100%	Sumber Kominfo